Edisi Pemutakhiran

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Kemunculan Penjajahan di Indonesia

Tim Nasional Penulisan
Sejarah Indonesia

Balai Pustaka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Sejarah Nasional Indonesia
IV

Kemunculan Penjajahan di Indonesia
(±1700–1900)

PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan
BALAI PUSTAKA

BP No. 2705

Hak pengarang dilindungi undang-undang

Edisi Pemutakhiran
Cetakan Pertama – 2008
Cetakan Ketujuh – Juli 2019
130719

959.8
Poe
s

Poesponegoro, Marwati Djoened
Sejarah Nasional Indonesia IV / Marwati Djoened Poesponegoro: Nugroho. –cet.7 –Edisi Pemutakhiran. –Jakarta: Balai Pustaka, 2019

xxxiv, 512, hlm.: ilus.; bibl.; indeks 24,5 cm. – (Seri BP no. 2705).

1. Sejarah Indonesia. I. Notosusanto, Nugroho. II. Judul III. Seri

ISBN 979–407–410–1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyelaras Bahasa: Huri Yani
Desain Isi : Olin & Lina
Desain Sampul : Alivia Dian dan Gatot. S
Sumber Foto : Tim Pemutakhiran

Kata Pengantar
Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan *SNI* pada tahun 1975, buku *SNI* ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia.

Keunikan pertama dari *SNI* adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/-wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Keunikan kedua dari buku *SNI* ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat indonesiasentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku *SNI* sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku *SNI* telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku *SNI* sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku *SNI* telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku *SNI*. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku *SNI*, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku *SNI* walaupun memang terlambat. Kepada para penulis buku *SNI*, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku *SNI* ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, *SNI* Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga *SNI* Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Terima kasih.

Balai Pustaka

Kata Pengantar
Edisi ke-4

Sejarah nasional menggambarkan pertumbuhan kita sebagai suatu bangsa. Sejak zaman purba dengan tanda-tanda pertama akan akar-akar kehidupan bangsa, kemudian melalui perkembangan suku-suku tiap daerah, kita telah tumbuh menjadi kesatuan bangsa dengan tanggapan dan sikap hidup nasional yang khas.

Perkembangan nasional mengingatkan kita kepada pertumbuhan pohon dengan pokok kesatuan yang makin kukuh dan besar. Kata *sejarah* yang berasal dari bahasa Arab berarti 'pohon'.

Sudah cukup banyak ditulis tentang sejarah nasional kita, baik oleh ahli sejarah bangsa kita maupun oleh orang-orang asing, masing-masing mengenakan pandangan dan tafsirannya terhadap pertumbuhan bangsa kita. Di tengah pelbagai uraian itu diperlukan karangan sejarah *babon*, yang dapat menjadi dasar dan rujukan penulisan sejarah nasional. Buku ini mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku, yang ditulis dan disunting oleh ahli-ahli sejarah bangsa kita.

Balai Pustaka sebagai Penerbit Pemerintah merasa bangga dapat menerbitkan keenam jilid *Sejarah Nasional Indonesia* Edisi ke-4 cetakan ke-8 ini.

Balai Pustaka

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kita semua mengetahui bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia sampai sekarang masih menggunakan bahan-bahan dan versi asing. Karena itu sudah lama dirasakan bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia perlu ditangani oleh sejarawan Indonesia yang mempunyai keahlian dalam bidang itu. Usaha-usaha ke arah penyusunan buku Sejarah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950, tetapi mengalami berbagai kesulitan dan hambatan sehingga baru sekarang dapat disusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia.

Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan "babon" sejarah Indonesia, yang disusun oleh sejarawan Indonesia, berdasarkan penelitian ilmiah dan orientasi nasional. Tim sejarawan Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo telah bekerja dengan penuh ketekunan dan dedikasi. Hasil pekerjaannya sangat berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mempergunakan fakta-fakta ilmiah yang objektif, dan orientasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu, kita sekarang tidak lagi menggunakan bahan-bahan dan versi asing dalam Sejarah Indonesia.

Selain Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia, telah pula disusun buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terdiri atas tiga jilid, dan untuk tahun 1976 telah direncanakan untuk menyusun buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Penulisan buku Sejarah Indonesia bukan merupakan tugas yang mudah, apalagi jika diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek.

Karena itu, usaha-usaha penulisan Sejarah Indonesia yang telah dilakukan itu perlu kita sempurnakan dan kembangkan terus sehingga anak didik dan masyarakat Indonesia akan dapat memetik manfaatnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Maret 1975
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sjarif Thayeb

Kata Pengantar Editor Umum
Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia* (*SNI*) mungkin telah dianggap sebagai dokumen historis dan telah dimakan waktu sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 dengan pelanjutannya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru). Tiga puluh tiga tahun dan/atau 25 tahun perjalanan sebuah buku sejarah tentu memerlukan pemutakhiran baik secara materi, teori, dan konsep, maupun secara perbukuan dan pembahasaan. Jika sebagian penulis (*SNI*) pada awalnya berumur 40 tahun, sekarang sebagian dari mereka telah berumur 75 tahun atau telah meninggal.

Dalam perjalanan waktu ini, buku *SNI* telah menjadi sumber penulisan sejarah yang beredar dan menjadi rujukan para cendekia dari luar dan dalam negeri. Selain itu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan sebuah sumber sejarah yang terpercaya didasarkan pada keterpercayaan kepada para penulis yang memang pakar dalam bidang sejarah dan bobot kepakaran mereka menjadi jaminan keakuratan sejarah nasional Indonesia. Kelangkaan buku sejarah yang menjadi sumber rujukan masyarakat, khususnya para pelajar/siswa dan mahasiswa, mendorong para pakar yang terlibat dalam penulisan *SNI* berkumpul kembali (tentu yang masih hidup) untuk memutakhirkan buku *SNI* dari segi materi, teori, dan konsep, selain editorial yang menarik dan bertanggung jawab. Lahirlah *SNI* Edisi Pemutakhiran ini.

Edisi Pemutakhiran ini tetap mempertahankan *SNI* dalam enam jilid seperti edisi awal dengan beberapa perubahan susunan subbab dan pengaturan kembali urutan subbab serta perbaikan redaksional pada setiap jilid. Pemutakhiran ini telah berlangsung satu setengah tahun di tengah kesibukan para penulis baik yang lama maupun yang baru.

Bagaimanapun juga yang tetap dijaga dalam Edisi Pemutakhiran ini adalah ditulis oleh pakar Indonesia dengan pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya. Pandangan Prof. Dr. Sartono Kartodirejo tetap relevan dan aktual seperti dalam "Prakata Editor Umum" Edisi I yang tetap dimuat dalam Edisi Pemutakhiran ini.

Dalam Edisi Pemutakhiran ini setiap jilid *SNI* mendapatkan pula prakata sebagai pertanggungjawaban para penulis jilid *SNI*. Ada prakata yang pendek dan ada prakata yang panjang yang semuanya menjadi pintu masuk setiap jilid.

Akhirulkalam para penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Balai Pustaka (Persero) sebagai penanggung jawab penerbitan, kepada mereka yang membantu memberikan dana kegiatan penulisan dan penerbitan, dan kepada para Konsultan PT Balai Pustaka (Persero) yang tetap pada usaha dan dorongan untuk penerbitan dan pemutakhiran *SNI* ini. Inilah jasa dan sumbangsih kita bangsa Indonesia dalam bentuk penulisan buku *SNI.*

Semoga buku ini berguna bagi para anak bangsa sekarang dan pada masa yang akan datang datang.

Semoga Tuhan memberkati kita semua yang terlibat.

Terima kasih.

Akhir 2007

R.P. Soedjono
R.Z. Leirissa

Kata Pengantar Editor Umum
untuk Edisi 1984

Sejak buku *Sejarah Nasional Indonesia* ini terbit untuk pertama kali pada tahun 1975 dan selanjutnya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru), kehadirannya sudah mantap dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dalam sebutan masyarakat mendapat nama-julukan "Buku Standar".

Memang hingga kini buku ini masih unik karena merupakan buku sejarah Indonesia pertama yang substansial hasil karya orang Indonesia. Dengan segala kekurangannya, buku ini dapat menyampaikan suatu *view from within*, pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya.

Para pengarang sendiri merasa bahwa buku ini sudah perlu diterbitkan dalam suatu edisi revisi, yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian mutakhir. Namun, usaha semacam itu memerlukan waktu yang lebih lama dan koordinasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk menerbitkan edisi ini yang telah mulai mengalami perbaikan-perbaikan, tetapi belum sepenuhnya. Selanjutnya, usaha melakukan revisi besar akan diusahakan terus.

Hal itu adalah semata-mata karena edisi-edisi sebelumnya telah lama habis. Padahal permintaan masyarakat sudah sangat mendesak karena sementara ini telah timbul satu generasi baru cendekiawan yang belum sempat memiliki buku standar Sejarah Nasional Indonesia. Generasi baru itu meliputi pula sejumlah besar guru sejarah pada SD, SMTP, dan SMTA yang perlu memantapkan pemahamannya terhadap sejarah nasional Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan memadai.

Diharapkan pula agar supaya masyarakat luas dapat menggunakan edisi ini untuk mengerti masa kini bangsa dan negaranya melalui pemahaman masa lampaunya. Dengan demikian, mudah-mudahan dapat dilaksanakan pembangunan masa depannya yang cemerlang.

11 Agustus 1984 **Marwati Djoened Poesponegoro**
Nugroho Notosusanto

Prakata Editor Umum
Edisi ke-1

Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya terasa di kalangan cendekiawan suatu keperluan untuk menulis kembali sejarah Indonesia, tidak lain karena penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan bangsanya, *neerlando-sentrisme* semacam itu perlu diganti dengan *Indonesia-sentrisme*, yaitu pandangan dari sudut penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai.

Untuk melaksanakan gagasan tentang penulisan kembali sejarah Indonesia pada tahun 1951, telah dibentuk suatu Panitia Sejarah Nasional yang bertugas menyusun kitab sejarah nasional Indonesia dengan dasar luas dan jiwa nasional bersendi pada ilmu pengetahuan dipandang dari sudut politik, sosial ekonomi dan kebudayaan mulai dari zaman purba sampai sekarang. Keadaan dewasa itu rupanya belum memungkinkan Panitia itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sebagai langkah yang sangat penting dapat disebut penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1957. Selain tujuan untuk memperdalam pemikiran tentang Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, diperbincangkan pula keperluan yang sangat mendesak, yaitu penulisan buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah. Kenyataannya adalah bahwa buku-buku sekolah yang dipakai, kalau bukan terjemahan atau saduran dari buku-buku sejarah karangan sejarawan Belanda, belum mewujudkan sejarah nasional dalam arti yang sebenarnya. Meskipun hasil seminar tidak memenuhi harapan para peserta, tetapi tidak sedikit manfaatnya untuk memperdalam kesadaran akan peranan sejarah nasional sebagai sarana penting pendidikan warga negara Indonesia, terutama untuk menimbulkan kesadaran nasionalnya dengan mengenal identitas bangsanya melalui sejarahnya.

Sekitar tahun 1963 telah dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali sejarah Indonesia, tetapi tahun-tahun berikutnya, yang

penuh ketegangan sosial dan krisis politik, tidak memberi kesempatan kepada panitia untuk menghasilkan karya.

Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Agustus 1970, yaitu suatu generasi baru sejarawan memajukan kertas kerjanya dalam jumlah yang cukup besar. Pokok-pokok kertas kerja itu mencakup periode prasejarah sampai dengan periode yang paling modern. Hal ini dapat dianggap suatu langkah yang cukup maju jika dibandingkan dengan seminar yang pertama, tambahan pula dapat dipandang sebagai suatu tanda bahwa sudah ada kemungkinan yang lebih besar untuk meneruskan usaha penulisan sejarah nasional. Jumlah tenaga kerja, meskipun kebanyakan belum banyak pengalaman dalam penulisan, telah memadai untuk membentuk kelompok yang akan bertugas melaksanakan usaha itu. Ditambahkan lagi bahwa keperluan penulisan buku sejarah untuk sekolah semakin terasa mendesak. Kedua hal itu mendorong para sejarawan untuk mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar diangkat suatu regu yang ditugaskan menulis kembali Sejarah Indonesia. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0173/1970, 4 April 1970, mengangkat Panitia Penyusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di perguruan tinggi dan sekaligus akan dijadikan bahan daripada *textbook* sejarah untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

Panel pertama mencakup seluruh periode yang lazim disebut prasejarah. Panel kedua akan membahas periode dari akhir prasejarah sampai kedatangan pengaruh Islam di Indonesia. Panel ketiga bertolak dari awal zaman ini sampai akhir abad ke-17. Panel keempat mulai sekitar tahun 1700 sampai 1900. Panel berikutnya meliputi periode pergerakan nasional (1900–1942). Panel yang terakhir menggarap masa pendudukan Jepang sampai dengan kira-kira pertengahan tahun enam puluhan.

Tidak berbeda dengan tugas pujangga di masa lampau, sejarawan dewasa ini juga mempunyai kewajiban untuk menafsirkan serta meneruskan tradisi bangsanya dengan menyusun kembali riwayatnya termasuk garis perkembangan masyarakatnya serta kebudayaannya.

Dalam menunaikan fungsinya itu sejarawan Indonesia perlu menyadari sepenuhnya bahwa dengan gambaran sejarahnya, bangsa Indonesia mampu menempatkan diri dalam waktu serta memahami diri sehingga secara lebih mendalam dikenal identitasnya.

Kesadaran akan tanggung jawab yang berat ini pada satu pihak menimbulkan pada sejarawan suatu keragu-raguan apakah kemampuan serta pengetahuannya telah memadai untuk melaksanakan tugas itu, pada pihak lain keadaan pengajaran sejarah sebagai sendi pendidikan nasional sangat menyedihkan sehingga di dalam keadaan itu tidak dapat diharapkan penanaman perasaan kepribadian nasional serta pemupukan konsensus pada generasi muda melalui pengajaran sejarah itu.

Dengan diperolehnya kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menyadari akan situasinya serta hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Proses dekolonisasi dalam bidang politik diikuti oleh proses yang sama dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan bangsa Indonesia "terasing" dari sejarahnya sendiri, apa yang diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri perantauan bangsa penjajah di mana ditonjolkan peranan tokoh-tokoh penjajah sedang peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena subjektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan penjajahan pada umumnya. Masalah dekolonisasi dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan pemberontak menjadi pahlawan, akan tetapi perlu diungkapkan segala kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran serta menerangkan proses sejarah perlu diuraikan pelbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia.

Penyusunan kembali sejarah Indonesia perlu memenuhi beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi itu.

(1) Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam" di mana bangsa Indonesia sendiri memegang peranan pokok.

(2) Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang memengaruhinya, baik ekonomis, sosial, maupun politik atau kultural.

(3) Berhubungan erat dengan kedua pokok di atas perlu ada pengungkapan akitivitas dari pelbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani serta golongan-golongan lainnya.

(4) Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesis, di mana digambarkan proses yang menunjukkan perkembangan ke arah kesatuan geopolitik seperti yang kita hadapi dewasa ini, prinsip integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai.

Penulisan ini berpangkal pada paham bahwa Indonesia dengan pelbagai kelompok penduduknya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan perkembangan wilayah Indonesia sebagai daerah politik-geografis. Paham itu kemudian diperkuat dengan munculnya gerakan nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, yaitu kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu bangsa.

Perkembangan kesatuan nasional itu sendiri tidak dapat dipahami tanpa mengetahui perkembangan sejarah Indonesia.

Penulisan sejarah pada tahun tujuh puluhan seyogianya didasarkan atas beberapa anggapan tentang perkembangan masyarakat Indonesia serta sejarahnya.

Anggapan pertama adalah proses integrasi yang memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai yang nasional. Ini berarti bahwa sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar.

Anggapan kedua berhubungan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang merupakan proses yang kompleks. Lembaga-lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan yang bergerak dengan pelbagai kekuatan, serta mencakup pelbagai aspek kehidupan.

Anggapan ketiga menunjuk kepada kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan untuk masa depan.

Salah satu sebab yang mendorong panitia untuk menerima tugas penulisan sejarah ini ialah karena buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah sangat rendah mutunya. Beberapa kali usaha untuk memperbaikinya telah gagal, antara lain karena tidak ada buku babon atau pedoman yang dapat memberi kerangkanya. Diharapkan tulisan ini akan dapat dipergunakan sebagai kerangka untuk penulisan buku sekolah itu.

Disadari sepenuhnya oleh panitia bahwa pengajaran sejarah merupakan dasar bagi pendidikan dalam masa pembangunan nasional, terutama untuk menggembleng jiwa generasi muda dengan membangkitkan pada mereka suatu kesadaran bahwa mereka anggota dari suatu nasion. Meskipun dirasakan bahwa tenaga ahli masih sangat kurang untuk melaksanakan pekerjaan raksasa itu, keperluan yang mendesak menghilangkan keragu-raguan sehingga kelompok tidak mau mengelakkan kewajiban menulis kembali sejarah Indonesia.

Setiap usaha kolektif semacam ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan dari pelbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan. Pertama-tama perlu disebut Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak semula memberikan dorongan yang kuat untuk menjalankan penulisan ini, dorongan itu berupa fasilitas-fasilitas serta prasarana-prasarana yang amat memudahkan pekerjaan panitia. Lagi pula kepercayaan serta perhatian yang diletakkan pada usaha ini merupakan dukungan moril yang sangat berharga sehingga pelbagai kesulitan dapat diatasi. Kepada beliau beserta pembantu-pembantu beliau di lingkungan Departemen kami mengucapkan terima kasih atas bantuan itu.

Semua anggota panitia, tidak ada seorang pun yang terkecuali, adalah tenaga dari universitas, lembaga ilmiah, dan lembaga pemerintah. Selain tugas pokoknya, mereka diberi kesempatan menyumbangkan tenaga serta pikirannya kepada karya penulisan ini. Atas kelonggaran itu Panitia perlu menyatakan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Perhatian terhadap usaha ini, yang sering disertai bantuan materil yang konkret tidak hanya datang dari pihak lembaga-lembaga Pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak sedikit bantuan diterima dari *The Ford Foundation* yang diberikan lewat perwakilannya di Indonesia, terutama dengan memberikan kesempatan bagi para ketua panel untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang teori dan metodologi sejarah.

Selama perantauan di luar, di Amerika Serikat dan di Nederland, perhatian serta bantuan diberikan kepada rombongan ketua-ketua panel dengan sangat leluasa sehingga tidak ternilai manfaat yang diperolehnya, terutama bagi penyusunan karya ini. Para sarjana atau sejarawan yang tersohor dari Universitas California di Berkeley, dan dari universitas-universitas lain, seperti Cornell, Ohio, Wisconsin, Yale, kemudian dari Universitas Leiden dan Koninklijk Instituut van Taal–, Land–en Volkenkunde, kesemuanya sangat terbuka dalam membahas masalah dan rencana penulisan sejarah ini. Fasilitas-fasilitas diperoleh dari arsip-arsip di negeri Belanda sehingga bahan menjadi semakin lengkap. Panitia merasa beruntung mendapat kesempatan yang luar biasa itu, lagi pula banyak yang secara perorangan dengan tulus ikhlas memberikan segala macam bantuan sehingga memperingan tugas rombongan selama merantau, sesungguhnya terlalu banyak untuk disebut satu per satu.

Kepada segenap anggota panitia di sini kami selaku ketua menyatakan rasa terima kasih atas segala jerih payah dan daya upaya, pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran yang kesemuanya memungkinkan pelaksanaan tugas yang diletakkan pada panitia. Yang perlu mendapat penghargaan

sebesar-besarnya tidak lain ialah segala kesediaan serta kemauan baik yang ditunjukkan sehingga selama kira-kira tiga tahun terjalin hubungan yang cukup akrab serta kerja sama yang baik. Tanpa sumbangan itu pekerjaan Panitia tidak akan dapat diselesaikan dengan semestinya.

Meskipun panitia sebagai suatu wadah telah mengatur serta sekadar mengarahkan dan mengoordinasikan penulisan kolektif ini, tetapi tanggung jawab terletak pada pengarang masing-masing.

Meskipun banyak fasilitas yang diperoleh selama menjalankan penulisan itu, mulai dari pengumpulan bahan sampai penerbitannya, tetapi oleh panitia dirasakan bahwa karya belum dapat memenuhi harapan seperti yang telah diutarakan di mana-mana, jangankan tuntutan seperti yang lazim diadakan terhadap karangan ilmiah. Mungkin dirasakan pula bahwa karya ini belum memadai biaya dan tenaga yang dicurahkan bagi pelaksanaannya. Karya kolektif seperti ini memang memerlukan organisasi, permusyawarahan, dan penyerasian pelbagai kondisi anggota sehingga sukar diharapkan bahwa semua nilai input dapat dicerminkan dalam nilai hasilnya. Kecuali kurang pengalaman menulis, pengalaman pertama dalam usaha kolektif, kurang kemahiran penulisan ini membawa akibat ketidakrataan serta serba kurangnya susunan penulisan ini.

Tidak ada seorang pun dalam panitia yang mempunyai anggapan bahwa karya ini merupakan suatu standar, karena masih jauh dari itu. Pada hemat kami, ini merupakan usaha permulaan, sekadar memenuhi keperluan yang mendesak. Besar harapan kami bahwa setelah karya ini terbit, banyak yang didorong menghasilkan penulisan sejarah Indonesia, dalam keseluruhan atau hanya sebagian, yang lebih tinggi mutunya serta lebih memenuhi syarat-syarat sebagai sejarah nasional yang ilmiah.

Panitia masih mencari-cari gaya bahasa serta tingkat penguraian yang sesuai dengan sidang pembaca karya ini. Yang dimaksud dengan sidang pembaca di sini terutama para kaum terpelajar serta cendekiawan Indonesia yang memiliki minat kepada sejarah tanah airnya, sekadar sebagai bacaan pendahuluan. Untuk mempelajari sejarah yang lebih mendalam serta terperinci sudah barang tentu diperlukan karya-karya khusus. Meskipun lingkup waktu serta rangkuman karya ini mencakup periode dari prasejarah sampai sejarah terbaru, tetapi panitia terpaksa membatasi diri pada pasal-pasal pilihan, yang meliputi bagian-bagian dari perkembangan sejarah dan merupakan gejala-gejala penting, terutama dalam hubungannya dengan proses integrasi serta yang menjelaskan sistem dan struktur masyarakat sekarang.

Selanjutnya sejarah yang disajikan di sini tidak meliputi semua bidang kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, beberapa segi dengan sengaja tidak dicakup, seperti sejarah kesenian dan sejarah kebudayaan dengan alasan bahwa (1) jenis sejarah itu sudah sejak lama mandiri dan (2) ruang lingkup penulisan ini terpaksa dibatasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pada kesempatan lain ada penulisan tersendiri mengenai sejarah kesenian dan kebudayaan itu.

Keterbatasan karya ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa belum cukup tersedia hasil penelitian, pengkajian serta, penulisan dari sudut penglihatan baru pada waktu karya ini dimulai. Yang jelas adalah bahwa karya ini tidak didasarkan atas penelitian yang asli dan mendalam.

Tidak ada penulisan sejarah yang tidak memuat sifat-sifat subjektif. Meskipun dalam penulisan ini diusahakan agar segala tuntutan metodologi ilmu sejarah dipenuhi, termasuk kritik sejarah, tetapi tidak ada anggapan bahwa hasil penulisan telah mencapai objektivitas sepenuhnya. Dalam menghayati penulisan sejarah Indonesia dari dalam atau, juga sering disebut penulisan yang Indonesia-sentris, mau tidak mau panitia membatasi sudut penglihatannya atau titik pendirian. Dianggapnya hal itu yang paling memadai dalam situasi yang kita hadapi, ialah kenyataan bahwa pengertian "Indonesia" memang mewujudkan realitas bagi bangsa Indonesia, yaitu negara nasional yang mengikat sebagai suatu kesatuan kelompok-kelompok etnis sebagai satu bangsa dengan satu bahasa nasional. Di sini perlu kita akui bahwa pangkal tolak penggarapan penulisan sejarah ini terikat pada zaman kita sekarang ini, suatu ikatan yang tidak dapat kita lepaskan begitu saja.

Sejarah Nasional seperti yang dikonsepsikan di sini sama sekali tidak menyangkut pengertian bahwa sejarah bangsa Indonesia harus digambarkan dalam serta keagungannya belaka sehingga objektivitas harus dikorbankan demi penggambaran yang demikian itu. Pasang surut kegiatannya, maju-mundur karya kebudayaannya, timbul tenggelam lembaga-lembaganya, unggul-kalah perjuangannya, kesemuanya secara bersama-sama menyusun irama sejarah Indonesia yang sebagai nasib bersama akan mempertinggi kesadaran bangsa Indonesia sebagai nasional. Panitia berkeyakinan bahwa sejarah Indonesia yang menggambarkan nasib bersama, dalam suka duka, kegemilangan dan kesuraman, di samping kepahlawanan serta kewibawaan tokoh-tokoh sejarah, mampu membangkitkan rasa kebanggaan pada generasi muda, perasaan mana akan memantapkan kepribadian bangsa, serta identitasnya. Dengan demikian, akan tercapai pula apa yang diharapkan dari pelajaran Sejarah Nasional, tanpa mengurangi tuntutan-tuntutan ilmu sejarah.

Akhirulkalam harapan yang terkandung dalam hati Panitia tidak lain ialah semoga karya yang tidak sepertinya ini menambah bahan bacaan bagi kaum terpelajar yang berminat kepada Sejarah Indonesia, baik yang hendak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau maupun yang ingin mengambil pelajaran dari suri teladan para tokoh sejarah atau dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Yogyakarta, akhir 1974
Sartono Kartodirdjo

Prakata Editor Jilid
Edisi Pemutakhiran

Dalam *SNI* edisi jilid IV, yang sebelumnya hanya terbatas pada abad ke-19, diperluas dengan abad ke-16 dan ke-17 (masa *Verebidge Oost-indische Compagnie* atau VOC). Sesungguhnya, masa VOC berbeda dengan abad ke-19, sekalipun dalam kedua zaman itu Belanda menjadi *counterpart* dari Indonesia. VOC adalah sebuah badan dagang dan belum menaruh minat pada penjajahan atau kolonialisme. Penggunaan senjata dan pendudukan daerah produksi rempah-rempah (terutama di Maluku) bermanfaat bagi VOC, jika kepentingan dagang itu mendesaknya untuk melakukan hal-hal tersebut. Belum ada upaya ekspansi teritorial yang disengaja seperti pada abad ke-19 untuk menegakkan kolonialisme. Oleh karena itu, VOC hanya melakukan pendudukan beberapa wilayah di Indonesia, seperti Maluku, Banten, Makassar, Pantai Utara, dan Pulau Jawa. Pendudukan wilayah-wilayah tersebut adalah hasil kerja sama dengan kekuasaan-kekuasaan lokal demi kepentingan masing-masing (kepentingan kekuasaan-kekuasaan lokal adalah politik dan kepentingan VOC adalah dagang).

Dalam bagian I jilid IV ini, masa VOC dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan fungsi VOC dan kegiatannya. Penulis berusaha agar semua hasil penelitian mutakhir mengenai VOC, yang dapat diperoleh di Indonesia, dapat digunakan di sini. Ada beberapa masalah yang terpaksa tidak dibahas di sini, misalnya "Preanger Stelsel" atau penanaman kopi di wilayah Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh belum banyak diteliti dan literaturnya belum ada di Indonesia.

Bagian II adalah inti dari materi jilid IV edisi sebelumnya. Namun, ditambahkan juga peristiwa dan masalah, yang pada waktu itu telah diteliti oleh cukup banyak orang dan publikasinya dapat diperoleh di Indonesia. Selain itu, materi jilid IV edisi sebelumnya juga diteliti untuk dikoreksi isinya sesuai dengan hasil penelitian mutakhir, serta perbaikan kesalahan-kesalahan ejaan ataupun salah tulis.

Jakarta, akhir 2007
R.Z. Leirissa

Prakata Editor Jilid

Edisi ke-4

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Redaksi ke-4 *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid IV mengambil kebijaksanaan untuk mempertahankan kerangka pokok dari edisi sebelumnya. Sebab itu pembagian bab dalam empat tema dipertahankan, yaitu sistem politik, perkembangan ekonomi, perlawanan terhadap kolonialisme, dan gerakan sosial. Judul jilid ini pun tidak mengalami perubahan yang besar.

Perubahan berupa tambahan dan penyempurnaan dalam setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I: judul diganti dengan Sistem Politik. Perubahan dan tambahan data terutama dibuat dalam subbab Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada perubahan-perubahan kecil, terutama dalam susunan bahasa. Suatu bagian berjudul "*pendahuluan*" dalam setiap subbab juga ditambahkan dengan memakai materi yang sudah ada maupun yang ditambahkan.

Bab II: tidak mengalami perubahan dalam materi, kecuali pembagian dalam subbab, serta susunan bahasanya.

Bab III: tambahan utama di sisi adalah mengenai perlawanan Sisingamangaraja di Sumatra Utara, serta perombakan mengenai Maluku Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Bali, serta Sumatra Barat, dan Aceh, juga mengalami penyempurnaan dan penambahan. Bagian-bagian ini ditulis kembali (*rewrite*). Selain itu pembagian-pembagian dalam subbab juga diusahakan agar sama, dan bagian mengenai "struktur perlawanan" dalam edisi lama dilebur dalam setiap subbab yang bersangkutan.

Bab IV: Gerakan Samin serta Gerakan Persihudamdam merupakan tambahan utama dalam bab ini. Selain itu subbab Sarekat Islam Lokal tidak dimasukkan dalam edisi ini karena diharapkan akan dimasukkan dalam Jilid V. Perubahan-perubahan kecil dalam susunan bahasa juga terdapat dalam bab ini.

Dalam bibliografi ditambahkan dengan buku dan artikel yang relevan denga isi buku. Selain itu suatu indeks juga ditambahkan.

Para anggota tim menyadari bahwa banyak wilayah di Indonesia belum mendapat tempat dalam buku ini. Terutama mengenai perlawanan terhadap kolonialisme. Selain belum diadakannya penelitian yang lebih mendalam dan serius, sebagian besar dari perlawanan-perlawanan itu masih tersimpan dalam arsip-arsip Hindia Belanda di Indonesia maupun

di Negeri Belanda. Selain itu dalam membahas perlawanan terhadap kolonialisme, tidak terdapat suatu pola (atau struktur) yang bisa diikuti dalam setiap perlawanan yang diuraikan. Berbeda umpamanya dengan uraian mengenai sistem politik, sitem ekonomi, dan gerakan sosial, yang mengikuti pola-pola tertentu karena memang telah diteliti secara mendalam oleh pelbagai sarjana di dalam maupun di luar negeri. Penyusunan yang seragam dalam subbab Perlawanan ini tidak mencerminkan suatu model atau teori tertentu.

Pada kesempatan ini anggota tim edisi ini menyampaikan terima kasih pada tim penulis edisi lama karena jerih payah merekalah yang menghasilkan buku ini. Kami hanya melakukan tambahan, dan editing sesuai dengan tugas yang termaktub dalam kerangka kerja yang diberikan pada kami. Para penulis edisi pertama itu adalah F.A. Sutjipto sebagai Ketua, dengan anggota-anggota Thee Kian Wie, Sartono Kartodirdjo, dan Djoko Surjo.

Jakarta, Juli 1980
R.Z. Leirissa

Prakata Editor Jilid
Edisi ke-1

Sejarah Indonesia pada abad XVIII dan XIX ditandai oleh hubungan yang makin intensif antara kekuasaan-kekuasaan tradisional dan kekuasaan asing, dalam hal ini kekuasaan Belanda. Dalam hubungan ini tampak pula, bahwa intensitas hubungan tersebut di tiap-tiap daerah di Indonesia tidak sama. Hal ini terutama disebabkan oleh proses historis masuknya pengaruh dan meluasnya kekuasaan Belanda di daerah satu dan lainnya tidak paralel. Dapat pula dikatakan, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai sejarah sendiri, yang kadang-kadang tidak tampak sama sekali hubungannya dengan daerah lain. Namun, dengan menggunakan datangnya pengaruh kekuasaan Barat sebagai aliran pokok (*mainstream*), dapat dicari hubungan yang terdapat antara daerah-daerah tersebut.

Kekuasaan-kekuasaan tradisional (kerajaan-kerajaan) di Indonesia mempunyai sistem politik dan susunan masyarakat yang berbeda. Sifat kerajaan agraria agak berbeda dengan kerajaan pantai. Ekspansi kekuasaan Belanda di kerajaan pantai tampak agak berbeda dengan di kerajaan pedalaman, meskipun di sana-sini terdapat juga persamaan, seperti taktik Belanda dalam mengadakan campur tangan urusan intern kerajaan. Di daerah Jawa sistem eksploitasi produksi agraris oleh Belanda tampak lebih kompleks daripada di daerah lain.

Kesamaan yang tampak menonjol dari pelbagai daerah kerajaan di Indonesia ialah bahwa usaha ekspansi kekuasaan Belanda sebagian besar menimbulkan reaksi baik dari penguasa setempat ataupun sekelompok elite dalam kerajaan, seperti para bangsawan atau orang-orang dari golongan agama. Hal ini menunjukkan, bahwa penguasa-penguasa dan rakyat kerajaan berusaha untuk tetap dapat hidup (*survive*), meskipun harus menghadapi tekanan-tekanan dari kekuasaan Belanda yang adakalanya cukup kuat.

Pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan dapat tertuang dalam bab-bab pada penerbitan ini. Sistem politik kerajaan tradisional yang menyangkut aspek-aspek, seperti kedudukan dan kekuasaan raja, susunan birokrasi, sumber penghasilan kerajaan, dan susunan masyarakatnya, diuraikan dengan maksud untuk memberi gambaran tentang struktur kerajaan-kerajaan tersebut. Uraian tentang perkembangan politik kolonial Belanda beserta perubahan-perubahan yang terjadi dikaitkan dengan pikiran-

pikiran yang mendasari politik tersebut, seperti paham konservatif, liberal, ethis, dan seterusnya. Penerapan politik kolonial tersebut di dalam masyarakat Indonesia menyangkut pelbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, ketatanegaraan, birokrasi, dan lainnya.

Mengingat bahwa tujuan yang paling utama dari politik kolonial Belanda adalah keuntungan ekonomis, maka dalam buku ini disediakan bab khusus untuk menguraikan perkembangan ekonomi Indonesia dalam abad XIX. Perkembangan ekonomi ini menyangkut macam-macam sistem yang digunakan oleh pemerintah asing, ialah Inggris dan Belanda, untuk menguasai faktor-faktor produksi agraris, seperti sistem Sewa Tanah (*Landrente*) dan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*). Akan diuraikan pula perkembangannya setelah Belanda menganut politik kolonial liberal.

Adalah jelas pula bahwa penguasa-penguasa tradisional dan rakyat mereka tidak selalu menerima perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih segi-segi yang memberatkannya, seperti pajak, pengerahan tenaga kerja, dan pemakaian tanah rakyat. Di daerah-daerah lain yang merupakan kerajaan pantai, seperti Banjar, Aceh, dan Makassar, penguasaan urusan perdagangan bandar lebih diutamakan oleh Belanda daripada langsung mengurusi penanaman hasil bumi, seperti yang dilakukan di Jawa. Di daerah-daerah reaksi terhadap usaha ekspansi kekuasaan Belanda sering kali muncul. Berhubung terjadinya ekspansi tersebut tidak lama untuk masing-masing daerah, maka timbulnya reaksi baik berupa perlawanan-perlawanan bersenjata ataupun gerakan-gerakan sosial tidak bersamaan pula waktunya.

Mengenai penentangan pihak bumiputra terhadap Belanda ini kecuali proses perkembangannya juga diuraikan strukturnya, seperti kepemimpinan, golongan pengikut, sistem perbentengan, persenjataan, dan taktik perlawanan. Dalam uraian tentang gerakan sosial juga dikemukakan tipe-tipe dari gerakan, seperti gerakan melawan pemerasan dan gerakan Ratu Adil.

Dalam hubungan dengan penentang terhadap kolonialisme sudah barang tentu tidak semua yang terjadi di tanah air kita dapat tercakup dalam uraian. Pemilihan sebagai contoh dari beberapa kejadian tersebut terpaksa dilakukan, meskipun perlu di sini ditandaskan bahwa baik perlawanan besar ataupun gerakan sosial, kapan dan di mana pun terjadinya mempunyai nilai yang lama dalam turut berusaha menentang setiap usaha kolonialisme asing.

Perlu pula diakui bahwa sebagian besar sumber yang digunakan dalam tulisan-tulisan ini adalah sumber sekunder, meskipun di sana-sini juga

digunakan sumber primer. Kemungkinan tidak adanya keseimbangan dalam penggunaan sumber lokal tertulis, antara lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan untuk memperoleh atau menggunakan sumber-sumber tersebut. Dalam batas tertentu diharapkan bahwa tulisan-tulisan dalam penerbitan ini dapat memberikan gambaran yang agak bulat mengenai Sejarah Indonesia dalam abad XVIII dan XIX, baik yang menyangkut segi perkembangannya maupun strukturnya.

Yogyakarta, akhir 1974

F.A. SUTJIPTO

Sejarah Nasional Indonesia
Edisi Pemutakhiran

Jilid I	Zaman Prasejarah di Indonesia
Jilid II	Zaman Kuno (awal M–1500 M)
Jilid III	Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)
Jilid IV	Kemunculan Penjajahan di Indonesia (± 1700–1900)
Jilid V	Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)
Jilid VI	Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942–1998)

Tim Redaksi Edisi Pemutakhiran

1. R.Z. Leirissa (Editor Jilid)
2. Yuda B. Tangkilisan
3. M. Iskandar

Sejarah Nasional Indonesia

Jilid I	Jaman Prasejarah di Indonesia
Jilid II	Jaman Kuna (awal M–1500 M)
Jilid III	Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)
Jilid IV	Abad Kesembilan belas (±1800–1900)
Jilid V	Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)
Jilid VI	Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (±1942–1984)

Tim Redaksi

Ketua : R.Z. Leirissa

Anggota : Nana Nurliana
Anhar Gonggong
Wardiningsih Soerjoharjo
Soeharto

Daftar Isi

Kata Pengantar Edisi Pemutakhiran v

Kata Pengantar Edisi ke-4 vi

Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia vii

Kata Pengantar Editor Umum Edisi Pemutakhiran ix

Kata Pengantar Editor Umum untuk Edisi 1984 xi

Prakata Editor Umum Edisi ke-1 xii

Prakata Editor Jilid Edisi Pemutakhiran xx

Prakata Editor Jilid Edisi ke-4 xxi

Prakata Editor Jilid Edisi ke-1 xxiii

Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutahiran xxvi

Sejarah Nasional Indonesia xxvii

Daftar Isi xxvii

Daftar Gambar xxxiii

Bagian I Masa Modern Awal 1

Bab I Pendahuluan 3

Bab II Jalur Darat dan Jalur Laut 5

Bab III Perdagangan Antarbenua 11

A. *Estado da India* 11

1. Sistem Perdagangan 11
2. Sistem Monopoli 15
   a. Sunda Kalapa 15
   b. Maluku 19
   c. Nusa Tenggara Timur 23

B. *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) 27
1. Sistem Perdagangan 27
2. Sistem Monopoli 31
a. Kepulauan Maluku Utara 31
b. Kepulauan Ambon 35
c. Kepulauan Banda 41
d. Dua Pelabuhan Internasional 44
e. VOC dan Mataram 47
f. VOC Bubar Digantikan Negara Kolonial Hindia Belanda 51

Bagian II Kekuasaan Belanda di Abad ke-19 53

Bab IV Sistem Politik 55
A. Jawa Tengah 55
1. Wilayah 55
2. Raja dan Bangsawan 59
3. Birokrasi 63
4. Masyarakat 76
B. Bali 77
1. Wilayah 77
2. Raja dan Bangsawan 78
3. Birokrasi 81
4. Masyarakat 84
C. Nusa Tenggara Barat 91
1. Wilayah 91
2. Raja dan Bangsawan 92
3. Birokrasi 96
4. Masyarakat 98
D. Sulawesi (Selatan) 101
1. Wilayah 101
2. Raja dan Bangsawan 102
3. Birokrasi 103
4. Masyarakat 107

E. Kalimantan Selatan ... 110
1. Wilayah ... 110
2. Raja dan Bangsawan ... 111
3. Birokrasi ... 116
4. Masyarakat ... 119
F. Kalimantan Barat ... 120
1. Wilayah ... 120
2. Raja dan Bangsawan ... 123
3. Birokrasi ... 126
4. Masyarakat ... 129
E. Aceh ... 130
1. Wilayah ... 130
2. Raja dan Bangsawan ... 133
3. Birokrasi ... 141
4. Masyarakat ... 149

Bab V Perlawanan terhadap Kolonialisme ... 153
A. Sulawesi Utara ... 156
1. Pendahuluan ... 156
2. Jalannya Perang ... 164
3. Akhir Perang ... 173
B. Maluku Tengah ... 178
1. Pendahuluan ... 178
2. Jalannya Perang ... 183
3. Akhir Perang ... 192
C. Sumatra Barat ... 195
1. Pendahuluan ... 195
2. Jalannya Perang ... 199
3. Akhir Perang ... 207
D. Sulawesi Selatan ... 212
1. Pendahuluan ... 212
2. Jalannya Perang ... 216
3. Akhir Perang ... 220
E. Jawa Tengah dan Jawa Timur ... 222
1. Pangeran Diponegoro ... 222

2. Jalannya Perang 229
F. Bali 249
1. Pendahuluan 249
2. Jalannya Perang 250
3. Akhir Perang 257
G. Kalimantan Barat 259
1. Pendahuluan 259
2. Jalannya Perang 260
3. Akhir Perang 268
H. Kalimantan Selatan 271
1. Pendahuluan 271
2. Jalannya Perang 277
3. Akhir Perang 281
I. Aceh 283
1. Pendahuluan 283
2. Jalannya Perang 286
3. Akhir Perang 300
J. Sumatra Utara 306
1. Pendahuluan 306
2. Jalannya Perang 310
3. Akhir Perang 320
K. Nusa Tenggara Barat 323
1. Pendahuluan 323
2. Jalannya Perang 330
3. Akhir Perang 342

Bab VI Perkembangan Ekonomi 345
A. Sistem Sewa Tanah 345
1. Pendahuluan 345
2. Pelaksanaan 347
3. Penilaian 350
B. Sistem Tanam Paksa 352
1. Pendahuluan 352
2. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 354

3. Pengaruh Sistem Tanam Paksa 362
4. Penilaian 368
C. Sistem Liberal 371
1. Pendahuluan 371
2. Asas-Asas Liberalisme 374
3. Jawa Tengah dan Jawa Timur 376
4. Pembangunan Prasarana 383
5. Sumatra Timur 387

Bab VII Gerakan Sosial 397
A. Gerakan Melawan Pemerasan 400
1. Pendahuluan 400
2. Gerakan di Jawa 404
B. Gerakan Ratu Adil 424
1. Pendahuluan 424
2. Gerakan di Jawa 431
C. Gerakan Samin 439
1. Pendahuluan 439
2. Gerakan di Jawa 442
D. Gerakan Sekte Keagamaan 450
1. Pendahuluan 450
2. Gerakan di Jawa 455
3. Gerakan di Tanah Batak 462

Daftar Pustaka 469

Daftar Sumber 493

Daftar Singkatan 507

Indeks 509

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Perdagangan masa Pra-Emporium 7
Gambar 2.2 Perdagangan masa Emporium (700–1750) 9
Gambar 3.1 Sebuah lanehara dari Sunda Kalapa 17
Gambar 3.2 Sebuah upacara di Banda, 1599 22
Gambar 3.3 Masjid Agung di Aceh, 1650 28
Gambar 5.1 Temberan di dekat hulu Sungai Tondano 175
Gambar 5.2 Rumah-rumah di Tondano 176
Gambar 5.3 Minawanua Gelora Hidup Kami 177
Gambar 5. 4 Sebuah lukisan Belanda yang maksudnya memperlihatkan serangan kaum Padri terhadap pasukan mereka di bawah pimpinan Letnan Kolonel Vermeulen Krieger bulan Januari 1833 210
Gambar 5. 5 Sebuah lukisan Belanda tentang serangan atas Tanjung Alam di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaff pada tahun 1822 211
Gambar 5.6 Teuku Umar (duduk no. 3 dari kiri) beserta pengikut-pengikutnya pada waktu ia menjalankan siasat bekerja sama dengan Belanda. Oleh pemerintah Belanda, ia digeri gelar Teuku Johan Pahlawan dan diangkat sebagai Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda di Aceh. 301
Gambar 5.7 Teuku Umar Johan Pahlawan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda di Aceh bersama-sama keluarga serta para pengikut di rumahnya di Lam Pisang dalam tahun 1896. 302
Gambar 5.8 Pada tanggal 30 Maret 1896 Teuku Umar bergabung kembali dengan pejuang-pejuang Aceh. 303
Gambar 5.9 Seorang Panglima Aceh dari Jeuram, Aceh Barat 304
Gambar 5.10 Panglima-panglima Teuku Umar dari Seunagan, Aceh Barat. Sebelah kiri: Pang Yatim; sebelah kanan: Keuchi' Abaih 305
Gambar 5.11 Foto keluarga Si Singamangaraja yang tertawan 322

Gambar 5.12 Raja Selaparang Ratu Agung Agung Gde Ngurah Karangasem dengan beberapa keluarganya pada tempat pengasingannya di Batavia (Jakarta) tahun 1894–1896 325
Gambar 5.13 Raja Selaparang Agung Agung Gde Ngurah Karangasem dengan keluarga dan pengirimnya di dalam pengasingan di Batavia (Jakarta) 1894–1896 ... 326
Gambar 5.14 Perutusan Raja Selaparang menghadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) pada tanggal 22 Mei 1894 (Sumber: KITLV, Leiden) 327
Gambar 5.15 Anak Agung Ketut Karangasem 328
Gambar 5.16 Punggawa Ubud Cokorde Gde Sukawati bersama putra mahkota Kerajaan Gianyar Anak Agung Ngurah Agung di muka halaman barat Puri Agung Gianyar (1906) 331

Bagian I
Masa Modern Awal

Bab I
Pendahuluan

Istilah "Modern Awal" memang tidak lazim digunakan dalam sejarah Indonesia. Akan tetapi, sesungguhnya istilah itu telah lama digunakan oleh para sejarawan untuk menunjukkan masa di antara akhir Abad Pertengahan dan awal Revolusi Industri, atau antara abad ke-16 sampai abad ke-18 (*Early Modern period*). Sekalipun pada mulanya istilah itu hanya digunakan untuk sejarah Eropa, kini istilah itu sudah menjadi umum dan menunjukkan adanya pengaruh dari wilayah yang dianggap lebih maju daripada wilayah lainnya yang dianggap kurang maju. Dalam buku ini istilah "Modern Awal" digunakan pula untuk untuk menunjukkan pengaruh Barat di Asia, khususnya Nusantara, yaitu Portugis ("*Estado da India*") lalu "*Verenigde Oostindische Compagnie*" atau Serikat Dagang di Asia milik Belanda. Sekalipun ciri-ciri perdagangannya hampir sama, interaksi Portugis dengan Nusantara tidak seintensif interaksi VOC dengan kekuasaan-kekuasaan di Nusantara. Namun, baik Portugis maupun VOC memiliki kelebihan dalam cara berdagang dibandingkan dengan cara-cara yang ketika itu digunakan di Asia. Oleh karena itu, bab ini dipusatkan pada VOC dan hubungannya dengan Nusantara.

Sejak masa Modern Awal, di sebagian Eropa telah terbentuk *nation-state*.[1] Namun, kalau *nation-state* di abad ke-20 didasarkan pada demokrasi, di masa Modern Awal kekuasaan masih berada dalam tangan kaum aristokrasi dan bersifat otoriter. Bentuk organisasi politik yang dinamakan *nation-state* di masa Modern Awal itulah yang memungkinkan diselenggarakannya perdagangan antarbenua.[2] Melalui kegiatan langsung oleh pihak kerajaan seperti di Portugal, atau melalui dukungan pihak pemerintah seperti di Belanda, memungkinkan terkumpulnya modal, teknologi, dan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan perdagangan besar-besaran itu.

---

1 *Nation-state* menurut definisi Anthony Giddens adalah "suatu tatanan lembaga-lembaga pemerintahan yang memonopoli kekerasan (senjata) yang kekuasaannya mencakup suatu wilayah (bangsa) tertentu. Lihat Anthony Giddens, *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*, London: Polity Press, 1984, hlm. 165–168

2 Istilah lain yang digunakan untuk menyebut perdagangan antara Eropa dan Asia di masa Modern Awal adalah "perdagangan jarak jauh" atau *long distance trade*

Bab II
Jalur Darat dan Jalur Laut

Perdagangan di Asia sudah berawal di masa Portugis dan VOC, bahkan telah ada berabad-abad sebelumnya, baik perdagangan melalui darat (jalan sutra) maupun melalui laut. Ketika Portugis dan VOC tiba di Asia, mereka menemukan suatu dunia yang sangat kaya dan dinamis dengan sistem perdagangan yang sangat ramai. Salah satu ciri yang sangat mencolok dalam kegiatan perdagangan di Nusantara adalah bahwa pelaku perdagangan terbagi dua. Pada satu pihak terdapat para pemilik modal yang terdiri dari para pejabat pemerintah, seperti sultan atau bupati dan syahbandar. Dalam sebuah studi, mereka disebut sebagai *political entrepreneur*.[1] Para penguasa itu tidak melakukan perdagangan itu sendiri, tetapi menyerahkannya kepada ribuan pedagang yang berlayar dari satu tempat ke tempat lain untuk menjajakan barang dagangannya. Oleh seorang ahli sejarah para pedagang ini dinamakan *peddlers* atau para penjaja.[2]

Dengan demikian, dalam masa Modern Awal itu terjadi interaksi dagang antara para penguasa dan para penjajanya di Nusantara dan organisasi-organisasi dagang besar dari Eropa seperti *Estado da India*, dan *East India Company* (EIC) dari Inggris serta *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dari Belanda.

Sebelum masa Modern Awal, wilayah Asia telah menjadi suatu sistem perdagangan tersendiri. Jalur-jalur perdagangan ketika itu mengikat berbagai kota pelabuhan di Timur Tengah dan Asia. Jalur-jalur perdagangan itu tidak saja menjadi urat nadi interaksi ekonomi, tetapi juga interaksi budaya (akulturasi).

Pada dasarnya di Asia dan Timur Tengah, sebelum masa Modern Awal, terdapat dua jalur perdagangan utama, yaitu jalur darat dan jalur laut. Pelayaran niaga melalui darat pada umumnya terutama digunakan oleh para pedagang Cina dan dikenal dengan nama "jalur sutra" karena banyak menyalurkan sutra dari Cina. Jalur dagang itu berawal di Chang An, yang menjadi ibu kota Cina antara abad ke-7 hingga abad ke-13, kemudian melintasi stepa-stepa dan gurun-gurun di Asia Tengah dan Laut Kaspia yang

---

1 Luc Nagtegaal, *Riding the Dutch Tiger. The Dutch East India Company and the North Coast of Java 1680–1743*, Leiden: KITLV Press, 1966

2 J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History*, Bandung: Voorkink-Van Hoeve, 1960

pada suatu ketika dikendalikan oleh bangsa Mongol, lalu ke Mesopotamia dan Parsi. Jalur dagang yang melintasi pedalaman Asia itu juga bercabang-cabang ke wilayah pantai, seperti India, Arab, dan lainnya. Alat angkut utama perdagangan darat ini adalah unta yang bergerak berkelompok (*caravan*). Jalur sutra itu berakhir di pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Laut Tengah, antara lain Antiochia. Dari pelabuhan-pelabuhan itulah komoditas dari Asia, seperti sutra dan rempah-rempah, diteruskan dengan kapal-kapal dagang ke kota-kota pelabuhan di Laut Tengah, seperti Genoa dan Venesia. Kemudian perdagangan itu dilanjutkan oleh para pedagang Barat ke seluruh Eropa.

Perdagangan rempah-rempah dari Nusantara juga melintasi jalur sutra. Pelabuhan-pelabuhan rempah-rempah di Nusantara seperti di Sumatra, Ternate, Tidore, dan Banda menjadi terkenal pertama-tama karena para pedagang Cina itu.[3] Kemudian para pedagang dari Jawa dan Melayu juga menjadi penting dalam jalur sutra itu. Semuanya bermuara di Cina dan diteruskan melalui jalur sutra.

Selain jalur darat, sebelum masa Modern Awal perdagangan antarbenua juga sudah berlangsung melalui laut. Perdagangan dari Nusantara ke Cina terutama dilakukan melalui laut. Namun, para pedagang lainnya dari Timur Tengah dan India sudah berabad-abad memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan. Sampai abad ke-10, jalur perdagangan melalui laut dari Timur Tengah hingga ke Cina dilakukan dalam satu gerakan sejalan dengan embusan angin. Angin musim sangat penting bagi jalur prasarana perdagangan itu. Embusan angin musim yang secara teratur enam bulan sekali berganti arah merupakan mekanisme yang sangat menentukan dalam perdagangan antarbenua. Antara bulan Juli hingga Desember angin musim bertiup dari arah timur (Australia) ke arah barat, dan mulai bulan Januari hingga Juni arah angin itu berubah arah dari Barat ke Australia dan dinamakan "angin barat". Energi alam yang senantiasa dapat diandalkan itu membawa jungku-jungku dagang dari Cina dan Nusantara dan terus ke arah India dan Timur Tengah. Sebaliknya, angin barat membawa para pedagang Timur Tengah dan India ke timur. Gerak angin itu bergantian arah secara teratur dan pasti tetap. Tahun itulah yang memungkinkan jungku-jungku dagang menjelajahi jalur dagang laut tanpa secara berkesinambungan dari timur ke barat dan sebaliknya.

Sejak abad ke-10, pelayaran melalui laut itu tidak lagi berlangsung secara berkesinambungan, tetapi dapat dilakukan secara bertahap dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Perubahan itu disebabkan sejumlah pelabuhan

---

[3] R.Z. Leirissa, "Jalur Sutra: Integrasi Laut-Darat dan Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutra", dalam Ade Kamaluddin cs (eds), *Ternate: Bandar Jalur Sutra*, Jakarta: Yayasan Adikarya, 2001, hlm. 1–10
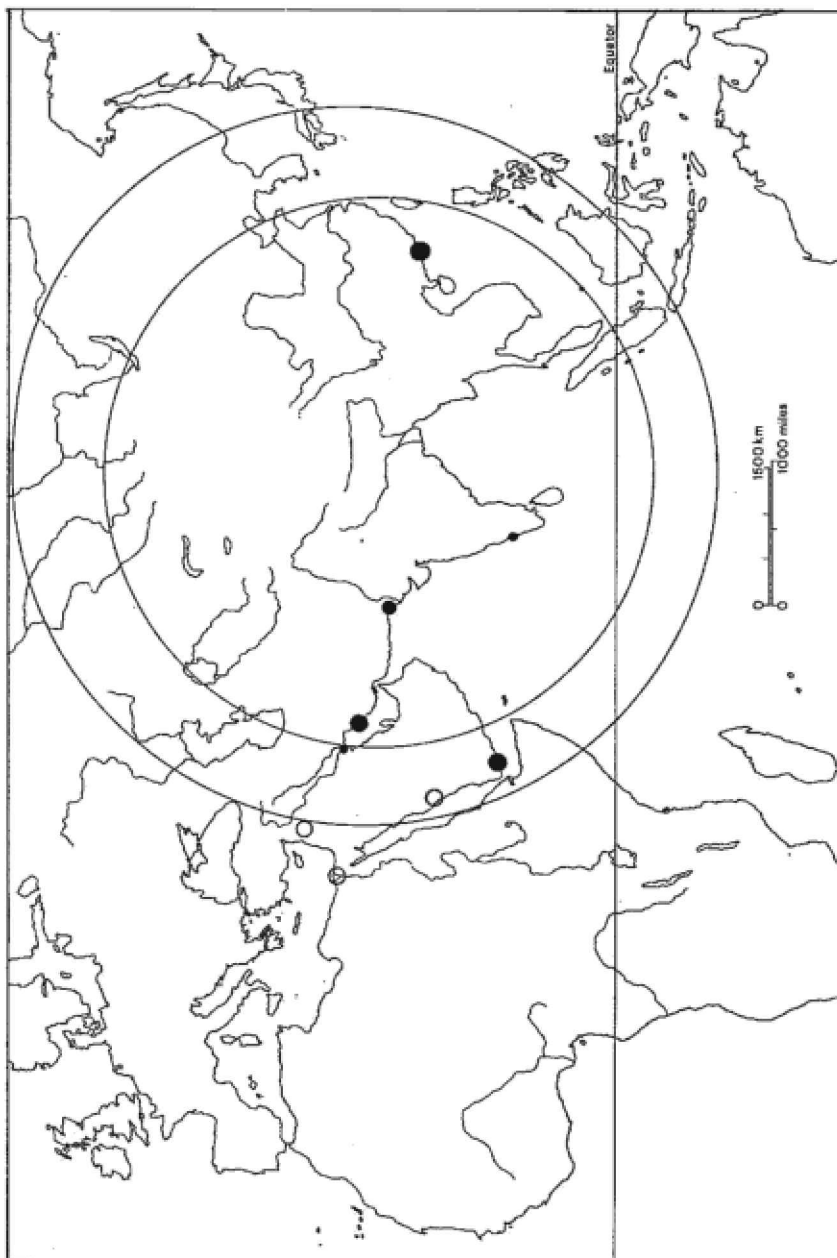
Gambar 2.1 Peta Perdagangan masa Pra-Emporium
(*Sumber:* Chaudhuri, 1989, hlm. 40)

tertentu di jalur pelayaran itu telah berkembang menjadi *emporium* yang memiliki fasilitas dagang (gudang-gudang, penginapan, penukaran uang, makanan, keamanan dan ketertiban, dan sebagainya)[4] sehingga jungku-jungku dagang dari satu *emporium* hanya perlu mengarungi lautan ke *emporium* berikutnya. Contohnya, munculnya Malaka sebagai *emporium* sejak awal abad ke-15 sangat memudahkan perdagangan cengkih sehingga menyaingi jalur sutra. Para pedagang Majapahit cukup membawa cengkih dari Maluku ke Malaka. Dari Malaka, para pedagang India membawa cengkih ke India dan para pedagang Cina membawa cengkihnya ke Cina. Demikian pula dengan komoditas dagang dari Cina, seperti sutra dari India, dapat diperoleh para pedagang yang bersangkutan di Malaka. *Emporium* lain yang penting ketika itu adalah Kalikut di pantai barat India yang jauh lebih tua dari Malaka dengan hubungan tetap dengan pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah, seperti Bandar Abas, Hormuz, dan Aden.[5]

Perdagangan jarak jauh melalui laut itu sudah tentu membawa risiko yang sangat besar karena jungku-jungku dagang dapat diterpa angin kencang yang mengakibatkan gelombang tinggi, atau disita oleh bajak laut. Oleh karena itu, komoditas dagang yang disalurkan melalui prasarana perdagangan laut itu terutama menyangkut komoditas yang mewah dan mahal, seperti sutra dari Cina. Dari Nusantara terutama dikenal ketika itu adalah cengkih dan pala (dari Maluku) dan lada (dari Sumatra dan Banten). Cengkih sudah diperdagangkan jauh sebelum bangsa-bangsa Barat melalukannya. Para pedagang Arab menamakan cengkih dengan istilah "mawar hitam". Pasar rempah-rempah di Timur Tengah yang terbesar ketika itu adalah Istambul. Melalui unta rempah-rempah diteruskan dari Timur Tengah ke Eropa. Jalur perdagangan rempah-rempah melalui Istambul itu mulai menyusut ketika bangsa Portugis menemukan jalur perdagangan melalui Tanjung Harapan.

Karena berada pada jalur perdagangan laut dari Timur Tengah ke Cina, tidak mengherankan kalau agama Islam telah dianut di Nusantara. Namun, sumber agama Islam di Nusantara tidak saja langsung dari Timur Tengah, tetapi bersamaan dengan terbentuknya *emporium-emporium* sepanjang jalur perdagangan itu sejak abad ke-10, sehingga kota-kota pelabuhan di India seperti Kalikut, menjadi sumber agama Islam di Nusantara. Dengan demikian, muncullah di Nusantara sejumlah kota pelabuhan yang penduduknya beragama Islam.[6]

---

[4] *Emporium* berarti pasar, tidak sama dengan *emperium* yang berarti wilayah kekuasaan yang luas

[5] K.N. Chaudhuri, *Trade and Civilization in the Indian Ocean. An Economic History from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge University Press, 1985

[6] Lihat Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, Chiangmai: Silkworm Books, 1988, Jilid I: *The Lands below the Winds*
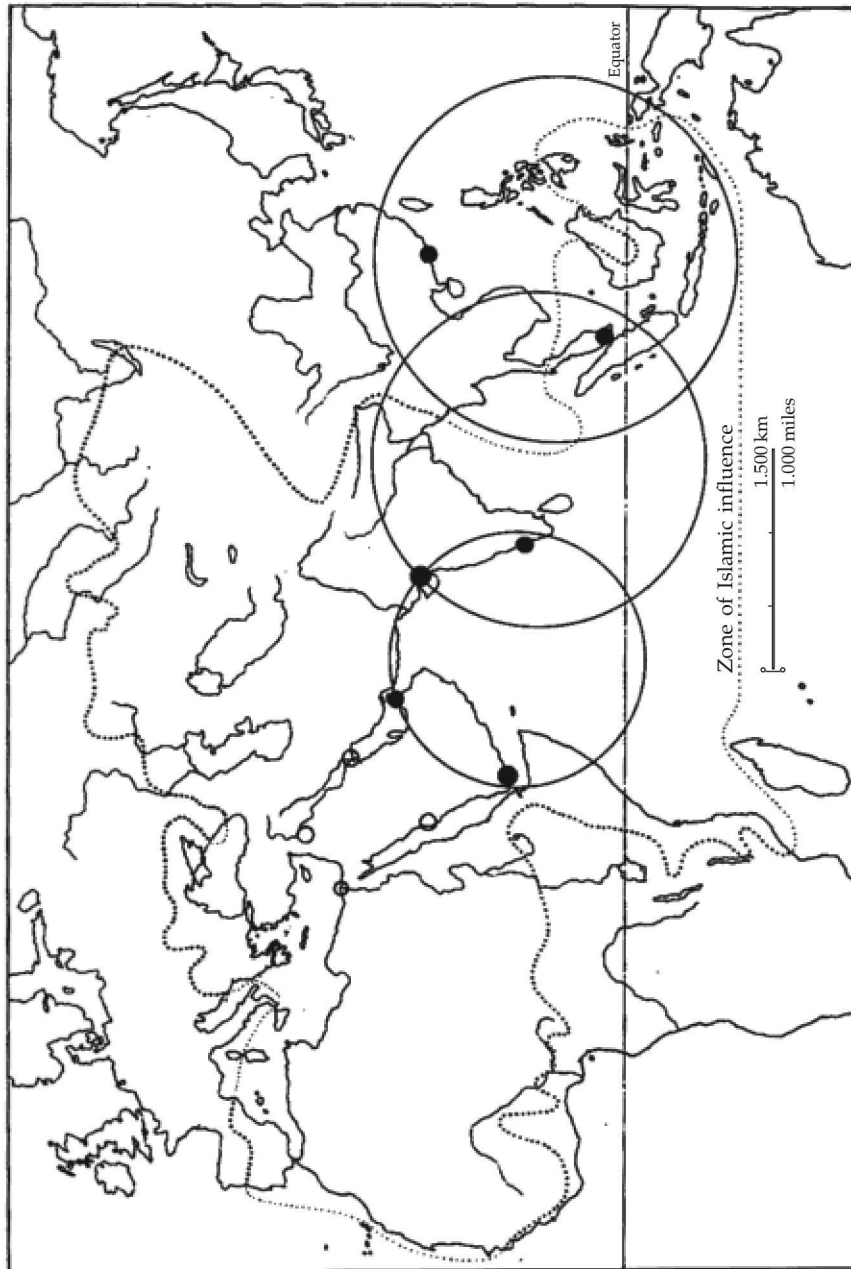
Gambar 2.2 Perdagangan masa Emporium (700–1750)
(*Sumber:* Chaudhuri, 1989, hlm. 41)

Selain kedua sumber tersebut di atas (Timur Tengah dan India), ada pula sumber ketiga, yakni Cina (khususnya dari Mazhab Syafei) yang mendapat pengaruh Islam dari Timur Tengah dan India. Agama Islam dari Cina itu makin menyebar setelah Cheng He mendapat izin dari sultan-sultan Malaka sejak Parameshwara untuk membangun pusat perdagangannya di kota pelabuhan itu dan menjadikannya sebuah *emporium*. Cheng He adalah laksamana terpercaya dari Kaisar Zhu Di atau Yung Le (1402–1424) dari Dinasti Ming di Cina, yang ditugaskan untuk memimpin armada-armada Cina berdagang di Samudra India.[7] Bahkan, ada yang berpendapat bahwa sejumlah armada yang dikoordinasi Cheng He itu pernah berlayar hingga Eropa.[8] Malaka menjadi pusat perdagangan Cheng He antara 1405 hingga 1430-an.

---

[7] Cheng He adalah ejaan Mandarin. Di Singapura masih tetap digunakan Cheng Ho

[8] Wang Tai Peng, "1433: Zheng He's delegation to the papal court of Florance", dalam *Journal of Asian Culture*, No. 30 (Juni 2006), hlm. 78–90. Bahkan ada yang berpendapat bahwa armada-armada itulah yang pertama kali berlayar mengelilingi dunia seabad sebelum Magelhaens (1521). Pendapat itu dikemukakan oleh Gavin Menzies, 1421: *The Year Cina Discovered the World*, Bantam Book, 2003. Lihat komentar atas buku Menzies itu dari R.Z. Leirissa, "The Construction of the Circumnavigation of the World by the Fleets of Cheng He (1421–1423). Notes on Gavin Menzies Book on the Use of Old Maps", dalam Leo Suryadinata (ed). *Chinese Diaspora Since Admiral Zheng He. With Special Reference to Maratime Asia*, Singapore: Chinese Heritage Centre, 2007, hlm. 15–23

Bab III
Perdagangan Antarbenua

A. *Estado da India*[1]

1. Sistem Perdagangan

Dalam masa Modern Awal, bangsa-bangsa Barat mulai memasuki Asia. Dampaknya di Nusantara berkaitan dengan kegiatan perdagangan Portugis dan Belanda. Mengapa bangsa Portugis yang pertama kali memasuki dunia perdagangan Asia? Kenyataan bahwa Portugal tidak memiliki kekayaan agraris sehingga menjadikan laut menjadi sumber penghasilan utama (perdagangan dan perikanan). Kegiatan perdagangan yang pada mulanya hanya terbatas di Laut Tengah mulai berubah menjelang abad ke-15 ketika bangsa Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim.[2] Kapal-kapal layar yang digunakan untuk pelayaran sekitar Laut Tengah mengalami inovasi menjadi *caravel* dengan dua sampai tiga tiang layar yang dapat digunakan untuk lintas benua. Sejalan dengan itu, layar segitiga ("layar tanjung") menggantikan dengan layar segi empat yang kurang efisien. Kemudi kapal yang sebelumnya berbentuk dayung besar, digantikan dengan daun kemudi yang ditempatkan pada buritan dalam air. Kompas mulai digunakan, juga peta *portolan*,[3] dan cara-cara menghitung garis bujur. Adik raja Portugal, Henry The Navigatorlah, dengan sekolah navigasinya, yang meningkatkan pengetahuan mengenai kartografi di Portugal.[4]

---

[1] *Estado da India* (Estate of India) dapat diartikan sebagai *emperium* Portugis di Asia. Bagi Portugis ketika itu istilah "India" sinonim dengan Asia. Sebab itulah perusahaan dagang orang Belanda yang didirikan tahun 1606 dinamakan "Verenigde Oostindische Compagie". Istilah "Oostindie" yang terjemahan harfiah adalah "India Timur" sesungguhnya mengacu pada "Asia Timur". Dalam abad ke-19, istilah "Oostindie" diartikan sebagai Hindia Belanda atau "Indonesia". Sekalipun istilah "India" mengacu pada seluruh Asia, dalam buku ini perhatian hanya dipusatkan pada beberapa kepulauan di Indonesia

[2] Suryadinata (2007), hlm. 33–34

[3] Peta portolan adalah peta yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jalur pelayaran, serta letak pelabuhan-pelabuhan dan perbintangan

[4] Cara menentukan garis lintang baru dipahami oleh para pelaut Eropa sejak akhir abad ke-17 dan merupakan alih teknologi navigasi-astronomi dari Cina

Berbeda dengan Belanda, ketika Portugis mulai mengadakan ekspansi ke Asia belum ada kelas menengah yang menguasai ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan antarbenua itu sepenuhnya dikendalikan oleh raja dan bangsawan. Hanya raja dan para bangsawan yang memiliki modal yang cukup besar untuk mengembangkan teknologi maritim dan membiayai perdagangan antarbenua.

Ada beberapa perbedaan cara perdagangan orang Portugis dengan perdagangan orang Asia. Salah satu ciri lain perdagangan antarbenua dari pihak Portugis yang tidak terdapat pada para pedagang Asia seperti Cina adalah permusuhannya terhadap Islam. Ada dua faktor yang menyebabkan Portugis senantiasa memusuhi Islam dalam masa Modern Awal ini. Pertama adalah perlawanan terhadap Islam di Portugal sejak tahun 713. Sejak itu Benua Iberia (Portugal dan Spanyol) dijajah oleh kekuasaan Islam. Baru sejak 1249 seluruh kekuatan Islam dapat dilenyapkan dari Portugal. Negeri itu untuk kembali dapat disatukan oleh Raja Alfonso III (1248–1279).[5]

Perlawanan terhadap Islam dilanjutkan oleh orang Portugis ketika mereka mengadakan ekspansi. Moroko merupakan wilayah Islam yang oleh Portugis dianggap sebagai potensi yang membahayakan. Oleh karena itu, dengan susah payah dan dalam waktu yang cukup lama Portugis berusaha merebut wilayah itu. Peperangan yang dahsyat itu meningkatkan kebencian antara Portugis pada Islam. Sudah sejak menguasai Moroko mereka menyebut orang Islam dengan istilah "Moor" (dari kata Moroko). Selanjutnya ketika Portugis melakukan ekspansi ke Afrika dan Asia dalam abad ke-16 Islam tetap menjadi musuh mereka dan orang Islam dari Moroko hingga Asia Tenggara disebut "Moor", istilah yang menunjukkan adanya suasana permusuhan dan kebencian seperti yang pernah dialami ketika merebut Moroko.

Faktor kedua penyebab orang Portugis senantiasa bermusuhan dengan Islam di masa Modern Awal ini adalah faktor persaingan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan teknologi maritim, orang Portugis juga mulai menyadari bahwa kekayaan alam Afrika (terutama emas) dan Asia (terutama rempah-rempah) dapat mendatangkan keuntungan yang besar di pasar Eropa. Kebetulan ketika itu Eropa sangat kekurangan emas sehingga permintaannya sangat meningkat. Rempah-rempah yang harganya sangat tinggi di Eropa juga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Faktor ekonomi itulah yang membangkitkan keinginan orang Portugis untuk mengarungi lautan lepas ke Asia.

---

5 A.H. de Oliviera Marques, *History of Portugal*, Impresa nacional-Casa da Moeda, 1991, hlm. 9–21

Ketika itu sebagian besar kota-kota pelabuhan di Afrika dan Asia dikuasai oleh para pedagang Islam. Pengetahuan mengenai jalur perdagangan dan tempat-tempat produksi juga tetap dirahasiakan oleh kekuasaan-kekuasaan Islam. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Portugal untuk (a) mencari jalan sendiri ke Afrika dan Asia, dan (b) melawan kota-kota pelabuhan Islam untuk mendapatkan kekayaan yang mereka dambakan.

Karena Portugis tidak diizinkan melintasi Laut Merah oleh kekuasaan-kekuasaan Islam, para pelaut dan navigator Portugis terpaksa mencari jalan lain. Bartolomeus Diaz menemukan jalan hingga ke Tanjung Harapan, dan Vasco da Gama membuka jalan ke India (1497–1499).[6] Dengan demikian, orang Portugis memasuki wilayah Asia yang memiliki dinamika ekonomi yang sangat tinggi. Namun, persaingan para pedagang Portugis dengan para pedagang Asia sering diwarnai dengan peperangan.[7]

Karena dalam masa Modern Awal di Portugis belum ada kelas menengah (kelas borjuis) yang mengendalikan ekonomi, perdagangan antarbenua Portugis seluruhnya dikendalikan oleh raja dan para bangsawannya. Kelas aristokrasi itulah yang memiliki modal dan menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau wakil raja di Goa selalu seorang bangsawan pula.

Keadaan itu tidak banyak berbeda dengan di Nusantara di mana ekonomi (perdagangan) juga terkait dengan politik (kekuasaan). Di Jawa misalnya, perdagangan berada dalam tangan para penguasa lokal. Seorang ahli sejarah menamakan menyatunya politik dan kekuasan ekonomi dalam tangan kelas penguasa itu dengan *political entrepreneur*.[8]

Perbedaan lain yang mencolok antara Portugis dan Asia adalah bahwa para pedagang Asia tidak memiliki jaringan organisasi yang luas yang mencakup wilayah kegiatan yang luas. Tiap-tiap pedagang di Asia bersama keluarga mereka berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, sarana perdagangan laut, yaitu jungku, dari para pedagang Asia tidak dipersenjatai. Perkecualiannya adalah para pedagang Cina di masa Cheng He (1405–1430-an). Cheng He memimpin armada-armada dagang milik kaisar Cina yang dikonsentrasikan di Malaka. Armada-armada dagang Cheng He itu dilengkapi dengan tentara dan persenjataan yang lengkap. Selain itu, dalam armada-armada itu terdapat

---

6 E.G. Ravenstein, *A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama, 1497–1499*, New Delhi-Madras: Asian Educational Services, 1995

7 C.R. Boxer, *The Portuguese Seaborn Empire 1415–1825*, London: Hutchinson & Co Publ. Ltd., 1969

8 Nagtegaal, 1996

pula ahli-ahli navigasi, perbintangan, dan pemetaan. Kemampuan orang Cina dalam teknologi navigasi-astronomi itu dalam abad ke-15 ternyata jauh lebih maju daripada orang Barat, seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Bahkan, menurut penelitian, ada kemungkinan besar orang Barat yang mulai mengarungi lautan ke Asia dalam abad ke-16 itu mendapat pengetahuan dari orang-orang Cina yang mengajarkannya kepada para pembuat peta dan ahli navigasi Italia.[9]

Kapal-kapal dagang Portugis yang besar (*Nao*) dilengkapi dengan tentara dan senjata ringan (senapan) dan berat (meriam). Kota-kota dagang yang dikuasai Portugis, yang membentang dari Sofala di pantai Afrika Timur hingga Maluku, dilengkapi dengan benteng yang terbuat dari batu (*fortelessa*) sehingga terjadi pemisahan antara penduduk setempat dan orang Portugis dalam benteng-benteng itu. Sama halnya dengan perdagangan Cina pada masa Cheng He, strategi dagang Portugis adalah sentralistis. Kegiatan misi Katolik pun didukung oleh Vice Roy di Goa sehingga di setiap kota benteng terdapat sebuah gereja. Oleh karena itulah kehadiran Portugis di Asia dilambangkan dengan "benteng dan gereja" atau dalam bahasa Portugis *"fortelessa e i greja"*.

Strategi perdagangan Portugis adalah membangun suatu pusat administrasi yang berhubungan dengan benteng-bentengnya. Oleh karena itu, setelah memasuki Asia, pada tahun 1510, Laksamana de Albuquerque merebut Goa dari kerajaan Bijapur di pantai barat India untuk dijadikan pusat administrasi perdagangan Portugis. Pemimpin perdagangan Portugis di Asia yang berkedudukan di Goa bergelar "Vice Roy" atau wakil raja. Dari Goa, perdagangan di sekitar Laut Arab, Teluk Persia, dan Samudra Hindia dapat didominasi oleh Portugis melalui kapal-kapal dan benteng-bentengnya. Untuk mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara, pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque merebut *emporium* Malaka yang berada di bawah kesultanan Malaka.

Selama di tangan Portugis (1511–1642), Malaka kembali marak sebagai pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Seorang pegawai Portugis di Malaka yang bernama Tomé Pires,[10] yang terkenal dengan buku *Suma Oriental* itu (1515), menulis mengenai Malaka sebagai berikut:

[9] Lihat artikel dari Wang Tai Peng dalam *Journal of Asian Culture*. Lihat catatan no. 9

[10] Tomé Pires tiba di Malaka dari Lisabon pada tahun 1511. Ia dijadikan penulis dan apoteker di Malaka. Pada tahun 1513 ia mengikuti armada Portugis ke Malaka. Sekembalinya di Malaka ia menulis buku tersebut. Bahan-bahan dari wilayah lain di Nusantara yang tidak dikunjunginya sendiri diperolehnya dari para pelaut Portugis lainnya di Malaka. Setelah menulis buku itu dan menerbitkannya (1515) ia diutus bersama beberapa orang ke Cina. Akan tetapi, perutusan Portugis itu ditangkap di Cina dan dibunuh, termasuk Tomé Pires

"Tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka, juga tidak ada tempat lain di mana orang memperdagangkan komoditas yang demikian halus dan mahal. Komoditas dari seluruh dunia Timur ada di sini; komoditas dari seluruh dunia Barat ada di sini. Pada akhir musim angin orang bisa mendapatkan apa saja yang dicari dan kadang-kadang lebih dari yang dicari".[11]

2. Sistem Monopoli

a. Sunda Kalapa

Setelah menguasai Malaka, de Albuquerque merencanakan untuk mengirim tiga armada untuk membangun monopoli Portugis. Dua armada berhasil dikirim, yaitu ke Maluku (untuk mencari cengkih) dan ke Sunda Kalapa (untuk mencari lada). Namun, armada yang rencananya akan dikirim ke Timor[12] untuk menegakkan monopoli Portugis atas kayu cendana tidak pernah dikirim karena kekurangan kapal.

Armada yang dikirim ke pelabuhan Sunda Kalapa terdiri dari empat kapal layar yang dipimpin oleh de Alvin.[13] Sunda Kalapa adalah sebuah pelabuhan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Laporan lengkap yang pertama yang kita miliki mengenai Sunda Kalapa berasal dari buku Tomé Pires (*Summa Oriental*) yang ikut dalam armada tahun 1513 itu.[14]

Pires menamakan kerajaan Pajajaran dengan istilah "Sunda". Wilayah kekuasaannya meliputi Banten (di sebelah timur), Sungai Cimanuk (di sebelah barat), dan di selatan berbatasan dengan *Dayeuh* atau ibu kota Pajajaran (di sekitar Bogor sekarang). Pires maupun para penulis Portugis yang sezaman membuat perbedaan yang jelas antara Sunda dan Jawa, bahkan ada yang berpendapat bahwa Sunda adalah sebuah pulau tersendiri terpisah dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Tampaknya gambaran yang diberikan oleh para penulis Portugis itu berasal dari penduduk setempat. Agama yang dianut penduduk Sunda tidak berbeda dengan di Jawa, yaitu agama Hindu.

Sejak masa Cheng He Sunda berdagang dengan Malaka. Pires menulis:

"Sunda memiliki beras untuk dijual sampai sepuluh jung setiap tahun, sayuran yang tidak terhingga macamnya, daging yang tak terhitung, celeng, kambing, domba, dan sapi dalam jumlah besar, memiliki anggur serta buah-buahan. Sunda sama kayanya dengan Jawa. Orang Sunda sering pergi ke Jawa untuk menjual beras dan bahan-bahan makanan, dan setiap tahun dua atau tiga jung

---

11 Boxer, 1969, hlm. 42

12 Arend de Roever, *De Jacht op Sandelhout. De VOC en de Tweedeling van Timor in de Zeventiende Eeuw,* Disertasi Universitas Leiden, 2002, hlm. 105–106

13 Adolf Heuken, S.J., *Sumber-sumber Asli Sejarah Jakarta. Jilid I*, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1999, hlm. 29–42

14 *Ibid*.

dayang dari Malaka ke Sunda untuk mengangkut budak belian, beras, dan lada. Setiap tahun banyak *pangajava*[15] dari Sunda ke Malaka dengan membawa barang-barang dagangan tersebut, dan dari sana mengangkut barang-barang berikut ke Sunda ..." (terutama berbagai jenis kain).

Armada Alvin tersebut datang ke Sunda Kalapa atas permintaan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa, yang merasa terancam keamanannya oleh Cerebon yang telah menganut Islam. Ia minta agar Portugis membangun benteng di wilayahnya untuk menghindari bahaya tersebut, dan sebagai imbalan Portugis akan mendapat prioritas dalam membeli lada.

Berita kedua mengenai Sunda Kalapa berasal dari Duarte Barbosa yang mengunjugi Sumatra dan Malaka pada tahun 1517. Dalam bukunya ia menulis:

> .... Kerajaan lain, yang bernama Sunda karena ada kota dengan nama sama, yang terletak pada posisi empat dan sepertiga derajat ke arah siang hari. Dan di kerajaan itu terdapat pula lada yang tidak akan habis .... Setelah melewati Pulau Sumatra menuju ke arah Jawa, terdapat Pulau Sunda, tempat banyak lada yang bermutu baik tumbuh. Mempunyai raja sendiri yang katanya ingin patuh kepada raja Portugis. Dari sinilah banyak dimuat budak belian untuk dibawa ke Tiongkok.[16]

Pihak Portugis tampaknya menyambut permintaan raja Sunda itu. Pada tahun 1522 sepupu Alfonso de Albuquerque yang menggantinya sebagai kapitan Malaka, yaitu Jorge de Albuquerque, mengirin armada kedua yang dipimpin Amrique Leme. Tugas Leme adalah membuat sebuah perjanjian perdagangan dan persahabatan dengan Prabu Surawisesa dan menetukan tempat yang terbaik untuk membangun benteng yang diminta oleh raja Sunda itu.[17] Setelah membuat perjanjian Sunda-Portugis itu, raja Sunda mengirim tiga orang pejabat kerajaan, yaitu Paduka Tumenggung, Sang Adipati, dan Bendahara, untuk mengantar Amrique Leme ke tempat yang disediakan untuk membangun benteng. Dalam naskah perjanjian Sunda-Portugis itu tertulis. "Pada tanggal ini (21 Agustus 1522) pada tempat benteng akan dibangun, kami menegakkan sebatang *padrao* [baca: padrang] dari batu ... di kawasan yang disebut Kalapa … dengan lambang raja, tuan kami, dengan sebuah inskripsi ....[18]

---

[15] Pangajava = "kapal perang yang panjang dan dangkal", Heuken, *loc. cit*, hlm. 39, catatan

[16] Heuken, Jilid I, 1999, hlm. 43

[17] *Ibid.*, hlm. 47–58

[18] Orang Portugis sering menanam *padrao* di tempat yang dianggap milik rajanya. Pada tahun 1918 ditemukan *padrao* [baca padrang] itu di pojok Jalan Kali Besar Timur I-Jalan Cengkeh (Jakarta). Benda itu kini disimpan di Museum Nasional Jakarta
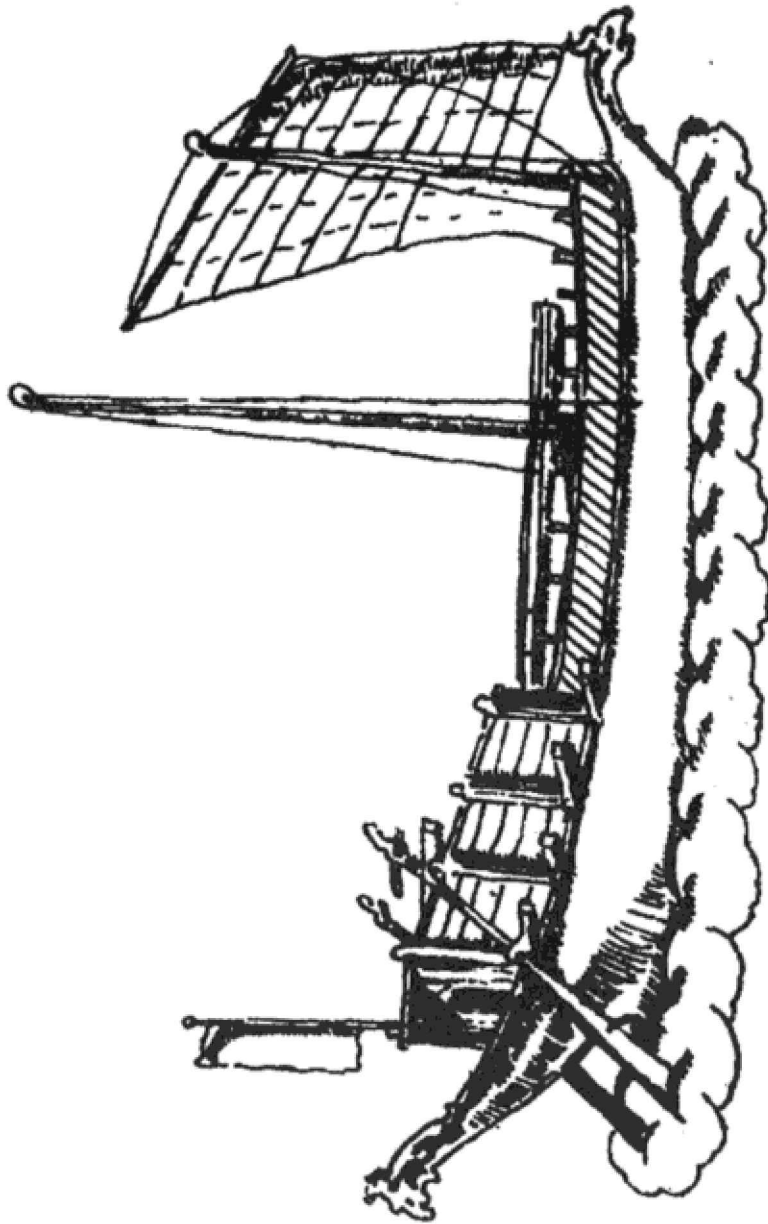
Gambar 3.1 Sebuah lanehara dari Sunda Kalapa
(*Sumber:* Heuken, 1991, hlm. 45)

Namun, benteng tersebut tidak pernah dapat dibangun dan monopoli tidak pernah dilaksanakan. Rupanya Demak mengetahui niat Portugis itu, dan setelah merebut Banten (Bandar Sunda) pada tahun 1526, diputuskan untuk mengirim pasukan untuk mencegahnya. Pasukan itu dipimpin oleh Fatahilah (Faletehan) yang tiba di Sunda Kalapa beberapa hari sebelum armada ketiga dari Portugis tiba di kota pelabuhan Sunda itu.[19] Pasukan Demak itu diperkuat oleh pasukan Cerebon dan pasukan Banten.

Armada Portugis yang ditugaskan membangun benteng tersebut dipimpin oleh Fransisco de Saa yang juga direncanakan menjadi kapten benteng itu. Namun, ketika de Saa memasuki Teluk Jakarta pada akhir bulan November 1526, armadanya diceraiberaikan oleh angin topan yang berlangsung beberapa hari. De Saa dan sejumlah kapalnya dapat menghindar dari topan itu. Akan tetapi, sebuah kapal dengan pimpinan Coelho yang disertai dua kapal kecil lainnya ditiup oleh topan itu ke arah Sunda Kalapa. Sebuah kapal kecil (jenis *brigantine*) terdampar di pantai dan 30 orang awaknya dibunuh oleh pasukan Cerebon.

De Saa berhasil membentuk armada lainnya dan bertolak kembali ke Sunda Kalapa. Namun, pasukan Faletehan berhasil menghalangi pendaratan pasukan Portugis itu. De Saa terpaksa kembali ke Malaka. Pada tahun 1527 Malaka mengirim armada lain untuk membangun sebuah Sunda Kalapa sesuai perjanjian 1522. Namun, armada itu tidak pernah sampai ke tujuan karena awak kapal armada itu memberontak dengan alasan gaji yang terlalu kecil.[20]

Dengan demikian, Portugis tidak pernah berkuasa di kerajaan Sunda dan Sunda Kalapa. Akan tetapi, Portugis dari Malaka masih tetap berdagang dengan Sunda Kalapa dan Banten hingga pertengahan abad ke-16. Selama itu pula nama Sunda Kalapa tetap dipertahankan. Nama Jayakarta[21] baru

---

[19] Orang Portugis menulis nama itu sebagai Faletehan. Nama itu pertama kali muncul dalam buku seorang penulis Portugis yang bernama Joao de Barros. Lihat Heuken (1999), Jilid I, hlm. 65–66

[20] Selain de Barros, persitiwa De Saa itu dilaporkan juga dalam buku-buku dari Lopez Castanheda, Diogo do Couto, dan Gaspar Correa. Lihat Heuken, *Sumber-sumber Sejarah*, 1999, hlm. 62–76. Menurut seorang saksi mata yang berlayar bersama de Saa, walau tidak berhasil mendarat di Sunda Kalapa, panglima armada itu sempat menanam dua *padrao*, salah satunya di muara sungai Cigede (muara dari sungai Cisadane) pada tanggal 30 Juni 1527. Keterangan itu diberikan oleh Joao de Lisboa dalam bukunya *Livro de Marinharia* yang diterbitkan pada awal abad ke-15, Heuken, 1999, Jilid I, hlm. 78–81

[21] Sampai pertengahan abad ke-16 nama yang lebih dikenal tetap Sunda Kalapa, setelah itu baru Jayakarta (*Xacatara*, menurut ejaan Portugis) menjadi lebih populer. Lihat buku De Barros seperti yang dikutip oleh Heuken, 1999, Jilid I, hlm. 77–78

menjadi dominan sejak pertengahan abad ke-16. Belandalah yang dalam tahun 1619 berhasil merebut tempat itu dan menjadikannya pusat perdagangan VOC dengan nama Batavia.

b. Maluku

Armada lain yang dikirim oleh Alfonso de Albuquerque untuk merebut daerah-daerah rempah-rempah dilakukan pada tahun 1512. Armada yang terdiri atas tiga kapal layar itu dipimpin oleh Antonio de Abreu (salah satu kapal yang memuat perbekalan tenggelam di perairan Madura). Tujuan utama ekspedisi ke Maluku itu untuk membangun monopoli Portugis atas perdagangan cengkih.[22] Armada itu pertama-tama tiba di kepulauan Banda, yaitu pusat produksi pala dan fuli (bunga pala). Setelah satu kapal layar lagi tenggelam, sisa armada itu tiba di Ternate pada tahun itu juga. Dengan susah payah, karena kapal-kapalnya karam, ekspedisi pertama itu tiba di Ternate dan berhasil mengadakan hubungan dengan Sultan Aby Lais (meninggal 1522). Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkih bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Ia malah mengirim sebuah surat kepada Raja Dom Manuel dari Portugal dan kepada Kapitan Malaka dengan permintaan yang sama.[23]

Hubungan dagang yang tetap baru dapat dirintis oleh Antonio de Brito. Hubungannya dengan Sultan Ternate yang masih kanak-kanak, Kaicili Abu Hayat, dan pengasuhnya Kaicili Darwis, berlangsung sangat baik. Pihak Ternate tanpa ragu mengizinkan De Brito membangun benteng pertama Portugis di Pulau Ternate (*Sao Joao Bautista* atau *Nossa Seighora de Rossario*) pada tahun 1522. Penduduk Ternate menggunakan istilah "Kastela" untuk benteng itu, bahkan kemudian benteng itu lebih dikenal dengan nama Gamalama. Sejak tahun 1522 hingga tahun 1570 terjalin suatu hubungan dagang (cengkih) antara Portugis dan Ternate. Sudah tentu tidak jarang terjadi konflik antara para penguasa Ternate dan pihak Portugis yang senantiasa mencoba mendominasi Ternate.[24]

---

[22] Suatu hal yang menarik adalah keterangan dari Fransiscus Xaverius, rohaniwan dari Ordo Jesuit yang berada di Ternate dalam tahun-tahun 1546 dan 1547. Ia mengatakan bahwa ia mendapat keterangan dari penduduk setempat bahwa istilah Maluku berarti "kepala kerbau" dan indentik dengan Ternate. Seorang penulis Portugis, Conto, dan penulis Spanyol Argensola, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan itu adalah "kepala dari kerajaan yang besar". Lihat Leonard Y. Andaya, *"The World of Maluku". Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1993, hlm. 47. Jika diperhatikan sistem empat kerajaan di Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), ungkapan itu lebih tepat ditafsirkan sebagai pemimpin dari Maluku Kie Raha

[23] *Ibid.*, hlm. 115–116

[24] *Ibid.*, hlm. 117–132

Tidak lama setelah orang Portugis mempunyai hubungan tetap dengan Ternate, orang Spanyol, yang telah menguasai Manila, tiba pula di Maluku dan membuat persekutuan dengan Kerajaan Tidore untuk kepentingan dagang cengkih pula. Akibat kehadiran kedua kekuasaan Barat itu di Maluku, dualisme antara Ternate dan Tidore yang senantiasa telah ada di sana makin meningkat tajam dan tidak jarang disertai peperangan. Sebaliknya, sultan Tidore juga mengizinkan Spanyol membangun sebuah benteng di Pulau Tidore.

Konflik yang sering terjadi antara Portugis dan sultan Ternate itu akhirnya meluas menjadi peperangan yang besar. Awal peperangan itu adalah pembunuhan Sultan Khairun (1537–1570) secara khianat oleh seorang prajurit Portugis di benteng Gamalama. Pengkhianatan dari pihak Portugis itu membangkitkan perlawanan Sultan Baabullah (1570–1584), putra Khairun. Baabulah mengepung benteng Portugis tersebut selama lima tahun. Selain itu, Baabullah juga berhasil mengerahkan daerah-daerah lainnya di Maluku (kecuali Tidore) untuk melawan Portugis. Wilayah-wilayah yang melawannya, seperti Bacan, dihancurkannya. Berkali-kali ia mengirim armada-armada ("kora-kora") Ternate ke kepulauan Ambon untuk menyerang desa-desa yang penduduknya telah beragama Kristen (Katolik). Benteng Gamalama dikepungnya secara ketat sehingga tidak seorang Portugis pun dapat memasuki atau meninggalkannya. Sejak pemerintahan Baabullah, Ternate menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Maluku. Hak monopoli Portugis dihapus, dan Ternate dijadikan pelabuhan bebas. Para pedagang Cina, Jawa, Melayu, dan lainnya, dengan bebas berdagang di Ternate. Sementara itu, benteng Gamalama yang dikepung rapat sejak tahun 1570 itu menyebabkan penghuni benteng kekurangan makanan serta berjangkitnya penyakit. Bantuan dari Malaka tidak pernah tiba lagi karena sejak tahun 1580 Portugal telah disatukan dengan Spanyol yang memusatkan kekuasaan dan perdagangannya di Manila. Setelah mengepung benteng Gamalama selama lima tahun, pada tahun 1575 Baabullah mengizinkan orang-orang Portugis yang telah sangat lemah itu meninggalkan benteng tersebut.[25] Baabullah lalu menjadikan benteng Portugis itu sebagai istananya.

Sementara itu, Baabullah berhasil menyatukan seluruh Maluku Utara dalam kekuasaannya. Ternate menjadi pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi oleh para saudagar mancanegara, dan menyebabkan sultan menjadi kaya raya. Francis Drake, seorang petualang Inggris yang pernah singgah di Ternate, mengatakan bahwa ia diterima dalam sebuah balai yang dibangun dalam benteng Portugis itu. Balai itu dihiasi dengan berbagai jenis kain yang mahal-mahal dan di lantainya ditebar sebuah permadani yang

---

[25] Lihat Andaya, 1993, hlm. 123–143

indah dan sangat besar. Orang Inggris menyebut Baabullah sebagai "Raja Atas Seribu Pulau", dan seorang sejarawan VOC yang bernama F. Falentijn menulis bahwa kekuasaan sultan Ternate meliputi 72 buah pulau.[26] Selama masa Baabullah, Maluku Utara sama sekali tidak berada di bawah kekuasaan Barat, bahkan masa itu adalah masa keemasan Maluku Utara.

Tentara dan pedagang Portugis dari Ternate itu melarikan diri ke Ambon. Sejak pertengahan abad ke-16, Ambon dan sekitarnya baru mulai menghasilkan cengkih dalam jumlah yang cukup untuk diperdagangkan. Daerah produksi utamanya adalah di jazirah Hitu (bagian dari Pulau Ambon)[27] dan Hoamoal (jazirah timur dari Pulau Seram). Cengkih diangkut ke Malaka oleh para pedagang Hitu dan Banda, serta para pedagang Jawa dan Melayu.

Ketika itu Portugis dari Ternate juga berusaha terutama membeli cengkih dari Hitu dan Hoamoal, tetapi upaya itu ditentang oleh masyarakat Ternate dengan menempatkan seorang pejabat dari keluarga Tomagola untuk menguasai Hoamoal dan sekitarnya. Hitu pun akhirnya menolak berhubungan dengan Portugis yang terpaksa harus memindahkan kantor dagangnya dari Hitu ke Hatiwe di pantai selatan daerah tersebut. Sebaliknya, Hitu mencoba mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan Demak dan Japara di Jawa dengan imbalan cengkih. Dengan demikian, sejak itu pula agama Islam mulai menyebar di jazirah Hitu dan Hoamoal.[28]

Sejak pertengahan abad ke-15 pula jazirah Leitimor (Pulau Ambon) telah menjadi pusat penyebaran agama Katolik di wilayah itu. Ketika Franciscus Xaverius mengunjungi Ambon pada tahun 1546 ia berhasil meyakinkan pimpinan Ordo Jesuit di Portugal bahwa Ambon dan sekitarnya dapat dijadikan daerah misi yang subur. Selama sekitar 50 tahun berikutnya, desa-desa yang penduduk di Jazirah Leitimor (Pulau Ambon), pulau-pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut yang belum beragama Islam menjadi pemeluk Kristen. Sejak itu pulau-pulau tersebut terbagi dua, yaitu penduduk dengan struktur sosialnya bercirikan Patalima[29] menganut Islam dan yang bercirikan Patasiwa menganut Kristen. Di setiap desa Kristen didirikan gereja dan para rohaniwan selalu disediakan oleh Ordo Jesuit dari Portugal untuk mengasuh jemaah itu.

---

[26] *Ibid.*, hlm. 136

[27] Pulau Ambon terdiri dari dua jazirah, yaitu jazirah Hitu dan jazirah Leitimor

[28] Ch. F. van Fraassen, *Maluku. Ternate en de Wereld van de Vier Bergen*, Utrecht, Moluks Historische Museum, 1999, hlm. 37–40

[29] Patalima dan Patasiwa adalah dua struktur sosial yang pada umumnya terdapat di Maluku. Struktur itu pada mulanya tidak terkait dengan agama karena Ternate yang Islam adalah Patalima dan Tidore yang juga Islam adalah Patasiwa.
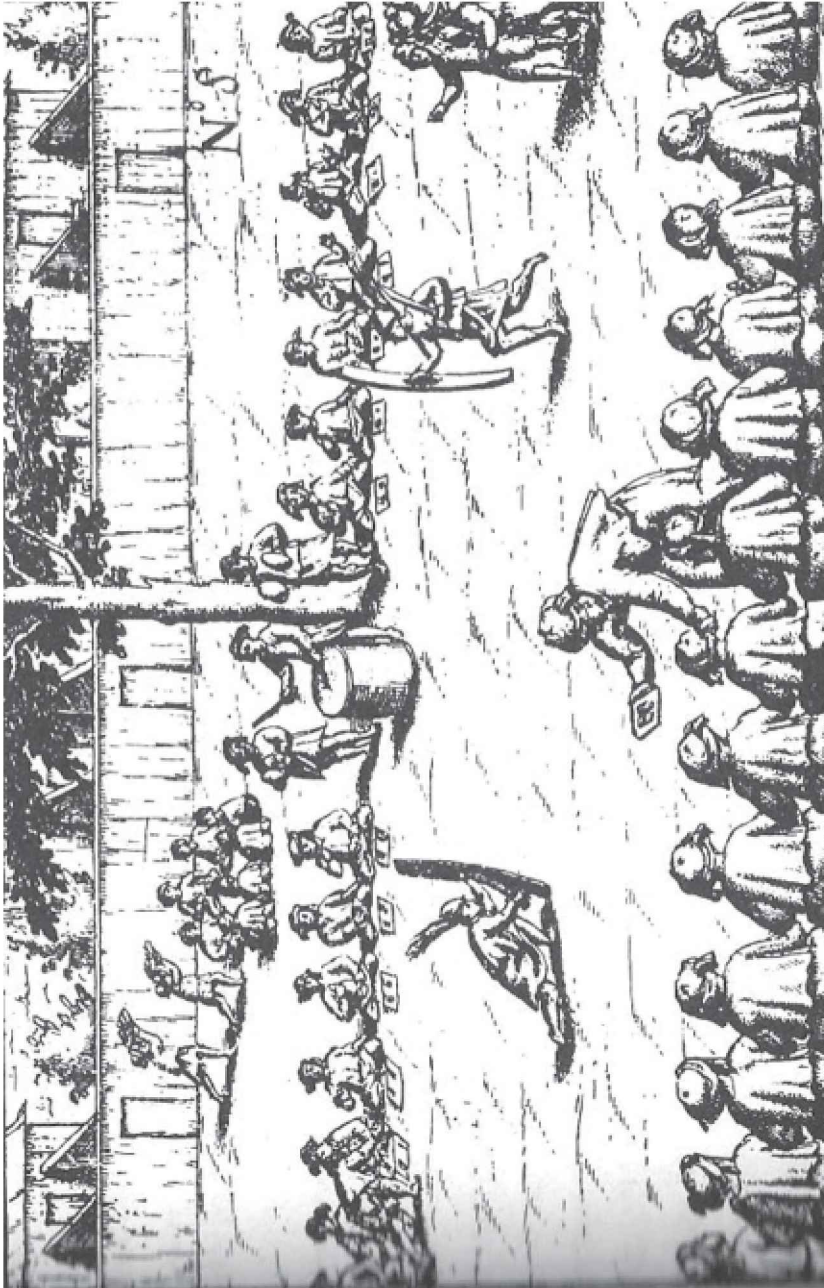
Gambar 3.2 Sebuah upacara di Banda, 1599
(*Sumber*: Relic, 1988, hlm. 43)

Sejak pertengahan abad ke-16 keadaan yang tidak serasi memang sudah terdapat di kepulauan Ambon ketika itu. Desa-desa yang beragama Islam mengakui hegemoni Ternate dan desa-desa yang beragama Kristen bergantung pada kaum misionaris Portugis, dan sejak itu di wilayah ini dualisme antara Patalima dan Patasiwa juga meluas menjadi dualisme antara Islam dan Kristen. Dualisme itu berubah menjadi konflik sejak Baabullah melancarkan perang terbuka terhadap Portugis. Armada-armada kora-koranya setiap tahun melancarkan serangan-serangan terhadap desa-desa Kristen di kepulauan itu.[30] Para misionaris tidak terlindungi kecuali kalau sekali-sekali tiba armada Portugis. Untuk melindungi dirinya para misionaris itu mengajukan permohonan pada wakil raja di Goa agar di Ambon dibangun sebuah benteng pula. Benteng itu selesai dibangun pada tahun 1571 dan diberi nama *Nossa Seighora de Anunciada*. Sebagian orang Portugis yang melarikan diri dari Ternate pada tahun 1575 mendapat perlindungan di benteng itu. Keadaan perang itu berlanjut selama masa pengganti Baabullah, yaitu Sultan Said al-din Barakat Syah (1584–1606). Keadaan yang sangat memprihatinkan di kepulauan Ambon itu berlangsung hingga VOC memasuki kepulauan itu dalam tahun 1606 dan mengadakan hubungan persahabatan dengan Ternate.

c. Nusa Tenggara Timur

Seperti dikatakan di atas, pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque merencanakan tiga armada untuk merebut monopoli perdagangan di Maluku, Jawa Barat, dan Timor. Armada ke Timor ditunda keberangkatannya sampai tiga kali karena ketika itu Portugis kekurangan kapal-kapal layar. Orang Portugis pertama yang sampai di Nusa Tenggara Timur adalah para rohaniwan dari Ordo Dominikan yang mendirikan sebuah benteng di sebuah pulau yang mereka namakan Solor. Selain melaksanakan tugas utamanya, yaitu menyebarkan agama Katolik, para rohaniwan itu juga berdagang kayu cendana untuk membiayai kegiatan utama itu.

Kegiatan misi Ordo Dominikan itu cukup berhasil. Separuh dari penduduk Pulau Solor yang menamakan dirinya kaum Demon menganut agama itu, sedangkan paruh lainnya yang dinamakan Paji yang telah beragama Islam menolaknya. Konflik tidak jarang terjadi antara kedua kelompok itu.

---

[30] Perang yang berkobar di Pulau Saparua masih terkandung dalam "kapata" atau lagu-lagu yang mengandung cerita sejarah. Beberapa di antaranya telah diinventarisasi oleh Dra. H. Maryam R.L. Lestaluhu, *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*, Jakarta, 1987

Pohon cendana hanya tumbuh di satu pulau, yaitu di Timor. Selama berabad-abad sebelum kedatangan Portugis kayu cendana telah diperdagangkan ke Cina. Para pedagang Cina, Jawa, dan Melayu berlomba-lomba mengikat persahabatan dengan raja-raja di Pulau Timor untuk mendapatkan bahan yang sangat berharga di Cina itu. Para rohaniwan Portugis di Solor setiap tahun menjual kayu cendana ke Malaka untuk diteruskan ke Cina. Kadang-kadang-kalau ada kapal, perdagangan langsung diadakan dengan Makao.[31]

Keberhasilan para rohaniwan Katolik dalam perdagangan kayu cendana itu menyebabkan Portugis mengeluarkan pernyataan bahwa kayu cendana adalah monopoli Portugis. Dengan sendirinya ketentuan itu tidak pernah dapat ditegakkan. Akan tetapi, pada tahun 1613 VOC berhasil merebut benteng para rohaniwan di Solor itu. Selanjutnya VOC mengadakan hubungan persahabatan dengan para raja di Pulau Timor bagian barat. Di bagian utara orang Portugis berkuasa melalui para raja wilayah itu.

Sekalipun VOC akhirnya menguasai Malaka pada tahun 1646, perdagangan Portugis di Pulau Timor tidak berhenti. Hubungan dagang Portugis dan raja-raja Timor bagian utara terus dilanjutkan melalui Makao. Dominasi Portugis dalam perdagangan kayu cendana itu tetap berlanjut sekalipun VOC sempat menggalang kerja sama dengan raja Kupang dan membangun sebuah benteng di sana. Keadaan itu akhirnya menimbulkan konflik terbuka dengan Portugis. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat di pegunungan Molo pada tahun 1569 VOC dan raja-raja yang mendukungnya dihancurkan sama sekali. Selanjutnya perdagangan cendana dikendalikan melalui Makao. VOC tetap bertahan di Kupang bukan untuk menyaingi Portugis dalam perdagangan cendana, melainkan untuk mencegah Portugis masuk kembali ke Ambon dan Maluku dari Timor.[32]

Apakah dampak dari kehadiran Portugis di Nusantara? Paling kurang dapat disebut tiga aspek kehidupan di Nusantara yang mengalami perubahan karena bersentuhan dengan kegiatan Portugis, yaitu perubahan ekonomi, khususnya rempah-rempah, agama, serta seni dan kuliner.

Mengenai aspek ekonomi khususnya rempah-rempah, yang paling menonjol adalah cengkih dan pala (serta fuli) yang oleh orang Eropa dinamakan *"fine spices"* (rempah-rempah yang halus). Cengkih adalah istilah Melayu yang berasal dari bahasa Mandarin, *zhi gia*, atau *zhen ga* dalam dialek Kanton.[33] Istilah ini mungkin mulai digunakan sejak para pedagang yang

---

[31] Arend de Roever, 2002

[32] *Ibid.*

[33] Anthony Reid, Jilid II, 1988, hlm. 3, 4

datang dari Cina di Maluku antara pertengahan abad ke-14 hingga awal abad ke-15. kemudian sejak Cheng He berada di Malaka, perdagangan tidak lagi dilangsungkan antara Cina dan Maluku, tetapi antara Maluku dan Malaka. Peran para pedagang Jawa dan Melayu dalam perdagangan rempah-rempah antara Maluku ke Malaka sangat menentukan.

Cengkih adalah buah pohon *Szygium aromaticum* atau *Caryophullus aromaticum* dan pala (serta fulinya) berasal dari pohon *Myristica fragnas* yang ketika itu hanya tumbuh di kepulauan Banda.[34]

Lada atau *Piper nigrum* (pala hutan) berasal dari Kerala (India Selatan) yang mungkin sekali sejak abad ke-14 telah tersebar ke Sumatra dan Semenanjung Malaya. Jika cengkih dan pala pada awalnya tumbuh liar di hutan, lada sejak awal harus ditanam dan dipelihara oleh petani dengan cermat. Karena berat (berair) dari segi volume, lada lebih banyak diekspor dibandingkan cengkih dan pala yang halus dan kering.

Sejak awal abad ke-15, rempah-rempah tersebut mulai menjadi primadona dalam ekspor dari Nusantara. Sejak Cheng He, para pedagang Jawa dan Melayu mengangkut rempah-rempah itu ke Malaka. Pasar yang paling penting bagi rempah-rempah dari Nusantara adalah Cina dan India yang kemudian oleh berbagai pedagang lain meneruskannya hingga Eropa. Setelah Cheng He tidak lagi menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangannya (1430-an), perdagangan rempah-rempah dari Malaka mundur. Namun, dengan kedatangan Portugis, Eropa menjadi pasar rempah-rempah yang menentukan pula. Seperti halnya di India dan Cina, di Eropa pun rempah-rempah digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan bahan obat-obatan.

Perluasan pasar rempah-rempah itu menyebabkan produksi rempah-rempah oleh penduduk juga meningkat untuk memenuhi permintaan. Masa puncak perdagangan rempah-rempah adalah antara 1570 hingga 1630. Ketika itu sekalipun Portugis berusaha keras untuk mempertahankan monopoli atas rempah-rempah, para pedagang dari Nusantara masih tetap penting. Bahkan para pedagang muslim mengekspornya melalui Aceh ke Mesir, yang akan diteruskan ke pasar-pasar rempah lainnya. Di dunia muslim ketika itu Istambul. Namun, berangsur-angsur jalur laut melalui Tanjung Harapan yang digunakan bangsa-bangsa Barat makin menonjol.

Sesungguhnya penduduk yang memproduksi rempah-rempah tidak mendapat keuntungan yang besar dari perdagangan itu. Keuntungan yang

---

[34] *Ibid.*

paling besar dinikmati oleh para penyedia modal, awak kapal, penguasa kota-kota pelabuhan, dan para syahbandar. Karena perdagangan berlangsung bertahap, harga rempah-rempah meningkat pada setiap tahapan. Cengkih umpamanya, diangkut dari Maluku ke Jawa, lalu dari Jawa ke Malaka. Menurut keterangan Tomé Pires di Malaka, cengkih yang dibeli di Ternate dapat meningkat menjadi tujuh kali lipat.

Perdagangan rempah-rempah itu membawa keuntungan bagi penduduk juga karena berbagai macam bahan kain dari India dan Cina serta berbagai perabot lainnya mengalir dari Malaka ke Maluku.[35] Selain itu, perdagangan juga membawa dampak lain, seperti dalam soal agama, seni, dan berbagai produk budaya material lainnya milik para pedagang asing.

Suatu kebiasaan pada orang Portugis di Asia, yang tidak ditiru oleh orang-orang Barat lainnya yang datang kemudian, adalah pembauran dengan penduduk lokal. Karena kondisi pelayaran zaman itu tidak nyaman dan tidak memenuhi syarat bagi para perempuan dari Portugal, para pedagang dan pelaut Portugis yang menetap untuk waktu yang lama di suatu kota pelabuhan menikah dengan perempuan setempat. Keturunan mereka membentuk masyarakat baru yang dinamakan "*Meztizo*". Melalui keluarga-keluarga hasil perkawinan campuran itulah kebudayaan Portugis menyebar di berbagai kota pelabuhan di Asia.

Dampak dari kehadiran Portugis di Nusantara lebih luas lagi. Pengaruh budaya Portugis dalam masyarakat lokal di Asia tidak terbatas pada pembauran fisik. Bahasa Portugis yang telah mengalami perubahan lokal (*pigeon Portuguese*) juga menyebar pada masyarakat kota-kota pelabuhan, termasuk di pelabuhan-pelabuhan Nusantara yang terkait dengan perdagangan antarbenua. Bahkan, sampai akhir abad ke-19 bahasa Portugis campuran itu menjadi bahasa pengantar di kalangan masyarakat, termasuk di Batavia.[36]

Bahasa Portugis campuran juga digunakan oleh para budak belian yang terdapat di kota-kota pelabuhan itu. Orang India yang menjadi budak menduduki tangga kasta yang paling rendah dalam masyarakat India. Akan tetapi, mereka dapat meninggalkan status budaknya dengan menjadi Kristen. Kelompok sosial baru itu menamakan dirinya golongan "Mahardika" dan tidak terkait dengan status kasta semula.

Pengaruh Portugis tampaknya cukup menentukan di Maluku dan Ambon. Bukan saja dalam hal bahasa, melainkan juga dalam hal busana,

---

[35] Reid, Jilid II, 1999, hlm. 5–24

[36] Mengenai Batavia akan dibahas dalam bagian berikut ini

kesenian (musik dan tarian), serta makanan kecil (seperti beberapa jenis kue dan lain-lain). Peninggalan benteng-benteng Portugis yang kini telah direnovasi oleh pemerintah RI juga sangat mengesankan.[37]

B. *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC)

1. Sistem Perdagangan

Sama halnya dengan bangsa Portugis, dalam masa Modern Awal, bangsa Belanda pun mengaitkan perdagangan (ekonomi) dan politik (kekuasaan). Berbeda dengan bangsa Portugis, bangsa Belanda melaksanakan perdagangan antarbenua melalui suatu badan dagang yang dibentuk khusus untuk itu, dilengkapi dengan modal yang disetor oleh warga negaranya. Dengan demikian, sekalipun dalam perdagangan antarbenua perusahaan perdagangan dari bangsa Belanda mendapat perlindungan politik, akibatnya perusahaan perdagangan itu bukan menjadi milik negara, melainkan milik warga negaranya.

Sejak membebaskan diri dari penjajahan Spanyol, dalam tahun 1581 bangsa Belanda membentuk suatu Republik Belanda Serikat yang dinamakan *De Republiek der Verenigde Nederlanden* yang terdiri atas tujuh negara bagian. Setiap negara bagian memiliki penguasanya sendiri yang dilengkapi dengan dewan perwakilan masing-masing (*Staten*). Dalam zaman ini di Belanda belum ada raja, tetapi pengaruh keluarga Oranye berfungsi sebagai alat pemersatu. Selain itu, ada pula sebuah dewan perwakilan yang mencakup semua negara bagian yang dinamakan *Staten-General*.

Sistem perdagangan yang memiliki aspek politik dan aspek swasta itu berkaitan dengan perkembangan masyarakat Belanda ketika itu. Dalam perkembangan itu, ekonomi pada umumnya (khususnya perdagangan) berada dalam tangan lapisan sosial yang dinamakan kaum *bourgeoisie* (burjuis), sedangkan politik masih berada dalam tangan kaum aristokrat. Kerja sama yang serasi antara kedua golongan sosial itulah yang memungkinkan diselenggarakannya perdagangan antarbenua di masa Modern Awal itu.[38]

---

[37] Antonio Pinto da Franca, *Pengaruh Portugis di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000. Untuk Maluku lihat Paramita R. Abdurachman, "Moluccan Respons to the First Intrusion of the West", dalam Haryati Soebadio & Carine A du Marchie Sarvaas (eds.), *Dynamics of Indonesian History*, Amsterdam-New York: North Holland Publ. Co. 1978, hlm. 161–188. Untuk Maluku Utara lihat buku Irza Arnyta Djafaar, *Jejak Portugis di Maluku Utara*, Yogyakarta, Ombak, 2006

[38] Baru sejak Revolusi Prancis di akhir abad ke-18 kaum borjuis di dunia Barat berhasil menguasai aspek politik juga dalam negaranya
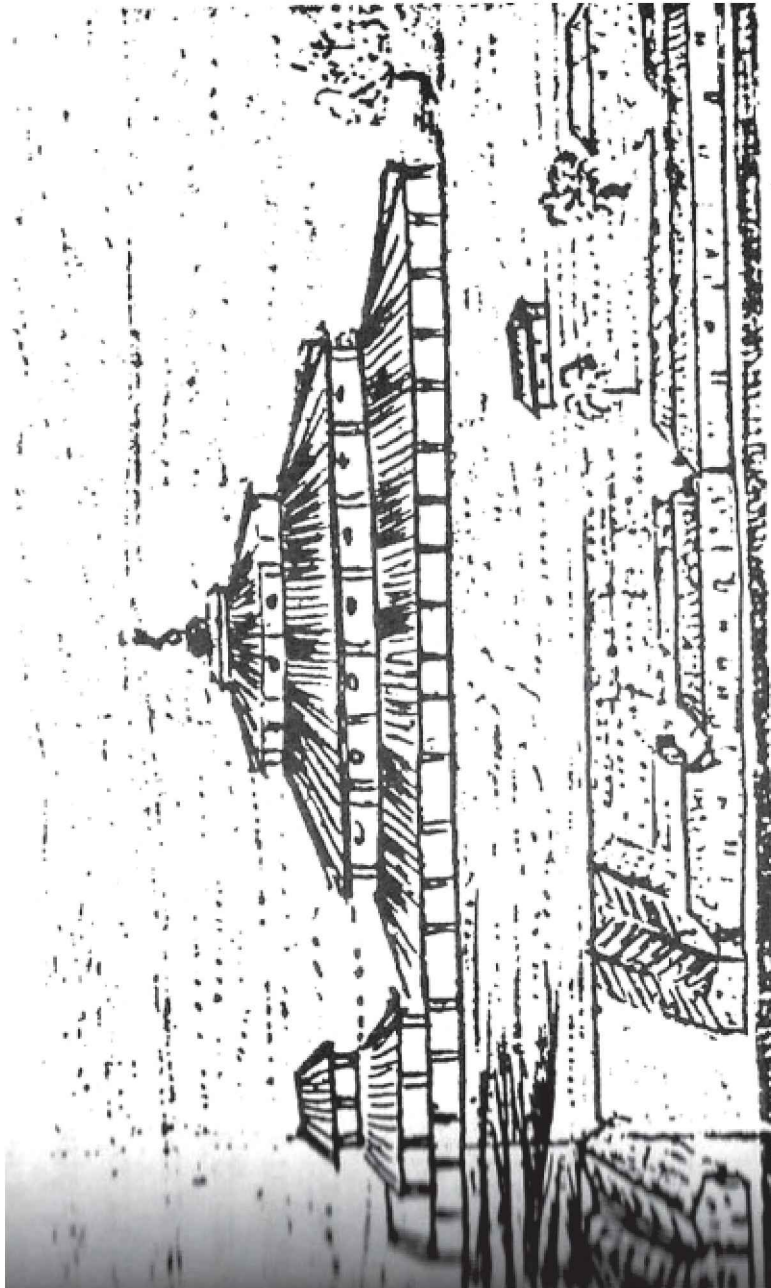
Gambar 3.3 Masjid Agung di Aceh, 1650
(*Sumber*: Reid, 1998, I, hlm. 69)

Jalan laut ke arah Timur (Asia) dilakukan bangsa Belanda sejak akhir abad ke-16 karena berhasil memperoleh peta-peta dan informasi ke Timur dari bangsa Italia (Venesia) yang banyak berjasa membuat peta ke Timur yang kemudian digunakan oleh bangsa Portugis.

Sebab itulah sudah sejak tahun 1595 kapal-kapal niaga Belanda mulai berdagang di Banten dan Sunda Kalapa. Perdagangan tersebut dipelopori oleh para pedagang kota Amsterdam yang mendapat lisensi dari wali kotanya untuk memegang monopoli perdagangan antara Amsterdam dan Asia. Daerah Zeeland di selatan juga membentuk perusahaan pelayaran niaganya. Tidak lama kemudian kota-kota lain pun berlomba-lomba membentuk perusahaan pelayaran niaga dengan lisensi dari wali kota masing-masing.

Banyaknya perusahaan pelayaran niaga yang mengklaim memegang monopoli perdagangan antara kota masing-masing dengan Asia dengan sendirinya menimbulkan persaingan ketat. Persaingan terutama terjadi pada penentuan harga jual rempah-rempah yang diangkut dari Asia, khususnya Nusantara. Persaingan yang mengakibatkan merosotnya keuntungan itu menyebabkan pihak Amsterdam dan Zeeland memutuskan untuk menyatukan semua perusahaan pelayaran niaga itu dalam satu perusahaan saja. Dengan bantuan pemerintah masing-masing, dan intervensi keluarga Oranye (Pangeran Mauritz), pada tanggal 20 Maret 1602 *Staten Generaal* mengeluarkan sebuah surat izin (*Octrooi*) pada sebuah perusahaan yang dinamakan *Verenigde Oostindische Compagnie* (Serikat Perusahaan Perdagangan di Asia Timur). *Octrooi* tersebut berlaku 21 tahun dan dapat diperbarui seterusnya.

Serikat perusahaan dagang itu dikelola oleh sebuah badan (*Bewindhebbers*) yang berjumlah sekitar 70 orang yang mewakili perusahaan-perusahaan lokal yang ada sebelumnya. Para manajer tersebut memilih 17 orang yang menjadi direksi (*Heeren XVII*). Modal perusahaan disetor oleh setiap anggota pengurus perusahaan-perusahaan lokal ditambah dengan saham yang dapat dibeli oleh siapa saja (*Partiesipanten*). Sampai VOC dibubarkan tahun 1799, modal dasar yang pertama itu tidak pernah ditambah sehingga tambahan modal hanya bergantung pada penjualan saham.[39]

Jika orang Belanda mendapat peta dan keterangan mengenai jalan laut ke Asia dari Italia (Venesia), sistem perdagangan di Asia banyak mengikuti Portugis yang sudah berada di Asia sejak abad ke-16. Namun, sampai tahun 1619 VOC belum memiliki pusat perdagangan di Asia. Selama itu Gubernur

---

[39] Hambatan modal itu sangat terasa ketika VOC meningkatkan perdagangannya di abad ke-18. Kekurangan dana tidak memungkinkan VOC menutup biaya penyediaan kapal dan modal dagang di Asia dari keuntungannya

Jendral VOC yang sudah diangkat sejak 1602 selalu berkantor di sebuah kapal VOC yang berada di perairan Nusantara. Pada tahun 1619, Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta beserta "dalem" dari Pangeran Wijayakrama yang memerintah sebagai wakil dari kerajaan Banten. Dengan menaklukkan Jayakarta, VOC menyatakan bahwa ia telah menduduki "kerajaan Sunda" yang membentang dari Teluk Jakarta hingga Samudra Hindia. Di bekas "dalem" itulah Jan Pieterszoon Coen membangun sebuah benteng yang diberi nama Batavia dan sebuah kota di bagian selatan benteng itu.[40]

Selain itu, seperti halnya Portugis, VOC juga memiliki suatu jaringan birokrasi dan persenjataan. Cara berdagang yang tidak lazim di Asia itu (kecuali Cheng He) dapat disebut sebagai *beaurocratic and amred trade* (perdagang yang didasari birokrasi dan tentara).[41] Wujudnya adalah benteng-benteng dengan pegawai dan tentaranya serta suatu hubungan surat-menyurat yang aktif dan laporan-laporan yang panjang dan lengkap antara berbagai pejabat di daerah dengan pusat di Batavia. Wilayah-wilayah yang dikuasai VOC untuk kepentingan dagangnya dikoordinasi oleh seorang *goeverneur*, sedangkan di wilayah-wilayah lain yang tidak memiliki ikatan politik ditempatkan seorang *opperhoofd* (kepala) atau seorang *gezaghebber* (penguasa).

Sebelum membangun benteng Batavia, VOC telah merebut beberapa benteng Portugis dan membangun sejumlah benteng baru di tempat-tempat yang dipandang strategis.[42] Seluruh sistem benteng yang saling dihubungkan dengan armada-armada VOC itu bertujuan menjamin monopoli VOC atas produksi rempah-rempah di Nusantara.[43]

Suatu ciri lain sistem perdagangan VOC adalah yang dinamakan *partnership* (kemitraan). VOC mengupayakan suatu sistem monopoli atas rempah-rempah dengan cara membina kemitraan dengan para penguasa lokal. Sampai sekitar pertengahan abad ke-16 kemitraan itu berhasil dibangun karena para penguasa lokal membutuhkan VOC untuk memerangi Portugis. Pihak VOC juga berkepentingan secara ekonomis (dagang) maupun secara politis untuk memerangi Portugis. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bersama dalam menghadapi Portugis, walau pada pihak VOC ada tambahan

---

[40] Mengenai masyarakat kota Batavia di bagian pertama abad ke-17 ditulis dengan jelas dan menarik oleh Hendrik E. Niemeijer, *Batavia: Een Koloniale Samenleving in de 17de Eeuw*, Uitgeverij Balans, 2005

[41] Chaudhuri, 1985

[42] R.Z. Leirissa, "The Dutch Trading Monopolies", dalam Haryati Soebadio & Carine A du Marchie sarvaas, 1978, hlm. 189–206

[43] C.R. Boxer, *The Dutch Saborn Empire 1600–1800*, Hutchinson of London, 1965

kepentingan dagang sedangkan pada pihak penguasa lokal praktis unsur ekonomi itu tidak ada. Setelah dominasi Portugis lenyap dari Nusantara karena dilawan VOC, sejak sekitar pertengahan abad ke-16 kemitraan itu dibangun oleh VOC dengan salah satu pihak yang bertikai dalam suatu kerajaan tertentu. Sistem kemitraan itu didukung oleh sistem perbentengan dan armada.

2. Sistem Monopoli

a. Kepulauan Maluku Utara

Contoh-contoh yang baik dari kemitraan jenis pertama tersebut di atas adalah antara VOC dan Ambon (1605) dan antara VOC dan Ternate. Karena kebijakan monopoli perdagangan cengkih VOC di Ternate membawa dampak pada kebijakan di Ambon, berikut akan dibahas terlebih dahulu kemitraan antara VOC dan Ternate.

Seperti telah dikemukakan di atas,[44] bahwa pada tahun 1570 Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis dari Maluku Utara. Sementara itu, di Portugis terjadi perubahan politik yang berdampak di Maluku. Pada tahun 1580 Raja Spanyol, Filip II, berhasil merebut takhta Portugis dan memerintah dua kerajaan sekaligus. Oleh karena itu, Madrid memerintahkan agar Gubernur Jenderal Spanyol di Manila, Dom Pedro da Cunha, bersama Tidore (sekutu Spanyol) menduduki Ternate, dengan mengerahkan sebuah pasukan yang sangat besar (3.095 orang) pada bulan Maret 1606. Sultan Said berhasil melarikan diri bersama sejumlah pejabat kerajaan, sementara da Cunha meneruskan ekspedisi ke wilayah-wilayah Ternate lainnya serta Bacan. Sultan Said akhirnya berhasil dibujuk untuk kembali ke Ternate dan menandatangani sebuah perjanjian dengan Spanyol yang antara lain menetapkan bahwa kerajaan Ternate mengakui kekuasaan dan memberi hak monopoli cengkih kepada Spanyol. Sebelum kembali ke Manila, da Cunha menempatkan pasukan di benteng Gamalama (yang dibangun Portugis, tetapi sejak 1575 digunakan oleh sultan-sultan Ternate). Sultan Said bersama sejumlah bangsawan Ternate dibawa pula ke Manila sebagai sandera.[45]

Sementara itu, pihak-pihak yang menolak kekuasaan Spanyol mengetahui bahwa di Banten telah tiba sebuah armada Portugis dari negeri Belanda. Seorang bangsawan dikirim sebagai utusan untuk meminta bantuan Belanda mengusir Spanyol dari Ternate dengan imbalan monopoli cengkih.

---

[44] Lihat catatan nomor 33

[45] Andaya (1993), hlm. 14–150

Laksamana Cornelis Matelieff menyetujui permintaan itu dengan syarat Ternate menyertakan 1.500 pasukan untuk membantu armadanya. Karena bantuan Ternate hanya beberapa ratus orang, Matelieff memutuskan untuk tidak menyerang Gamalama, tetapi membangun benteng baru di pantai Malayu berseberangan dengan benteng Spanyol itu. Benteng VOC itu kemudian dikenal dengan nama *Fort Oranye*. Matelieff mengharuskan Sultan Muzafar Syah menandatangani sebuah perjanjian (kontrak) yang antara lain menetapkan bahwa VOC akan menjaga keamanan Ternate terhadap Spanyol dengan imbalan monopoli cengkih di seluruh kerajaan Ternate.[46]

Untuk kepentingan pertahanan itu dalam waktu singat VOC membagun benteng-benteng lain kecuali *Fort Oranye*. Di Pulau Moti dibangun *Fort Nassau*, di Pulau Ternate dibangun benteng kedua di Takome, yaitu *Fort Willemstad*. Benteng Spanyol di Pulau Bacan direbut dan diberi nama *Fort Barnevelt*. Dalam waktu dua tahun VOC berhasil membangun tembok-tembok pertahanan (*fortification*) selain benteng-benteng tersebut yang dipertahankan oleh 500 orang tentara, yaitu di Taloko, Takome, dan Kalamata di Pulau Ternate, Tapasoho, Ngofakiaha dan Tabalola di Pulau Makian, dan beberapa lagi di Jailolo (Halmahera) dan Pulau Tidore.[47]

Kebijakan monopoli cengkih VOC di Maluku mengalami perubahan di sekitar tahun 1650-an. Perubahan itu sudah tampak sejak Sultan Hamzah (1627–1648), adik Sultan Baabullah, masih muda. Ketika Gubernur Jenderal Spanyol Pedro da Cunha menyandera Sultan Said ke Manila, Hamzah termasuk dalam rombongan itu. Ia baru kembali ke Ternate sekitar 1627 dan langsung dipilih oleh Dewan Kerajaan sebagai sultan. Selama berada di Manila rupanya ia tertarik pada cara Spanyol memerintah di Filipina, yaitu dengan kekerasan. Oleh sebab itu, ketika menjadi sultan di Ternate, ia mencoba menerapkan sistem pemerintahan tangan besi itu dan mengabaikan kebiasaan para sultan sebelumnya yang senantiasa bermusyawarah dan bermufakat dengan para bangsawan di Ternate.[48]

Salah satu hambatan yang dihadapi Hamzah untuk melaksanakan cara pemerintahan yang otoratis itu adalah perlawanan dari keluarga Tomagola yang sejak abad ke-16 telah diberi hak untuk berkuasa di jazirah Hoamoal di Seram dan di pulau-pulau sekitarnya, termasuk di jazirah Hitu (di Pulau Ambon).[49] Pusat kekuasaan Tomagola di Hoamoal itu terletak di negeri Luhu yang juga merupakan pelabuhan ekspor cengkih utama di masa itu. Keluarga

---

46 *Ibid.*, hlm. 152–153

47 *Ibid.*

48 Andaya, 1993, hlm. 158–169

49 *Ibid.*

Tomagola adalah salah satu dari empat keluarga bangsawan yang menentukan politik kerajaan Ternate.[50] Untuk menghilangkan otonomi dari keluarga Tomagola di Hoamoal dan Hitu, Hamzah mengatakan bahwa mereka dibutuhkan di Ternate sebagai penasihat sultan. Keinginan Hamzah itu selalu ditolak oleh keluarga Tomagola. Oleh karena itu, Hamzah mencari jalan lain untuk mematahkan kekuasaan Tomagola dengan cara meminta gubernur VOC di Ambon untuk memerintah di Hoamoal dan Hitu atas namanya.

VOC sangat gembira dengan tindakan Sultan Hamzah itu karena Hoamoal dan Hitu selalu menjadi titik lemah sistem monopolinya di kepulauan Ambon. Para pedagang Eropa dari Makassar senantiasa mengirim para nahkoda Bugis dan Makassar untuk membeli cengkih secara tersembunyi di kedua wilayah itu untuk dijual kembali kepada para pedagang Eropa. Hal itu juga dilakukan oleh para pedagang dari kepulauan Banda.

Sepeninggal Hamzah pada tahun 1648, Dewan Kerajaan memilih sebagai sultan putranya yang tertua yang bernama Mandar Syah (1648–1675). Berbeda dengan ayahnya, Mandar Syah adalah seorang sultan yang sangat lemah. Untuk mempertahankan diri ia membina kerja sama yang sangat erat dengan VOC. Sikap itu mendapat kecaman dari para anggota Dewan Kerajaan, dan pada tahun 1950 menurunkan Mandar Syah dan menggantikannya dengan adiknya, Kaicili Manilha, yang oleh pihak VOC dianggap "tidak sanggup mengendalikan pikirannya". Pihak-pihak yang menentang Mandar Syah adalah Kaicili[51] Said dan Hukum[52] Laulata dari keluarga Tomagola, Kimelaha[53] Terbile dari keluarga Tomaitu, *Jougugu*[54] Kaicili Musa dan Kimelaha Marsaoli dari keluraga Marsaoli. Sultan Mandar Syah melarikan diri ke *Fort Oranye* dan meminta perlindungan VOC, dan dengan bantuan VOC ia dapat dipulihkan kembali sebagai sultan Ternate pada tahun 1655.

Sementara itu, pada tanggal 31 Januari 1652 Mandar Syah menandatangani sebuah perjanjian (kontrak) dengan VOC dalam *Fort Oranye*. Dalam perjanjian itu Ternate menerima keinginan VOC agar di kerajaan itu tidak diperdagangkan cengkih. Untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan itu, VOC

---

[50] Tiga keluarga lainnya adalah Tomaitu, Marsaoli, dan Lumatau yang disebut sebagai "Fala Raha" (empat rumah) yang berpengaruh dalam politik di Ternate. Sultan Ternate selalu dipilih dari salah satu "rumah" itu. Hamzah sendiri adalah seorang Tomagola.

[51] Kaicili adalah gelar bangsawan, keluarga sultan

[52] Hukum adalah kadi atau pemimpin agama

[53] Kimelaha adalah kepala distrik sama dengan bupati

[54] Jougugu adalah menteri utama. Jougugu, kapita laut, dan hukum adalah tiga pejabat kerajaan yang utama yang berkuasa dalam Dewan Kerajaan

diizinkan setiap tahun melaksanakan patroli dengan sebuah armada yang terdiri dari kontingen VOC dan kontingen Ternate. Ekspedisi pemeriksaan cengkih itulah yang dikenal dengan nama *hongitochten*.[55] Pohon cengkih (yang berbuah maupun yang tidak) akan ditebang oleh tentara ekspedisi itu. Penebangan pohon-pohon cengkih itu dikenal dengan sebutan *extierpatie*.

Pelaksanaan administrasi monopoli di Maluku Utara itu dilakukan oleh sebuah birokrasi yang memusat di kota Ternate. Berbeda dengan di Ambon dan di Banda, di Maluku Utara VOC tidak memiliki administrasi yang tersebar di seluruh wilayah itu. Pemerintahan yang dilakukan oleh aparat tradisional dari ketiga kerajaan (Ternate, Tidore, dan Bacan[56]), yang sultannya masing-masing dalam awal abad ke-17 menjadi sekutu VOC, kemudian berubah status menjadi vasal. Sistem pemerintahan VOC di Maluku Utara itu dinamakan *Gouvernement der Molukken* (Pemerintah Maluku).[57]

Dengan demikian, VOC mengharapkan dapat mengendalikan perdagangan cengkih secara tuntas dengan menghilangkan para penyelundup cengkih yang umumnya adalah orang Jawa, Melayu, dan Banda. Selain itu, ekstirpasi pohon cengkih setiap tahun di Maluku Utara menguntungkan VOC. Dalam pertengahan abad ke-17 sudah terjadi kelebihan produksi cengkih sehingga harganya di pasaran Eropa mulai merosot. Pengurangan produksi di Maluku Utara itu akan menormalkan kembali harga cengkih di pasaran dunia.

Dalam Perjanjian 1652 antara VOC dan Sultan Mandar Syah ditentukan juga harga beli cengkih. Selanjutnya VOC akan membayar 50 ringgit (*realen*) bagi setiap bahar cengkih yang berukuran 625 pon. Namun, di kemudian hari VOC menghentikan pembayaran dengan ringgit (*realen*), tetapi dengan bahan-bahan kebutuhan untuk setiap bahar cengkih. Kebijakan itu diambil karena para pedagang yang mendatangi Ternate lebih tertarik pada ringgit (*realen*).[58]

Ketentuan lain dari Perjanjian tahun 1652 itu berdampak politik. Dalam perjanjian itu VOC berjanji akan menyerahkan *recognitie penningen* (pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan) pada setiap tahun pada sultan

---

55 Hongi = armada, *tochten* = penjelajahan atau patroli

56 Sebelum abad ke-17 terdapat kerajaan keempat, yaitu Jailolo di Halmahera. Dalam awal abad itu Ternate dan sekutunya (VOC) mencaplok wilayah itu

57 Istilah "Maluku" (Moloko dalam bahasa Ternate) sesungguhnya hanya mencakup keempat kerajaan di Maluku Utara. Baru sejak abad ke-19 Belanda menggunakan istilah Maluku untuk seluruh kepulauan antara Sulawesi dan Papua

58 van Fraassen, 1999, hlm. 45–47

dan para bangsawan. Pembayaran itu merupakan ganti rugi atas penerimaan sultan dan bangsawan Ternate selama itu atas perdagangan cengkih. Ditentukan bahwa setiap tahun sultan akan menerima 12.000 ringgit dan para bangsawan membagi di antara mereka 1.500 ringgit. Sekalipun dengan para bangsawan tersebut telah dibuat juga sebuah perjanjian pada tanggal 28 Maret 1653 yang mengandung ketentuan itu, dalam kenyataannya VOC menyerahkan seluruh jumlah itu kepada sultan agar bagian dari para bangsawan dibagikan sesuai keinginan sultan.[59] Dengan cara itulah VOC melumpuhkan kekuasaan "Fala Raha" dan memperkuat kedudukan otoriter dari sultan.

Sesungguhnya sejak pertengahan abad ke-17 sultan Ternate (dan Bacan serta Tidore) dapat dikendalikan oleh VOC. Keadaan politik itu diformalkan setelah Gubernur Ternate Padbrugge berhasil mengatasi pemberontakan para bangsawan yang bersama Sultan Sibori pada tanggal 17 Juli 1683. Pada tahun itu sultan dan para bangsawan harus menandatangani sebuah perjanjian lagi. Dalam perjanjian itu kerajaan Ternate dinyatakan sebagai daerah kekuasaan Belanda karena direbut melalui perang, tetapi para sultan dan bangsawan diperkenankan memerintah terus sebagai vasal dari VOC. Bahkan, VOC mendapat hak untuk mengangkat sultan baru. Dengan pengubahan status politik dari sekutu menjadi bawahan itu, *recognitiepennigen* juga dihapus. Selanjutnya sultan akan menerima 6.400 ringgit setahun untuk pengeluarannya, para pejabat kerajaan bersama-sama menerima 600 ringgit, para pemimpin Pulau Makian bersama-sama menerima 2.000 ringgit dan para penguasa dari Pulau Moti bersama-sama 150 ringgit.[60] Walau jumlah uang itu tidak diberikan untuk pengganti penghasilan dari penjualan cengkih, patut dikatakan di sini bahwa kedua pulau itu pernah menjadi produsen cengkih terbesar di Maluku Utara.

Ketentuan lain dalam Perjanjian 1652 itu adalah bahwa wilayah keluarga Tomagola di Hoamoal dan Hitu dialihkan sepenuhnya dari kerajaan Ternate kepada VOC di kepulauan Ambon. Sejak itu wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ternate itu sepenuhnya menjadi wewenang VOC.

b. Kepulauan Ambon

Seperti telah dikemukakan di atas, VOC lebih dahulu berkuasa di Ambon daripada di Ternate. Persaingan Hitu dengan Portugis yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-16 itu makin meruncing menjelang akhir abad

---

[59] Dua sultan lainnya di Maluku, yaitu Tidore dan Bacan, kemudian juga menandatangani perjanjian ekstirpasi dengan VOC dengan imbalan *recognitie penningen*

[60] van Fraassen, 1999, hlm. 48–49

itu.[61] Sejak itu pula kapal-kapal dagang Belanda mulai muncul di Hitu dengan tujuan mengambil keuntungan yang maksimal dari perdagangan cengkih. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Hitu mencoba menggalang persahabatan dengan Belanda untuk menghadapi Portugis. Ketika di Hitu muncul berita bahwa di Banten telah muncul armada Belanda yang sangat kuat, dikirimlah utusan-utusan untuk meminta agar Belanda bersama Hitu menghadapi Portugis. Laksamana Steven van der Hagen yang memimpin armada VOC tersebut segera memanfaatkan kesempatan baik itu karena ditawari monopoli cengkih sebagai imbalan kerja sama. Pada tahun 1606 armada VOC dengan dibantu pihak Hitu merebut benteng Portugis di Ambon itu dan mengganti namanya menjadi *Fort Victoria*.[62]

Keinginan VOC di Ambon untuk menjalankan sistem perdagangan monopoli cengkih di kepulauan ini mendapat perlawanan dari wakil Ternate yang berkedudukan di Luhu, Hoamoal. Perlawanan itu menjalar juga ke negeri-negeri (desa-desa) yang penduduknya beragama Islam di Pulau Haruku dan Pulau Saparua. Tidak lama kemudian, Hitu, sekutu VOC juga mengangkat senjata melawan VOC di Ambon.

Perjanjian VOC dengan Sultan Mandar Syah pada tahun 1652 tersebut di atas mengakhiri perlawanan Hoamoal dan Hitu. Namun, pertarungan untuk menguasai perdagangan cengkih di kepulauan Ambon itu terus berlangsung hingga 1658. VOC akhirnya unggul karena teknologi perangnya jauh lebih baik daripada teknologi perang penduduk lokal. Bantuan dari Makassar dan dari Jawa tidak berhasil menahan armada yang sangat kuat dari Batavia dengan pimpinan seorang laksamana kawakan, yaitu Arnold de Vlaming.

Dengan demikian, VOC di Ambon bebas membangun suatu sistem monopoli cengkih di Maluku. Sudah sejak tahun 1652 Gubernur VOC di Ambon memerintahkan penduduk untuk menanam cengkih. Namun, kebun-kebun cengkih itu hanya dibatasi pada empat pulau, yaitu Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut. Di pulau-pulau lainnya yang pernah menghasilkan cengkih ketika masih dikuasai Ternate, yaitu di jazirah Hoamoal dan pulau-pulau kecil di sekitarnya berlaku

---

[61] Rijali, *Hikayat Tanah Hitu* (lihat disertasi Z.J. Manusama, "Hikayat Tanah Hitu", Universitas Leiden, 1977

[62] R.Z. Leirissa, "Tinjauan atas Politik Perdagangan VOC di Maluku dalam Bagian Pertama Abad ke-17" dalam C.P.F. Luhulima (ed.), *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jakarta, 1971, hlm. 138–169; R.Z. Leirissa, "Local Potentates and the Competition for Cloves in Early Seventeenth Century Ternate (North Maluku)", dalam *Proceedings of the VIth IAHA Conference*, Bangkok, Jilid I, hlm. 310–332

pelarangan seperti tertera dalam perjanjian dengan Sultan Mandar Syah (*extierpatie* dan *hongitochten*).

Pada umumnya setiap keluarga diharuskan menanam sejumlah pohon cengkih yang setiap tahunnya dipanen menjelang akhir tahun. Akan tetapi, ketika jumlah produksi cengkih berlebihan di pasar Eropa sehingga harganya merosot, VOC di Ambon mengadakan *hongitochten* dan menebas (*extierpatie*) sejumlah pohon cengkih di setiap negeri. Hal itu terjadi pertama kali pada tahun 1692. Ketika pasar dunia kekurangan persediaan cengkih, pada tahun 1727 VOC memerintahkan penduduk untuk menambah lagi jumlah pohon cengkih. Pada tahun 1770 muncul lagi perintah untuk mengurangi produksi cengkih. Selama pendudukan Inggris di Ambon antara 1796 dan 1817 penanaman dan produksi cengkih sangat mundur karena Inggris tidak mementingkannya.[63]

Cengkih yang ditanam masyarakat keempat pulau tersebut di atas dijual kepada VOC di benteng-benteng mereka seharga 56 ringgit setiap bahar (di Maluku sama dengan sekitar 110 kg) atau f168. Diperkirakan,[64] bahwa sekitar 1680-an setiap tahun setiap *dati* (keluarga) dengan panen yang normal dapat menjual kepada VOC kurang dari 1 bahar dan memperoleh rata-rata f36 (uang ringan). Kalau dikonversi dengan "uang keras", jumlah itu sama dengan rata-rata 25,2 realen.[65] Namun, dari jumlah itu masih ada berbagai potongan, di antaranya bagian yang terbesar untuk para penguasa desa, belum lagi manipulasi alat timbang oleh pegawai VOC (menambahkan batu pada cengkih yang ditimbang). Dalam masa jatuhnya harga cengkih seperti dalam abad-abad berikut,[66] dengan sendirinya pendapatan penduduk menjadi jauh lebih rendah.

Uang yang diterima penduduk itu digunakan untuk membeli barang-barang "mewah", seperti berbagai macam kain cita (*chitzen*) yang diimpor VOC dari India, perabot yang terbuat dari besi dan beras yang dijual para pedagang Makassar, dan lain sebagainya. Kemewahan itu tidak dapat dinikmati oleh penduduk yang dilarang menanam cengkih, seperti di Pulau Seram dan Pulau Buru.[67]

---

[63] G.J. Knaap *Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656–1696*, Dordrecht-Holland/Province-USA: Foris Publications 1987, hlm. 228–260

[64] *Ibid.*, hlm. 254–256

[65] Ringgit atau "realen" adalah uang Spanyol ("realen van achten") disebut juga "uang berat", f (florijn) adalah uang Belanda yang disebut juga "uang ringan". Diperkirakan bahwa nilai "uang ringan" adalah 30 persen di bawah "uang berat"

[66] Sekalipun secara resmi VOC dibubarkan tahun 1799, sistem monopoli cengkih di kepulauan Ambon itu dipertahankan hingga 1865

[67] Knaap, 1987

Sistem monopoli cengkih VOC di keempat pulau tersebut sesungguhnya tidak benar-benar terkendali. Lautan yang luas dan demikian banyaknya pulau-pulau kecil yang dapat digunakan oleh perahu-perahu dagang itu untuk bersembunyi menyebabkan banyak terjadi kebocoran. Para pedagang dari Makassar dan Jawa berlomba-lomba menerobos blokade kapal-kapal VOC untuk mendapatkan cengkih. Makassar ketika itu (sampai tahun 1667) merupakan pelabuhan bebas yang masih tetap dikunjungi para pedagang dari Eropa dan Asia Tenggara yang membeli cengkih yang berhasil diperoleh para pedagang tersebut.[68]

Pengelolaan wilayah perkebunan cengkih yang meliputi empat pulau itu (Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusalaut) membuat VOC membangun suatu birokrasi yang berpusat di kota Ambon yang direbutnya dari Portugis pada tahun 1606. Pusat administrasi yang dipimpin seorang gubernur itu terdapat dalam *Fort Vicoria*. Di sekitar benteng itu muncul sebuah kota yang hingga kini dinamakan kota Ambon.[69] Wilayah administrasi keempat pulau tersebut, ditambah dengan pulau-pulau Seram dan Buru dalam masa VOC, dinamakan *Gouvernement van Amboina* (Pemerintah Amboina).

Di pulau-pulau Haruku dan Saparua ditempatkan residen, masing-masing bertempat di benteng-benteng pula. Seperti dikemukakan di atas, di setiap pulau terdapat paling kurang dua benteng yang masing-masing dikawal oleh tentara VOC yang terdiri dari orang Belanda.[70] Di Pulau Ambon terdapat empat benteng besar (*fort*), yaitu Victoria (di Ambon), Amsterdam (di Hila), Leiden (di Hitulama), dan Rotterdam (di Larike), dan lima benteng kecil (*vestiging*), yaitu Haarlem (di Negerilima), Vlisseingen (di Pulau Tiga), Hoek van Hulung (di Seit), Amesfoort (di Waai), dan Middelburg (di Baguala). Di Pulau Haruku terdapat dua benteng besar (*fort*), yaitu Zeelandia (di Haruku) dan Hoorn (di Kariu); di Pulau Saparua terdapat satu benteng besar, yaitu Fort Duurstede (di Saparua), dan empat benteng kecil (*vestiging*) Delft (di Porto), Huis te Velzen (di Itawaka), dan Hollandia (di Sirisori); di Pulau Nusalaut terdapat satu benteng kecil (*vesting*), yaitu Beverwijk. Di Hoamoal terdapat tiga benteng besar (*fort*), yaitu Overburg (Luhu), dan Dwingland (di Loki), dan dua benteng kecil (*vesting*), yaitu Wentelberg (di Nuahatu) dan Kalenberg (di Lesidi).[71]

---

[68] R.Z. Leirissa, "Changing maritime trade patterns in the Seram Sea", dalam G.J. Schutte (ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago*, Leiden: LITLV Press, 1994, hlm. 99–114

[69] R.Z. Leirissa (ed.), *Ambonku: Doeloe, Kini dan Esok*, Ambon, Pemerintah Kota, 2004

[70] Baru dalam masa pendudukan Inggris (1796–1718) dibentuk suatu pasukan yang terdiri dari para pemuda lokal. Mereka inilah yang menjadi motor perlawanan Pattimura tahun 1817

[71] Rumphius, 2002

Untuk menjamin produksi monopoli, VOC menata negeri-negeri (desa) di keempat pulau kecil itu (Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusalaut). Permukiman yang sebelumnya terletak di pegunungan, terutama yang memberi perlawanan pada VOC selama bagian pertama abad ke-17, diharuskan membangun negerinya di pesisir. Dalam abad ke-17 jumlah penduduk keempat pulau itu diperkirakan sekitar 100.000 jiwa.

Dalam keempat pulau tersebut pemisahan negeri-negeri Islam dan Kristen mengikuti pola budaya tertentu. Di wilayah yang pola budayanya dikategorikan sebagai Patalima pada umumnya terdapat negeri-negeri Islam, seperti di bagian utama Pulau Ambon (Hitu), di bagian utama pulau-pulau Haruku dan Saparua. Di wilayah yang pola budayanya dikategorikan sebagai Patasiwa terdapat negeri-negeri yang penduduknya menganut Kristen. Hanya Nusalaut yang seluruh penduduknya beragama Kristen. Pola itu tetap bertahan di masa VOC,[72] dan terus bertahan hingga kini. Hanya satu desa yang dalam abad ke-17 beralih dari Islam ke Kristen, yaitu negeri Hulaliu di Pulau Haruku.[73]

Negeri-negeri diatur sedemikian rupa agar produksi cengkih berjalan lancar. Pemimpin negeri berasal dari keluarga-keluarga tertentu secara turun-temurun. Para pemimpin negeri[74] itu dianggap sakral dan memiliki karisma. Bahkan para pemimpin negeri dianggap mewakili suatu alam pikiran kosmologis-tradisional yang membagi alam raya dalam dua bagian atau empat bagian yang berada dalam keseimbangan.[75]

Penduduk negeri dibagi lagi dalam beberapa bagian (soa) masing-masing dengan pemimpinnya sendiri (*kepala soa*), dan *soa* dibagi dalam famili (keluarga) yang melaksanakan produksi cengkih. VOC yang menguasai kepulauan itu berdasarkan kemenangan dalam perang, membagi lahan-lahan terbaik bagi penduduk untuk ditanami cengkih (tanah dati). Setiap keluarga wajib menanam 80 pohon cengkih.

Kecuali lahan perkebunan cengkih dan lahan tanaman konsumtif, terbentang hutan yang luas dan tidak berpenghuni. Hutan yang tidak

---

72 Lihat catatan pegawai VOC dari abad ke-17, G.E. Rumphius yang berjudul "Ambonsche Landbeschrijving" yang telah diterbitkan kembali dengan judul *De Ambonsche Eilanden Onder de VOC*, Utyrecht: Landelijke Steunpunt Educatie Molukkers, 1002

73 Knaap, 1987, hlm. 59–98

74 Istilah yang digunakan bagi para pemimpin negeri itu bervariasi sesuai dengan kemampuan produksi cengkih negerinya. Gelar yang tertinggi bagi penguasa negeri adalah "Raja", lebih rendah lagi adalah negeri yang dipimpin seorang "Pati", dan akhirnya negeri yang dipimpin "Orangkaya". Dengan sendirinya dapat terjadi peningkatan sejalan dengan peningkatan produksi cengkihnya

75 Lihat dokumen-dokumen dalam "Maluku" (4 jilid dari van Fraassen)

berpenghuni itu merupakan bagian integral dari negeri yang dinamakan "pertuanan negeri". Hutan luas yang tidak berpenghuni, tetapi merupakan sumber makanan itu menjadi tanggung jawab "kepala kewang"[76] dan anggotanya.

Pelaksanaan pengelolaan negeri-negeri produsen cengkih itu dapat dipelajari dalam laporan-laporan para residen dan gubernur serta para pemimpin negeri dari abad ke-17 dan ke-18. Dokumen-dokumen yang demikian banyak itu kini menjadi sumber sejarah yang tidak terbatas nilainya bagi penelitian sejarah lokal.[77]

Tidak lama setelah VOC menguasai Pulau Ambon dan sekitarnya, gereja-gereja di negeri Belanda meminta izin kepada VOC untuk mengadakan pekabaran Injil di wilayah yang penduduknya telah beragama Katolik sebelumnya. Sejak awal abad ke-17 berangsur-angsur semua negeri yang penduduknya beragama Katolik beralih menjadi Protestan. Di setiap negeri yang penduduknya beragama Kristen dibangun gereja yang diasuh oleh para pendeta Belanda yang sekali-sekali datang dari Ambon. Selain itu, terdapat pula sekolah yang tujuannya menambah pengetahuan keagamaan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, dibangun pula seminari di Ambon dengan murid-murid yang dipilih dari kalangan keluarga penguasa negeri. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "sekolah midras". Para pengajar dalam institusi pendidikan tersebut dikenal dengan istilah "guru madras". Mereka dipilih dari putra-putra terbaik di setiap desa dan dibina sebagai guru dalam seminari-seminari di kota Ambon yang diselenggarakan oleh para pendeta Belanda. Para guru tersebut tidak saja mengajar di sekolah, tetapi juga melayani kebaktian di gereja dan memimpin kegiatan keagamaan lainnya. Para "guru madras" inilah yang merupakan faktor utama dalam penyebaran agama Kristen di kepulauan Ambon di masa VOC. Di luar wilayah monopoli itu penataan permukiman maupun pembinaan kehidupan agama Kristen baru dimulai dalam abad ke-19.

Pengaruh VOC selama sekitar 300 tahun sangat membekas di kepulauan Ambon dan beberapa tempat lain seperti kota Jakarta (baca: Batavia). Dengan dihapusnya sistem monopoli tersebut di kepulauan Ambon pada tahun 1865, sistem tanah *dati* juga kehilangan fungsinya. Akan tetapi, sistem negeri (desa) tetap bertahan hingga kini. Demikian pula agama Kristen di negeri-negeri yang penduduknya menganut agama itu. Hubungan serasi antara masyarakat

---

[76] Ewang = hutan

[77] Dalam Arsip Nasional RI di Jakarta, antara lain, terdapat "Arsip Ambon" yang tersimpan dalam 1621 kotak yang masing-masing berisi 200 hingga 400 helai dokumen

Islam dan Kristen berlangsung dengan baik karena adanya ikatan *pela gandong* (persaudaran antara Islam dan Kristen) antara beberapa negeri yang berlainan agama.

c. Kepulauan Banda

Kepulauan Banda terdiri dari dua pulau yang besar, yaitu Pulau Banda dan Banda Besar atau Lontor. Selain itu, ada beberapa pulau kecil yang terdapat di sebelah baratnya, seperti Pulau Rosenggaing dan Pulau Run. Dalam awal abad ke-17 diperkirakan jumlah penduduknya hanyalah 15.000 jiwa yang terbagi dalam desa-desa kecil di kepulauan tersebut. Berbeda dengan Maluku Utara (dan sama dengan di kepulauan Ambon), di kepulauan Banda tidak muncul institusi kerajaan yang mengikat desa-desa itu menjadi satu kesatuan politik. Setiap desa berdiri sendiri dengan pimpinan seorang tetua yang dalam bahasa Melayu disebut *Orangkaya.*[78]

Kepulauan Banda dalam masa Modern Awal adalah satu-satunya wilayah yang dikaruniai oleh Tuhan dengan pohon pala (*Myristica fragrans*) yang menghasilkan buah pala. Produk dagangnya adalah biji pala dan fuli (kulit tipis yang membau biji pala). Telah disinggung di atas bahwa orang Cina telah berdagang di Maluku sejak abad ke-13. Dengan sendirinya kepulauan Banda juga menjadi tujuannya. Namun, setelah Cheng He mendirikan markasnya di Malaka sejak awal abad ke-15, pedagang Cina tidak lagi berlayar ke Maluku karena rempah-rempah dari Maluku dapat diperoleh dengan mudah di Malaka. Dalam masa Cheng He inilah muncul para pedagang dari Jawa dan Melayu yang mengangkut pala dan fuli ke Malaka. Bangsa Portugis juga berhasil mendapat izin monopoli di sini seperti terbukti dengan sebuah bekas benteng mereka di Pulau Banda yang kemudian dibangun kembali oleh VOC dalam abad ke-17 dengan nama *Fort Nassau*.

Dalam awal abad ke-17 terjadi persaingan antara Inggris dan Belanda untuk memonopoli perdagangan lada di kepulauan Banda. Beberapa tahun sebelum abad ke-17 Inggris dan Belanda telah menemukan jalan ke kepulauan Banda. Akan tetapi, persaingan mulai keras sejak di Inggris dibentuk *East India Company* (EIC) pada tahun 1600 dan di Belanda dibentuk *Verenigde Oost-indische Compagnie* (VOC) dua tahun kemudian. Jika VOC membuka kantor dagangnya di Banda Neira, EIC menduduki Pulau Run dan Pulau Ai yang dianggap koloni Inggris pertama di Asia. Bahkan, ketika James I dilantik sebagai raja ia diberi gelar "Raja Inggris, Skotlandia, Irlandia,

---

78 Des Alwi, *Maluku: Bamda Neira, Ternate, Tidore dan Ambon*, Jakarta, Dian Rakyat, 2005, hlm. 3–183

Prancis, Puloway (Pulau Ai) dan Puloroon (Pulau Run).[79] Akan tetapi, pada tahun 1802 VOC telah berhasil memengaruhi para Orangkaya untuk menandatangani sebuah perjanjian (kontrak) yang menetapkan VOC sebagai pemegang hak monopoli pala dengan imbalan keamananan kepulauan itu dari rongrongan Inggris maupun Portugis. Namun, kebiasaan membuat perjanjian yang masa berlakunya "abadi" itu bukan kebiasaan orang Banda. Bagi mereka setiap transaksi dagang harus dirundingkan kembali. Lagi pula mereka masih membutuhkan para pedagang dari Jawa dan Melayu yang menjadi pemasok berbagai kebutuhan hidup mereka sehingga melarang para pedagang tersebut memasuki kepulauan Banda ialah suatu kerugian yang sangat besar.[80]

Kedua perusahaan dagang Barat itu beranggapan bahwa perdagangan di Asia harus dilakukan dengan senjata. Di kalangan VOC pendapat itu terutama dianut oleh Jan Pieterszoon Coen yang dua kali menjadi Gubernur Jenderal VOC dengan kedudukan di Batavia (1619–1623, 1627–1619). Coenlah yang mengatakan kepada Heeren XVII pada tahun 1614, "Tuan-tuanlah seharusnya mengetahui dari pengalaman, bahwa perdagangan di Asia harus dilaksanakan dan dipertahankan dengan perlindungan senjata dan bahwa senjata harus bisa dibiayai melalui keuntungan dari perdagangan itu. Jadi, kita tidak bisa berdagang tanpa perang dan tidak bisa berperang tanpa berdagang."[81]

Pada tahun 1609 VOC mengirim armada yang besar di bawah pimpinan Laksamana Verheoven untuk menggunakan senjata di kepulauan Banda. Pertama, Verhoeven membuat sebuah perjanjian dagang (kontrak) dengan para Orangkaya di kepulauan itu untuk mendapatkan hak monopoli pala. Namun, hubungan diplomatik yang baik itu dikotori dengan pembangunan sebuah benteng di Pulau Banda pada lokasi yang pernah digunakan Portugis untuk membangun benteng mereka. Pembangunan benteng (*fort*) Nassau itu menimbulkan kesimpulan pada para Orangkaya bahwa laksamana VOC itu tidak bermaksud baik. Pada suatu kesempatan Verheoven dibunuh bersama sejumlah pasukannya.[82] Sejak itu terjadi permusuhan antara VOC dengan penduduk Banda. Penduduk Banda malah lebih suka berdagang dengan Inggris, hal ini lebih mencemaskan VOC. Tidak lama setelah itu VOC membangun benteng kedua di Pulau banda, yaitu *Fort Belgica*.

---

79 Charles Corn, *Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de Specerijenhandel*, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1998, hlm. 148, 156, 178 (terjemahan dari Scent of Eden, *A Narrative of the Spice Trade*, 1998)

80 Corn, 1998, hlm. 154

81 *Ibid.*, hlm. 151

82 *Ibid.*, hlm. 161–164

Setelah mengonsolidasi kekuasaannya di Batavia, pada tahun 1621 Coen memutuskan untuk memimpin sendiri pendudukan kepulauan Banda untuk mencegah penduduknya berdagang dengan Inggris. Armada VOC yang dipimpin sendiri oleh sang gubernur jenderal itu berkekuatan 13 kapal besar, sejumlah kapal pengintai, dan sekitar 40 jungku dan sekoci. Tentara yang dibawanya berjumlah 1.600 orang Belanda yang diperkuat oleh 250 orang yang telah berada di Banda. Selain itu, diikutsertakan pula sekitar 300 orang Jawa yang berstatus narapidana dan sekitar 100 samurai Jepang serta sejumlah bekas budak belian.[83]

Armada Coen itu tiba di Banda Neira pada bulan Februari 1621. Dalam satu bulan seluruh Pulau Lontor berhasil diduduki pasukan VOC. Coen lalu mengumpulkan semua Orangkaya Lontor untuk membuat sebuah perjanjian damai. Dalam perjanjian itu dijanjikan apabila penduduk menyerahkan semua senjata mereka, mereka tidak akan ditindak dan diperbolehkan hidup damai di desa masing-masing. Akan tetapi, sebelum surat perjanjian itu ditandatangani, Coen telah memerintahkan pembangunan sebuah benteng di Pulau Lontor yang kemudian dinamakan *Fort Hollandia.* Seperti halnya ketika Verhoeven membangun benteng Nassau di Pulau Banda, rakyat Pulau Lontor pun menjadi curiga akan maksud baik Coen dengan perjanjian perdamaian tersebut. Banyak yang melarikan diri dan membentuk kelompok-kelompok untuk bergerilya.

Dalam keadaan yang tegang itu terjadi suatu insiden yang mempunyai akibat yang sangat tragis.[84] Pada tanggal 16 Mei 1821 Coen berlayar kembali ke Batavia. Pulau Lontor diserahkannya kepada Kapten t'Sonck. Sebelum benteng tersebut dibangun, komandan Pulau Lontor itu menggunakan rumah-rumah rakyat untuk perumahan para perwiranya dan masjid sebagai markas mereka. Pada malam tanggal 21 April 1621 lentera di dalam masjid itu dengan tidak sengaja jatuh sehingga menimbulkan kebakaran. Tanpa menyelidiki terlebih dahulu t'Sonck menuduh bahwa kebakaran itu disengaja oleh penduduk Lontor sebagai tanda dimulainya perlawanan bersenjata terhadap VOC. Malam itu juga tentara VOC mulai dikerahkan untuk mengejar penduduk yang melarikan diri ke hutan-hutan dan puncak-puncak gunung. Banyak yang tertembak mati, tetapi lebih banyak lagi yang mati kelaparan. Penduduk yang ditemukan di desa-desa dibunuh dan rumah-rumah dan perahu-perahu mereka dibakar dan/atau dihancurkan. Mereka yang dapat melarikan diri mencari perlindungan pada Inggris atau menyebar ke pulau Kei dan Aru. Jumlah yang melarikan diri adalah sekitar

---

[83] *Ibid.*, hlm. 188

[84] *Ibid.*, hlm. 190–192

300 orang, tetapi yang meninggal (baik karena ditembak atau dianiaya maupun yang kelaparan) tidak kurang dari 2.500 orang. Diperkirakan bahwa dari penduduk yang berjumlah sekitar 15.000 di kepulauan Banda tertinggal sekitar 1.000 orang saja.[85]

Coen juga mengunjugi Pulau Ai dengan pasukannya. Di pulau itu ia memerintahkan untuk membangun sebuah benteng yaitu Fort Rvenge. Selain itu, ia bermaksud menyerang Pulau Run, tetapi niatnya itu dibatalkan karena tidak jauh dari pulau itu terdapat sebuah kapal Inggris. Pulau Run tetap berada dalam tangan Inggris hingga tahun 1667. Pada tahun itu diadakan perjanjian perdamaian antara Inggris dan Belanda. Perdamaian itu antara lain disertai dengan penyerahan Pulau Run dari Inggris kepada VOC, dan sebagai imbalannya Belanda menyerahkan Pulau Manhattan (New York) kepada Inggris.

Mereka yang menyerahkan diri dan tertawan dinaikkan ke kapal-kapal untuk diangkut ke Batavia. Rombongan pertama berjumlah 883 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sekitar 44 pemimpin desa (Orang kaya) pada tanggal 8 Mei dihukum mati dalam benteng Nassau dengan cara dipenggal-penggal oleh para samurai Jepang.[86]

Setelah praktis melenyapkan penduduk di Pulau Banda dan Pulau Lontor, VOC lalu menyatakan bahwa kebun-kebun pala menjadi miliknya. Masalahnya adalah bagaimana membuat kebun-kebun itu produktif. Jalan keluar yang ditempuh VOC adalah dengan memberi hak pakai atas kebun-kebun itu kepada bekas tentara dan pegawai VOC. Tenaga kerja di kebun-kebun itu diusahakan oleh VOC melalui tenaga budak yang dikumpulkannya dari segenap penjuru tanah air.

Kebun-kebun pala dengan hak pakai itu dibagi dalam 68 *perken* (kapling) dengan ukuran masing-masing 12 sampai 30 hektare. Di Pulau Lontor terdapat 34 *perken*, di Pulau Air 31 *perken*, dan di Pulau Banda 3 *perken*. Seluruhnya dikelola oleh 34 hingga 68 *perkenier* (pengelola *perken*).[87]

d. Dua Pelabuhan Internasional

Sekalipun secara nominal VOC telah menguasai daerah-daerah produksi rempah-rempah di Nusantara Timur, tidak berarti bahwa cengkih dan pala tidak dapat diperdagangkan pihak-pihak lain.[88] Pada awal abad ke-17 persaingan VOC masih tetap Portugis yang berkuasa di Malaka. Namun,

---

[85] *Ibid.*, hlm. 193

[86] *Ibid.*, hlm. 194

[87] Des Alwi, 2005, hlm. 127

[88] Boxer, 1965, hlm. 84–112

setelah Malaka direbut VOC pada tahun 1646 para pedagang Islam dari India dan Timur Tengah berpindah ke Banten dan Makassar. Bahkan, para pedagang Cina pun mulai berdagang di kedua pulau itu. Banten dan Makassar muncul sebagai pengganti Malaka yang sebelumnya merupakan *emporium* utama di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, untuk mengonsolidasi monopolinya di Maluku, VOC harus melumpuhkan peran kedua pelabuhan internasional itu. Makassar ketika itu terutama merupakan sumber kebocoran monopoli VOC di Maluku. Para pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, Cina, Jawa, dan Melayu menjadikan kota pelabuhan itu sebagai pelabuhan utama untuk mendapatkan pala dan cengkih.

Para pedagang asing itu sendiri tidak berani memasuki perairan Maluku dengan kapal-kapal layarnya yang besar yang mudah dicegah oleh armada-armada VOC yang sewaktu-waktu berada di perairan Maluku. Akan tetapi, para pedagang asing itu membiayai para pedagang Bugis dan Makassar yang menggunakan perahu-perahu kecil untuk memasuki wilayah monopoli VOC. Perahu-perahu kecil itu mudah sekali disembunyikan di teluk-teluk yang banyak terdapat di pulau-pulau sehingga tidak mudah terlihat oleh armada VOC.

Seperti telah disinggung di atas para pedagang Bugis dan Makassar itu terutama berhubungan dengan Hoamoal yang sampai pertengahan abad ke-17 dikuasai oleh salah satu anggota keluarga inti (*Fala Raha*) di Ternate yaitu keluarga Tomagola. Bahkan, dalam menghadapi VOC Hoamoal tidak segan-segan meminta bantuan dari Makassar. Demikian pula jazirah Hitu yang menjadi produsen cengkih yang penting di kawasan Ambon. Dalam menghadapi VOC Hitu pun mendapat bantuan dari Makassar selain dari Jawa.

Di Sulawesi Selatan sejak awal abad ke-17 telah terdapat sejumlah kerajaan, terbesar di antaranya adalah kerajaan kembar Goa-Tallo dan kerajaan Bone. Karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, Goa-Tallo atau Makassar muncul sebagai kerajaan yang terbesar dan terkuat. Ketika Arung Palaka muncul sebagai Raja Bone (1634–1696), berangsur-angsur berkembanglah persaingan dan permusuhan dengan Sultan Hasanuddin dari Makassar (memerintah 1653–1669). Pada tahun 1660 Arung Palaka mengangkat senjata melawan Hasanuddin dan meminta bantuan dari VOC. Kemitraan antara VOC dengan Bone itulah yang memungkinkan VOC menguasai Makassar.[89]

[89] M.C. Rickfels, *A History of Modern Indonesia. C 1300 to the Present*, London, MacMillan Press Ltd., 1981, hlm. 61–63

Pasukan Arung Palaka bergabung dengan armada VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Speelman dan pada tahun 1666 menyerang Makassar. Sementara armada VOC menghadapi armada Makassar di laut, pasukan Arung Palaka yang dibantu oleh Kapitan Yongker dengan pasukannya dari Ambon melawan pasukan Makassar di darat. Perang berkobar sangat dahsyat dan berlangsung lebih dari satu tahun.

Makassar terdesak sehingga di Bongaya, Makassar terpaksa menandatangani sebuah perjanjian dengan VOC pada tanggal 18 November 1667. Namun, tidak lama kemudian Hasanuddin melancarkan perlawanan dan baru dapat dihentikan sama sekali dalam tahun 1669.

Kekalahan Hasanuddin itu adalah kemunduran dari kerajaan Makassar. Perjanjian Bongaya menentukan bahwa seluruh wilayah kekuasannya di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur harus diserahkan kepada VOC. Untuk mencegah perdagangan dengan Maluku VOC mendirikan sebuah benteng di bekas benteng Makassar dan menamakannya Fort Rotterdam. Sebelumnya VOC telah mendirikan sebuah benteng di Manado pada tahun 1658 untuk mencegah pengaruh Spanyol dari Filipina. Sejak 1677 VOC berhasil menduduki Gorontalo, Limboto, Minahasa, dan Sangir-Talaud.[90]

Pelabuhan Banten juga dikuasai VOC melalui sistem kemitraan. Sebelum jatuhnya Malaka, Banten telah menjadi pengekspor lada yang utama di Nusantara. Kerajaan Banten tidak saja menguasai wilayah Banten, tetapi juga wilayah Sumatra Selatan yang juga kaya dengan perkebunan lada. Para pedagang Eropa seperti Inggris dan Belanda menjadikan Banten sebagai pintu masuk ke Nusantara.[91] Bahkan, sebelum membentuk pusat perdagangannya di Batavia, VOC menjadikan Banten sebagai kantor dagangnya yang utama.

Intervensi VOC di Banten berlangsung dalam masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (memerintah 1651–1683) yang sesungguhnya merupakan zaman keemasan kerajaan Banten. Ketegangan dalam keraton muncul ketika putra sulung Sultan Tirtayasa, yang kemudian memerintah sebagai Sultan Haji (memerintah 1682–1687), mempunyai ambisi untuk menggantikan ayahnya sebagai sultan. Untuk memperkuat kedudukannya ia meminta bantuan VOC di Batavia. Sultan Tirtayasa terpaksa meninggalkan keratonnya pada tahun 1671. Selain memusuhi VOC hubungan Tirtayasa dengan Amangkurat II di Mataram juga tidak serasi.

Karena berbagai tindakan VOC di Banten, pada tahun 1678 Tirtayasa mengumumkan perang terhadap VOC. Dengan dukungan Sultan Haji VOC

---

[90] *Ibid*.

[91] Pelayaran dari Eropa melalui Tanjung Harapan menuju Nusantara pada umumnya melalui perairan di selatan Sumatra, kemudian memasuki Selat Sunda menuju Banten

melancarkan perang terhadap Banten sehingga pada tahun 1683 Sultan Tirtayasa didukung oleh Seh Yusuf, seorang ulama dari Makassar. Pada tahun 1683 Tirtayasa menyerah, kemudian dipenjarakan di Batavia dan meninggal tahun 1695. Sejak tahun 1680-an VOC menguasai kerajaan Banten atas nama Sultan Haji. Dalam suatu perjanjian Sultan Haji menyerahkan hak monopoli lada kepada VOC. Selain itu, para pedagang asing juga dilarang memasuki pelabuhan Banten.[92]

e. VOC dan Mataram

Mataram adalah kerajaan yang paling besar di Pulau Jawa dalam masa VOC. Namun, kepentingan VOC di wilayah ini tidak menyangkut perdagangan antarbenua, tetapi kebutuhan konsumsi VOC di Asia. Pertama-tama VOC membutuhkan Mataram untuk penyediaan bahan makanan para pegawai dan tentaranya.[93] Selain itu, VOC sangat membutuhkan kayu jati untuk perbaikan kapal-kapal layarnya dan perumahan para pejabat di Batavia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kantor dagang VOC yang pertama di wilayah Mataram adalah di Japara.

Hubungan VOC dengan Mataram mulai menjadi intensif sejak zaman Sultan Agung (memerintah 1613–1646), raja yang terbesar sepanjang sejarah Mataram. Sejak VOC bercokol di Batavia Sultan Agung telah menyadari bahwa para pedagang Belanda itu dapat menjadi saingannya. Bahkan, ketika VOC mengirim utusannya dari Japara untuk menghadiri upacara penobatan Sultan Agung, raja Jawa itu telah memperingatkan bahwa hubungan Mataram dapat berlangsung dengan baik apabila VOC tidak berambisi untuk menduduki Pulau Jawa.[94] Kekhawatiran itu tampaknya menjadi kenyataan ketika VOC merebut Jayakarta dan menjadikannya pusat perdagangan mereka dengan nama Batavia. Namun, upaya Sultan Agung untuk mengusir VOC dari muara Sungai Ciliwung itu ternyata gagal. Dua kali penyerbuan besar-besaran dalam tahun 1627 dan 1629 ternyata gagal, walaupun Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen meninggal tahun 1629 karena kemungkinan besar terjangkit penyakit kolera.

Hubungan damai antara VOC dengan Mataram mulai dirintis dalam zaman Sultan Amangkurat I (memerintah 1646–1677). Pada tahun 1646 ia

---

[92] Ricklefs, 1981, hlm. 75–76

[93] Gandum tidak dapat diangkut dalam pelayaran antarbenua karena mudah rusak terkena air laut, sedangkan kentang pada zaman ini masih menjadi bahan makanan kaum miskin di Eropa

[94] Ricklefs, 1981, hlm. 40

membuat sebuah perjanjian persahabatan dengan VOC, yang dalam pandangannya merupakan pernyataan takluk VOC kepada Mataram.[95]

Namun, dalam zaman Amangkurat II (memerintah 1677–1703) keadaan mulai berubah. Ketika itu Surabaya memberontak kembali terhadap Mataram. Sesungguhnya permusuhan Surabaya dan Madura terhadap Mataram itu telah dapat diatasi oleh Sultan Agung ketika pada tahun 1625 ia berhasil menaklukkan Surabaya. Mataram terpaksa meminta bantuan VOC yang berhasil mematahkan perlawanan Trunojoyo, bahkan menangkapnya tahun 1679.[96] Sebagai imbalannya, dalam bulan Januari 1678 Mataram membuat suatu perjanjian baru dengan VOC di mana Mataram memberi izin bagi VOC untuk mengelola pelabuhan-pelabuhannya hingga ongkos perang yang dikeluarkan VOC terbayar, dan hak monopoli bagi VOC untuk mengimpor madat dan tekstil, serta kekuasaan atas Semarang.

Tidak lama kemudian keamanan Mataram terganggu lagi oleh ulah seorang bekas budak dari Batavia yang melarikan diri ke Mataram, yaitu Untung Surapati.[97] Surapati dan pasukannya tidak lama berdiam di Mataram karena selanjutnya ia membangun pusat kekuasaannya di Pasuruan. Bahkan, ada bukti-bukti bahwa ia berambisi menghidupkan kembali kerajaan Majapahit yang telah lama lenyap itu.[98]

Perlawanan Surapati atas Mataram berlangsung lama. Sebagai imbalan atas bantuan VOC, badan dagang Belanda itu diizinkan membuka kantor-kantor dagang selain di Japara dan Semarang, juga di Surabaya, Rembang, Demak, dan Tegal.

Sementara itu, muncul sejumlah pangeran di Mataram yang juga menentang kekuasaan Amangkurat III (1703–1708) yang dianggap banyak pangeran tidak berhak atas takhta Mataram. Oleh sebab itu, ketika Pakubuwono II naik takhta (1704–1719) ia harus meminta bantuan VOC lagi untuk mengatasi gangguan keamanan itu. Seperti biasanya, VOC menuntut balas jasa. Pada bulan Oktober 1705 Mataram membuat perjanjian baru dengan VOC.

---

[95] *Ibid.*, hlm. 68

[96] Trunojoyo kemudian diizinkan oleh Sultan untuk berdiam di sekitar keraton Mataram tetapi kemudian dibunuh oleh Amangkurat II

[97] Sebagai budak ia dikenal dengan nama Untung. Akan tetapi, ketika melarikan diri ke Mataram ia berhasil mengalahkan pasukan Cerebon yang dipimpin oleh Surapati. Sejak itu ia menamakan dirinya Surapati dan dalam buku-buku sejarah dikenal sebagai Untung Surapati

[98] Keterangan-keterangan selanjutnya mengenai Mataram diperoleh dari buku M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in java 1677–1626. Asian and European Imperialism in the Early Kartasura period*, Sydney, Allen & Unwinn, 1993

Dalam perjanjian 1705 itu VOC bersedia menghapus utang-utang Mataram pada VOC yang dibuat sebelumnya dengan imbalan berbagai konsesi ekonomi. Salah satu konsesi utama dari Mataram pada VOC adalah bahwa Mataram mengakui secara sah batas-batas kekuasaan VOC, termasuk Priangan. Selain itu, Mataram mengakui bahwa Cerebon adalah protektorat VOC, kemudian Madura Timur juga diserahkan kepada VOC, konfirmasi kekuasaan VOC atas Semarang (sehingga pada tahun 1708 VOC menjadikannya pusat perdagangannya di Mataram). VOC juga diberi hak untuk membangun benteng di mana saja di Mataram, memegang hak monopoli perdagangan atas madat dan tekstil, dan membeli beras di mana saja di Mataram. Mataram juga berjanji akan menyerahkan kepada VOC 800 koyan beras setiap tahun selama 20 tahun dan memulihkan pos tentara VOC di kota keraton. VOC juga berhasil memaksakan batas-batas pelayaran pada Mataram, yaitu di sebelah barat Lampung, di sebelah timur di Lombok, dan di sebelah utara Kalimantan.

Pemberontakan ternyata tidak pernah mereda di Mataram, khususnya oleh Cakraningrat dari Madura. Akan tetapi, pada zaman Pakubuwono II (memerintah 1726–1743) terjadi malapetaka yang besar yang menentukan nasib Mataram. Pada tahun 1740 orang-orang Cina dibunuh di Batavia karena dituduh hendak memberontak. Kelanjutan dari peristiwa itu adalah menjalarnya pemberontakan di kota-kota pelabuhan Mataram oleh orang Cina yang dibantu orang Jawa. Dalam keadaan yang kacau itu Cakraningrat IV dari Madura menyerang Kartasura pada tahun 1743 sehingga Pakubuwono II terpaksa meninggalkan keraton dan melarikan diri ke arah Jawa Timur. Ia berhasil diselamatkan oleh Gubernur VOC di Semarang, Von Hohendorff. Dengan perjanjian baru tahun 1743 kedudukan Pakubuwono II dipulihkan kembali dengan dukungan VOC. Akan tetapi, ia membangun keraton baru di tempat lain yang dinamakannya Surakarta. Dalam perjanjian itu Mataram menyerahkan Madura Barat kepada VOC, demikian pula kota-kota pelabuhan Surabaya, Rembang, Japara, dan Balambangan di Jawa Timur. Perjanjian itu juga menentukan bahwa pengangkatan para pejabat tinggi Mataram seperti Patih harus mendapat persetujuan dari VOC dan VOC diizinkan membangun benteng di Surakarta. Pelayaran perdagangan orang Jawa selanjutnya dibatasi sampai Madura dan Bali saja.

Pergolakan politik tetap berlangsung di Mataram. Tiga pangeran memperebutkan kekuasaan atas Mataram, yaitu Pangeran Singosari, Pangeran Mangkubumi, dan Mas Said. Ketika Pakubuwono II meninggal tahun 1743 ia memanggil Gubernur VOC di Semarang, Von Hohendorff, dan "menitipkan" kerajaannya kepada pejabat VOC itu.[99]

---

[99] Data selanjutnya dari M.C. Ricklefs, *Jogyakarta Under Sultan Mangkubumi 1749–1792. A History of the Division of Java*, London, Oxford University Press, 1974

Hohendorff memanggil ketiga pangeran yang memperebutkan kekuasaan atas Mataram itu dan membagi kerajaan Mataram menjadi tiga bagian. Surakarta tetap dikuasai turunan Pakubuwono, yaitu Pakubuwono III (1749–1788), Yogyakarta diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono dan sebagian dari Yogyakarta diserahkan kepada Mas Said dengan gelar Paku Alam. Dalam Perjanjian Gianti yang dibuat pada tanggal 13 Februari 1755 kedudukan Hamengkubuwono I di Yogyakarta itu dilegalisasi.

Kepentingan VOC di Mataram bukan untuk perdagangan antarbenua. Singkatnya kepentingan VOC di Mataram adalah berbagai komoditas konsumsi bagi para pegawai dan tentaranya yang ditempatkan di berbagai benteng di Nusantara. Kebutuhan itu berhasil diperoleh VOC sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan kepada Mataram dalam konflik politik internnya. Selain itu, praktis seluruh pantai utara Mataram juga menjadi bagian dari kekuasaan VOC sebagai imbalan atas bantuan militernya itu.

Sekalipun interaksi perdagangan VOC dengan Mataram tidak terlampau luas dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang telah dikemukakan di atas, betapa pun juga VOC meninggalkan bekas-bekasnya juga di Mataram. Dalam salah satu penelitian dapat dibuktikan bahwa orang Jawa ketika itu tidak tertarik pada kebudayaan spiritual dari VOC. Agama Kristen, yang memang tidak dikembangkan oleh VOC, sama sekali tidak membekas di Mataram zaman VOC. Identitas budaya Mataram dalam masa itu tidak berubah. Demikian juga tidak terdapat pengaruh dari sistem ekonomi VOC. Gagasan-gagasan dan cara-cara perdagangan dari VOC sama sekali tidak ditiru di Mataram. Di Mataram tujuan ekonomi adalah pengendalian kekayaan melalui dominasi kerajaan. Itu berarti bahwa peran raja secara pribadi sangat dominan. Karena pentingnya Mataram bagi VOC (beras dan kayu), kelanjutan sistem budaya yang melandasi seluruh tatanan politik Mataram juga dipertahankan oleh VOC.[100]

Berbeda halnya dengan teknologi perang. Dalam masa ini perang menjadi suatu kebutuhan yang penting di Mataram, terutama untuk menghadapi pemberontakan Trunojoyo dan Suropati dalam abad ke-17, hingga pemberontakan para pangeran dalam abad ke-18. Untuk kepentingan kelanjutan kekuasaannya, Mataram mengambil alih ciri-ciri kemiliteran VOC. Penataan pasukan, baris-berbaris, persenjataan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan kemiliteran menjadi bagian dari tentara Mataram.[101]

---

[100] Ricklefs, 1993, hlm. 222–234
[101] *Ibid*.

Salah satu contoh lain dari alih budaya material adalah dalam bidang pelayaran. Sebelum kehadiran VOC di Nusantara teknologi pembuatan perahu telah berkembang di kota-kota pelabuhan seperti di Rembang, Juana, dan Lasem. Wilayah ini kaya akan hutan-hutan jati yang sangat penting untuk pembuatan perahu. Jenis-jenis perahu yang diproduksi di galangan-galangan itu adalah *tenggang*, *gonting*, dan *jung* yang berukuran sekitar 50 sampai 60 ton.

VOC kemudian juga memesan kapal-kapal layar berukuran kecil yang dapat digunakan di perairan Nusantara. Sejak abad ke-17 VOC telah menggunakan kapal-kapal layar yang kecil sejenis *jacht* dan *pinas* yang berukuran sekitar 100 hingga 250 ton. Untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal berukuran kecil itu VOC memesan kapal-kapal di galangan-galangan tersebut di atas, tetapi dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan perahu-perahu layar yang biasanya diproduksi di tempat-tempat itu. Oleh karena itu, sejak abad ke-18 terjadi alih teknologi sehingga galangan-galangan kapal di Jawa Tengah itu berhasil memproduksi kapal-kapal layar yang lebih besar dari biasanya seperti yang umumnya digunakan oleh VOC.[102]

f. VOC Bubar Digantikan Negara Kolonial Hindia Belanda

Dalam akhir abad ke-18 VOC dibubarkan. Masalah yang masih menggangu para ahli sejarah VOC adalah menjawab pertanyaan mengapa VOC harus dibubarkan, sedangkan EIC masih bertahan hingga pertengahan abad ke-19. Dalam akhir abad ke-19, ketika liberalisme mulai berkumandang di negeri Belanda dan sistem ekonomi yang dikendalikan negara seperti tanam paksa sedang digempur oleh kalangan politik, jawaban yang sering dilontarkan adalah korupsi. Ketika itu orang menuduh bahwa para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dan perwiranya, banyak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan VOC. Bahkan, ketika itu singkatan VOC dipelesetkan menjadi *Vergaan Onder Corruptie* (Tenggelam Karena Korupsi).

Tuduhan itu kini mulai dipelajari secara ilmiah, tetapi sampai hari ini belum ada suatu analisis pun yang membenarkan tuduhan itu. Korupsi memang tidak mudah diungkapkan, padahal kenyataannya adalah bahwa para pegawai tinggi VOC memiliki rumah-rumah mewah di Batavia dan di negeri Belanda yang jelas tidak dapat dibiayai hanya dengan gaji mereka.

Kemudian muncul jawaban yang dicari dalam praktik perdagangan itu sendiri. Dikatakan bahwa cara VOC membukukan keuangannya menyebabkan sulit untuk mengatakan apakah perusahaan itu merugi atau

---

[102] Gerrit J. Knaap, *Shalow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775*, Leiden, KITLV Press, 1996, hlm. 149–157

membuat laba, dan seberapa besar. Hal itu terutama disebabkan sistem pembukuan ganda dari VOC. Di negeri Belanda dilakukan pembukuan tersendiri yang mencatat uang yang dikeluarkan untuk belanja di Asia (termasuk *overhead*-nya), dan satu lagi di Batavia yang mencatat jumlah uang yang diterima dari negeri Belanda dan jumlah yang dibelanjakan di Asia.

Kalau diperhatikan pembukuan di negeri Belanda tampak bahwa selama abad ke-17 VOC tidak merugi sedikit pun. Akan tetapi, dalam abad ke-18 VOC mengadakan ekspansi dagang yang membutuhkan sumber daya manusia dan peralatan yang jauh lebih banyak daripada di abad ke-17. Dapat diperhitungkan bahwa dalam akhir abad ke-18 VOC telah merugi sekitar f643.000.000.[103] Akan tetapi, berapa jumlah keuntungan dalam pembukuan di Batavia itu hingga kini belum dipelajari.

Akhir-akhir ini muncul studi-studi yang memerhatikan faktor perang sebagai penyebab bubarnya VOC.[104] Menurut salah satu pendapat, sejak tahun 1783 berkobar serangkaian perang di Eropa yang terutama melibatkan Inggris dan Prancis. Dalam keadaan itu Belanda berusaha netral, tetapi tidak selalu berhasil. Dalam suasana perang itulah kapal-kapal dagang VOC yang bertolak ke Asia maupun yang kembali dari Asia menjadi sasaran armada-armada kedua kekuatan raksasa di Eropa itu. Lambat laun kapal-kapal VOC yang berani mengarungi lautan makin berkurang, yang berarti volume perdagangan juga makin lama makin berkurang, terutama antara tahun 1783 dan 1795.

Karena terus-menerus merugi, VOC tidak sanggup membayar dividen dari saham-saham yang dibeli rakyat. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun perusahaan itu harus berutang pada negara untuk melakukan kewajibannya. Namun, akhirnya pada tahun 1795 negara memutuskan untuk mengambil alih seluruh kekayaan VOC sebagai pelunasan dari utang-utang tersebut. Untuk melakukan hal itu, negara membentuk sebuah panitia. Pada akhirnya di tahun 1799 panitia itu menyatakan bahwa VOC *failite* dan bubar.[105]

Harta kekayaan VOC yang tidak bergerak, seperti benteng-benteng atau daerah-daerah produksi rempah-rempah di Nusantara, diambil alih oleh negara. Itulah aset kerajaan Belanda yang menjadi cikal bakal dari Negara Kolonial Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1817.

---

[103] F.S. Gaastra, "Verenigde Oost-Idische Compagnie", internet situs Tanap

[104] Ingrid G. Dillo, *De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1793–1795. Schepen en Zeevarenden*, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992

[105] *Ibid*.

Bagian II
Kekuasaan Belanda di Abad ke-19

Bab IV
Sistem Politik

A. Jawa Tengah

1. Wilayah

Setelah kerajaan Majapahit runtuh, timbul beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Di pantai utara Pulau Jawa berkembang kerajaan Demak, Tuban, dan Gresik. Kerajaan-kerajaan ini mendapat banyak pengaruh dari penyebaran agama Islam. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyiaran agama Islam di kepulauan Indonesia.

Di pedalaman Pulau Jawa berkembang kerajaan Pajang. Perebutan kekuasaan mewarnai perkembangan politik setelah kekuasaan kerajaan Majapahit sebagai pusat kerajaan memudar. Ketika kekuasaan kerajaan Pajang mulai tenggelam, kerajaan Mataram yang terletak di Jawa Tengah mengambil alih perannya sebagai pusat politik. kerajaan Mataram berada di bawah pengaruh agama Islam. Mataram mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga, yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Pada waktu itu wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat.

Sebelum VOC menganeksasi wilayah negara Mataram sampai akhir abad ke-17, seluruh wilayah kekuasaan Mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah besar yang berkedudukan di keraton sebagai pusatnya. Urutan pembagian wilayah dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut: istana atau keraton raja merupakan pusat negara dan terletak di ibu kota negara, yang biasa disebut wilayah *Kutanegara* atau sering disingkat menjadi *Kutagara*. Selanjutnya wilayah yang mengitari Kutagara ini disebut wilayah Negara Agung. Menurut *Serat Pustaka Raja Puwara*, wilayah Negara Agung ini semula dibagi menjadi empat bagian, yang meliputi daerah Kedu, Siti Ageng atau Bumi Gede, Bagelen, dan Pajang. Pada zaman Sultan Agung, tiap-tiap daerah tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian. Daerah Kedu dibagi menjadi daerah Siti Bumi dan Bumijo, masing-masing terletak di sebelah barat dan sebelah timur Sungai Progo. Daerah Siti Ageng yang terletak di antara Pajang dan Demak dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen; daerah Bagelen dibagi menjadi daerah Sewu, terletak di antara Sungai Bogowonto dan Sungai Donan di Cilacap, dan daerah Numbak Anyar

yang terletak di antara Sungai Bogowonto dan Sungai Progo. Daerah Pajang juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah *Panumpin*, meliputi daerah Sukowati dan daerah *Panekar*, yang merupakan daerah Pajang sendiri.

Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk daerah pantai, disebut wilayah *Mancanegara*. Wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga dibagi dalam dua bagian, yaitu *Mancanegara Wetan* untuk bagian timur dan bagian barat disebut *Mancanegara Kilen*.[1] Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah *Pasisiran*. Sebagaimana halnya wilayah Mancanegara, wilayah Pasisiran juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah *Pasisiran Wetan* dan *Pasisiran Kilen*.[2] Batas antara kedua daerah ini adalah Sungai Tedunan atau Sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Japara.[3]

Penggunaan batas alam seperti sungai, gunung, hutan, dan lainnya untuk memisahkan antara kesatuan-kesatuan wilayah adalah lazim pada waktu itu. Bahkan, untuk kesatuan wilayah desa, pohon besar yang dapat terlihat dari jauh seperti pohon kapas hutan (*randu alas*) banyak digunakan sebagai batas. Untuk mengurusi wilayah yang luas tersebut disusunlah jabatan-jabatan pemerintahan, yang secara hierarkis menyilang dari atas ke bawah dan menyebar dari pusat ke daerah. Dalam hubungan ini raja memegang kekuasaan sentral dan berkedudukan di atas pejabat-pejabat birokrasi tersebut.

Sistem pembagian wilayah dalam awal abad ke-18 mengalami perubahan dengan adanya pengaruh kekuasaan VOC. Dalam masa pemerintahan raja-raja, yang kemudian menggantikan Sultan Agung, kemunduran-kemunduran terjadi. Berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan makin menyempit akibat aneksasi yang dilakukan oleh VOC, sebagai imbalan intervensinya dalam pertentangan-pertentangan intern negara Mataram. Setelah Perang Trunojoyo berakhir pada tahun 1678, Mataram harus melepaskan daerah Karawang, sebagian daerah Priangan dan Semarang. Demikian pula setelah perlawanan Untung Surapati dapat dipadamkan sekitar tahun 1705, daerah Cerebon yang juga mengakui kekuasaan Mataram, sisa Priangan, dan separuh bagian timur Pulau Madura dianeksasi oleh Belanda. Selanjutnya, setelah Perang Cina berakhir pada

---

1 Perincian baik dari daerah *Negara Agung* maupun dari *Mancanegara* dapat dibaca pada *Serat Pustoko Rodjo Poeworo*, dalam J. Brandes, "Register op de proza-om-zetting van de Babad Tanah Djawi (uitgave van 1874)", dalam *VBG*, 51, Bagian Empat, 1900 (lampiran II), hlm. 151–152, 164–168, 181–182. Juga periksa B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, II, (*Ruler and Realm in Early Java*), 's-Gravenhage, 1959, hlm. 179–185

2 Perincian daerah Pasisiran terdapat dalam *Serat Poestoko Rodjo Poeworo* dalam *ibid.*, hlm. 164–168

3 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 203

tahun 1743, seluruh daerah pantai utara Jawa dan seluruh Pulau Madura sudah dikuasai Belanda. Wilayah negara makin menyempit dengan berakhirnya Perang Gianti pada tahun 1755, di mana negara Mataram dipecah menjadi dua bagian, yakni Surakarta dan Yogyakarta.[4] Dalam tahun 1757 dan 1813 wilayah terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan Mangkunegaran dan Pakualaman.

Sementara itu, perubahan kekuasaan pada negara-negara di Jawa untuk pertama kali terjadi pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808–1811), yaitu dengan adanya peraturan baru mengenai upacara penerimaan residen di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Menurut peraturan baru ini, residen di kerajaan-kerajaan itu harus diberi penghormatan sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan raja.[5] Berarti raja-raja itu diturunkan martabatnya, dari raja merdeka menjadi raja bawahan.

Di Istana Surakarta, peraturan Daendels tersebut diterima, tetapi tidak demikian halnya di Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh yang menentang peraturan ini pada tahun 1810 dipaksa turun dari takhtanya dengan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Daendels sendiri.[6] Sebagai penggantinya, diangkat putra mahkota menjadi raja dengan gelar Hamengku Buwono III atau Sultan Rojo. Peristiwa ini memberi kesempatan pada Daendels untuk memaksa Yogyakarta dan Surakarta menerima perjanjian baru pada tahun 1811 yang menyebabkan kedua negara itu kehilangan lagi sebagian dari wilayahnya.

Ketika Inggris merebut Jawa dari tangan pemerintah Belanda pada tahun 1812, Surakarta dan Yogyakarta ingin memulihkan kekuasaannya kembali seperti semula. Akan tetapi, kenyataannya wilayah kedua negara tersebut makin berkurang. Di Yogyakarta, Sultan Sepuh naik takhta lagi dan berhasil menggerakkan Sunan Surakarta untuk bersama-sama menentang Inggris. Oleh karena itu, Inggris mengambil tindakan kekerasan dengan menyerbu Yogyakarta dan memaksa Sultan Sepuh turun takhta. Peristiwa ini berhasil memaksa Sunan dan Sultan menandatangani perjanjian baru pada tanggal 1 Agustus 1812,[7] yang antara lain berisi bahwa Kedu, sebagian Semarang, Rembang, dan Surabaya diserahkan kepada pemerintah Inggris. Selain itu,

---

[4] Soekanto, *Sekitar Jogjakarta* 1755–1825 (*Perdjandjian Gianti – Perang Diponegoro*), Djakarta, 1952, hlm. 8–18

[5] Laporan Politik Tahun 1837 (*Staatkundig Overzicht van Nederhtndsche Indie.*, 1837), Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 4, Djakarta, 1971, hlm. 51

[6] *Ibid.*, hlm. 52–53

[7] Laporan Politik Tahun 1837, *ibid.*, hlm. 53–54

Sultan harus menyerahkan sebagian wilayah dan kekuasaan kepada Pangeran Notokusumo. Pangeran ini pada tahun 1813 diangkat oleh pemerintah Inggris menjadi Pangeran Mangkunegara.

Ketika Pulau Jawa dikembalikan lagi kepada pemerintah Belanda, raja-raja di Jawa berharap dapat memulihkan kekuasaan, tetapi gagal karena ternyata pemerintah Belanda memperbarui semua keputusan pemerintah Inggris. Sehubungan dengan itu, timbul kekecewaan di Istana Yogyakarta dan Surakarta, yang kemudian tumbuh menjadi benih permusuhan menentang pemerintah Belanda. Terutama di Yogyakarta, benih permusuhan makin membesar dan meluas, karena pengurangan wilayah dan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda makin bertambah, akhirnya meletus menjadi perang pada tahun 1825, yaitu Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa, karena perang melanda hampir seluruh daerah di Jawa.[8]

Setelah Perang Diponegoro selesai dalam tahun 1830, baik Yogyakarta maupun Surakarta, wilayah kekuasaannya menjadi makin sempit dan makin bergantung pada pemerintah Hindia Belanda. Kedua negara ini kehilangan kekuasaannya atas daerah Mancanegara sehingga wilayah kekuasaannya hanya terbatas pada daerah-daerah Pajang, Mataram, Sukowati, dan Gunung Kidul.[9] Dalam semua soal pemerintahan, baik Sultan maupun Sunan, tidak boleh bertindak sendiri lagi, tetapi harus mendapat persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda. Penghasilan mereka tidak lagi diperoleh dari pemungutan pajak, tetapi digaji oleh pemerintah Hindia Belanda yang jumlahnya ditentukan dengan perjanjian. Demikian pula dengan penghasilan para bangsawan dan para pembesar lainnya. Keadaan sempat bergejolak karena sejumlah bangsawan tidak puas. Keadaan di Yogyakarta baru tenang kembali setelah Pangeran Mangkudiningrat dan Pangeran Prabuningrat pada tahun 1831 ditangkap dan dibuang, karena kedua pangeran ini dicurigai akan berusaha mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Di Surakarta, Sunan Paku Buwono IV diam-diam meninggalkan istana pada bulan Juni 1830, tetapi segera dikejar dan berhasil ditawan di Mancingan. Oleh karena itu, Sunan ini dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Ambon. Sebagai gantinya diangkat Pangeran Purboyo dengan gelar Sunan Paku Buwono VII.

Selanjutnya, untuk mempertegas batas-batas negara Yogyakarta dan Surakarta, pada tanggal 27 September 1830 diadakan persetujuan dengan

---

8 Lihat selanjutnya dalam Bab III

9 Laporan Politik Tahun 1837, *op. cit.*, hlm. 56–57

Belanda yang isinya menentukan bahwa Sunan Surakarta menguasai Pajang dan Sukowati, sedangkan Sultan Yogyakarta memerintah daerah Mataram dan Gunung Kidul.[10]

Jelas di sini bahwa dengan tindakan-tindakan Belanda tersebut kekuasaan dan wilayah negara Yogyakarta dan Surakarta di Jawa berkurang dan selanjutnya banyak bergantung pada pemerintah Hindia Belanda.

2. Raja dan Bangsawan

Raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah negaranya. Keabsahan (*legitimacy*) kedudukan dan kekuasaan raja didapat karena warisan menurut tradisi. Apabila pada masa didirikannya negara oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575, otoritas raja lebih banyak didasarkan pada karisma dan kelebihan kemampuan pribadinya sehingga pada masa-masa kemudian otoritas raja telah dilembagakan menjadi tradisi.[11] Dengan demikian, pengangkatan raja baru lebih didasarkan pada keturunan atau hak waris menurut tradisi. Hal ini sudah tentu tidak menghilangkan kenyataan bahwa ada juga di antara raja-raja tersebut yang mempunyai kecakapan memerintah, keberanian dan kepribadian, serta sifat-sifat yang baik.

Menurut tradisi istana, sebagai pengganti raja ditetapkan putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan permaisuri (*garwa padmi*). Apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, putra laki-laki tertua dari selir (*garwa ampeyan*) dapat diangkat sebagai pengganti raja. Apabila kedua-duanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja, paman, atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti. Penyimpangan dapat terjadi ketika calon yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai raja, seperti mempunyai sakit ingatan atau cacat badan. Penyimpangan tradisi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan dan bahkan dapat menjurus ke arah intrik dalam istana dan pertentangan intern para bangsawan.

Dalam hubungan ini, kepribadian dan sifat yang baik maupun kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar atas otoritas raja. Dalam keadaan demikian, loyalitas, baik dari kalangan istana, para pejabat birokrasi, maupun rakyat pada umumnya dapat terjaga. Sebaliknya, sifat dan tindakan yang tidak baik dari raja dapat menimbulkan ketegangan dalam istana ataupun rasa ketidakpuasan. Tindakan raja yang menyinggung

---

[10] *Ibid.*, hlm. 60

[11] Mengenai ciri-ciri kepemimpinan karismatik dan otoritas tradisional, periksa R. Bendix, Max Weber: *An Intellectual Portrait*, New York, 1962, hlm. 298 dan seterusnya

golongan tertentu dalam masyarakat kerajaan dapat pula menimbulkan kebencian dan penentangan. Tindakan Amangkurat I pada tahun 1667 yang mengasingkan pegawai-pegawai tinggi istana ke suatu desa di luar kota, di antaranya adalah Wirojoyo yang menjabat sebagai Tumenggung Kutagara dan Wiromanggolo seorang adik dari Pangeran Purboyo,[12] membawa akibat timbulnya kekecewaan di antara para bangsawan. Kekeruhan ini ditambah dengan pembunuhan terhadap sejumlah ulama yang dituduh menghasut Adipati Anom menentang raja merupakan salah satu sebab pemihakan Raden Kajoran atau Panembahan Romo pada Trunojoyo untuk meruntuhkan kekuasaan raja.

Raja-raja Mataram memakai gelar *panembahan*, *susuhunan* (*sunan*), atau *sultan*. Agama Islam diangkat menjadi agama negara. Pemakaian gelar *Sayidin Panatagama* seperti tampak pada rentetan gelar yang dipakai oleh susuhunan, raja-raja Surakarta, demikian pula oleh sultan dan raja-raja Yogyakarta, menunjukkan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar *khalifatullah* seperti terlihat pada rentetan gelar sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedududukan raja.[13] Dengan tidak mengurangi peran agama Islam yang kuat dalam kehidupan istana, tampak pula bahwa pandangan terhadap kedudukan raja Mataram masih dilekati oleh unsur-unsur kepercayaan pra-Islam. Sinkretisme ini tampak misalnya pada penarikan garis genealogi raja-raja Mataram ke atas sampai pada dua cabang nenek moyang, yaitu cabang kanan (*panengen*) sampai pada nabi-nabi dalam agama Islam dan cabang kiri (*pangiwo*) yang berakhir pada figur dewa-dewa agama Hindu.[14]

Raja dipandang sebagai pusat Kosmos dan dari raja terpancar kekuatan yang berpengaruh pada alam maupun masyarakat. Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkukuh keabsahan (*legitimacy*) sebagai raja. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja (*pulung ratu*) dan konsep tentang pewaris keturunan darah raja (*trahing kusuma rembesing madu*). Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah rajalah yang dapat menjadi raja. Meskipun seorang *homo novus* sebagai pendiri suatu kerajaan secara lahiriah hanya anak orang

---

[12] *Dagh. Register, gehouden int Casteel Batavia vans passerende daer terplaetse als over geheel Nederlandts Indie* (untuk selanjutnya Dagh Register), tanggal 14 April 1667

[13] Mengenai gelar raja-raja Mataram, khususnya raja-raja Surakarta dan Yogyakarta, dalam hubungannya dengan Islam, periksa L.W.C. van den Berg, "De Mohammedaansche vorsten in Nederlandsch Indie", *BKI*, 53, 1901, hlm. 21–25

[14] Periksa *Poeniko Serat Babad Tanah Djawi, wiwit saking Nabi Adam doemoegi ing Tahoen* 1647, 's-Gravenhage, 1941

tingkat bawahan, orang tersebut dianggap masih keturunan darah dari raja-raja masa lampau. Dalam hubungan ini perlu disebut pola anggapan tentang lahirnya seorang putra raja dengan perempuan dari kalangan rakyat biasa, seperti diketemukan dalam cerita babad ataupun dalam cerita pewayangan.

Pandangan rakyat terhadap raja seperti tersebut di atas lebih memperkuat otoritas raja dan sebaliknya memungkinkan raja untuk menuntut loyalitas sepenuhnya dari rakyat. Di dalam kitab *Wulang Reh*, yang menurut anggapan umum dikarang oleh Sunan Paku Buwono IV, tercantum ajaran yang menekankan agar rakyat mengabdi dengan sepenuh hati pada raja; raja dianggap sebagai Tuhan dan mengabaikan perintah raja sama dengan mengabaikan perintah Tuhan; rakyat digambarkan sebagai sampah terapung di lautan, yang menurut gelombang akan dibawa ke mana pun.[15]

Raja yang baik disarankan untuk menjadi pegangan bagi raja yang memerintah. Ajaran mengenai hal ini terutama tercantum dalam kitab *Asta Brata* yang diambil dari wejangan-wejangan dalam cerita pewayangan.[16] Namun, dalam sejarah raja-raja Mataram tampak bahwa tidak semua dari mereka mematuhi tuntunan itu, dan pula tidak mempraktikkan pedoman cara memerintah yang baik seperti tercantum dalam kitab *Niti Praja*.[17] Sifat personal raja sangat menentukan baik dan buruknya pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan tercermin dalam kata *ingsun* (aku) di dalam *angger-angger* (peraturan) kerajaan, seperti *ora ingsun lilani* (tidak kuperkenankan), *bakal ingsun patrapi paukuman* (akan kujatuhi hukuman), dan sebagainya.[18]

Kewibawaan raja diperbesar dengan adanya benda-benda pusaka keraton yang dianggap keramat. Anggapan adanya hubungan mistis antara raja-raja Mataram dengan Ratu Kidul (Dewi Lautan Selatan) menempatkan diri raja tidak hanya sebagai manusia biasa, tetapi manusia yang mempunyai kemampuan dan kekuatan di atas kodrat. Menara (panggung) Sangga-buwana di dalam kompleks istana Surakarta menurut kalangan istana, dahulu dipergunakan sebagai tempat pertemuan Sunan dan Ratu Kidul. Tradisi upacara *Labuhan* disertai saji-sajian di Pantai Laut Selatan, seperti dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta, menunjukkan masih dipeliharanya hubungan antara kerajaan manusiawi dan kerajaan roh halus (*lelembut*) tersebut.

---

[15] *Serat Wulang Reh, Jasan Dalem Sri Susuhunan Pakubuwana* IV, Sala, 1963, hlm. 10–11

[16] Soemodirdjo, *Serat Asta Brata Winedar* atau *Serat Asta Lokapala*, Jogyakarta, 1938

[17] Periksa kitab "Paniti Praja", M.S. Reksapustaka, No. 20

[18] Periksa kumpulan *Angger-angger* dalam tulisan T. Roorda, *Javaansche Wetten*, Amsterdam, 1944, *passim*

Anggapan adanya hubungan akrab tersebut diperkuat dengan penciptaan tarian Bedaya Ketawang yang menggambarkan pertemuan antara raja-raja Mataram dengan tokoh mistis tersebut.

Adanya sinkretisme antara agama Islam dengan kepercayaan pra-Islam, seperti hinduisme, animisme, dan dinamisme di lingkungan keraton, juga tampak pada upacara-upacara lain kerajaan, seperti upacara *Grebeg*[19] yang dijatuhkan pada hari-hari besar Islam. Penggelaran benda-benda keramat dengan sebutan Kyai seperti Kyai Plered (tombak), Kyai Sengkelat (keris), Kyai Tunggul Wulung (bendera), dan Kyai Gunturmadu dari Nigawilaga (gamelan perayaan Sekaten di Yogyakarta), menunjukkan unsur dinamisme yang mempersonifikasikan kekuatan dalam benda. Bagaimanapun juga semua tradisi dalam istana dimaksud untuk memperkukuh kedudukan raja.

Sudah disinggung di muka bahwa dalam melaksanakan kekuasaan di wilayah negaranya, raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Kepala-kepala daerah sebagai wakil raja mendapat sebagian kekuasaan dari raja untuk mengurus dan mengatur wilayah yang ada di bawah yurisdiksinya. Sebagian dari mereka diambil dari lingkungan keluarga terdekat raja, dari para bangsawan lainnya, ataupun orang-orang yang berjasa dan mendapat kepercayaan dari raja. Pengangkatan orang-orang terdekat raja dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya sikap penentangan. Tampak jelas bahwa kekuasaan besar raja memungkinkannya untuk memilih pejabat-pejabat yang sesuai dengan keinginannya. Dengan kekuasaannya, raja dapat mengangkat, menindak, ataupun memecat pejabat-pejabat dalam kerajaan.

Meskipun di samping raja terdapat semacam dewan penasihat yang anggotanya antara lain terdiri atas para pangeran yang telah berpengalaman, kekuasaan raja sangat menentukan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, seperti pengangkatan dan pemecatan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, mengadili kejahatan-kejahatan, dan mengumumkan perang. Syarat-syarat pengangkatan dan kenaikan tingkat para pejabat terutama adalah kesetiaannya terhadap raja dan jasanya terhadap kerajaan. Dalam *Babad Pacina* disebutkan bahwa pada waktu Keraton Kartasura diduduki laskar Cina yang dibantu oleh prajurit-prajurit pengikut Raden Mas Garendi pada tahun 1742, Raja Paku Buwono II terpaksa mengungsi ke Ponorogo. Ketika tiba di Magetan, Sunan memerintahkan kepada Bupati Magetan Citrodiwiryo untuk memanggil Raden Suputro dan Raden Mertoloyo yang waktu itu berada di Madiun. Kedua orang ini akan diutus

---

[19] Mengenai perayaan *Grebeg* antara lain periksa tulisan J. Groneman, *De Garebeg is te Ngayogyakarta*, Den Haag, 1895

Sunan ke Surabaya untuk bertemu dengan penguasa di Surabaya, Ki Sawunggaling dan Ki Wirosroyo, dan memberitahukan, bahwa Sunan telah meninggalkan Keraton Kartasura. Di dalam surat yang dibawa oleh kedua orang utusan itu juga disebutkan bahwa Sultan telah menaikkan pangkat disertai gelar dan nama baru kedua penguasa di Surabaya tersebut. Ki Sawunggaling menjadi Tumenggung Seconegoro, sedang Ki Wirosoyo menjadi Tumenggung Sastronegero.[20] Kenaikan tingkat tersebut diberikan karena kedua pejabat tersebut selalu menunjukkan kesetiaan kepada raja. Fakta lain mengenai pengangkatan orang yang berjasa pada raja, dengan pemberian gelar dan nama tertentu, terdapat juga pada masa perang melawan Inggris (*Geger Sepei*) di Yogyakarta pada tahun 1812. Karena jasa seorang kapten Cina bernama Tan Jin Sing pada Sultan dinilai cukup pada masa itu, pada tahun 1813 Sultan telah mengangkat menjadi Raden Tumenggung Secodiningrat.[21] Fakta-fakta demikian banyak dijumpai, baik dalam sumber babad maupun dalam sumber Kompeni Belanda. Dalam hal-hal tertentu karena raja tertarik hatinya, orang dapat juga mendapat belas kasihan raja untuk diangkat dalam kedudukan yang tinggi (*angsal sihing narpati sinengkakaken ing ngaluhur*). Sebaliknya, raja juga dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap orang ataupun pejabat yang melakukan kesalahan besar terhadap raja, seperti usaha melakukan pembunuhan terhadap raja atau melakukan pemberontakan atau makar.

3. Birokrasi

Dengan melihat kedudukan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terpisah dari pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya, secara berturut-turut akan dikemukakan hierarki jabatan dengan mengikuti sistem pembagian wilayah. Dalam pemerintahan perlu dibedakan pemerintahan dalam istana (*peprintahan lebet*) dan pemerintahan luar istana (*peprintahan jawi*).

Untuk pemerintahan dalam istana pengurusannya dibebankan kepada empat orang Wedana Dalam (*Wedana Lebet*), yaitu *Wedana Gedong Kiwa*, *Wedana Gedong Tengen*, *Wedana Keparak Kiwa*, dan *Wedana Keparak Tengen*. Sebelum tahun 1744, di atas keempat jabatan wedana ini, terdapat jabatan Patih Dalam (*Patih Lebet*) yang bertugas mengoordinasi tugas wedana-

---

[20] "Babad Pacina", milik Wiradipraja (M.S. Sonobudoyo, Nomor A/2,11)

[21] C. Poensen, "Amengkoe Boewono II (Sepuh), Ngayogyakarta's Tweede Sotan", *BKI*, 43, 1905, hlm. 279 dan seterusnya; juga periksa A. van Marle, "De Groep der Europeanen in Nederlands Indie, iets over ontstaan en Groei", *Indonesia*, Tahun ke V, Nomor 2, September 1951, hlm. 102

wedana tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Adipati Mandaraka pernah menjabat sebagai Patih Lebet, sedang pada masa pemerintahan Amangkurat I, Tumenggung Singaranu pernah diangkat menjadi Patih Lebet.[22] Sejak tahun 1755, jabatan Patih Lebet tersebut dihapuskan.[23] Para Wedana Gedong ditugaskan untuk mengurus keuangan dan perbendaharaan istana, sedang Wedana Keparak bertugas mengurus keprajuritan dan pengadilan. Pembagian tugas antara *kiwa* dan *tengen* dari kewedanaan-kewedanaan tersebut kurang jelas. Para Wedana Lebet ini biasanya memakai gelar "Tumenggung" atau "Pangeran", bila pejabat tersebut masih keturunan raja. Tiap-tiap Wedana Lebet tersebut dibantu oleh seorang *Kliwon*,[24] sering juga disebut *Papatih* atau *Lurah Carik* yang biasanya memakai gelar *Ngabehi*, kemudian seorang *Kebayan*, yang memakai gelar *Ngabehi*, *Rangga* atau *Raden*, dan 40 orang *Mantri Jajar*.

Untuk mengurusi pemerintahan di Kutagara, raja mengangkat dua orang tumenggung. Kedua tumenggung ini langsung di bawah perintah raja. Rouffaer menyebut jabatan ini sebagai *Administrateur van het kroondomein* (yang mengurusi tanah milik raja).[25] Kedudukan kedua tumenggung Kutagara ini cukup penting dan bersama-sama dengan keempat Wedana Lebet mereka merupakan anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Pada zaman Kartasura sekitar tahun 1744, pengurusan daerah Kutagara ditugaskan pada empat orang pejabat, seorang di antaranya diangkat menjadi kepala (wedana) mereka.

Wilayah Negara Agung masih termasuk daerah pusat kerajaan. Sudah disebut di muka bahwa wilayah ini dipecah menjadi delapan bagian. Tiap-tiap daerah bagian ini dikepalai oleh seorang Wedana Luar (*Wedana Jawi*). Sesuai dengan nama daerah-daerah bagian tersebut, terdapat sebutan *Wedana Bumi*, *Wedana Bumija*, *Wedana Sewu*, *Wedana Numbak Anyar*, *Wedana Siti Ageng Kiwa*, *Wedana Siti Ageng Tengen*, *Wedana Panumping*, dan *Wedana Panekar*. Umumnya wedana-wedana Negara Agung mempunyai tempat kediaman di Kutagara. Seperti halnya wedana-wedana Lebet, wedana-wedana Jawi ini masing-masing juga dibantu oleh seorang *Kliwon*, seorang *Kebayan*, dan 40 orang Mantri Jajar.[26] Sebagai koordinator para wedana ini

---

[22] *Dagh-Register*, tahun 1656–1657, hlm. 34

[23] G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", Adatrechtbundel, 34, 1931, hlm. 279

[24] Kliwon menurut Rouffaer berasal dari kata *liu* = veel = banyak; *Kliwon* = *Hoofd over Velen* (periksa *ibid.*, hlm. 291–292). Serat *Wadu Aji* menyebutkan: "*Kliwon, tegesipun kapiji, dene winenang anampeni parentah saking Bupati, utawi tegesipun malih kalih ewon, puniko Kabekta saking lenggahipun kala ing kina siti dusun karya kalih ewu*"; periksa *Serat Wadu Aji* dalam lampiran IV tulisan Brandes, *op. cit.*, hlm. 192

[25] G.P. Rouffaer, *op. cit.*, hlm. 283

[26] *Serat Pustaka Raja Puwara*, dalam J. Brandes, *op. cit.*, hlm. 156–159

adalah seorang *Patih Jawi* yang tugasnya tidak hanya menyangkut wilayah Negara Agung, tetapi juga wilayah-wilayah kerajaan di luarnya. Di tanah-tanah *lungguh* ini bangsawan yang bersangkutan mengangkat seorang *demang* atau *kyai lurah* sebagai wakilnya.

Daerah-daerah di wilayah Mancanegara, baik Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen, masing-masing dikepalai oleh seorang bupati atau lebih. Bupati kepala daerah ini biasanya memakai gelar Tumenggung atau *Raden Arya*. Jumlah bupati yang mengepalai tiap daerah tidak sama, tergantung dari luas daerah yang diurusnya. Pada masa pemerintahan Paku Buwono II dari tahun 1726 sampai dengan 1749, daerah Kadiri yang meliputi tanah cacah seluas 4.000 *karya* atau *bau* cukup dikepalai oleh seorang bupati, antara lain pernah dijabat oleh Tumenggung Katawengan. Sebaliknya, daerah Madiun karena lebih luas, meliputi tanah cacah seluas 16.000 *karya*, dikepalai oleh dua orang bupati, yaitu Raden Tumenggung Martalaya dan Raden Arya Saputra.[27] Daerah yang tidak begitu luas cukup dikepalai oleh seorang kliwon atau mantri.

Wilayah Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen masing-masing dikepalai oleh seorang wedana bupati yang kedudukannya di atas semua bupati kepala daerah yang termasuk dalam wilayah wewenangnya. Tugas wedana bupati adalah mengawasi dan mengoordinasi semua bupati bawahannya. Ia bertanggung jawab pada raja atas keberesan pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan penghasilan daerah yang harus diserahkan ke pusat. Fakta sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1677 Mas Tumapel, saudara sepupu Panembahan Mas Giri, menjadi Wedana Bupati Mancanegara Wetan, berkedudukan di Jipang.[28] Akan tetapi, sekitar tahun 1709 untuk wilayah Mancanegara Wetan telah diangkat Tumenggung Surowijoyo. Setelah Perjanjian Gianti pada tahun 1755, wilayah Mancanegara Wetan menjadi bagian dari negara Yogyakarta, pengurusannya diserahkan kepada wedana bupati yang berkedudukan di Maospati, Madiun. Raden Rangga Prawirodirjo III, ayah Sentot Alibasyah, tokoh dalam Perang Diponegoro, adalah salah seorang dari pejabat wedana bupati tersebut. Sistem pemerintahan tersebut juga berlaku untuk wilayah Mancanegara Kilen.[29]

Baik wilayah Pasisiran Wetan atau pun Pasisiran Kilen masing-masing dikepalai oleh wedana bupati. Untuk wilayah Pasisiran Wetan, wedana

---

[27] *Ibid.*, hlm. 166

[28] B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 161

[29] Mengingat *Serat Pustaka Raja Puwara* menyebut Banyumas meliputi daerah seluas 500 karya, terluas dari daerah-daerah lainnya, kemungkinan besar Banyumas menjadi tempat kedudukan *Wedana Bupati Mancanegara Kilen*

bupati berkedudukan di Japara, sedang untuk Pasisiran Kilen berkedudukan di Tegal. Pada masa Perang Trunojoyo sekitar tahun 1677, Adipati Martoloyo menjabat Wedana Bupati Pasisiran Kilen, sedang sekitar tahun 1664 sebagai Wedana Bupati Pasisiran Wetan adalah Tumenggung Martonoto.[30] Seperti halnya wedana bupati di wilayah Mancanegara, Wedana Bupati Pasisiran bertugas mengawasi dan mengoordinasi bupati-bupati kepala daerah yang ada di bawah yurisdiksinya.

Selain memakai gelar *Adipati* atau *Tumenggung* penguasa-penguasa daerah Pasisiran juga ada yang memakai gelar *Kyai Demang* atau *Kyai Ngabehi*, terutama mereka yang menjabat sebagai bupati. Sebagai contoh Kyai Ngabehi Wongsorojo, yang menjabat Bupati Semarang sekitar tahun 1657, dan Tumenggung Suronoto yang menjabat sebagai Bupati Demak. Pemerintahan kota di Pasisiran biasanya dipercayakan pada seorang kepala yang bergelar *Kyai Lurah*. Pada zaman Sultan Agung, di daerah Pasisiran juga terdapat tanah *lungguh* dari beberapa bangsawan istana. Sebagai contoh, daerah Pemalang sekitar tahun 1623 berada di bawah yurisdiksi, Pangeran Purboyo, yang pemerintahannya diwakilkan kepada seorang *Kyai Lurah*,[31] sedang Pekalongan di bawah yurisdiksi Pangeran Uposonto.[32]

Selain jabatan-jabatan kepala daerah tersebut di atas, masih terdapat jabatan-jabatan lainnya baik, tingkat tinggi, menengah, maupun tingkat bawah, yang diserahi tugas-tugas tersendiri dalam birokrasi kerajaan. Pada zaman Mataram Kartasura, pada sekitar tahun 1744, terdapat jabatan-jabatan yang diberi tugas khusus untuk mengepalai golongan-golongan rakyat tertentu. Jabatan ini dipegang oleh empat orang Tumenggung, yaitu Tumenggung yang mengepalai 6.000 orang *Kalang*,[33] Tumenggung yang membawahkan 1.000 orang *Gowong*, Tumenggung dari 1.200 orang *Tuwaburu*,[34] dan Tumenggung yang mengepalai 1.400 orang *Kadipaten*.

Sebagaimana halnya pejabat-pejabat kepala daerah yang mempunyai staf pegawai yang mengurusi tugas-tugas tertentu, para Tumenggung pun dibantu oleh pejabat-pejabat bawahan. *Serat Wadu Aji* dan *Serat Raja Kapa-*

---

30 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 199

31 *Ibid.*, hlm. 191

32 Periksa catatan Perjalanan de Haan dalam J.K.J. de Jonge, *De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie*, V, 1870, hlm. 30

33 Orang *Kalang* diberi tugas sebagai tukang kayu pengangkut barang, kusir pedati, dan sebagainya. Mengenai asal usul, periksa T. Altona, "Over den oorsprong der Kalang', *TBG*, 42, 1923, hlm. 521 dan seterusnya

34 Tugas orang *Gowong*, antara lain membuat kerangka rumah dan bangunan lain. Orang *Tuwaburu* adalah punggawa raja yang ditugaskan menangkap binatang buas, termasuk harimau

kapa memberikan uraian terperinci nama-nama pegawai (*punggawa*) raja dalam keraton yang mempunyai tugas tertentu di pelbagai bidang pekerjaan.[35] Di bidang keagamaan, terdapat jabatan-jabatan *Pengulu*, *Katib*, *Modin*, *Naib*, dan *Suranata*. Pejabat-pejabat keagamaan tersebut di dalam kerajaan Mataram disebut abdi dalem *Pametakan* atau *Mutihan*.

Pengulu istana merupakan jabatan tertinggi dalam keagamaan. Di dalam istana, pengulu diberi tugas memimpin upacara-upacara keagamaan, berdoa untuk keselamatan negara dan keluarga raja, menguatkan dalam upacara pelantikan raja baru, memberikan pengajaran agama kepada kerabat raja, dan sebagainya. Meskipun dalam menjalankan tugas sering kali berada di dalam keraton, tempat kediaman pengulu ini biasanya di dekat Masjid Besar Negara yang berada di dekat alun-alun. Di dalam keraton terdapat masjid khusus untuk para punggawa dan keluarga raja.

Jabatan keagamaan ini juga terdapat di unit administrasi tingkat bawahannya, seperti kewedanaan-bupati, kabupaten, dan di kelurahan atau *patinggen*. Dibandingkan dengan pengulu yang ada di daerah-daerah, pengulu istana dipandang sebagai *Pengulu Ageng* (Pengulu Besar). Dalam pandangan orang Jawa, ulama-ulama keraton ini kecuali mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai soal-soal agama, juga dianggap orang yang mempunyai kekuatan magis, orang yang keramat. Ulama-ulama istana juga dianggap mahir dalam ilmu nujum, ilmu mantera, ilmu gaib, dan sebagainya.[36] Di dalam Perang Cina di Kartasura, peran Haji Mahbub dan Haji Mataram sebagai penafsir mimpi disebut-sebut, yaitu waktu pasukan Kartasura akan menyerang benteng Kompeni di Semarang.[37]

Pengaruh para ulama istana adakalanya begitu kuat sehingga dapat memengaruhi politik pemerintahan raja. "Babad Pakepung" menyebutkan betapa kuatnya pengaruh empat orang ulama keraton yang bernama Bahman, Nursaleh, Wirodigjo, dan Panengah pada diri Sunan Paku Buwono IV.[38] Pengaruh kuat para ulama juga tampak pada bidang kemiliteran. Nasihat para ulama sangat diperlukan untuk menentukan hari atau saat penyerangan terhadap musuh karena ulama-ulama istana juga dianggap mahir dalam ilmu menghitung saat (*ngelmu petungan*).

---

[35] Periksa *Serat Wadu Aji*, dalam J. Brandes, *op. cit.*, hlm. 190–201: juga *Raja Kapa-kapa*, dalam *ibid.*, hlm. 186–189

[36] "Buku Isi Tetedakan Pranatan Dalem tuwin Serat Warni-warni tumrap Nagari Surakarta", M.S. Radyapustaka No. 165, hlm. 23

[37] "Babad Pacina", M.S. Sanabudaya Nomor A/2, 75a

[38] "Babad Pakepung", M.S. Sanabudaya Nomor 127, 7a; juga periksa C. Poensen, "Mangkoeboemi, Ngayogyakarta's eerste Soeltan", *BKI*, 3, 1901, hlm. 333

Dalam membicarakan ulama-ulama dalam birokrasi negara ini masih perlu disinggung ulama-ulama yang mengepalai daerah *perdikan*. Mereka ini diberi tugas oleh raja untuk mengurusi pekerjaan tertentu. Ulama yang mengepalai desa *Perdikan Mutihan* ditugaskan untuk memelihara tempat ibadah seperti masjid dan langgar, dan untuk memberi pelajaran agama di daerahnya. Ulama yang mengepalai desa *Perdikan Pakuncen* mendapat tugas dari raja sebagai juru kunci, untuk memelihara kuburan keluarga raja. Di samping itu, masih terdapat bentuk perdikan lain yang mempunyai kewajiban non-religius.[39] Pengangkatan seorang ulama menjadi kepala desa perdikan berdasarkan pelbagai motif. Ada yang karena jasa ulama tersebut pada raja, seperti dapat menyembuhkan penyakit raja atau keluarganya; karena kemahirannya dalam bidang agama, raja tertarik padanya atau adakalanya karena hubungan perkawinan antara raja dengan anak atau keluarga ulama tersebut. Meskipun tidak seperti ulama-ulama birokrasi tingkat kelurahan, ulama-ulama kepala desa *perdikan* tergolong juga *abdi dalem* raja. Penghasilan mereka berupa gaji, tetapi juga hasil bumi ataupun penghasilan lain dari daerah *perdikan*.

Jabatan penting lainnya di dalam keraton ialah jabatan *pujangga*. Pujangga ini adalah pejabat yang mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang pengetahuan, seperti dalam sastra, adat tradisional, seni, sejarah, *ngelmu* Jawa, bahkan juga mempunyai pengetahuan cukup tentang agama. Oleh raja ia diberi tugas menulis seluk-beluk yang berhubungan dengan raja, keraton, maupun negara, misalnya menulis genealogi raja, menyusun syair (*tembang*) mengenai peristiwa-peristiwa dalam keraton, menulis cerita sejarah (babad), juga menulis ramalan, filsafat, dan petuah-petuah cerita pewayangan. Di antara pujangga-pujangga terkenal dapat disebut antara lain Yosodipuro dan Ronggowarsito dalam keraton Surakarta.

Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan *jeksa*. Jabatan ini termasuk di bawah wewenang wedana-wedana *Keparak*. Di dalam sidang pengadilan istana, *jeksa* mengemukakan bukti-bukti kesalahan-kesalahan dari terdakwa (*pesakitan*) dan mengajukan tuntutan-tuntutan. Sidang pengadilan diadakan di ruang (*bangsal*) khusus yang disebut *Bangsal Pancaniti* dan dihadiri oleh raja dan para pangeran yang telah berpengalaman sebagai penasihat raja. Setelah mendengar pembelaan dari pihak terdakwa dan kemudian pendapat-pendapat dari para pangeran, akhirnya raja setelah melakukan semedi (mengheningkan cipta sebentar), lalu menjatuhkan

---

[39] F. Fokkens Jr, "Vrije Dessa's op Java en Madoera", *TBG*, 31, 1886, hlm. 486 dan seterusnya

vonis.[40] Sebagai pelaksana hukuman mati terdapat jabatan *mertalulut* dan *singanegara*. *Mertalulut* mempunyai tugas melaksanakan hukuman mati dengan jerat tali, seperti hukuman gantung. Singanegara bertugas menghukum mati dengan senjata tajam, seperti menusuk dengan keris, tombak, atau memenggal dengan pedang.

Untuk mengurus penghasilan raja dilakukan, antara lain oleh pejabat *pemaosan* dan *melandang*. Jabatan-jabatan ini termasuk di bawah wewenang wedana-wedana Gedong. *Pemaosan* mempunyai tugas mengumpulkan pajak tanah, sedang *Melandang* bertugas mengurusi pungutan hasil bumi yang diserahkan ke keraton. Sebagaimana pejabat-pejabat lainnya, *pemaosan* dan *melandang* juga mempunyai bawahan yang membantunya.

Selain itu, masih ada kelompok pekerja yang ditugaskan untuk membuat barang-barang tertentu ataupun perlengkapan lain untuk keperluan istana. Mereka adalah *abdi dalem gending*, yang bertugas membuat gamelan, *Kemas* untuk membuat barang-barang perhiasan dari emas, *genjang* sebagai pekerja yang membuat barang-barang dari kuningan, dan *sarawedi* sebagai pengasah intan dan berlian. Kemudian, perlu juga disebut *abdi dalem pande* yang ditugaskan membuat barang-barang dari besi, *palingga* sebagai pembuat batu bata, *Jlagra* sebagai tukang pembuat barang dari batu, *undagi* sebagai pembuat dari pengukir barang-barang dari kayu, dan *gerji* sebagai tukang jahit istana.

Di samping itu, terdapat juga kelompok pekerja yang diberi tugas untuk membersihkan kompleks dalam istana inti (*lebet cepuri*) ialah *abdi dalem kemit-bumi*, sedang pekerja yang membersihkan kompleks di luar istana ditambah lagi dengan tugas sebagai pengangkut barang adalah pekerja *gladag*. Kelompok-kelompok pekerja tersebut masing-masing dikepalai oleh pejabat yang biasanya berpangkat lurah dan pembantunya yang berpangkat *bekel*.

Susunan pejabat-pejabat dalam rumah tangga istana, dalam ukuran yang kecil juga ditiru oleh kepala-kepala daerah, seperti wedana-bupati, bupati, juga oleh bangsawan-bangsawan di daerah. Demikian pula susunan birokrasi dalam unit administrasi tingkat atas terdapat miniaturnya dalam unit-unit administrasi tingkat di bawahnya. Pada tingkat kelurahan atau *petinggen* juga terdapat pejabat-pejabat yang mengurusi pekerjaan-pekerjaan khusus, seperti soal pengairan, keamanan, dan lainnya. Yang bertindak sebagai sekretaris lurah adalah *carik*, yang sekaligus menjabat sebagai wakilnya apabila

---

[40] Gambaran mengenai jalannya pengadilan secara mendetail pada zaman Sultan Agung, yang merupakan model dari cara pengadilan kerajaan-kerajaan sesudahnya periksa "Catatan Perjalanan R.V. van Goens dalam J.K.J. de Jonge", *op. cit.*, V, 1870

lurah tidak ada di kelurahan. Sebagaimana halnya pada unit administrasi tingkat atasan, di kelurahan selain pejabat-pejabat yang mengurusi soal-soal sekuler, juga terdapat pejabat-pejabat dalam bidang keagamaan, seperti *kaum*, *modin*, ataupun *naib*.

Dalam menguraikan jabatan-jabatan birokrasi masih perlu disinggung jabatan-jabatan kemiliteran. Sebelum pengaruh kekuasaan Belanda merembes di lingkungan istana, susunan jabatan kemiliteran Mataram masih menggunakan sistem tradisional.

Gelar kepangkatan dalam kemiliteran (keprajuritan) disusun menurut hierarki dari atas ke bawah, seperti terdapat pangkat *senapati*, *panji*, *lurah*, dan *bekel prajurit*. Akan tetapi, setelah pengaruh Belanda masuk dalam lingkungan istana, gelar-gelar kepangkatan dalam sistem kemiliteran Belanda juga dipergunakan seperti kolonel, letnan kolonel, mayor, kapten, letnan, dan seterusnya. Keadaan demikian tampak jelas terutama pada susunan Legiun Mangkunegoro dan Pakualam, juga pada berapa gelar kepangkatan keprajuritan di istana Surakarta dan Yogyakarta.

Sebelum terdapat pengaruh Belanda dalam susunan kemiliteran kerajaan, raja mempunyai prajurit tetap yang terutama bertugas sebagai penjaga istana. Prajurit ini merupakan prajurit profesional yang mendapat gaji dan jaminan hidup dari istana. Di antara prajurit tersebut ada yang dipilih menjadi prajurit pengawal pribadi raja. Di samping itu, bila diperlukan, raja dapat mengadakan *militie* di seluruh wilayah kekuasaannya. Adanya pengerahan laskar-laskar daerah tersebut diuraikan dengan jelas dalam kitab-kitab babad. Pada masa Sultan Agung pernah terjadi pengerahan laskar dari desa-desa, seperti desa-desa antara Trayem (sebelah barat daya Muntilan) dan Pingit untuk diberangkatkan menyerang daerah Jawa Timur (*Bang Wetan*).

Menurut keterangan Dr. De Haan, yang pada tahun 1622 sebagai duta VOC mengunjungi istana raja di Kertasura, dikatakan bahwa pada waktu ia sampai di daerah antara Trayem dan Pingit, ia tidak menjumpai orang laki-laki kecuali yang lanjut usianya. Ia mendapat keterangan bahwa orang laki-laki yang masih kuat diharuskan berkumpul di alun-alun Kertasura, untuk selanjutnya diberangkatkan ke medan perang.[41] Pada masa Amangkurat I, untuk menghadapi pasukan Kraeng Galesong dalam masa Perang Trunojoyo, pernah raja memerintahkan laskar Mancanegara untuk berangkat. Ketika ternyata pasukan Mancanegara di bawah Raden Panji Kartosulo ini tidak

---

41 Periksa "Verbaal, gehouden door Dr. de Haan, als afgezant van den Gouverneur-Generaal Jan Pieterz, Coen. namens de Vereenigde Oost-Ind. Comp. aan den Panembahan van Mataram in 1622", dalam J.K.J de Jonge, *op. cit*., IV, 1869, hlm. 299, dan seterusnya

berhasil,[42] raja kemudian memberangkatkan pasukan Pasisiran yang dipimpin oleh Prawirotaruno.[43] Waktu Paku Buwono II akan menyerang benteng kompeni Kartasura, ia telah mengerahkan pasukan-pasukan daerah. *Babad Pacina* menyebutkan berhimpunnya laskar daerah Sewu, Numbakanyar, dan pasukan Mancanegara.[44]

Pasukan-pasukan daerah tersebut dipimpin oleh kepala-kepala daerah setempat atau orang lain yang ditunjuk. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa kepala-kepala daerah kecuali bertugas dalam bidang pemerintahan adakalanya juga diberi tugas kemiliteran. Senapati perang sering diangkat secara mendadak oleh raja, berhubung ada serangan musuh atau pengiriman ekspedisi militer. Dalam Perang Diponegoro (1825–1830) perlawanan-perlawanan berkobar di daerah-daerah, seperti perlawanan di daerah Semarang yang dipimpin oleh Pangeran Serang, perlawanan rakyat di daerah Kertosono oleh Bupati Kertosono, dan perlawanan yang berkobar di daerah Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirdjo. Sewaktu Sultan Agung akan menyerang Kompeni Batavia pada tahun 1628, ia mengangkat Tumenggung Baurekso, Bupati Kendal, sebagai Senapati Perang. Pemilihan Senapati Perang dapat juga jatuh pada bangsawan keluarga dekat dari raja, seperti Pangeran Sujonopuro dan Pangeran Uposonto dalam perang terhadap Kompeni Batavia pada tahun 1629. Demikian pula penunjukan pangeran-pangeran dari keraton Yogyakarta, seperti Pangeran Murdaningrat dan Pangeran Panular menjadi pemimpin pasukan untuk melawan Diponegoro.

Di samping prajurit profesional, raja juga mempunyai petugas mata-mata (*telik sandi*) untuk mengawasi tindakan para pejabat dalam kerajaan. Mata-mata ini tidak hanya terdapat di daerah pusat, tetapi juga disebar ke daerah-daerah. Khusus untuk menjaga keamanan umum di dalam kerajaan juga terdapat petugas kepolisian, yang di dalam kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dalam abad ke-18 dan 19 dikenal dengan nama *Abdi Dalem Gunung*. *Serat Angger Gunung* yang dikeluarkan pada masa itu dimaksudkan untuk mengatur keamanan dalam wilayah kerajaan, dan mengurus soal-soal kejahatan berupa pembegalan, pencurian, pembunuhan, pelanggaran perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya.[45] Petugas *gunung*-lah yang

---

[42] J.J. Meinsma, ed., *Babad Tanah Djawi* (prosa), I, 1903, hlm. 292–294; juga periksa H.J. de Graaf, "De opkomst van Raden Troenodjojo", dalam *Djawa*, 20, 1940, hlm. 74

[43] J.J. Meinsma, ed., *op. cit.*, hlm. 294–299; H.J. de Graaf, *loc. cit*

[44] Periksa *Babad Pacina*, milik Djajadiputra, M.S. Sunabudaya No. A/2, 45a

[45] Mengenai *Serat Angger Gunung*, di samping *Serat Angger* lainnya, seperti *Serat Angger Pradata Dalem* dan *Serat Angger Sedasa*, tercantum dalam buku T. Roorda, *Javaansche Wetten*, Amsterdam, 1844. Mengenai pembunuhan dalam pasar misalnya, periksa *Serat Angger Gunung*, Pasal 83 dalam T. Roorda, *op. cit.*, hlm. 211

diharuskan mengurus dan menyerahkan pihak-pihak yang tersangkut kepada dinas yang bertugas memeriksa dan mengadili.

Pejabat-pejabat birokrasi tidak mendapat imbalan jasa berupa gaji, tetapi sebagai pengganti jerih payah, mereka mendapat *gaduhan* atau peminjaman tanah, sebagai tanah lungguh dari raja. Dari hasil bumi tanah tersebut para pejabat dapat membiayai keperluan hidup mereka. Tentunya tidak semua hasil tanah lungguh tersebut menjadi bagian dari pejabat-pejabat birokrasi. Sebagian hasilnya harus diserahkan kepada kas kerajaan. Tidak hanya para pejabat birokrasi yang mendapat imbalan jasa berupa tanah lungguh, tetapi para bangsawan keluarga raja juga mendapatkannya. Dalam *Serat Pustaka Raja Puwara* disebutkan bahwa nenek raja (*Ratu Eyang*) mendapat tanah lungguh sama dengan tanah lungguh ibu dari raja (*Ratu Ibu*) dan dari istri raja (*Ratu Kencana*) yaitu masing-masing 1.000 karya, sedang tanah lungguh Adipati Anom adalah seluas 8.000 karya.[46] Masing-masing Wedana Lebet mendapat tanah lungguh seluas 5.000 karya. Tanah lungguh wedana-wedana Jawi tidak sama luasnya, tetapi tergantung dari luas daerah yang diperintahnya. Sebagai contoh Wedana Bumi dan Wedana Bumija, masing-masing mendapat 6.000 karya, sedang Wedana Siti Ageng Kiwa dan Wedana Siti Ageng Tengen masing-masing mendapat 10.000 karya.[47] Baik Patih Lebet maupun Patih Jawi masing-masing mendapat 20.000 karya.

Jabatan lain yang lebih rendah juga mendapat tanah lungguh sebagai imbalan jasa. Hal ini termuat dengan terperinci dalam *Serat Pustaka Raja Puwara*. Antara lain dapat disebut seperti jabatan *pecat tanda* yang mendapat tanah lungguh 475 karya; *tanda mantri* mendapat 475 karya; *rangga* mendapat 350 karya; *demang* mendapat 200 karya, sedang *pangalasan* 112 karya.[48] Mungkin sekali tenaga-tenaga yang belum merupakan pejabat tetap, dalam pengertian masih dalam status belajar (*magang*), mendapat sekadar imbalan jasa dengan hasil bumi atau dalam bentuk uang, terutama sewaktu peredaran mata uang mulai meluas dalam abad ke-19.

Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu diusahakan agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu syarat yang penting untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah pusat kerajaan dan pemerintah di daerah-daerah adalah tetap adanya kewibawaan raja di satu pihak dan tetap terpeliharanya loyalitas penguasa-penguasa daerah di lain pihak. Dalam hubungan ini raja mengadakan seleksi terhadap orang-orang yang akan diangkat sebagai kepala daerah. Loyalitas

---

[46] Periksa *Serat Pustaka Raja Purwara* dalam J. Brandes, *op. cit.*, hlm. 147, juga *Serat Wadu Aji* dalam *ibid.*, hlm. 192

[47] *Pustaka Raja Puwara, op. cit.,; Serat Wadu Aji, loc. cit.*

[48] *Pustaka Raja Puwara, op. cit.*, hlm. 147–148

terhadap raja menjadi syarat mutlak untuk setiap pengangkatan. Dalam sejarah kerajaan Mataram tampak sekali bahwa hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan baik. Hal seperti ini terjadi terutama apabila raja yang sedang memerintah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari syarat-syarat yang diharapkan untuk pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dengan baik. Di lain pihak dapat pula terjadi bahwa ketegangan antara pusat dan daerah disebabkan adanya keinginan penguasa daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Keadaan seperti itu dapat diketahui misalnya dalam zaman pemerintahan Sultan Agung, pada waktu Adipati Pragola dari Pati berusaha untuk melepaskan diri dari pusat dengan mengadakan penentangan terhadap raja.

Karena adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya penentangan dari penguasa daerah, raja mengadakan sistem pengawasan yang teliti. Keharusan bupati-bupati daerah untuk menghadap raja pada upacara *Grebeg* adalah salah satu cara untuk mengetahui loyalitas mereka. Tidak hadir dalam upacara tersebut tanpa alasan yang jelas, akan menimbulkan kecurigaan raja. Apalagi bilamana ketidakhadiran itu terjadi berkali-kali tanpa keterangan. Dalam keadaan seperti itu raja biasanya mengutus seorang pesuruh (*gandek*) untuk menanyakan sikap sebenarnya dari penguasa daerah tersebut. Di samping *gandek* adakalanya raja mengirimkan *telik sandi*, untuk menyelidiki tingkah laku pejabat yang dicurigai. Apabila ternyata bupati daerah tersebut melakukan persiapan-persiapan untuk mengadakan perlawanan terhadap raja, raja mengirimkan seorang utusan yang sekaligus menjadi kepala (senapati) dari pasukan bersenjata yang menyertainya. Utusan ini diberi tugas oleh raja untuk menginsafkan bupati yang akan memberontak tersebut, tetapi apabila usaha itu gagal ia diberi kuasa oleh raja untuk menundukkannya dengan kekuatan senjata. Tipe utusan seperti ini, juga disebut *duta ngrampungi* (duta yang bila perlu menundukkan dengan perang), banyak dijumpai dalam sejarah kerajaan Mataram. Bagaimanapun juga tindakan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan terhadap penguasa-penguasa daerah dan menghancurkan kekuatan-kekuatan yang akan menentang kekuasaan raja.

Di samping keharusan penguasa-penguasa daerah untuk menghadap raja sebagai bukti loyalitas pada waktu-waktu yang ditentukan, keharusan memberi upeti kepada raja juga merupakan cara untuk mengadakan pengawasan. Penyerahan upeti (*glondong pengareng-areng*) kepada raja merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Cara lain yang dilakukan untuk mengecilkan kemungkinan timbulnya sikap penentangan terhadap raja adalah perwakilan politik. Penguasa

daerah yang cukup kuat dan mencoba untuk melepaskan diri, oleh raja didekati dan diminta untuk datang ke keraton. Penguasa daerah tersebut disuruh tinggal lebih lama di keraton dan diizinkan untuk kawin (mendapat *triman*) dengan seorang putri keraton. Ketika Madura ditaklukkan oleh Sultan Agung pada tahun 1624, seorang pangeran Madura bernama Prasena, yang dikhawatirkan akan memperkuat diri lagi untuk mengadakan penentangan, oleh raja diharuskan tinggal di keraton Mataram. Di keraton, Prasena mendapat perlakuan baik dan dikawinkan dengan putri keraton Ratu Ibu. Baru setelah terbukti menunjukkan loyalitas pada raja, Prasena diperbolehkan memerintah Madura, bahkan diberi nama baru Pangeran Cakraningrat (I).[49]

Untuk menghindari kemungkinan timbulnya kekuasaan yang kuat dari bupati-bupati daerah, pemindahan tugas sering kali dilakukan. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa kemungkinan timbulnya penentangan di daerah-daerah yang lebih jauh dari keraton adalah lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di dekat keraton. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penguasa daerah yang jauh dari pusat dilakukan lebih ketat. Dapat dibayangkan bahwa kekuasaan raja terasa makin menipis di daerah-daerah yang lebih jauh letaknya. Penguasa-penguasa daerah mempunyai kekuasaan dan pengaruh cukup besar di daerah yurisdiksinya. Kehidupan penguasa daerah adalah mirip dengan kehidupan raja dalam ukuran lebih kecil. Mereka juga mempunyai lambang-lambang kebesaran dan mempunyai pengikut bersenjata. Pemindahan tugas adalah cara yang efektif untuk menghalangi makin besarnya kekuasaan bupati daerah.

Fakta-fakta historis dalam abad ke-17 sangat jelas memberikan bukti, karena pada masa itu pengaruh VOC terhadap kebijakan politik raja belum terasa. Antara lain dapat disebut pemindahan-pemindahan tugas yang kerap kali dilakukan bagi penguasa daerah di Japara. Pada tahun 1647 Bupati Wedana Pasisiran Tumenggung Wirosetyo telah menggantikan penguasa yang lama Tumenggung Mertonoto, tetapi pada tahun 1653 Wirosetyo telah dipindahkan lagi untuk memegang jabatan lain, yakni menjadi penguasa di Tegal. Setelah untuk beberapa waktu berkuasa di Tegal Wirosetyo, ia dipindahkan lagi ke Japara. Akan tetapi, kemudian ia dipindahkan lagi untuk memangku jabatan baru di keraton, dan sebagai penguasa baru di Japara diangkat Reksomenggolo. Namun, baru beberapa waktu lamanya menduduki jabatan itu, Reksomenggolo telah dipindahkan

---

[49] Kesetiaan Pangeran Cakraningrat I terhadap Raja Mataram terbukti bahwa ia gugur dalam menjalankan perintah raja untuk bertempur melawan pemberontakan Pangeran Alit di Alun-alun Plered pada tahun 1647; periksa R. Maurenbrecher "Tjakra (adi) ningrat, Vorstenhuis van Madoera", *TBG*, 2, 1889, hlm. 294

untuk diganti oleh Wirodikoro. Pada waktu kemudian Wirodikoro tidak mendapat perhatian raja dan pada tahun 1677 diganti oleh Wongsodipo.[50]

Sudah disebutkan bahwa raja mempunyai orang-orang yang ditugaskan sebagai *telik sandi* di daerah-daerah. Di samping itu, pengiriman pejabat-pejabat istana ke daerah-daerah dimaksudkan pula untuk mengetahui dari dekat keadaan pemerintahan daerah. Pejabat-pejabat tersebut juga diberi tugas meneliti cara kerja penguasa daerah dan memperingatkan apabila mereka mengabaikan tugas-tugas yang harus dilakukan, seperti tugas pengumpulan pajak-pajak yang sudah ditentukan diserahkan ke pusat. Sebagai ilustrasi ialah apa yang dilakukan oleh dua pejabat pusat Nitinegoro dan Wirojoyo pada tahun 1664, yang diperintahkan oleh Raja Amangkurat I untuk melawat ke daerah-daerah pesisiran mulai dari Gresik sampai Japara, dengan tugas untuk memaksa semua bupati pesisiran agar menyerahkan bea cukai yang didapatnya ke kas kerajaan.[51]

Teranglah bahwa pelbagai cara telah dilakukan oleh raja sebagai penguasa pusat kerajaan untuk menjaga hubungan yang stabil antara pusat dan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa daerah yang dapat menggoyahkan hubungan pusat dan daerah akan mendapat hukuman dari raja. Pembiayaan hidup raja beserta keluarganya, dan pejabat-pejabat dalam istana bergantung pada penghasilan yang dikumpulkan dari daerah-daerah, dalam bentuk penyerahan hasil bumi atau pajak ke kas keraton. Sebagai balas jasa raja memberi perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah kekuasaannya. Di samping itu, pemerintah pusat mengambil alih kesukaran-kesukaran yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah daerah, seperti tertimpa bencana alam, percekcokan antara penguasa daerah satu dengan yang lain, dan kedatangan gerombolan penjahat yang mengganggu keamanan rakyat suatu daerah. Pemerintah pusat memberi fasilitas berupa pembuatan bangunan-bangunan umum yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah seperti pembuatan jembatan-jembatan besar, jalan-jalan besar, dan gudang-gudang bandar.

Untuk memelihara tata tertib di seluruh wilayah kerajaan, diciptakan peraturan-peraturan (*angger-angger*) yang harus ditaati oleh seluruh penduduk. Ketentuan dalam *Serat Angger* menyebutkan bahwa orang yang bepergian harus membawa surat keterangan (*layang padang*),[52] tidak lain adalah untuk menertibkan dan memudahkan pengawasan penduduk yang melawat dari daerah satu ke daerah lainnya. Sudah disinggung pula di

---

50 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 198

51 Dagh-Register, 1664, hlm. 520

52 Periksa T. Roorda, *op. cit.*, *passim*

muka bahwa *Abdi Dalem Gunung* yang diserahi tugas kepolisian akan menangani dan mengurusi kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan penduduk. Dengan demikian, tampak bahwa terdapat pertukaran jasa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun sering kali tampak pula bahwa dalam pemerintahan seorang raja tuntutan pada arus jasa ke pusat lebih besar daripada yang diberikan oleh raja kepada daerah.

4. Masyarakat

Secara garis besar masyarakat dalam negara Mataram, termasuk juga setelah menjadi negara-negara Surakarta dan Yogyakarta, dapat dibagi menjadi dua bagian, *pertama* ialah lapisan atas atau disebut lapisan orang besar (*wong gede*, *priayi luhur*), sebagian besar termasuk golongan yang memerintah. Lapisan *kedua* adalah lapisan bawah, yaitu rakyat biasa (*wong cilik*, *kawula alit*) yang jumlahnya jauh lebih besar daripada lapisan atas dan merupakan golongan yang diperintah. Lapisan atas meliputi raja beserta para bangsawan keturunan raja dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Pejabat-pejabat birokrasi di unit pemerintahan tingkat terbawah seperti di kelurahan termasuk lapisan wong cilik. Di antara kedua lapisan tersebut, terdapat pejabat-pejabat birokrasi tingkat menengah yang mempunyai status sebagai priayi juga meskipun lebih rendah daripada lapisan atas yang disebut di muka. Termasuk dalam kategori ini adalah pejabat-pejabat birokrasi tingkat menengah pada dinas-dinas dalam pemerintahan pusat kerajaan ataupun pada unit pemerintahan daerah kabupaten.

Tampaklah bahwa lapisan atas terdiri dari golongan bangsawan keturunan raja, bangsawan karena pengangkatan, juga pejabat-pejabat birokrasi tingkat atas. Dari golongan keturunan darah raja masih dibagi-bagi menurut derajat keturunan, yang masing-masing mempunyai status dan prestise (harkat) sendiri dalam masyarakat.[53] Dapat dimengerti bahwa dalam masyarakat kerajaan, status priyayi menjadi idaman setiap orang, justru karena status priayi dianggap lebih tinggi dan terhormat daripada status golongan lainnya. Kecuali bangsawan keturunan dari raja-raja Mataram, di daerah-daerah terutama di daerah Pasisiran, terdapat bangsawan keturunan dari dinasti sebelumnya.

Di samping itu, dalam masyarakat juga terdapat golongan-golongan, seperti golongan pedagang, petani, pekerja pengrajin, buruh, dan budak. Pada masa pemerintahan negara Mataram, golongan petani merupakan

---

[53] Adatrechbundel, 14, (Java en Madoera), 's-Gravenhage, 1917, hlm. 137 dan seterusnya. Juga "Javaansche Titels", TNI, 4, 1846, hlm. 254, dan seterusnya

jumlah yang terbesar, mengingat sifat agraris dari kerajaan tersebut. Merekalah sebenarnya yang menghasilkan produksi untuk kebutuhan bahan makanan seluruh penduduk. Namun, dalam sistem status yang berlaku pada waktu itu mereka termasuk golongan bawah. Kedudukan pedagang dalam masyarakat kerajaan masih di bawah kedudukan pejabat-pejabat atau *abdi dalem* raja. Kedudukan sebagai priayi atau *abdi dalem* merupakan hal yang ideal bagi anggota masyarakat. Dengan adanya anggapan ini, pedagang kaya berusaha menjalin hubungan yang lebih erat dengan priayi, terutama melalui tali perkawinan. Dengan demikian, diharapkan status pedagang tersebut turut terangkat.

Golongan pekerja kerajinan meliputi mereka yang berusaha dalam pembuatan barang-barang kesenian, seperti ukiran-ukiran, perhiasan, dan pertenunan. Masih dapat juga disebut adanya pengusaha-pengusaha tradisional yang membuat alat-alat rumah tangga, genteng, batu bata, alat-alat dari besi, dan lainnya. Produksi mereka merupakan barang dagangan baik melalui pemesanan maupun dengan menjajakannya di pasar-pasar. Perusahaan-perusahaan tradisional ini mempunyai buruh-buruh sesuai dengan keahliannya, baik berasal dari lingkungan desa sendiri maupun dari luar. Termasuk golongan buruh adalah mereka yang bekerja demi mendapatkan upah, seperti buruh pengangkut di pasar-pasar, di bandar-bandar sungai, demikian pula buruh penggarap sawah.

Meskipun jumlahnya terbatas, terdapat pula dalam masyarakat apa yang digolongkan sebagai budak. Hidup mereka tergantung pada tuannya, baik karena akibat utang piutang, maupun karena hal lain, seperti bekas tawanan perang. Perlu juga disebut golongan yang dicela oleh masyarakat, adalah pembegal, pencuri, berandal, dan sebagainya. Mereka kebanyakan hidup tidak menetap dalam suatu desa, tetapi berpindah-pindah. Adakalanya menetap secara ilegal dalam desa atau menetap dalam hutan-hutan atau gua-gua yang tidak jauh letaknya dari desa.

B. Bali

1. Wilayah

Menjelang pertengahan abad ke-19, di Bali terdapat sejumlah negara, masing-masing mempunyai raja dan pemerintahan sendiri. Di pantai utara, memanjang dari Tanjung Pasir di sebelah barat sampai ke Tanyar (sebuah kota di sebelah timur laut Gunung Batur), terdapat kerajaan Buleleng. Di ujung timur pulau ini terdapat kerajaan Karangasem, dan di Pantai Tenggara terdapat kerajaan-kerajaan Klungkung dan Gianyar. Di sebelah selatan, terdapat kerajaan Badung, sedangkan di daerah pantai barat daya terdapat

kerajaan Jembarana, Tabanan, dan Mengwi. Satu kerajaan lagi, yaitu Bangli, terdapat di tengah pulau ini.

Di antara raja-raja dari negara-negara tersebut di atas, Raja Dewa Agung dari Klungkung diakui sebagai raja tertinggi oleh hampir seluruh negara di Bali. Selain sebagai raja, menurut adat ia diakui sebagai pemimpin agama di seluruh Bali.

Wilayah kekuasaan raja-raja Bali pernah tidak terbatas pada daerah Bali saja, tetapi sampai Pulau Lombok. Di Lombok terdapat empat negara, yaitu Karangasem (Singasari), Mataram, Pagesangan, dan negara Pagutan, dan sejak tahun 1740 sampai tahun 1838 menjadi negara vasal kerajaan di Bali. Akan tetapi, seluruh wilayah Lombok lepas dari tangan raja Bali setelah salah satu raja di Bali dapat dikalahkan oleh raja Mataram pada tahun 1838.

Daerah kekuasaan tiap-tiap negara dibagi dalam bagian-bagian wilayah yang masing-masing dikepalai oleh seorang raja bawahan, *Pamade*, yaitu bangsawan keluarga dekat dari raja. Sebagai contoh ialah kerajaan Buleleng, dibagi dalam wilayah-wilayah: Singaraja, Tejakula, dan Banjar; kerajaan Badung dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Denpasar, Pamecutan, dan Kesiman.

Pembagian suatu kerajaan atas wilayah-wilayah itu didasarkan atas batas alam. Sebagai contoh, Klungkung dibagi dalam dua bagian, yaitu wilayah berada di sebelah timur dan sebelah barat Tukad Unda. kerajaan Karangasem dibagi dalam dua bagian, yaitu wilayah sebelah timur dan sebelah barat Bukit Penyu. Untuk mengurusi wilayah-wilayah ini, raja bawahan atau *Pamade* dibantu oleh pejabat-pejabat tertentu. Nama jabatan-jabatan tersebut berbeda antara negara yang satu dengan lainnya. Mengenai nama jabatan-jabatan itu akan diuraikan di bagian berikut.

2. Raja dan Bangsawan

Raja-raja di Bali memakai gelar *Anak Agung*, *Cokorda*, *Ida Cokorda*, atau lainnya. Di wilayah negaranya, raja dihormati sebagai penguasa tertinggi. Kekuasaan raja diperoleh karena keturunan. Para raja menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang mereka buat, dan yang disebut *Peswara*.[54]

Kekuasaan raja cukup besar untuk dapat mengumpulkan pasukan rakyat bersenjata di dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai, untuk

[54] Ida Anak Agung Gde Agung, *Bali pada Abad XIX Perjuangan Rakyat dan Raja-raja Menentang Kolonialisme Belanda 1808–1904*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989, hlm. 311

memelihara loyalitas rakyat terhadap raja, ada suatu tradisi yang disebut *ngarebeg*. Di dalam upacara *ngarebeg* penduduk laki-laki di wilayah negara datang berkumpul dengan membawa senjata mereka masing-masing dan mengadakan parade pasukan bersenjata di hadapan raja dan para pembesar. Tradisi ini selain untuk menunjukkan kekuasaan raja juga dimaksudkan untuk memelihara perasaan tanggung jawab rakyat terhadap keselamatan negara.

Kekuasaan raja juga tampak di bidang lain, seperti pada pengerahan tenaga rakyat untuk memperbaiki bendungan. Di Bali masalah pengairan merupakan masalah penting bagi kerajaan. Pengaturan pengairan untuk tanah persawahan dengan sistem *subak* menyangkut segi kehidupan pokok rakyat Bali. Di Badung, pengaliran air untuk sawah-sawah di seluruh wilayah tergantung dari lima bendungan besar, yaitu bendungan Kadewatan, Mambal, Praupan, dan Ongan, yang semuanya ada di Tukad Ayung, dan bendungan Pegat di Tukad Yeh Pegat. Tiga di antara bendungan-bendungan tersebut terletak di luar batas kerajaan Badung. Sebaliknya, dua bendungan lainnya yang terletak di dalam wilayah itu, tidak hanya mengairi sawah-sawah di wilayah kerajaan Badung, tetapi juga mengairi sawah-sawah di wilayah kerajaan Gianyar dan Mengwi. Jelaslah bahwa dalam urusan pengairan diperlukan kerja sama antara satu dengan lainnya.

Apabila ada bendungan yang rusak, raja-raja yang berkepentingan mengumumkan *gebug gumiyan* kepada seluruh rakyat mereka. Meskipun pengertian *gebung gumiyan* adalah semacam "dalam keadaan perang", dalam hubungan ini dapat diartikan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Setelah ada pengumuman tersebut, seluruh rakyat laki-laki diwajibkan berkumpul untuk segera *gugur gunung* memperbaiki bendungan tersebut. Meskipun bekerja dalam *gebug gumiyan* ini merupakan tugas untuk kepentingan umum, dengan pengerahan penduduk *banjar-banjar* desa (*kerja sasaradan*), karena tugas tersebut menyangkut pula keselamatan negara, dari sudut ini *ayahan gebug gumiyan* juga bersifat tugas wajib bagi negara. Di kerajaan Karangasem, *ayahan* tersebut disebut *ayahan laku sembah*, dan di negara Badung disebut juga *ayahan gebug gumiyan* atau *ayahan babanjaran*.

Kekuasaan raja juga tampak dalam situasi perang. Apabila raja mengumumkan perang, penduduk laki-laki di seluruh wilayah negara yang masih kuat diwajibkan datang dengan membawa senjata mereka masing-masing. Mereka dimasukkan dalam kelompok-kelompok pasukan di bawah pimpinan kepala-kepala pasukan yang ditunjuk oleh raja. Pengerahan tenaga dari rakyat juga sering dilakukan untuk keperluan upacara-upacara kebesaran yang diadakan oleh raja atau keluarga raja. Adakalanya juga diadakan pengerahan tenaga untuk membantu kelancaran upacara keagamaan seperti

pitrayadnya. Dengan melihat hal-hal tersebut di atas jelas bahwa kekuasaan raja terhadap rakyatnya cukup besar. Dalam bidang politik raja berkuasa untuk mengambil keputusan-keputusan seperti mengadakan perjanjian dengan kerajaan lain ataupun kekuasaan luar, mengumumkan perang dan damai, di samping kekuasaannya untuk mengangkat, memindah, ataupun memecat penjabat-penjabat birokrasi kerajaan.

Raja-raja bertempat tinggal di dalam puri (istana) bersama-sama dengan keluarga dekat raja (bangsawan). Puri adalah identitas kekuasaan raja di Bali.[55] Di dalam puri, raja mempunyai *abdi-abdi* yang diberi tugas tertentu. Pada saat-saat diadakan upacara di dalam istana, para *punggawa* kerajaan, baik yang berasal dari dalam kota kerajaan maupun dari daerah-daerah, datang menghadap raja.

Istana dan ibu kota secara bersama-sama merupakan suatu mikrokosmos dari suatu tatanan supranatural. Keduanya bukan saja inti, mesin, atau tumpuan gerak dari negara, melainkan juga adalah negara itu sendiri.[56]

Di dalam puri terdapat *abdi* yang mempunyai keahlian di bidang seni,[57] seperti *sangging* yang ahli ukir-ukiran dan membuat patung. Ia ditugaskan menghias puri dan rumah-rumah bangsawan keluarga raja. Para *undagi druwe* mendapat tugas membuat bangunan-bangunan dan barang-barang dari kayu, seperti yang terdapat di puri kerajaan Klungkung. Di puri Gianyar terdapat kelompok *abdi pangentengan* yang diberi tugas membuat genteng untuk keperluan puri. Kelompok-kelompok petugas tersebut masing-masing dikepalai oleh *prebekel*. Di dalam puri terdapat pula kelompok *prebekel gong* yang diserahi tugas mengurus gamelan istana. Kelompok *prebekel pangobatan* bertugas mengurusi obat senjata api. Kelompok *prebekel pangawin* dengan tugas membawa tombak waktu mengiringkan raja. Kelompok *prebekel luput senapan* ditugaskan sebagai pengiring raja bersenjatakan senapan. Selain itu, masih terdapat kelompok-kelompok petugas lain.

Para abdi yang bekerja untuk kepentingan puri biasanya disebut *pangayah sajroning ancak saji*. Di samping itu, terdapat para abdi yang bekerja di luar puri yang disebut *truna manca jabaning ancak saji*. Di puri Krambitan kelompok abdi yang disebut terakhir itu selain ditugaskan bekerja di luar

---

55 Agus Aris Munandar, *Istana Dewa Pulau Dewata Makna Puri Bali Abad ke-14–19*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2005, hlm. 162

56 Clifford Geertz, *Negara Teater Kerajaan-kerajaan di Bali Abad ke-19*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 2000, hlm. 26–27

57 Di dalam *Babad Buleleng* disebutkan adanya pertunjukan wayang yang dilakukan oleh dalang Ki Pun Gulyang, bertempat di puri Ki Gusti Agung Pahang. Periksa P.J. Worsley, *Babad Buleleng*, The Hague, 1972, hlm. 191

puri, juga diberi tugas bekerja di puri raja atasannya di Tabanan. Kelompok pekerja dalam puri yang di beberapa kerajaan juga disebut *panjeroan*. Panjeroan mempunyai tempat tinggal di sekitar puri dan mendapat kebutuhan hidup sehari-hari (*pecatu*) dari puri. Masih perlu disebut abdi raja yang menjadi *pangayah kadalem* yang diberi tugas untuk menjaga pesanggrahan raja. Sebagai penghasilan, mereka juga mendapat sebidang tanah sebagai *pecatu*. *Pengayah kadalem* diberi tugas juga untuk menjaga rumah-rumah raja dan para pembesar kerajaan.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, sistem penggantian raja di Bali didasarkan atas keturunan. Biasanya pengganti raja yang meninggal adalah putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki yang lahir dari permaisuri yang berasal dari golongan bangsawan (kesatria). Adakalanya apabila putra laki-laki lebih dari seorang, raja memilih putra yang dicintai dan dianggap cakap sebagai calon penggantinya. Adalah menjadi adat kebiasaan di Bali bahwa putra mahkota baru aktif menjadi raja setelah upacara pembakaran jenazah raja yang meninggal. Apabila putra mahkota yang menggantikan masih di bawah umur, biasanya diwakili oleh ibunya atau salah seorang bangsawan yang dipilih oleh para *punggawa pedanda*. Jika putra mahkota belum dewasa, dibentuk suatu dewan perwakilan yang terdiri dari para bangsawan dan *punggawa* istana.

Penggantian raja yang meninggal dapat dilakukan dengan pelbagai cara, tetapi pemegang kekuasaan baik yang tetap maupun yang sementara selalu dari bangsawan keluarga dekat raja.

3. Birokrasi

Untuk menjalankan pemerintahan di seluruh wilayah suatu kerajaan, raja dibantu oleh para penjabat pemerintahan yang secara hierarkis menduduki fungsi tertentu dalam birokrasi kerajaan. Sebagai pusat pemegang kekuasaan adalah raja, yang di dalam mengambil kebijakan pemerintahan didampingi oleh sebuah Dewan kerajaan yang bernama *Pasamuan Agung*. Tugas pokok Pasamuan Agung adalah memberi nasihat dan pertimbangan pada raja dalam memecahkan persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dan ikut membantu dalam penyusunan undang-undang kerajaan. Di samping itu, Pasamuan Agung juga diserahi tugas untuk mengurusi hubungan dengan penguasa-penguasa di luar kerajaan. Di kerajaan Bangli, Pasamuan Agung sekaligus berfungsi sebagai Dewan Keluarga Raja. Di kerajaan lain, di samping raja terdapat juga penguasa pembantu raja yang mengurusi pemerintah di daerah tertentu di wilayah kerajaan dan mempunyai punggawa serta pejabat manca sendiri. Di

beberapa kerajaan, penguasa pembantu raja tersebut disebut *made* atau *pamade*. kerajaan Tabanan pernah mempunyai seorang penguasa pembantu seperti itu, yaitu I Gusti Ngurah Made Kaleran.

Di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari raja dibantu oleh seorang *Bagawanta*. Di bawah raja terdapat jabatan *patih*, *prebekel*, atau *pambekel kota* dan punggawa-punggawa daerah. Di kerajaan Badung, di bawah raja terdapat jabatan patih yang merangkap sebagai jaksa atau *sedahan gede*. Jabatan yang terakhir ini juga sering disebut *panyarikan gede*. Adakalanya juga merangkap sebagai *pangulun subak*. Sesuai dengan pembagian wilayah kerajaan, punggawa-punggawa diberi kekuasaan oleh raja untuk memerintah di daerah-daerah dan membawahi pejabat-pejabat pemerintahan sampai di tingkat desa. Kedudukan punggawa-punggawa ini setingkat dengan kepala distrik. Di Buleleng, punggawa disebut *pambekel gede*, sedangkan dahulu hanya cukup disebut *pambekel*. Mereka kebanyakan mempunyai darah keturunan raja dan juga mendiami rumah tempat tinggal yang disebut puri. Di Buleleng dan Jembrana, jabatan pambekel adalah sebagai kepala antara tingkat distrik dan desa, sedangkan wakil-wakil punggawa yang bertugas di desa disebut *klian manca*.

Peradilan di tiap kerajaan diselenggarakan oleh suatu majelis, yang disebut *Kerta*. Majelis ini mendasarkan keputusannya atas peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh raja, yakni *Peswara*. Majelis Kerta terdiri atas beberapa anggota yang ditunjuk raja, dan yang disebut *Jaksa*. Di samping itu, ada pejabat lain yang berfungsi sebagai pencatat, seperti panitera pengadilan yang disebut *Kanca*.[58]

Pejabat yang menghubungkan raja dan masyarakat pengairan adalah kepala pengairan yang disebut *sedahan gede* atau *sedahan agung*, juga sering disebut *panyarikan gede*. Di bawah jabatan ini terdapat jabatan *sedahan tembuku* yang bertugas mengawasi pengaliran air ke sawah-sawah dan menerima pajak pemakaian air. Di bawahnya terdapat jabatan *klian subak* yang ditugaskan langsung mengatur pengaliran air ke sawah-sawah dan mengurusi administrasi pemasukan uang dari pemakai. Karena masalah pengairan ini menyangkut kebutuhan masyarakat desa, pada hari-hari tertentu diadakan rapat untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul. Biasanya rapat semacam itu diadakan pada tiap 35 hari sekali yang dijatuhkan pada hari *Anggara Kasih* atau *Buda Kliyon*. Apabila ada warga desa yang tidak datang pada rapat tersebut, ia dikenakan denda.

---

[58] Ida Anak Agung Gde Agung, *Bali pada Abad XIX Perjuangan Rakyat dan Raja-raja Menentang Kolonialisme Belanda 1808–1904*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1989, hlm. 26–27

Di beberapa daerah, kepala desa disebut *prebekel*. Hubungan desa dengan negeri dijembatani oleh *prebekel*.[59] Di dalam menjalankan pemerintahan desa, *prebekel* didampingi oleh dewan orang-orang tua yang disebut *duluan desa*. Di beberapa desa yang bertindak sebagai pengurus desa adalah sejumlah warga desa yang cukup tua. Dua orang di antaranya yang usianya lebih lanjut dari lainnya dipilih sebagai *rama desa* atau *prewayah*. Dalam menjalankan tugas, *rama desa* dibantu antara lain oleh *kubayan*, *bau*, *singgukan*, *pangabin*, dan *pangenem*. Beberapa desa merupakan suatu *banjar* yang dikepalai oleh seorang *klian banjar*, sering juga disebut *panyarikan*. Klian banjar ini dipilih dari dan oleh anggota masyarakat banjar. Dalam mengurusi kepentingan masyarakat banjar, klian banjar dibantu oleh beberapa *juru arah* atau *saya* yang terutama bertugas sebagai pesuruh untuk menyampaikan perintah-perintah atau pemberitahuan dari *klian* kepada anggota masyarakat banjar. Di desa sering ada pertemuan yang disebut *pasangkepan desa*, sedangkan di wilayah banjar pada waktu-waktu tertentu diadakan pertemuan yang disebut *pasangkepan banjar*. Pasangkepan banjar juga diadakan tiap 35 hari sekali dan biasanya jatuh pada hari *Anggara Kasih* (Selasa Kliwon) dan Sabtu *Kliyon*.

Pejabat-pejabat kerajaan seperti telah disebut di atas secara hierarkis melintas dari atas ke bawah dan masing-masing mengurusi tugas-tugas yang sesuai dengan wewenangnya. Terlihat adanya dua jalur hierarkis dari atas ke bawah, yaitu di satu arah menuju ke masyarakat desa dan di lain arah menuju ke masyarakat pengairan. Tiap-tiap arah dilengkapi dengan susunan birokrasi yang sesuai dengan wewenangnya. Pejabat-pejabat tersebut diangkat oleh raja atau wakilnya yang diberi wewenang untuk melakukannya atas nama raja. Kecuali tugas-tugas administratif, para *punggawa*, *prebekel*, dan *sedahan* bertanggung jawab atas penjagaan keamanan di wilayah mereka. Di dalam hal keamanan sebenarnya para kepala tersebut hanya mengawasi dan mengatur karena pada dasarnya penjagaan umum langsung menjadi tanggung jawab seluruh rakyat.

Di batas-batas desa terdapat rumah-rumah penjagaan (*pagebagan*) guna menertibkan dan mengawasi orang-orang yang keluar masuk dari desa satu ke desa yang lain. Dalam peraturan mengenai banjar tercantum juga ketentuan mengenai penjagaan terhadap tahanan atau tawanan (*magebagan bebandan*). Di tiap-tiap desa terdapat kentongan desa (*kulkul*) yang dipukul pada waktu akan mengumpulkan penduduk desa. Dari jenis pukulan tersebut dapat diketahui oleh penduduk desa peristiwa apa yang sedang terjadi, seperti ada pembunuhan, pencurian, kebakaran, atau peristiwa

---

[59] Clifford Geertz, *Negara Teater Kerajaan-kerajaan di Bali Abad ke-19*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, hlm. 103

kawin lari. Apabila mendengar *kulkul* berbunyi, penduduk desa terutama laki-laki diwajibkan keluar rumah dan bersama-sama mengatasi bahaya tersebut. Barang siapa tidak mau datang berkumpul, oleh desa dijatuhi hukuman. Akan lebih berat apabila di antara penduduk desa ada yang menjadi korban waktu mengatasi bahaya tersebut.

Penjagaan keamanan juga diadakan di daerah pengairan. Untuk keamanan tersebut, pengawasan dan penjagaan (*tilikan*) pada subak merupakan keharusan, terutama guna mencegah adanya pencurian air. Di desa-desa daerah Jembrana terdapat penjaga keamanan (*pecalang*) khusus untuk ternak, sedangkan di Karangasem terdapat kelompok penjaga keamanan hutan yang disebut *langlang alas*. *Sekaha gulungan* yang terdapat di daerah Nusa Penida adalah semacam polisi ternak yang berhak mengadili jika terjadi pencurian ternak dari penduduk desa.

Tugas kepolisian untuk keamanan seluruh wilayah kerajaan tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, tetapi juga yang menyangkut politik. Dalam hubungan ini raja-raja dan para pembesar dalam kerajaan-kerajaan Bali mempunyai petugas mata-mata yang disebut *dolop* atau *pacalang*. Petugas-petugas ini disebar ke daerah-daerah untuk mengawasi kemungkinan timbulnya penentangan terhadap raja ataupun hal-hal yang membahayakan kerajaan. Petugas khusus semacam ini di kerajaan Tabanan disebut *pangruruh* atau *jejeneng*.

Sifat religius penduduk Bali sangat tebal. Oleh karena itu, kedudukan para pendeta agama, baik Siwa maupun Buddha sangat terhormat. Di dalam kerajaan-kerajaan, tugas-tugas yang bersifat keagamaan menduduki tempat yang penting pula. Di puri-puri terdapat *pedanda-pedanda* yang ditugaskan memimpin upacara-upacara keagamaan, seperti pelantikan raja baru, pembakaran jenazah raja dan keluarganya, upacara pada hari-hari besar keagamaan, dan pemujaan pada dewa-dewa. Raja mempunyai tempat-tempat pemujaan dengan pendeta-pendeta khusus yang mengurusinya. Pendeta-pendeta tidak hanya terdapat di pusat-pusat kerajaan, tetapi juga di daerah-daerah sampai pada kesatuan wilayah kecil tingkat desa. Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap desa di Bali mempunyai tempat pemujaan yang diurus oleh pendeta beserta pembantu-pembantunya.

4. Masyarakat

Meskipun tidak setajam pembagian kasta di India, di Bali terdapat juga penggolongan penduduk menjadi empat kasta (*caturwarna*, *caturwangsa*, atau *caturjanma*), yaitu *brahmana*, *kesatria*, *wesya*, dan *sudra*. Termasuk golongan brahmana adalah para resi, baik dari agama Siwa maupun

Buddha; golongan kesatria, meliputi raja, para bangsawan, dan keturunannya; golongan weisya, mencakup para petani terpandang yang masih keturunan kebayan dan para seniman; golongan sudra termasuk di dalamnya para petani kecil, pedagang, rentenir, nelayan, dan lainnya.

Golongan brahmana adalah golongan yang terhormat dalam masyarakat Bali. Golongan ini dapat dibagi dua, yaitu para Brahmana Siwa dan Brahmana Buddha. Dari segi silsilah, golongan Brahmana Siwa dianggap masih keturunan pendeta Nirarta, seorang anak dari Dangiyang Asmaranata dalam zaman Bali kuno. Para Brahmana Buddha dianggap masih keturunan Dangiyang Asmaranata juga melalui garis keturunan Dangiyang Astapaka. Dibanding dengan yang menurunkan Brahmana Siwa, yang menurunkan Brahmana Buddha lebih muda satu derajat keturunan. Dangiyang Astapaka dikatakan bertempat tinggal di Budakling di daerah Karangasem. Dangiyang Asmaranata dianggap masih keturunan Empu Barada.

Pendeta Nirarta yang juga disebut Bagawan Dwijendra atau Padanda Sakti Wau Rawuh mengadakan perkawinan dengan putri-putri dari beberapa Dangiyang dan menurunkan cabang-cabang keturunan yang mempunyai sebutan sesuai dengan nama tempat tinggalnya. Oleh karena itu, golongan Brahmana Siwa di Bali dibedakan menurut cabang nenek moyang yang menurunkannya, seperti *Brahmana Kamenuh*, *Brahmana Kamiten*, *Brahmana Manuaba*, *Brahmana Mas*, dan *Brahmana Antapan*. Brahmana yang belum menjalani pelantikan (*madiksa*, *mapadgala*, dan *mawinten*) disebut *Brahmana Welaka*, sedangkan setelah dilantik menjadi pendeta ataupun pedanda mendapat sebutan *Brahmana Sulinggih* atau *Sang Gede*. Keturunan Brahmana menggunakan sebutan *Ida*. Apabila anak itu lahir dari istri yang berasal dari golongan brahmana, ia mendapat sebutan *Ida Bagus* dan apabila putri menggunakan sebutan *Ida Ayu* atau *Idayu*. Menurut urutan kelahiran, anak-anak laki-laki tersebut mendapat sebutan panggilan: *Ida Wayan*, *Ida Nyoman*, *Ida Made*, dan *Ida Ketut*. Sebutan *Ida Made*, *Ida Nyoman*, dan *Ida Ketut* juga digunakan untuk anak-anak brahmana yang lahir dari istri kasta yang lebih rendah.

Golongan kesatria dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu golongan *kesatria dalem*, golongan *predewa*, dan golongan *pangakan*, *prebagus*, atau *presangiyang*. Anak laki-laki kesatria dalem yang lahir dari istri yang berkasta di atasnya apabila menjadi raja ia mendapat gelar *Cokorda*. Anak-anak lainnya yang tidak dipilih menjadi raja termasuk golongan predewa. Apabila anak itu laki-laki memperoleh sebutan *I Dewa* dan apabila perempuan mendapat sebutan *I Dewa Ayu*. Anak-anak dari Cokorda yang lahir dari istri padmi juga memakai gelar Cokorda, sedangkan anak-anak

yang lahir dari istri selir (*panawing*) memakai gelar *I Dewa* atau *Anak Agung*. Selanjutnya, anak dari *I Dewa* yang lahir dari istri padmi juga bergelar *Anak Agung*. Golongan kesatria dalem yang kawin dengan perempuan dari kasta rendah apabila mempunyai anak termasuk golongan *pangakan*, *prebagus*, atau *presangiyang*. Anak-anak dari golongan ini apabila laki-laki mendapat sebutan *Dewa Bagus*, *Bagus* atau *Kagus*, *Pangakan*, atau *Ngakan*, dan *Sang*, tetapi apabila perempuan mendapat sebutan *Dewa Ayu*, *Desak*, *Ayu* atau *Yayu*, dan *Sang Ayu*.

Uraian di atas mengenai keturunan kesatria dalem yang masih mempunyai asal keturunan dari Sri Kresna Kepakisan, seorang bupati yang diangkat oleh Maha Patih Gajah Mada untuk memerintah di Bali. Di samping itu, masih ada golongan kesatria yang berasal dari Jawa, yang disebut para *arya*. Mereka ini datang setelah Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343. Mereka seterusnya bertempat tinggal menyebar di pelbagai daerah di Bali. Keturunan para arya ini memakai gelar *Gusti*, *I Gusti*, atau *Ki Gusti*. Kedudukan arya sebagai kesatria di Bali tidak begitu mantap, bahkan keturunan mereka ada yang termasuk golongan weisya.

Golongan weisya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu golongan *pregusti*, golongan dari keturunan arya Jawa, dan keturunan tiga orang weisya dari Jawa yang datang di Bali bersama-sama para arya Jawa. Para pregusti ini dikatakan masih keturunan Arya Damar, Arya Gajah Para, dan Arya Wangbang. Golongan pregusti yang laki-laki memakai sebutan *I Gusti*, sedangkan yang perempuan menggunakan sebutan *Ni Gusti Ayu*. Golongan weisya keturunan arya dari yang laki-laki memakai sebutan *gusti*, sedangkan yang perempuan dengan sebutan *Gusti Ayu* atau *Ayu*. Keturunan weisya Jawa memakai sebutan *Gusti* atau *Si* untuk laki-laki dan *Ni luh* untuk perempuan. Para weisya Jawa yang dahulu datang di Bali tersebut bernama Tan Kuwur, Tan Mundur, dan Tan Kober.

Golongan sudra terdiri dari rakyat bawahan. Golongan ini juga dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: mereka yang mendapat anugerah dari raja, mereka yang diangkat oleh raja menjadi *prebekel*, sudra tingkat bawah yang juga disebut *sudra jati*, *tani kelen*, atau *panegen*. Golongan sudra juga sering disebut *wong jaba* atau *wong kesamen*, sedang mereka yang mendapat anugerah dari raja sering disebut *kula wisuda*. Di daerah Klungkung terdapat orang-orang sudra tingkat atas yang mendapat sebutan *prebali*. Mereka masih keturunan pengawal-pengawal pribadi Sri Kresna Kepakisan. Golongan sudra yang mendapat anugerah raja (*kula wisuda*) memakai sebutan *Gusti*, *Si*, *Putu*, *Cede*, *Jro*, *Nengah*, dan *Wargi* di depan namanya. Kedudukan mereka sederajat dengan para keturunan weisya Jawa.

Di bawah golongan-golongan *caturwarna* atau *caturwangsa* terdapat juga para budak yang disebut *sepangan* untuk yang laki-laki dan *sepangan luh* untuk perempuan. Masih perlu juga disebut adanya para *tetunggon* (*pandeling*), yaitu orang yang kehilangan kebebasannya karena terikat oleh tuannya akibat tidak dapat membayar utang.

Untuk membedakan golongan satu dengan yang lain, kecuali gelar atau sebutan yang dipakai, antara lain dapat juga diketahui dari bentuk kompleks tempat tinggal, penggunaan bahasa, dan tingkah laku.[60] Mengenai tempat tinggal dapat dibedakan, misalnya, antara rumah kesatria biasanya mempunyai halaman yang dikelilingi dengan tembok berpintu gapura, yang diberi hiasan bingkai mahkota. Gapura tempat tinggal orang weisya hanya diberi ornamen biasa di bagian atasnya. Terhadap golongan kesatria, golongan kasta bawah biasa melakukan sembah, sedang bahasa yang digunakan oleh golongan bawahan terhadap atasan adalah bahasa hormat. Di dalam upacara atau pertemuan-pertemuan, golongan brahmana, kesatria, dan weisya duduk lebih tinggi daripada golongan sudra.

Dalam membicarakan masyarakat Bali kiranya belum lengkap jika belum membicarakan kedudukan dan kehidupan tiap-tiap golongan. Sebagaimana telah disinggung di muka, urutan pembagian penduduk yang bertingkat dari atas ke bawah menunjukkan tingkat kedudukannya di dalam masyarakat. Mengingat sifat religius penduduk Bali, sudah semestinya bahwa golongan brahmana menduduki tempat yang penting di dalam masyarakat. Upacara-upacara keagamaan diadakan baik di tingkat istana, di daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat desa. Pedanda-pedanda, baik dari agama Siwa maupun Buddha memegang peran penting dalam upacara *pancayadnya*, yaitu *dewayadnya*, upacara yang dipersembahkan kepada para dewa; *pitrayadnya*, upacara untuk arwah nenek moyang; *manusayadnya*, upacara-upacara yang diadakan pada tingkat-tingkat hidup manusia, *bhutayadnya*, upacara untuk makhluk-makhluk halus penjaga alam.

Di dalam upacara kematian, baik pedanda Siwa maupun Buddha bertugas untuk menyelamatkan jiwa almarhum. Tiap-tiap pedanda berdiri di sebelah kanan dan kiri jenazah, pedanda Siwa berada di sebelah kanan dan pedanda Buddha di sebelah kiri. Pedanda Siwa mengucapkan *mantraweda* dengan memercikkan tirta *pangentas* dan *tirta pabresihan*. Setelah bertukar tempat, berganti pedanda Buddha mengucapkan *mantraweda* sambil memercikkan *tirta panglukatan*. Dengan upacara tersebut, arwah

---

[60] Berburu di hutan merupakan kegemaran para bangsawan Bali. Dalam *Babad Buleleng* disebutkan bahwa di sebelah timur Angon Liman atau Bangun Liman terdapat hutan, tempat Sri Panji biasa berburu (*abuburu*). Periksa P. J. Worsley, *op. cit*., hlm. 167

almarhum diharapkan telah dilepaskan dari segala dosa. Pada kesempatan kemudian, pedanda tersebut memberikan bisikan (*pawisikan*) kepada arwah almarhum agar dengan mudah dapat naik ke surga.

Tiap-tiap pendeta mempunyai wilayah keagamaan sendiri-sendiri. Pendeta Siwa mempunyai wilayah penganut yang disebut *masiwa-kasiwa*, sedang pendeta Buddha mempunyai wilayah *masiwa-kaboda*. Tiap orang diwajibkan mengambil air suci dari *masiwanya* sendiri. Mengingat sebagian besar penduduk Bali hidup dari pertanian, upacara keagamaan juga diadakan untuk menghormati dewa-dewa yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti Dewa Tanah, Dewa Air, dan Dewa Padi. Dalam upacara-upacara semacam itu pendeta diserahi tugas untuk memimpinnya. Tempat-tempat pemujaan (*pura*) tersebar di daerah-daerah, dan sebagai pemimpin upacara-upacara adalah pendeta-pendeta daerah setempat. Mengingat pentingnya kedudukan para pendeta dalam masyarakat Bali, adalah wajar jika mereka diberi pengecualian-pengecualian dari pemerintahan kerajaan. Pengecualian itu antara lain berupa pembebasan pajak bagi tanah-tanah milik mereka. Tanah kompleks pura (*labapura*) juga dibebaskan dari pajak. Hasil tanah tersebut sebagian dipakai untuk biaya hidup pengurus pura, seperti pemangku dan para pembantunya. Adakalanya pemangku mendapat tanah jabatan dari pemerintah kerajaan. Para pendeta juga dibebaskan dari kerja wajib kerajaan ataupun kerja wajib wilayah. Masalah perkawinan masih dipegang teguh perkawinan secara endogami. Orang-orang dari golongan brahmana diwajibkan kawin dengan orang di lingkungan kasta mereka. Perkawinan dengan orang dari kasta yang lebih rendah dapat berakibat penurunan kasta orang brahmana tersebut. Kemurnian kasta brahmana dijaga antara lain dengan adanya larangan perkawinan yang disebut *asu pundung*, yaitu larangan bagi orang laki-laki dari kasta kesatria, weisya, dan sudra kawin dengan perempuan atau gadis dari kasta brahmana.[61]

Golongan kesatria juga mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Kerabat raja dan para bangsawan lainnya mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah kerajaan, seperti pemberian tanah-tanah *apanage*. Hubungan antara golongan kesatria dengan golongan brahmana sangat erat. Eratnya hubungan tersebut dikarenakan selain tingkat kasta mereka langsung berdekatan, juga karena kedudukan mereka sebagai penguasa di bidang keduniawian sangat erat hubungannya dengan kekuasaan para

---

[61] Pengaruh para brahmana cukup kuat di daerah tingkat distrik, seperti apa yang dapat dilihat di distrik Banjar yang terletak di sebelah barat ibu kota kerajaan Singaraja. Adanya brahmana-brahmana yang tinggal di distrik tersebut membawa akibat besarnya pengaruh distrik-distrik sekitarnya. Periksa "De expeditie naar Bali in 1868", MT, 1873, hlm. 125

brahmana di bidang keagamaan. Dalam pelantikan raja baru, pentahbisannya dilakukan oleh pedanda-pedanda istana. Meskipun dalam sistem kasta tersebut brahmana lebih tinggi tingkatannya daripada golongan kesatria, dalam beberapa hal kekuasaannya golongan kesatria melebihi brahmana. Para pedanda istana baik dari agama Siwa maupun Buddha berada dalam lingkup birokrasi kerajaan yang tunduk pada peraturan kerajaan. Pelantikan *brahmana welaka* menjadi pendeta atau *brahmana sulinggih* harus mendapat izin dari raja. Dapat dikatakan bahwa golongan kesatria sebagian besar mempunyai kegiatan dalam bidang politik kerajaan. Di dalam masa perang biasanya merekalah yang diangkat menjadi panglima-panglima perang. Di dalam soal perkawinan umumnya orang-orang dari kasta kesatria kawin dengan orang sekasta. Dengan adanya larangan perkawinan *alangkahi karang ulu*, tidak mungkin golongan weisya dan sudra kawin dengan golongan kesatria.

Meskipun dari segi kasta, golongan-golongan tersebut seakan-akan tertutup satu sama lain. Namun, dalam masyarakat sering kali batas tersebut tidak selalu tampak. Misalnya, dalam mata pencarian, adakalanya golongan weisya melakukan bidang usaha yang sama dengan yang dilakukan oleh orang dari golongan kesatria. Hal ini disebabkan tidak seluruhnya orang dari golongan kesatria dapat menduduki fungsi penting dalam birokrasi kerajaan. Kehidupan sehari-hari golongan kesatria dari derajat kelahiran agak bawah, banyak yang hampir tidak berbeda dengan kasta di bawahnya. Demikian pula halnya golongan weisya tingkat bawah, hampir tidak berbeda dengan golongan sudra atas. Bahkan, kehidupan petani-petani dari golongan sudra yang beruntung dalam usaha pertaniannya dapat lebih baik daripada keturunan arya Jawa yang menurut kastanya lebih terhormat.

Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa sampai derajat tertentu kekayaan juga memengaruhi status seseorang dalam masyarakat Bali. Seorang dari kasta atas yang kurang mampu sedikit banyak menurunkan derajat prestisenya dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan orang-orang dari kasta brahmana. Penghormatan masyarakat kepada mereka lebih didasarkan pada pandangan religius. Kesucian dan kebaikan sifat dan tingkah laku di samping kemampuannya dalam soal agamalah yang menyebabkan mereka terpandang dalam masyarakat. Dengan demikian, kekayaan tidak banyak memengaruhi besar kecilnya penghormatan masyarakat kepada seseorang dari golongan brahmana.

Dalam hubungan dengan kekayaan, masih perlu disebut golongan minoritas asing yang tinggal di Bali, terutama golongan Cina, sebagai golongan terkaya. Kebanyakan di antara mereka mempunyai mata pencarian sebagai

pedagang, baik pedagang besar maupun kecil. Di samping adanya pedagang-pedagang golongan Cina yang kaya, berkat keuntungan yang mereka dapat dari perdagangan dalam partai besar, seperti perdagangan hasil bumi dan ikan, terdapat pula orang-orang Cina yang membuka toko atau warung-warung. Oleh karenanya di beberapa daerah di Bali ada sebutan *wong toko* untuk orang Cina. Sering kali mereka juga disebut *babah*, *singkeh*, atau *wong Cina*. Golongan minoritas Cina ini mempunyai tempat tinggal tersendiri dan melakukan adatnya sendiri.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, di kota-kota bandar terdapat perkampungan pedagang, seperti pedagang Makassar dan Bugis. Pedagang-pedagang tersebut di samping membeli hasil bumi dan hasil kerajinan Bali untuk diekspor ke luar dengan menggunakan perahu-perahu pedagang langganan dari kepulauan lain, juga bertindak sebagai penerima barang-barang impor dari pedagang-pedagang yang datang. Dalam abad ke-17 perdagangan budak cukup ramai. Perahu-perahu Belanda datang ke bandar-bandar untuk mengangkut budak-budak yang dijual di pulau lain. Pedagang-pedagang Jawa di abad tersebut biasanya singgah di Bali dalam perjalanan ke Maluku untuk menjual beras. Di Bali mereka membeli barang-barang kerajinan, kain batik, dan lainnya untuk selanjutnya dijual ke pulau lain yang dilaluinya.

Gambaran di atas menunjukkan ramainya perdagangan laut di Bali. Sudah tentu hal tersebut berakibat adanya macam-macam suku bangsa di kota-kota bandar, baik sebagai penghuni tetap maupun sebagai penghuni musiman. Hubungan antara penguasa kerajaan dengan golongan pedagang suku bangsa lain tidak mengalami kesukaran. Demikian pula perbedaan agama tidak merupakan rintangan dalam mengadakan hubungan. Di samping budak, golongan yang kehilangan kebebasannya karena tidak dapat membayar utang (*pandeling*) masih banyak terdapat di Bali. Dipandang dari segi kasta, mereka termasuk golongan bawah. Dalam hubungan dengan perbudakan di Bali, perlu dikemukakan bahwa tidak semua budak dari golongan rendah. Tawanan-tawanan perang atau hasil *tawan karang* adakalanya dari orang-orang kasta atas. Budak-budak yang memang berasal dari kelas rendah dalam pandangan masyarakat berbeda dengan budak-budak karena tawanan perang. Umumnya mereka yang belakangan ini lebih dihargai. Budak-budak, baik yang laki-laki (*sepangan*) maupun perempuan (*sepangan luh*), hidup di rumah tuannya dengan dijamin kebutuhan pangannya. Para *pandeling* yang di Bali sering disebut *tetunggon* bekerja di rumah tuannya sebagai angsuran utang sampai dibebaskan kembali.

C. Nusa Tenggara Barat

1. Wilayah

Pulau Lombok yang terletak di antara Pulau Bali dan Sumbawa di wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki luas sekitar 4.700 kilometer persegi.[62] Pulau Lombok terletak di antara 115 derajat 50′ dan 116 derajat 43′ Bujur Timur dan 8 derajat 10′ dan 8 derajat 54′ Lintang Selatan, dengan batas-batasnya, di sebelah barat dengan Pulau Bali yang dipisahkan oleh Selat Lombok. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Sumbawa dipisahkan oleh Selat Sape. Di sebelah utara terbentang Laut Jawa dan di sebelah selatan terhampar Samudra Indonesia.

Menurut keadaan alamnya, Pulau Lombok dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian utara Pulau Lombok. Bagian ini disebut sebagai *Kompleks Rinjani*. Deretan pegunungannya merentang dari barat ke timur dengan sejumlah gunung seperti Gunung Wangsit, Gunung Punikan, Gunung Sengkareang, Gunung Rinjani, dan Gunung Nangi. Gunung Rinjani adalah yang tertinggi, tidak kurang dari 3.775 meter di atas permukaan laut. Di lereng Gunung Rinjani terdapat sebuah danau, yaitu Segara Anakan. Danau ini sangat penting untuk kehidupan masyarakat karena danau ini menjadi sumber air untuk lahan persawahan di sekitarnya. Tanah di daerah ini sangat subur dan sesuai untuk lahan penanaman. Di bagian tengah pulau membentang dataran sepanjang 18 kilometer. Bentangan itu mencakup daerah Mataram, Cakranegara, Praya, dan Batujai. Daerah Mataram dan Cakranegara memperoleh pengairan dari Danau Segara Anakan melalui sungai-sungai, seperti Kali Babak, Kali Jangkok, dan Kali Meninting. Daerah ini tergolong paling subur dan pengairannya diatur sedemikian rupa seperti sistem subak di Bali. Daerah Praya dan Batujai tidak memperoleh air yang cukup untuk menjadi lahan persawahan sehingga sebagian besar lahannya bersifat tadah hujan. Daerah bagian selatan adalah tanah pegunungan kapur dengan ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Topografinya curam menurun hingga mencapai pinggiran laut. Daerah ini disebut Mareja Bonga yang memiliki deretan pegunungan, seperti Gunung Mareja, Gunung Sasak, dan Gunung Kawangan. Daerah pesisir pantai memberi sumbangsih tidak kalah penting untuk perkembangan masyarakat Pulau Lombok. Beberapa daerah pantainya sesuai untuk pelabuhan. Di sebelah barat terletak Pelabuhan Ampenan dan Labuhan Tering yang menjalin hubungan dengan

---

[62] I Wayan Tagel Eddy, I Bara, *Lombok di Seberang Bali: Sebuah Studi tentang Pemberontakan Praya 1891–1894*, Yogyakarta, Tesis Magister S2 Program Studi Sejarah Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1992, hlm. 23

Pulau Bali, sedangkan di sebelah timur adalah Labuhan Haji dan Piju yang berhadapan dengan Pulau Sumbawa.

Perkembangan awal masyarakat dan politik di Pulau Lombok tidak terlepas dari hubungannya dengan Bali. Walau sebagian besar masyarakat pulau ini beragama Islam, pengaruh Bali ikut memainkan peran. Sebelum masuk pengaruh Bali itu, sekitar abad ke-17–18, masyarakat Lombok mengenal bentuk kekuasaan *kedatuan*. Penguasanya memakai gelar *datu*. Menurut *Babad Lombok*, ada tiga kedatuan yang sangat besar pengaruhnya, yaitu Datu Seleparang, Datu Pejanggi, dan Datu Bayan. Di antara mereka, Datu Selaparang yang paling perkasa. Dalam mengendalikan kekuasaan, ia dibantu oleh seorang patih, yakni Banjar Getas. Suatu ketika keduanya terlibat pertikaian yang disebabkan sang patih merasa tidak puas terhadap junjungannya. Dalam bentrokan itu, Banjar Getas atau disebut juga Raden Praya, berhasil mengalahkan Datu Selaparang. Kemenangannya itu tidak terlepas dari bantuan kerajaan Karangasem di Bali pada tahun 1740.[63] Setelah keruntuhan Selaparang, kerajaan Karangasem memperluas pengaruhnya, dengan membantu masyarakat Lombok untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Sumbawa. Pada masa itu pusat pemerintahan Pulau Lombok tidak lagi berada di Lombok Timur, tetapi pindah ke Lombok Barat. Penguasa Bali menempatkan seorang wakil raja yang berkedudukan di Tanjung Karang. Setelah tahun 1774, terjadi perpecahan yang memunculkan empat kerajaan, yaitu Karangasem Sasak, Mataram, Pagutan, dan Pagesangan. Keempat kerajaan ini saling bersaing satu dengan lainnya. Pada pergolakan politik tahun 1838–1839, kerajaan-kerajaan itu, Mataram berhasil mengalahkan kerajaan lainnya. Sejak itu kerajaan Mataram berkembang dan menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok. Raja-raja Mataram masih bertalian kerabat dengan raja-raja Bali dari Karangasem. Masyarakat Sasak menjadi kaula kerajaan dan tinggal di desa-desa. Atas jasa membantu kerajaan, beberapa desa Sasak dianugerahi semacam perdikan atau keistimewaan, seperti pembebasan atas pungutan pajak kerajaan, tetapi harus bersedia memberi bantuan apabila diperlukan.

2. Raja dan Bangsawan

Tradisi kerajaan Mataram bertalian erat dengan keningratan Bali. Ketika pengaruh dan kekuasaan kerajaan Karangasem dari Bali masuk ke Lombok terjadi percampuran tradisi politik. Gelar tertinggi kerajaan, yang sebelumnya *datu* beralih menjadi *gusti*, seperti di Bali. Gelar *datu* menjadi

[63] I Gde Parimartha, *Perang Praya: Faktor Pendorong dan Campur Tangan Kolonial Belanda di Lombok (1891–1894)*, Djambatan, 8, No. 3, 1990, hlm. 128

turun derajatnya hanya untuk kalangan bangsawan, selain gelar *raden*. Raja adalah penguasa tertinggi kerajaan yang berdiam di puri atau keraton. Bersama keluarganya, raja memiliki kekuasaan atas politik dan ekonomi kerajaan. Melengkapi simbol kekuasaan istana, raja mengangkat seorang raja muda dan putra mahkota. Mereka bertindak selaku penasihat kerajaan selain sebagai pelaksana utama perintah raja. Mereka menjadi utusan raja dalam menyampaikan perintah dan pemimpin pasukan dalam suatu pergolakan. Dalam mengendalikan kerajaan, raja mengeluarkan sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh kaula kerajaan, yang disebut *Paswara* atau *Titiswara*.[64] Peraturan itu mengatur mengenai batasan melakukan suatu kegiatan, seperti di bidang ekonomi dan kepemilikan. Bawahan-bawahan raja merupakan pelaksana dan pengawas pemberlakuan peraturan-peraturan itu.

Paswara-paswara itu meliputi tata cara menjalin hubungan dengan orang asing atau disebut juga *wong sunatara*, aturan berniaga di Lombok, penghibahan tanah, perburuan di hutan, dan pelestarian lingkungan. Berkenaan dengan orang asing, sejumlah paswara mengatur tentang sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap orang asing, ketentuan-ketentuan untuk orang-orang asing, perdagangan dengan orang asing melalui *subandar*, yaitu pejabat kerajaan yang berwenang di pelabuhan, dan tentang perlakuan terhadap kapal-kapal asing yang tiba dan yang terdampar di wilayah kerajaan Lombok. Paswara ekonomi mengatur tata cara berniaga di pelabuhan Lombok. Masalah pertanahan yang diatur oleh paswara berkaitan dengan penghibahan kepemilikan tanah. Masalah tanah merupakan masalah penting yang melibatkan kepentingan raja dan kaulanya. Sejumlah paswara berisikan larangan-larangan, seperti pelarangan berburu di hutan yang dipandang sebagai hak dan milik raja, serta melarang mengganggu kelestarian Gunung Rinjani dan Danau Segara Anakan karena tempat-tempat itu merupakan kawasan suci. Paswara raja juga memberikan ketentuan kepada para bawahannya untuk memberi perintah kepada rakyat mereka agar memelihara dan memperbaiki sarana-sarana jalan agar tetap dalam keadaan laik dilalui.

Raja memiliki hak kepemilikan atas seluruh tanah di lingkungan kerajaannya. Kepemilikan itu membedakan beberapa jenis hak atas tanah. Tanah *druwe dalem* meliputi seluruh tanah yang secara langsung merupakan milik raja.[65] Jenis tanah ini dapat dibagi ke dalam tanah *pengayah, pecatu,*

---

[64] *Ibid.*, hlm. 49–51; lihat: Ida Bagus Rama, *Perubahan Sosial di Lombok 1894–1942*, Tesis S2 Program Studi Sejarah Fakultas Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1989, hlm. 26

[65] *Ibid.*, hlm. 30

dan *wakaf*. Tanah *pengayah* adalah tanah milik kerajaan yang dikerjakan oleh para petani penggarap secara turun-temurun. Mereka membayar pajak dan upeti kepada raja di samping kewajiban bekerja untuk kerajaan. Tanah *pecatu* adalah tanah jabatan yang menjadi sumber penghasilan para pejabat. Raja memberikan tanah-tanah *pecatu* untuk para abdi kerajaan sesuai dengan jabatan dan kedudukan mereka. Kemudian tanah *wakaf* adalah tanah yang hasilnya digunakan untuk membiayai lembaga keagamaan seperti pura dan masjid.

Penaklukan dan kekukuhan kekuasaan politik raja dan para bangsawan atau *triwangsa* menimbulkan akibat-akibat tertentu pada pola pemilikan tanah dalam masyarakat Lombok. Akibat utama adalah bahwa hak sita komunal yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat Desa Sasak telah beralih ke dalam lingkup hak kuasa raja sepenuhnya. Pengambilalihan hak komunal itu membuat kekuasaan raja semakin luas sehingga ia menjadi pemilik semua tanah di Lombok, baik yang digarap maupun tidak. Hak komunitas desa dan anggota-anggotanya yang secara bebas dapat memanfaatkan tanah yang tidak digarap dalam lingkup hak sita desa telah berada di bawah kekuasaan raja. Sebagai akibatnya, para petani yang hendak membuka lahan untuk membuat sawah harus memperoleh izin raja terlebih dahulu. Banyak juga tanah di hutan menjadi medan perburuan untuk raja, bangsawan, dan ponggawa kerajaan. Berburu di hutan tanpa seizin raja adalah pelanggaran yang dapat dikenai hukuman. Banyak lahan menjadi tempat peruntukan penggembalaan ternak raja. Menggembalakan hewan di daerah itu tanpa seizin raja merupakan pelanggaran.

Perubahan pola kepemilikan tanah itu berakibat penting terhadap masyarakat Sasak. *Pertama*, bahwa perubahan itu mengurangi kemandirian Desa Sasak. Sebagai organisasi sosial politik yang otonom, Desa Sasak yang berlandaskan pada hak sita komunal telah beralih. Pengalihan hak komunal itu melanda desa-desa Sasak, baik di Lombok Timur maupun Lombok Barat. Di Lombok Barat kekuasaan politik Bali telah mapan selama lebih dari dua abad, yang menyebabkan kedudukan desa sebagai organisasi sosial politik telah pupus. Pengertian hak sita komunal tidak dikenal lagi. Petani Lombok menjadi bergantung pada keadaan apakah sebagai petani penggarap tanah *druwe dalem* atau tanah *druwe jaba*. Mereka berada di bawah perintah langsung raja dan bangsawan Bali. Sementara di Lombok Timur kekuasaan politik Bali belum begitu mendalam sehingga desa masih mempertahankan bentuk dasar organisasi sosial politiknya. Pengertian hak sita masih berlaku seiring dengan kekuasaan kepala desa yang selalu dijabat oleh bangsawan Sasak. Akan tetapi, kekuasaan itu telah menjadi sangat terbatas. Tugas utama kepala telah berubah menjadi perpanjangan kekuasaan kerajaan

dalam menjalankan dan menegakkan peraturan, serta mengawasi agar para petani tetap membayar pajak sekaligus memenuhi tuntutan kerja wajib. Kepala desa di Lombok Timur telah merosot kedudukannya, mereka tidak lagi sebagai penguasa daerah, tetapi lebih menjalankan peran sebagai pemungut pajak untuk kerajaan.

Selain itu, raja memiliki hak atas tanah melalui tata cara tertentu. Tanah *pengacil* adalah tanah yang menjadi milik raja karena pemiliknya meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya tidak ada. Tanah-tanah ini selanjutnya dikerjakan petani dengan cara bagi hasil. Sementara tanah *druwe jaba* tidak langsung di bawah penguasaan raja, tetapi berada di bawah perseorangan yang berdiam di luar puri atau istana kerajaan yang ditunjuk oleh raja. Jenis kepemilikan tanah ini mirip dengan yang berlaku di Bali. Ada dua tipe tanah *druwe jaba*, yaitu yang dimiliki bangsawan Bali atau *druwe jaba* Bali dan *druwe jaba* Sasak yang dimiliki oleh bangsawan Sasak. Raja tidak memungut pajak dan pengerahan tenaga kerja dari pemilik tanah-tanah ini. Namun, para aristokrat Bali dan Sasak, para pemilik tanah ini, memungut pajak dan tenaga kerja dari para penggarapnya. Sistem pemilikan tanah *druwe jaba* tidak menyenangkan para petani Sasak yang sebelumnya dapat menikmati hasil tanah garapannya. Masalah kewajiban dan penggarapan tanah ini kerap menjadi sumber perlawanan petani Sasak.

Di samping raja dan keluarganya, kehidupan politik kerajaan mengenal golongan aristokrat atau bangsawan. Pola *triwangsa* masyarakat Bali memengaruhi kehidupan kerajaan Mataram Lombok. Pengaruh itu tampak pada pemakaian gelar, pola hubungan sosial, pelaksanaan upacara, dan ritual kerajaan. Dalam triwangsa, semua gelar diperoleh secara askriptif atau turun-temurun dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Para bangsawan kerajaan terkadang ikut serta dalam acara-acara kerajaan yang penting ketika memperoleh restu raja, seperti dalam pembuatan perjanjian dengan pihak luar kerajaan. Dalam perjanjian tahun 1843 yang dibuat antara raja Lombok dan pemerintahan Hindia Belanda, di samping raja dan raja muda, para bangsawan *Bahudanda* juga ikut menandatangani perjanjian itu, seperti Gusti Gde Wanasari, Dewa Anom, Gusti Gde Rai, Gusti Nengah Peguyangan, dan Gusti Nyoman Tangkeban.[66] Kewajiban para bangsawan yang penting adalah membantu raja ketika menghadapi gejolak politik baik yang berasal dari luar kerajaan maupun dari dalam, selain memberi upeti secara berkala. Biasanya raja mengangkat pejabat di lingkungan istana dari kalangan bangsawan.

---

[66] ANRI, *Surat-surat Perdjandjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1814 s.d. 1938*, Djakarta, ANRI, 1964, hlm. 338

3. Birokrasi

Dalam menjalankan kekuasaan sehari-hari, raja dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang ditunjuknya. Secara wilayah, kerajaan terbagi atas *keponggawaan* atau distrik dan desa atau kampung.[67] Distrik dipimpin oleh seorang pejabat kerajaan yang bergelar *ponggawa*. Raja mengangkat dan memberhentikan seorang ponggawa yang berasal dari golongan triwangsa. Dalam pengendalian pemerintahan distrik sehari-hari tidak langsung dilakukan oleh ponggawa melainkan diemban oleh para pejabat yang disebut *pembekel*. Pejabat ini langsung ditunjuk oleh para ponggawa. Pembekel bertanggung jawab mengenai keamanan di wilayahnya dan sewaktu-waktu mengerahkan penduduk untuk bekerja bergotong royong bagi kepentingan umum seperti perbaikan jalan dan kebersihan tempat peribadatan. Jabatan ini bersifat turun-temurun. Di wilayah distrik Bali, para pembekel diangkat dari kalangan pemuka masyarakat Bali, sedangkan di daerah Sasak para pembekel berasal dari golongan *perwangsa* atau bangsawan Sasak. Para ponggawa tidak berdiam di wilayah jabatannya, tetapi di sekitar puri kerajaan yang berada di Mataram dan Cakranegara. Jumlah distrik mencapai 50 wilayah. Para ponggawa sesekali mengunjungi distrik jabatannya terutama ketika melaksanakan kewajiban utamanya, yakni mengumpulkan pajak masyarakat berupa pajak tanah *druwe dalem* dan *pengancil*. Pungutan itu dikumpulkan dalam bentuk hasil panen pertanian, terutama padi. Seluruh hasil itu mereka serahkan kepada seorang pejabat Sedahan Agung. Wilayah desa atau disebut juga *dasan* diperintah oleh para *kliyang*. Pengangkatan mereka melalui suatu kesepakatan pada suatu musyawarah. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh *juru arah* yang bertugas menyampaikan perintah pejabat kerajaan kepada penduduk desa. Ia juga dibantu oleh petugas keamanan yang disebut *langlang*.

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari raja dibantu oleh para pejabat tinggi kerajaan, seperti *bahudanda*, *bhagawanta*, *jaksa* atau *kerta*, *sedahan agung*, dan *subandar* atau syahbandar. *Bahudanda* memiliki jabatan sebagai penasihat dan sebagai menteri. Sebagai penasihat, *bahudanda* merupakan dewan kerajaan yang menjalankan kekuasaan bersama raja dari puri. Sebagai menteri, *bahudanda* merupakan pegawai tinggi kerajaan yang bertugas membantu raja dalam bidang administrasi kerajaan. Di samping faktor keturunan yang harus berasal dari golongan triwangsa, yang merupakan pelapisan sosial yang askriptif atau turun-temurun, kesetiaan dan kecakapan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih dan

---

[67] Tagel Eddy, *op. cit.*, hlm. 43

mengangkat *bahudanda*. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemasukan kas kerajaan disebut *sedahan agung*. Sumber keuangan kerajaan berasal dari pajak atau upeti dari tanah *druwe dalem*, tanah *pengancil*, baik untuk tanah sawah maupun tanah tegalan. Sumber pendapatan lainnya adalah kontrak pelabuhan yang diberikan oleh *subandar* setiap tahun, dan pajak perdagangan yang berhubungan dengan barang ekspor dan impor.

Subandar atau *syahbandar* adalah pejabat yang memegang peran penting dalam pemasukan kas kerajaan. *Subandar* adalah penguasa pelabuhan yang secara langsung ditunjuk oleh raja berdasarkan pertimbangan kesetiaan, kemampuan mengatur lalu lintas perdagangan di pelabuhan, dan kemampuan dalam berbahasa asing. Tugas-tugas *subandar* mencakup menertibkan perkapalan dan pelayaran pelabuhan, menertibkan perdagangan internasional di pelabuhan, dan bertindak sebagai konsul orang asing. Lalu lintas barang di pelabuhan menjadi wewenang *subandar*, termasuk menentukan besarnya bea yang harus dibayar oleh para pedagang. Di tiap-tiap pelabuhan atau pabean dibangun kantor dagang yang disebut *bangsa* sebagai tempat kerja *subandar*. Jabatan ini terbuka untuk bangsa lain. Orang-orang asing yang pernah diangkat oleh raja Mataram sebagai *subandar* di pelabuhan Ampenan adalah George Peacock King dari Inggris dan Said Abdullah, seorang keturunan Arab. Ketika perdagangan di Nusa Tenggara meningkat, peran *subandar* menjadi penting untuk perekonomian kerajaan. *Subandar* menyerahkan upeti sebagai hasil pemungutan pajak dalam tugasnya kepada raja setahun sekali.[68]

Di Lombok terdapat dua buah lembaga peradilan, yaitu *Kerta Bali* untuk orang-orang Bali dan *Kerta Sasak* untuk penduduk Sasak. Para pejabat peradilan Kerta Bali disebut *jaksa* atau *kerta* yang terdiri dari tiga atau empat orang pendeta. Bhagawanta merupakan pendeta kerajaan yang membantu raja dalam urusan keagamaan, khususnya untuk umat Hindu dan Buddha, sedangkan untuk penganut agama Islam, seorang haji melakukan tugas itu. Untuk itu, ia diangkat sebagai penghulu di seluruh Lombok. Para pejabat kerajaan memperoleh tanah jabatan atau *tanah pecatu* dari raja untuk membiayai kehidupan mereka. Tanah itu dikerjakan oleh para petani penggarap dengan landasan bagi hasil. Para petani penggarap ini juga merupakan tenaga kerja bagi para pejabat kerajaan untuk kepentingan rumah tangganya. Mereka memiliki kewajiban untuk membantu kerajaan dalam keadaan darurat.

---

[68] *Ibid.*, hlm. 52

4. Masyarakat

Pada abad ke-19, masyarakat Lombok terdiri atas berbagai suku bangsa seperti Sasak, Bali, Melayu, Bugis, dan juga pendatang asing seperti Cina dan Arab.[69] Para pendatang kebanyakan bergerak di bidang pelayaran dan perdagangan antarpulau. Mereka membawa hasil Pulau Lombok ke tempat lain dan memasok sejumlah kebutuhan masyarakat yang dibawa dari luar pulau. Sebagian kecil dari mereka menetap dan berbaur dengan penduduk setempat, sedangkan sebagian lagi hanya berdiam sementara waktu sesuai dengan kepentingan niaganya.

Jumlah dan perkembangan penduduknya dapat diketahui dari beberapa catatan mereka yang sempat mengunjungi Lombok pada abad ke-19. Dalam catatan itu terdapat perkiraan jumlah penduduknya sehingga dapat disusun sebagai berikut:[70]

Tahun	Perkiraan Jumlah Penduduk
1818	200.000 — 250.000
1845	150.000 — 200.000
1846	400.000 (380.000 orang Sasak dan 20.000 orang Bali)
1875	400.000
1884	656.000 (600.000 orang Sasak, 50.000 orang Bali, 6.000 orang Melayu, Arab, dan Cina)
1895	660.000 (50.000 orang Bali)

Masyarakat Bali yang datang ke Lombok terutama sebagai tentara kerajaan Karangasem dalam rangka melaksanakan ekspansi ke Pulau Lombok. Semenjak tahun 1740 orang-orang Bali mulai menetap di Pulau Lombok ketika Lombok merupakan vasal (kaula) kerajaan Karangasem di bawah pemerintahan Gusti Wayan Taga.[71] Pada umumnya mereka menetap di Lombok Barat. Permukiman mereka berada di sekitar Mataram, Cakranegara, Ampenan, dan Narmada. Sebagian lainnya bertempat tinggal di daerah Tanjung, Gerung, dan Kadiri. Pola permukiman mereka menyerupai masyarakat di Pulau Bali, yakni sebuah pekarangan dikelilingi tembok dari tanah liat dan pintu rumahnya menghadap ke jalan raya. Pola ini mendekati susunan sebuah benteng pertahanan yang sempat merepotkan serbuan tentara Belanda ketika berlangsung Perang Lombok.

---

69 *Ibid.*, hlm. 62

70 Tabel tersebut di atas tidak memperlihatkan perkembangan oleh karena berasal dari sumber-sumber yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh I.B. Rama, *op. cit.*, hlm. 18

71 *Ibid.*, hlm. 15

Masyarakat Sasak dipandang sebagai penduduk asli Pulau Lombok. Mereka mengenal suatu pelapisan atau penggolongan masyarakat.[72] Secara sosial politik, masyarakat Sasak dapat digolongkan ke dalam dua tingkatan utama, yaitu golongan bangsawan yang lazim disebut *perwangsa* dan golongan masyarakat kebanyakan yang disebut *jajarkarang* atau bangsa Ama. Golongan *perwangsa* terbagi atas dua tingkatan, yaitu bangsawan penguasa dan bangsawan rendahan. Para bangsawan penguasa atau *perwangsa raden* menggunakan gelar *datu*. Penyebutan untuk kaum laki-laki golongan ini adalah *raden* dan perempuan bangsawannya dipanggil *denda*. Jika kelompok raden telah mencapai usia cukup dewasa dan ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya, mereka berhak memakai gelar *datu*. Perubahan gelar itu dilakukan setelah melalui upacara tertentu.

Bangsawan rendahan atau Triwangsa menggunakan gelar *lalu* untuk para lelaki dan *baiq* untuk para perempuan. Tingkatan terakhir disebut *jajar karang*, panggilan untuk laki-laki adalah *loq* dan perempuannya adalah *le*. Golongan pertama dan kedua lazim disebut *permenak*. Sesuai dengan statusnya, golongan *permenak* di samping lebih tinggi daripada jajar karang adalah penguasa sekaligus juga merupakan pemilik sumber daya lahan pertanian yang luas. Ketika dinasti raja Karangasem Bali berkuasa di Lombok, golongan *permenak* hanya menduduki jabatan sebagai pembekel di daerah berpenduduk Sasak. Masyarakat Sasak memberikan penghormatan kepada golongan *permenak* berdasarkan ikatan tradisi turun-temurun dan berdasarkan ikatan budaya agama Islam. Landasan pelapisan sosial masyarakat Sasak mengikuti garis keturunan lelaki (patrilineal).

Dalam alam kepercayaan, masyarakat Lombok mengenal tiga kelompok agama yang dianut oleh kalangan orang Sasak, yaitu *kelompok Bhoda*, *Waktu Telu*, dan *Islam*. Kelompok Bhoda dalam bentuk komunitas kecil berdiam di pegunungan utara dan di jajaran lembah pegunungan selatan Lombok. Kelompok Bhoda adalah orang-orang Sasak yang dari segi kesukuan, budaya, dan bahasa menganut kepercayaan menyembah berhala. Mereka menyingkir ke daerah pegunungan dalam upaya melepaskan diri atau menghindari pengaruh islamisasi di Pulau Lombok. Nama *Waktu Telu* diberikan kepada penganut kepercayaan yang beribadah tiga kali pada bulan puasa, yaitu sembahyang Magrib, Isya, dan Subuh. Di luar bulan puasa, mereka dalam seminggu hanya sekali melakukan ibadah, yaitu pada hari Kamis dan Jumat, saat sembahyang Asar. Urusan ibadah salat dan puasa diserahkan kepada pemimpin agama mereka, yaitu para kiai dan penghulu. Pada hari-hari tertentu penduduk memberi sedekah kepada

[72] Tagel Eddy, *op. cit.*, hlm. 66

pemimpin agamanya. Mereka hanya menunaikan tugas yang diberikan oleh para kiai. Semua kiai *Waktu Telu* tidak melaksanakan zakat dan naik haji. Daerah-daerah penganut *Waktu Telu* meliputi Bayan dan Tanjung di Lombok Barat, dataran tinggi Sembalun dan Suranadi di Lombok Timur, dan Pujut di Lombok Tengah.[73]

Hubungan kekerabatan masyarakat Sasak walau terkesan bilateral, lebih menganut pola patrilineal. Pola kekerabatan itu disebut *Wiring Kadang* yang mengatur hak dan kewajiban warga. Unsur-unsur kekerabatan itu meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki ayah (paman), anak lelaki saudara lelaki ayah (sepupu), dan anak-anak mereka. Warga kelompok *Wiring Kadang* mengemban tanggung jawab terhadap masalah keluarga, yang terutama terlihat pada saat persiapan penikahan salah seorang anggota kerabat. Masalah warisan dan pengaturannya menjadi hak mereka. Harta warisan biasanya disebut *pustaka* yang mengandung nilai-nilai luhur dan berbentuk seperti tanah, rumah, dan benda-benda lainnya yang dianggap keramat. Benda-benda keramat itu, antara lain berupa pakaian, keris, dan permata. Orang-orang Bali di Lombok juga memiliki pola kekerabatan yang serupa dan disebut *purusa*. Garis keturunan mereka berdasarkan pada garis ayah. Seperti pada masyarakat Sasak, pola pewarisan mereka disebut *pusaka*.

Seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, kehidupan masyarakat Sasak lebih banyak mengemban kewajiban terhadap kekuasaan kerajaan. Walau di sejumlah desa, seperti Praya dan Sakra, memiliki hak *perdikan*, yaitu bebas dari pungutan pajak. Namun, kewajiban *apati getih*, yaitu ikut serta dalam peperangan kerajaan tetap harus dipenuhi. kerajaan memberikan hak itu berkenaan dengan jasa mereka yang telah membantu dalam memenangkan peperangan. Kehidupan petani pada umumnya selalu berada di bawah penindasan para bangsawan dan pejabat kerajaan. Banyak lahan pertanian mereka yang diambil alih oleh raja melalui hak sita komunal sebelumnya. Banyak tanah yang tidak memiliki ahli waris menjadi milik kerajaan. Selain itu, tuntutan kerja wajib menjadikan para bangsawan tidak jarang secara sewenang-wenang mengambil putra putri mereka untuk menjadi pekerja dan pelayan. Padahal di lahan pertanian para petani sangat membutuhkan tenaga putra putri mereka. Para petani menjual hasil pertanian kepada para pedagang bawah subandar dan sebaliknya mereka memperoleh barang kebutuhan lainnya dari jalur perdagangan itu pula. Kekuasaan kerajaan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat perdesaan.

---

[73] *Ibid.*, hlm. 26; I.B. Rama, *op. cit.*, hlm. 39, 41

D. Sulawesi (Selatan)

1. Wilayah

Di wilayah Sulawesi (Selatan) sejak beberapa abad yang lalu telah terdapat beberapa negara yang berbentuk kerajaan. Sebagai negara, setiap kerajaan telah mempunyai peralatan perlengkapan negara yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Sistem politik negara-negara yang terdapat di Sulawesi (Selatan) mempunyai variasi persamaan dan perbedaan. Variasi yang dimaksud menyangkut tidak hanya pada istilah yang digunakannya, tetapi juga pada bentuk dan tata pengaturan kerja dari perlengkapan kenegaraan tersebut.

Persamaan dan perbedaan itu disebabkan oleh sekian banyak suku-suku bangsa yang mendiami wilayah itu, dan yang kemudian mendirikan negaranya masing-masing. Suku-suku bangsa yang dimaksud ialah Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Di samping keempat suku terbesar itu, terdapat juga suku *Duri* (*Dori*) yang merasa juga sebagai suatu suku tersendiri. Mereka yang bersuku Bugis mempunyai negara Bone, Wajo, Sawitto, Suppa, Soppeng, Luwu, dan banyak lagi negara-negara kecil lainnya. Orang Makassar mempunyai negara kembar Tallo-Gowa. Suku Mandar mempunyai pula negara-negara seperti Balannipa, Cenrana, dan Majenne. Demikian pula orang-orang Toraja dan *Dori*.

Kerajaan-kerajaan yang besar dan luas pengaruhnya adalah Bone, Wajo, dan Gowa. Pada awalnya kerajaan Gowa muncul sebagai kekuatan politik yang menguasai jazirah Sulawesi Selatan dan perairan menuju ke kepulauan Maluku. Banyak kapal melintasi perairan Sulawesi Selatan untuk memperoleh rempah-rempah di Maluku. Kejayaan Gowa meredup ketika Belanda mengalahkannya dan memaksakan pembuatan Perjanjian Bongaya. Akibat perjanjian itu, kerajaan Bone mengukuhkan kekuatannya. Melalui perantaraan Bone, kerajaan Wajo mengakui kedaulatan Belanda berdasarkan perjanjian tanggal 23 Desember 1670. Namun, sampai tahun 1848, kekuasaan Belanda tidak pernah mencampuri urusan kerajaan Wajo.

Setelah Perjanjian Bongaya, kekuasaan kerajaan Gowa kian berkurang. Gowa tidak lagi mendominasi politik di Sulawesi Selatan. Malahan Gowa menjalin hubungan yang erat dengan Belanda. Upaya-upaya untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Gowa sempat dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Sebagai akibat Perjanjian Bongaya, ketiga negara ini mengalami beberapa perubahan. Kedudukan negara Bone makin kukuh, makin luas,

dan makin besar pengaruhnya. Selanjutnya, menurut kontrak tertanggal 23 Desember 1670 yang ditandatangani antara Wajo dan Belanda yang dilakukan melalui perantaraan kerajaan Bone, Wajo mengakui kedaulatan Belanda atas Wajo. Namun, sampai tahun 1848, pemerintah Belanda belum pernah menanamkan kekuasaannya di negeri ini.[74]

Negara Gowa, setelah Perjanjian Bongaya telah kehilangan "dominasi" kekuasaan politiknya di Sulawesi Selatan dan telah mengubah haluan menjadi "sahabat" Belanda. Sampai pada akhir abad ke-19 memang telah beberapa kali terjadi usaha mengembalikan kebesaran kekuasaan negara Gowa, tetapi usaha itu tidak pernah berhasil.

2. Raja dan Bangsawan

Sesuai dengan bahasa-bahasa yang digunakan, masyarakat Sulawesi Selatan mengenal beberapa istilah untuk menyebut raja dan kerabatnya. Istilah-istilah sebutan raja-raja di kerajaan Bugis seperti di Bone ialah *Arung MangkauE ri Bone*[75] di Wajo digunakan istilah *Arung MatowaE ri Wajo*[76] di Sawitto digunakan istilah *Addatuwang Sawitto*[77]; di kerajaan Luwu digunakan istilah *Payungnge ri Luwu*; dan di kerajaan Suppa dan Soppeng digunakan istilah *Datu Suppadan Datu Soppeng*. Dari keterangan di atas tampak bahwa istilah *Arung*, yang memang berarti raja itu, tidak selalu digunakan untuk menyebut seorang raja yang memerintah di kerajaan-kerajaan Bugis. Di kerajaan Makassar, digunakan istilah *Sombayya ri Gowa*[78] dan di kerajaan orang Mandar digunakan istilah *Maraddia*.

Untuk keturunan mereka digunakan istilah-istilah *Anaarung* dan *Ana-kareeng*. Juga dikenal istilah khusus untuk keturunan langsung mereka, yaitu *bau'*, dan istilah ini digunakan baik oleh orang Bugis maupun orang Makassar. Demikian pula terdapat istilah *Opu* (terutama di kerajaan Luwu) *petta*, dan *Daeng*. Istilah *Andi* digunakan untuk semua keturunan orang yang berdarah bangsawan.

---

[74] Juga dapat digunakan istilah-istilah *Petta MangkuE* ri Bone dan *Arumpone*

[75] Juga dapat digunakan istilah *Petta Matowa Wajo*

[76] Digunakan juga istilah *Addituwang Sawitto*

[77] Digunakan juga istilah *Karaengta ri Gowa*

[78] Mattulada, "Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (*A Descriptive Analysis of The Political-Anthroplogy of the Buginese*)", disertasi untuk gelar Doktor dalam Ilmu Antropologi, Jakarta, 1975, hlm. 378

3. Birokrasi

Dalam menjalankan pemerintahan kerajaan, seorang raja dibantu oleh sekian banyak pembantu dekat yang mempunyai bidang tugas masing-masing. Di Sulawesi Selatan terdapat juga suatu sistem birokrasi sebagai alat pengatur kehidupan kerajaan.

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat sistem birokrasi kerajaan Bone, Wajo, dan Gowa. Ketiganya merupakan contoh birokrasi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang mempunyai persamaan dan perbedaan.

Di Bone sejak abad ke-14 dikenal istilah *kawerrang* yang berarti ikatan, yaitu ikatan dari tujuh *wanua* (negeri) yang membentuk suatu uni (kesatuan) yang kemudian dikenal dengan nama *Tana Bone*. Ketujuh *wanua* yang membentuk uni Tana Bone itu ialah: (1) Wanua Ujung, (2) Wanua Tibojong, (3) Wanua Ta', (4) Wanua Tanete ri Attang, (5) Wanua Tanete ri Awang, (6) Wanua Ponceng, dan (7) Wanua Macege. Di dalam pertumbuhan selanjutnya *kawerrang Tana Bone* berubah menjadi *Watampone*, yaitu istilah yang berasal dari kata *watam* dan *Bone* yang berarti "pusat Bone". Sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan itu, diperlukan pula pelbagai aparat untuk menjalankan negara kerajaan Bone. Pada dasarnya semua pejabat yang menjalankan pemerintahan Bone itu masih mempunyai hubungan keturunan dengan *Arung MangkauE ri Bone*, dan semua pejabat itu disebut dengan istilah *pakkatenni ade*, tetapi jenjang dan pelapisan mereka itu telah ditentukan di dalam *wari* (pelapisan masyarakat). *Matoa PituE* kemudian berubah fungsinya sebagai pejabat negara secara penuh karena kedudukannya sebagai kepala-kepala *wanua* dilepas. Selanjutnya *Matoa PituE* diubah lagi menjadi sebuah dewan yang disebut dengan istilah *Ade' PituE*. Lembaga ini merupakan dewan menteri Tana Bone yang disebut dengan *pakkatenni ade*. Oleh karena itu, lembaga ini merupakan pula lembaga eksekutif, dan juga sekaligus penyambung lidah rakyat kepada raja. Di dalam pembagian tugas pemerintahan, pengaruh ketujuh *wanua* yang melahirkan Tana Bone masih tampak dengan jelas. Pembagian itu adalah sebagai berikut.

1. *Arung Macege* memegang urusan pemerintahan umum.
2. *Arung Ponceng* memegang urusan keamanan dan pertahanan.
3. *Arung Tibojong* memegang urusan kehakiman/peradilan.
4. *Arung Tanete ri Attang* memegang urusan pembangunan dan pekerjaan umum.
5. *Arung Tanete ri Awang* memegang urusan keuangan dan ekonomi.

6. *Arung Ta'* memegang urusan pengajaran dan pendidikan.
7. *Arung Ujung* memegang urusan penerangan dan kerohanian.[79]

Kemudian dikenal istilah *To-Marilaleng*, yaitu seorang yang terdekat dengan raja, dan yang ditetapkan sebagai "ketua" dari *Ade' PituE*. *Tomarilaleng* adalah saluran penyampaian kehendak raja kepada rakyat, karena ia juga disebut dengan istilah *To-Mabbicar*a atau *PabbicaraE*, dan karena ia berasal dari keluarga raja, disebut juga dengan istilah *Petta PabbicaraE*. Kedudukan dari *To-Marilaleng* (*PabbicaraE*) merupakan kedudukan yang penting karena ternyata kemudian dia diberikan kedudukan sebagai pemimpin dewan pemerintahan kerajaan Bone; dialah yang mengetahui/atau mengoordinasikan anggota-anggota *Ade-pituE* di dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Bone.

Selain pejabat-pejabat yang disebut di atas, terdapat pula pejabat-pejabat yang lebih rendah tingkatannya, tetapi sangat penting artinya dalam pemerintahan kerajaan Tana Bone. Mereka itu dikenal dengan istilah *ponggawa* yaitu Panglima Angkatan Perang Negara Kerajaan. Pejabat inilah yang bertugas mengatur keamanan dan pertahanan, dan di bawah langsung oleh raja Bone. Pejabat ini disebut juga dengan istilah *Petta PonggawaE*, dan membawahi tiga orang panglima, disebut *dulung*, yaitu (1) *dulung awang tangka*, yakni panglima yang menguasai daerah-daerah perairan; (2) *dulung ajang ale'*, yakni yang menguasai daratan dan hutan; (3) *dulung lamuru*, yakni yang menguasai daerah-daerah perbatasan. Selanjutnya di bawah ketiga dulung ini terdapat pejabat-pejabat *panggulu jowa* atau *anre-guru jowa* sebagai pemimpin-pemimpin pasukan laskar. Selanjutnya dikenal pula jabatan *kadhi* (*kali*) yang disebut juga dengan *Petta Kali*, yakni jabatan keagamaan Islam; jauh sebelum kedatangan Islam jabatan keagamaan dipegang *panggulu-bissu*.[80]

Menurut keterangan yang terdapat di dalam *lontara*, kerajaan Gowa sebelum kedatangan To-Manurung di Gowa, terdapat sembilan kelompok penduduk yang disebut *anang*. Kesembilan orang ini mendiami wilayahnya masing-masing yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut dengan *karaEng*, *anronggurư* dan/atau *gallarang*. Di dalam perkembangannya, kesembilan orang ini merasa membutuhkan seorang pemimpin di antara mereka, dan dipilihlah seorang ketua yang mereka sebut dengan *paccalla* yang merupakan penasihat di antara kesembilan anang itu. Akan tetapi,

---

[79] *Ibid.*, hlm. 380

[80] Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wadjo*, Jajasan Kebudajaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1964, hlm. 16

tampaknya kedudukan seorang *paccalla* yang hanya berfungsi sebagai penasihat untuk menjaga perdamaian di antara mereka, kurang memuaskan para penguasa tersebut. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang berkedudukan "lebih" dari seorang penasihat belaka.

Kebutuhan untuk memperoleh seorang pemimpin yang lebih berkuasa itu pada akhirnya mendorong mereka untuk mencari seorang tokoh untuk kedudukan tersebut. Akhirnya, menurut lontara, ditemukan pada diri seorang perempuan yang oleh mereka disebut *To-Manurung* di atas Bukit Tamalate. Tomanurung ini kemudian kawin dengan seorang yang bernama *karaEng Bayo*, yang menurunkan raja-raja Gowa. Namun, kedudukan kesembilan *anang* masih tetap kuat karena kekuasaan mereka masih tetap ada; bahkan kemudian kesembilan kepala kaum ini menjadi anggota dewan kerajaan Gowa yang disebut dengan *Bate Salapanga ri Gowa*.

Jika memerhatikan susunan para pembantu *Sombayya ri Gowa* sebagai raja negara kerajaan Gowa, akan ditemukan kedudukan-kedudukan yang disebut dengan istilah-istilah berikut: *Tu-Mabbirara Butta* merupakan perdana menteri kerajaan; yang mengatur dan memimpin penyelenggaraan kekuasaan negara dan melakukan pembagian kekuasaan/pekerjaan di antara para pembesar kerajaan lainnya. *Tu-Mailalang Toa* adalah menteri kerajaan yang mengatur hubungan kekuasaan raja Gowa dengan raja-raja bawahannya, dan yang menyampaikan kehendak raja kepada rakyat melalui para raja bawahannya. *Tu-Mailalang Lolo* adalah menteri kerajaan yang menyalurkan kehendak rakyat kepada raja Gowa. Pejabat inilah yang berbicara untuk kepentingan rakyat, dan bertugas untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Sebelum diadakan kedudukan syahbandar (*Sabannaraka ri Gowa*) di Gowa untuk menarik pajak, pejabat ini memegang kedudukan tersebut. *Tu-Makkajannangang* adalah menteri kerajaan mengurus masalah-masalah keamanan dalam negeri, dan mengatur tata tertib dalam lingkungan pejabat-pejabat istana. *Pati-Matarang* adalah menteri kerajaan yang mengatur urusan pertahanan dan peperangan, yang menyusun laskar-laskar yang akan dibawa ke medan perang.

Semua jabatan teras tersebut di atas dipegang oleh lingkungan *ana-karaEng ri Gowa*, dan para pejabat itu digelari *KaraEngta*, yang berarti pertuanan kita. Oleh karena itu, di dalam lingkungan aparat pemerintahan dikenal istilah-istilah *KaraEngta Tumabbicara Butta*, sebutan untuk perdana menteri, *KaraEngta Tuimailalang Toa*, untuk pejabat yang memerintah di daerah kerajaan dalam wilayah kerajaan Gowa dan disebut sesuai dengan nama daerah tempatnya memerintah; misalnya, yang memerintah di daerah Kuruisi digelar dengan *KaraEngta Kuruisi*, dan lain-lain. Pejabat-pejabat atau raja-raja bawahan yang berasal dari *Bate Salapanga*, digelari *DaEngta*. Karena

itu dikenal istilah *DaEngta Gallarang Tombolo*, dan pejabat bidang keagamaan yang (Islam) dikenal dengan *DaEngta Kalia ri Gowa*.

Kerajaan Wajo juga telah mempunyai sistem pemerintahan yang cukup mampu mengatur dirinya sebagai suatu negara, sebagaimana halnya dengan kerajaan Tana Bone dan Gowa. Struktur pemerintahan mereka adalah sebagai berikut: awalnya kerajaan Wajo terdiri atas tiga kelompok, yaitu *Battempola*, *Talo'tenreng*, dan *Tua'*. Ketiga kelompok ini merasa memerlukan seorang pemimpin yang dapat mengikat mereka dalam satu ikatan kerajaan Wajo. Untuk itulah mereka sepakat mencari seorang pemimpin untuk mereka. Raja yang pertama diangkat untuk maksud itu yang digelari dengan *Batara Wajo*.[81] *Batara Wajo* yang kemudian disebut juga dengan *Arung Matoa Wajo* di dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh tiga orang raja dari ketiga kelompok yang bersepakat untuk mendirikan kerajaan Wajo, yaitu *Paddanreng* (*Ranreng*) *Battempola*, *Talo' tenreng*, dan *Tau'*. Di samping ketiga jabatan tersebut, terdapat juga tiga jabatan lainnya, yaitu masing-masing *Pa'bate* (*Bate*) *Lompo* yang pada mulanya hanya bertugas mengurus masalah-masalah perang, akan tetapi kemudian berkembang, dan mencampuri urusan-urusan kerajaan secara lebih luas. Ketiga *Paddanreng* (*ranreng*) itu jika digabungkan dengan ketiga *Batelompo* menjelma menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang disebut *Arung Ennengnge* (raja yang enam). Jika *Batara* (*Arung Matoa*) Wajo turut hadir di dalam pembicaraan di dalam lingkungan *Arung Ennengnge*, lembaga pemerintahan itu disebut *Petta Wajo* atau pertuanan di Tana Wajo. Di bawah lembaga ini terdapat lagi sebuah lembaga yang disebut *Arung Mabbicara* (pertuanan yang menetapkan hukum) yang beranggotakan 30 orang; jumlah 30 orang diperoleh dari wakil 10 orang dari ketiga negeri asal pendiri kerajaan Wajo, yang bertugas mendampingi ketiga orang *paddanreng* yang disebut di atas. Tugas mereka ialah *ma'dette* bicara, yaitu menetapkan hukum/undang-undang, *mattetta'*, *mappano-pate' bicara*, yaitu mengesahkan, mengumpulkan, dan menyampaikan pelbagai hal peraturan perundang-undangan untuk ditangani oleh *Petta Wajo*. Selanjutnya terdapat lagi lembaga yang beranggotakan tiga orang yang berasal dari ketiga negeri pendiri Tana Wajo yang disebut dengan *Suro ri Bateng*. Lembaga ini bertugas menyampaikan kepada rakyat perintah-perintah dari *paddanreng* dan *Bate Lompo*, dan menyampaikan kepada rakyat hasil-hasil permufakatan dan perintah dari *Petta Wajo*. Gabungan keseluruhan anggota-anggota lembaga disebut dengan *Arung PatappuloE* (pertuanan yang empat puluh) atau disebut juga dengan *Puang ri Wajo*, yaitu penguasa Tana Wajo. Lembaga ini merupakan penguasa tertinggi

[81] Pitirim A. Sorokin, "Social Stratification", dalam Selo Sumarjan & Sulaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Djakarta, 1964, hlm. 276

kerajaan Wajo. Menurut orang Wajo lembaga ini menentukan mati hidupnya kerajaan Wajo atau dalam kata-kata mereka: *paoppangngi, palengengngi Tana Wajo*.

Perlengkapan kenegaraan lainnya disebut dengan istilah *Punggawa* (Matoa), yang mengepalai perkampungan-perkampungan Majauleng, Sabbangparu, dan Takkalalla'. Para punggawa ini bertugas menjalankan pemerintahan secara langsung kepada rakyat di daerah kekuasaannya; dialah yang menjadi penghubung antara para *Arung Lili'* (rajaja bawahan) dengan *petta Wajo*. Karena itu, para punggawa ini digambarkan sebagai *inanna tau maegaE* yaitu "induk dari orang banyak".

Dari keterangan tersebut di atas tampak bahwa sistem pemerintahan di antara ketiga kerajaan, Bone, Gowa, dan Wajo, terdapat persamaan dan perbedaan. Dari asal raja yang memerintah, antara Bone dan Gowa terdapat persamaan, yaitu berasal dari apa yang disebut dengan *To (Tu)-Manurung*; tokoh ini digambarkan sebagai orang yang berasal dari langit, dan ditemukan ketika kelompok kaum di kerajaan itu menjadi seseorang (pribadi) untuk diangkat sebagai raja yang mempersatukan kelompok-kelompok tersebut. Lain halnya dengan kerajaan Wajo, para pemimpin kelompok pendiri kerajaan itu mencari pemersatu mereka tidak dari hal-hal yang bersifat legendaris, tetapi dicari di kalangan mereka sendiri.

Di dalam perkembangan selanjutnya, Gowa dan Bone mengembangkan pengaruhnya sehingga model-model sistem pemerintahannya banyak "ditiru" oleh kerajaan-kerajaan "kecil" lainnya. Demikian pula percampuran darah di antara para keluarga raja-raja banyak terjadi melalui perkawinan. Kerajaan-kerajaan Suppa, Sawitto, dan Mandar mempunyai ikatan kekeluargaan yang erat dengan kerajaan Bone dan Gowa.

4. Masyarakat

Sulawesi Selatan yang didiami oleh suku-suku Bugis disebut dengan *Ogi'* atau *Ugi'*, Makassar yang disebut dengan *Mang kasa* atau *Mangkasara*, Mandar yang disebut dengan *Menre'* atau *Manra'*, dan Toraja mempunyai tata kehidupan yang lahir dari kalangan mereka sendiri sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya. Tentu saja tata kehidupan itu telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan pertumbuhan masyarakat mereka; juga sedikit banyak oleh karena adanya kontak-kontak dengan dunia luar.

Kampung mereka yang biasanya didiami oleh sekian banyak keluarga dalam sekian banyak rumah, dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut dengan *Macoa*, atau *Matoa*, atau *Jennang*, atau *Lompo*, atau *To'do*, yang dibantu oleh sedikitnya dua pembantu yang disebut *sariang* dan

perennung. Gabungan sekian banyak kampung yang disepakati untuk dibangun secara bersama disebut dengan *wanua* yang dipimpin oleh seorang kepala wanua yang disebut *arung*, atau *gallarang*, atau *sullewatang*. Mereka adalah raja-raja bawahan dari raja yang memerintah di kerajaan pusat. Semua pejabat itu, dari yang terendah sampai yang tertinggi, disebut *pakkatenni ade'*.

Rumah-rumah kediaman di Sulawesi (Selatan) didirikan di atas tiang-tiang yang cukup tinggi, dan terdiri atas tiga bagian, yaitu yang disebut dengan *rakkeang*, bagian atas rumah yang persis berada di bawah atap. Biasanya *rakkeang* digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti padi dan pisang, dan lain-lain. Di bagian ini juga disediakan tempat untuk menyimpan benda-benda keramat, seperti benda-benda pusaka milik keluarga; bagian lainnya disebut *alebola*, yaitu bagian yang ditempati oleh penghuni rumah yang terdiri atas bagian-bagian yang ditempati oleh yang empunya rumah, ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Bagian-bagian ini disebut dengan *lontang*; bagian lainnya ialah *awasao*, yaitu bagian yang terletak di bawah lantai panggung. Biasanya *awasao* dipergunakan untuk menyimpan alat-alat untuk pekerjaan mereka seperti cangkul dan jala. *Awasao* juga digunakan sebagai tempat ternak-ternak peliharaan, seperti kerbau, kambing, dan ayam.

Jenis rumah dapat dibagi berdasarkan kedudukan dalam masyarakat. *Saoraja* yaitu kediaman dari raja atau kaum bangsawan dan cirinya adalah berpetak lima atau tujuh, bubungannya, yang disebut dengan *timpa 'laja'* bersusun lima bagi raja yang sedang memerintah, sedang untuk bangsawan bersusun tiga. Tangganya diberi atap, dan disebut *sapa'na*. Terdapat juga *saoraja* yang berpetak lebih dari tujuh, dan didiami oleh raja-raja kerajaan besar, seperti Bone, Luwu, Wajo, dan Soppeng, disebut dengan *salassa*. Bentuk rumah lainnya disebut *saopati*, yaitu rumah tempat kediaman yang lebih kecil dari saoraja berpetak (lontang), tidak lebih dari empat, dan ber-*timpa'laja'* satu atau tiga, dan tidak mempunyai *sapana'*. Rumah ini biasanya didiami oleh orang-orang terpandang dalam masyarakat, seperti orang kaya. Rumah kediaman lainnya ialah *bola to-sama* atau *barum-parung*, didiami orang kebanyakan yang pada umumnya berpetak tiga, berbubungan dua, dan tidak mempunyai *sapana'*. Di Toraja, terdapat dua jenis rumah sesuai dengan fungsinya, yaitu yang disebut *tongkonan*, dan *banua barung-barung*; jenis Tongkonan adalah rumah adat keluarga, dan *banua barung-barung* adalah rumah kediaman pribadi. Dalam kehidupan orang Toraja, rumah jenis tongkonan sangat penting artinya karena mempunyai fungsi sakral, sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Masyarakat di Sulawesi Selatan mempunyai pelapisan masyarakat, sebagaimana halnya masyarakat-masyarakat lainnya. Pelapisan sosial ini merupakan suatu karakteristik yang permanen di dalam setiap masyarakat yang teratur.[82]

Orang-orang Bugis-Makassar dan Mandar mengenal tiga pelapisan masyarakat, yaitu *ana-karung* (*ana-karaEng*) yakni lapisan tinggi di mana terdapat raja dan kerabat keluarganya; *to-maradeka* yang terdiri atas rakyat jelata, dan *ata'* yaitu hamba sahaya. Berbeda dengan suku-suku lainnya di Sulawesi (Selatan), orang Toraja mengenal empat pelapisan masyarakat yaitu *tana'-bulaan* yang terdiri atas raja, bangsawan tertinggi, dan kerabatnya; *tana' bassi*, golongan yang masih dianggap mempunyai darah bangsawan tetapi sudah tidak sama dengan pelapisan yang disebut pertama; *tana' karurung*, yaitu lapisan orang-orang merdeka (orang-orang kebanyakan); dan lapisan terbawah disebut *tana' kua-kua*.

Dalam sistem pelapisan masyarakat dikenal dua sifat, yaitu terbuka dan tertutup. Jika dihubungkan dengan sifat pelapisan masyarakat Sulawesi (Selatan), dapat dikatakan bahwa sifatnya adalah tertutup, sekaligus terbuka. Maksudnya jika menyangkut pada hal-hal yang bersifat ekonomi dan pendidikan, dapat disebut terbuka. Artinya, baik lapisan teratas maupun lapisan terbawah dapat memperoleh status yang tinggi sekiranya mampu untuk mencapai jenjang itu. Akan tetapi, jika hal itu berkaitan dengan status darah keningratan, kita menjumpai sifat tertutup dari pelapisan masyarakat di Sulawesi (Selatan). Baik orang Bugis-Makassar, Mandar, maupun Toraja tidak bersedia untuk "membaurkan" darah keningratannya. Artinya, golongan *ana-karung* dan *tana' bulaan* tidak akan membuka kemungkinan untuk mengawinkan anak-anak perempuannya dengan golongan yang lebih rendah tingkatannya. Perkawinan semacam itu sangat terlarang.[83]

Walaupun demikian, terdapat pengecualian pada hal-hal yang sangat khusus. Di kalangan orang Bugis-Makassar dan Mandar terdapat pengecualian pada dua jenis golongan dalam masyarakat, yaitu untuk orang-orang *To-Sugi'* (orang kaya) dan *Towarani* (orang berani). Jika perkawinan yang tidak sederajat terpaksa juga dilakukan, ditempuhlah jalan yang disebut *mangngelli dara* (Bugis), atau *ammalli cera'* (Makassar), artinya "membeli darah". Maksudnya adalah bahwa laki-laki yang akan mengawini perempuan yang lebih tinggi derajat darahnya, harus membayarnya dengan

---

[82] H.Th. Chabot, Verwantschap, *Stand En Sexe In Zuid Celebes*, J.B. Wolters Uitgevermaatschappij NV., Groningen, Djakarta, 1950, hlm. 95

[83] L.T. Tandilintin, *Toraja dan Kebudayaannya*, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi, Ujung Pandang, 1974, hlm. 130

sejumlah barang-barang, seperti uang dan emas. Di dalam masyarakat Toraja, jika perkawinan terpaksa terjadi, pihak laki-laki harus menjalani persyaratan yang disebut *unteka palandua* atau *unteka bua layuk*.[84]

Sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen di wilayah Sulawesi (Selatan) terdapat kepercayaan animistis, seperti *PatotoE* yang berarti Dia yang menentukan nasib, *To-PalanroE*, Dia yang menciptakan, *DewataseuwaE* yang berarti dewa yang tunggal, dan *Puang Matua* yang berarti Tuhan yang tertinggi.

Setelah masuknya agama Islam, agama ini meluas ke seluruh wilayah yang didiami oleh orang-orang Bugis-Makassar dan Mandar. Selanjutnya agama Kristen diterima oleh sebagian penduduk suku Toraja, tetapi mereka masih tetap mempertahankan kepercayaan animistis.

E. Kalimantan Selatan

1. Wilayah

Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Pada masa jayanya wilayah kerajaan Banjar meliputi seluruh daerah Kalimantan Selatan dan Kotawaringin sampai ke Pulau Laut. Dalam wilayah itu terdapat beberapa kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan sultan Banjar. kerajaan itu adalah Berau, Kutai, Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tatar, Dusun Hulu, Dusun Ilir, Bekompai, Dayak Besar (Kebayan), Dayak Kecil (Kapuas), Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kotawaringin.[85]

Di antara daerah-daerah ini kekuasaan sultan paling terasa di Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Bekumpai, dan Dusun. Inilah yang disebut "Kerajaan Banjar" dalam abad ke-19.[86] Wilayah kekuasaan itu dipersempit lagi oleh Sultan Adam dalam perjanjian tambahannya dengan pihak Hindia Belanda pada tahun 1854.[87] Menurut ketentuan ini, wilayah kerajaan dibatasi oleh Sungai Banjar (anak Sungai Barito) di sebelah barat, sebelah timur oleh Pegunungan Moratus, dan sebelah selatan oleh Gunung Pamatun.

---

84 *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839–1848*, Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah, No. 5, Jakarta, 1973, hlm. C VII

85 Arsip Nasional RI, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda* Tahun 1839–1848, Jakarta, 1973, hlm. 166–199

86 *Ibid.*, hlm. 184–185

87 Arsip Nasional RI, *Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah VOC, Batafse Republiek, Inggris*, dan *Hindia Belanda*, 1635–1860, Jakarta, 1965, hlm. 249–252

Sejak tahun 1826, kekuasaan sultan dibatasi oleh pihak Hindia Belanda. Menurut ketetapan itu,[88] pengangkatan sultan dan mangkubumi harus disetujui pihak Hindia Belanda dan perkara-perkara yustisi di daerah yang dikuasai Belanda diputuskan oleh pihak Belanda. Dewan yang memutuskan perkara-perkara dalam wilayah sultan pun beranggotakan seorang wakil Hindia Belanda. Dalam daerah-daerah yang telah diserahkan kepada pihak Belanda dibentuk suatu pemerintahan yang pada pertengahan abad ke-19 digabung menjadi "Gouvernement van Borneo".[89] Sekalipun demikian, dalam wilayah yang dikuasai sultan-sultan, sistem pemerintahan tradisional masih tetap berlaku dan merupakan patokan terpenting dalam negara Banjar.[90]

2. Raja dan Bangsawan

Masyarakat dalam negara Banjar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu golongan yang memerintah, golongan yang diperintah yang berupa mayoritasnya, dan golongan budak. Golongan yang memerintah terdiri atas sultan dan keluarganya, kemudian menyusul para birokrat. Meskipun dalam struktur pemerintahan kerajaan raja menduduki posisi tertinggi, dalam pelaksanaan kekuasaan ia dibatasi oleh *Dewan Mahkota* yang beranggotakan bangsawan keluarga terdekat raja dan pejabat birokrasi tingkat atas seperti *mangkubumi*, para *mantri*, dan *kiai*. Dewan Mahkota berfungsi sebagai penasihat raja dalam memecahkan persoalan-persoalan penting seperti soal pemerintahan, penggantian takhta, pengumuman perang dan damai, dan hubungan dengan kekuasaan luar. Pengaruh Dewan Mahkota terhadap sikap dan tindakan raja sangat besar, sedang peran Mangkubumi dalam dewan ini pun cukup penting. Pengaruh yang besar dari Dewan Mahkota sering kali disalahgunakan oleh sebagian bangsawan untuk menonjolkan kepentingan mereka atau untuk melemahkan kedudukan raja. Perlu dikemukakan bahwa pengaruh para bangsawan dalam pemerintahan kerajaan sangat besar.

Raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindahkan, atau memecat pejabat-pejabat birokrasi. Namun, untuk pejabat birokrasi tingkat atas, raja meminta nasihat dari Dewan Mahkota. Pengangkatan didasarkan pada jasa atau kecakapan seseorang. Pengangkatan seseorang pada jabatan

---

88 *Ibid.*, hlm. 228–247

89 Goubernement ini semata-mata dibentuk untuk memberi kesan pada Inggris yang mulai berekspansi di Brunei, bahwa Belanda berkuasa di Kalimantan

90 Suri Suroto, "Pergerakan Sosial dan Perang Banjarmasin", *Seminar Sejarah Nasional II*, Yogyakarta, 26–29 Agustus 1970

birokrasi yang penting biasanya disertai dengan pemberian gelar. Seperti halnya di Jawa, raja adakalanya mengangkat orang yang berjasa menjadi seorang bangsawan. Pemecatan dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang melalaikan tugas atau menunjukkan sikap penentangan terhadap raja. Dalam pertengahan abad ke-19, pengaruh Belanda terhadap kerajaan Banjar telah begitu kuat sehingga dalam pengangkatan maupun pemecatan pejabat-pejabat birokrasi tingkat atas Belanda ikut campur tangan. Bahkan, dalam penggantian takhta, pengaruh Belanda pun cukup besar.

Menurut adat kebiasaan dalam negara Banjar, pengganti raja adalah putra mahkota yang diangkat dari putra sulung raja yang meninggal dengan permaisuri dari golongan bangsawan. Dengan demikian, putra dari istri yang bukan dari golongan tersebut, tidak berhak menggantikan raja. Keruwetan timbul dalam istana ketika di antara bangsawan keluarga raja ada yang mempunyai pendirian yang berbeda mengenai penunjukan pengganti raja. Keruwetan tersebut dapat berakibat tertundanya keberangkatan jenazah raja, karena menurut tradisi, jenazah baru dapat diberangkatkan ke makam apabila sudah ada kepastian mengenai penunjukan penggantinya. Timbulnya kericuhan dalam istana, mengenai penggantian raja, kerap kali terjadi dalam sejarah Banjar. Penunjukan putra mahkota oleh raja almarhum belum tentu diterima oleh seluruh bangsawan. Sebagai ilustrasi mengenai keruwetan dalam penggantian raja dapat ditunjuk misalnya peristiwa meninggalnya Sultan Adam (1857). Istri raja yang bukan berasal dari golongan bangsawan (Ratu Komala Sari) menginginkan agar putranya yang bernama Pangeran Tamjidillah dijadikan sultan. Keinginan ini mendapat dukungan dari Belanda, karena pertimbangan politik menganggap Tamjidillah lebih menguntungkan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelumnya, keinginan Belanda dapat dipaksakan sehingga Tamjidillah dijadikan raja, sedangkan putra Sultan Adam yang lebih berhak, yaitu Pangeran Hidayatullah, diabaikan. Keputusan yang menyimpang dari tradisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan bangsawan dan rakyat. Dalam hubungan ini tampak pula bahwa intervensi Belanda dalam pengangkatan raja seperti ini kecuali bertentangan dengan tradisi juga berakibat timbulnya kericuhan di dalam istana. Apabila raja yang menggantikan itu masih belum dewasa, biasanya dibentuk suatu perwalian yang angotanya terdiri dari saudara-saudara raja yang meninggal. Perwalian dihapuskan apabila raja yang baru telah cukup dewasa untuk memerintah sendiri. Sistem perwalian sering kali disalahgunakan oleh sebagian bangsawan untuk kepentingan mereka sendiri.

Mengingat bahwa di Banjar terdapat pula sistem *selir*, terutama di kalangan raja dan para bangsawan, dapat dimengerti bahwa jumlah

keluarga bertambah banyak.[91] Tambah banyaknya kerabat raja tersebut merupakan salah satu penyebab timbulnya keruwetan dalam soal pergantian raja maupun dalam pengisian jabatan-jabatan penting tingkat atas, seperti jabatan mangkubumi.

Meskipun pada dasarnya penggantian raja didasarkan pada keturunan, keturunan raja yang dapat dicalonkan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Di samping garis keturunan yang dibenarkan oleh adat, tabiat dan perilaku calon raja juga merupakan faktor penting dalam pemilihan. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kepentingan politik dan pribadi sering kali mengabaikan syarat-syarat tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kericuhan dalam istana dan kekecewaan di kalangan rakyat.

Untuk membedakan golongan bangsawan dengan rakyat bawahan, digunakan pelbagai macam lambang status, di antaranya yang paling menonjol adalah gelar, baik gelar keturunan maupun gelar jabatan. Gelar *pangeran*, *ratu*, *gusti*, dan *nanang* menunjukkan bahwa yang memakainya masih keturunan bangsawan dengan derajat-derajat yang berbeda-beda. Demikian pada gelar *adipati*, *tumenggung*, *kyai ngabehi*, *rangga*, *demang*, *lurah*, dan *pembekal*,[92] menunjukkan jabatan yang dipangku oleh si pemakai. Karena pemegang jabatan birokrasi kerajaan tidak hanya terdiri dari golongan bangsawan, tetapi juga dari rakyat biasa, pemakaian gelar jabatan tingkat atas tidak menjadi monopoli golongan bangsawan. Sudah barang tentu jabatan-jabatan tingkat bawah dipangku oleh orang-orang dari golongan rakyat biasa.

Di samping lambang status berupa gelar, terdapat macam-macam lambang status yang lain guna mempertajam perbedaan yang dapat terlihat antara golongan atas dan golongan bawah, seperti rumah, payung, pengiring, dan pakaian. Kekayaan bangsawan pemegang tanah *apanage* dari hasil bumi tanah mereka, ditambah dengan hasil yang besar dari usaha perdagangan, memungkinkan mereka hidup mewah dalam rumah-rumah

---

[91] Dalam *Hikayat Banjar* disebutkan bahwa putra Sultan Rahmatullah (1620–1642) yang bernama Sultan Hidayatullah (1642–1650) mempunyai tiga orang istri yang berasal dari golongan berbeda, yaitu golongan bangsawan dan ulama. Istri sultan yang diambil dari golongan bangsawan adalah Putri Nur Alam, seorang putri dari Pangeran di Laut, sedang yang diambil dari golongan birokrasi dan ulama ialah putri seorang kiai di Pondok dan seorang putri dari Tuan Khatib Banun; periksa J. Ras, *op. cit.*, 145, 147. Disebutkan pula bahwa selain itu sultan masih mempunyai banyak *selir*. Putra sultan seluruhnya berjumlah 40 orang. Pada waktu Sultan Sulaiman meninggal pada tahun 1825, dan digantikan oleh Sultan Adam, terdapat 25 orang pangeran keluarga dekat raja; bandingkan Anonim, "Eenige reizen in de binnenlanden van Borneo, door eenen Ambtenaar van het Gouvernentent; in het jaar 1824", *TNI*, 2, 1838, hlm. 88

[92] L.W.C. an den Berg, "De Mohammedaansche voorsten in Nederlandsch Indie", *BKI*, LIII, 1901, hlm. 49

yang bagus. Bentuk bangunan rumah menunjukkan status penghuninya. Bentuk rumah seperti *bubungan tinggi*, *palimasan*, *balai laki*, dan *gajah menyusu* menunjukkan rumah orang-orang besar.[93] Demikian pula susunan kompleks tempat kediaman dan hiasan dalam rumah, menunjukkan status penghuninya. Istana raja dibagi-bagi dalam beberapa kompleks dengan bangunan-bangunan tertentu. Bangsal untuk menerima tamu terletak di kompleks ketiga dari depan. Seluruh kompleks dibatasi dinding yang kuat.

Sebagai ilustrasi dapat ditunjukkan misalnya istana raja Banjar yang ada di Martapura. Istana Martapura dibagi-bagi dalam bagian-bagian tertentu. Seluruh bangunan yang terdapat di dalam bagian-bagian istana berjumlah enam buah. Bangunan pokok seluruh kompleks adalah balairung, yaitu tempat duduk raja bila sedang dihadap. Bangsal ini dibangun dalam tahun 1786 oleh Panemahan Batu atau Sultan Tamjidillah yang memerintah antara tahun 1785 dan 1808. Panjang bangunan ini kira-kira 120 kaki, lebar 50 kaki, dan tinggi 25 kaki, terbuat dari kayu besi yang diberi papan dengan hiasan-hiasan ukiran. Bagian timur istana Martapura diberi batas dinding dari tanah setinggi 20 kaki, sedang sisi-sisi lainnya dibatasi dengan pagar kayu besi yang kuat dengan tinggi 20 kaki juga.[94] Hiasan-hiasan dalam istana raja ada yang dibuat dari emas dan diisi berlian. Di samping itu, terdapat pula peralatan dalam rumah yang berukiran juga.

Kekayaan yang diperoleh dari perdagangan laut maupun perdagangan sungai juga sangat menentukan status para bangsawan. Golongan bangsawan yang mempunyai status tinggi karena darah keturunan, sementara ada yang gagal dalam bidang usaha sehingga hidup mereka tidak jauh berbeda dengan rakyat biasa. Seorang pegawai Belanda yang pernah mengadakan perjalanan di pedalaman Kalimantan Selatan dalam tahun 1824 mengatakan bahwa beberapa bangsawan kerabat raja yang bertempat tinggal di Martapura, Karang Intan, dan Matraman mendiami rumah yang tidak begitu bagus, bahkan ada yang dibuat dari bambu.[95] Pengiring-pengiring merupakan lambang kebesaran dari golongan bangsawan. Para bangsawan pemegang tanah *apanage* dapat mengangkat pengiring-pengiring sendiri. Makin kuat dan besar kekuasaan, ditambah dengan kekayaan yang melimpah, makin besar pula jumlah pengiringnya. Pengiring tersebut tidak hanya tampak pada upacara-upacara resmi negara, tetapi juga pada saat-saat bangsawan tersebut pergi berburu. Berburu merupakan kegemaran umum bagi raja

---

93 A.H.K. Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, 1953, hlm. 149, dst.

94 A. van der Ven, "Aantekningen omtrent het Rijk Bandjarmasin", *TBG*, IX, 1860, hlm. 105, dst.

95 Anonim, *op. cit.*, hlm. 88

maupun golongan bangsawan.[96] Dalam hubungan ini, berburu, terutama berburu kijang, merupakan lambang status juga, yang membedakan kegemaran golongan bangsawan dengan rakyat biasa.

Di dalam istana terdapat lambang-lambang kebesaran raja seperti *payong bawat* dan benda-benda upacara dalam bentuk *kendaga*, tikar, tempat rokok, dan lainnya. Benda-benda pusaka yang dianggap bertuah seperti keris Si Masagirang, tombak Si Panatus, dan bende Si Macan, tersimpan pula dalam istana.[97] Untuk memeriahkan suasana apabila raja menerima tamu seorang pembesar, para petugas seni mempergelarkan tari-tarian. Dalam upacara penobatan raja baru, sering pula dipertunjukkan *tari radap*. Dalam kesempatan seperti ini para bangsawan hadir dengan diikuti oleh para pengiring mereka dengan lambang-lambang kebesaran bangsawan, seperti payung, pakaian kebangsawanan, dan perlengkapan lain.

Tampak jelas, dengan menggunakan pelbagai macam lambang status, raja dan para bangsawan membedakan golongannya dengan rakyat biasa. Hak-hak dan wewenang yang dimilikinya karena tradisi memungkinkan mereka mendapat fasilitas dalam masyarakat. Karena kegiatan para bangsawan di dalam usaha perdagangan sangat menonjol, fasilitas yang mereka peroleh dari usaha perdagangan mengakibatkan juga makin tingginya kedudukan mereka di dalam masyarakat.

Kekayaan negara sebagian didapat dari pungutan pajak yang dibebankan para rakyat di wilayah negara, dan juga dari usaha perdagangan. Pada dasarnya pungutan pajak dikenakan pada seluruh penduduk, baik pada para bangsawan yang memiliki tanah-tanah *apanage* maupun rakyat biasa. Hasil tanah *apanage* para bangsawan sebagian wajib diserahkan kepada kas kerajaan. Pelbagai macam pajak dikenakan pada penduduk lainnya, baik petani, pedagang, maupun lainnya. Beberapa macam pajak yang perlu disebut misalnya pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluhan, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan, dan pajak bandar.

Raja sebagai penguasa tertinggi negara mempunyai wewenang menarik sebagian dari pajak negara. *Pajak kepala* ditarik dari tiap keluarga, yang besar kecilnya disesuaikan dengan jumlah anggota. *Pajak tanah*, atau juga disebut *jawian*, dikenakan pada tanah yang ditanami. Untuk tanah yang tidak ditanami dikenakan juga pajak yang disebut-sebut *pajak turus*. Di samping itu, ada juga uang pungutan sebagai biaya untuk setiap permintaan izin menanami kembali tanah penduduk. Uang pungutan ini disebut *tabus*

---

96 Anonim, *Ibid*., hlm. 90

97 A.A. Cense, *Kroniek van Bandjarmasin*, Zantpoort, 1928, hlm. 147, dst.

surat.[98] Pungutan pelbagai macam pajak tersebut dilakukan oleh petugas-petugas pajak yang mendatangi daerah-daerah. Ada juga pungutan pajak yang disebut *hasil*, yang sebenarnya tidak berbeda dengan pajak kepala bagi tiap-tiap anggota keluarga (*lawang*). Penarikannya dilakukan setiap tahun dan bertepatan dengan musim panen, dalam bentuk uang ataupun hasil bumi.[99] Pajak padi persepuluhan dikenakan pada hasil dari tanah sawah, sejumlah sepersepuluh hasil panen padi.

Kekayaan alam di daerah kerajaan Banjar dalam bentuk emas dan berlian merupakan sumber penghidupan yang menguntungkan baik bagi pemerintah maupun penduduk Banjar. Pendulangan emas dan berlian diusahakan, baik oleh para bangsawan yang memiliki tanah daerah pendulangan maupun oleh para pedagang dan penduduk setempat. Pajak yang dipungut dari usaha dan hasil pendulangan cukup dapat menambah pemasukan penghasilan pemerintah kerajaan. Demikian pula apabila barang-barang tersebut diperdagangkan, tidak luput pula dari pajak barang dagangan. Pajak barang dagangan tersebut juga dikenakan pada hasil bumi dan hasil hutan yang diperdagangkan dari daerah pedalaman ke daerah pantai.

Letak kerajaan Banjar yang cukup strategis, karena berada di tepi jalan perdagangan laut di bagian timur dan bagian barat Indonesia, menyebabkan kuatnya tradisi perdagangan laut dan pelayaran pada penduduk Banjar. Kecuali sebagai bandar transito, bandar dari kerajaan Banjar juga mengekspor produksi bumi dan hasil hutan yang cukup melimpah di daerah pedalaman. Demikian pula pemasukan barang-barang dagangan dari lain daerah atau dari negara asing untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk, ramai dilakukan. Bagi pemerintah, cukai atau pajak bandar bagi perahu-perahu yang singgah di bandar dengan memuat barang dagangan merupakan hasil pendapatan yang cukup banyak. Dari hasil-hasil pajak dan cukai itulah sebagian besar dipakai untuk mencukupi pembiayaan aparatur pemerintahan kerajaan.

3. Birokrasi

Dalam urusan pemerintahan kerajaan, sultan dibantu oleh seorang *mangkubumi* atau *patih* yang bertindak sebagai kepala pelaksana pemerintahan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang bangsawan keluarga dekat raja, seperti putra atau saudara raja. Susunan jabatan di bawah mangkubumi mengingatkan kita pada jabatan-jabatan dalam

---

98 van der Ven, *op. cit.*, hlm. 11, dst.

99 De Hollander, *Land en volkenkunde*, 11, 1898 hlm. 49

kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Pengaruh Pulau Jawa terutama pada abad-abad ke-16 dan ke-17 cukup terasa dalam kerajaan Banjar. Pengaruh ini tampak sekali pada gelar-gelar para bangsawan, gelar jabatan dalam birokrasi kerajaan, organisasi pemerintahan, tata cara, maupun pada cabang-cabang seni istana.

Di bawah jabatan mangkubumi terdapat jabatan *mantri panganan*, *mantri pengiwa*, *mantri bumi*, dan 40 orang *mantri sikap*. Tiap-tiap *mantri sikap* ini mempunyai petugas bawahan sebanyak 100 orang.[100] *Mantri panganan* dan *mantri pengiwa* bertugas mengurus bidang kemiliteran. *Mantri bumi* dan *mantri sikap* bertugas mengurus perbendaharaan istana dan pemasukan pajak sebagai penghasilan negara. Para mantri tersebut adakalanya berasal dari rakyat biasa yang karena kecakapannya oleh raja diangkat sebagai pejabat istana. Umumnya mereka memakai gelar *kiai* atau *tumenggung*.[101] Selain itu, mangkubumi masih didampingi oleh para *panggapit mangkubumi* yang terdiri dari *penghulu* yang bertugas sebagai pemuka agama, *patih balit*, *patih kuwin*, dan *patih muhur*, yang masing-masing bertugas sebagai hakim dalam istana.[102]

Hikayat *Carita Raja Banjar* dan *Raja Kota Waringin*[103] memberi uraian terperinci mengenai jabatan-jabatan dalam negara Banjar sebelum abad ke-19. Di samping jabatan-jabatan tersebut di atas, lebih terutama berkedudukan sebagai pejabat birokrasi pemerintahan tersebut di atas, raja mempunyai kelompok-kelompok pejabat khusus untuk mengurus rumah tangga istana. Raja dengan keluarga terdekat (*kadang haji*) seperti *ratu ibu* dan putra mahkota bertempat tinggal dalam istana. Untuk menjaga keamanan istana, raja mempunyai kelompok petugas yang disebut kelompok *sarawisa*. Kelompok ini mempunyai anggota sebanyak 50 orang dan dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut *surabraja*. Karena kelompok ini bertugas dalam bidang keamanan, secara hierarkis mereka berada di bawah wewenang mantri *panganan* dan *pangiwa*. Kelompok *sarawisa* tersebut menempatkan markasnya di *pagungan*, sebuah bangunan tinggi dalam kompleks istana. Alun-alun dapat dilihat dengan jelas dari *pagungan* tersebut.

Tugas mengurusi dan membersihkan *balairungsari* dan *sitiluhur* diserahkan kepada para petugas *mandung* yang beranggotakan 50 orang dan dikepalai oleh pejabat *raksayuda*. Pada saat-saat raja dihadap oleh para pembesar kerajaan, raja dikawal oleh kelompok pasukan pengawal yang

---

[100] Amir Hassan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin, 1953, hlm. 149

[101] J. Ras, *Hikajat Bandjar*, Diss, Leiden, 1968, hlm. 196, *glossary*, hlm. 568

[102] *Ibid.*, hlm. 440–441

[103] *Ibid.*, hlm. 228, dst.

bernama kelompok *mamagarsari* yang berjumlah 40 orang dan dikepalai oleh pejabat *sarayuda*. Kelompok yang diserahi tugas memelihara alat-alat senjata adalah *saragani*. Tugas mereka kecuali memelihara alat-alat senjata api seperti senapan dan meriam, juga alat-alat senjata lain seperti tombak, keris, parang, panah, dan perisai. Kelompok *saragani* berada di bawah seorang kepala yang disebut *saradipa* juga disebut *wangsanala*.[104]

Tugas mengurus upacara-upacara kerajaan dipercayakan kepada petugas khusus di bawah pimpinan seorang pejabat *mengumbara*. Dalam upacara-upacara kerajaan, raja didampingi para rohaniwan yang disebut *mawarga*, sedang yang diserahi membawa benda-benda upacara lambang kebesaran raja seperti *payong bawat*, tombak, tikar, tempat rokok, dan lainnya adalah pejabat *rasajiwa*. Karena kelompok *pamarakan* yang beranggotakan 50 orang itu dapat dikatakan selalu dekat dengan raja, mereka sering pula bertugas sebagai pesuruh untuk menyampaikan perintah raja atau bahkan melayani apabila sedang bersantap. Masih perlu disebut kelompok *pergamelan* yang ditugaskan menyempurnakan, mengembangkan, dan mempergelarkan seni tari, gamelan, dan pertunjukan lain di dalam istana. Kelompok seniman ini dikepalai oleh pejabat *astaprana*.[105] Karena istana raja-raja Banjar diperlengkapi dengan peralatan yang berukiran indah dan banyak hiasan di antaranya berlapis emas dan bertabur berlian, dapat dipastikan bahwa seniman-seniman ukir dan kerajinan tangan terdapat pula di istana raja. Berhubungan dengan kegemaran berburu raja-raja Banjar, ada pula kelompok petugas yang khusus mengiring raja selama berburu di samping tugas menangkap binatang hutan lainnya. Kelompok petugas ini disebut *tuhaburu*, sedang kepalanya disebut *puspawana*. Para petugas yang mengurusi pekerjaan-pekerjaan untuk keperluan istana bertempat tinggal di perkampungan di sekitar istana.

Mengawasi dan menjaga keamanan pasar menjadi tugas kelompok *pariwala* atau *singabana*. Sebagai kepalanya adalah pejabat *singantaka* atau *singapati*. Dalam hubungannya dengan bidang ekonomi disebut adanya jabatan *wargasari* yang mengepalai kelompok petugas *juru gaduh gedong* dan *jurung*, yang mempunyai tugas mengurusi bahan makanan, terutama persediaan padi. Karena perdagangan laut sangat penting bagi negara Banjar, masalah perbandaran merupakan urusan yang cukup penting. Pengurusan dalam bidang ini termasuk antaranya penarikan cukai bandar untuk barang-barang dagangan yang diimpor dan yang diekspor dan cukai berlabuh bagi perahu-perahu yang singgah di bandar, diurusi oleh pejabat *anggamarta* sebagai kepala dari para petugas *juru bandar*. Kepala urusan

[104] J. Ras, *op. cit*., hlm. 285

[105] *Ibid*., 331, untuk jabatan-jabatan di atas periksa juga A.H.K. Bondan, *op. cit*., hlm. 149–150

perbandaran adakalanya dijabat oleh orang asing yang diangkat oleh kerajaan. Pengurusan perdagangan yang diusahakan oleh negara diserahkan kepada pejabat *wiramartas*.

Apa yang diuraikan di atas adalah susunan jabatan dalam birokrasi kerajaan sekitar abad ke-17 yang sedikit banyak masih terus digunakan dalam abad-abad berikutnya. Beberapa perubahan terjadi misalnya pada pemerintahan Sultan Adam (1825–1857) seperti adanya jabatan *mufti* yang berfungsi sebagai hakim tertinggi kerajaan yang secara hierarkis mengepalai hakim-hakim tingkat bawahan. *Penghulu* istana selain sebagai pemuka agama sekaligus juga menjadi kepala masjid besar di kota kerajaan. Semua pejabat dalam birokrasi kerajaan diangkat oleh raja atau wakilnya yang dikuasakan dengan surat piagam.

Untuk mengurusi pemerintahan di daerah-daerah, disusun jabatan-jabatan tertentu dengan wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan besar-kecilnya kesatuan wilayah yang diperintahnya. Dalam hubungan ini perlu disebut adanya daerah-daerah *apanage* para bangsawan yang merupakan semacam daerah *enclave* di daerah-daerah yang pengurusannya dilakukan oleh kepala-kepala yang ditunjuk oleh bangsawan pemegang tanah *apanage*. Kesatuan wilayah setingkat dengan distrik pada masa kekuasaan Belanda dikepalai oleh pejabat yang disebut *lalawang*. Lalawang membawahi sejumlah kesatuan wilayah lebih kecil, setingkat dengan distrik bawahan atau kelurahan, yang masing-masing dikepalai oleh seorang lurah. Seperti halnya dengan kesatuan wilayah tingkat atasan, dalam wilayah-wilayah ini selain terdapat jabatan-jabatan yang mengurusi soal-soal sekuler, juga terdapat jabatan-jabatan urusan keagamaan. Di kelurahan terdapat jabatan-jabatan keagamaan seperti *kaliba*, *katip*, *lebai*, dan *bilal*.[106] Tiap-tiap lurah membawahi sejumlah desa yang masing-masing dikepalai oleh *pembekal*. Desa terdiri atas sejumlah kampung yang masing-masing diketuai oleh *tetuha kampung*. Tetuha kampung dipilih di antara dan oleh penduduk dengan syarat: ia adalah penduduk asli kampung, berpengaruh, serta mempunyai kecakapan dan pengalaman. Di dalam kampung kedudukan *tetuha kampung* cukup dihormati.

4. Masyarakat

Dari seluruh uraian di atas sebenarnya sudah tampak susunan masyarakat dalam negara Banjar. Golongan bangsawan kerajaan merupakan golongan yang dihormati dalam masyarakat. Mereka sebagian memangku jabatan birokrasi kerajaan, sebagian mengadakan usaha pribadi,

---

[106] A. van der Ven, "Aantekeningen omtrent het rijk Banjarmasin", *TBG*, IX, 1860, hlm. 115

seperti sebagai pedagang atau sebagai pemilik usaha pendulangan emas dan berlian. Sudah pasti bahwa di kalangan bangsawan sendiri terdapat juga lapisan-lapisan menurut derajat kebangsawanannya. Hal ini berpengaruh terhadap tingkatan penghormatan orang kepada mereka. Selain golongan bangsawan, golongan pedagang mempunyai kedudukan yang cukup dihargai oleh masyarakat. Pedagang-pedagang kaya mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, bahkan juga pada pemerintah kerajaan. Penghormatan pada seorang pedagang kaya akan makin bertambah apabila pedagang tersebut sekaligus juga masih keturunan bangsawan. Sudah jelas bahwa penghargaan pada golongan pedagang juga bertingkat-tingkat, menurut besar kecilnya usaha ataupun kaya dan tidaknya pedagang tersebut. Mengingat tradisi usaha berdagang dianggap cukup dalam masyarakat Banjar, dapat dipahami mengapa usaha tersebut dipandang terhormat. Usaha perdagangan giat dan menguntungkan pedagang kecil dapat dilihat, misalnya, pasar-pasar yang ada di tepi-tepi sungai, dan perahu-perahu kecil ramai membawa barang-barang dagangan hasil bumi, atau hasil hutan di sungai-sungai yang banyak terdapat di daerah kerajaan Banjar.

Golongan pemimpin-pemimpin agama termasuk lapisan atas pula. Sekalipun tidak berkekuasaan politik, golongan ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang menduduki jabatan-jabatan birokrasi sekalipun jumlahnya tidak besar. Sebagian besar golongan ini terdapat di daerah perdesaan di antara rakyat biasa. Selain menjadi guru agama, banyak pula di antara mereka yang menjadi pedagang, dan dengan kekayaan yang diperoleh mereka dapat meningkatkan status sosial.

Golongan petani penanam hasil bumi merupakan golongan yang cukup besar jumlahnya. Mereka merupakan golongan yang memproduksi bahan makanan untuk kebutuhan hidup sendiri, juga untuk diperdagangkan. Penjualannya dilakukan sendiri atau disalurkan melalui tengkulak-tengkulak yang mendatangi desa-desa daerah pedalaman. Selain itu, terdapat pula golongan pekerja yang membuat barang-barang kerajinan, seperti anyam-anyaman dan alat-alat perkakas rumah tangga. Mengingat bahwa perdagangan laut sangat ramai di bandar-bandar kerajaan Banjar, tidak mengherankan kalau golongan buruh tenaga kasar cukup banyak juga jumlahnya.

F. Kalimantan Barat

1. Wilayah

Kerajaan Sintang terletak di pedalaman Kalimantan Barat di antara pertemuan atau percabangan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai

memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan penduduk daerah pedalaman Kalimantan Barat. Apalagi mengingat bahwa hampir sepertiga luas kawasan itu terdiri atas air, yakni rawa-rawa, danau, dan terutama sungai. Terlebih pula, pentingnya sungai bertalian dengan asal usul penamaan daerah Sintang. Pada mulanya daerah pertemuan antara Sungai Kapuas dan cabang Sungai Melawi diberi nama "Senentang", yang berasal dari istilah orang Dayak. Dinamakan seperti itu karena di sekeliling wilayah itu banyak ditemukan anak-anak sungai yang mengalir "tentang-menentang" (saling silang) antara satu dengan lainnya. Dalam rentangan waktu, lafal penyebutannya berubah menjadi "Sintang".[107]

Sungai yang paling penting di Kalimantan Barat adalah Sungai Kapuas atau dikenal juga sebagai Kapuas Bohang. Sungai itu berfungsi sebagai urat nadi perhubungan utama, baik antara kawasan pedalaman dan pesisir pantai Laut Cina Selatan, maupun antardaerah di pedalaman, yakni melalui anak-anak sungainya yang besar dan kecil. Banyak aliran sungai dalam berbagai ukuran bermuara ke Sungai Kapuas. Hulu sungainya memiliki delapan percabangan muara, yang berakhir di Laut Cina Selatan. Luasnya diperkirakan sekitar 102.000 kilometer persegi dengan panjangnya yang berkelok-kelok lebih kurang 1.143 kilometer.[108] Jarak kedua sisinya di hadapan kota Sintang adalah sekitar 536 meter. Ke arah hilir arusnya bertambah deras, penuh jeram, dan liukan, yang sebagiannya diredam dengan saluran-saluran, yang disebut juga *Bintas*. Sungai Kapuas berhilir di Putus Sibau. Cabang-cabang utamanya yang pada masa pra-kolonial Belanda di bawah pengaruh kerajaan Sintang adalah Sungai Melawi, Ketunggau, Sepauk, Seberuang, Silat, dan Tempunak.

Sungai Melawi, anak sungai besar Sungai Kapuas, memiliki panjang aliran sekitar 500 kilometer dan lebarnya hampir sama dengan rata-rata lebar Sungai Kapuas, tidak kurang dari 200 meter. Dari panjang tersebut, bagian yang dapat dialiri adalah sekitar 464 kilometer. Sungai itu berawal dari lereng Pegunungan Kemintin, dan bermuara selain ke sungai induknya yakni Kapuas, memiliki panjang aliran sekitar 500 kilometer dan lebarnya tidak jauh berbeda dengan Sungai Kapuas, yakni tidak kurang dari rata-rata 200 meter. Dari panjangnya itu bagian yang dapat dilayari sekitar 464 kilometer. Sungai Melawi berawal dari lereng Pegunungan Kemintin. Muaranya selain berakhir di Sungai Kapuas, juga terdapat di daerah Pino. Tinggi permukaan

---

[107] J.U. Lontaan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pontianak, Pemda Tingkat I Kalbar, edisi I, 1975

[108] *Encyclopedie van Nederlandsch Indie (ENI)*, 1919, hlm. 361

airnya mencapai 5 meter. Di bagian hilir, arusnya sangat deras dan disebut Riam Tambuk.[109] Sungai Melawi memiliki banyak percabangan sungai. Di sebelah selatan Sungai Melawi terdapat percabangan sungai yang meliputi, antara lain, Naga Kayan, Naga Jetta, Naga Dahan, Naga Isa, Naga Kalabebu, Naga Labaho, Naga Belimbing, Naga Kaingal, Naga Tengcawes, Pino, Dedei, Kandis, Tenkajau, Itang, Pinang, Kroab, Serawai, Mau, Katap, Kalaki, Serebong, Kampung Tabang, Kampung Panin, Karang Taman, dan Bajau dengan kelompok Bajaunya.

Cabang utama Sungai Melawi adalah Sungai Kayan yang memiliki anak-anak sungai (percabangan), seperti Tebidah, Mali, Jeta, Serawai, Embalo, Lakawei, Mentutu, Mohema, Ella, Dedai, Dakan, Gandis, Belimbing, Kelaki, Kebibu, Mau, Demu, dan Kroab. Ketujuh anak sungai yang disebutkan pertama menghubungkan daerah Melawi dengan Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Sungai Pino, yang mengalir membelah daerah Matan dan Kotawaringin, bersumber dari Gunung Pembangan Badak. Muaranya memiliki tanah yang subur dan sangat sesuai dengan budi daya padi. Namun, sungai itu sukar untuk dilayari karena makin ke dalam kian dangkal dan terdapat sejumlah jeram.

Jalur komunikasi dari Sintang ke arah selatan yang melintasi Melawi, menuju daerah Banjarmasin dapat ditempuh dengan beberapa cara. Untuk sampai di Katingan, perjalanan menelusuri dua buah anak sungai utama. *Pertama*, adalah anak Sungai Serawai dengan melintasi sungai-sungai kecil, seperti Jeludung, Sehekei, dan Sinaman. *Kedua*, adalah melalui anak Sungai Lakawu yang kemudian memberikan dua pilihan, apakah memanfaatkan arah Sungai Sanito, atau ke Sungai Irawea. Di samping itu, terdapat jalan setapak di sepanjang sungai Mentatu, Mohela, atau Olla dan Ella.

Sungai-sungai di sekitar Melawi yang mengalir sejajar antara lain sungai Tempunak dan Sepauk. Sumber mata air Sungai Tempunak berasal dari pegunungan yang terletak di perbatasan Banjarmasin. Sungai Sepauk memiliki panjang sekitar tujuh puluh dua kilometer dan di sepanjang tepiannya dijumpai sebuah tambang garam. Kebutuhan garam penduduk di sekitarnya dipenuhi dari tambang itu.

Berikutnya adalah Sungai Seberuang dan Ketunggau. Sungai yang disebutkan pertama terletak di sekitar daerah Silat dan bermuara di Sungai Kapuas. Lapisan tanahnya banyak mengandung batu kapur. Pinggiran sungainya diketahui kaya akan sejenis batu keras beraneka warna. Dalam radius tiga meter dari muaranya mengandung bijih besi.

---

[109] *Ibid.*, hlm. 362

Sungai Ketunggau berhilir di daerah perbatasan dengan Kalimantan Utara atau tepatnya dengan Serawak.[110] Sumber airnya berada di Gunung Klingkang yang menjadi bagian dari kerajaan Borneo atau lebih dikenal dengan Brunei dan terletak tidak jauh dari Sadong dan Batang Lupar. Panjang Sungai Ketunggau selesai dilayari lebih kurang dalam waktu 9 hari dengan perahu besar. Sungai itu cukup lebar, dalam, dan tidak mengenal masa-masa kering atau surut. Di musim hujan, ketinggian airnya memungkinkan untuk dilayari oleh perahu-perahu besar. Airnya berwarna kehitam-hitaman dan tidak banyak ditemukan jeram. Ketika air pasang, terutama di muaranya ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Percabangan sungainya, antara lain Sungai Mereka, Merakai, Sekalau, Subega, Senduwa, Kembuh, Engkujung, dan Tabung. Keadaan geografi pedalaman Kapuas, di mana Sintang termasuk di dalamnya, yang penuh dengan percabangan sungai, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakatnya.

2. Raja dan Bangsawan

Awal mula kerajaan Sintang masih diliputi misteri. Namun, dari tradisi lokal dapat digali beberapa petunjuk yang dapat mengarah ke masa-masa awal itu. Menurut van den Dungen-Gronovius, ada alkisah seorang putra raja keturunan kerajaan Majapahit menjadi raja di Sukadana yang terletak di pesisir Kalimantan Barat. Ia berhasil menjadi raja melalui cara politik garam. Kemudian kekuasaan kerajaan meluas hingga ke kawasan pedalaman dengan perkawinan. Pada suatu waktu, penguasa Sintang yang disebutnya sebagai bupati melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sukadana. Menurut cerita rakyat, awal kerajaan Sintang bertalian dengan pendirian permukiman awal di daerah Sepauk, di sekitar Sintang, oleh seorang yang bernama Aji Melayu. Dengan kedatangan pengaruh Hindu, berdirilah kerajaan Sintang. Gelar-gelar kerajaan banyak yang berasal dari tradisi politik itu. Ketika pengaruh Islam datang, gelar raja-raja Sintang berubah dari *panembahan* menjadi sultan, walau gelar Panembahan tidak sama sekali ditanggalkan.

Raja menggunakan gelar *panembahan* atau *sultan*, sedangkan keluarga dan kerabatnya memakai sebutan *pangeran, raden, gusti, ade, uti, ratu, abang,* dan *wayang.* Pangeran dipakai oleh kaum laki-laki kerabat dekat raja dan anak-anak lelaki tertua mereka. Mereka biasanya mengendalikan kekuasaan di suatu daerah kerajaan atau persungaian. Mereka umumnya menggunakan nama-nama, seperti Anom, Adipati, Laksamana, Bendahara, Muda, Paduka, Kusuma Negara, Surya Negara, dan Mangku Negara. Sementara

---

[110] *Ibid.*, hlm. 362

Ade, Uti, dan Gusti adalah gelar yang disandang oleh anak-anak lelaki yang kedua orang tuanya tergolong bangsawan berdasarkan garis keturunan. Untuk anak perempuannya adalah *Ratu*. Lalu, *Abang* dan *Wayang* adalah gelar untuk putra dan putri bangsawan yang diangkat atau tidak berdasarkan keturunan. Gelar *Raden* dipakai oleh dua kelompok, yakni yang disandang secara serta-merta atau otomatis berdasarkan keturunan dan yang diangkat atau dianugerahi oleh raja.[111]

Pemilihan seorang raja seperti saat peralihan kekuasaan atau suksesi, berdasarkan adat istiadat di Sintang, tidak selalu berdasarkan *primogeniture*, tidak lebih mendekati prinsip *primus inter pares.* Proses pemilihan itu dilangsungkan dalam suatu pertemuan keluarga kerajaan dan pemuka-pemuka lainnya yang terkait. Memang anak lelaki tertua biasanya mendapat nominasi utama untuk menduduki takhta pendahulunya (ayahnya). Walau tidak tertutup kemungkinan seorang perempuan (putri) menjadi calon untuk itu. Namun, prinsip berdasarkan garis keturunan itu harus dilengkapi dengan kecakapan dan kelebihan tertentu. Penerus mahkota kerajaan harus terlebih dahulu membuktikan kemampuan dirinya untuk kemudian mampu menggalang dukungan dari kalangan elite kerajaan. Sidang itulah yang memilih dan menetapkan siapa penerus takhta.

Setelah kedatangan Belanda, prinsip *primogeniture* diperkuat yang kemudian menjadi sumber konflik hingga ikut menjadi penyebab meletusnya sebuah pemberontakan bersenjata. Tentang jabatan *jaksa,* tidak diperoleh keterangan lebih lanjut, terkecuali bahwa menurut Perjanjian 1855 pihak kolonial mengalihkan hak peradilan kerajaan Sintang kepada suatu peradilan kolonial berupa *landraad.* Sebelum itu penyelesaian perkara hukum dan adat istiadat ditengahi oleh raja, patih, dan bangsawan penguasa kawasan sungai. Mengenai pengaturan peradilannya lebih lanjut disampaikan dengan penjelasan tersendiri.

Berkaitan dengan keadaan alam dan geografis di dan sekitar Sintang tidak memungkinkan timbulnya peluang untuk membangun kekuasaan yang sentralistik dan berstruktur ketat dan tertutup *(tightly-closely structured)*, mengingat topografinya yang terbentuk dari sungai-sungai. Biaya pengawasan kekuasaannya terlampau tinggi apabila bertumpu pada kekuatan bersenjata (militer). Demikian juga secara administrasi kekuasaan yang sentralistik membutuhkan dukungan ekonomi yang besar. Untuk itu, pengendalian dan persebaran kekuasaan akan kian menipis di wilayah yang jaraknya makin jauh dari pusat kerajaan. Oleh karena itu, tidaklah

[111] Naskah Sintang, CS 84-2/37, PNRI, Jakarta

mengherankan apabila para bangsawan yang menguasai suatu kawasan sungai memiliki kekuasaan yang hampir dapat mengimbangi kekuasaan kerajaan.

Kunci pengendalian penguasa pusat, yang daerah-daerahnya disebut sebagai pinggiran *(peripheral area)* memperkecil kemungkinan munculnya saingan-saingan yang ada melalui cara membuat persekutuan dengan pemimpin-pemimpin kelompok di sekelilingnya. Hubungan raja dan elite politik kerajaannya mengikuti beberapa prinsip *patron-client relationship*. Raja memberikan jabatan dan kedudukan kepada para elite itu. Raja memperkuat kekuasaan dan melindungi mereka terhadap pengikut-pengikutnya (bawahan). Sebaliknya, raja memperoleh kesetiaan mereka. Keadaan geografi dan keamanan di kawasan aliran Sungai Kapuas, tradisi Mengayau, dan ancaman penjarahan antarkelompok Dayak memperkuat peran pelindung dari raja dan penguasa-penguasa kawasan sungai (persungaian) lainnya. Keamanan menjadi tidak pasti karena tindakan sejumlah kelompok Dayak sebagai bajak sungai. Kelompok yang disebut dengan Dayak pengembara adalah pelaku perompakan itu. Beberapa kelompok Dayak itu, antara lain, *Puak Punan*, *Iban*, *Menketan*, dan *Batang Lupar*.

Kekuasaan pihak kerajaan terhadap kaulanya dipelihara melalui upacara-upacara. Istana raja dengan segala kegiatan dan gayanya adalah alam dewa-dewa di mana seluruh kejayaan dan keagungan berada. Dengan legitimasi yang dianggap sakral, penguasa menyelenggarakan kekuasaannya dengan sejumlah sanksi (hukuman) untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan alam kehidupan. Melalui upacara-upacara kerajaan itu, persatuan di kalangan penguasa secara vertikal dan horizontal dipelihara, dan selanjutnya berlaku pula terhadap pemuka-pemuka kelompok Dayak kaula. Dengan itu terjadi penyerapan timbal balik antara kultus ritual pusat dan pinggirannya. Di Sintang, pada upacara-upacara tertentu yang setidak-tidaknya diselenggarakan sekali dalam setahun, kelompok Dayak terlibat terutama dalam hal penyediaan kebutuhan acara tersebut. Kewajiban Dayak untuk ikut serta itu disebut *pupuh* atau *pupul*. Mereka menyerahkan ayam, pakaian, blok-blok beras, dan batu asah. Kelompok Melayu wajib mempersembahkan sejenis upeti atau hantaran, dan membangun tempat tinggal penguasa. Perayaan atau upacara itu meliputi tahap pada ritus peralihan kehidupan seseorang seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian, terutama di kalangan anggota keluarga kerajaan.[112]

---

[112] P.J. Veth, *Borneo's Westerafdeeling Geograpisch, Statistisch, Historisch Voorafgegaan door Eene Algemeene Schets der Ganschen Eilands*, II, 1856, hlm. 339

3. Birokrasi

Mengenai susunan pemerintahan pada masa sebelum pengaruh Belanda tidak diketahui secara rinci. Struktur pemerintahan di kerajaan Sintang, berdasarkan pola yang ada setelah Perjanjian 1855, dapat dilihat pada skema di bawah ini.
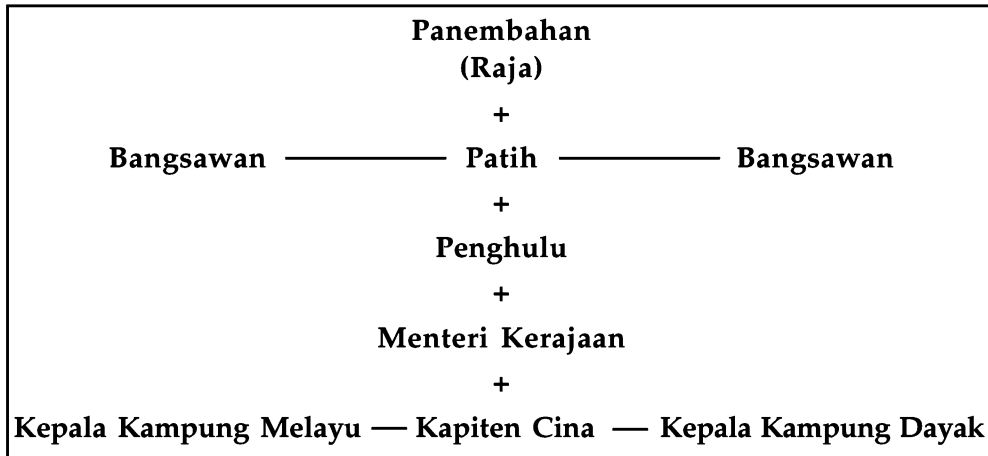
Dari struktur tersebut terkandung suatu pembagian kekuasaan di kalangan Melayu berdarah ningrat (kerajaan). Pembagian itu adalah panembahan (raja) dan keluarganya, bangsawan pemangku jabatan, dan bangsawan tanpa jabatan. Namun, umumnya mereka adalah pemegang *lungguh (appanagehouder)*, yakni Tuan (*Lord*) terhadap perkampungan-perkampungan yang terletak di daerah kekuasaannya, berupa persungaian. Selanjutnya, tugas pengumpulan pungutan atau pajak dibebankan kepada seorang *pembekel* yang menjadi penghubung antara tuan dan hambanya.

Dalam menjalankan kekuasaan raja dibantu oleh seorang patih, sejumlah menteri, dan pejabat lainnya. Kekuasaan patih hampir sama dengan raja karena ia yang mengendalikan kebijakan dan peraturan kerajaan. Patih diangkat oleh raja melalui pertimbangan pertemuan bangsawan keluarga kerajaan. Ia membawahi para menteri yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Namun, dalam pemerintahan kerajaan para menteri tidak terlampau menonjol karena peran patih yang sedemikian besar. Mereka tidak lebih sebagai pelaksana titah dan kebijakan patih dan tentu saja, raja.

Di bawah menteri adalah para kepala kampung. Tugas mereka sebagai bawahan kerajaan adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan raja, seperti memungut pajak dan menjaga ketertiban. Apabila terjadi kekacauan, biasanya mereka tidak mengatasinya sendiri, tetapi melapor ke kerajaan. Berdasarkan laporan mereka, patih beserta pasukan kerajaan turun tangan

memulihkan ketertiban. Di kalangan kelompok Melayu terdapat kelompok pemuka agama atau penghulu, walau tidak memainkan peran yang penting dalam percaturan politik. Bahkan, ada indikasi bahwa penguasa tertinggi adalah pemangku besar agama. Pelaksanaan kehidupan beragama tampaknya tidak terlepas dari adat istiadat (tradisi). Gelar-gelar pemuka agama di Sintang, antara lain, *imam*, *lebai*, dan *chatib*.[113] Penghulu adalah jabatan kerajaan yang mengatur urusan keagamaan.

Kapiten Cina mengepalai para penduduk Cina dan memiliki bawahan yang disebut *Lao Thay*. Di Sintang terdapat seorang Lao Thay dan seorang lagi di Batu Lintang. Tidak banyak diperoleh keterangan tentang kegiatan politik di kalangan penduduk Cina kecuali mereka yang bergerak di bidang ekonomi, seperti perdagangan dan pekerja tambang emas. Tidak disebut-sebut pula dalam sumber kolonial dan lainnya tentang keadaan mereka pada saat pemberontakan berlangsung.

Hubungan kekuasaan antara kerajaan dan kelompok Dayak taklukannya diatur dalam bentuk sistem *cacah*. Tumpuan kekuasaan terletak pada pengumpulan dan pemilikan jumlah manusia sebagai kaula. Bersama-sama pengendalian atas mereka kekuasaan menjadi acuan dan bukan berdasarkan pada pengakuan terhadap pemilikan dan pengawasan atas wilayah dengan batas-batas yang tegas, sebagaimana feodalisme yang mengenal *fief* dan *feudum*. Penguasa tertinggi membangun legitimasi kekuasaannya dengan mengukuhkan diri sebagai keturunan dari pembuka awal permukiman atau cikal bakal kerajaan.

Pranata di sekitar pemanfaatan lahan di Sintang memperlihatkan adanya kebebasan di kalangan penduduk, terutama pada kelompok Melayu, untuk membuka sebidang tanah di hutan rimba yang belum dibuka sebagai lahan garapannya. Walau kelak pembuka tanah itu berpindah ke tempat lain, sebagaimana layaknya suatu sistem perladangan, hak garapnya tidak hilang. Ketika rotasi penanaman kembali ke tempat semula, dengan mudah penggarapan lahan berlanjut. Di kalangan Dayak berlaku suatu penguasaan tanah yang bersifat komunal dalam batasan kampung.

Mengenai wewenang hukum penguasa kerajaan sukar untuk dipastikan batas-batasnya. Memang supremasi itu paling mudah diperhatikan pada saat penanganan suatu masalah pelanggaran aturan atau ketertiban. Akan tetapi, batasan lingkup hukum dalam kehidupan masyarakat di Sintang sukar untuk dipisahkan dengan adat istiadat. Misalnya, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa kekuasaan kerajaan juga merasuk ke dalam kehidupan sosial masyarakatnya ketika memberlakukan larangan untuk

[113] *Ibid*.

seorang lelaki memiliki istri resmi lebih dari satu, walau memiliki selir tidak dibatasi oleh pihak penguasa. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi umumnya diselesaikan dengan hukuman denda. Kecuali apabila pelanggaran itu dipandang berat. Untuk itu, dikenakan suatu hukuman badan. Akibatnya, ikatan perbudakan telah menanti sang pelanggar hukuman itu. Tindakan kejahatan yang tergolong tidak terampuni dan berbahaya adalah menentang kehendak penguasa. Bentuk pembangkangan itu berbentuk seperti kelalaian atau kebebalan untuk membayar pajak atau pungutan lainnya yang berlaku. Sebagai sanksi pelanggar itu dapat kehilangan nyawanya.

Susunan politik di kalangan Dayak pada dasarnya berawal dari rumah-rumah panjang. Keluarga adalah satuan (unit) politik terkecil, bukan perseorangan (individu) sebagai warga. Di atas *lawang* (keluarga) terdapat *pasirah* atau serupa kampung dengan seorang pemimpin yang dipilih di antara kepala-kepala keluarga anggotanya. Kemudian sejumlah kampung membentuk suatu satuan pemerintahan tersendiri. Pemimpin-pemimpinnya menggunakan sebutan seperti *Lang, Macan, Macan Layang, Macan Pintu, Singa, Singa Muda, Layang Muda, Langit, Raden, Temenggung, Kelamba*, dan *Pati*. Semua persoalan yang timbul dalam tiap-tiap kelompok diselesaikan tanpa melibatkan pihak lain. Campur tangan kerajaan terjadi terutama pada saat merebak perselisihan antarkampung atau kelompok kampung. Di sejumlah tempat ditemukan permukiman kelompok Dayak yang bukan kaula kerajaan tertentu. Namun, jumlah mereka tidaklah banyak. Mereka sering harus berpindah-pindah untuk menghindari ancaman dan dijadikan kaula kerajaan.

Persoalan yang timbul di kalangan Dayak memiliki beberapa latar belakang. Namun, faktor penyebab yang utama dan sering muncul adalah campur tangan pihak luar yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu. Latar belakang perselisihan yang sedianya hanya berskala kecil menjadi meluas dengan adanya campur tangan luar itu. Persoalan biasanya berkenaan dengan perebutan lahan dan dendam karena tradisi Mengayau sebagaimana yang diceritakan pada bagian sebelumnya. Namun, kepentingan pihak luar dapat menyeret suatu kelompok Dayak terlibat permusuhan dengan kelompok Dayak lainnya. Persoalan yang disebutkan terakhir itu berhubungan juga dengan hilangnya kemerdekaan suatu kelompok Dayak. Prosesnya dapat berlangsung dalam sejumlah tahap. Awalnya adalah pembukaan hubungan ekonomi atau pertukaran. Kemudian peningkatan hubungan menjadi kehendak penguasaan. Caranya adalah dengan tekanan kekuatan senjata atau kekerasan. Dalam penaklukan itu tidak jarang pihak penakluk memanfaatkan bantuan kelompok Dayak lainnya, baik kaula maupun kelompok bebas lain (bukan kaulanya).

4. Masyarakat

Pelapisan berikutnya adalah orang-orang *merdeka*, yang meliputi penduduk biasa yang tidak terikat pada bentuk penghambaan. Kebanyakan mereka dari kalangan Melayu. Mereka adalah warga kerajaan dan menempati jabatan pemerintahan tertentu. Umumnya mereka menempati jabatan menteri yang berkedudukan di bawah patih. Gelar-gelar yang digunakan oleh menteri kerajaan adalah *kyai, demang*, dan *angsa.*

Setelah itu adalah lapisan *hamba*, yang tidak merdeka dan terikat pada kewajiban-kewajiban tertentu kepada seorang tuan, terutama terhadap kalangan keluarga kerajaan. Selain itu, pada lapisan yang sama dikenal suatu kelompok yang disebut orang *belian*. Dalam literatur kolonial, dibedakan antara *slaaf* dan *pandeling*. Kelompok *pandeling* adalah orang *belian.* Pelapisan bawah itu lebih banyak melibatkan kelompok Dayak. Dalam masyarakat Dayak, asal usul dan kedudukan pelapisan itu memperlihatkan keadaan yang tidak jauh berbeda di seluruh Kalimantan. Hanya bahasanya atau penyebutannya yang berlainan. Dengan itu, suatu perbandingan dapat dikemukakan yang mengacu pada pelapisan masyarakat di kalangan Dayak Ngaju dari Kalimantan Tengah.

Mereka mengenal dua pelapisan yakni golongan *merdeka* dan *budak*. Golongan yang pertama terdiri atas dua kelompok, yakni *Utus Gantong* atau *Utus Tatau* dan *Utus Rendah* atau *Pehe-Belum.* Kelompok pertama adalah golongan tinggi, kaya, dan dipandang sebagai lapisan bangsawan tinggi yang memiliki garis keturunan langsung dari *Zat Keilahian* (Dewa). Mereka memiliki perlambang atau pusaka-pusaka yang berkaitan dengan unsur-unsur sakral itu, seperti tombak, gong, tikar, dan bejana atau tempayan. Mereka merupakan pemimpin dalam *puak-puak*-nya. Sebutan lainnya untuk mereka adalah *Anak Matahari* atau *Manusia Tingang* yang identik dengan *Mahatara.* Kelompok kedua adalah golongan bawah dan miskin. Garis keturunan mereka dipandang tidak bertalian dengan garis keilahian. Segelintir dari mereka dapat menduduki jabatan yang dimiliki oleh *Utus Gantong*. Namun, sebagian besar mereka adalah kalangan biasa. Sebutan lain untuk mereka adalah *Anak Bulan* dan *Manusia Tambon* yang identik dengan *Bawin Jata.*[114]

Di samping itu, terdapat kelompok budak, yang terbagi atas *Rewar* dan *Jipen*. Rewar adalah budak yang turun-temurun menjadi milik sang majikan. Menurut kepercayaan kelak hingga di akhirat (alam setelah kematian) sang budak akan terus mengabdi kepada pemiliknya, sedangkan *jipen* adalah

---

[114] Sebagaimana diungkapkan oleh F. Ukur, *Tantang Jiwa Suku Daya*, 1971 dan H. Scharer, *Die Gotteside der Ngaju Dayak in Sued Borneo*, Leiden; E.J. Brill, 1946, yang dikutip oleh Lontaan, *op. cit.*, hlm. 266–273

seseorang yang menjadi budak karena tidak mampu membayar utang. Sebagai gantinya ia harus mengabdi kepada pemberi utangnya. Biasanya keadaan mereka akan beralih menjadi *rewar* (turun-termurun) karena tidak sanggup melunasinya hingga akhir hayat. Jipen dikenal juga sebagai *pandeling*. Di Sintang pandeling dapat dibedakan antara *Orang Dalam* dan *Kawan*. *Orang Dalam* adalah pandeling dari raja dan *Kawan* adalah pandeling biasa (awam).[115]

Proses seseorang menjadi budak dapat diikuti dari keterangan berikut. Di Batang Ingar atau Sungai Ingar pada saat musim kelaparan melanda banyak orang Dayak yang masuk ke dalam perangkap pedagang Melayu karena berutang. Dengan cara tertentu, pedagang itu menawarkan pinjaman kepada orang Dayak yang sedang mengalami kesulitan itu. Padahal di ujung pinjaman itu adalah jebakan menjadi budak. Malahan hanya untuk sepiring nasi yang diberikan, seorang Dayak dapat terjebak menjadi budak. Selain itu, tuduhan telah mempraktikkan sihir dapat menjadikan seseorang menjadi budak. Demikian juga ketika seseorang melakukan utang darah atau pembunuhan dan tidak mampu membayar pajak kerajaan juga menyebabkan terjadinya perbudakan. Dalam kegiatan rumah tangga dan perekonomian, masyarakat Sintang budak memiliki nilai yang sangat berharga. Selain sebagai tenaga kerja, budak juga merupakan komoditas perdagangan yang sangat menguntungkan.

E. Aceh

1. Wilayah

Pada abad ke-19 di Sumatra terdapat sejumlah negara yang berbentuk kerajaan, seperti Aceh, Siak, Kampar, Palembang, dan Jambi.[116] Di samping itu, ada juga wilayah-wilayah yang tidak mempunyai satu pemerintahan pusat, Lampung misalnya. Di situ tampak pemerintahan dipegang oleh kepala suku atau kepala distrik. Oleh karena itu, ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Sumatra pada awal abad ke-19, sikap dan tindakannya terhadap negara-negara di Sumatra itu berbeda-beda.

Belanda sedikit demi sedikit mulai memasukkan dan menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah, baik secara langsung maupun tidak

---

[115] Naskah Sintang, A II, *op. cit*., PNRI

[116] Sumber yang dipakai untuk bagian Pendahuluan ini terutama adalah buku *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda*, Tahun 1839–1848, Arsip Nasional RI, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5. Jakarta, 1973 dan Laporan Politik Tahun 1837, Arsip Nasional RI, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, Djakarta, 1971, khususnya tentang Sumatra

langsung. Di daerah-daerah yang secara tidak langsung dikuasainya, pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan pos-pos pemerintahan dan pos-pos militer di tempat-tempat yang dianggapnya penting. Di wilayah ini kekuasaan raja-rajanya boleh dikatakan masih penuh, misalnya seperti di Jambi, Kampar, dan Inderagiri. Di samping itu, di beberapa tempat lainnya, seperti di Bengkulu, Lampung, dan Palembang, Belanda berkuasa secara langsung dan menempatkan pejabatnya, seperti residen atau *controleur*. Pejabat Belanda di daerah-daerah itu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat di Batavia (Jakarta). Misalnya, untuk Palembang telah diangkat seorang residen pada tahun 1839.

Walaupun demikian, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk tidak terlalu mencampuri urusan-urusan penduduk setempat. Pungutan pajak secara langsung, seperti pajak tanah, pajak kepala, dan pajak jalan, tidak dilakukan. Keuangan diperlukan untuk membiayai aktivitasnya diperoleh dari perdagangan, seperti monopoli penjualan candu dan garam, serta penjualan hasil-hasil setempat dan cukai atas barang-barang yang keluar dan masuk wilayah itu.

Jika dilihat secara menyeluruh, negara di Sumatra itu ada yang tumbuh beberapa abad sebelum Belanda tiba di Indonesia. Misalnya, Palembang telah terkenal sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Ketika Belanda datang, pada umumnya para penguasa di wilayah di Sumatra itu beragama Islam dan memegang peran dalam perniagaan di wilayahnya. Tapal batas antara kerajaan-kerajaan itu sangat sukar untuk ditentukan karena tidak pernah diadakan perjanjian atau persetujuan tentang tapal batas wilayah masing-masing. Bahkan, sering terjadi bahwa karena satu dan lain sebab suatu wilayah dikuasai oleh dua negara. Misalnya, para kepala suku di Lampung selalu bersaing memperebutkan kekuasaan sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya suatu pemerintah pusat yang kuat, akibatnya Sultan Palembang berhasil menguasai daerah sepanjang Sungai Komering.

Salah satu negara yang penting di Sumatra pada abad ke-19 adalah Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatra. Pada waktu itu Aceh mempunyai peran yang besar karena terletak di jalur lalu lintas perdagangan laut dan juga karena Aceh adalah satu-satunya negara yang masih berdaulat penuh. Dalam "Traktat London 1824", kedaulatan Aceh dijamin baik oleh Belanda maupun oleh Inggris, sebagai negara penanda tangan persetujuan itu. Oleh karena itu, sistem negara Aceh perlu dikaji lebih lanjut dan akan dibahas lebih luas agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan sejarah di Sumatra pada abad ke-19.

Sudah sejak lama pantai utara dan timur laut Pulau Sumatra menjadi tempat persinggahan kaum pedagang yang mengadakan perdagangan antara Cina dan India.[117] Misalnya, Samudra Pasai dengan pelabuhannya pada akhir abad ke-13 telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam ke Indonesia. Kemudian ketika pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai bandar Malaka, para pedagang Aceh khususnya mampu bertahan dan bersaing, bahkan mengembangkan kekuasaannya. Selain Samudra Pasai masih terdapat beberapa negara lain di Sumatra Utara pada waktu itu, di antaranya ialah Tamiang, Perlak, Daya, dan negara Aceh Darussalam yang berpusat di lembah Sungai Aceh.

Pusat negara Aceh meliputi wilayah yang disebut Aceh Besar dengan ibu kota yang dinamakan Banda Aceh Darussalam. Sultan Aceh berhasil memperluas dan memperkuat kekuasaannya berkat majunya perdagangan. Tanpa kesukaran, penguasa-penguasa daerah lainnya dapat ditundukkan sehingga mulai abad ke-16 semakin luaslah daerah kekuasaan Aceh Darussalam. Walaupun daerah-daerah dan negara-negara yang ada di Sumatra Utara ini menyatakan tunduk kepada Aceh, mereka tetap bebas dan mempunyai otonomi yang sebesar-besarnya.

Kekuasaan Aceh semakin memuncak di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Ia menguasai jalur pantai, baik sebelah barat maupun sebelah timur dan para pedagang dipaksa singgah di pelabuhan-pelabuhan Aceh sehingga kekayaan Sultan dari cukai barang dagangan semakin bertambah. Menurut catatan seorang pedagang bangsa Prancis, yang datang di Aceh pada tahun 1621, daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Aceh adalah Labo, Singkil, Barus, Batanghari, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, dan Salida.[118]

Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, kekuasaan kesultanan merosot dan hanya menjadi lambang. Daerah kekuasaan sultan-sultan pengganti Iskandar Muda hanya berpusat di ibu kota dan daerah pelabuhan. Pada saat itu kekuasaan yang sebenarnya jatuh ke tangan para *uleebalang*, imam kepala-kepala pemerintahan yang lain, yang kekuasaannya di wilayah masing-masing semakin besar. Misalnya, dengan majunya perdagangan lada, di daerah pantai muncul penguasa-penguasa baru yang sering disebut "raja". Karena sekarang perdagangan dikuasai oleh penguasa baru, penghasilan Sultan semakin berkurang. Sultan kehilangan haknya memungut bea masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan yang semula dikuasainya. Sebagai gantinya, Sultan mendapat upeti tahunan yang disebut *hasil* atau *wasee* dari

---

[117] Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra. Atjeh, the'Netherlands, and Britain, 1858–1898*, Kuala Lumpur, 1969, hlm. 1–5

[118] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, 1977/1978, hlm. 74

para penguasa baru itu. Pada abad ke-19 ini, walaupun perdagangan Aceh semakin meningkat, hubungan Sultan dengan para penguasa baru yang muncul sebagai akibat berkembangnya perdagangan itu justru menjadi lemah.

Pada tahun 1802 yang bertakhta adalah Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah yang memerintah sampai tahun 1823. Tugasnya yang terutama adalah mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan pemerintah pusat. Ia menyadari bahwa daerah-daerah yang makin besar kekuasaannya dan semakin luas otonominya akan sangat membahayakan kedudukan pemerintah pusat. Lebih-lebih jika kekuasaan asing, yaitu Inggris dan Belanda, berhasil campur tangan. Sebelum tugasnya selesai, ia sudah meninggal pada tahun 1823. Penggantinya ialah Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah (1823–1838). Seharusnya yang menggantikan adalah putra dari permaisurinya, yaitu Tuanku Ibrahim. Akan tetapi, para panglima Sagi telah menentukan bahwa Tuanku Ibrahim kehilangan haknya. Untuk mencegah agar Tuanku Ibrahim tidak memberontak, Sultan Muhammad Daud mengangkatnya menjadi penasihat.

Ada suatu peristiwa penting yang terjadi di awal pemerintahan Sultan Muhammad Daud, yaitu ditandatanganinya "Traktat London" pada tanggal 17 Maret 1824 antara Inggris dan Belanda. Pokok persetujuan ini adalah pembagian daerah kekuasaan Inggris dan Belanda di Indonesia dan Malaya. Walaupun tidak tercantum dalam naskah persetujuan itu, dalam nota dari Belanda maupun dari Inggris jelas terungkap keduanya akan menghormati kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, Aceh sendiri tidak diikutsertakan dalam perundingan itu. Dari sini dapat diduga bahwa masalah Aceh akan dipertahankan di antara kedua kekuasaan asing itu.

Kenyataan membenarkan dugaan ini. Pada tahun 1871 pemerintah Hindia Belanda dan Inggris mengadakan persetujuan baru yang disebut "Traktat Sumatra". Di antara isinya yang penting, yang menyangkut kerajaan Aceh, adalah kebebasan yang diberikan kepada orang Belanda oleh Inggris untuk bertindak di Pulau Sumatra. Dengan demikian, terbukalah jalan bagi orang Belanda untuk melaksanakan cita-citanya menguasai seluruh Pulau Sumatra termasuk Kesultanan Aceh. Sejarah kemudian mencatat perang kolonial sebagai perang terlama yang pernah terjadi di Indonesia.

2. Raja dan Bangsawan

Susunan masyarakat Aceh tidak jauh berbeda dengan susunan masyarakat tradisional yang lain di Indonesia. Pada pokoknya terdapat tiga

kelompok besar dalam masyarakat yang bertingkat strukturnya ini, yaitu tingkatan yang paling atas diduduki oleh raja yang bergelar sultan dengan keluarganya dan gelar mereka adalah *Tuanku*. Di bawahnya terdapat kaum bangsawan dan para pejabat tinggi pemerintah, baik di pusat kerajaan yaitu ibu kota maupun di daerah-daerah. Pada umumnya gelar yang dipakai adalah *Teuku*, kecuali para bangsawan di daerah-daerah di pantai timur yang bergelar *Tengku* karena mendapat pengaruh dari Melayu. Tingkatan yang paling bawah, yang jumlahnya paling besar, adalah rakyat umum yang terbagi dalam berbagai tingkatan, kelompok, atau golongan.

Sultan yang berada di tingkat teratas menduduki pusat-pusat dalam pemerintahan. Ia dibantu oleh sejumlah besar pejabat birokratis, baik sipil maupun keagamaan. Mereka mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan, misalnya jabatan sebagai perdana menteri, *wasir* (menteri), *qadhi* (jaksa), *laksamana*, dan *syahbandar*. Para bangsawan di daerah juga mempunyai kedudukan yang tinggi di daerah kekuasaannya masing-masing. Bahkan, sering terjadi bahwa seorang bangsawan daerah mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada raja. Misalnya, Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim berhak menentukan siapa raja yang akan bertakhta.

Menurut hukum, raja berkewajiban melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang para pejabat kerajaan. Ia juga mempunyai kekuasaan untuk mengangkat orang-orang yang ahli dalam lapangan masing-masing untuk mengurus kerajaan. Para alim ulama, baik yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti Dayah Teungku Chiek,[119] yang banyak didirikan di kesultanan Aceh maupun yang menambah pengetahuannya di Tanah Suci, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Hal ini dapatlah dimengerti jika diingat bahwa dasar utama masyarakat Aceh adalah agama Islam.

Sultan dan keluarganya hidup di istana, yang terletak di ibu kota Banda Aceh Darussalam. Istana itu dikelilingi oleh lapangan yang berbentuk bulat telur dan diperkuat oleh empat lapis tembok pertahanan di sebelah luarnya. Bahkan, menurut laporan seorang pengamat Prancis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), sebelum sampai ke bangunan istana yang sebenarnya harus melalui empat buah pintu gerbang dan yang terakhir dinding batunya sengaja diperkuat sampai 50 langkah tebalnya.[120] Di keempat penjuru dinding pertahanan didirikan empat buah menara yang tinggi sebagai tempat pengintai menjaga mungkinan datangnya bahaya.

---

[119] Lembaga Pendidikan agama tinggi yang mendidik para calon alim ulama

[120] A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta, 1975

Istana sultan Aceh sebagaimana layaknya istana raja-raja Indonesia pada masa itu, juga dihias dengan indah. Taman-taman dibangun di sekitar dan di dalam kompleks istana. Salah satu contoh seperti yang digambarkan oleh Nuruddin ar Raniri, salah orang pujangga Aceh yang hidup pada masa Sultan Iskandar Thani (1637–1641), dalam karyanya *Bustanus Selatin*. Diceritakan bahwa sultan membuat suatu taman yang indah yang diberi nama "Taman Ghairah" di mana mengalir sungai yang jernih dan penuh ditumbuhi tanam-tanaman dan bunga-bungaan. Di dalamnya juga dibangun bermacam-macam balai seperti balai keemasan dan balai gading.[121] Terdapat juga sebuah bangunan yang disebut *Gegunongan Menara Permata* tempat keluarga raja bersuka ria.[122] Lebih lanjut Nuruddin ar-Raniri menceritakan tentang keindahan istana yang dihias emas, permata, dan batu-batu berharga lainnya. Payung-payung kebesaran yang bertingkat tujuh, bertingkat lima, atau bertingkat tiga merupakan kelengkapan kebesaran raja.[123]

Gambaran yang diberikan dalam *Bustanus Salatin* tentang kehidupan istana dan keindahan bangunannya rupanya masih dapat dipakai untuk menggambarkan keadaan istana dan kehidupan raja dan kaum bangsawan abad ke-18 dan ke-19. Agaknya tidak banyak perubahan yang terjadi. Buktinya sisa-sisa Gunongan dan pintu gerbang istana sampai masa kini masih dapat dilihat di Banda Aceh.

Kesultanan Aceh diperintah oleh raja secara turun-temurun. Penggantian sultan biasanya dilakukan jika sultan yang memerintah sudah meninggal dunia. Jika sultan yang sedang memerintah sebelum meninggal sudah menentukan siapa yang akan menggantikannya, tidak akan timbul kesulitan walaupun yang ditunjuk sebagai penggantinya itu mungkin bukan anak kandungnya.[124] Akan tetapi, jika belum ada yang ditentukan siapa yang akan menggantikannya, biasanya Panglima Sagi XXII Mukim yang menjadi wakil raja. Ia juga bertugas menerima hasil yang didapat oleh Aceh

---

[121] Dr. T. Iskandar, Nuru'd-din ar-Raniri, *Bustanus Selatin*, Kuala Lumpur, 1966, hlm. 25

[122] Tentang "Gunongan" sudah dibahas oleh Prof. Dr. R. Hoesein Djajadiningrat yang berjudul "De stichting van het "Gunongan" Geheeten Monument Te Koetaraja", dalam *TBG*, 57, 1916, hlm. 561–575

[123] Dr. T. Iskandar, *ibid*., hlm. 37–38

[124] Sebuah contoh terdapat dalam kitab *Bustanus Selatin* yang menceritakan bahwa Iskandar Muda ketika menyerbu Pahang di Semenanjung Melayu telah tertarik pada putra mahkota Pahang yang waktu itu baru berumur 7 tahun. Kemudian anak itu dibawa ke Aceh, dan dari tanda-tanda yang dilihatnya Sultan Iskandar Muda merasa yakin bahwa putra mahkota Pahang tersebut akan menjadi raja besar. Itulah sebabnya, ketika putra mahkota Pahang yang bergelar Hussain Syah berusia 10 tahun dikawinkan dengan putrinya yang bernama Tuan Putri Seri Alam Permaisuri

dan daerah takluknya. Bila sudah ada yang diangkat menjadi sultan, perbendaharaan yang dikumpulkan itu pun dengan sendirinya dikembalikan kepada sultan baru yang berhak atasnya.

Pada dasarnya pengganti raja yang meninggal adalah putra laki-laki raja yang lahir dari istri pertama. Umumnya yang menggantikan adalah putra yang sulung. Namun, apabila hal itu tidak mungkin, dapat diangkat putra laki-laki yang lain. Jika tidak ada seorang pun pengganti laki-laki yang dianggap pantas, seorang putri atau kemenakan adakalanya ditunjuk sebagai pengganti raja. Apabila putra yang naik takhta itu masih di bawah umur dan dianggap belum mampu memerintah sendiri, dapat dibentuk dewan perwalian yang akan memegang pemerintahan sementara sampai saat anak tersebut menjadi dewasa untuk memerintah sendiri. Biasanya ibu dan pamannya yang diangkat menjadi wali. Misalnya, pada waktu Sultan Ali Ri'a'at Syah meninggal pada tahun 1607, kemenakannya yang bernama Maharaja Darma Wangsa Tun Pangkat diangkat sebagai penggantinya dengan nama Sultan Iskandar Muda.[125] Sultan Iskandar Muda yang meninggal pada tahun 1636 digantikan oleh putra angkatnya, yaitu yang kemudian bergelar Sultan Iskandar Thani Alauddin Mughayat Syah.[126] Sultan Iskandar Thani adalah putra sultan Pahang yang dibawa ke Aceh ketika kerajaan Pahang ditaklukkan oleh Aceh pada tahun 1618.[127]

Sultan Thani meninggal pada tahun 1641, dan yang menggantikan beliau sebagai raja adalah istrinya sendiri yang bernama Putri Sri Alam Permaisuri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda. Setelah menjadi raja, putri ini bergelar Sultan Tajul' Alam Safiatuddin Syah. Ketika Sultan Tajul' Alam meninggal pada tahun 1675 ia diganti oleh seorang perempuan lain yang tidak jelas asalnya. Raja baru ini bernama Nurul' Alam Nakiatuddin Syah.[128] Pada tahun 1678 ia digantikan oleh putrinya yang bernama Putri Raja Setia dan bergelar Sultan Inayat Zakiatuddin Syah (1678–1688) dan kemudian digantikan oleh seorang putri lagi dan bergelar Sultan Kamalat Syah hingga pada waktu itu kesultanan Aceh diperintah oleh empat orang sultan perempuan secara berturut-turut. Pada tahun 1795 Sultan Alauddin Muhammad Syah meninggal ia digantikan oleh putranya Husein yang masih kecil. Sebelum ia menjadi dewasa, pemerintahan kerajaan dipegang oleh ibu dan paman-pamannya.[129]

---

[125] Hoesein Djajadiningrat, "Critische overzicht van der Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh", *BKI*, LXV, 1911, hlm. 175

[126] *Ibid.*, hlm. 183

[127] Lihat catatan No. 99 di atas

[128] Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 189

[129] *Ibid.*, hlm. 211

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem penggantian raja di kesultanan Aceh tidaklah terlampau ketat. Pengganti raja tidaklah harus selalu putra laki-laki, tetapi dapat juga perempuan, kemenakan, ataupun istri dari raja yang meninggal.

Dalam pengangkatan raja baru, peran para panglima sagi sangat besar, terutama Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim. Sebagai contoh, pada waktu Sultan Jauharul Alam meninggal pada tahun 1823, menurut surat wasiat yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah putranya yang baru kira-kira berumur tujuh tahun. Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim tidak menyetujui dan tidak mau mengakui raja baru yang ditunjuk sesuai dengan surat wasiat itu. Kemudian dipilihnya putra yang lain dari Sultan yang sudah almarhum bernama Tuanku Darid.[130] Dari fakta ini tampak jelas bahwa kadang-kadang seorang bangsawan mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada raja atau kalangan istana. Pelantikan raja baru biasanya disaksikan oleh para ulama istana dan ulama kerajaan terkemuka, para panglima sagi, dan para pembesar kerajaan lainnya. Nyatalah bahwa hubungan raja dengan kaum bangsawan, baik yang berada dekat dengan ibu kota maupun yang di wilayah-wilayah di luar ibu kota, cukup kuat.

Secara garis besar terdapat dua macam kaum bangsawan di Aceh. *Pertama*, adalah mereka yang merupakan keturunan sultan-sultan Aceh dan bergelar *tuanku*, dan *kedua*, adalah mereka yang berasal dari keturunan *uleebalang* dan memakai gelar *teuku*.[131] Pada umumnya *uleebalang* (hulubalang) menguasai sebuah *nangroe* (negeri) yaitu gabungan beberapa mukim. Asalnya mungkin dari pembantu raja yang terkemuka yang karena jasanya kemudian diberi hadiah sejumlah mukim untuk penghidupan. Sistem ini terutama mulai berkembang di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda.[132]

Selain sebagai penguasa *nangroe*, *uleebalang* juga bertugas mempersiapkan tenaga tempur jika terjadi peperangan. Ia juga melaksanakan segala perintah Sultan, menyediakan perbekalan perang jika diperlukan oleh pemerintah pusat dan memberi upeti kepada Sultan. Mereka mempunyai kekuasaan yang besar di daerahnya masing-masing dan sampai batas-batas tertentu mereka itu adalah pemimpin yang merdeka.[133]

Para uleebalang menerima kekuasaannya langsung dari Sultan Aceh. Mereka memerintah secara turun-temurun dan setiap pengggantian

---

[130] *Loc. cit.*

[131] Zakaria Ahmad, *Sekitar kerajaan Aceh*, 1520–1675, Medan, 1972, hlm. 95

[132] Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 2

[133] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 78

pimpinan harus disahkan oleh Sultan. Pengesahan Sultan itu tercantum dalam suatu surat pengangkatan yang dinamakan *sorkata* (*sarakata*) yang dibubuhi cap stempel kerajaan Aceh yang disebut *Cap Sikureung* (cap sembilan) dan sering juga disebut *cap halilintar*.[134] Cap Sikureung ini dipakai oleh sultan-sultan Aceh sejak Sultan Iskandar Muda sampai Sultan Aceh yang terakhir. Dalam stempel ini dicantumkan nama-nama sultan yang pernah memerintah di kesultanan Aceh sebanyak sembilan orang termasuk sultan yang sedang memerintah yang ditempatkan di tengah-tengah. Nama-nama sultan yang delapan lainnya ditempatkan di sekelilingnya. Pemilihan nama-nama sultan untuk ditempatkan dalam cap itu didasarkan pada kemasyhurannya atau karena hendak dijadikan kenang-kenangan.

Kekuasaan *uleebalang* dalam memerintah negeri seperti raja kecil yang otokratis. Para *uleebalang*, atau di beberapa negeri disebut *keujruen*, memimpin daerahnya dibantu oleh *banta* atau *bangta* yang masih bertalian kerabat. Mereka juga adalah hakim untuk masyarakatnya yang dibantu oleh seseorang yang memahami masalah hukum agama, yakni *khadi* atau *kali*. Panglima negeri disebut *rakan*, dengan gelar *pang*, dan yang berjasa besar dalam peperangan disebut *panglima prang*. Di Aceh Besar dan Pidi, wilayah uleebalang terdiri atas mukim yang mengoordinasikan sejumlah *gampong*. Di Aceh Besar negeri-negeri membentuk suatu federasi yang dipimpin oleh *panglima sagi*. Tugas uleebalang adalah:[135]

1. menjaga ketertiban umum;
2. memelihara agama Islam dengan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari dan menolak bid'ah;
3. mengawal agama Islam dan isi negeri dari ancaman musuh, termasuk dari para pencuri dan penyamun;
4. membangun negeri seperti pembuatan jalan;
5. menjaga agar pemindahan hak atas segala harta kaum muslimin tidak lain daripada atas dasar hukum sara;
6. menegakkan hukum adat dan sara masing-masing menurut perlunya;
7. memilih pegawai-pegawai termasuk para panglima, yang jujur dan cakap.

Di samping para uleebalang, para *panglima sagi* pun tidak kecil kekuasaannya. Seperti telah disebutkan di atas, Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim adalah yang paling terkemuka. Ia sebenarnya adalah putra

[134] Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hlm. 89

[135] Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah Perang Aceh 1873–1912*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 41

Sultan Iskandar Muda dari istri yang bukan permaisuri dan bernama Teuku Itam. Ia mengambil gelar Polem yang berarti "saudara tua" karena ia lebih tua dari Putri Tujul Alam, permaisuri Sultan Iskandar Thani. Mula-mula ia menjadi Imam di Gle Yeueng di hulu Sungai Aceh. Kemudian putranya yang terkenal sebagai pahlawan dan menggantikan kedudukannya diangkat menjadi pemimpin mukim-mukim yang ada di wilayah itu yang berjumlah 22 buah. Untuk membela kepentingannya, mukim-mukim itu menyatukan diri dalam suatu federasi dan terbentuklah XXII Mukim. Sebagai imbangan dan reaksi pembentukan Sagi XXII Mukim ini, di sisi barat dan timur Sungai Aceh juga terbentuk federasi dari mukim-mukim yang ada di situ, yaitu Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim karena masing-masing jumlahnya 25 Mukim dan 26 Mukim.[136] Ketiga buah federasi mukim ini hanya dibentuk di wilayah Aceh Besar.

Para panglima sagi yang juga disebut uleebalang pada mulanya dipilih untuk mempertahankan saginya. Akan tetapi, lama-kelamaan kekuasaannya menjadi turun-temurun dan menyatakan diri sebagai pengawal kesultanan. Demikian pula halnya dengan uleebalang, kekuasaannya pun semakin besar. Betapa besar kekuasaan para uleebalang itu sampai timbul pepatah pada abad ke-19 bahwa 12 uleebalang dari ketiga sagi itu mempunyai kekuasaan untuk menurunkan dan mengangkat sultan. Walaupun demikian, mereka itu masih tetap menyatakan hormatnya kepada sultan.[137]

Di antara panglima-panglima sagi, Panglima Sagi XXII Mukim adalah yang terkemuka. Ia berkedudukan juga sebagai patih (*mantri yang terutama besar*) yang memangku pemerintahan sebelum seorang raja baru dilantik, dan sultan yang lama sudah meninggal. Para pejabat tinggi kerajaan sering diberi sebutan orang kaya atau orang besar.[138]

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa sultan sebagai penguasa pusat dihormati oleh para panglima sagi. Namun, dalam menjalankan pemerintahan daerah, para panglima sagi mempunyai kekuasaan yang besar. Demikian pula para hulubalang yang mengepalai distrik-distrik di dalam sagi tidak kecil pengaruhnya di wilayah mereka masing-masing. Kecuali rasa hormat mereka terhadap sultan, hubungan antara uleebalang daerah dengan sultan di pusat diwujudkan dengan pengiriman sebagian hasil bumi dan hasil pajak sebagai upeti ke istana.

---

[136] Anthony Reid, *Pre-Colonial State Systems in Southeast Asia*, hlm. 53

[137] Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 4

[138] L.W.C. Van den Berg, "De Mohammedaansche Vorsten in Nederlandsch Indie", *BKI*, 8, 1901, hlm. 48–49

Sebenarnya sumber penghasilan yang utama bagi kerajaan adalah hasil perniagaan yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kesultanan Aceh dan di daerah-daerah taklukannya. Barang dagangan yang terpenting yang dihasilkan Aceh pada waktu itu ialah lada, pinang, dan kapur barus. Barang dagangan itu banyak dibeli oleh para pedagang asing seperti Cina, Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika. Semua kegiatan perdagangan di kesultanan Aceh dipusatkan di ibu kota sehingga kota Banda Aceh Darussalam menjadi sangat ramai. Perdagangan lada diawasi oleh Sultan dengan dibantu oleh pejabat-pejabat negara yang bertugas dalam bidang masing-masing dan harus mendapat izin dari Sultan. Aktivitas perdagangan di daerah-daerah diawasi oleh pejabat tinggi pusat, yaitu syahbandar yang bertindak sebagai wakil Sultan.

Jika kekuasaan Sultan mulai susut, daerah-daerah biasanya mempunyai kebebasan yang semakin besar. Para uleebalang yang menguasai daerah-daerah itu mempunyai keleluasaan berdagang dan memungut cukai dari barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wilayah kekuasaannya. Tambahan lagi karena paksaan untuk berniaga di pusat tidak kuat, para pedagang asing pun semakin banyak yang langsung mencari barang dagangan atau menjual barang-barangnya di pelabuhan-pelabuhan, baik di pantai barat maupun di pantai timur Aceh. Oleh karena itu, Sultan hanya menerima apa yang disebut *wasee*, yaitu pajak daerah pada pemerintah pusat.

Selain itu, menurut sebuah buku undang-undang yang berasal dari abad ke-17 yaitu *Kitab Adat Meukuta Alam*, Sultan mendapat hadiah dari orang-orang asing yang berkunjung ke Aceh. Sebelum mulai berdagang mereka menghadap Sultan untuk mendapat izin berniaga dan biasanya mereka membawa hadiah yang berharga. Selain itu, kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Aceh juga dikenakan biaya dan hasilnya masuk ke kas pemerintah pusat.[139]

Sultan Aceh juga mendapat penghasilan dari beberapa hak istimewa yang dipunyainya. Menurut kitab *Adat Meukuta Alam*, jika ada orang asing yang meninggal, segala harta yang ditinggalkannya akan menjadi milik Sultan. Demikian juga jika ada warga kesultanan yang meninggal tanpa mempunyai ahli waris, harta "hamba"nya itu pun akan jatuh ke tangannya. Lebih lanjut kitab itu menyatakan, jika ada kapal yang kandas di pantai kerajaan, Sultan berhak menyita segala-galanya.[140] Dari apa yang telah dibicarakan di atas tampak jelas betapa Sultan Aceh menjadi kaya raya

---

[139] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 85

[140] *Ibid.*, hlm. 86

dan mampu memperluas kekuasaannya jika dia merupakan seorang raja yang kuat. Jika dia lemah, kekuasaan beralih ke tangan para panglima sagi, sedangkan para uleebalang dan sultan hanya sekadar menjadi lambang pemersatu.

3. Birokrasi

Dalam garis besarnya wilayah negara Aceh terbagi atas tiga wilayah, yaitu *daerah inti*, *daerah pokok*, dan *daerah takluk*.[141] *Daerah inti* adalah wilayah yang sudah dikuasai oleh Aceh sejak awal berdirinya. Wilayah tersebut sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Kadang-kadang dinamakan juga *Aceh Lhee Sagoe* (Aceh Segitiga) karena bentuknya yang memang mirip segitiga dengan dasar di pantai laut. Di daerah tersebut mengalir Sungai Aceh (*Krueng Aceh*) yang menghubungkan ibu kota Banda Aceh Darussalam dengan pelabuhannya yang agak jauh di muara.

Daerah pokok ialah wilayah yang dikuasai kemudian setelah kesultanan Aceh berdiri dan digabungkan ke bawah kedaulatan Sultan Aceh. Daerah-daerah pokok itu meliputi Pidie, Samudra, Pase, Perlak, Gayo, Alas, Barat, Singkel, Teureumon, dan Barus. *Daerah takluk* ialah negara-negara yang menyatakan diri takluk kepada Sultan Aceh atau yang dianggap oleh Aceh sebagai daerah takluknya.

Negara-negara itu terletak di sebelah barat maupun timur Pulau Sumatra, bahkan juga di Semenanjung Malaya, di antaranya Aru, Deli, Siak Asahan, Tanjung Balai, Panai, Rokan, Kampar, Inderagiri, Palembang, Jambi, Johor, Kedah, Patani, Pahang, Perak, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, Indrapura, dan Nias. Daerah yang dikuasai atau ditaklukkan oleh kesultanan Aceh pada umumnya adalah kota-kota pelabuhan dan yang menghasilkan barang-barang yang penting bagi perdagangan. Misalnya, daerah Pidie yang terkenal sebagai lumbung kerajaan Aceh karena tanahnya yang subur sesuai untuk persawahan. Lain lagi dengan Pasaman dan Tiku yang penting dari segi ekonomi karena hasil ladanya, sedang Barus dan Singkil banyak menghasilkan kapur barus. Kedua macam hasil bumi itu, lada dan kapur barus, termasuk barang dagangan yang banyak dicari oleh para pedagang asing. Dari fakta ini dapat ditarik kesimpulan bahwa motif yang mendorong Sultan Aceh mengadakan ekspansi adalah terutama faktor ekonomi. Buktinya, jika suatu daerah telah ditundukkannya, Sultan hanya akan menempatkan wakilnya yang biasanya disebut syahbandar, untuk mengawasi perdagangan saja. Jalannya pemerintahan di tempat-tempat

---

[141] Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hlm. 83

tersebut menurut apa adanya dan penguasa-penguasa wilayah itu praktis merdeka tanpa campur tangan Sultan. Mereka masing-masing mempunyai corak pemerintahan sendiri-sendiri. Yang akan dibicarakan di sini terutama adalah sistem pemerintahan di daerah inti, yaitu Aceh Besar, yang menjadi pusat kerajaan.

Bentuk kesatuan wilayah yang terkecil di kesultanan Aceh adalah apa yang disebut *gampong* (kampung).[142] Agaknya struktur organisasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita temukan pada masa sekarang. Sebuah gampong terdiri dari berapa rumah yang didiami oleh sejumlah keluarga dan dikepalai oleh seorang yang disebut *Keucik*. Biasanya dalam mengatur gampongnya, Keucik dibantu oleh seorang atau lebih pembantu yang disebut *waki* (wakil). Sedang jabatan khusus sekretaris desa tidak ada.[143] Gampong-gampong yang letaknya dekat istana raja diwajibkan untuk menyediakan tenaga guna secara bergilir menjaga istana dan membersihkannya. Selain itu, juga diwajibkan memberikan sumbangan kepada istana untuk menyambut tamu pembesar. Di daerah perkebunan lada dan daerah-daerah dekat hutan bertindak sebagai kepalanya adalah para *peutuha*. Di tiap gampong biasanya terdapat sebuah atau lebih *meunasah* yang selain sebagai tempat beribadat, juga digunakan sebagai tempat pertemuan dan permufakatan warga gampong, tempat anak-anak belajar ilmu keagamaan, seperti mengaji atau membaca Alquran dan juga sebagai tempat tidur anak-anak muda di waktu malam.[144] Tugas memelihara *meunasah* dijalankan oleh *Teungku Meunasah* yang juga merangkap sebagai pembantu Keucik di bidang keagamaan, seperti nikah, talak, rujuk, zakat, dan kematian. Ada juga yang menyebut *Tengku Mandarsah* berdasarkan adanya tempat pengajaran agama Islam (madrasah) di wilayah itu.[145] Agaknya lembaga meunasah ini baru muncul setelah agama Islam masuk dan berkembang di Aceh.[146] Jadi, dapat dikatakan asalnya lebih muda daripada lembaga gampong. Selain Teungku Meunasah dalam mengatur kehidupan gampong, Keucik juga dibantu oleh tokoh-tokoh di kampung itu atau orang-orang tua yang dianggap arif bijaksana dan disebut dalam bahasa Aceh *Ureungtuha*. Dalam memutuskan sesuatu keucik juga mengadakan mufakat dengan penduduk laki-laki dewasa dalam gampong. Di samping Teungku Meunasah di dalam gampong juga terdapat ulama-

---

[142] Sumber-sumber yang dipakai di sini terutama adalah buku Zakaria Ahmad, *ibid*., Bab V

[143] Anonim, "Meedelingan betreffende Atjehsch onder horigheden", *BKI*, 67, 1913, hlm. 412–413

[144] Zakaria Ahmad, *op. cit*., hlm. 86

[145] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 53

[146] E.B. Kielstra, *Beschriejving van den Atjeh Oorlog, I, 's-Gravenhage*, 1885 hlm. 6–7; C. van Vollenhoven, *Net Adatrecht van Nederlandsch Indie*, I, Leiden, 1931, hlm. 151; C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, I, Leiden, hlm. 63

ulama dan *leube* yang ahli dalam hukum Islam, demikian juga pejabat-pejabat keagamaan lainnya seperti *kadi*, *imeum masjid*, *hatib*, dan *bileue*. Di beberapa daerah kesatuan beberapa gampong dikepalai oleh seorang *datu*. Misalnya, Datu Basa yang memerintah daerah di tepi kanan Sungai Samadua meliputi beberapa gampong yaitu Jeuret, Ladang, Ladang Kaseh Putih, Pan, dan Balai. Adapun yang memerintah daerah di tepi kiri Sungai Sama Dua adalah Datu Mauda Nua'Radin. Di samping itu, beberapa gampong di dekatnya juga termasuk dalam kekuasaannya, adalah gampong-gampong Sus Ulu, Paja, Alue Sialang Ulu, Ujung Gampang, Tangga Pantan Laut, Dalam, Gunung Ketek, dan Kuta Baru.

Beberapa buah gampong yang berdekatan letaknya dan jumlah warga laki-lakinya ada 40 orang atau lebih, wajib bersembahyang Jumat bersama di masjid. Seperti yang diajarkan oleh Mazhab Syafi'i, gampong-gampong itu kemudian membentuk kesatuan yang disebut *mukim* (dari bahasa Arab *muqim* yang berarti tempat tinggal). Dari sini tampak bahwa kesatuan wilayah mukim bukanlah suatu lembaga yang asli, tetapi terbentuk setelah agama Islam berkembang. Kepala mukim disebut *Imeum Mukim* yang biasanya seorang ulama dan tugas utamanya adalah memimpin sembahyang Jumat. Namun, lama-kelamaan tugasnya juga mencakup soal-soal pemerintahan sehingga kedudukannya seolah-olah ada di atas *keucik-keucik* dalam mukimnya. Urusan masjid dan keagamaan kemudian diserahkan kepada para petugas khusus. Dengan perubahan fungsi ini, kaum cerdik pandai juga menjadi *imeum* dan kedudukannya jadi turun-temurun. Kesatuan wilayah mukim ini hanya dikenal di Aceh Besar (tidak di Aceh Utara ataupun di Aceh Timur).[147]

Wilayah inti kesultanan Aceh (Aceh Raya) dibagi dalam tiga wilayah *sagi* (*sagoe*) dan wilayah pusat kerajaan. Daerah pusat kerajaan ini meliputi:

a. istana Sultan, Peukan Aceh dan gampong-gampong Merdowati, Jawa, Pandai, dan Kedah;
b. mukim-mukim Longbatan, Pager Ayer, dan Lamsayun;
c. Distrik III Mukim dari Sagi XXVI Mukim;
d. Masjid Raya dan sekitarnya.

Dari keempat wilayah tersebut, hanya Masjid Raya dan sekitarnya yang tidak diperintah langsung oleh Sultan, tetapi pemerintahannya diserahkan kepada dua orang pejabat keagamaan, yaitu hakim tertinggi kerajaan Teuku

---

[147] Perincian mengenai nama-nama *mukim* di wilayah kesultanan Aceh, antara lain diperiksa "Mededeelingen betreffende Atjehche onderhorigheden," *BKI*, XV, 's-Gravenhage, 1905, hlm. 53 dst.

Kadli Malik'ul Adil dan Panglima Masjid Raya.[148] Karena wilayah-wilayah tersebut berada dalam pusat kerajaan, kegiatan wilayah banyak dihubungkan dengan keperluan istana. Misalnya, gampong-gampong di wilayah tersebut diberi beban untuk memelihara istana. Di samping itu, masih terdapat juga tanah-tanah *enclave* milik raja di daerah-daerah. Pengelolaan tanah-tanah *enclave* itu diserahkan pada *panglulee peurarue* (*beunarue*, bendahara).

Wilayah sagi juga terbagi atas beberapa daerah. Tiap sagi terdiri dari sejumlah mukim. Berdasarkan jumlah mukim yang disatukan menjadi wilayah sagi, ketiga sagi di kerajaan Aceh disebut Sagi XXV Mukim yang meliputi daerah Aceh bagian barat, Sagi II Mukim berada di daerah bagian tengah sebelah selatan, dan Sagi XXVI Mukim terletak di daerah bagian timur. Wilayah pusat kerajaan berada di daerah bagian tengah sebelah utara sampai ke pantai utara. Tiap-tiap sagi dibagi dalam kesatuan-kesatuan wilayah lebih kecil setingkat distrik. Dalam bahasa Aceh wilayah distrik ini disebut *nanggroe* (negeri) dan tiap *nanggroe* meliputi beberapa mukim. Sebagai contoh, di wilayah Sagi XXV terdapat distrik IV Mukim, distrik VI Mukim, dan distrik IX Mukim.

Tiap-tiap sagi dikepalai oleh *Panglima Sagi* atau juga sering disebut *Hulubalang Besar*, sedang tiap distrik (nanggroe) dikepalai oleh seseorang hulubalang (uleebalang). Pada hakikatnya, para hulubalang di wilayah sagi mempunyai kekuasaan yang otonom di wilayah kekuasaannya. Raja atau sultan lebih berfungsi sebagai lambang pemersatu yang diakui oleh para hulubalang. Kedudukan para hulubalang ini tidak tergantung pada sultan karena jabatan atau kedudukan mereka itu turun-temurun. Namun, hal seperti itu tidak berlaku bagi hulubalang di wilayah pusat yang berada langsung di bawah kekuasaan sultan. Hulubalang-hulubalang ini diangkat oleh raja dengan surat tetapan (*serkata*) yang dibubuhi materi kerajaan (cap halilintar)[149] seperti yang disinggung di atas.

Bentuk kesatuan wilayah sagi (*sagoe*) ini sebenarnya baru muncul pada abad ke-17. Sebelum waktu itu belum dikenal. Kata "sagi" sendiri artinya sudut, sebab daerah Aceh Besar digambarkan bentuknya bagai sebuah segitiga dengan dasarnya di pantai. Menurut sejarahnya pada tahun 1675 di bawah Sultan Nurul Alam Nakiatuddin (1675–1677) yang menggantikan Sultan Tajul Alam di daerah pedalaman muncul kekuasaan baru yang mengubah susunan kesultanan di Aceh Besar (pusat kerajaan). Seperti Tajul Alam menggabungkan 22 mukim yang terletak di daerah sekitar hulu sungai

---

[148] E.B. Kielstra, *op. cit.*, hlm. 7

[149] L.W.C. van den Berg "De Mohammedaansche Vorsten in Nederlandch Indie", *BKI*, LIII, 1901, hlm. 18

dalam satu kesatuan yang sifatnya federatif. Tindakannya ini kemudian ditiru oleh mukim-mukim lain di wilayah sebelah barat dan sebelah timur sehingga terbentuklah dua sagi lainnya.[150] Tujuan sebenarnya pembentukan sagi ini adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing.

Di daerah pantai timur terdapat juga wilayah yang diperintah oleh empat orang kepala (*tuka peuet*). Tiap-tiap kepala tersebut mempunyai wilayah yurisdiksi sendiri. Mereka juga sering disebut hulubalang kecil (*uleebalang cut*). Gelar yang dipakai oleh kepala-kepala daerah itu berbeda-beda, seperti *kenjruen, meuntroe, ci'pakeh,* atau *ken*. Di Lo' Seumawe kepala tersebut diberi gelar *mbah raja,* sedang di Teunom bergelar *imeum*. Ada juga wilayah yang diperintah oleh lima orang hulubalang (*uleebalang limong*) dan tiap-tiap kepala mempunyai batas wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Di daerah pantai barat kepala tersebut disebut *rigaih keuci,* sedang wilayah yang diperintahnya disebut *sagoe* (sagi).[151]

Di dalam pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang mangkubumi. Pada waktu Perang Aceh, jabatan mangkubumi dipegang oleh seorang Arab bernama Habib Abdurrahman. Di bawah mangkubumi terdapat empat orang pejabat tinggi yang disebut *mantri hari-hari*. Fungsi mantri hari-hari terutama adalah sebagai penasihat raja. Pangkat mantri hari-hari lebih rendah daripada para panglima sagi. Untuk mengurus soal keuangan istana, baik pemasukan maupun pengeluaran, raja menyerahkannya kepada syahbandar yang sebenarnya tugas pokoknya adalah mengurus soal bandar. Adakalanya syahbandar juga disertai tugas untuk mengurus usaha dagang milik sultan pribadi. Di samping itu, masih terdapat pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas di muara sungai, yaitu *kepala kreung* yang dibantu oleh *pawang kreung*. Tugas untuk memungut cukai barang-barang impor dan ekspor dijalankan oleh *panglima lasot*.[152] Di masa damai, adakalanya panglima perang juga ditugaskan sebagai penarik pajak. Pejabat yang berfungsi sebagai penulis dan mengurusi pembukuan dan surat-menyurat adalah *krani*.

Dalam abad ke-17 dan ke-18 terdapat jabatan-jabatan yang lebih lengkap di dalam istana sultan, antara lain dapat disebut *hulubalang rama setia* sebagai kepala pengawal pribadi raja, *raja udah na laila* sebagai kepala perbendaharaan istana dan perpajakan, dan *kerkun katib al-muluk* sebagai sekretaris kerajaan. Selain itu, di kerajaan juga masih terdapat pejabat-pejabat tinggi lain seperti *sri maharaja laila* sebagai kepala kepolisian, *laksamana*, *panglima*, *paduka sinara* sebagai kepala yang mengurus tanah

[150] A. Reid, *Pre-Colonial State System in Southeast Asia*, hlm. 53

[151] C. van Vollenhoven, *op. cit.*, hlm. 162

[152] *Ibid.*, hlm. 163

wakaf[153] di samping para pejabat tinggi kepala daerah, seperti panglima sagi dan hulubalang. Jabatan-jabatan tinggi tersebut dalam abad ke-19 tidak seluruhnya masih terdapat karena untuk jabatan yang bersifat turun-temurun belum tentu ada pengganti yang akan menjabatnya.

Sebenarnya jika kita membicarakan soal jalannya pemerintahan Kesultanan Aceh pada abad ke-18 dan ke-19 tidaklah dapat melepaskan diri dari pemerintahan yang sudah diletakkan dan dijalankan pada masa-masa sebelumnya. Sebagai sebuah kesultanan yang berlandaskan ajaran Islam, yang menjadi sumber hukum kerajaan Aceh adalah keempat dasar hukum Islam, yaitu Alquran, al Hadis, Ijma' ulama, dan Qiyas. Namun, sebagai suatu kerajaan yang sudah tumbuh sejak masa pra-Islam, adat dan kebiasaan yang sudah berkembang pada zaman itu tidak mungkin hilang begitu saja. Oleh karena itu, di samping keempat dasar hukum Islam tersebut di atas, hukum adat juga sering masih dijadikan sumber hukum.

Menurut ceritanya undang-undang dasar Kesultanan Aceh yang disebut *Kanun Al Asyi* disusun oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahari (1537–1568) yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda.[154] Kitab Kanun ini kemudian juga sering disebut *Adat Meukuta Alam* atau *Kanun Meukuta Alam*. Dalam Kanun ini ditetapkan beberapa lembaga pemerintahan di pusat dengan para pejabatnya dan tugasnya masing-masing. Lembaga-lembaga yang dimaksud itu sebagai berikut.

1. *Balai Rong Sari*, yaitu lembaga tertinggi negara tempat mufakat empat orang uleebalang dan tujuh orang alim ulama serta sultan.
2. *Balai Majelis Mahkamah Rakyat*, merupakan badan legislatif yang terutama bertugas membuat dan mengubah undang-undang. Anggota balai ini ada 73 orang yang mewakili 73 mukim, dan pimpinan dipegang oleh Qadli Malikul Adil atau Qadi raja yang adil.
3. *Balai Gading*, yaitu lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dipimpin oleh wasir Mu'azzam.
4. *Balai Furdhah*, yaitu lembaga yang mengatur dan mengurus soal ekonomi dan perniagaan dan dipimpin oleh Menteri Seri Paduka.
5. *Balai Laksamana* dengan pimpinan seorang wasir yang bergelar "Orangkaya Laksamana Amirul Harb". Tugasnya yang terutama adalah menjaga keamanan dan mempertahankan kesultanan. Balai ini juga mengurus para prajurit baik darat maupun laut.
6. *Balai Majlis Mahkamah*, yaitu lembaga yang mengurus soal kehakiman dan dipimpin oleh Seri Raja Panglima Wasir Mizan.

---

[153] L.W.C. van den Berg, *op. cit.*, hlm. 48

[154] A. Hasjmy, *op. cit.*, hlm. 70–74

7. *Balai Baitul Mal* yang dipimpin oleh seorang wasir yang bergelar "Orangkaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wasir Derham" yang mengurus segala soal keuangan dan soal anggaran biaya negara.

Di samping tujuh buah lembaga kenegaraan tinggi ini masih ada sejumlah menteri yang bertugas menangani masalah-masalah yang lebih khusus. Mereka itu adalah sebagai berikut.

1. *Seri Maharaja Mangkubumi*, yaitu menteri yang mengurus segala hulubalang dan pamong praja serta lain-lain yang berhubungan dengan soal pemerintahan.
2. *Wazir Badhul Muluk*, yaitu menteri yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan soal diplomatik seperti mengatur para utusan dari luar atau mengatur pengiriman utusan keluar.
3. *Wazir Kun Deraja*, yaitu menteri yang bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keraton dan merangkap menjadi syahbandar yaitu penguasa kota Banda Aceh Darussalam.
4. *Wazir Rama Setia*, yaitu menteri yang mengurus pajak pasar di seluruh kesultanan.
5. *Seri Maharaja Gurah*, yaitu menteri yang mengatur segala hal tentang kehutanan.

Menurut sebuah berita lain, di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, susunan pemerintah pusat terdiri atas 24 lembaga atau jabatan, yaitu:[155]

1. *Karekun Katibul Muluk* atau Sekretaris Raja,
2. *Rais Wazirat Addsulah* atau Perdana Menteri,
3. *Wasirat addaulah* atau Menteri Negara,
4. *Wasirat al Akham* atau Menteri Agung,
5. *Wazirat al Harbiyyah* atau Menteri Peperangan,
6. *Wazirat al Haqqamiyah* atau Menteri Kehakiman,
7. *Wazirat al Daraham* atau Menteri Keuangan,
8. *Wazirat al Mizan* atau Menteri Keadilan,
9. *Wazirat al Maarif* atau Menteri Pendidikan,
10. *Wazirat al Kharijiyah* atau Menteri Luar Negeri,
11. *Wazirat Addakhilyyah* atau Menteri Dalam Negeri,
12. *Wazirat at al Augaf* atau Menteri Urusan Waqaf,
13. *Wazirat al Azzizaah* atau Menteri Pertanian,

[155] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 79–82

14. *Wazirat al Maliyyah* atau Menteri Urusan Harta,
15. *Wazirat al Muwaskalat* atau Menteri Perhubungan,
16. *Wazirat al Asyighal* atau Menteri Kerja,
17. *Syakh al Islam Mufte* atau Empat Syakh Keabah,
18. *Qadhi Malikul adil* atau Kadhi Raja yang Adil,
19. *Wazir Tahakkum Muharzijlailan* atau Ketua Pengurus Korps Kesenian,
20. *Qadhi Mualdlan* atau Kadhi/Jaksa Agung,
21. *Imam Bandar Darul Makmur Darussalam*,
22. *Keucik Muluk* (keucik raja),
23. *Imam Muluk* atau Imam Raja, serta
24. *Panglima Khanduri Muluk* atau Ketua Penyelenggara Kenduri Raja.

Para pejabat dari ke 24 lembaga tersebut di atas diangkat oleh sultan.

Akan tetapi, tidak seluruh pejabat yang jumlahnya 24 orang itu mempunyai pengaruh yang sama besarnya terhadap sultan. Hanya empat yang benar-benar sangat dekat pada raja dan mempunyai pengaruh yang besar. Mereka itu ialah perdana menteri yang lazimnya bergelar *Orangkaya Maharaja Seri Maharaja*. Dia disegani baik oleh sultan, para menteri (wasir), para pejabat lain, serta para bangsawan. Kemudian *Kadhi Malikul Adil*, yaitu yang mengurusi soal pengadilan dan syariat agama Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah *Wasir al Harbiyyah* atau Menteri Peperangan dan yang lebih terkenal dengan sebutan Laksamana atau Orangkaya Laksamana. Tugasnya memimpin seluruh Angkatan Perang Aceh dan mempertahankan negara serta mengatur penyerbuan keluar. Terakhir yang sangat dekat dengan Sultan ialah *Kerukun Katibal Muluk* atau semacam sekretaris sultan. Ia bertugas mengurus dan menyelesaikan segala macam urusan surat-menyurat, seperti surat-surat dengan negeri asing, surat-surat dagang, ataupun surat pengangkatan untuk uleebalang.

Di bidang perekonomian, keadaan pada abad ke-18 dan ke-19 agak berbeda dari masa-masa sebelumnya. Kemunduran politik dan melemahnya kekuasaan pusat juga memengaruhi keadaan perekonomian seperti yang sudah disinggung di muka. Sultan sudah kehilangan monopoli perdagangan di negeri-negeri takluk yang jauh letaknya. Penghasilan pusat merosot dan terutama hanya tergantung dari perniagaan yang terbatas dan pajak serta upeti yang jumlahnya pun semakin menyusut. Namun, seperti dijelaskan oleh seorang sarjana,[156] aktivitas perekonomian di Aceh pada umumnya

---

[156] Lance Castles, "Ekonomi dan Keuangan di kerajaan Aceh Darussalam", prasaran dalam *Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*, 1978

berkembang. Daerah-daerah baru dibuka, baik untuk persawahan maupun untuk perkebunan lada sehingga ekspor lada pun meningkat. Hal ini terutama berkaitan dengan berkembangnya semangat wiraswasta dari para uleebalang.[157] Dari gambaran tersebut di atas tampaklah bahwa birokrasi Aceh pada abad ke-17 tidaklah sederhana. Pembagian tugas tampak terperinci dan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan pun kuat yaitu hukum Islam dan hukum adat. Keadaan ini mungkin agak berubah pada abad ke-18 dan ke-19 dengan mulai mundurnya dan merosotnya kekuasaan pemerintah pusat. Namun, sistem pemerintahan dan jalannya pemerintahan pada umumnya tidak banyak perubahan. Misalnya, ketika perang melawan orang Belanda meletus, para uleebalang, semua pejabat pemerintah, serta rakyat bersatu bersama Sultan yang pada kenyataannya sudah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Dengan demikian, rakyat Aceh mampu bertahan membela kemerdekaannya selama lebih dari 30 tahun.

4. Masyarakat

Masyarakat Aceh dalam abad ke-18 dan ke-19 masih merupakan suatu masyarakat yang bertingkat dan tersusun dalam golongan-golongan. Mungkin agak sukar untuk menyebutnya sebagai masyarakat berkelas seperti dalam pengertian pada masa sekarang. Namun, yang jelas ada golongan bangsawan, golongan kaum alim ulama, golongan rakyat umum, dan juga kelompok-kelompok lain seperti orang pendatang atau orang asing. Memang suatu kenyataan bahwa kaum bangsawan dan kaum alim ulama pada umumnya menduduki tingkatan atas. Akan tetapi, dari kalangan rakyat umum pun tidak kurang yang mendapat kehormatan dan berada di tingkat yang tinggi, misalnya orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, kaum saudagar, dan kaum cerdik pandai.[158]

Sebagai satu negara yang berlandaskan pada hukum Islam, kedudukan ulama atau orang yang ahli dalam soal-soal agama menjadi sangat penting. Seperti yang telah diuraikan di muka, seorang *Imeum Mukim* yang pada mulanya bertugas sebagai pemimpin umat bersembahyang Jumat, lama-kelamaan pun fungsinya berubah dan menjadi penguasa daerah dan harkatnya serta kekuasaannya pun semakin tinggi. Dalam hal ini pendidikan keagamaan mempunyai peran yang penting.

Pada mulanya anak-anak akan diajar bersembahyang dan pengetahuan dasar keagamaan oleh orang tuanya sendiri atau di rumah seorang alim

---

[157] *Ibid.*, hlm. 9–14

[158] Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hlm. 95

yang ada dikampungnya.[159] Yang disebut orang *alim* adalah orang yang dianggap sudah memahami dasar-dasar agama Islam dan mengetahui beberapa cabang ilmu dalam Islam. Biasanya pelajaran diadakan pada malam hari dan juga pagi hari. Selain itu, pelajaran itu diadakan di meunasah yang ada di tiap gampong, dan salah satu fungsinya adalah tempat pendidikan agama. Setelah seorang anak meningkat dewasa, pendidikannya dilanjutkan biasanya di masjid-masjid dan disebut *Rangkang*. Bagi mereka yang berminat lebih lanjut mendalami agama dan pengetahuan Islam dapat meneruskan pendidikannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, yaitu *Dayah Teungku Chiek*. Di sinilah calon alim ulama diajar soal-soal agama yang lebih dalam, seperti Tauhid dan Fiqih. Namun, agaknya lembaga pendidikan yang mengajarkan hal-hal atau pengetahuan yang praktis seperti pertanian dan pertukangan tidak ada. Pengetahuan semacam itu biasanya didapat melalui pendidikan yang informal, melalui latihan, serta pengalaman.[160] Yang menarik perhatian dalam masyarakat Aceh ini adalah terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk juga menikmati pendidikan. Sebagai contoh, salah seorang pejuang perempuan Aceh yang bernama Teungku Fakinah pernah mengajar di Dayah Lam Pucok di mana dia sendiri pernah menjadi muridnya.[161]

Selain kaum alim ulama dan cerdik pandai, kaum bangsawan, baik yang termasuk keluarga sultan maupun uleebalang mempunyai kedudukan dan harkat yang tinggi. Lebih-lebih jika mereka berhasil dalam perniagaan sebab perdagangan merupakan salah salah satu sendi kehidupan kesultanan Aceh. Tidaklah mengherankan bahwa semangat wiraswasta pun berkembang di kalangan para uleebalang dan para bangsawan lainnya. Sejarah Aceh pun mencatat bahwa sultan-sultan yang berkuasa pada umumnya menaruh perhatian besar pada soal perdagangan dan perluasan kekuasaan yang dilakukannya pada hakikatnya berlandaskan kepentingan ekonomi.

Selain perdagangan dan bercocok tanam, rakyat Aceh mempunyai kehidupan yang beraneka ragam. Dari laporan seorang Prancis yang bernama Augustin de Beaulieu tampak jelas bahwa banyak rakyat yang mempunyai keahlian pertukangan atau pengrajin, seperti tukang emas, tukang periuk, tukang besi, tukang kapal, dan pengrajin tenun. Bahkan, diceritakan lebih lanjut bahwa kapal-kapal besar yang disebut *galleon* milik orang Aceh mempunyai kekuatan yang jauh melebihi kekuatan kapal *galleon* milik orang Portugis. Dikatakannya bahwa papan-papan pada sisi kapal

---

[159] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 130–131

[160] Misalnya, dapat dibandingkan dengan pemahat-pemahat atau pengrajin anyaman di kalangan rakyat Bali pada masa sekarang

[161] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 132

sampai enam jempol jari tebalnya.[162] Walaupun mungkin laporan orang asing ini agak dibesar-besarkan, yang penting adalah fakta yang menunjukkan bahwa orang Aceh pada masa itu merupakan bangsa yang aktif dan dinamis. Inilah salah satu faktor bahwa mereka itu sekian lama mampu menghadapi segala tekanan dari orang asing seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang selalu berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di negara Aceh.

Dalam kehidupan sehari-hari tampaknya rakyat Aceh menganut asas gotong royong seperti yang umum terdapat di tempat-tempat lain di Indonesia. Misalnya, dalam pemerintahan gampong, *keucik* terlebih dahulu bermufakat dengan orang-orang tua di gampongnya sebelum mengambil sesuatu keputusan yang dianggap penting. Bahkan, sering kali bila dianggap perlu seluruh penduduk laki-laki dari gampong itu dipanggil untuk ikut bermusyawarah, sehingga keputusan yang diambil biasanya adalah hasil permufakatan.

Rumah-rumah rakyat biasanya didirikan di atas tiang seperti yang masih dapat dijumpai pada masa sekarang. Bangunannya pada umumnya dibuat dari bambu dan kayu. Bangunan di atas tiang ini memang cukup praktis sebab ruangan di bawah atau yang dinamakan kolong rumah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti kandang ternak, tempat menyimpan kayu bakar, atau menyimpan barang-barang lain seperti alat pertanian misalnya.

Rakyat Aceh bukanlah bangsa yang bebas pajak. Tidak sedikit penghasilan negara didapat dari pungutan pajak atau dari cukai yang ditarik oleh pejabat-pejabat kerajaan urusan pajak. Ada macam-macam pajak yang dibebankan kepada rakyat. Bagi mereka yang mempunyai tanah ladang dikenakan pajak tanah (*wase tanah*), sedangkan untuk barang-barang yang diperjualbelikan di pasar-pasar dipungut pajak pasar (*adat peukan*). Di daerah-daerah di mana terdapat muara sungai, di situ terdapat rumah cukai. Pejabat-pejabat cukai mengawasi keluar masuknya perahu-perahu di muara. Perahu-perahu yang akan memasuki muara itu diharuskan membayar cukai muara (*wase kuala*).[163] Selain itu, barang-barang dagangan yang akan diekspor sewaktu melalui muara tersebut juga dipungut pajak dengan tarif menurut macam barang dagangan. Dengan demikian, terdapat berbagai macam pajak, seperti pajak lada (*wase lada*), *wase pinang*, dan juga ada pajak hasil hutan (*wase uteuen*). Di dalam jual beli lada kecuali ditarik pajak lada juga dipungut *wang hareukat*.[164]

---

[162] *Ibid.*, hlm. 94

[163] C. van Vollenhoven, *op. cit.*, hlm. 164

[164] *Ibid.*

Suatu hal yang menarik dari peninggalan lama yang ada dalam masyarakat Aceh adalah penggolongan rakyat dalam kelompok *soeke* (suku) atau *kawon* (kaum).[165] Penggolongan atas *kawon* didasarkan atas keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki dan adat istiadatnya. Pada masa itu ada empat *kawon* sebagai berikut.

1. *Kawon Imeum peut* (kaum imam empat), yaitu mereka yang berasal dari orang Hindu yang telah memeluk agama Islam.
2. *Kawon Lherentoih* (suku tiga ratus), yaitu mereka yang berasal dari orang-orang Mantir dan Batak.
3. *Kawon Tok Batu*, yaitu mereka yang terdiri dari orang-orang asing, seperti orang Arab, orang Parsi, dan orang Turki.
4. *Kawon Ja Sandang*, yaitu orang Hindu yang bekerja untuk majikan masing-masing.

Keempat *kawon* ini mempunyai pimpinan yang dipilihnya sendiri-sendiri dan disebut *panglima kawon*. Walaupun kedudukannya turun-temurun, panglima kawon yang baru sudah terpilih harus disahkan oleh uleebalang yang berkuasa di tempat tinggal panglima kawon tersebut. Panglima *kawon* berkewajiban membela kepentingan anggota-anggota *kawon*-nya dan masing-masing anggota kawon berbeda menurut negeri asal mereka. Oleh sebab itu, oleh Sultan hal-hal yang bermulai dengan *reusam* (kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat) diserahkan kepada panglima *kawon* dan para uleebalang di masing-masing tempat.[166]

---

[165] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 89
[166] *Ibid.*, hlm. 90

Bab V
Perlawanan terhadap Kolonialisme

Proses hubungan antara kekuasaan negara dan kekuasaan Belanda dalam abad ke-19 menunjukkan dua gejala yang bertolak belakang, di satu pihak tampak makin meluasnya kekuasaan Belanda, sedang di lain pihak terlihat makin merosotnya kekuasaan negara-negara tradisional. Pengaruh hubungan dengan kekuasaan Barat tersebut menyangkut pelbagai segi kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam bidang politik, pengaruh Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern negara-negara, misalnya dalam soal pergantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat birokrasi, maupun partisipasinya dalam menentukan kebijakan politik negara. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa tradisional makin bergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan soal-soal pemerintahan menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing sejak akhir abad ke-17 berakibat makin kurangnya penghasilan penguasa-penguasa tradisional.

Dalam bidang sosial-ekonomi, kontak dengan Barat berakibat makin lemahnya kedudukan kepala-kepala daerah dalam negara-negara tradisional. Kekuasaan mereka berangsur-angsur berkurang dan lebih jauh ditempatkan di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing, sedang tenaga kerja mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial. Sudah pasti keadaan seperti ini sedikit banyak menimbulkan keguncangan dalam kehidupan para penguasa dalam negara-negara tersebut. Khusus di Jawa, faktor-faktor produksi pertanian, baik yang menyangkut tanah maupun tenaga kerja, diatur menurut sistem kolonial. Para petani dibebani tugas mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan diharuskan menyumbangkan tenaga kerjanya secara paksa pada penguasa kolonial.

Di daerah-daerah lain, di mana perdagangan laut merupakan sumber penghidupan pokok dari penduduk, seperti Maluku, penguasaan daerah pantai dan tindakan monopolistik dalam perdagangan yang dilakukan oleh Belanda, ditambah dengan penguasaan daerah produksi tanaman ekspor, merupakan hambatan besar bagi penduduk setempat untuk memperoleh

penghasilan. Tidak mengherankan apabila tindakan penguasa-penguasa asing tersebut menimbulkan rasa antipati di kalangan penduduk bumiputra, yang dapat menuju ke arah timbulnya perlawanan-perlawanan. Desakan-desakan pihak Belanda pada pihak negara-negara tradisional dalam hal pembuatan perjanjian yang mengabaikan nilai-nilai tradisi yang berlaku di daerah-daerah setempat, di samping tuntutan agar mengakui soverinitas asing di daerah tersebut, dipandang oleh pihak bumiputra sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Apabila kekuasaan negara atas daerah-daerah tersebut itu cukup kuat, kekecewaan tersebut dapat menjurus ke arah penentangan bersenjata. Di dalam keadaan kurang kuat penguasa bumiputra terpaksa tunduk pada kekuasaan asing sehingga wilayah kekuasaan mereka ditempatkan di bawah kekuasaan kolonial. Tampak jelas bahwa usaha Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan politis juga mempunyai tujuan keuntungan ekonomis. Oleh Belanda perluasan wilayah tersebut diharapkan dapat memperlancar pemungutan hasil produksi dan pengerahan tenaga kerja murah, di samping dapat memperlancar usahanya di bidang perdagangan.

Dalam bidang budaya, terutama dalam abad ke-19, pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional makin meluas. Sementara di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat terutama datang dari pemimpin-pemimpin agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma dalam ajaran agama Islam. Orientasi keagamaan seperti ini terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat birokrasi kerajaan yang patuh pada agama. Di dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan.

Di samping faktor-faktor baru sebagai akibat pengaruh Barat di pelbagai segi kehidupan tersebut, gejala kronis yang sering muncul dalam kalangan para penguasa turut menambah kompleksnya keadaan. Yang dimaksud di sini ialah gejala pertentangan intern antarbangsawan seperti terlihat dalam kerajaan-kerajaan di Jawa (Jawa Tengah, Banten) dan Kalimantan (Banjar), maupun pertentangan antargolongan dalam masyarakat seperti di Sumatra Barat. Pertentangan antarbangsawan umumnya bermotif perebutan kekuasaan, sedang pertentangan antar-golongan dalam masyarakat yang terjadi di Sumatra Barat, lebih banyak berdasarkan motif perebutan pengaruh atas dasar keyakinan dan kepercayaan. Gejala pertentangan intern dengan cara ini mempermudah intervensi-intervensi itu berjalan sejajar dengan tujuan ekspansi wilayah yang direncanakan oleh Belanda dalam rangka kolonialismenya. Sudah

pasti intervensi asing dengan pemihakan pada salah satu pihak yang sedang bertentangan dapat menimbulkan kekecewaan dan reaksi pada pihak yang lain, yang bahkan dapat memancing ke arah perlawanan. Akibatnya, perlawanan dari salah satu pihak yang bertentangan tidak lagi diarahkan pada lawan intern, tetapi juga pada kekuasaan asing.

Selama situasi kritis terlihat gejala pengelompokan pihak pro dan kontra kekuasaan asing, baik di kalangan penguasa, bangsawan, maupun di antara sementara golongan dalam masyarakat. Di daerah kerajaan, ajakan perlawanan dari para bangsawan ataupun ulama yang berpengaruh untuk melawan kekuasaan asing dengan cepat mendapat sambutan baik dari kelompok rakyat, yang karena tekanan-tekanan hidup yang mereka alami sudah bersikap antipati terhadap kekuasaan asing. Dalam hubungan ini ikatan tradisional dalam bentuk ketaatan pada atasan merupakan faktor penting dalam turutnya para rakyat dengan pihak penguasa tersebut. Di samping itu, pengalaman pahit yang pernah dirasakan oleh rakyat di daerah-daerah selama kontak dengan kekuasaan asing dapat memperkuat keinginan untuk berjuang melawan kekuasaan asing. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi di daerah-daerah selama kontak dengan kekuasaan Barat cukup subur untuk timbulnya perjuangan tersebut. Karena dalam tiap-tiap daerah intervensi intensitas kontak dari kekuasaan Belanda tidak bersamaan waktu terjadinya, timbulnya perjuangan terhadap kekuasaan asing pun tidak sama waktunya. Perjuangan-perjuangan itu dapat berupa perlawanan besar, atau pemberontakan maupun hanya merupakan kericuhan-kericuhan.

Mengingat banyaknya jumlah perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia selama abad ke-19, dan tidak mungkin untuk diuraikan seluruhnya dalam buku ini. Di sini akan diuraikan beberapa saja, yang diharapkan dapat mewakili secara keseluruhan bentuk reaksi berupa perlawanan besar dari pihak bumiputra terhadap kekuasaan Belanda. Perlawanan-perlawanan yang dibentangkan di sini tidak mengabaikan perlawanan-perlawanan lain yang pernah berkobar di daerah tertentu, seperti perlawanan yang cukup gigih di Banten, Sulawesi Utara, dan di daerah-daerah di Indonesia yang merupakan reaksi terhadap kekuasaan, kolonial Belanda, dan mempunyai saham berharga dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional.

A. Sulawesi Utara

1. Pendahuluan

Minahasa adalah sebuah wilayah yang terletak di Sulawesi Utara. Wilayah itu didiami oleh suatu etnik yang memiliki sebutan yang sama. Sebagaimana wilayah di kepulauan Indonesia lainnya, kolonialisme Belanda menyebarkan pengaruhnya di wilayah ini. Penerapan kepentingan kolonial itu menimbulkan perlawanan dari etnik setempat. Perang Minahasa melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda yang berlangsung di daerah Tondano, atau dikenal juga dengan sebutan *Minawanua*, terjadi dua kali. Perang Minahasa pertama terjadi pada tahun 1661 sampai 1664, ketika pendatang Belanda di bawah panji perusahaan dagang Hindia Timur atau VOC, yang lebih dikenal dengan kompeni, memaksakan kehendaknya agar pemimpin Minahasa membuka wilayahnya untuk kepentingan mereka. Sebelumnya, para pemimpin etnik Minahasa telah menjalin hubungan dengan pendatang Barat lainnya, yakni Spanyol. Ketika itu, Spanyol terlibat persaingan dalam penguasaan jalur pelayaran dan perdagangan laut dengan Portugis dan kemudian Belanda. Spanyol mengalami konflik dengan Portugis di Maluku Utara, di tengah-tengah persaingan Ternate dan Tidore. Kompeni Belanda juga berusaha menanamkan pengaruhnya di kawasan Sulawesi Utara dengan mencoba menjalin hubungan dengan *walak* Tondano.[1] Daerah Tondano dikenal sebagai penghasil beras utama di kawasan itu. Dalam peperangan itu pihak Minahasa tidak berhasil membendung kekuatan kompeni.[2]

Sebagai akibatnya, kompeni membangun permukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng, yang diberi nama Fort Amsterdam. Letak benteng itu kini di sekitar Manado. Akan tetapi, walau sebuah benteng telah didirikan, kompeni belum dapat mengendalikan keadaan di kawasan itu sepenuhnya. Selain menghadapi persaingan dengan kerajaan Bolaang, yang terletak di daerah Bolaangmongondow, *walak-walak* Minahasa tidak seluruhnya menunjukkan sikap hendak menjalin hubungan dengan kompeni. Untuk itu, gubernur kompeni di kepulauan Maluku, Robertus Padtbrugge, melakukan perjalanan dinas ke Minahasa, dan sejumlah daerah lainnya, dengan maksud membuat atau memperbarui perjanjian. Ia menemui sejumlah pemimpin Minahasa dan pada tanggal 10 Januari 1679

---

1 *Walak* adalah istilah untuk kesatuan hidup atau organisasi sosial di Minahasa, semacam subetnik

2 Bert Supit, *Minahasa dari Amanat Watu Pinawetengan hingga Gelora Minawanua*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1986, hlm. 88–91

kedua belah pihak mencapai kesepakatan membuat sebuah perjanjian, yang sering disebut sebagai *Perjanjian Tahun 1679*.

Perjanjian itu mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan Minahasa dan kompeni. Khusus mengenai status hubungan kedua belah pihak muncul penafsiran yang berbeda. Menurut salinan dokumen Perjanjian Tahun 1679 yang disusun oleh kompeni, Minahasa adalah sebuah daerah bawahan (*onderdaan*) kompeni. Namun, menurut pandangan dan alam pikiran pihak Minahasa yang diwariskan secara turun-temurun, perjanjian itu mengatur hubungan yang setara antara Minahasa dan kompeni, yakni dalam bentuk persahabatan (*vriendschap*). Minahasa adalah sekutu kompeni (*bondgenoot*). Dengan perkataan lain, Minahasa bukan bawahan Belanda. Di masa-masa selanjutnya, perbedaan penafsiran mengenai status hubungan ini kerap muncul ke permukaan sebagai sumber dan inspirasi perlawanan terhadap tatanan kolonial Belanda. Beberapa pergolakan di keresidenan Manado pada abad ke-19 berkaitan dengan persoalan ini sebagai pemicu gerakan. Pandangan ini juga membingkai alam pemikiran para pemimpin *walak-walak* Minahasa yang melancarkan perang terhadap Belanda pada tahun 1808 dan 1809.

Ketentuan lainnya adalah bahwa Minahasa akan membantu kompeni terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Beras dan kayu gelondongan sangat dibutuhkan oleh kompeni, baik sebagai komoditas niaga maupun sebagai bahan bangunan permukiman di Minahasa. Sebaliknya, kompeni akan membantu Minahasa dalam menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Perjanjian itu diperbarui kembali pada tahun 1699 dan 1790.

Dalam rangka memperluas pengaruhnya, kompeni mulai mencampuri urusan dalam kehidupan *walak-walak* Minahasa. Kehadiran kompeni di wilayah Minahasa berkembang menjadi semacam kekuatan pengimbang dalam perimbangan kekuatan antar-*walak*. Oleh karena itu, kompeni sering mengambil keuntungan dalam persaingan antar-*walak* Minahasa. Ketika perselisihan itu berkembang menjadi bentrokan, kompeni melibatkan diri dengan memihak kepada salah satu *walak* yang sedang bertikai. Tidaklah mengherankan apabila keterlibatan itu semakin memperuncing konflik yang terjadi sehingga jalan musyawarah yang lazim ditempuh oleh para pemimpin *walak* Minahasa dalam mencari jalan keluar dari sebuah persoalan yang timbul di antara mereka, tidak jarang sulit mencapai sasarannya. Namun di pihak kompeni, dengan cara itu mereka mendapatkan sekutu-sekutu yang dapat diandalkan kesetiaannya, di samping memperoleh hasil bumi dan hutan untuk kebutuhannya. Sejalan dengan itu, proses pemilihan pemuka *walak*, atau *ukung*, yang menurut adat istiadat Minahasa dilakukan

secara bersama-sama tidak luput dari intervensi kompeni. Akibatnya, kekisruhan kerap timbul dalam proses pemilihan itu. Karena kompeni selalu menentukan siapa yang harus dipilih, sudah tentu mereka yang disenangi.

Selain itu, kompeni juga menuntut kewajiban tertentu dari penduduk Minahasa. Penyaluran beras atau *leverantie* makin lama makin diperberat tuntutannya. Minahasa adalah lumbung beras bagi pasokan kebutuhan pangan kompeni di kepulauan Maluku. Sehubungan dengan itu, suatu kelompok dibentuk untuk menjamin kelancaran pasokan kebutuhan itu. Namun, dalam melakukan tugas, kelompok itu sering melampaui kewenangan mereka. Tidak jarang petani Minahasa diintimidasi dan diteror melalui suatu kelompok yang memang dibentuk oleh kompeni sehubungan dengan maksud itu. Lagi pula, mereka menimbun kekayaan untuk diri mereka sendiri, seperti dengan menyita perabot rumah tangga, ternak, perhiasan, budak, dan hasil pertanian lainnya.

Pada akhir abad ke-18, seorang pejabat kompeni di Minahasa, Residen G.F. Durr memberlakukan hukuman denda yang penentuan kesalahan dan besar jumlahnya diputuskannya sendiri. Keadaan-keadaan seperti itu terus berlangsung dan memperlihatkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pihak Belanda yang mendahulukan kepentingannya sendiri. Menyikapi keadaan yang sedemikian menekan itu, para pemimpin Minahasa terpecah menjadi beberapa kelompok, mulai dari yang mendukung tindakan kompeni Belanda itu sampai yang menentangnya walau pada umumnya tidak berani menyatakan secara terbuka karena tidak ada dukungan yang dapat diandalkan. Di kalangan para *ukung* mulai menyebar rasa ketidakpercayaan terhadap kompeni yang dipandang banyak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada. Tindakan kompeni dipandang sebagai pelanggaran ketentuan perjanjian yang menyatakan bahwa Minahasa adalah sekutu, bukan bawahan. Artinya, kompeni memperlakukan Minahasa tidak sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat, terutama merujuk pada tahun 1679 versi Minahasa. Solidaritas mulai muncul dan menemukan landasannya di kalangan *walak-walak* Minahasa yang resah menyaksikan ketidakadilan itu.

Memasuki abad ke-19 terjadi beberapa perkembangan baru. Kekuasaan VOC mulai runtuh karena bangkrut dan seluruh miliknya diambil alih oleh negara atau pemerintah Belanda. Sejak itu, embrio pemerintahan sebuah negara mulai muncul di kepulauan Indonesia, termasuk di Minahasa. Akan tetapi, peninggalan VOC tidak serta-merta menghilang. Pada tahun 1802, Residen Durr digantikan oleh Carel Christoph Prediger Jr. Pada awal jabatannya, Prediger memperlihatkan harapan-harapan akan melakukan perubahan terhadap keadaan masyarakat yang timpang di Minahasa. Ia

melaporkan segala penyelewengan dan kebobrokan yang dilakukan oleh pendahulunya kepada atasannya. Selanjutnya, Prediger melakukan pendekatan kepada *ukung-ukung* Minahasa. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya mulai diperbarui kembali. Namun, timbul suatu masalah. Prediger mengajukan tuntutan agar Minahasa menyalurkan beras secara sukarela kepada kompeni. Para *ukung* Minahasa menentang keras gagasan ini. Juga, Prediger menahan diri untuk tidak campur tangan dalam urusan *walak*. Walau begitu, para *ukung* Minahasa tidak puas dengan tindakan Prediger. Mereka menuntut agar residen itu memecat Urbanus Matheoz, seorang anggota kelompok pengumpul hasil bumi Minahasa di masa residen sebelumnya. Matheoz terkenal di kalangan masyarakat Minahasa sebagai seorang pemeras dan penindas. Keresahan yang kerap terjadi di kalangan *walak* Minahasa sering bersumber pada ulahnya. Namun, Prediger tidak melaksanakan kehendak para *ukung* itu.

Karena sikap itu, hubungan para *ukung* dan Prediger mulai tidak harmonis. Apalagi tidak jarang kebijakan Prediger tidak selaras dengan yang dinyatakannya di hadapan pertemuan para *ukung*. Prediger menghadapi masalah, bahwa ia tidak memiliki tenaga bantuan yang cukup dan cakap sesuai untuk memperoleh keterangan yang diperlukan terutama dalam pembuatan sebuah kebijakan. Prediger belum memahami keadaan yang dihadapinya dalam memerintah negeri Minahasa. Oleh karena itu, sejumlah keputusannya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulunya.[3] Perubahan yang sempat muncul ke permukaan tidak pernah terwujud.

Sementara itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Daendels, mengeluarkan keputusan untuk membangun garis pertahanan untuk koloni Hindia Belanda terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Pertikaian Belanda dan Inggris bersumber sejak negeri Belanda dikuasai oleh Prancis. Napoleon Bonaparte memperluas Revolusi Prancis ke seantero Eropa dan mendapat perlawanan dari kalangan monarki, terutama Inggris. Dalam rangka itu, Daendels membutuhkan serdadu-serdadu dalam jumlah cukup untuk membangun sebuah pasukan tempur yang tangguh dan dalam jumlah yang cukup. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengerahkan penduduk dari sejumlah daerah jajahan di Hindia Belanda. Minahasa tidak luput dari rencana pengerahan serdadu itu. Seorang perwira pendaftar dikirim ke Manado, yakni Kapten Hartingh.[4]

---

3 Bert Supit, *Sejarah Perang Tondano (Perang Minahasa di Tondano)*, Jakarta, Lembaga Penelitian Sejarah dan Masyarakat, 1991, hlm. 25–29

4 Eddy Mambu "Pantang Menyerah Kisah Perlawanan Orang-orang Minahasa terhadap Kekuasaan Penjajah di Pemulaan Abad ke-19", Jakarta, Makalah Seminar Perang Tondano, Yayasan Kebudayaan Minahasa, November 1986, hlm. 35

Prediger yang mengemban tugas itu dengan segera mengadakan pertemuan dengan para *ukung* Minahasa di Air Madidi pada tanggal 10 Mei 1808. Namun, ketika itu tidak semua pemimpin *walak* dapat hadir sehingga pertemuan mengalami penundaan sampai tanggal 19 dan 20 Mei. Dalam pertemuan itu Prediger menyampaikan jumlah jiwa yang dibutuhkan, yakni sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang perimbangan jumlahnya untuk setiap *walak* disesuaikan dengan kepadatan penduduk-nya. Mereka akan dikirim ke Pulau Jawa untuk dilatih menjadi serdadu. Sebagai imbalannya, pemerintah kolonial memberikan kain dan sejumlah uang kepada pihak *ukung* yang ditetapkan juga sebagai pemasok pengerahan tenaga pemuda itu. Suatu pertanyaan penting muncul dalam pertemuan itu, yaitu berapa lama para pemuda itu akan meninggalkan kampung halaman mereka. Prediger menjawab lima tahun, tetapi tidak dapat menegaskan apakah akan diberlakukan perpanjangan atau tidak.

Tanggapan Prediger yang tidak seperti diharapkan oleh para *ukung*, menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya maksud pengerahan itu adalah untuk selamanya. Bagi para *ukung* hal itu berarti mereka akan menyerahkan pemuda-pemuda mereka kepada Belanda. Mereka selain tidak menanggapi usulan itu, juga tampak tanda-tanda sikap keras menolak-nya. Menurut mereka, imbalan yang ditawarkan itu merupakan uang pembeli kepala orang yang tidak selaras dengan adat istiadat Minahasa. Pada masa itu bepergian jauh dari kampung halaman ke tempat yang belum diketahui adalah tindakan yang tidak lazim dilakukan. Apalagi ada kemungkinan mereka yang berangkat itu tidak akan pernah kembali. Tentunya, para *ukung* akan banyak menemui penolakan dari kalangan keluarga-keluarga anggota *walak*-nya. Dalam masyarakat bertani, kebutuhan tenaga kerja dipenuhi terutama dari kalangan keluarga dan sebagian dari anggota *walak*-nya. Pola dan luas penggarapan lahan terkait erat dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Pola gotong royong "Mapalus" antara lain untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja itu. Walau mendapat tantangan, Prediger tetap memaksakan kehendaknya agar tercapai kesepakatan mengenai pengiriman pemuda itu. Ia juga tidak mengindahkan bahwa pertemuan itu tidak dihadiri oleh seluruh *walak* Minahasa, seperti yang disampaikan oleh pihak Minahasa yang hadir. Ujung pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa hasil-hasil pertemuan itu akan dibahas kembali dalam musyawarah atau pertemuan *walak*.

Ternyata, dalam musyawarah *walak* di kediaman Matulandi di Tondano Touliang pada tanggal 2 Juni 1808, usul Prediger tidak mendapat persetujuan. Di antara para pemimpin *walak* yang hadir adalah Lonto dari

Tomohon, Tewu dan Matulandi dari Tondano, dan Mamait dari Remboken.[5] Selain itu, mereka adalah kepala-kepala *walak* dari Kakas, Remboken, Sonder, Tounsarongsong, Tompaso, Kawangkoan, Tombasian, Tonsea, Klabat, dan lainnya. Mereka yang tercatat ikut dalam pertemuan itu adalah sebagai berikut:[6]

No.	*Walak*	*Ukung*
1.	Manado	Gerrit Opatija
2.	Bantik-Kristen	Urbanus Matheosz
3.	Bantik-Alifuru	Rumondor
4.	Klabat di Bawah (permukiman di kawasan Manado)	Sigar, Maramis
5.	Ares	Dondokambay Lasut
6.	Mawuring (perkampungan Tondano di tepi Sungai Tikala	Runturambi
7.	Nieuw Tondano	Kilapong
8.	Negeri Baru (Titiwungen)	Johanes Karinda
9.	Klabat di Atas (Maumbi)	Rondonuwu, Tikoalu
10.	Likupang (termasuk *walak* Maumbi) Kalengkongan	Bernadus
11.	Tonsea (ibu negeri Kema)	Hendrik Dotulang, Lukas Pelengkahu, Ombu, Lengkong
12.	Tondano (Kapataran)	Gerrit Wuysang
13.	Tondano-Toulimambot	Korengkeng, Sepang, Abraham Lolutong
14.	Tondano Touliang	Sarapung, Tewu, Matulandi, Kepel
15.	Tondano Kristen	Fredrik Lumingkewas
16.	Remboken	Mamait, Kalo
17.	Kakas	Kalalo, Kawengian
18.	Tomohon-Soronsong	Lonto, Pantow, Manopo

[5] B. Supit, *op. cit.*, 1986, hlm. 169

[6] S.U. Marunduh, "Konflik Minahasa-Belanda 1807–1809", Yogyakarta, Tesis Magister S2 Program Pascasarjana Sejarah Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 25

19.	Kakaskasen	Mainalo
20.	Tombariri	Jakob Supit (Kristen), Poluakan (Alifuru), Pangeman (Woloan)
21.	Sonder	Walewangko, Mokalu
22.	Kawangkoan	Tuyu, Pele
23.	Tompaso	Sondak, Lela, Kaawon, Woworega
24.	Langowan	Irot, Koyongian
25.	Tombasian Atas	Rontuwene
26.	Rumoong Atas	Daniel Tumbelaka
27.	Tombasian Bawah	Mamarimbing
28.	Rumoong Bawah	Talumepa, Rumopa
29.	Kawangkoan Bawah	Emeseng, Pele
30.	Tonsawang	Rugian
31.	Pasan	Lokke
32.	Ratahan	Watak
33.	Ponosakan	Mokolensang

Pembicaraan tentang pengerahan itu menjadi pokok utama dan menjadi bersifat segera, karena sebagaimana yang terjadi di Tombariri, kompeni telah melakukan pemanggilan pemuda secara sepihak, tanpa persetujuan *ukung*-nya. Namun, pembicaraan pun merembet ke hal-hal lainnya yang mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dan tindakan pihak Belanda. Pembicaraan pertemuan itu kian memanas. Tidak hanya masalah pengerahan pemuda yang menjadi pokok pembahasan, tetapi juga merembet hingga ke pemasokan beras secara sukarela dan kehadiran serdadu dari luar wilayah Minahasa. Berdasarkan ketentuan adat istiadat, demikian pandangan Lonto, keadaan itu tidak dapat dibenarkan atau dibiarkan berlarut-larut. Di dalam pertemuan itu *ukung* Lonto menyampaikan:[7]

> *"Nenek moyang kita pernah menyerahkan hasil jerih payah mereka dengan cuma-cuma kepada Belanda. Mereka tidak pernah menyerahkan beras begitu saja kepada kompeni. Tidak pula kepada*

[7] Brieven van Ternate 1808–1810, surat tertanggal 10 Juni 1808, Arsip Manado, Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam S.U. Marunduh, *ibid*., hlm 101

Residen Durr. Predigger harus mengirim kembali tentara Ternate itu pulang ke negeri mereka sebab kita anak-anak Toar dan Lumimuut pasti lebih berani dan lebih baik menjaga tanah warisan para leluhur kita. Predigger mengatakan bahwa mereka (tentara Ternate) berada di sini supaya bajak laut Mindanao tidak berani datang kemari? Mengapa hampir tiap hari kita mendengar adanya orang memulangkan orang-orang Ternate yang tidak berguna itu? Dan, janganlah sampai kita mau menyerahkan pemuda-pemuda kita untuk dibawa lari oleh Belanda. Kita memerlukan mereka di sini. Tugas mereka adalah di sini."

Puncak pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yakni menghentikan pemasokan beras secara sukarela kepada kompeni, mendesak penarikan armada kora-kora kompeni beserta serdadunya, menolak rekrutmen pemuda menjadi serdadu, dan akan melakukan perlawanan bersenjata apabila kompeni memaksakan kehendaknya. Keputusan itu diperkuat secara adat istiadat dengan pernyataan ikrar atau sumpah bersama. Di hari keempat pertemuan, para peserta yang hadir setuju untuk menolak tuntutan itu dan mereka mengangkat sumpah untuk kesepakatan yang dicapai, sebagai berikut.[8]

a. Bahwa pemerintah Hindia Belanda menuntut lebih daripada apa yang disepakati dalam kontrak, seperti membagikan uang kepada pemuda-pemuda agar mau menjadi tentara. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
b. Bahwa harga "kain" sebagai alat pembayaran ketika itu sudah meningkat dibandingkan kesepakatan semula.
c. Bahwa mereka tidak ingin lagi membayar setengah gantang padi setiap keluarga untuk membiayai kora-kora Ternate yang menjaga keamanan pantai terhadap ancaman *lanun* (bajak laut) Mindanao karena bajak laut tetap merajalela.
d. Bahwa mereka tidak mau lagi melaksanakan kerja wajib, seperti pemeliharaan benteng di Manado.
e. Bahwa apabila pemerintah kompeni tidak mau mengubah apa yang ada, mereka akan mengatur urusan mereka sendiri. Artinya, mereka tidak mengakui kekuasaan Belanda di Minahasa.

Dalam mengangkat sumpah itu, *ukung* Lonto memegang *sagu-sagu* (sejenis tombak), Mamait mencekal parang, dan Matulandi mengangkat *lelutan* (senapan). Setelah itu, keputusan musyarawah diberikan kepada

---

[8] E. Mambu, *loc. cit.*, hlm. 37

utusan kompeni yang hadir untuk disampaikan kepada Prediger di benteng Fort Amsterdam.

Jelas bahwa tanggapan itu bernada keras walau tidak didukung oleh seluruh *walak*. Sejumlah *ukung walak* tidak hadir, seperti Korengkeng, Sepang, Dotulong, dan Sarapung dari Tondano. Pertemuan itu juga tidak dihadiri oleh *walak-walak* Tonsawang, Ponosakan, Ratahan, Pasan, Langowan, Tikala, Arus, Bau, dan Mawuning. Hasil kesepakatan itu disampaikan oleh Maramis dari Klabat di Bawah kepada Prediger. Kabar itu juga diperoleh Prediger dari sejumlah kepala *walak* yang tidak hadir, seperti Korengkeng dan Dotulong. *Ukung* Kalito juga melaporkan pertemuan beserta hasilnya kepada Prediger dengan maksud untuk meyakinkan Prediger agar mau memahami adat istiadat Minahasa yang demokratis. Ia menekankan masalah pentingnya para pemuda untuk membina pertahanan sendiri di Minahasa yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman perompak. Berkenaan dengan itu, semua panjar pembayaran dan kain-kain akan dikembalikan seutuhnya kepada kompeni. Hal itu berarti bahwa Minahasa tidak terikat lagi dengan kesepakatan untuk mengerahkan sejumlah 2.000 pemudanya menjadi serdadu Belanda.

Setelah mendengar hasil itu, walau berang, Prediger masih berusaha mencoba melakukan pendekatan yang juga dikuti intimidasi. Akan tetapi, upaya itu malah memperkuat kecurigaan *walak-walak* Minahasa. Sejak itu, pengelompokan di kalangan *walak* Minahasa makin jelas di antara mereka yang setuju dan menolak usulan Prediger. Pihak yang mendukung usulan itu juga berusaha memengaruhi para *ukung* yang menolak. Oleh karena itu, perpecahan mulai timbul di kalangan *walak* Minahasa.

2. Jalannya Perang

Utusan yang kembali melaporkan hasil pertemuan Minawanua itu berusaha meyakinkan Prediger bahwa tidak terbersit niat untuk mengadakan gerakan di kalangan *ukung* Minahasa. Terkecuali, apabila kompeni menanggapinya dengan pendekatan kekerasan. Pada mulanya, Prediger menggunakan pengaruhnya di kalangan pemimpin *walak* Minahasa dengan mengundang mereka untuk berkunjung ke Fort Amsterdam. Ajakan itu ditolak karena pengalaman terhadap jebakan kompeni yang pernah menangkap sejumlah *ukung* Minahasa di masa lampau ketika berada di benteng kompeni belum pupus dari ingatan mereka. Upaya itu tidak membuahkan hasil.

Prediger masih berusaha melakukan pendekatan dengan sejumlah cara. Ia mengirim bawahannya, Wenderstyd dan Mai Malo, *ukung* Kakaskasen untuk menyelidiki keadaan dan membujuk para *ukung* agar membatalkan penolakan mereka menemui Lonto dan sejumlah *walak* di Tondano, tetapi tidak berhasil. Malahan mereka dicegat di Koya oleh kelompok Lonto dan Tewu yang memperingatkan agar tidak melanjutkan perjalanan karena keselamatan mereka tidak terjamin. Kapten Hertingh yang juga mendengar hasil pertemuan di Tondano itu kemudian mengirimkan sejumlah serdadu dengan pesan bahwa ia sendiri akan datang ke Tondano. Akan tetapi, tanggapan yang diperoleh adalah bahwa kehadirannya tidak dikehendaki.

Prediger masih mencoba untuk menempuh cara persuasif. Ia mengira bahwa ia telah keliru mengirim Mai Malo karena Lonto tidak senang dengannya. Oleh karena itu, ia mengutus Karundeng dari Kampung Baru, Kambey Lasut dari Ares, serta Kaunang dan Paat dari Lotta. Lonto bersedia menerima mereka. Lonto menceritakan kepada mereka bahwa rakyatnya tidak bersedia memenuhi tuntutan Prediger. Malah ia menerima ancaman bahwa mereka akan membakar rumahnya dan juga mengeluarkan isi perutnya. Kemudian Lonto diundang untuk datang ke Manado dan menyampaikan sendiri perihal penolakan itu kepada Prediger. Dengan tegas Lonto menolaknya karena belum pupus dari benaknya peristiwa yang dialami oleh Pangalila dan *ukung* lainnya yang diundang oleh Residen Schierstein, tetapi kemudian malah ditangkap.

Prediger masih berusaha menarik dukungan dari sejumlah *ukung*. Kemudian ia berangkat sendiri ke pedalaman Minahasa beserta pasukan pengawalnya. Dalam perjalanan itu tidak banyak *ukung* yang bersedia menemuinya. Mereka telah meninggalkan *walak*-nya. Bahkan, di sejumlah *walak* ia menemui sikap bermusuhan dari para penduduknya. Sejumlah *ukung* yang telah menerima kunjungannya mendapat ancaman akan diserang oleh pasukan gabungan beberapa *walak*. Di *Tara-tara* ia mendapati jalan-jalan dirintangi, jembatan diputus, dan ratusan pemuda bersenjata tombak menghadang dan mulai menyerangnya. Persenjataan pasukannya tidak berfungsi karena tersiram hujan. Hanya keajaiban yang membuat Prediger dapat lolos dari kepungan itu.[9] Kemudian Prediger mencoba memecah belah para *ukung* Minahasa. Ia mengundang Korengkeng dan Sarapung yang pernah menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan gerakan penolakan itu. Mereka tidak kuasa untuk memengaruhi sikap keras penolakan tersebut. Pengaruh Tewu dan Matulandi tidak dapat mereka tandingi dalam memengaruhi para *walak* yang melawan itu.

[9] *Ibid.*, hlm. 42

Sementara itu, sekutu mereka Lumingkewas dan Sepang diketahui berada di pihak perlawanan. Keduanya kemudian tidak pernah muncul lagi di benteng Belanda walau Prediger mengundang mereka.

Setelah kegagalan itu dan seusai mempelajari keadaan, Prediger tiba pada suatu kesimpulan yang membawanya kepada keputusan untuk menempuh cara kekerasan. Pemikiran itu disampaikan kepada atasannya, Gubernur Maluku Carel Lodewijk Wieling. Dalam laporannya itu juga terkandung permohonan petunjuk pelaksanaan untuk mengatasi situasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Wakil Gubernur Maluku Erhard Christiaan Lantzuis tiba di Minahasa untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang ada. Setelah mendengar langsung penjelasan Prediger, Lantzuis menyetujui rencana Prediger untuk menggunakan cara kekerasan. Dengan segera persiapan rencana dan pembentukan pasukan untuk berperang dilakukan.

Sementara menanti bantuan yang diperlukan dari Ternate, Lantzuis berusaha untuk tidak mengeruhkan keadaan. Ia berusaha melakukan pendekatan kepada para *ukung* Minahasa. Seraya itu ia meyakinkan mereka bahwa pengerahan pemuda itu tidak memaksa. Ia mengusulkan untuk mengadakan pembicaraan dengan melakukan pertemuan di Kawangkoan dengan para *ukung* pada tanggal 20 Agustus 1808. Namun, gagasan itu tidak terlaksana karena jalan-jalan menuju tempat itu telah ditutup oleh pihak perlawanan dan kepala *walak* Kawangkoan, Tuyu, yang tidak bersedia menjadi tuan rumah perhelatan itu. Tuyu menyampaikan keberatannya melalui seorang utusan kepada Lantzuis. Sementara itu, kapal-kapal Inggris mulai memasuki perairan Manado yang memperlihatkan sikap tidak bersahabat.

Pada waktu itu pula, pihak *walak-walak* Minahasa melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Konsolidasi kekuatan dilakukan dengan mengirimkan pasukan ke Tondano untuk memperkuat pasukan yang ada. Pemimpin pasukan ditetapkan, yakni Tewu dari *walak* Tondano yang dibantu oleh Wailantukan, Walalangi, Rumaper, dan Rumambi. Mereka mengirim utusan ke Filipina melalui Atep, untuk memperoleh perlengkapan senjata. Situasi yang sedang berlangsung di Filipina mendukung maksud dan tujuan Minahasa. Ketika itu Inggris, yakni Raffles, memulai gerakan-gerakan penyusupan dalam upaya menyebarkan pengaruh di kepulauan Filipina, berawal dari Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Utusan itu kembali ke Minawanua dengan membawa serta senapan, meriam, dan amunisi yang diperoleh dengan cara barter.

Kontak senjata pertama antara Minahasa dan Belanda terjadi di daerah Tonsea Lama. Sebelumnya, sebuah serangan tiba-tiba menyebabkan Koya

berhasil direbut dan menewaskan bekas kepala *walak* Korompis dan membakar perkampungan Koya, yang berlanjut ke Tataaran tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Pasukan yang dipimpin Letnan Jacobus Helder membuka jalan bagi pasukan Levi Sanders melanjutkan serangan ke Tonsea Lama.[10] Sekelompok kecil pasukan Minahasa yang sedang membangun pertahanan di daerah itu mencoba menahan kedatangan pasukan Belanda. Di Tataaran, pasukan Belanda mendirikan markas komandonya. Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Minahasa tidak dapat menahan gerak maju pasukan Belanda. Sejumlah serdadu Belanda mendekati Temberan dan membendung aliran sungai itu. Pasukan Minahasa yang mengetahui bahwa Belanda telah membangun kubu pertahanan di Tataaran segera melakukan serangan. Dengan menggunakan meriam kaliber 6 pon, pertahanan Belanda itu dihujani tembakan-tembakan. Serangan itu mengejutkan pasukan Belanda yang tidak mengira pasukan Minahasa memiliki senjata seperti itu. Sebelumnya mereka menduga bahwa dalam pertempuran mereka akan menghadapi senjata tradisional (*inlandsche wapen*). Serangan itu menyebabkan pasukan Belanda, yang telah mendekati Danau Tondano, ditarik mundur. Selain itu, serangan tersebut mengubah rencana penyerbuan Belanda. Prediger mengirim utusan ke Minawanua dan mengundang para pemimpin Minahasa untuk mengadakan pertemuan.

Permintaan itu ditolak oleh pihak Minahasa. Namun, Prediger tidak menghentikan upayanya dan sekali lagi mengirimkan utusannya dengan maksud yang sama. Setelah penolakan yang kedua, pihak Minahasa mengabulkan permintaan Prediger dengan sejumlah syarat, yakni terutama bahwa pertemuan harus diadakan di Kakas atau Remboken, pembukaan kembali bendungan Sungai Temberan, dan penarikan pasukan Belanda dari Koya. Dalam pertemuan itu Minahasa diwakili oleh Tewu. Dalam pertemuan tersebut Tewu menyampaikan kembali hasil keputusan musyarawah Minawanua. Namun, Prediger tidak menanggapinya. Selanjutnya Prediger memberitahukan maksudnya mengadakan pertemuan. Ia menegaskan tidak mengakui adanya hubungan persahabatan Minahasa dan Belanda. Sikap ini selaras dengan garis kebijakan Daendels, bahwa Minahasa adalah taklukan Belanda. Ia menyerukan pula agar Tewu dan pemimpin Minahasa lainnya segera menyerahkan senjata-senjata mereka, berupa meriam yang telah dipakai untuk menyerang pertahanan Belanda. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka akan ditangkap dan

---

10 S.U. Marunduh, *op. cit.*, hlm. 119

ditahan di benteng Fort Amsterdam. Tewu dan kelompoknya segera menyadari adanya perangkap Belanda dalam pertemuan itu. Untuk itu, ia tidak boleh kehilangan hubungan dengan pemimpin Minahasa lainnya yang sedang bersiaga di benteng Minawanua. Ia mengirim seorang utusan kembali ke pertahanan itu. Tidak beberapa lama berselang, utusan itu membawa berita ke pertemuan bahwa meriam-meriam yang ada telah dibenamkan ke dalam lumpur. Namun, upaya mengulur-ulur waktu itu tidak mengubah keadaan. Prediger menangkap rombongan Minahasa yang hadir dalam pertemuan itu, terutama Tewu dan Sepang. Ikut ditangkap Korengkeng dan Keppel, tetapi tidak beberapa lama dilepaskan dengan alasan mereka tidak terlibat dalam gerakan perlawanan itu. Prediger beranggapan bahwa dengan menangkap pemimpin Minahasa, perlawanan akan lumpuh. Pada tanggal 23 Oktober pasukan Belanda menyerang kubu pertahanan Minahasa di Minawanua. Pasukan utama yang diangkut dengan dua buah perahu jenis tongkang dan tiga buah kora-kora diberangkatkan untuk memulai serbuan. Pasukan ini mencoba menerobos pertahanan Minahasa di hulu Sungai Temberan. Daerah itu penuh dengan parit-parit dan jebakan-jebakan. Gerakan pasukan Belanda didukung dengan tembakan-tembakan artileri dari Koya.

Pasukan Minahasa menyambut kedatangan pasukan Belanda dengan tembakan meriam. Sejumlah pasukan yang ditempatkan di atas perahu menyerbu pasukan Belanda yang berada di tongkang dan kora-kora. Usaha untuk menahan kedatangan perahu-perahu Belanda berhasil sehingga pasukan Belanda untuk sementara waktu tidak dapat meneruskan perjalanan mereka. Setelah konsolidasi dan pengerahan pasukan Belanda dilakukan, pasukan Minahasa tidak dapat menahan lebih lama lagi gerak maju musuhnya. Pertahanan Minahasa di hulu Sungai Temberan jatuh ke tangan pasukan Belanda. Dengan begitu, jalan masuk ke perkampungan telah terbuka. Pasukan Belanda terus menerobos masuk dan membakar permukiman yang dijumpai. Sekitar 48 rumah musnah ditelan amukan api. Perlawanan yang dilancarkan oleh pasukan Minahasa dapat diatasi oleh pasukan Belanda. Apalagi pada keesokan harinya, serbuan Belanda didukung penuh oleh hujanan tembakan artileri. Serangan meriam itu menyebabkan pasukan Minahasa sejenak mengundurkan diri. Serdadu Belanda sempat merasa di atas angin, ketika tidak menjumpai seorang pun prajurit Minahasa. Namun, keadaan itu tidak berlangsung lama, suatu serangan mendadak dilancarkan oleh pasukan Minahasa dari tempat persembunyian mereka, yang berhasil menahan gerak maju pasukan Belanda yang hendak menerobos ke jantung pertahanan Minawanua. Tiga serdadu pasukan Belanda menderita luka parah. Dua hari kemudian, nyawa

dua serdadu tidak dapat diselamatkan. Mereka tewas. Sergapan itu begitu menyulitkan posisi pasukan Belanda. Keadaan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pasukan Belanda diperintahkan untuk bergerak mundur.

Akibat peristiwa baku tembak itu, pihak Belanda menderita kerugian karena kehilangan lebih dari seratus serdadu, baik yang menjadi korban pertempuran maupun yang menderita luka. Mereka yang luka-luka dikirim kembali ke benteng Fort Amsterdam. Benteng pertahanan di Moraya sulit ditembus. Selain rintangan alam berupa rawa-rawa berlumpur, benteng itu juga dikelilingi oleh rintangan buatan berupa parit yang dipagari oleh bambu berduri dan bambu runcing yang ditancapkan dan disamarkan sedemikian rupa. Prediger melakukan kekeliruan saat membendung Sungai Temberan. Genangan luapan sungai itu membuat medan pertempuran menjadi sukar dilewati. Pasukan Belanda banyak yang tenggelam, hingga sebatas pinggang, dan oleh karena itu mereka tidak leluasa bergerak. Di pertahanan Koya, Prediger bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Veld dari Tonsea Lama. Ia memerintahkan Veld untuk membuka kembali bendungan Sungai Temberan. Setelah itu, Prediger kembali ke Tataaran bertemu dengan Lantzhuis. Ia melaporkan kepada wakil gubernur alasan menarik mundur pasukan. Medan pertempuran yang sulit berupa genangan air dan lumpur, dan juga kondisi pasukan yang tidak mendukung sebagai inti laporan Prediger, menurut Lantzhuis tidak masuk akal. Ia memerintahkan Prediger agar kembali mempersiapkan serangan berikutnya.

Serangan ke pertahanan Minahasa dilancarkan kembali. Pasukan Belanda menyerang dengan didukung oleh tembakan-tembakan artileri. Pasukan Minahasa menyambut serangan itu dengan pekik peperangan yang membahana. Mereka merangkak maju tanpa menghiraukan hujanan tembakan musuh. Pasukan Minahasa berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan mendesak mereka kembali ke perahu-perahu yang segera menjauhi daratan. Di perairan Danau Tondano, pasukan Minahasa terus menyerang dengan pasukan selamnya. Mereka memakai alang-alang sebagai alat bantu pernapasan selama di dalam air. Mereka bersenjatakan parang dan tombak. Tugas mereka adalah menenggelamkan perahu musuh. Dalam pertempuran itu, seorang kapten dan juru mudi perahu Belanda tewas, dan sebuah perahu kora-kora Belanda juga tenggelam. Pasukan Prediger yang berada di pertempuran sebelah barat juga mengalami kekalahan. Pasukan Minahasa terus mengejar pasukan Belanda hingga ke pertahanan mereka di Tataaran.

Pasukan Wendersteyd yang diperintahkan untuk mengangkat kembali kora-kora yang karam menemui kesulitan. Mereka diserang oleh prajurit Minahasa yang disebut "hantu-hantu danau" dan sangat ditakuti oleh

pasukan Belanda. Pasukan itu biasanya menyerang di malam hari, muncul dan menyergap pasukan Belanda. Kemunculan tiba-tiba itu mengejutkan pasukan Belanda. Mereka panik dan kucar-kacir menghadapi lemparan tombak dan tembakan senapan prajurit Minahasa. Serdadu Belanda yang lolos dari penyergapan itu menyingkir ke Tataaran, meninggalkan perahu dan tongkang mereka yang kemudian jatuh ke tangan pasukan Minahasa.

Kalangan serdadu Belanda diliputi ketakutan, khususnya terhadap "hantu-hantu danau". Dalam bayangan mereka, pasukan danau itu terdiri atas makhluk berbadan besar dan berbulu lebat dengan pekik sorak mengerikan yang menggentarkan semangat. Gambaran ini tidak seluruhnya benar. Memang pasukan Danau Minahasa memiliki keberanian dan semangat tempur yang tinggi. Mereka menempatkan boneka-boneka berbentuk manusia yang terbuat dari kulit batang pohon sagu yang ditaburi lumut, di haluan perahunya sebagai perisai. Ketika mendekati sasaran, perisai itu diambangkan di atas permukaan air, dan begitu mendekati jarak tembak diangkat bersamaan dengan teriakan perang. Di kegelapan malam, cara demikian menimbulkan kesan yang menakutkan bagi musuh.

Akibatnya, jumlah dan moral pasukan Belanda merosot. Prediger memerlukan waktu untuk menyusun kembali pasukannya. Bala bantuan pasukan didatangkan bersama dengan perlengkapan militer. Dalam rentangan waktu penantian, Prediger mengirim utusan ke Minawanua untuk menawarkan perundingan pada tanggal 2 November 1808. Sekembalinya utusan itu, Prediger mendapat laporan bahwa pihak Minahasa mengajukan tuntutan agar pemimpin mereka yang ditahan di benteng Fort Amsterdam segera dibebaskan. Menurut mereka, perundingan perdamaian tidak dapat dilakukan tanpa menyertakan para pemimpin yang ditahan itu. Prediger mengabulkan sebagian tuntutan itu, dengan membebaskan Korengkeng dan Kepel. Sementara Tewu dan Sepang tetap ditahan.

Minahasa tetap menuntut pembebasan Tewu dan Sepang. Mereka berencana membawa masalah itu dalam perundingan usulan Prediger. Mereka mengajukan usulan agar pertemuan dilakukan di Koya. Ketika itu pula, Prediger mengulang kembali janji pemberian hadiah uang untuk penangkapan pemimpin perlawanan Minahasa, seperti Lonto, Mamait, dan Lumingkewas. Mengantisipasi jebakan Belanda, Matulandi hadir dalam perundingan itu dengan pengawalan pasukan lengkap bersenjata. Melihat kedatangan Matulandi beserta pasukannya, Prediger mengurungkan maksudnya untuk bertatap muka langsung. Sebagai gantinya, ia menawarkan pembicaraan tidak langsung melalui kurir dari kedua belah pihak. Pada pembicaraan tidak langsung itu tidak ada hasil yang dicapai

selain kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan keesokan harinya. Prediger tidak menampakkan diri dalam pertemuan lanjutan itu. Ia diwakili oleh Herder dan Veld. Pihak Minahasa menyadari adanya maksud terselubung dari pihak Belanda. Oleh karena kecurigaan itu, Matulandi menolak bertemu dengan perutusan Belanda. Pertemuan itu gagal dan Matulandi segera kembali ke Minawanua.

Prediger menyadari bahwa rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga ia membuat rencana baru. Melalui kaki tangannya, Prediger menyebarkan kehendak Belanda untuk menciptakan perdamaian. Bersamaan dengan itu, berita pembatalan perintah penangkapan terhadap para pemimpin Minahasa, seperti Lumingkewas dan Matulandi, disebarluaskan. Sementara terhadap Lonto dan Mamait tidak ada perintah seperti itu. Tampaknya Prediger berusaha memecah belah persatuan *walak-walak* Minahasa, terutama antara Matulandi dan Lumingkewas dengan Lonto dan Mamait. Para pemimpin Minahasa segera mengadakan pertemuan untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 11 November 1808 itu disusupi oleh pengikut Prediger. Mereka telah mempersiapkan rencana untuk membelokkan tujuan pertemuan yang sebenarnya menjadi suatu ajang pernyataan kesetiaan kepada Belanda. Malahan, konsep pernyataan kesetiaan telah dipersiapkan dan dibuat sedemikian rupa seolah-olah dibuat oleh Matulandi dan Lumingkewas. Namun, usaha itu tidak berhasil. Lonto yang memimpin pertemuan itu tidak surut pengaruhnya. Ia meyakinkan *walak-walak* Minahasa untuk tetap memegang teguh kesepakatan sumpah Minahasa. Ia menandaskan bahwa pernyataan kesetiaan itu merupakan pengkhianatan terhadap sumpah mereka. Ia mengingatkan pula bagaimana Belanda mengkhianati para pemimpin Minahasa di masa sebelumnya yang belum pupus dari ingatan. Akhir pertemuan itu menghasilkan suatu pembaruan kesepakatan dan kesetiaan kepada Sumpah Minawanua. Selain itu, suatu rencana menggempur pertahanan Belanda di Tataaran disusun. Akan tetapi, rencana itu sempat bocor sehingga diketahui oleh pihak Belanda. Prediger segera mengeluarkan perintah untuk mengosongkan Tataaran dan menarik pasukannya mundur hingga ke Tomohon.

Prediger menyadari bahwa upayanya telah gagal. Ia mengundurkan diri dan berangkat ke Fort Amsterdam pada tanggal 13 November 1808. Dari benteng itu, ia melancarkan teror terhadap *walak-walak* di luar Tondano. Kediaman *ukung* Lonto di Kamasi, Tomohon, dibakar bersama sejumlah rumah lainnya. *Walak* lainnya juga tidak luput dari intimidasi Prediger agar memusuhi perlawanan Minawanua. Ladang pertanian mereka dirusak dan hasil panen dibakar karena penolakan keinginan

Belanda itu. Pada umumnya, *walak-walak* itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tindakan teror itu, antara lain disebabkan oleh sebagian besar kekuatan mereka berada di Minawanua. Kemudian Prediger mendatangkan bantuan dari benteng Belanda di Ambon dan Ternate. Sementara itu, pihak Minahasa juga menggalang tenaga memulihkan kembali kekuatan dan perlengkapan pasukannya, persediaan bahan pangan, amunisi, dan kebutuhan lainnya untuk menghadapi pertempuran berikutnya.

Pada bulan Maret 1809, pasukan Belanda bergerak menuju pusat perlawanan Minahasa di bawah komando Prediger. Pada tanggal 2 April 1809, pasukan Belanda diperintahkan untuk melakukan serangan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya, pasukan Herder tidak menjumpai perlawanan dalam gerak maju mereka. Kenyataan ini menimbulkan optimisme di kalangan serdadu Belanda, tetapi juga melengahkan kewaspadaan mereka. Mereka berhasil melintasi parit-parit di Moraya tanpa kesulitan yang berarti. Kubu pertahanan dan perkampungan yang ditemui dalam keadaan kosong karena telah ditinggalkan. Prediger memperkirakan akan memperoleh kemenangan dengan mudah dan tanpa pertumpahan darah. Untuk itu, ia memerintahkan pasukannya untuk tetap bergerak maju.

Tiba-tiba, pasukan Minahasa menyerbu pasukan Belanda. Serangan mendadak itu membuat pasukan Belanda kucar-kacir. Pada saat itu tentara Belanda sedang lengah sehingga tidak mengira akan mendapat serangan tiba-tiba. Selain itu, mereka memperkirakan pasukan lawan telah melemah karena tempat pertahanan yang telah ditinggalkan. Pasukan Minahasa menyerang musuh mereka dengan gagah berani dan semangat tempur yang tinggi. Penyerangan itu membuat Belanda kewalahan dan tidak ada jalan lain untuk mereka kecuali mundur. Malahan mereka tidak sempat membalas tembakan dan sergapan musuh. Akibatnya, Prediger tidak dapat mengendalikan pasukannya. Mereka kucar-kacir ke berbagai arah karena tidak sempat membalas kecuali berserabutan menyelamatkan diri. Sejumlah prajurit Belanda tewas dalam sergapan itu. Prediger pun hampir tewas dalam kancah itu. Ia terkena peluru yang ditembakkan oleh pasukan Minahasa sehingga terluka cukup parah di kepalanya. Segera ia dilarikan oleh pasukannya ke garis belakang, sampai ke Tataaran, untuk memperoleh perawatan.

Pasukan Herder menemui keadaan yang tidak jauh berbeda di perairan Danau Tondano. Seluruh armada kora-kora Belanda hancur oleh serbuan prajurit Minahasa. Pasukan Belanda berkumpul kembali di Tataaran untuk memulihkan kekuatan mereka. Pasukan Minahasa kembali berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Dalam laporannya, Letnan Herder

menggambarkan bahwa semangat tempur pasukan perlawanan sangat tinggi dan mereka memiliki persenjataan yang tidak kalah baiknya. Pasukan Minahasa tidak mengejar musuh hingga ke pusat pertahanan mereka di Tataaran. Tampaknya mereka menyadari bahwa medan perang yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu, Prediger dapat segera dilarikan ke Manado. Namun, kesehatannya kian memburuk sehingga komando diserahkannya kepada Letnan Herder. Belanda pun tidak melakukan kegiatan militer apa-apa terhadap pertahanan Minawanua. Untuk beberapa lama, tidak terjadi pertempuran. Pada tanggal 24 April 1809 komando pasukan beralih ke Letnan Herder, karena kondisi Prediger semakin memburuk sehingga harus dibawa ke benteng Fort Amsterdam. Ia digantikan oleh Martinus Balfour yang dibantu oleh Kapten Weintre. Mereka tiba di Manado pada tangal 8 Juni 1809 dan segera mengambil alih kekuasaan dan tugas Prediger.

3. Akhir Perang

Intimidasi Belanda terhadap *walak-walak* yang bermukim di luar wilayah Tondano memberikan hasil yang diinginkan. Jalur-jalur penyaluran kebutuhan untuk *walak-walak* yang berjuang di Minawanua mulai terganggu. Hubungan perdagangan Minahasa dengan Inggris melalui Kema diketahui oleh Belanda. Kapten Don Escarilla, nakhoda kapal berbendera Inggris yang dikenal sebagai pemasok kebutuhan persenjataan perlawanan disergap beserta kapalnya di perairan Teluk Manado. Selain itu, penyediaan kebutuhan pangan yang bersumber dari kawasan sebelah timur Danau Tondano dan wilayah selatan Minahasa juga berada di bawah penguasaan Belanda sehingga penyalurannya tersendat-sendat. Salah satu dampaknya adalah banyak penduduk di wilayah perlawanan yang dianjurkan untuk mengungsi ke daerah yang cukup pangan.

Balfour mempersiapkan pasukannya untuk merebut jantung pertahanan perlawanan. Ia mengangkat Kapten Weintree yang berpengalaman tempur di Halmahera sebagai pucuk pimpinan pasukan Belanda. Ia tidak mengadakan serangan langsung ke Minawanua seperti halnya Prediger. Akan tetapi, sebelumnya ia mengadakan teror dan operasi militer di sekitar Danau Tondano. Sementara itu, Kapten Weintree tetap melancarkan tekanan dan teror terhadap *walak-walak* yang masih membangkang. Letnan Herder meningkatkan patroli di danau untuk memutuskan hubungan pertahanan musuh dengan Minahasa Selatan. Menghadapi taktik seperti itu, pasukan perlawanan Minahasa mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Namun, mereka tetap melancarkan taktik

dan strategi ofensif dengan menggunakan siasat menyergap dan menghilang. Namun, satu per satu jalur menuju jantung pertahanan mulai terisolasi karena Balfour memerintahkan menutup jalur ke arah barat yang melewati danau ke arah selatan, dan jalan ke sebelah utara dan timur berada di bawah pengawasan pasukan musuh. Pemutusan jalur logistik dengan menutup semua jalan keluar membuat para pemberontak harus memikirkan alternatif lainnya. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat bertahan, seperti dengan mengolah makanan termasuk mengolah sagu sebagai bahan makanan tambahan karena persediaan beras kian menipis. Para pemimpin Minahasa berusaha menembus blokade Belanda itu, termasuk *ukung* Lonto yang mencoba menyusup ke *walak* Remboken untuk menggalang penyediaan dan pemasukan beras untuk pasukan dan pengikutnya. Namun, dalam perjalanan pulang usaha *ukung* itu diketahui musuh. Ia tertangkap walau telah berusaha menyamar untuk mengelabui pasukan Belanda.

Setelah melakukan persiapan yang matang, pasukan Belanda kembali menyerang Tondano pada dini hari tanggal 5 Agustus 1809. Mereka langsung menuju sasaran utama berupa tempat berada kanon-kanon yang telah diketahui. Selanjutnya, mereka bergerak maju ke Minawanua, memasuki dan membakar perkampungannya. Dengan kekuatan yang tersisa, benteng Moraya melakukan perlawanan terakhirnya. Tembakan meriam sebagai pelindung pendaratan dan gerak maju pasukan, menandai mulainya pertempuran. Menghadapi gempuran itu pasukan Minawanua telah bersiap menyambutnya. Selama empat hari serangan pasukan Belanda datang bergelombang seolah-olah tiada putusnya. Benteng Moraya dan Papal mengalami kehancuran. Korban pun berjatuhan. Pertahanan Minawanua berhasil ditembus, Kapten Weintree memasuki perkampungan. Pertempuran habis-habisan berlangsung dengan cara berhadap-hadapan. Temu senjata yang menentukan hidup dan mati bagi pasukan Minawanua itu terjadi sekitar satu jam. Pasukan Belanda membantai semua makhluk yang dijumpainya, tidak peduli apakah orang sakit, cedera, jompo, kanak-kanak, atau perempuan. Pertahanan Minawanua selanjutnya dibumihanguskan. Penjarahan dari apa yang tersisa pun terjadi. Perlawanan kemudian beralih di luar benteng pertahanan di Tondano. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa-sisa pasukan Minahasa masih bertahan di hutan-hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau. Pengejaran pasukan Belanda banyak mengalami kendala dalam menerobos keadaan alam itu untuk dapat menangkap sisa-sisa pasukan perlawanan itu.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan amnesti atau pengampunan kepada pihak pemberontak asalkan mereka mau berjanji mengakui kekuasaan Belanda. Namun, para pemimpin perlawanan seperti
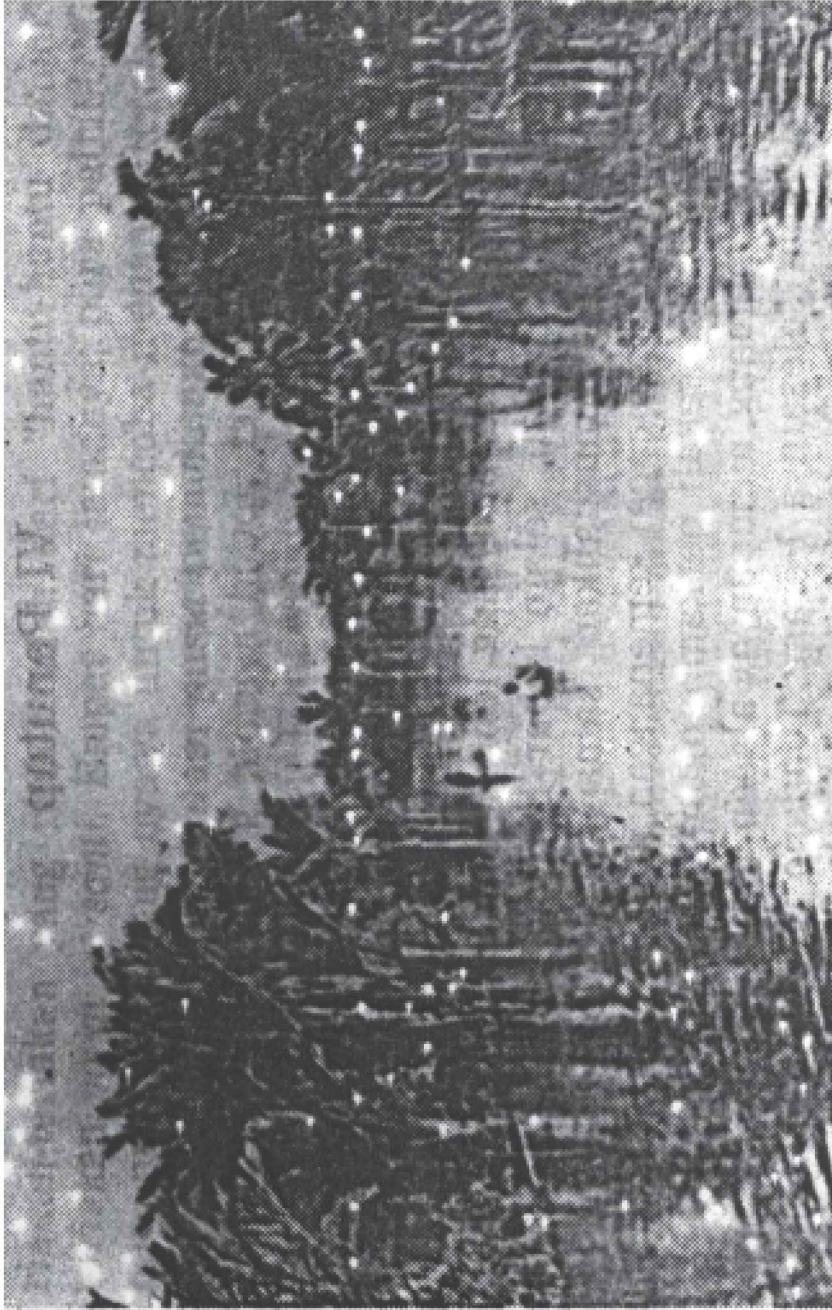
Gambar 5.1 Temberan di dekat hulu Sungai Tondano
Di sini pernah terdapat suatu permukiman para patriot yang habis dimusnahkan Belanda dalam Perang Tondano II. Di sini letaknya Winawanua. Tampaknya tenteram, padahal seabad yang lalu tempat ini pernah menjadi "neraka" di mana para pejuang Winawanua telah mendemonstrasikan "Semangat Anoa". (Foto: M. Hamerster, tahun 1915)
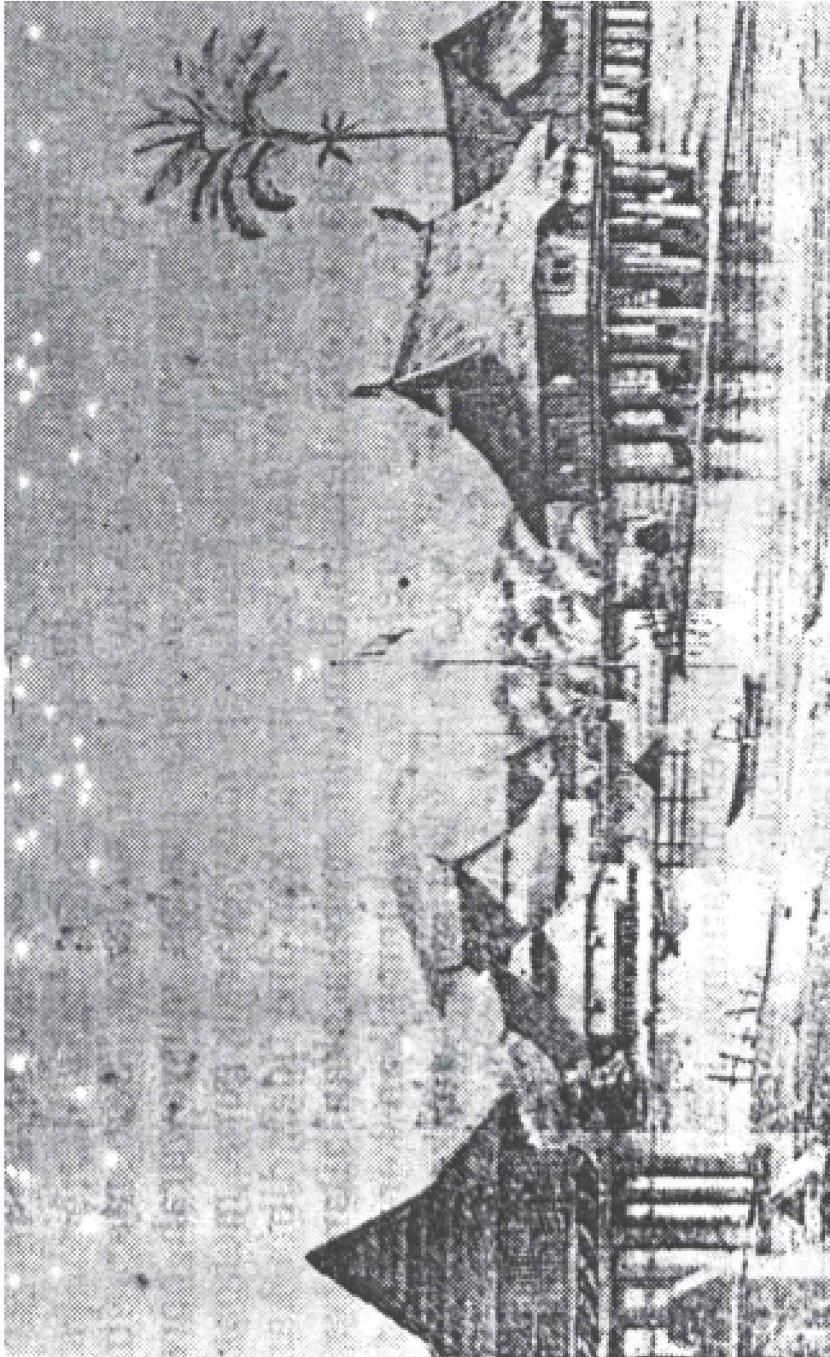
Gambar 5.2 Rumah-rumah di Tondano
Beginilah keadaan Tondano sewaktu kedatangan Prof. Reinwardt pada tahun 1821.
Tondano didirikan pada zaman pendudukan Inggris dan ditahbiskan oleh Residen Nelson pada tahun 1812.
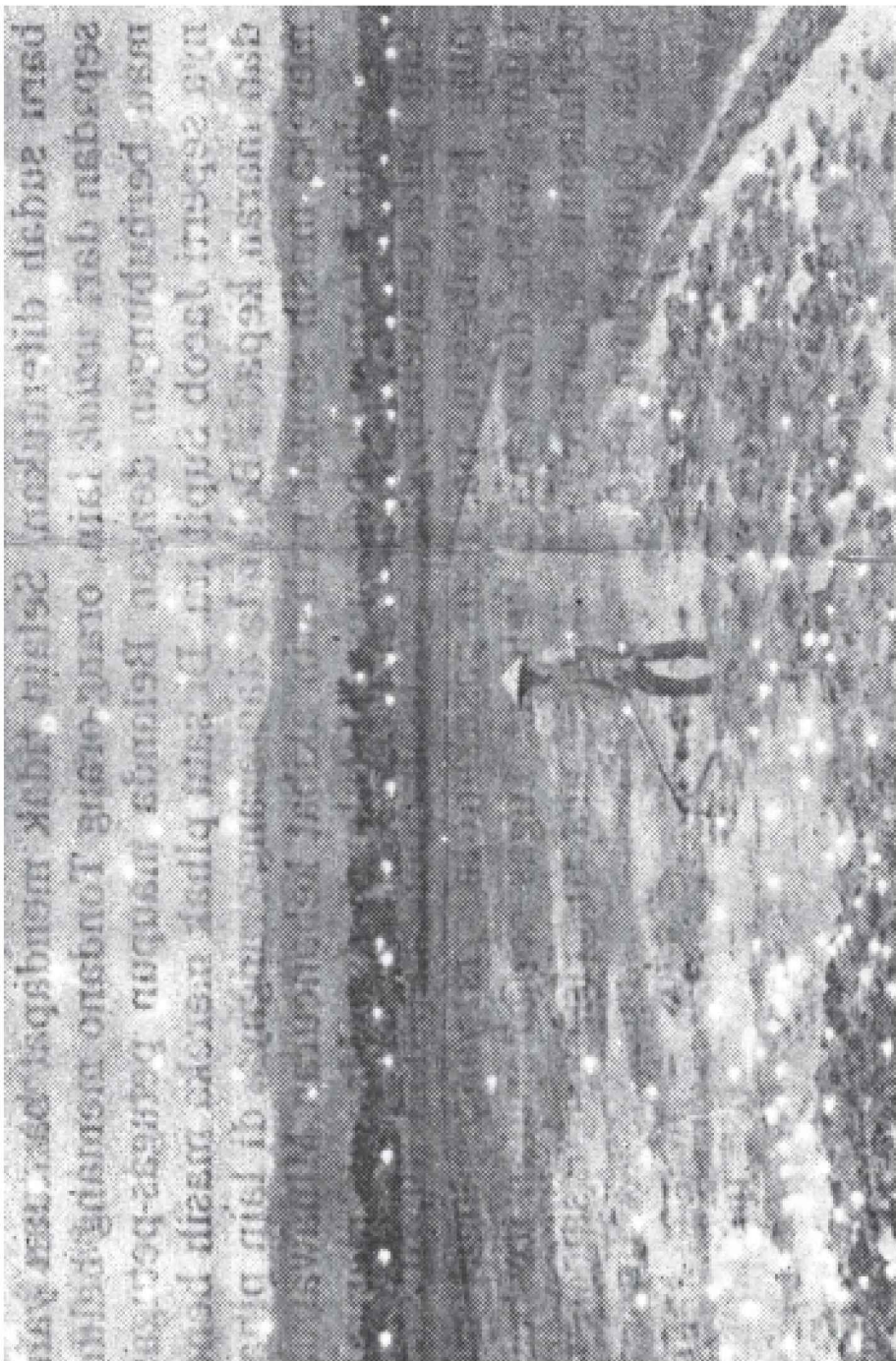
Gambar 5.3 Minawanua Gelora Hidup Kami

Lumingkewas, Matulandi, Mamait, dan Lonto tidak termasuk dalam penganugerahan itu. Selanjutnya, Jacob Supit ditunjuk untuk menjadi pemimpin mereka yang bersedia menyerah itu. Balfour juga mengusulkan kepada atasannya agar mereka diizinkan untuk membangun kembali permukiman baru di dekat Maumbi, Air Madidi, dan pinggiran Sungai Tondano dengan pemikiran agar mudah diawasi. Akan tetapi, gagasan ini tidak terwujud karena pihak Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di tanah Minahasa pada tahun 1810.

Pihak Inggris memanggil Matulandi dan Mamait dari persembunyian mereka di hutan. Inggris mengangkat mereka kembali sebagai kepala *walak* Tondano dan Remboken. Sementara itu, Tewu, Sepang, dan Lonto yang dibuang di Ternate dikembalikan ke Minahasa. Para mantan pemberontak itu malah diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama yaitu sebelah utara Minawanua. Di sebelah kiri Sungai Tondano adalah untuk orang Touliang dan di sebelah kanan untuk orang Toulimambot. Kediaman itu mereka sebut sebagai kota Tondano.

B. Maluku Tengah

1. Pendahuluan

Paling kurang ada tiga buah dokumen yang ditulis orang-orang Ambon pada masa perlawanan Pattimura. Mengapa mereka melawan kekuasaan Kolonial dalam tahun 1817 dibeberkan dalam dokumen-dokumen yang ditulis dengan huruf Latin bahasa Melayu itu. Selain itu, gubernur Belanda yang dianggap bersalah dalam peristiwa ini, baik oleh orang-orang Ambon maupun oleh pejabat-pejabat di Batavia, juga meninggalkan laporan mengenai sebab-musabab terjadinya perlawanan tersebut. Demikian pula dengan Komisaris Engelhard yang mendampingi gubernur, serta Admiral Byuskes yang didatangkan dari Batavia.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyusun suatu uraian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa perlawanan Pattimura di Maluku Tengah. Setelah merebut pusat pemerintahan Hindia Belanda di Saparua, para pengikut Pattimura Thomas Mattulesy mengeluarkan suatu pernyataan yang ditujukan pada pihak musuhnya. Di dalam pernyataan tertanggal 29 Mei 1817 itu Pattimura ikut menegaskan bahwa orang-orang Ambon menuntut perbaikan-perbaikan di Maluku Tengah. Jika perbaikan-perbaikan yang disebut satu per satu di dalam pernyataan dapat dipenuhi, perlawanan akan dihentikan. Akan tetapi, jika tuntutan-tuntutan itu tidak dapat dipenuhi, dengan sendirinya penduduk Maluku

Tengah tidak akan mengakui hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda lagi.[11]

Sejak VOC menguasai Maluku dalam abad ke-17, timbul permukiman-permukiman baru dengan nama "negeri" di daerah pantai Kepulauan Maluku Tengah. Berangsur-angsur muncul suatu struktur sosial di negeri-negeri yang merupakan gabungan antara unsur-unsur sistem budaya lama dengan unsur-unsur yang dimasukkan oleh VOC.[12] Masyarakat negeri di pantai Kepulauan Ambon-Uliase mendapat hak atas tanah (dati) untuk perkebunan-perkebunan cengkih, di samping tanah-tanah pusaka milik keluarga masing-masing. Hasil cengkih setiap dati dijual kepada VOC dengan harga tertentu, sedangkan hasil tanah pusaka berupa bahan makanan dipakai oleh keluarga (famili) yang mengerjakannya. Selain itu, VOC juga mengembangkan suatu sistem pemerintah desa (negeri) serta sistem pendidikan desa. Jika para penguasa desa mempunyai ikatan kekerabatan dalam desa (negeri) masing-masing, para guru desa selalu dipindah-pindahkan dari satu desa ke desa lainnya.

Sistem perkebunan cengkih, sistem pemerintahan desa, dan sistem pendidikan desa, merupakan unsur-unsur yang mengikat kehidupan penduduk Ambon-Lease dengan serasi.

Selain dampak positif, terasa pula kepincangan-kepincangan yang ditimbulkan sistem-sistem itu. Ekspedisi Hongi yang dilaksanakan VOC setiap tahun, umpamanya, lebih banyak merupakan tragedi dalam sejarah Maluku. Ekspedisi yang terdiri atas kora-kora (perahu perang) milik masing-masing negeri di kepulauan Ambon-Uliase, dimaksudkan untuk mengawasi Pulau-pulau Seram, Buru, Manipa, dan lain-lain yang dilarang menghasilkan cengkih. Setiap pohon cengkih di pulau-pulau tersebut ditebang oleh serdadu-serdadu VOC yang diangkut armada kora-kora tersebut. Selama berlangsungnya ekspedisi itu, banyak pemuda negeri yang menjadi pendayung kora-kora meninggal karena kekurangan makanan, atau dibunuh musuh. Selain itu, waktu yang digunakan sering melebihi waktu yang disepakati, yaitu tiga bulan dan kebetulan jatuh pada masa panen cengkih (akhir tahun) tatkala tenaga mereka justru dibutuhkan di dati masing-masing.

---

[11] P.H. van der Kemp, *"Nederlands-Indische Bestuur in het Midden van 1817"*, (Martinus Nijhoff), 1915, hlm. 29–32

[12] Mengenai hal ini lihat tulisan-tulisan dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku I*, Jakarta, Lembaga Sejarah Maluku, 1917

Kepincangan lain sistem yang dibangun VOC di Maluku Tengah ini adalah korupsi.[13] Sejak bagian kedua abad ke-18, penyakit ini mulai menjalar di kalangan pejabat-pejabat Belanda. Mental pedagang yang merupakan ciri bekas pejabat-pejabat Belanda pada abad ke-17, mulai berganti dengan mental pegawai pemerintah dalam abad ke-18 sehingga untung rugi perusahaan sebagai pendorong utama, berganti dengan usaha memperkaya diri masing-masing. Para residen di daerah-daerah menjual suplai bahan-bahan keperluan yang disalurkan VOC ke daerah-daerah dengan harga yang menguntungkan.[14]

Hukuman denda (uang) yang dituntut pengadilan negeri di Ambon atas penduduk yang melakukan pelanggaran hukum, dibayar oleh residen yang bersangkutan, yang kemudian memotong jumlah ini ditambah suatu jumlah tertentu untuk kepentingan sendiri, dari hasil penjualan cengkih orang-orang yang bersangkutan.

Pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturan lain yang dilakukan pejabat-pejabat tersebut meliputi hampir seluruh segi kehidupan perdesaan. Akan tetapi, di dalam pernyataan pengikut-pengikut Pattimura tersebut, hanya disebut tindakan-tindakan para pejabat yang mulai memerintah pada bulan Maret–April 1817. Pejabat-pejabat ini mengambil alih pemerintahan Maluku Tengah dari tangan pejabat-pejabat Inggris yang memerintah sejak tahun 1810.[15] Rencana-rencana mereka menggelisahkan rakyat. Penyederhanaan sistem pendidikan dengan menghapuskan sekolah-sekolah desa dan memusatkannya di satu atau dua negeri di setiap pulau, didesas-desuskan oleh orang-orang Ambon sebagai usaha menghapuskan seluruh sistem itu. Sekalipun interpretasi yang dilakukan tidak benar, dan ternyata rencana penyederhanaan dilakukan oleh sejumlah pejabat yang belum mengenal daerah itu, hal itu membuat desas-desus tersebut menjadi sumber keresahan.

Leverantie bahan bangunan juga merupakan sumber penyalahgunaan. Kewajiban ini merupakan suatu bagian dari sistem VOC sejak pertengahan abad ke-17, dan disempurnakan dalam masa-masa berikutnya. VOC mewajibkan negeri-negeri tertentu di Ambon dan Uliase untuk menyediakan bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan untuk perbaikan kapal-

---

[13] Korupsi sebagai sebab utama pemberontakan diuraikan oleh Laksamana A.A. Buijskes dalam "Rapport Kedung Alang"-nya tertanggal 10 Oktober 1818 (Arsip Nasional RI, Nomor 186)

[14] Tentang adanya perdagangan oleh para residen disebutkan Bujskes dalam laporan tersebut dalam catatan Nomor 3

[15] Menurut C. van den Berg van Saparoea (lihat catatan Nomor 20), Residen van den Berg termasuk orang-orang yang tidak menyetujui rencana itu

kapalnya. Bahan-bahan itu ditebang di Seram dan diangkut ke Ambon oleh negeri-negeri tersebut. Dalam masa pendudukan Inggris yang berlangsung sepuluh tahun itu, paksaan ini dihapus dan seluruh *Leverantie* bahan bangunan dibayar oleh pihak Inggris. Namun, pejabat-pejabat Belanda yang menggantikan pada pertengahan tahun 1817 menghidupkan kembali sistem lama sekalipun dengan jumlah bayaran yang tidak memuaskan penduduk.[16]

Ada beberapa tindakan lain yang oleh penduduk dianggap tidak pantas. Perintah Gubernur van Middelkoop pada penduduk Ambon-Lease untuk membuat garam dan ikan asin bagi keperluan kapal-kapal perang Belanda yang sedang berlabuh di Ambon, dianggap perbuatan sewenang-wenang. Membuat garam dan ikan asin tidak pernah menjadi kewajiban sebelumnya. Hanya karena kebetulan pada saat itu hubungan dengan Batavia sangat sulit sehingga penyediaan bahan makanan bagi keperluan tentara dan pegawai Belanda juga terlambat, membuat van Middelkoop mengeluarkan perintah ini. Perintah ini dianggap memberatkan karena kerja rodi lain tidak dikurangi. Bayaran yang kecil jumlahnya untuk hasil ikan asin dan garam terutama ditolak oleh penduduk Saparua.[17]

Sumber keresahan lainnya yang disebut oleh pengikut-pengikut Pattimura adalah sirkulasi uang kertas. Sejak masa VOC, penduduk selalu menerima uang logam untuk hasil penjualan cengkih mereka. Uang kertas mulai diintroduksi Daendels di Jawa dan pada tahun 1817 di Ambon. Pernyataan pengikut-pengikut Pattimura menjelaskan adanya penyelewengan dalam hal ini. Pejabat-pejabat daerah membayar hasil cengkih dengan uang kertas, tetapi penduduk yang membeli bahan-bahan kebutuhan seperti tekstil di toko-toko pemerintah, diwajibkan membayar dengan uang logam.[18] Lama-kelamaan uang logam habis dari peredaran dan penduduk mulai panik karena belum percaya pada alat bayar dari kertas itu. Tidak ada usaha untuk mengatasi keguncangan-keguncangan perasaan ini dari pejabat gubernemen.[19]

Soal uang kertas terutama ditekankan dalam "Pernyataan Hatawano"[20] (Saparua Utara) ketika diadakan perundingan dengan pihak

---

[16] Perhitungan mengenai harga-harga bahan bangunan itu, antara lain dibuat oleh Mr. A. Idema, "De Oorzaken van den Opstand van Saparoea in 1817", *BKI*, 79, 1923

[17] *Ibid.*

[18] Menurut Idema, kelemahan sistem moneter pada saat itu adalah kurangnya tempat-tempat penukaran uang. Hanya di kota-kota Ambon, Ternate, dan Banda terdapat kantor penukaran uang

[19] R.Z. Leirissa, *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Jakarta, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1975, hlm. 45

[20] van der Kemp, "Het Herstel van het Nederlands gezeg in de Molukken in 1817" 65–66, 1911, hlm. 670

Belanda pada bulan Juli 1817. Dalam perundingan ini, antara lain disebut bahwa uang kertas tidak dapat dipergunakan untuk memberi sumbangan di gereja (tabung diakoni yang dibuat khusus untuk uang logam). Menurut *Pernyataan Hatawano*, mereka yang menolak menerima uang kertas akan dirantai dan diangkut ke Batavia. Selain menguraikan adanya hambatan-hambatan yang dikenakan atas kegiatan para guru desa yang juga mempunyai kewajiban mengasuh upacara-upacara agama Kristen, penduduk Hatawano juga menuntut dikirimnya dua orang pendeta. Pelayanan upacara-upacara keagamaan oleh pendeta-pendeta Belanda sudah terhenti jauh sebelum pendudukan Inggris.[21] Pihak Inggris yang mengerti penduduk dalam soal ini menyediakan seorang pendeta (Inggris) sebagai penggantinya. Hal ini tidak dilakukan para pejabat yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Maret 1817.

Suatu sumber keresahan lainnya adalah paksaan atas pemuda-pemuda negeri untuk menjadi *soldadu* di Jawa. Sejak awal abad ke-17 sudah ada orang Ambon yang menjadi anggota tentara VOC[22], tetapi jumlahnya berkurang sejak pertengahan abad ketika Daendels tiba di Batavia (1808) dengan rencana-rencana pertahanannya. Ia memerlukan pemuda-pemuda untuk "milisi"-nya. Sejumlah pemuda Ambon dan Pulau Saparua diangkut dengan cara paksa. Tindakan sewenang-wenang inilah yang tidak disetujui. Selain itu, pengalaman pahit Daendels menyebabkan orang menganggap pekerjaan *soldadu* sebagai suatu hukuman buangan.[23] Mungkin dalam pandangan penduduk praktik ini disamakan dengan kewajiban Hongi.

Pattimura menyebut persoalan paksaan menjadi serdadu Batavia sebagai sumber keresahan yang penting di samping tindakan-tindakan penyederhanaan sistem pendidikan.[24] Laporan dari Johanis Risakotta, seorang guru dari negeri Porto,[25] malah menyebut persoalan ini sebagai dorongan utama yang menimbulkan perlawanan di Saparua.

---

21 Lihat umpamanya, "Some account of the island of Amboina at the time they were taken by us with sugestion towards their better management in Case of our keeping per-possessions of them", diterbitkan oleh Mr. J.E. Heeres, *BKI*, 60 (1908), hlm. 314–365

22 Umpamanya biografi Jonker oleh van der Chijs

23 Menurut Buijskes, dalam laporannya, kekeliruan yang dibuat oleh Daendels maupun van Middelkoop adalah tidak diberikannya jaminan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini merupakan salah satu sebab mengapa orang pada waktu itu segan menjadi di luar Ambon

24 P.H. van der Kemp, *op. cit.*, 1915, hlm. 29

25 Naskah laporan Risakotta (di dalam van der Kemp dinamakan "Rapport Porto") diperoleh dalam bentuk fotokopi. Selama perlawanan tersebut, Risakotta, guru di Porto bersikap netral. Ia membuat laporan itu atas permintaan Residen Ambon de Neijs

Pattimura adalah nama samaran Thomas Matulesy yang pernah menjadi sersan mayor dalam tentara milisi Inggris di Ambon ketika Inggris untuk sementara menduduki Kepulauan Maluku. Ketika Maluku diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1817, Matulesy dan kawan-kawannya diberhentikan dan mereka pulang ke kampung masing-masing. Matulesy mengunjungi Saparua dan bertemu dengan sejumlah pemuda setempat yang sedang dilanda rasa khawatir terhadap kebijakan milisi Belanda. Adiknya juga tidak luput dari perasaan itu, yang kemudian memengaruhi Matulesy. Kekhawatiran itu bersumber pada kabar bahwa para pemuda akan diangkut secara paksa untuk menjadi serdadu Belanda di Pulau Jawa. Kabar seperti itu menimbulkan bayang-bayang rasa takut. Oleh karena itu, mereka membulatkan tekad untuk menentang kebijakan itu dan mengadakan perlawanan.[26]

2. Jalannya Perang

Sejak awal bulan Maret 1817 pelbagai kelompok penduduk Maluku Tengah sudah mulai mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan situasi baru akibat adanya rencana-rencana pemindahan kekuasaan dari tangan Inggris kepada Belanda. Pertemuan-pertemuan yang membicarakan hal ini dilakukan secara rahasia di pelbagai tempat. Di Pulau Haruku, umpamanya, pertemuan semacam itu dilakukan di suatu tempat yang dinamakan Umekau. Di Pulau Saparua pertemuan-pertemuan pertama dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan Hutan Kayuputih. Pertemuan-pertemuan ini sudah barang tentu diketahui oleh Residen Uitenbroek di Haruku, Residen van den Berg di Saparua, serta Residen Burggraaf di Hitu, dan melalui mereka sampai pula ke Gubernur Middelkoop di Ambon. Namun, pejabat-pejabat tersebut tidak dapat menerima kenyataan bahwa di pelbagai tempat ada masyarakat yang merencanakan semacam "huru-hara". Dengan demikian, pembicaraan demi pembicaraan diadakan dan hubungan antara pelbagai pihak di daerah kepulauan Maluku Tengah mulai terjalin.

Pada pertemuan tanggal 14 Mei 1817 di Pulau Saparua, para pemuda dan penguasa-penguasa desa (raja atau patih dan orang kaya) memutuskan untuk menghancurkan pusat kekuasaan kolonial di benteng Duurstede yang terletak di Pulau Saparua. Keputusan yang sangat dirahasiakan ini

---

[26] R.Z. Leirissa, *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Jakarta, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1975, hlm. 46

diteruskan kepada setiap negeri di pulau itu. Selain itu, dalam musyawarah di tempat itu mereka juga memilih Thomas Matulesy sebagai pemimpin perang dengan julukan Pattimura.

Nyaris rencana penyerbuan Duurstede buyar karena beberapa golongan pemuda dari desa Porto tidak sabar. Malam hari tanggal 14, kelompok pemuda ini mendatangi dan membongkar *orambay pos* (perahu milik pemerintah) yang sedianya akan mengangkut kayu bahan bangunan dari Porto ke Ambon. Keesokan harinya Residen van den Berg berkuda dari benteng Duurstede ke Porto dengan maksud membereskan masalah itu. Akan tetapi, para pemuda lalu menangkapnya di Porto. Hanya karena Kapitan Pattimura berhasil menengahi persoalan ini, Residen van den Berg lolos dari tangan para pemuda dan berhasil dipulangkan ke Duurstede.[27]

Pada malam hari itu juga para pemuda mulai berdatangan ke sekitar benteng Duurstede dan pagi harinya tanggal 15 Mei tembakan-tembakan mulai dilancarkan. Tidak lama kemudian, Kapitan Pattimura pun tiba untuk memimpin penyerbuan ke arah Duurstede. Dua kali penyerbuan dilakukan tanpa hasil. Tembakan-tembakan meriam dari arah benteng tidak dapat ditandingi para pemuda yang hanya bersenjatakan beberapa bedil, pedang, tombak, dan lain-lain. Namun, karena tembakan-tembakan tersebut itu benteng habis dan akhirnya tentaranya terpaksa menyerahkan diri. Setiap penghuni benteng tersebut, termasuk Residen van den Berg beserta keluarganya tewas, kecuali putranya yang berumur lima tahun.

Jatuhnya Duurstede bagi Belanda merupakan suatu pukulan yang besar. Oleh sebab itu, tidak lama kemudian mereka menyusun suatu kekuatan untuk merebutnya kembali. Pasukan yang dipimpin Mayor Beetjes itu tiba di Saparua pada tanggal 20 Mei 1817. Perjalanan mereka memang sangat menyedihkan. Di Pulau Ambon tidak ada desa yang bersedia menyerahkan perahu-perahunya untuk mengangkut pasukan Beetjes ke suatu tempat di hutan-hutan. Setelah bersusah payah mereka sampai di Pulau Haruku di mana terdapat benteng Zeelandia. Di sini pun tidak ada negeri yang berani menyerahkan perahu-perahu untuk mengangkut mereka ke Saparua.[28] Dengan susah payah akhirnya Residen Uitenbroek berhasil memperoleh satu *kruisarombai* (rembaya perang) dan 6 *arombay* biasa untuk mengangkut sekitar 100 orang pasukan Beetjes Saparua.

Pasukan Beetjes tiba sekitar pukul 11.00, angin musim barat yang terkenal dengan ombaknya yang dahsyat dari arah Laut Banda,

---

[27] *Ibid.*

[28] Surat Gubernur 25/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

menyebabkan Beetjes tidak mudah mencari tempat pendaratan. Akhirnya, dipilih Pantai Waisisil di sebelah barat Duurstede. Namun, tempat itu justru menjadi tempat yang ideal untuk menahan suatu pendaratan.

Sejak armada *arombay* Beetjes memasuki Teluk Saparua, Kapitan Pattimura sudah bersiap-siap dengan strateginya.[29] Seluruh pasukan diaturnya sepanjang pantai. Setiap gerakan armada diikuti oleh pasukan itu dengan cermat. Sekitar 1.000 orang yang sebagian bersenjatakan bedil dan sebagian lagi bersenjatakan pedang dan tombak segera dikonsentrasikan di tempat pendaratan. Pendaratan pasukan Beetjes sendiri berjalan dengan lancar.

Sebenarnya salah satu pasukan tersebut sudah berhasil membuka jalan sampai ke Sungai Waisisil. Namun, Beetjes tidak menyadari hal ini. Tanda mengundurkan diri dibunyikan sehingga semua pasukan tersebut bergegas kembali ke *arombay*. Namun, pengunduran yang tidak teratur ini malah menyebabkan kehancuran Beetjes. Para pengayuh *arombay* yang terdiri atas penduduk desa berusaha menyelamatkan diri setelah melihat pasukan-pasukan Pattimura mulai menyerbu pantai. Dengan demikian, hampir seluruh pasukan Beetjes musnah di Waisisil, termasuk Beetjes sendiri. Kekalahan yang kedua kali ini lebih lagi menimbulkan kegemparan di kalangan pemerintahan Belanda.

Sebenarnya, segera setelah menyerbu Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817 Pattimura sudah merencanakan penyerbuan ke arah benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Pemberitahuan sudah dikirimnya ke Hulaliu (Haruku). Surat itu kemudian diteruskan ke desa-desa Oma, Samet, dan desa lainnya. Sampai di desa Haruku surat itu diserahkan kepada Residen van den Berg oleh Raja Haruku yang memang memihak kepada Belanda. Penundaan penyerbuan ke Zeelandia bukan disebabkan oleh hal itu. Pada hari surat itu beredar, yaitu tanggal 19 Mei, armada Beetjes pun tiba di Haruku dan berita mulai tersiar mengenai tujuan sebenarnya pasukan Beetjes. Sesungguhnya pada hari itu Kapitan Pattimura sudah bersiap memimpin suatu pasukan pula dari Haria (Saparua) untuk membantu merebut Zeelandia. Malah desa-desa yang menerima suratnya itu sudah mulai mengirimkan pasukan-pasukannya ke desa Pulau yang dijadikan tempat berkumpul oleh Pattimura.[30]

---

[29] Surat Uitenbroek 30/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[30] Surat Uitenbroek 23/5/1817; Surat Isak Mustamu guru Abubu dan surat Matheus Mahasiswa Kepala Soa Abubu (Arsip Nasional RI, Ambon 563)

Setelah armada Beetjes dihancurkan sejak 25 Mei 1817, rencana penyerbuan Zeelandia dihidupkan lagi. Desa-desa yang memihak kepada Kapitan Pattimura mengirimkan pasukan-pasukannya ke Pulau bersama para kapitannya. Pattimura pun mengirimkan sejumlah kapitan dari Saparua untuk membantu penyerbuan di Haruku. Penyerbuan pertama dilangsungkan pada tanggal 30 Mei. Pasukan-pasukan disebar di desa-desa Pelau, Hulaliu, Aboru, dan ditaksir berjumlah 100 orang.[31] Kemudian bantuan dari Saparua juga tiba sekitar tanggal 27 Mei.[32] Kemudian dilaporkan bahwa di Kabau saja sudah terkumpul sekitar 500 orang.[33]

Bersama dengan persiapan-persiapan itu, Uitenbroek juga melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi pertikaian. Dibentuknya sebuah komisi yang terdiri atas Raja Sameth, bekas Raja Hulaliu, dan guru dari Oma, untuk mendekati kepala-kepala desa di Pulau Haruku dan Samet, pada saat-saat awal ini memihak kepada Belanda bersama desa Haruku.[34] Cara lain yang dijalankan Uitenbroek untuk memengaruhi para penguasa desa adalah dengan mengirimkan hadiah-hadiah. Ketiga desa tersebut di atas, umpamanya, diikat dengan pemberian beberapa balok kain putih sebagai tanda perdamaian.[35] Masalah ini juga mendapat perhatian dari Gubernur Middelkoop sendiri. Dianjurkannya kepada Uitenbroek agar membayar gaji para guru yang selama ini belum dibayar sebagai usaha untuk menarik golongan ini ke pihaknya.[36] Sudah lama memang tersiar berita bahwa Belanda bermaksud meniadakan jabatan-jabatan guru di beberapa tempat di Maluku Tengah. Seperti dibentangkan di atas, masalah ini merupakan salah satu sumber keresahan. Usaha-usaha lain dari Uitenbroek adalah mendatangkan bala bantuan tentara. Pada tanggal 25 Mei, kapal *Zwaluw* yang disewa dari pihak Inggris membuang jangkar di sekitar perairan Haruku. Kapal inilah yang berhasil menahan sebagian dari serangan-serangan pasukan Pattimura. Kemudian bantuan-bantuan pasukan dan senjata mengalir pula ke Zeelandia sehingga pasukan di sana berkekuatan 100 orang yang dipimpin Kapiten van Driel dengan sejumlah perwiranya. Kapal perang Inggris pun kemudian akan dikerahkan ke Haruku untuk membantu *Zwaluw*, demikian pula kapal perang Maria Rijgersbergen yang didatangkan kemudian.[37]

---

[31] Surat Gubernur 25/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)
[32] Surat Gubernur 25/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)
[33] Surat Uitenbroek 30/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)
[34] Surat Gubernur 27/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)
[35] Surat Gubernur 23/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)
[36] Surat Gubernur 26/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)
[37] Surat Gubernur 25/5/1817 (Arsip Nsional RI, Ambon 472)

Serangan pasukan Pattimura yang pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei berlangsung kira-kira dua jam dengan pasukan sebesar kira-kira 500 orang lebih.[38] Serangan pertama ini berhasil digagalkan oleh Belanda. Pasukan-pasukan tidak berhasil mendekati benteng itu karena tembakan-tembakan meriam dari arah benteng dan kapal *Zwaluw*. Sedia keesokan harinya akan dilakukan serangan lagi, tetapi rencana itu tertunda. Mungkin karena Belanda berhasil menangkap salah seorang pasukan yang memang disiksa sehingga terpaksa harus menceritakan rencana tersebut.[39]

Pada tanggal 3 Mei serangan dilancarkan lagi dari pukul 8.30 sampai sekitar 11.30. Serangan yang dilakukan dari lima jurusan ini gagal pula. Demikian pula serangan pada tanggal 4 Mei yang juga dilakukan selama beberapa jam. Kapal-kapal *Zwaluw* dan *Nassau* berhasil melontarkan peluru-peluru meriam sedemikian rupa sehingga posisi para penyerbu buyar.[40] Serangan-serangan kemudian dilangsungkan beberapa kali lagi dalam bulan Juni. Pasukan-pasukan dipusatkan di pelbagai desa, seperti Kabau, Pelau, dan Rohomony. Selain itu, rupanya penduduk Hitu juga datang membantu karena pada tanggal 12 Mei dilaporkan adanya sebuah *arombay* yang menyeberang dari Liang ke arah Pelau.[41] Untuk memperkuat pasukan-pasukan di Haruku, Kapitan Pattimura mengerahkan beberapa kapitan dari Pulau Saparua, antara lain Kapitan Lukas Aron Lisapali dari Ihamahu, kemudian menyusul, Melchior Kesaulya yang telah dijadikan Raja Sisisory.[42]

Kira-kira satu minggu setelah usaha-usaha penyerbuan Zeelandia ini, muncul beberapa pihak yang mencoba mengadakan perundingan. Bekas Raja Oma mencoba jalan ini. Kemudian bekas Raja Aboru juga menjelajahinya. Namun, seluruh usaha ini dilaporkan kepada Kapitan Pattimura di markasnya di Haria. Tampak bahwa jalan yang diambil pihak-pihak tersebut tidak mendapat persetujuannya. Malah mereka yang membangkang mendapat teguran keras. Bekas Raja Aboru akhirnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Belanda lalu membalas dengan membakar seluruh negeri Oma. Sebelum pembakaran ini dimulai ternyata seluruh isi negeri telah melarikan diri.[43]

---

[38] Surat Gubernur 30/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[39] Surat Uitenbroek 1/6/1917 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[40] Surat Gubernur 3/6/1817 dan 4/6/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 1042, 472)

[41] Surat Gubernur 12/6/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 1042)

[42] Keputusan Buyeskes, 7/2/1818

[43] Surat Gubernur 18/6/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 1042)

Pasukan-pasukan Haruku kemudian menghadapi lawan yang lebih kuat. Pada pertengahan bulan Juni Gubernur Middelkoop mengirim sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Kapitein Luitenant Groot. Pasukan yang antara lain terdiri atas 90 orang *burgers* yang diperkuat dengan kapal perang Inggris itu langsung menyerang desa Kabau dan Rohomony yang dilaporkan menjadi pusat konsentransi pasukan. Namun, sebelum pasukan Groot mendarat seluruh pasukan yang memang berada di kedua desa itu sudah mengundurkan diri ke hutan-hutan. Kedua desa ini memang musnah terbakar.[44]

Patroli-patroli laut yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Inggris dan *Maria Rijgersbergen* sekitar Pulau Haruku memaksa para pemuda untuk menghentikan serbuan-serbuan. Maklumlah desa-desa seluruhnya terletak di tepi pantai dan dengan mudah pula dihancurkan oleh meriam-meriam kapal perang.

Keadaan di Pulau Ambon, khususnya Jazirah Hitu, justru lebih bergolak sejak pertengahan Juli. Memang sudah sejak terdengar berita mengenai jatuhnya Duurstede di Saparua, pihak Belanda sudah mulai menyusun pertahanan di Pulau Ambon. Selain itu, mereka juga menerima berita-berita bahwa di beberapa tempat telah terlihat konsentrasi-konsentrasi pasukan.[45] Pasukan-pasukan Hitu memang sudah mulai dikerahkan sejak pertengahan bulan Juni. Sebagai panglima di Hitu, Pattimura mengangkat Ulupaha, kapitan dari negeri Seit, sebagai panglima di Hitu. Instruksi-instruksi Kapitan Pattimura mengenai perkembangan peperangan di Hitu juga diterima oleh Kapitan Ulupaha melalui kurir-kurir dari Haria.[46] Sebaliknya, Ulupaha mengadakan hubungan melalui kurir-kurirnya ke Haria. Sejak awal bulan Juni Kapitan Pattimura sudah menerima kabar dari Hitu bahwa pasukan-pasukan Hitu sudah siap untuk mengadakan penyerbuan ke arah benteng Zeelandia di Hila. Menurut kurir itu yang ditunggu hanya bantuan pasukan dari "Tanah Besar" (Seram).[47] Ternyata kemudian Kapitan Pattimura menginstruksikan Kapitan Ulupaha untuk menyeberang ke Seram dan bertemu dengan penguasa-penguasa di Piru dan Tanunu untuk mendapatkan bantuan pasukan.

Pasukan-pasukan di Hitu sendiri dikumpulkan dari pelbagai desa yang menyetujui gerakan ini. Desa-desa tersebut kemudian menyediakan sejumlah

---

[44] Surat Gubernur 18/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[45] Surat Gubernur 18/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[46] Surat Burggraaf 28/6/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[47] Lihat No. 15

pemuda yang secara berkala bergabung dengan Ulupaha untuk mengadakan penyerbuan-penyerbuan. Kemungkinan besar bantuan juga diperoleh Kapitan Ulupaha dari desa Pelau dan desa-desa tertentu di Saparua.[48] Dengan kekuatan ini, pada tanggal 27 Mei Ulupaha mencoba menyerang benteng Amsterdam. Serangan dari arah timur dilakukan oleh pasukan dari Liang dan dari arah barat oleh pasukan-pasukan dari Seit. Pasukan-pasukan dari Seram juga menyertai serbuan ini. Mengalirnya pasukan dari Seram yang dalam tulisan-tulisan Belanda dinamakan *Alifuru* sangat ditakuti. Residen Burggraaf berkali-kali meminta agar Gubernur mendatangkan kapal perang untuk mengadakan blokade. Karena sebagian besar kapal-kapal perang sedang dikerahkan ke Haruku dan Saparua, terpaksa Belanda menyewa sebuah kapal swasta (*Tweed*) untuk membantu Burggraaf. Serangan-serangan Ulupaha sejak awal Juni lebih hebat lagi. Seluruh benteng Hila (Amsterdam) terkepung rapat. Jalan-jalan keluar dari Hila pun tertutup sehingga tidak seorang pun yang dapat meninggalkan benteng tersebut. Setiap negeri yang memihak kepada Kapitan Ulupaha menyediakan lebih kurang 50 orang pemuda untuk mengadakan pengepungan itu. Demikian gawatnya serangan-serangan Ulupaha sehingga atap rumah residen diangkat karena terancam kebakaran.[49] Baru pada tanggal 6 Juni kapal *Tweed* tiba di perairan Hila sehingga benteng yang hampir jatuh itu terlepas dari tangan Ulupaha.

Menjelang penyerangan kedua, Kapitan Ulupaha mengirim beberapa mata-mata untuk mempelajari keadaan di sekitar benteng Amsterdam. Selain itu, ia mengirimkan beberapa kepala desa ke Seram untuk mendapatkan bantuan pasukan lagi. Ia memperkirakan bahwa dalam waktu tiga hari saja pasukan-pasukan Seram dapat dikumpulkan untuk memperkuat Hitu.[50] Serangan yang sudah dipersiapkan dengan matang itu dilancarkan pada tanggal 24 Juli. Salah seorang panglima yang berjasa dalam serangan ini adalah Paticula dari Wakal. Kapitan Ulupaha yang telah tua, lumpuh, dan setengah buta, selama penyerangan ini dan penyerangan-penyerangan berikutnya selalu berada di tengah-tengah pasukannya untuk memberi pengarahan. Ia melakukannya sambil duduk di kursi tandu.

Setelah berhasil mengepung benteng Amsterdam untuk kedua kalinya, Kapitan Pattimura menginstruksikan Kapitan Ulupaha untuk menyeberang ke Piru dan Tanunu di Seram untuk mendapatkan bantuan pasukan lagi.

---

[48] Surat Burggraaf 26/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 167)

[49] Surat Burggraaf 2/5/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 566)

[50] Surat Burggraaf 13/6/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 566)

Menurut rencana ini pasukan Ulupaha yang diperkuat pasukan Alifuru itu serta pasukan-pasukan dari Pelau dan Kailolo di Haruku, akan menyerbu dan merebut Liang. Setelah merebut Liang, mereka merencanakan untuk meneruskan penyerbuan ke desa-desa Wai, Suli, Baguala, dan Hitulama. Dengan demikian, mereka akan berhasil memutuskan hubungan antara Hitu dan Ambon.[51]

Sekalipun tidak berhasil menduduki benteng Amsterdam, serangan-serangan pada tanggal 24 Juni dapat dianggap berhasil. Residen Burggraaf dapat dilumpuhkan oleh tusukan-tusukan pedang dan tombak sehingga tidak berdaya. Demikian pula beberapa bintara. Itulah sebabnya Gubernur Middelkoop mengganti Burggraaf dengan Smit de Haart yang terkenal sebagai seorang yang sangat aktif. Benteng Kaitetu, yang sebenarnya terdiri atas beberapa buah benteng yang masing-masing dapat menampung kira-kira 100 orang, diserang oleh de Haart pada pertengahan bulan Juli. Benteng ini memang termasuk sangat penting dan dari sini pula Ulupaha melancarkan serangannya ke benteng Amsterdam.[52] Beberapa hari sesudah itu de Haart dengan pasukannya menyerbu benteng Hautana. Setelah benteng ini jatuh, de Haart meneruskan perjalanan ke Lebelau. Di tempat ini terjadi pertempuran yang sengit. Setelah kedua belah pihak kehabisan peluru, terjadi perang tanding. Beberapa orang kapitan yang perkasa gugur di sini, seperti Kapiten Tomal dari Liang, Kapitan Patikeker dari Kulor, Kapitan Mulubara dari Iha, dan Kapitan Sakatuna dari Hautuna. Sebelumnya, di Hautuna, Kapitan Jakapara dan Kapitan Patikuli juga sudah gugur. Pertempuran di Lebelau ini diperkuat oleh pasukan-pasukan dari beberapa negeri lain seperti Lima, Luhu, dan lain-lain.[53]

Tatkala Ulupaha berada di Seram, pasukan-pasukan Belanda menyerang Seit. Pasukan-pasukan Seit yang dipimpin oleh wakil-wakil dari Ulupaha akhirnya harus pula mengakui kekuatan lawan. Seluruh penduduk Seit ketika ini mengungsi sampai ke Seram melalui Tanjung Sial. Mereka menyaksikan desa mereka menjadi mangsa api. Sekembalinya dari Seram, Ulupaha bertekad untuk balas dendam. Dengan bantuan pasukan-pasukan dari Luhu dan Tanunu ia telah berhasil menghancurkan koloni Belanda yang berada di desa Luhu serta merebut benteng di sana. Benteng Loki yang terkenal tidak jauh dari tempat itu juga berhasil direbutnya. Selanjutnya, Ulupaha mengerahkan pasukan-pasukan *Alifuru* untuk mencegah agar penduduk desa yang memihak kepada Belanda memetik cengkih tahun itu.

---

[51] Surat Burggraaf 30/6/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 472)

[52] Surat Smit de Haart 16/7/1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 566)

[53] Surat Smit de Haart 24, 26, 30 Juli 1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 566)

Penyerbuan yang dapat dikatakan besar juga, terjadi dalam bulan September. Dengan kekuatan sekitar 1.000 orang pasukan Ulupaha menyerbu Larike, sebuah pusat kekuasaan Belanda di Hitu.[54]

Sementara pertempuran-pertempuran sedang berkobar di Hitu, Belanda sekali lagi mencoba merebut benteng Duurstede di Saparua. Dalam bulan Juli mereka mengirim sebuah pasukan dengan kawalan kapal-kapal perang ke arah utara Pulau Saparua. Maksudnya adalah untuk menduduki desa-desa di sana. Namun, Groot yang memimpin ekspedisi itu menghadapi perlawanan yang cukup tangguh. Keunggulan penduduk desa itu disebabkan sistem perbentengan yang kukuh. Sejak direbutnya Duurstede pada bulan Mei, Kapitan Pattimura telah menginstruksikan penduduk desa itu membangun sistem perbentengan. Ada perbentengan yang sederhana yang hanya berupa sebuah garis lurus di depan desa yang menghadap ke laut. Ada pula sistem perbentengan yang lebih kompleks seperti yang terdapat di Paperu, Ouw-Ulat, dan Sisisory. Benteng-benteng terakhir ini terdiri atas dinding yang berlapis-lapis sejajar dengan jalan masuk ke desa. Setiap pasukan musuh yang melaluinya pasti dapat diserang dengan kelewang atau ditembak dari jarak dekat. Benteng-benteng ini terbuat dari batu karang atau batu masif yang tingginya satu meter dan lebarnya setengah meter. Benteng-benteng ini praktis tidak dapat ditembusi peluru-peluru meriam kapal perang.

Setelah gagal menaklukkan penduduk desa-desa di Hatawano (Utara Saparua), Groot berusaha mengadakan perundingan. Sebuah bendera dipancangkan di tepi pantai dengan sepucuk surat yang memaklumkan gencatan senjata 24 jam untuk menjajaki usaha-usaha perundingan. Ternyata penduduk Hatawano bersedia. Namun, mereka menginginkan agar Groot mengirimkan utusan-utusannya kepada Kapitan Pattimura. Hal ini dipersiapkan dan seorang perwira Groot berhasil dibawa kepada Pattimura di Saparua. Rupanya Groot tidak bersedia memenuhi permintaan Pattimura. Ketika itu Pattimura menuntut agar didatangkan seorang pejabat dari Batavia untuk mengadakan perundingan. Groot memang meneruskan hal ini kepada Gubernur Middelkoop, tetapi tanpa hasil yang memuaskan. Sementara itu, para penguasa dari pulau-pulau Saparua, Haruku, Nusalaut, dan Seram berkumpul di Hatawano dan menyusun surat pernyataan yang berisi syarat-syarat perdamaian. Mereka menuntut agar kecurangan-kecurangan dan ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini mereka alami (yaitu, zaman VOC) dihentikan. Pemeliharaan kehidupan agama diperhatikan; kebiasaan memaksakan para pemuda

[54] Surat Smit de Haart 25 September 1817 (Arsip Nasional RI, Ambon 566)

menjadi serdadu di luar Maluku dihapuskan, dan lain-lain. Jika hal-hal ini dapat dipenuhi dan Belanda bersedia menjalankan pemerintahan yang berperikemanusiaan seperti yang mereka alami dalam zaman Inggris, mereka bersedia mengadakan perundingan. Sesungguhnya pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan hasil perundingan yang mereka lakukan di *baileu* (balai desa) Haria pada tanggal 29 Mei tidak lama setelah mereka berhasil merebut Duurstede.

Perundingan yang diprakarsai Groot ternyata gagal. Kecurigaan dari pihak Grootlah yang menyebabkannya. Dengan demikian, peperangan mulai lagi. Armada dan pasukan Groot kini menuju Duurstede yang memang sengaja dilepaskan oleh Kapitan Pattimura karena sudah sejak semula mesiu dari meriam-meriamnya telah habis. Sekalipun pasukan-pasukan Groot berhasil menguasai benteng tersebut, di luar tembok-temboknya pasukan Pattimura tetap berkuasa. Benteng-benteng baru dibangun di sekelilingnya dari balik tembakan-tembakan dapat dilancarkan terhadap anggota pasukan musuh yang memberanikan diri mengambil air di sumur yang terletak di lapangan benteng. Usaha-usaha Groot untuk membersihkan daerah sekelilingnya dari para penembak tersembunyi juga sia-sia.

3. Akhir Perang

Perlawanan yang tidak kunjung reda di Saparua, Haruku, dan Ambon dengan bantuan pasukan-pasukan *Alifuru* dari Seram itu berlangsung terus dalam bulan Agustus sampai November. Sekalipun persenjataan Pattimura tidak lengkap karena hanya kira-kira 20% dari pasukannya memiliki bedil tua yang biasanya dipakai untuk berburu, sedangkan sebagian terbesar hanya menggunakan parang (pedang), *torana* (tombak), dan *salawaku* (perisai), siasat-siasat penyergapan terhadap benteng atau patroli musuh, sering cukup efektif. Sergapan-sergapan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil pada saat-saat yang tepat. Selain itu, pasukan-pasukan *Alifuru* berkeliaran di kebun-kebun cengkih dan berhasil memaksa penduduk yang memihak kepada musuh untuk tidak memetik cengkih. Untuk mendapatkan mesiu, Kapitan Pattimura mengirim para pedagang dari Seram Timur yang secara tradisional berabad-abad sudah berdagang dengan kepulauan di Nusantara bagian barat sampai ke Semenanjung Malaysia. Melalui mereka inilah Kapitan Pattimura mencari mesiu yang ditukarkan dengan cengkih yang tertimbun dalam benteng Duurstede. Selain itu, hubungan surat-menyurat juga dilakukan Pattimura dengan pelbagai penguasa di Bali, Kalimantan, Ternate, dan lain-lain melalui saluran perdagangan tradisional itu.

Situasi ini rupanya mendorong pihak Belanda untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Dalam bulan November 1817 tiba di Ambon satu armada yang lebih kuat dengan pasukan-pasukan yang masih segar, ditambah dengan sekitar 1.500 orang pasukan *Alifuru* yang disumbangkan kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore atas permintaan Gubernur van Middelkoop. Pasukan yang sedemikian dahsyat itu dipimpin langsung oleh Laksamana Muda A.A. Buyskes yang selain menjabat panglima armada di Hindia Belanda, juga menjadi Komisaris Jenderal I atau orang pertama di Batavia. Perwira yang berpengalaman melawan pasukan Napoleon di Eropa ini menyusun siasat yang sangat jitu. Pulau-pulau di sekitar Saparua diterkamnya lebih dahulu dengan pasukan yang sedemikian besar dan ditunjang oleh kapal-kapal perang serta benteng-benteng yang terkenal dengan meriam-meriamnya. Pertempuran di Hitu dipimpin oleh Mayor Meyer. Kapitan Ulupaha terpaksa mengundurkan diri bersama pasukannya ke Seram dan bertahan di bekas benteng Belanda di Luhu. Baru pada bulan Januari ia terdesak dari sana bersama kira-kira 400 orang pasukannya dan bertahan di hutan-hutan sagu di utara Luhu. Namun, suatu penyerbuan Belanda yang diperkuat dengan pasukan-pasukan dari Manipa dan Boano memaksa pasukan Ulupaha mengundurkan diri lagi. Kapitan Seit yang telah tua itu dan senantiasa dipikul dengan kursi oleh pengikut-pengikutnya, tertinggal ketika pasukannya dikejar musuh, dan akhirnya tertangkap musuh.

Segera setelah Hitu diduduki, pasukan Buyskes dengan komandan operasi Mayor Meyer diseberangkan ke Haruku. Dengan lindungan meriam-meriam dari kapal-kapal perang dan benteng Zeelandia, pasukannya menuju ke pusat pertahanan di Haruku, yaitu desa Islam Pelau. Pasukan-pasukan Haruku segera mengundurkan diri ke hutan-hutan. Namun, mereka tidak mempertimbangkan kemampuan Buyskes yang memang unggul dalam strategi. Sebagian pasukannya dikerahkan ke Hulaliu yang dapat diduduki karena pasukan-pasukan Haruku di sana juga mengundurkan diri di bawah tekanan meriam-meriam. Dari Hulaliu, Buyskes mengirim sebuah pasukan kecil yang terdiri atas orang-orang *Alifuru*. Ternate dan Tidore untuk memotong jalan melalui hutan dan pegunungan ke arah Aboru. Dengan cara ini pasukan-pasukan Haruku yang mengundurkan diri itu dapat dipukul dari pelbagai jurusan. Desa-desa yang memegang peran penting di Haruku musnah terbakar, seperti Pelau, Rohomony, Kabau, Hulaliu, dan Aboru. Pemuda-pemuda yang gagah perkasa satu per satu mengorbankan jiwa raganya menghadapi tekanan pasukan dari yang lebih kuat persenjataannya dan lebih unggul strateginya.

Sebelum pasukan Meyer diseberangkan ke Pulau Saparua dari Hulaliu, desa Porto dan desa Haria di mana mereka akan didaratkan ditembaki oleh meriam-meriam kapal-kapal perang. Hal ini menyebabkan para pemuda Porto dan Haria yang berjaga-jaga di belakang tembok-tembok benteng terpaksa mengundurkan diri. Kaum perempuan dan anak-anak sudah terlebih dahulu diungsikan ke pegunungan. Kapitan Pattimura pun memindahkan markasnya dari Haria ke wilayah pegunungan Boi. Setelah Porto dan Haria musnah terbakar, pasukan Meyer mendarat tanpa perlawanan. Sementara itu, pasukan-pasukan Pattimura tidak memahami benar siasat yang digunakan Buyskes, karena beberapa kapal perang dan kapal pengangkut mengambil tempat di pelbagai sudut pulau itu sehingga orang tidak mudah menduga tempat pendaratan itu akan dilakukan. Pendaratan Meyer di Porto-Haria memang berhasil. Namun, ketika pasukan Meyer berusaha membuka jalan antara Porto-Haria dengan Duurstede, mereka mengalami perlawanan yang gigih di Paperu. Perbentengan yang sangat kompleks di sini dipertahankan tidak saja oleh pemuda-pemuda Paperu, tetapi juga diperkuat oleh pemuda-pemuda Porto dan Haria. Namun, keunggulan teknologi perang menentukan di sini pula. Kapal-kapal perang musuh segera mengambil kedudukan di perairan Paperu dan memuntahkan peluru-peluru meriamnya ke arah perbentengan Paperu. Kaum perempuan dan anak-anak diungsikan sementara pasukan Meyer menyerbu dari arah barat (Porto-Haria), pasukan-pasukan dari benteng Duurstede dikerahkan pula dari arah timur untuk memberi bantuan. Dari segala sudut desa Paperau disergap. Pasukan Meyer yang terlebih dahulu menerjunkan diri ke dalam perbentengan Paperu. Perang tanding menyusul, dan pemuda-pemuda mulai terdesak oleh gelombang pasukan musuh yang terus-menerus berdatangan. Korban-korban berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Menghadapi tekanan-tekanan ini para pemuda mengundurkan diri ke arah hutan-hutan Paperu. Meyer dan pasukannya merayakan hari kemenangan di desa Paperu sementara pasukan Pattimura mulai merosot semangatnya. Ketika pasukan Meyer tiba di Boi, seorang musuh Kapitan Pattimura mengkhianatinya dengan cara menunjukkan tempat persembunyiannya. Beberapa panglima lainnya juga tertangkap dengan cara yang sama. Pertempuran kemudian berkobar lagi di desa-desa Sirisory, Ulat, dan Ouw. Siasat yang digunakan Buyskes di Paperu diulangi lagi di sini. Namun, pertempuran di Ouw termasuk yang mengesankan karena ketika itu komandan ternyata meninggal. Kapitein Vermeulen-Krüger, yang juga luka parah, mengambil alih pimpinannya. Namun, para pemuda tidak dapat menandingi siasat musuh yang terus-menerus mengirimkan gelombang demi gelombang pasukan untuk diterjunkan ke tengah-tengah

perbentengan Ouw. Mereka terkepung dan terpaksa mengundurkan diri. Dalam salah satu pertempuran ini Kapitan Paulus Tiahahu dari Nusalaut tertangkap bersama putrinya Marta Kristina Tiahahu. Kapitan yang telah mendekati umur 80 tahun itu selama pertempuran senantiasa diusung oleh pengikut-pengikutnya.

Dalam bulan Desember 1817 Kapitan Pattimura bersama tiga orang panglimanya dijatuhi hukuman mati yang dijalankannya di benteng Niuew Victoria di Ambon. Beberapa orang pemimpin lainnya mengalami nasib yang sama seperti Kapitan Paulus Tiahahu yang dihukum pancung di Nusalaut dan Kapitan Ulupaha yang diangkat dari Luhu untuk digantung di Ambon. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan atas pemimpin-pemimpin yang lebih rendah. Sejumlah pasukan yang tertangkap dikenakan hukuman buangan ke Cianjur. Sebagian terbesar dikenakan amnesti.

C. Sumatra Barat

1. Pendahuluan

Perang melawan kolonialisme di daerah Minangkabau bermula dari pertentangan antara dua pihak dalam masyarakat, yang dikenal dengan gerakan Padri, yang dimulai pada awal abad ke-19. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam, membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Nabi.

Arti istilah Padri tidak begitu jelas. Pengikut-pengikut gerakan Padri memakai pakaian jubah putih, sedangkan kaum Adat memakai kain hitam.[55]

Ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-16, terdapat dua cara hidup yang berdampingan secara damai: adat lama dan Syara' Islam sama-sama dihormati. Keduanya mendapat tempat dalam masyarakat Mingkabau, sampai-sampai timbul pepatah yang mengatakan: "Adat basandi Syara', Syara' basandi Adat".

Golongan Adat dan golongan Syara' bekerja sama dan melengkapi satu sama lain. Namun, pada masa selanjutnya kerja sama ini nyata tidak abadi, keadaan pun berubah.

Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagarruyung. Raja dibantu oleh empat orang pembantu yang disebut *Basa Ampek Balai*. Mereka adalah Indomo di Saruaso, Titah di Sungai Tarab,

---

[55] Sartono Kartodirdjo (Editor), *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Jakarta, Pusat Sejarah ABRI, 1973, hlm. 89

Mangkudum di Sumanik, dan Kadi di Padang Ganting.[56] Raja tetap dihormati sebagai lambang negara Minangkabau, tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Penduduk Minangkabau terdiri atas dua belas suku yang berbeda-beda namanya dan mereka berdiam secara menyebar di seluruh negara. Tiap suku dipimpin oleh seorang penghulu, sedangkan raja dan para pembantunya tidak termasuk dalam salah satu suku pun, tetapi berada di luar suku. Pada hakikatnya kekuasaan terletak di tangan para penghulu yang tergabung dalam *Dewan Penghulu* atau *Dewan Nagari*.

Raja, bangsawan, dan para penghulu inilah yang menjalankan peran penting dalam pemerintahan adat. Perkembangan yang kemudian tampak di Minangkabau adalah timbulnya kebiasaan-biasaan buruk, sedang para pembesar tidak mampu menghalangi, bahkan turut menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu menyabung ayam, madat, berjudi, dan minum minuman keras. Kebiasaan ini makin meluas dan memengaruhi kelompok pemudanya. Andaikata akan diadakan acara menyabung ayam, mereka datang berduyun-duyun dari berbagai tempat.

Menghadapi keadaan ini kaum ulama atau Padri mulai mengadakan reaksi sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan Padri. Kaum Padri ingin memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni. Sejak itu timbul bibit-bibit pertentangan antara kaum Padri dan kaum Adat.

Pada akhir abad ke-18, seorang ulama dari kampung Kota Tua (daerah Cangking, Empat Angkat) di Daratan Agam, yaitu Tuanku Kota Tua, mulai mengajarkan pembaruan-pembaruan.[57] Beliau mengajarkan bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni, kemudian ditunjukkannya bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan Alquran dan Sunnah Nabi.

Di antara murid Tuanku Kota Tua adalah Tuanku nan Renceh dari kampung Bansa di Kamang. Ulama ini terkenal sangat taat dan pintar serta terkenal sebagai guru agama di seluruh Luhak Agam.

Sementara itu, pada tahun 1803 telah kembali dari Mekah tiga orang haji, yakni Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari Delapan (VIII) Kota, dan Haji Piobang dari Tanah Datar. Ketiga ulama ini menyaksikan secara langsung bagaimana kaum Wahabbi di Mekah meluruskan agama

---

[56] Muhammad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat (1803–1838)*, Djakarta, 1964, hlm. 8

[57] Sartono Kartodjirdjo, *op. cit.*, hlm. 90

dan membasmi bid'ah sehingga mereka ingin meluruskan pula agama di negerinya, Minangkabau.[58]

Dengan tujuan ini mereka mulai mengajar di kampung-kampung. Pada suatu ketika dengan bantuan seorang penghulu, Kuncir gelar Datuk Batuah, Haji Miskin melarang penduduk Pandai Sikat menyabung ayam. Larangan ini tidak diperhatikan oleh penduduk. Haji Miskin menjadi kesal dan pada suatu malam dibakarnya balai tempat menyabung ayam. Kaum Adat marah, Haji Miskin dikejar-kejar dan berhasil menyingkir ke Kota Lawas; di sini ia mendapat perlindungan dari Tuanku Mensiangan. Tuanku Mensiangan segera dapat dipengaruhi oleh Haji Miskin dan bertekad akan membantunya. Kaum Adat semakin marah, beberapa hari kemudian di dekat Balai Panjang, pasar Kota Lawas, terjadi perkelahian antara kaum Adat dengan beberapa orang yang menaruh simpati pada Haji Miskin. Akibatnya, Haji Miskin menuju Kamang dan bertemu dengan Tuanku nan Renceh. Akibatnya, paham baru ini segera meluas di Luhak Agam, di Empat Angkat, IV Kota, Candung, dan Kota Tua.

Tuanku nan Renceh mengajak Tuanku-Tuanku di Luhak Agam untuk membentuk persekutuan melawan kaum Adat. Delapan ulama itu adalah: Tuanku nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau. Mereka dijuluki "Harimau nan Salapan" karena tindakannya yang keras. Sebelum melaksanakan tujuan, mereka bermusyawarah dengan guru yang mereka hormati, yaitu Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua menyetujui gerakan ini, tetapi ia menyarankan agar dilakukan secara damai. Menurutnya, pembaruan yang keras akan menimbulkan perlawanan keras pula. Sikapnya yang lunak ini menyebabkan Tuanku Kota Tua tidak jadi terpilih sebagai pemimpin gerakan. Yang kemudian terpilih menjadi pimpinan gerakan akhirnya Tuanku mensiangan, yang juga seorang ulama terkenal dan disegani di daerah VI Kota.

Tuanku nan Renceh bertekad melakukan kekerasan. Setiap orang diharuskan melakukan Syara' setepatnya. Adat lama harus dirombak sehingga menimbulkan kecemasan para penghulu.

Pada pihak lain, kaum Adat tidak tinggal diam. Suatu pesta sabung ayam diadakan dengan segera di kampung Batipuh, Sungai Puar dengan maksud menghina kaum Padri. Pesta itu kemudian menjadi tegang sehingga pertempuran pun terjadi di Batipuh. Dalam pertempuran itu, kaum Padri

---

[58] Uraian secara mendalam mengenai konflik antara Adat dan Islam di Minangkabau, periksa Taufik Abdullah, "Adat and Islam; An Examination of Conflict in Minangkabau" Indonesia, II, Oktober 1966 (Modern Indonesia Project, Cornell University) dan seterusnya

terus menyebarkan pahamnya. Luhak V Kota menerima paham Padri, tetapi Tilatang, Matur, dan Candung menentangnya ketika Tuanku nan Renceh meluaskan pengaruhnya sehingga pertempuran demi pertempuran terjadi. Tuanku Kota Tua yang menghendaki pembaruan dengan cara lunak, yaitu dengan mencegah meluasnya pertempuran, tetapi gagal.

Selanjutnya, berkat kegiatan kaum Padri, Luhak Agam dan IV Kota menerima pembaruan. Demikian pula di Lembah Alahan Panjang yang luas, terdiri atas kampung Padang Lawas, Jambak, Kota, Lubuk Ambacang, Alai, Bonjol, Pasir, Mandari, Padang Sikakusuk, Marapak, Caniago, Tanjung Bungo, dan Padang Bulus. Di antara kampung-kampung ini, Bonjol kelak memegang peran penting.

Sementara itu, pimpinan adat tertinggi di Lembah Alahan Panjang adalah Datuk Bandaro yang setelah mempelajari paham pembaruan bersama para penghulu lainnya menjadi tertarik dan menerimanya. Dengan demikian, ajaran Padri meluas di daerah Lembah Alahan Panjang. Walaupun demikian, ada juga kelompok penghulu yang tidak menyetujuinya, mereka dipimpin oleh Datuk Sati.

Di antara kedudukan kaum Padri yang kuat adalah Bonjol. Di sini didirikan benteng yang cukup besar; di dalamnya terdapat sebuah masjid, 40 rumah, dan tiga gubuk kecil.[59]

Ketika Datuk Bandoro meninggal karena terkena racun, ia digantikan oleh Muhammad Syahab atau Pelo (Pendito) Syarif yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang lahir pada tahun 1774 adalah anak dari Tuanku Rajanuddin dari kampung Padang Bulus, Tanjung Bungo, daerah Lembah Alahan Panjang.

Di daerah lain seperti di Tanah Datar, kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Pasaman, bergelar Tuanku Lintau. Di sini pengaruh adat sangat kuat. Di sini pula Raja Minangkabau, Tuanku Raja Muning di Pagarruyung, berkedudukan. Pertempuran antara kaum Padri dan kaum Adat segera meletus di Tanah Datar. Dalam pertempuran ini kaum Adat terdesak sehingga pengaruh kaum Padri makin meluas di daerah ini.[60]

Perang saudara ini meluas terus dan kemudian mengalami perkembangan baru setelah kekuasaan asing mulai campur tangan. Pada waktu itu di Pantai Sumatra Barat yang berkuasa adalah Inggris. Inggris membuka kantor di Air Bangis, Padang, dan Pulau Cingkuk.[61] Letnan

[59] Muhammad Radjab, *op. cit.*, hlm. 36–37

[60] Periksa GB. Kielstra, "Sumatra's westkust van 1819–1825, HKI, 26, 1887, hlm. 11

[61] Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 93

Gubernur Thomas Stamford Raffles mengunjungi Padang pada tahun 1818. Kaum Adat mengharapkan bantuan dari Inggris. Dua orang Tuanku dari Saruaso yang mewakili Raja Minangkabau menghadap Raffles. Mereka adalah Tuanku Tangsir Alam dan Sultan Kerajaan Alam. Raffles melihat berbagai kemungkinan, menimbang untung rugi. Pada pihak lain, Raffles juga menghubungi kaum Padri, untuk menawarkan jasa baik, tetapi ternyata tidak ada persesuaian pendapat. Tujuan Raffles sebenarnya untuk memperoleh daerah pedalaman yang subur. Oleh karena itu, hanya dengan negara Minangkabau, Raffles dapat mengadakan perjanjian setia kawan.

Namun, Inggris harus segera menyerahkan daerahnya kepada Belanda sebagai pelaksanaan Perjanjian London (1824). Kekuatan Inggris di Sumatra Barat diserahkan kepada Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Du Puy sebagai residen. Kaum Adat kini beralih minta bantuan kepada Belanda.

Pada tanggal 10 Februari 1821, Residen Du Puy beserta Tuanku Saruaso dan 14 penghulu yang mewakili Minangkabau mengadakan perjanjian.[62] Dengan dasar perjanjian ini, beberapa daerah di Minangkabau diduduki Belanda. Langkah Belanda tidak semata-mata ditujukan untuk melawan kaum Padri, tetapi lebih banyak ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua meriam dan seratus orang tentara. Sejak itu, mulailah perang Padri melawan Belanda. Peran kaum Adat sebagai musuh utama kaum Padri digantikan oleh Belanda. Kaum Padri menghadapi Belanda yang mempunyai sistem persenjataan modern, serta personel yang terlatih.

2. Jalannya Perang

Peperangan ini dapat dibagi dalam tiga masa. Masa pertama berlangsung antara 1821–1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Masa kedua adalah antara tahun 1825–1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan gerakan kaum Padri yang mulai melemah. Ketika itu pihak Belanda memusatkan perhatiannya pada perang Diponegoro di Jawa. Masa ketiga antara tahun 1830–1838, ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran, kemudian diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri.

---

[62] Laporan Politik Tahun 1837 (Arsip Nasional RI hlm. 75)

Kaum Padri mulai bergerak menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap pasukan patroli mereka. Pos Belanda di Semarang menjadi sasaran penyerangan kaum Padri bulan September 1821. Soli Air Sipinang berkali-kali mendapat gangguan dari kaum Padri. Tuanku Pasaman dengan pasukannya melakukan operasi di sekitar hutan. Usaha pemimpin pasukan Belanda untuk berdamai dengan Tuanku Pasaman dengan perantaraan seorang pendeta Kristen tidak berhasil. Bahkan, Tuanku Pasaman pada waktu itu telah mengerahkan sebanyak 20.000 hingga 25.000 orang pasukan Padri di sebelah timur Gurun. Pasukan ini dilengkapi dengan senjata-senjata tradisional, bendera-bendera pasukan, dan payung-payung besar sebagai tanda pengenal pasukan.

Dalam pertempuran yang terjadi antara pasukan Tuanku Pasaman dan pasukan Belanda yang terdiri atas 200 orang serdadu Eropa yang diperlengkapi dengan meriam 6 pon dan meriam kodok (*howitser*), ditambah dengan 8.000 hingga 10.000 orang pasukan bantuan terdiri atas orang bumiputra, telah meminta banyak korban di kedua belah pihak. Tuanku Pasaman menderita kerugian lebih kurang 350 orang gugur, di antaranya anak Tuanku Pasaman sendiri. Demikian pula pihak Belanda tidak sedikit kehilangan serdadunya yang tewas dan mendapat luka-luka. Dengan sisa pasukannya, Tuanku Pasaman kemudian mengundurkan diri ke Lintau, setelah berhasil menerobos rintangan-rintangan dari pasukan musuh yang mencoba memutuskan jalan yang menuju Lintau. Setelah berhasil menguasai seluruh lembah Tanah Datar, Belanda mendirikan benteng di Batusangkar yang kelak diberi nama Fort van Der Capellen.

Markas Tuanku Pasaman di Lintau dijaga kuat oleh pasukan Padri. Pasukan Belanda sebanyak 120 orang serdadu di bawah pimpinan Raaff dan beberapa kapten berusaha menyerang markas Tuanku Pasaman, tetapi maksud tersebut ditunda setelah mengetahui bahwa pasukan Tuanku Pasaman di markas tersebut cukup kuat. Setelah mendapat bantuan dari daerah lain sebanyak 150 orang serdadu, Raaff melanjutkan usahanya. Penunjuk jalan yang mengantar Raaff menuju markas Tuanku Pasaman ternyata orang yang pro Padri dan berhasil memasukkan pasukan Raaff ke dalam jebakan di daerah pertahanan kaum Padri yang kuat. Karena kekalahan yang diderita, Raaff mengundurkan diri ke Pagarruyung.

Karena Tuanku Pasaman cukup berat untuk ditundukkan, Belanda mencoba lagi untuk mendekatinya. Surat ajakan untuk berdamai yang dikirim oleh Raaff kepada Tuanku Pasaman tidak mendapat jawaban. Pasukan Raaf yang bergerak di sekitar Tanjung Alam pada tanggal 10 Juni 1822 diserang oleh pasukan Padri. Di daerah lain pasukan Padri juga aktif mengadakan penyerangan-penyerangan. Di sekitar Baso, pasukan Tuanku

nan Renceh tanggal 14 Agustus 1822 telah menyerang pasukan Belanda. Pasukan Belanda terdesak, bahkan Kapten Goffinet yang memimpin menderita luka berat. Pasukan kaum Padri yang lain dalam bulan September 1822 telah pula mengadakan operasi di daerah Guguk Sigandang dan Tanjung Alam, dan membakar kampung-kampung penduduk yang memihak kaum Adat. Pasukan kaum Padri ini berjumlah sekitar 20.000 orang.

Dari beberapa pertempuran yang terjadi terlihat bahwa pasukan kaum Padri cukup kuat dan terpencar di daerah-daerah. Dalam pada itu hubungan kaum Adat dengan Belanda dalam melawan kaum Padri juga makin erat. Raja Muning yang telah lanjut usianya bersekutu dengan Belanda meskipun ia sudah tidak mampu tampil sebagai pemimpin dalam pasukan. Dalam hubungan pertentangan kaum Padri dan kaum Adat kedudukan Tuanku Kota Tua sebenarnya berada di tengah-tengah kedua pihak tersebut. Ia menginginkan jalan damai dalam menyebarkan paham kaum Padri dan tidak menyetujui tindakan-tindakan kaum Padri dengan kekerasan. Justru karena sikapnya yang demikian ini Belanda tidak memusuhinya. Bahkan, pernah dengan menggunakan pengaruh Tuanku Kota Tua, Belanda dapat melunakkan pendirian pengikut Padri di Kapau. Demikian pula dengan perantaraan Tuanku Kota Tua, kaum Padri bersedia meninggalkan daerah Alahan Panjang dan Rao sehingga di daerah itu Belanda kemudian dapat memperkuat diri.

Di Bonio pertahanan kaum Padri juga cukup kuat. Untuk menghadapi kaum Padri ini, pemimpin pasukan Belanda Letnan P.H. Marinus memindahkan meriam-meriam dari pertahanannya di Baruh Bukit ke pertahanan di dekat Bonio. Demikian pula pasukan Belanda yang lain di bawah Kapten Brusse dengan bantuan 1.000 orang penduduk setempat telah dipergunakan untuk menghadapi kaum Padri di Bonio. Waktu pasukan van Geen bergerak sampai di dekat bukit di muka Bonio, pasukan Padri segera turun dari bukit tempat pertahanannya dan menyerang pasukan musuh. Dalam pertempuran ini Letnan Marinus meninggal. Setelah bertempur, pasukan Padri segera mengundurkan diri ke dalam hutan-hutan di sekitarnya.

Usaha selanjutnya dari pasukan Belanda untuk menaiki bukit dengan maksud untuk mendekati pertahanan kaum Padri di Bonio tersebut telah disambut oleh kaum Padri dengan lemparan tombak, batu, maupun batang-batang pohon dari atas. Dalam medan pertempuran yang lain di Kapau pasukan Padri membentuk garis pertahanan yang cukup panjang. Pasukan ini pada tanggal 18 September 1833 mencoba mengepung pasukan Belanda yang berkekuatan 100 orang sehingga pasukan musuh tersebut harus

menyingkir ke Kota Tua. Sebagian pasukan Padri mengejarnya, tetapi dalam pertempuran yang terjadi ternyata pasukan Padri kalah kuat sehingga mengundurkan diri. Usaha kaum Padri untuk melemahkan kedudukan musuh diteruskan dengan menutup jalan yang menghubungkan pos Belanda di Kota Tua dengan Tanjung Alam.

Di daerah Agam pada tanggal 24 September 1823 pasukan Padri menyerang pasukan Belanda yang berkekuatan 170 orang. Dalam pertempuran ini pihak Belanda menderita kerugian 19 orang serdadu luka-luka. Namun, persenjataan pasukan Belanda yang cukup kuat telah berhasil mendesak pasukan Padri, bahkan akhirnya dapat merebut pertahanan Padri di daerah itu yang dijaga oleh 360 orang.

Dengan kepergian Letnan Kolonel Raaff ke Padang pada tanggal 16 Desember 1823 untuk menggantikan kedudukan Du Puy sebagai residen dan komandan militer Belanda di Padang, terjadi perkembangan baru. Raaff merencanakan untuk mengadakan perundingan dengan kaum Padri. Usahanya untuk mendekati kaum Padri di Bonjol berhasil dan pada tanggal 22 Januari 1824 dapat diadakan perundingan perdamaian dengan mereka. Setelah itu, kaum Padri di daerah VI Kota juga mengadakan perdamaian dengan Belanda. Adanya perundingan ini sebenarnya hanya menguntungkan pihak Belanda untuk menunda waktu guna memperkuat diri.

Pengiriman pasukan-pasukan oleh Raaff pada tanggal 29 Februari 1824, terdiri atas 150 orang serdadu Eropa, 150 orang Madura, dan 1.000 orang bumiputra setempat dengan perlengkapan meriam 3 pon dan *howitser*, ke daerah Pandai Sikat dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan apabila usahanya untuk mengajak berdamai tidak mendapat sambutan dari kaum Padri. Tuanku Damasiang, seorang pemimpin Padri di Kota Lawas, menolak untuk berdamai dengan Belanda sehingga mendapat serangan dari pasukan lawan. Kota Lawas dibakar dan Tuanku Damasiang terpaksa menyerah karena kepungan pasukan Belanda tersebut.

Pendudukan daerah VI Kota oleh pasukan Belanda menimbulkan kemarahan kaum Padri di Bonjol. Meninggalnya Letnan Kolonel Raaff karena sakit pada tanggal 19 April 1824 merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk kembali mengobarkan perang. Naskah perjanjian perdamaian dikirimkan kembali kepada pihak Belanda dan mereka mulai mengadakan gerakan pasukan ke sebelah tenggara Tanah Datar. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Belanda di Saruaso. Pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan 120 orang serdadu pada tanggal 17 Juli 1824 dikirimkan ke daerah tersebut dan berhasil membakar kampung tempat markas pasukan Padri, tetapi ketika pasukan Belanda tersebut akan kembali ke Saruaso di suatu lembah yang sempit telah diserang dengan tiba-tiba

oleh pasukan kaum Padri yang cukup kuat. Dengan susah payah dan dengan kerugian 30 orang serdadu pasukan Belanda berhasil kembali ke Saruaso.

Dalam tahun 1825 berhubung dengan adanya perlawanan Diponegoro di Jawa, pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada kesulitan baru. Sementara perlawanan kaum Padri belum dapat dikalahkan, kekuatan militernya sebagian harus dikerahkan untuk menghadapi perang baru itu. Di Tanjung Alam pasukan Padri aktif mengadakan operasi dan mengadakan gangguan terhadap pengikut-pengikut kaum Adat yang memihak Belanda. Dalam bulan April 1825 mereka telah melakukan perlawanan terhadap pasukan Kapten Bauer yang mencoba mengusir mereka dari Tanjung Alam. Demikian pula sejumlah 7.000 kaum Padri telah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di Agam, dekat Bukittinggi.

Kolonel Stuers, yang diangkat menjadi penguasa sipil dan militer di Sumatra Barat sejak tanggal 2 November 1824, pada tanggal 29 Oktober 1825 telah berhasil mengadakan kontrak perdamaian baru dengan kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Keramat, yang isinya antara lain menyebutkan: Belanda akan mengakui kekuasaan tuanku-tuanku di Lintau, IV Kota, Telawas, dan Agam; kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan para pedagang; kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang kembali dari pengungsian. Perjanjian yang diadakan di Ujung Karang itu baru ditandatangani di Padang pada tanggal 15 November 1825.

Perdamaian antara Belanda dan kaum Padri ini mengecewakan para pengikut kaum Adat, yang sebelumnya telah mendapat kesanggupan dari Belanda untuk memberi bantuan dalam melawan kaum Padri. Dalam hubungan ini Belanda mempunyai perhitungan lain. Gencatan senjata dengan kaum Padri baginya sangat menguntungkan, karena dengan demikian sebagian dari pasukannya di daerah ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pasukannya di Jawa dalam usahanya menindas perlawanan Diponegoro.

Dalam bulan September 1826 serdadu-serdadu Belanda di Minang-kabau sebanyak 5.000 orang beserta 17 opsir berangkat ke Jawa sehingga kekuatan militer Belanda di Minangkabau tinggal 677 orang. Dengan kekuatan ini, Belanda harus menjaga 17 pos yang letaknya tersebar di daerah-daerah. Dengan demikian, terlihat bahwa kekuatan Belanda tidak mencukupi. Kelemahan ini telah digunakan oleh sementara rakyat yang memihak kaum Padri untuk menentangnya. Penduduk kampung Mulik Padang menentang waktu komandan Belanda di daerah itu memaksa mereka untuk membuat jalan. Dua detasemen pasukan Belanda yang oleh

De Stuers dikirim ke Kampung Mulik Padang untuk memaksa rakyat lagi, ternyata mendapat perlawanan bersenjata dari mereka sehingga pasukan Belanda bercerai-berai.

Kaum Padri mengambil kesempatan yang baik itu untuk memulai perlawanan lagi. Mereka mengadakan serangan terhadap daerah-daerah pengikut kaum Adat, seperti Saruaso di Tanah Datar. Dengan kekuatan yang ada, Belanda harus menghadapinya. Sementara itu, kepala-kepala adat dari daerah XIII Kota dapat memengaruhi penduduk XX Kota untuk menentang Belanda dengan tidak membayar cukai dan pajak pasar yang dibebankan atas mereka. Ternyata perjanjian perdamaian tertanggal 15 November 1825 tidak ada artinya lagi.

Kecurigaan terhadap Belanda terutama terdapat pada kaum Padri di Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawan seperjuangannya, Tuanku nan Gapuk dan Tuanku Hitam. Pengalaman dalam perjanjian dengan Belanda di Masang yang ditandatangani di Padang pada tanggal 26 Januari 1825 yang akhirnya tidak ditepati sendiri oleh Belanda, adalah penyebab hilangnya kepercayaan pada Belanda.

Dalam hubungan dengan perlawanan kaum Padri perlu diketahui bahwa di antara pemimpin-pemimpin mereka tidak selalu terdapat kesamaan pendapat. Sikap golongan Padri yang tidak menginginkan jalan kekerasan dalam menghadapi kaum Adat ditentang oleh golongan Padri yang keras pendiriannya. Perbedaan pendirian ini menyebabkan pecahnya kekuatan kaum Padri sendiri. Meskipun demikian, dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda, tampak bahwa mereka sama-sama menunjukkan sikap menentang. Hal ini terlihat pada sikap Tuanku nan Garang dan Tuanku Ibrahim yang meskipun lunak terhadap kaum Adat, ternyata tidak mudah diajak bekerja sama dengan pemimpin militer Belanda di Padang, De Richemont.

Di daerah VII Kota di Pariaman pengikut Padri aktif mengadakan operasi. Saat itu di Naras pengaruh pemimpin Padri Tuanku nan Cerdik sangat besar. Dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1829 menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten De Richemont yang berkekuatan 130 orang serdadu dan 50 orang marine, Tuanku nan Cerdik berhasil mengalahkannya sehingga menyebabkan kerugian musuh 5 serdadu tewas, di antaranya seorang letnan laut, dan 30 orang lainnya luka-luka. Pemimpin pasukan lawan terpaksa menunggu lagi pasukan bantuan.

Kelemahan pasukan Belanda di pelbagai daerah pertempuran membawa akibat makin meluasnya perlawanan kaum Padri. Di samping

itu, terlihat pasukan kaum Adat yang kecewa mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kira-kira 70 orang penghulu adat dengan bantuan penduduk XIII Kota yang bersikap anti-Belanda telah menyerbu Padang, tetapi kemudian mengundurkan diri setelah lebih kurang 100 orang serdadu Belanda melawannya. Sementara itu, kaum Padri yang bergerak di sebelah utara Pasaman berhasil menduduki Air Bangis. Air Bangis dijaga oleh pasukan Padri berkekuatan sebanyak 300 orang, sedangkan dari arah laut penjagaan dibantu oleh perahu-perahu Aceh di bawah pimpinan Sidi Mara.

Melihat situasi perang tersebut, tampak jelas bahwa kedudukan Belanda di Sumatra Barat cukup sulit. Residen MacGillavry, dan pemimpin militer De Richemont tidak berhasil mengalahkan sama sekali perlawanan kaum Padri. Kaum Adat tidak seluruhnya memihak kepadanya, sedang kaum Padri makin berani mengganggu daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal van Den Bosch memandang perlu untuk mengadakan mutasi pimpinan pemerintah Belanda di Sumatra Barat. Pada tanggal 4 Maret 1831 Kolonel G.P.J. Elout diangkat menjadi residen merangkap pemimpin tertinggi militer di Sumatra Barat. Tugas pertama Elout adalah mematahkan perlawanan kaum Padri atau setidak-tidaknya menghalang-halangi meluasnya kekuasaan kaum Padri.

Kekuatan militer yang terbatas dari Elout sebenarnya tidak memungkinkan untuk mematahkan perlawanan kaum Padri. Waktu itu Elout hanya mempunyai serdadu sebanyak 707 orang dan 26 opsir. Separuh dari 707 orang serdadu tersebut adalah orang bumiputra. Kekuatan militer ini harus dibagi untuk menjaga 18 pos militer. Dengan kekuatan yang ada ini, Belanda ingin mematahkan kekuatan kaum Padri. Tuanku nan Cerdik yang waktu itu bermarkas di Naras menjadi sasaran pertama Elout. Telah disebutkan bahwa pengaruh pemimpin Padri di Naras sangat besar. Serangan Belanda terhadap kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku nan Cerdik dilakukan dengan tiba-tiba pada tanggal 6 Juni 1831 sehingga dalam pertempuran yang terjadi pasukan Tuanku nan Cerdik terpaksa menyingkir ke Bonjol.

Sementara itu, pasukan Padri yang berada di sebelah utara Muarapalam pada tanggal 18 Agustus 1831 terlibat dalam pertempuran dengan pasukan lawan. Di daerah lain, pertempuran masih terus berlangsung. Pertahanan kaum Padri di Sijantang pada tanggal 14 September 1831 mendapat serangan dari pihak Belanda dengan pasukan Bugis yang berjumlah 120 orang. Pertahanan Padri di sini cukup kuat sehingga Belanda harus menantikan bantuan pasukan lain untuk menghadapinya lagi. Baru pada tanggal 22 September 1831 pertahanan Padri di Sijantang dapat dipatahkan oleh Belanda.

Tuanku nan Cerdik yang menyingkir setelah gagal dalam mempertahankan Naras, mulai beroperasi di daerah XII Kota. Ia mengadakan kerja sama dengan Tuanku Imam Bonjol dalam penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos Belanda. Dalam bulan Maret 1832 Tuanku nan Cerdik berhasil menghimpun kekuatan di XII Kota untuk mempersiapkan penyerangan terhadap pasukan musuh yang berada di V Kota dan VII Kota. Bersama-sama dengan pasukan Tuanku Imam Bonjol yang terdiri atas 4.000 orang, pasukan Tuanku nan Cerdik yang berkekuatan 3.000 orang mengadakan gerakan ke arah Tiku. Gerakan ini telah menimbulkan kekhawatiran pimpinan militer Belanda. Pasukan gabungan dari Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku nan Cerdik ini berhasil menduduki Mengopo dan membuat markas di situ. Dalam hubungan ini Belanda memberangkatkan pasukannya yang berkedudukan di Pariaman menuju arah Tiku dan kemudian menyerang pasukan Padri di Manggopoh. Pertempuran seru yang terjadi meminta banyak korban di kedua belah pihak.

Di daerah Agam, Tuanku Damasiang yang bermarkas di sebelah selatan Kapau merupakan ancaman terhadap pertahanan Belanda di Fort De Kock. Dengan susah payah pasukan Belanda yang berkekuatan 250 serdadu dapat mematahkan perlawanan pasukan Tuanku Damasiang. Untuk menjaga perlawanan Padri selanjutya Belanda mendirikan pos penjagaan di Bukit Koriri di Cilatang. Sementara Belanda berhasil menduduki beberapa tempat di daerah Agam, pasukan Padri telah berhasil memperluas daerah pengaruhnya ke daerah-daerah pantai sebelah utara Padang.

Dalam hubungan ini Gubernur Jenderal van Den Bosch sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan koloni Belanda di Hindia Belanda menginginkan persoalan di Sumatra Barat selekas mungkin dapat diatasi, dalam arti, perlawanan kaum Padri harus segera dikalahkan sehingga Belanda dapat berkuasa di seluruh Sumatra Barat. Bantuan militer yang dikirim dari Batavia tiba di Padang pada pertengahan tahun 1832, berkekuatan tiga kompi dengan perlengkapan beberapa meriam dan mortir. Di samping itu, ikut pula legiun Sentot Ali Basyah Prawirodirdjo yang terdiri atas 300 orang bersenjata. Pasukan ini disebar di pelbagai pos dan benteng Belanda dan sebagian dipergunakan untuk mengadakan operasi di daerah pedalaman.

Pertahanan kaum Padri di sebelah utara Tanjung Alam pada tanggal 22 Juli 1833 mendapat serangan dari pasukan Belanda. Dalam pertempuran ini pihak Padri dapat menewaskan antara lain seorang kapten. Dengan bantuan militer dari Jawa ini, pasukan Belanda bertambah kuat sehingga beberapa daerah yang dikuasai kaum Padri dapat didudukinya, seperti Tapi Selo bekas kedudukan Tuanku Pasaman. Di Kebon Belongkat yang terletak

sebelah timur Muarapalam, demikian pula di Buo, Belanda mendirikan kubu untuk menjaga daerah yang telah dikuasainya. Perlu juga disebut pertempuran besar yang terjadi di Agam. Dalam pertempuran pada tanggal 29 Juli 1833 ini pasukan Padri yang berjumlah 2.000 orang berhadapan dengan pasukan musuh yang membawa kerugian di pihak Belanda 8 orang tewas dan 40 orang luka-luka, tetapi tidak sedikit pula korban di pihak kaum Padri. Belanda berhasil meminta keterangan dari Tuanku nan Cerdik, yang waktu itu oleh Belanda diangkat sebagai Raja Bicara, tentang kekuatan kaum Padri di Bonjol untuk mengadakan serangan lagi ke daerah pantai. Oleh karena itu, Belanda segera mengirimkan pasukan untuk menghalang-halangi kemungkinan gerakan pasukan Padri Bonjol tersebut. Belanda lalu mengambil jalan lewat Tiku, Manggopoh, Bevervoorde sampai di Lubuk Ambalu dan mendirikan kubu di situ.

Sementara itu, pertempuran yang terjadi di sekitar jurang antara Mantua dan Agam pada tanggal 10 September 1833 membawa kekalahan pada pihak kaum Padri, meskipun mereka dapat menewaskan beberapa serdadu Belanda, di antaranya seorang letnan kolonel. Beberapa distrik dan seluruh daerah VIII Kota telah jatuh ke tangan Belanda. Penyerangan-penyerangan pasukan Padri pada pos-pos maupun benteng-benteng Belanda masih terus dilakukan, seperti penyerangan benteng Belanda di Amerongen oleh Tuanku Tambusai pada pertengahan Januari 1833, serta penyerangan pos Belanda di Guguk Sigandang oleh Tuanku Daimasiang pada akhir Mei 1833, penyerangan benteng Belanda di Pantar pada tanggal 22 November 1833 dan benteng Belanda di Amerongen lagi pada tanggal 21 Oktober 1833.

3. Akhir Perang

Pada akhir tahun 1834, Belanda baru dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang Bonjol, setelah jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai dikuasai oleh Belanda. Pada akhir September 1834 pasukan Belanda menyiapkan pasukan besar untuk mulai menyerang Bonjol. Dilihat dari gerakan-gerakan militer yang dilakukan Belanda mulai tahun 1835 tampak jelas bahwa kekuatan militernya sebagian besar dikerahkan untuk meruntuhkan kekuatan kaum Padri di Bonjol. Untuk tujuan ini, daerah-daerah sekitar Bonjol dicoba untuk dikuasainya. Hal ini tampak misalnya dalam persiapan mereka untuk beroperasi ke daerah Alahan Panjang, dengan mengerahkan pasukan yang cukup besar. Bonjol didekati dari beberapa jurusan. Pada tanggal 21 April 1835 dua kelompok pasukan Belanda telah menyerang pertahanan kaum Padri di sekitar

Semawang Gadang. Pasukan Padri setelah melakukan pertempuran ternyata tidak dapat mengatasi kekuatan musuh sehingga terpaksa menyingkir. Pasukan tersebut yang kemudian bergerak maju sampai di dekat Kumpulan (jarak lebih kurang 1½ jam perjalanan dari Bonjol) telah disambut oleh pasukan kaum Padri yang berada di daerah tersebut. Kekuatan kaum Padri sebesar 12.000 orang di daerah itu akhirnya dapat memukul mundur pasukan musuh sehingga pemimpin pasukan Belanda merasa perlu mendatangkan bantuan pasukan yang sedang berada di Batipuh. Dalam menghadapi pasukan Belanda, setelah mendapat bantuan itu pasukan Padri ternyata kalah kuat sehingga terpaksa mundur. Pertahanan Belanda yang berada di Batu Bedindit kemudian dikepung oleh pasukan Padri tersebut, tetapi usaha kaum Padri untuk menduduki daerah itu tidak berhasil. Pada tanggal 11 Mei 1835, benteng Padri di sebuah bukit dekat Bonjol juga telah diduduki pasukan Belanda.

Kesulitan yang diderita oleh kaum Padri di Bonjol berawal dengan ditutupnya jalan-jalan penghubung dengan daerah lain oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 11 sampai 16 Juni 1835, sayap kanan pasukan Belanda telah berhasil menutup jalan yang menghubungkan benteng Bonjol dengan daerah sebelah barat. Gangguan-gangguan dari pasukan Belanda dilakukan untuk mengacaukan penghuni benteng Bonjol. Pada tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol telah ditembaki meriam Belanda dan seterusnya pada tanggal 21 Juni kubu pertahanan Belanda maju lagi mendekati benteng Bonjol. Dalam pertempuran yang terjadi tanggal 11 Juni 1835 Belanda telah kehilangan 23 serdadu tewas dan 139 luka-luka, sedang di antara pasukan bantuan terdapat korban 7 orang tewas dan 85 orang luka-luka. Pada Agustus 1835, bukit yang terletak di dekat Bukit Terjadi telah jatuh ke tangan Belanda.

Pada tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol menyatakan kepada residen Belanda di Padang kesediaannya untuk mengadakan gencatan senjata. Untuk sementara waktu, aktivitas pasukan Belanda dihentikan setelah adanya perjanjian gencatan senjata itu. Waktu Belanda mendesak Tuanku Imam Bonjol agar menyerah bersama pengikutnya, mereka mendapat jawaban bahwa kaum Padri Bonjol mau menyerah apabila pasukan Belanda ditarik dari daerah Alahan Panjang. Karena Belanda tidak dapat menerima usul itu, keadaan menjadi tegang kembali. Pasukan-pasukan pengikut Tuanku Imam Bonjol beroperasi di luar benteng pada tanggal 2 Juni 1835 mulai mengadakan perlawanan lagi terhadap pasukan musuh. Serdadu Belanda pada tanggal 25 November 1835 berkumpul di depan benteng Bonjol bersama-sama dengan sejumlah 13.000 pasukan bantuan yang terdiri atas pasukan-pasukan bumiputra dari

penduduk setempat dari daerah lain. Dalam pertempuran yang terjadi, benteng Bonjol masih dapat dipertahankan oleh kaum Padri.

Selama tahun 1836 kekuatan kaum Padri masih belum dapat dipatahkan sama sekali oleh militer Belanda. Untuk mematahkan benteng Bonjol, Belanda mengerahkan lagi pasukan-pasukannya di sekitar Bonjol, antara lain pasukan orang Afrika. Pasukan ini digabungkan dengan pasukan-pasukan orang Bugis yang sengaja dikerahkan oleh Belanda untuk mematahkan perlawanan kaum Padri di Sumatra Barat.

Pada tanggal 10 Agustus 1837 Tuanku Imam Bonjol kembali menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perundingan perdamaian. Belanda mengharap bahwa perundingan tersebut akan diikuti dengan kesediaan Tuanku Imam Bonjol untuk menyerah. Namun, Belanda menduga bahwa kesediaan Tuanku Imam Bonjol tersebut hanya merupakan siasat untuk memperoleh waktu guna menggali lubang yang menghubungkan dalam dan luar benteng. Di samping itu, juga untuk mengetahui musuh yang berada di sekitar benteng Bonjol. Kegagalan usaha perdamaian menyebabkan timbulnya lagi pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837.

Pasukan Belanda yang bergerak dari arah utara pada tanggal 1 Juli 1837 menduduki Durian Tinggi, Talu, dan kampung-kampung di Lubuk Sikaping pada tanggal 3 Juli 1837. Dalam pertempuran bulan Oktober 1837, pengepungan dilakukan oleh pasukan-pasukan Belanda terhadap benteng Bonjol. Tembak-menembak terjadi antara pasukan Belanda di luar benteng dan pasukan Padri di dalam benteng. Meriam-meriam kaum Padri tidak banyak menolong karena musuh berada dalam jarak dekat. Akhirnya benteng Bonjol yang dipertahankan oleh kaum Padri dengan sekuat tenaga dapat dimasuki oleh pasukan Belanda. Pasukan Padri Bonjol tidak berdaya lagi berhadapan dengan pasukan musuh yang lebih besar jumlahnya di samping senjata yang lebih lengkap sehingga terpaksa menyerah. Penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya terjadi pada tanggal 25 Okboter 1837 dan merupakan pukulan berat bagi perlawanan kaum Padri pada umumnya. Kaum Padri terpaksa meninggalkan Bonjol untuk meneruskan perang di hutan-hutan.

Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839 beliau dibuang ke Ambon, lalu pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado, dan meninggal di sana pada tanggal 6 November 1864.

Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah menyerah kepada Belanda, gerakan Padri tetap meneruskan perjuangan. Tuanku Tambusai mengadakan perlawanan terhadap Belanda di sekitar daerah Rao dan
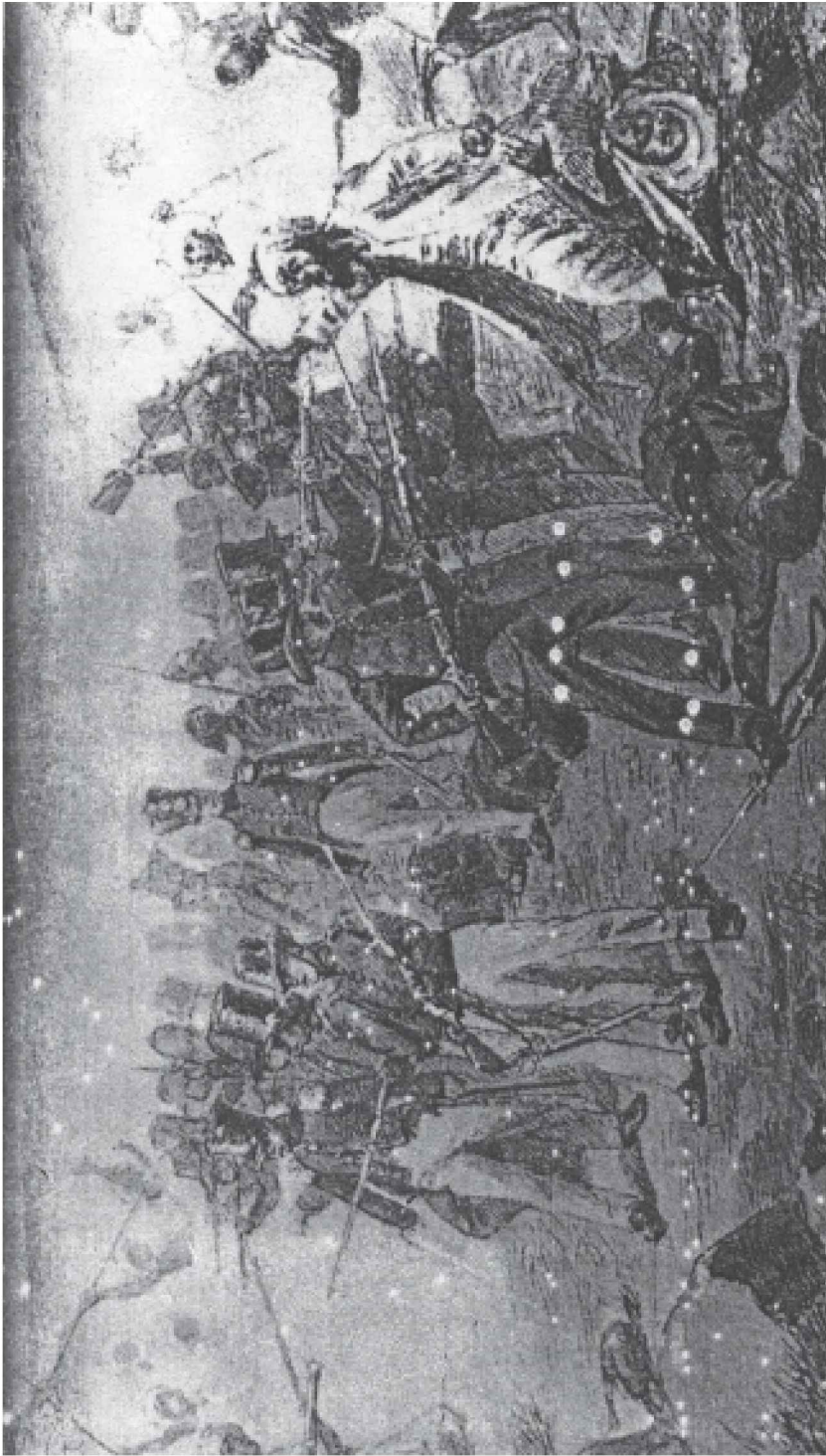
Gambar 5. 4 Sebuah lukisan Belanda yang maksudnya memperlihatkan serangan kaum Padri terhadap pasukan mereka di bawah pimpinan Letnan Kolonel Vermeulen Krieger bulan Januari 1833.
(Foto: *Kementerian Pertahanan Belanda,* Seksi Sejarah Militer Angkatan Darat Hindia Belanda)
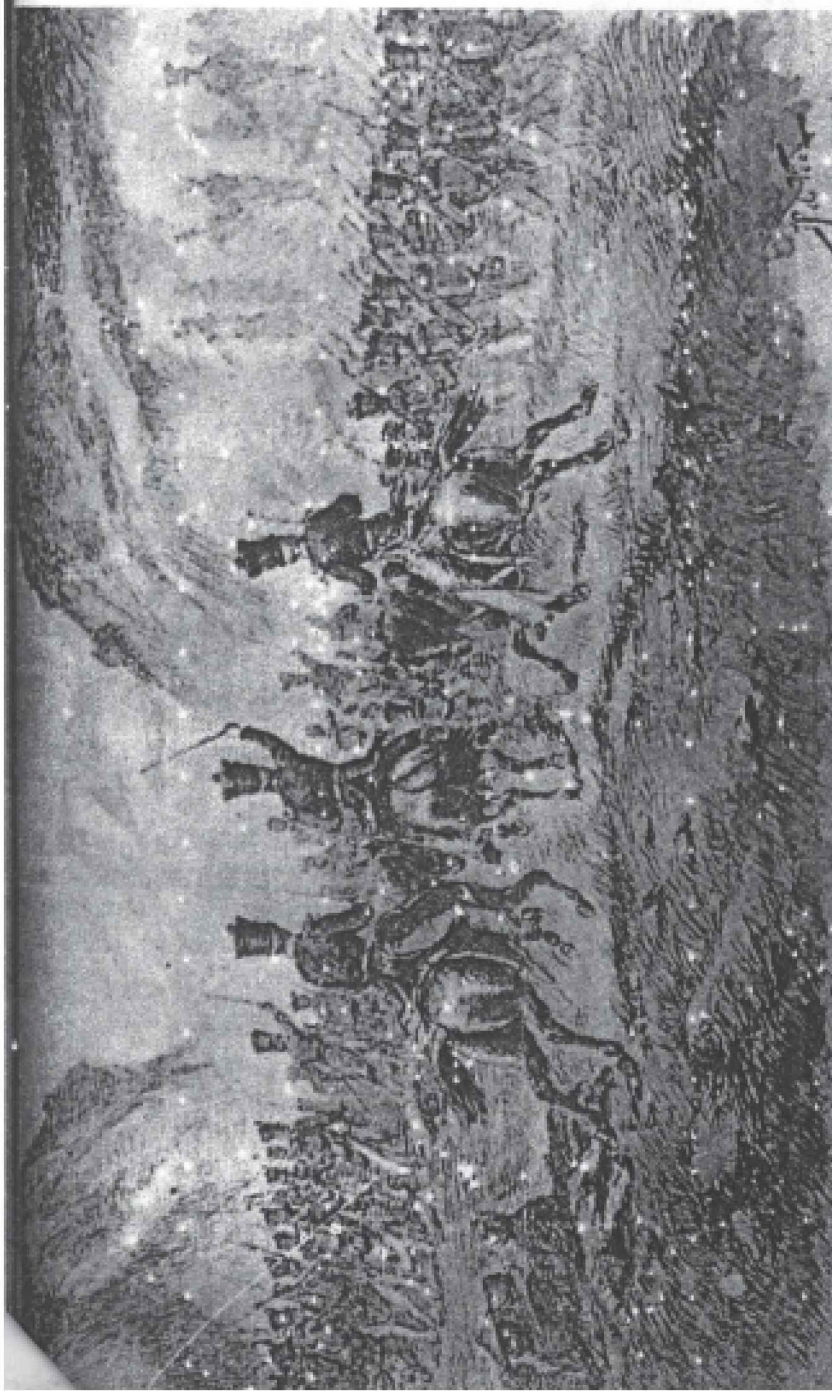
Gambar 5. 5 Sebuah lukisan Belanda tentang serangan atas Tanjung Alam di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaff pada tahun 1822.
(Foto: *Kementerian Pertahanan Belanda,* Seksi Sejarah Militer Angkatan Darat Hindia Belanda)

Mandailing. Belanda menugaskan Mayor van Bethoven untuk menghadapi Tuanku Tambusai. Pada bulan November dan Desember 1837, pasukan Belanda itu bergerak ke dan menduduki Portibi, Kota Pinang, Angkola, Sipirok, dan Padang Lawas.

Pada tanggal 18 Januari 1838, Kolonel Michiels menggantikan Francis sebagai kepala pemerintahan sipil di Sumatra Barat. Sementara itu, usaha untuk menindas perlawanan Tuanku Tambusai dijalankan terus. Tuanku Tambusai menyingkir ke Dalu-Dalu, sebelah tenggara Portibi. Pada bulan April 1838, Lubuk Antai ditinggalkan kaum Padri dan Dalu-Dalu diserang. Akhirnya, Tuanku Tambusai berhasil dikalahkan pada 28 Desember 1838.

Secara umum perlawanan kaum Padri dapat dipatahkan pada akhir tahun 1838. Dengan demikian, kekuasaan Belanda telah tertanam di Sumatra Barat.

D. Sulawesi Selatan

1. Pendahuluan

Pada tahun 1607 Belanda berhasil mendirikan sebuah kantor dagang di Makassar. Dengan demikian, kontak-kontaknya dengan para penguasa tradisional dapat dilakukan secara lebih intensif. Akan tetapi, terbukanya kemungkinan intensifikasi kontak-kontak semacam itu membuka pula peluang yang lebih besar bagi Belanda untuk menjalankan tujuan utamanya untuk menguasai secara penuh arus perdagangan melalui Sulawesi Selatan. Bersamaan dengan usaha intensifikasi kontak-kontak itu, dijalankan pula usaha-usaha untuk "memperkecil" penguasaan arus perdagangan yang selama ini berada di tangan para penguasa setempat. Adanya sikap yang demikian dari pihak Belanda tentu saja menimbulkan reaksi dari pihak penguasa setempat.

Reaksi yang terkuat muncul ketika kerajaan Gowa berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Raja Gowa (Sombayya ri Gowa) ini menentang keras usaha-usaha Belanda untuk menjadi penguasa di Sulawesi Selatan. Bagi Sultan Hasanuddin tidak ada seorang pun, termasuk juga Belanda, yang berhak untuk menjadi penguasa tunggal (monopoli) di bidang perdagangan. Oleh karena itu, ia menolak melakukan pembatasan terhadap bangsa-bangsa lainnya, seperti Portugis dan Spanyol, untuk ikut berdagang di wilayah negara kerajaannya. Sikap ini dengan sendirinya tidak menguntungkan pihak Belanda. Ketegangan hubungan yang pada akhirnya melahirkan peperangan tidak dapat dihindari, yaitu pada tahun 1666. Kenyataan ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa di dalam

usahanya untuk menguasai wilayah dan arus perdagangan Sulawesi Selatan, Belanda harus menghadapi reaksi aktif dari pihak penguasa setempat.

Di dalam usahanya untuk menguasai wilayah dan arus perdagangan Sulawesi (Selatan) itu, terdapat keadaan dalam negeri yang cukup menguntungkan pihak Belanda yang lebih memperlicin usaha penguasaannya. Yang dimaksudkan adalah adanya pertentangan antara negara Bone dan Gowa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Pertentangan ini berawal dari usaha-usaha kerajaan Gowa untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya di wilayah kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi (Selatan), termasuk usahanya untuk menguasai Bone. Sehubungan dengan itu, salah seorang penguasa Bone, Arung Palaka, berusaha untuk melepaskan diri dari Gowa.

Usaha Arung Palaka, yang dibantu sepenuhnya oleh para pemimpin kerajaan Bone lainnya, untuk melepaskan diri dari kekuasaan Gowa telah lama dilakukan. Usaha itu tidak jarang dilakukan dengan jalan kekerasan, yang mendorong timbulnya pertempuran di antara kedua negara ini. Salah satu di antara pertempuran yang terbesar itu terjadi pada tahun 1660. Dalam pertempuran ini salah seorang pemimpin utama laskar Bone, yaitu Tobala, tewas. Namun, Arung Palaka yang juga ikut memimpin laskar Bone berhasil meloloskan diri, walaupun nyaris tewas di dalam pertempuran itu. Arung Palaka berhasil menyembunyikan diri untuk kemudian kembali berusaha menyusun kekuatannya. Walaupun berhasil mengumpulkan kekuatan sebanyak 4.000 orang, dan melakukan penyerangan, Arung Palaka gagal mengalahkan pasukan-pasukan kerajaan Gowa.

Menghadapi kenyataan ini, Arung Palaka tampaknya menyadari bahaya yang akan dihadapinya jika dia tetap berada di Bone. Oleh karena itu, ia berusaha untuk meninggalkan daerahnya agar tidak menjadi korban kekuasaan Gowa. Dia berhasil memperoleh perlindungan dari Sultan Buton, dan setelah berada di Buton selama lebih kurang tiga bulan, akhirnya dia berhasil "menyingkir" ke Batavia.[63] Dengan dasar itu, lahirlah kerja sama antara Arung Palaka dan Belanda untuk menghadapi Sultan Hasanuddin. Di dalam pertentangan-pertentangan antara kekuatan-kekuatan ini, mereka juga telah berusaha dan berhasil mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Dalam hubungan itu, kerajaan Gowa (Sultan Hasanuddin) dibantu sepenuhnya oleh kerajaan Wajo, dan kerajaan Bone (Arung Palaka) dibantu sepenuhnya oleh kerajaan Soppeng.

---

[63] Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Wadjo*, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1967, hlm. 42

Kerja sama antara kedua kekuatan ini pada akhirnya mengakhiri kekuasaan Gowa atas Bone, dan Sultan Hasanuddin harus menerima kenyataan bahwa Belanda akan memegang monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan. Arung Palaka pun berhasil membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan kerajaan Gowa. Ia kemudian diangkat sebagai Raja Bone. Kerja sama antara Arung Palaka dan Belanda tentu saja memberikan keuntungan bagi Belanda, yaitu usaha menguasai Sulawesi Selatan akan makin berhasil. Kekuasaan Belanda mendapat pengakuan dari kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Lamuru, Mario, Soppeng, dan Wajo.

Perluasan pengakuan kekuasaan Belanda itu tidak sepi dari perlawanan-perlawanan yang kuat. Hal ini makin tampak setelah mangkatnya "sekutu" Belanda, Arung Palaka. Kemangkatan beliau digunakan oleh beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda. Kerajaan Wajo melakukannya pada tahun 1710, dan dengan bantuan bajak-bajak laut, pasukan-pasukan kerajaan Wajo muncul di perairan Makassar, dan mendarat untuk kemudian bergerak sampai ke Maros. Penyerangan yang dilakukan ini gagal, dan pasukan kerajaan Wajo mengundurkan diri ke arah lain.

Kemudian, ketika Lamaddukkeleng menjadi *Arung Matoa Wajo* perlawanan itu dilanjutkan. Ia berhasil membangun kembali kekuatannya bersama dengan kerajaan Gowa yang berusaha mengusir Belanda dari Sulawesi (Selatan). Usaha itu berhasil karena ketika itu *Pabbicara Butta* Gowa, yaitu La Maplasepe KaraEng Bontolangkasa, juga sangat tidak senang dengan kekuasaan Belanda di bumi "tanah airnya". Pada bulan Mei 1739 kedua tokoh anti Belanda itu mewujudkan serangannya kepada Belanda dalam bentuk menyerang beberapa daerah kekuasaan Belanda di Makassar, seperti kampung Maccini' dan Maricayya. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilakukan oleh Wajo dan Iowa itu tidak berhasil. Bahkan, ketika penyerangan sedang dilakukan, orang-orang Bone yang bergabung dengan Lamadduk-Kelleng berbalik menentangnya. Kelompok orang Bone ini rupanya berhasil dipengaruhi oleh mantan permasuri Raja Bone, Batararitoja, yang lari ke Makassar, dan mendapat perlindungan dari Belanda. Akibat kekalahannya itu, Lamaddukkelleng kembali ke Wajo.

Arung Mato Wajo Lamaddukkelleng adalah seorang raja Wajo yang hampir seluruh mata pemerintahannya dipenuhi oleh usaha-usaha untuk mengusir Belanda dari bumi Sulawesi Selatan. Di samping itu, ia juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, raja ini pernah melakukan serangan ke beberapa kerajaan lainnya, seperti ke daerah Mandar. Akan tetapi, usahanya dapat dikatakan tidak berhasil. Sampai pada saat mengundurkan diri pada tahun 1754 beliau tetap pada usaha

tersebut. Akan tetapi, pengunduran dirinya cukup tragis, yaitu karena beliau kecewa atas makin berkurangnya dukungan yang diperolehnya dari rakyat atas usaha-usaha perlawanannya terhadap Belanda, dan usaha perluasan kekuasaan kerajaan Wajo itu.

Meskipun kerajaan Gowa telah berada di bawah kekuasaan Belanda, usaha untuk melakukan perlawanan masih tetap berlanjut. Adanya kenyataan ini mendorong pimpinan kompeni Belanda di Batavia untuk mengirimkan sebuah ekspedisi militer ke Makassar dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan kerajaan Gowa dan sekutu-sekutunya. Keterbatasan kekuatan kompeni Belanda tidak memungkinkan untuk tetap menguasai dan mengawasi secara langsung daerah-daerah yang telah direbutnya. Daerah-daerah yang telah ditaklukkannya itu pada akhirnya diserahkan kembali kepada seorang raja/penguasa setempat, tetapi dengan status pinjaman. Kenyataan inilah yang tetap membuka peluang bagi raja-raja setempat tersebut untuk tetap berusaha memperkuat kembali kedudukannya. Di antara raja-raja yang menerima daerah yang berstatus pinjaman itu adalah Raja Bone. Kedudukan Raja Bone di antara raja-raja di Sulawesi Selatan, adalah cukup penting, dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dia cukup berpengaruh untuk mengajak raja-raja lainnya melakukan penentangan terhadap Belanda. Hal yang demikian pernah dibuktikan dengan usaha pemboikotannya terhadap perdagangan budak yang dilakukan oleh kompeni Belanda. Tindakan pemboikotan ini dibantu oleh beberapa raja dari kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Bahkan, mengancam untuk menghancurkan benteng kompeni Belanda, *"Rotterdam"*.

Pada tahun 1811 terjadi perubahan penguasa kolonial di Indonesia. Wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi (Selatan), tidak lagi diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi oleh pemerintah kolonial Inggris. Akan tetapi, perubahan itu tidak membawa arti yang penting bagi negara-negara kerajaan di Sulawesi Selatan. Pola penjajahan Inggris tetap sama dengan Belanda. Pertentangan-pertentangan yang sering terjadi antara negara yang satu dengan yang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh kompeni pemerintah Belanda, juga tetap digunakan oleh Inggris di dalam usahanya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Sebaliknya, tidak semua kerajaan di Sulawesi Selatan dapat menerima Inggris sebagai penguasa baru di wilayahnya. Kerajaan Bone adalah salah satu di antaranya. *Arumpone* menolak penyerahan wilayah kekuasaan Belanda kepada Inggris karena beranggapan bahwa wilayah kerajaan bukanlah daerah kekuasaan mutlak dari kompeni Belanda. Dia beranggapan negaranya adalah kerajaan "merdeka". Sikap raja Bone ini disetujui sepenuhnya oleh kerajaan Ternate dan Suppa. Sikap keras ketiga negara

itu terhadap kompeni Inggris ditunjukkannya dengan menolak undangan menghadiri upacara penandatanganan penyerahan kekuasaan dari kompeni Belanda kepada Inggris. Dengan demikian, hubungan antara kerajaaan Bone, Ternate, dan Suppa dengan kompeni Inggris dalam keadaan yang cukup tegang. Karena sikap ketiga negara itu tetap tidak berubah, Belanda melangkah dengan tindakan kekerasan dalam bentuk pertemuan antara mereka. Gowa dan Sidenreng, karena keterikatan pada perjanjian, tetap memihak kepada Inggris. Akan tetapi, Bone, Tanete, dan Suppa berhasil memperoleh dukungan dari negara lain, seperti Sawitto, Alitta, dan Rappeng. Keadaan yang demikian berlangsung sampai datangnya kembali Belanda ke Sulawesi Selatan pada tahun 1816.

Kembalinya Belanda ke Sulawesi Selatan tidaklah mengubah cap penentangan negara-negara Bone, Tanete, dan Suppa terhadap kekuasaan asing. Lain halnya dengan kerajaan Gowa yang ketika itu lebih bersikap lunak menghadapi kekuasaan Belanda. Di lain pihak, kerajaan Soppeng dan Wajo menyatakan dirinya sebagai negara-negara yang merdeka. Kenyataan menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan tidak cukup mampu untuk menekan sama sekali kekuasaan raja-raja kerajaan Sulawesi Selatan. Tampak dengan jelas bahwa situasi Sulawesi Selatan cukup sulit untuk dikuasai oleh penguasa kolonial Belanda. Ketika Gubernur Jenderal van der Cappellen tiba di Makassar pada bulan Agustus 1824, ia menyaksikan bahwa kekuatan Belanda di situ hanya terdiri atas 30 orang opsir dan 371 orang serdadu. Kekuatan ini masih harus dibagi-bagi penempatannya di beberapa pos yang tersebar di daerah-daerah yang saling berjauhan. Agar kekuatannya dapat bertambah, penguasa kolonial melakukan pendekatan kepada beberapa raja yang dapat atau bersedia memihak kepadanya.

Di dalam perkembangannya kemudian, penguasa kolonial Belanda berkehendak untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Bongaya. Kehendak yang demikian ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari raja-raja di Sulawesi Selatan. Penerima undangan untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan oleh Belanda adalah raja-raja Gowa dan Sidenreng, sedangkan raja-raja Bone, Ternate, dan Suppa tidak bersedia hadir. Bahkan, ketiga negara ini berusaha menghalangi usaha penanaman kekuasaan Belanda di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

2. Jalannya Perang

Adanya sikap yang demikian dari ketiga raja tersebut di atas, mendorong penguasa kolonial Belanda untuk mengirimkan ekspedisi

militernya ke daerah-daerah tersebut. Pada tahun 1824 Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke wilayah Suppa dan Tanete. Belanda berusaha untuk menaklukkan negara-negara ini dengan kekerasan. Kehendak yang demikian disambut oleh Tanete di bawah pimpinan rajanya, La Patau. Pada tanggal 16 Juli 1824 pasukan Belanda, di bawah pimpinan de Stuers, telah mendarat di dekat Ance, sebuah tempat di sebelah utara muara Sungai Pancana. Rakyat Tanete di bawah pimpinan Raja La Patau mencoba mempertahankan wilayah kerajaannya dari serangan tersebut, tetapi mereka gagal karena kekuatan yang tidak seimbang, dan alat persenjataan Belanda yang lebih baik. Di dalam pertempuran itu, tiga orang serdadu Belanda tewas, salah seorang di antaranya bernama Burger dengan pangkat letnan. Ketika Raja La Patau mengetahui ketidakseimbangan kekuatannya dengan pasukan Belanda, beliau mengundurkan diri ke daerah pedalaman yang lebih aman. Takhta kerajaan diserahkannya kepada seorang saudara perempuannya yang bernama Da Eng Tanningsanga. Raja ini diakui kekuasaannya oleh Belanda karena bersedia menandatangani perubahan Perjanjian Bongaya seperti yang dikehendaki oleh Belanda.[64] Dengan demikian, negara Tanete dikuasai oleh Belanda. Untuk menjaga perlawanan yang mungkin timbul lagi, Belanda mendirikan pos-pos di tempat-tempat yang strategis, seperti di pantai sebelah selatan Sungai Pancana, dan benteng-benteng di Manle, Segeri.

Bekas Raja La Patau kemudian mendapat pengampunan, bahkan kemudian diangkat kembali sebagai *Arung Matoa.* Akan tetapi, raja ini tidak dapat dikendalikan oleh Belanda; kemudian beliau kembali melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Kemudian timbul lagi bentrokan antara La Patau dengan Belanda. Penentangan La Patau berlangsung terus sampai pada saat dia harus meninggalkan daerahnya karena tidak mampu menghadapi kekuatan Belanda yang dibantu oleh beberapa orang raja lainnya. Dia kemudian digantikan oleh Larumpung Megga Dulung Lamuru' yang diangkat oleh Belanda.[65]

Di daerah Suppa para pasukan kerajaan yang dipimpin oleh rajanya yang bersiap untuk menghadapi kedatangan pasukan Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1824 pasukan-pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Laut Buys mendarat di Pare-Pare, yaitu kota pelabuhan yang terletak beberapa kilometer (sebelah selatan) dari Suppa. Kedatangan mereka

---

[64] Abd. Razak Daeng Patunru, "Sejarah Kerajaan Ternate", di dalam *Bingkisan*, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Oktober, 1967, hlm. 3

[65] *Ibid.*, hlm. 4

disambut oleh pasukan Suppa dengan perlawanan yang kuat. Dengan itu terjadilah pertempuran pasukan-pasukan Belanda. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda memperoleh bantuan dari pasukan negara Sidenreng. Walaupun demikian, ternyata pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan Sidenreng itu tidak berhasil menaklukkan pasukan-pasukan kerajaan Suppa. Karena pasukan mereka yang berjumlah lebih kurang 4.000 orang itu ternyata telah siap menghadapi serangan Belanda itu. Bahkan, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Reeder menderita kekalahan, dan meninggalkan dua orang opsir, dan 11 orang serdadu biasa ditambah dengan 31 orang yang luka-luka.

Dari jalannya pertempuran yang digambarkan di atas tampak bahwa pasukan Suppa cukup kuat dan tangguh dalam mempertahankan diri dari serangan dari pasukan gabungan Belanda Sidenreng. Kekalahan yang diderita oleh pasukan Belanda itu menyadarkan pimpinan militer yang berkedudukan di Makassar, bahwa Suppa cukup sulit ditaklukkan oleh pasukan ekspedisi yang dikirimkannya itu. Kesadaran itu mendorong pimpinan militer Belanda tersebut untuk berusaha membangun kembali kekuatan pasukan gabungannya dengan kerajaan Sidenreng, untuk dikirimkan ke Suppa.

Penyerangan ke Suppa dilakukan pada bulan Agustus 1824. Dalam penyerangan itu kelihatan dengan jelas kelemahan kekuatan pasukan Belanda. Dengan kekuatan yang hanya terdiri atas 270 orang, de Stuers sebagai pemimpin pasukan Belanda itu harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan kubu pertahanannya. Ternyata usaha mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh pasukan Suppa berhasil dilakukan oleh pasukan Belanda. Pasukan Suppa yang melakukan penyerangan itu dapat dipukul oleh mereka. Walaupun demikian, Belanda harus menerima kenyataan pahit, yaitu bahwa di dalam pertempuran beberapa orang perwiranya telah tewas, seperti Letnan Bauff, van Pelt, dan Banhoff. Pasukan Suppa terus melakukan perlawanan, dan dengan bersembunyi di dalam lubang-lubang, dan parit-parit, pasukan Suppa melakukan berbagai gangguan terhadap pasukan Belanda yang sedang berjaga-jaga di pos-pos atau yang sedang berpatroli.

Jika dilihat dari segi geografis, Suppa hanyalah merupakan sebuah negara kecil. Namun, perlawanan yang dilakukannya terhadap penguasa kolonial Belanda cukup tangguh dan menyulitkan posisi Belanda di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pimpinan militer Belanda mengirimkan sebuah pasukan bantuan untuk memperkuat pasukan ekspedisi yang telah dikirimkan itu. Pada tanggal 23 Agustus 1824 sebuah kapal perang yang membawa 110 orang serdadu infanteri yang membawa serta 10 pucuk

meriam tiba di pelabuhan Pare-Pare. Suppa kemudian dikepung oleh gabungan pasukan Belanda dan Sidenreng yang berkekuatan lebih kurang 2.000 orang, sedang Belanda hanya terdiri atas 70 orang. Akan tetapi, usaha kali ini pun berhasil digagalkan. Pasukan Sidenreng yang membantu Belanda mengundurkan diri karena salah seorang anak pemimpinnya menderita luka-luka berat.

Kegagalan ini pun belum juga mampu mendorong Belanda mengurungkan maksudnya untuk menghancurkan Suppa. Ternyata Belanda masih berusaha untuk mengulangi kembali penyerangannya yang sudah sekian kali gagal itu. Dengan kembali dibantu oleh pasukan Sidenreng, Belanda menyerang Suppa lagi. Walau menggunakan jumlah pasukan yang lebih besar, serangan kali ini pun gagal untuk menaklukkan Suppa. Salah satu penyebabnya adalah semangat perang di dalam diri pasukan-pasukan Sidenreng sangat menurun sehingga mengharuskan pasukan Belanda untuk bersandar pada kekuatannya sendiri. Sebagai akibatnya, Belanda harus mundur, dan kehilangan 12 orang serdadunya yang tewas, seorang di antaranya berpangkat letnan, dan 71 orang serdadu lainnya luka-luka. Usaha yang kesekian kali gagal itu memaksa de Stuers kembali ke Makassar pada tanggal 6 Oktober 1824. Untuk mengawasi daerah kerajaan Suppa, ditinggalkan sebanyak 100 orang serdadu.

Kerajaan Bone juga tetap melanjutkan usaha perlawanannya terhadap kekuasaan Belanda. Pos-pos Belanda di Pangkajene diserang, dan pos Belanda yang terletak di La'bbakang dihancurkan, negara Tanete diduduki, dan mengangkut kembali raja yang telah dipecat oleh Belanda. Ketika itu pasukan-pasukan Bone yang berjumlah 3.000 telah mendesak satu detasemen kecil pasukan Belanda yang berada di Pancana. Pasukan Belanda ini tentu saja akan dihancurkan oleh pasukan Bone seandainya tidak dibantu oleh sebuah tembakan dari kapal perang Belanda yang sengaja dikirimkan ke Pantai Bone.

Dalam bulan Oktober pasukan Bone menyaksikan gerakan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Le Clerq, komandan pasukan Belanda di Maros, dengan kekuatan 7 orang opsir, 10 orang serdadu berkuda, dan membawa serta 173 buah meriam. Pasukan ini berkedudukan di Bulu Seppong yang terletak kira-kira 24 kilometer dari Makassar. Gerakan pasukan Belanda ini dihadang oleh pasukan-pasukan Bone, dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Dalam pertempuran ini pasukan Bone memperoleh kemenangan. Belanda meninggalkan beberapa orang tewas, sebaliknya pasukan Bone berhasil merampas dua pucuk meriam pasukan Belanda. Dengan kemenangannya itu, pasukan

Bone menguasai jalan penting yang menghubungkan Makassar dan Maros yang terletak di sebelah utara Makassar.

Keadaan pasukan Bone memang sangat kuat dan mampu melakukan penyerangan-penyerangan yang sangat membahayakan. Kegiatannya untuk menghadapi Belanda tidak dihentikan, bahkan dipergiat. Para penguasa yang diangkat oleh Belanda diusir dari daerah kekuasaannya seperti yang dilakukannya terhadap diri penguasa di Segeri. Pasukan-pasukan ekspedisi dikirimkannya ke daerah-daerah lainnya, dan mendekati pos-pos pasukan Belanda di sebelah selatan *Bonthain*, Bulukumba. Sementara itu, daerah pengaruh kekuasaan kerajaan Bone makin meluas, dan hampir meliputi seluruh Semenanjung Sulawesi Selatan. Dengan demikian, keadaan Belanda makin sulit dan terjepit. Situasi yang membahayakan ini mendorong gubernur jenderal untuk mengerahkan kekuatan militer yang masih ada padanya. Pos-pos yang masih berada di dalam kekuasaannya diperkuat. Penyerangan terhadap pasukan Bone direncanakan jika musim hujan tiba kelak. Diawasinya jalan yang menghubungkan daerah-daerah Leong-Leong dan Semangi dengan Makassar, yakni dengan mendirikan tiga buah benteng yang diperkuat dengan pasukan-pasukan bantuan yang telah didatangkan. Demikian pula benteng Belanda di Maros yang dipimpin oleh Mayor van Coeshoors diperkuat dengan 253 orang serdadu.

3. Akhir Perang

Dari kenyataan yang diuraikan di atas, tampak bahwa Bone ternyata merupakan lawan yang cukup kuat bagi Belanda. Oleh karena itu, tidak mustahil jika Belanda akan melakukan pengiriman ekspedisi-ekspedisi militer besar-besaran untuk mengalahkan perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Bone tersebut. Di lain pihak kerajaan Bone berusaha sekuatnya untuk menghadapi perluasan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan; karena itu akan berarti membahayakan kemerdekaan kerajaan-kerajaan bumiputra di Sulawesi Selatan. Bone sebagai penghalang utama dalam usaha perluasan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan, disadari sepenuhnya oleh pemerintah pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Akhirnya Belanda mengirimkan pasukan ekspedisi yang berkekuatan besar yang dipimpin oleh Mayor Jenderal van Geen. Tugas utamanya adalah memperbesar kekuatan pasukan Belanda, dan menarik simpati dari sebanyak mungkin penguasa-penguasa setempat, untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Bone. Pada tanggal 20 Januari 1825 van Geen telah berada di Makassar dan menyiapkan rencana

pemberangkatan pasukan-pasukan ekspedisinya. Rencana penyerangannya diatur dengan mendaratkan sebagian pasukan di berbagai tempat, dan akan dilakukan tembakan-tembakan meriam terhadap daerah-daerah kedudukan pasukan Bone. Sebagian lagi ditugaskan untuk melindungi pos-pos Belanda. Baru setelah itu usaha selanjutnya akan diarahkan menguasai daerah-daerah pedalaman dengan tujuan agar daerah Pantai Bone dapat diduduki oleh pasukan Belanda.

Sementara menunggu pasukan yang didatangkan dari Maluku dan Madura, van Geen telah mengumpulkan 46 orang opsir dan 53 serdadu biasa di Makassar. Dalam persiapan ekspedisi ini ternyata van Geen mengalami kesulitan karena di samping perlengkapan yang sangat terbatas, juga kesehatan dari sejumlah pasukannya sangat buruk. Kesulitan lainnya adalah adanya perbedaan pendapat antara van Geen dengan penjabat Belanda lainnya, yaitu dengan van Schelle dan Tobias, yang masing-masing menjadi komisaris-komisaris Belanda di Makassar.

Perbedaan pendapat di antara ketiga pejabat pemerintah Belanda tersebut berpangkal pada pelaksanaan pengiriman ekspedisi. Di satu pihak kedua komisaris Belanda di Makassar itu menghendaki agar pengiriman ekspedisi ke Tanete dan Suppa lebih didahulukan. Di lain pihak van Geen melakukan pengiriman itu justru ke Bone terlebih dahulu, karena di antara ketiga kerajaan yang menentang Belanda itu, kerajaan Bone adalah jalan yang terbesar dan terkuat. Mendahulukan penaklukan kerajaan Bone akan lebih mempermudah menaklukkan kerajaan-kerajaan Suppa dan Tanete.

Meskipun kedua komisaris Belanda tersebut di atas menyarankan untuk mendahulukan penyerangan kepada kedua negara kecil, yaitu Suppa dan Tanete, di dalam praktiknya van Geen lebih mementingkan agar pengiriman ekspedisi ke Bone lebih didahulukan. Untuk maksud itu van Geen dengan segera mengirimkan Mayor van der Wijck ke Maros untuk melihat keadaan pertahanan Belanda di situ. Dalam pada itu pasukan-pasukan Bone telah bersiap untuk menghadapi penyerangan yang akan dilakukan oleh pasukan Belanda itu. Jalan yang menghubungkan Leong-Leong dengan Semangi diawasinya dengan ketat dengan membangun benteng-benteng pertahanan di daerah itu, yang dijaga oleh lebih kurang 600 orang. Dari arah sebelah utara pasukan Bone telah siap, apabila diperlukan untuk melakukan penyerangan.

Akhirnya pasukan van Geen yang bergerak ke daerah selatan berhadapan dengan pasukan Bone yang berkedudukan di Bonthain. Dalam pertempuran ini pasukan Belanda berhasil mendesak pasukan Bone. Demikian pula pertahanan Bone di Bulukumba terpaksa ditinggalkan, dan berhasil diduduki oleh pasukan Belanda. Pertempuran terjadi pula ketika

pasukan Bone yang berkedudukan di benteng-benteng Kajang dan Sinjai mendapat serangan dari Belanda. Semua benteng Kerajaan Bone itu pada akhirnya jatuh ke tangan Belanda, walaupun telah diusahakan untuk dipertahankan oleh pasukan Bone. Untuk menjaga benteng-benteng yang telah diduduki itu, Belanda menggunakan tenaga-tenaga bantuan yang diperoleh dari Gowa dan Maluku.

Salah satu faktor yang memperlemah kekuatan Bone ialah diserahkannya kedudukan raja Tanete kepada seorang raja perempuan yang berpihak kepada Belanda. Dengan demikian, Tanete dapat dijadikan sekutu Belanda. Dengan Sidenreng dan Tanete sebagai sekutunya, Belanda mengharapkan akan dapat mengimbangi kekuatan dari negara-negara lainnya yang menentangnya, seperti Suppa, Segeri, La'bbakang, dan Pangkajene.

Negara Segeri juga tetap melakukan perlawanan terhadap penduduk Belanda. Salah seorang pemimpin perlawanan yang terkenal, dan sangat disegani ialah La Sameggu Daeng Kalabbu. Akan tetapi, pada akhirnya perlawanan ini pun berhasil dipatahkan oleh kompeni Belanda.

Demikianlah gambaran perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi (Selatan), sepanjang abad ke-19. Dari gambaran tersebut tampaklah kepada kita bahwa sepanjang usaha penanaman kekuasaannya di wilayah Sulawesi (Selatan), Belanda telah menghadapi sekian banyak perlawanan, baik yang dilakukan secara besar-besaran maupun kecil-kecilan.

Usaha perlawanan ini tetap berlangsung sampai pada akhir ke-19, dan awal abad ke-20. Misalnya, seperti apa yang dilakukan oleh La Sinrang dari kerajaan Sawitto dan Pong Tiku di Tana Toraja.

E. Jawa Tengah dan Jawa Timur

1. Pangeran Diponegoro

Dalam memoarnya Diponegoro berkisah tentang dirinya, mengapa ia melakukan pemberontakan terhadap Sultan Yogyakarta. Pada suatu hari tanggal 21 Ramadan, tatkala sedang bersemedi ia mendapat perintah dari Ratu Adil.

> *"He, Ngabdulkamid, kupanggil kau kemari rebutlah tanah Jawa. Bila ada orang bertanya dasarnya adalah ayat Qur'an."*
>
> *"Mohon maaf saya tidak sanggup, saya tidak memiliki prajurit," jawab Diponegoro.*

Itulah bahasa simbol (perlambang) yang tertulis dalam memoarnya. Peristiwa tersebut merupakan monolog batin Diponegoro, antara keinginan yang kuat (ambisinya) dengan keraguannya. Perintah dipahami sebagai suatu tugas kewajiban membangun masyarakat baru di Kesultanan Yogyakarta yang berdasarkan ayat-ayat Alquran.[66] Membangun masyarakat baru telah menjadi cita-cita Diponegoro yang dengan mata kepala sendiri melihat meluasnya pengaruh budaya Barat dan ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi, ketidakadilan konflik antarbangsawan di Kesultanan Yogyakarta. Sejak ayahnya Sultan Hamengkubuwono III memegang tampuk pemerintahan, ia sangat prihatin dan malu terhadap terjadinya konflik suksesi antara kakeknya Sultan Hamengkubuwono II yang taat kepada agama dan adat istiadat keraton, lawan ayahnya yang masih berstatus sebagai Putra Mahkota (Pangeran Adipati Anom) yang berorientasi sekuler, cenderung pada budaya Barat.

"saya sangat sedih
saya kuatir nasib Bapak
mudah-mudahan ia sadar
tawakal atas bencana
apa yang harus saya lakukan
jika tidak saya tolong
bagaimana akhirnya
alangkah malu saya
masalah kecil yang diperebutkannya
anak memusuhi bapaknya"[67]

Sejak peristiwa itu, ia meninggalkan aktivitas di keraton, hanya melakukan audiensi kepada ayahnya pada hari-hari besar, seperti Garebeg Maulud dan Hari Raya. Ia menilai kakeknya sebagai seorang yang suka melanggar hukum dan tidak menepati janji, seperti membatalkan pencalonan ayahnya sebagai Putra Mahkota. Ayahnya dinilai sebagai anak yang durhaka kepada orang tua, lemah terhadap tekanan orang Barat, serta bersikap kebarat-baratan. Pengangkatannya menjadi sultan dibayar dengan biaya yang sangat mahal. Beberapa wilayah kerajaan yang subur dan strategis, Kedu, Japan, Jipang, dan Karang Bolong terpaksa diserahkan kepada Inggris. Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris pada tahun 1816, yang diangkat sebagai Residen Yogyakarta adalah Nahuijs, seorang sahabat

---

[66] Diponegoro, *Babad Diponegoro ing Nagari Ngayoyakarta Adiningrat*, *I*, 1983, hlm. 173

[67] Diponegoro, *Babad Diponegoro*, *I*, 1983, hlm. 49

Komisaris Jenderal van der Capellen. Residen Nahuijs yang beraliran liberal, tatkala tiba di Yogyakarta melihat betapa luas tanah *apanage* yang subur, tetapi menganggur karena pemiliknya berada di negara sebagai pejabat Kesultanan. Tanah-tanah *apanage* tersebut di mata Nahuijs dapat dijadikan sumber keuangan pemerintah apabila disewakan kepada pemilik modal dan juga dapat menguntungkan petani karena para penyewa dapat memberikan upah yang tetap kepada petani. Dengan pemikiran itu, para petani terbebas dari pemerasan penguasa pribumi dan bangsawan pemilik tanah. Nahuijs menghitung ada 34 jenis pajak yang dipungut oleh penguasa pribumi dari masyarakat. Bahkan, ada pajak yang tidak masuk akal, seperti pajak gubuk di sawah dan pajak *make up* penari (*tledek*).[68]

Gagasan residen mendapat sambutan dari para pemilik modal. Pada tahun 1817 ia sendiri memelopori penyewaan tanah milik Sultan di Bedoyo, Bangkong, Rembang, Penting, Gatak, dan Rangkah seluas delapan setengah jung seharga SpM50.000. Pada tahun 1818–1820 para pejabat dan pengusaha penyewa tanah meningkat pesat. Sampai tahun 1820 seluruh tanah yang disewakan berjumlah 383 jung atau 1.532 cacah dengan harga sewa SpM203 64,5 atau F41.821,25, yang tersebar di seluruh wilayah Kesultanan. Hampir seluruh tanah yang disewakan dijadikan perkebunan kopi.

Dampak dari persewaan tanah ini adalah banyak bangsawan yang memperoleh kekayaan secara mendadak, sebaliknya banyak petani penggarap yang tinggal di tanah itu diusir atau mereka dijadikan pekerja paksa oleh tuan tanah penyewa. Praktik buruk persewaan tanah yang merugikan petani penggarap ini disaksikan sendiri oleh Komisaris Jenderal van der Capellen. Pada bulan Mei 1823 Komisaris Jenderal membatalkan keputusan persewaan tanah di tanah Kerajaan (*Vorstenlanden*). Pelarangan ini menimbulkan persoalan baru bagi para bangsawan pemilik *apanage*. Mereka harus mengembalikan uang sewa yang pernah diterimanya. Sebagian dari mereka tidak mampu mengembalikan, sekalipun dengan cara mengangsur, terpaksa meminjam kepada rentenir dengan jaminan barang-barang berharganya. Banyak bangsawan yang jatuh miskin karena terjerat utang dan sakit hati kepada pemerintah Hindia Belanda.[69]

Para penyewa pun memrotes keputusan van der Capellen, yang dianggapnya sebagai keputusan reaksioner. Van der Capellen menjawab,

---

[68] Nahuijs, *Verzameling van Officiele Rapporten betreffende van den Oorlog op Java in de Jaren 1825–1830*, I, 1835, hlm. 4

[69] P.H. van der Kemp, *Brieven van den Gouverneur Generaal van der Capellen over Dipanegara, 20 mede eene Wederlegging van den Minister Elout*, 1896, hlm. 567–568

bahwa sistem ekonomi liberal belum saatnya diterapkan di tanah kerajaan, yang berarti pengusiran penduduk yang tidak mampu melawan pemilik modal. Masalah persewaan tanah kemudian diambil alih oleh pemerintah dan pejabat pemerintah. Bahkan, pemerintah berusaha untuk menguasai tanah-tanah milik kerajaan yang subur dan strategis di Jabarangkah (wilayah di lereng utara Gunung Prahu) dan Karangkobar (di timur laut Banyumas). Sejak mengundurkan diri dari kehidupan politik kerajaan, Diponegoro memilih tinggal di Tegalrejo, yaitu tanah *apanage* seluas 500 cacah yang diwarisi dari buyutnya, janda Sultan Hamengkubuwono I. Ia melakukan pengembaraan fisik dan spiritual, serta mengubah gagasan dan pandangan tentang diri dan masyarakatnya. Di tempat ini pula ia menekuni tarikh Islam dan mendalami tarikh Nabi Muhammad. Ia gemar berkelana dari masjid ke masjid di pelosok Kesultanan, menyamar sebagai santri dan bertemu dengan para kiai dan ulama. Hal paling membahagiakannya adalah tatkala berkumpul dengan santri rendahan dan miskin. Dalam pengembaraan secara spiritualnya ia sering menyepi di gua-gua tertentu, mengikuti jejak Muhammad sebelum menjadi Nabi. Sampai pada puncak pengembaraan spiritual, ia menyatakan telah mendapat perintah dari Ratu Adil untuk merebut kembali tanah Jawa.[70] Ia mengubah namanya menjadi Ngabdul Kamid, menanggalkan pakaian kebesarannya, dan menggantinya dengan pakaian Rasul yang serba putih.

Dalam masa pemerintahan ayahnya, masyarakat Kesultanan diidentikkan dengan masyarakat Arab pra-Islam, yang disebutnya sebagai masyarakat *jahiliah*. Ia ingin mengubah masyarakat *jahiliah* menjadi masyarakat Islami berdasarkan tuntunan Rasul. Untuk dapat menyusun masyarakat baru dalam wadah *balad* (negara) Islam, hanya dapat dicapai dengan perang sabil (suci) terhadap kafir.[71]

Pergaulan Diponegoro yang luas dengan komunitas santri dan petani memudahkan dia memperoleh simpati, dukungan, serta pengakuan legitimasi kepemimpinannya oleh masyarakat sebagai pemimpin yang legal. Ia juga berhubungan dengan para pemimpin bawahan, yaitu demang, bekel, serta para kiai dan ulama, seperti Kiai Mlangi, Kiai Kwaron, Kiai Taptoyani, Kiai Mojo, Syeh Ahmad, Mudo Wiriodikromo, dan Jo Muhammad, yang

[70] Ngabdul Kamid, mengadopsi nama Sultan Turki Abdul Hamid I (1787–1789) yang memberikan inspirasi dan motivasi Diponegoro untuk berbuat seperti dia. Ia pengagum Sultan Turki tersebut. Peter Carey, "Satria and Santri" *Some notes on the Relationship between Diponegoro's Keraton and Religious Supporters During the Java War (1825–1830)* dalam T. Ibrahim Alfian, *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* 1987, hlm. 271 dst

[71] Diponegoro, *Babad, I,* 1983, hlm. 188

semuanya tinggal di wilayah Pajang. Mereka mengakui Diponegoro sebagai pemimpin mereka, dan memperkuat karakter Diponegoro untuk membangun masyarakat baru dalam balad Islam. Bahkan, para pemimpin masyarakat itu sering kali berkunjung ke tempat tinggal Diponegoro di Tegalrejo.[72]

Peristiwa di atas dapat dijadikan petunjuk bahwa Diponegoro memiliki kemampuan dan karisma untuk membangun solidaritas masyarakat melalui aktivitas *lobbying*. Tegalrejo menjadi *maarkplaats*, tempat menjual dan membeli gagasan, konsep-konsep ideologi, politik kenegaraan, budaya militer, rencana strategi dan aksi, serta tempat berkumpulnya pemimpin masyarakat tatkala terjadi kekosongan kepemimpinan di Kesultanan Yogyakarta, sesudah meninggalnya Sultan Hamengkubuwono III.[73] Di sini Diponegoro memperoleh basis legitimasi dan permufakatan sukarela dari kelompok-kelompok yang berkepentingan. Para santri berperan sebagai komunikator terdepan bagi penyampaian ide, gagasan balad Islam, tentang masyarakat *jahiliah*, dan perang sabil. Mereka memiliki jaringan yang luas di masyarakat.[74]

Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1824, akhirnya R.M. Ambyah menggantikan kedudukan ayahnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Pada masa pemerintahan adiknya, banyak bangsawan yang tiba-tiba menjadi kaya dari hasil persewaan tanah *apanage*. Dalam pandangan Diponegoro, karena kekayaan itu mereka banyak yang melanggar, menanggalkan, dan meninggalkan nilai-nilai kehidupan Jawa dan Islam yang disakralkan. Pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan Jawa dan Islam itu adalah akibat tunduknya mereka kepada peraturan yang dibuat kafir, yang telah merampas tanah-tanah milik kerajaan melalui persewaan tanah. Tanah Jawa yang telah jatuh ke tangan kafir harus direbut kembali dengan sabil yang berlandaskan Alquran,[75] itulah pendapat Diponegoro. Masalah lain yang meresahkan batin Diponegoro adalah pemungutan pajak dan pungutan bea secara besar-besaran. Untuk

---

72 Dalam *Babad Diponegoro* versi Surakarta, ditambahkan banyak para tumenggung (bupati), seperti Kliwon, Panewu, Mantri, Pangeran, dan Aria hampir setiap malam datang ke Tegalrejo dan berjanji setia akan mendukung Diponegoro untuk melakukan perang sabil. Peter B. Carey, *Babad Diponegoro*, 1981, hlm. 10

73 Istilah *maarkplaats* diadopsi dari J. Hageman Jcz, *Geschiedenis van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830*, 1896, hlm. 72

74 Ide perang sabil merupakan salah satu ideologi gerakan sosial yang memberikan semangat yang gigih kepada para pengikutnya, Sartono Kartodirdjo, *Pokok-pokok tentang Gerakan Sosial*, 1972, hlm. 7

75 Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 188

menambah pemasukan keuangan Kesultanan, adiknya melakukan kebijakan yang tidak terpuji. Sultan yang masih berusia 18 tahun itu dikendalikan oleh mertuanya Patih Danurejo IV. Ia memerintahkan menambah jumlah gerbang-gerbang pungutan (*tolpoorten*) yang disewakan kepada orang-orang Cina melalui sistem perolehan (setoran).[76] Gerbang-gerbang pungutan ini amat merugikan rakyat. Patih sebenarnya tidak berhak mengeluarkan keputusan yang menentukan mengenai jalannya pemerintahan karena ia bukan pemilik negara.[77] Ia sering kali mengingatkan adiknya mengenai masalah perpajakan ini, tetapi adiknya menolak.

Pada tanggal 16 Desember 1822, Sultan Hamengkubuwono IV meninggal secara mendadak seusai makan dalam usia 18 tahun. Peristiwa ini menggemparkan seluruh kerajaan. Terjadi saling tuduh antara kelompok bangsawan. Diponegoro dituduh sebagai dalang pembunuhan. Dalam peristiwa ini tidak pernah terungkap siapa pembunuh sultan sebenarnya. Yang menjadi persoalan adalah siapa pengganti sultan? Pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada kesulitan untuk menunjuk siapa yang akan dinobatkan sebagai sultan karena persaingan antarbangsawan sangat tajam. Calon utamanya adalah Pangeran Paku Alam, yang pernah menjadi wali sultan, yaitu Sultan Jarot. Akan tetapi, beberapa bangsawan menolak, karena tatkala menjadi wali sultan ia banyak berbuat kesalahan. Residen Yogyakarta Baron de Salis meminta Diponegoro sebagai penggantinya, tetapi ia menolak. Diponegoro juga keberatan kalau pemerintah menunjuk R.M. Menol yang masih berusia dua tahun sebagai sultan pengganti ayahnya. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Diponegoro. *Pertama*, R.M. Menol masih kanak-kanak, belum memenuhi syarat sebagai sultan. Menurut Diponegoro, seorang sultan adalah juga senopati (Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang) dan Sayidin Panatagama. *Kedua*, dari keturunan. Ibu R.M. Menol adalah Ratu Kencono anak Sumodiningrat (Danurejo IV). Danurejo adalah keturunan Surapati, yaitu seorang budak yang berasal dari Bali yang pernah diangkat sebagai *luitenant* oleh VOC. Sesudah peristiwa Kartasura, pada Februari 1686 ia memberontak terhadap kerajaan Mataram dan menguasai wilayah Monconogoro Timur sampai 10 tahun. Di kalangan bangsawan Yogya masalah asal usul keturunan dan pengkhianatan terhadap sultan dan kerajaan merupakan nilai prinsip yang dipegang teguh secara turun-temurun. Perkawinan antara sultan dan keturunan budak dianggap sebagai perkawinan pinggir. Ratu Kencono di mata para bangsawan Yogyakarta berstatus perempuan pinggir. Nilai

---

[76] Mengenai persewaan gerbang pungutan kepada orang Cina dibahas secara mendalam oleh Peter Carey dalam *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755–1825*, (terjemahan), 1986

[77] Diponegoro, *Babad, I,* 1983, hlm. 46

prinsip ini tidak pernah diperhatikan secara baik oleh pemerintah Inggris maupun Belanda. Tujuh hari sesudah kematian ayahnya, pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 19 Desember 1822 menobatkan R.M. Menol seorang bocah yang berusia dua tahun (lahir 25 Januari 1820) sebagai sultan. Keputusan yang diambil oleh Residen Baron de Salis sebenarnya merupakan keputusan politis, tanpa mempertimbangkan aspek kulturalnya. Kemudian residen menjatuhkan pilihannya kepada Mangkubumi dan Diponegoro sebagai wali sultan. Sekalipun enggan, Diponegoro akhirnya menerima penunjukan itu. Menurut van Sevenhoven penunjukan itu tepat karena pemerintah tidak menyukai orang yang reputasinya buruk.[78]

Pada hari penobatan terjadi insiden. Sebagai wali sultan, Diponegoro atas nama Sultan wajib membaca kontrak dan sekaligus menandatanganinya dihadapan hadirin. Diponegoro mengaku tidak dapat membaca dan menulis. Paku Alam menatapnya dengan sinis. Para bangsawan yang lain saling memandang dan tersenyum. Peristiwa ini membuat ia sangat malu dan merasa ada komplotan yang mempermalukan dan menghina dirinya. Dalam tata krama keraton (protokoler keraton) setiap audiensi resmi, para pangeran wajib menyembah Sultan, tanpa memandang siapa dia. Ia merasa dipermalukan di depan umum karena harus "menyembah" seorang bocah yang baru berusia dua tahun yang dianggapnya lahir dari perkawinan pinggir. Betapa beratnya ia menanggung malu, sebagaimana dikisahkan dalam memoarnya.

Yang terpikir hanyalah perasaan malu,
seperti tidak dimanusiakan
disuruh menjadi walinya anak-anak.[79]

Sejak itu ia jarang hadir dalam upacara resmi keraton, ia lebih sering pergi "menyepi" ke gua-gua. Dengan perilakunya itu, Letnan Gubernur Jenderal, de Kock terpengaruh oleh pendapat umum di kalangan pembesar Belanda, bahwa ketidakhadiran Diponegoro karena sakit hati. Pendapat umum itu sangat menguntungkan Diponegoro, menutupi kegiatannya yang sebenarnya baik di Tegalrejo maupun di tempat-tempat lain yang dia kunjungi. Diponegoro melakukan *conspiracy of silence*, membangun kekuatan bersenjata, memilih para pemimpinnya, membagi wilayah perang dan pertahanan, menentukan tempat yang strategis untuk pos-pos komandonya. Pabrik-pabrik mesiu dibangun di tempat-tempat yang dirahasiakan di sekitar negara Yogyakarta.

---

[78] *ANRI*, Surat Laporan Pejabat Residen Yogyakarta J.I.Van Sevenhoven kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Yogyakarta, 25 Maret 1826, Arsip Djokdja, 81

[79] Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 159–160

2. Jalannya Perang

Tatkala Baron van Salis digantikan oleh Smissaert pada tahun 1823, kondisi politik sangat menguntungkan Diponegoro. Residen baru ini mantan kepala kehutanan yang senang hidup mewah dan berfoya-foya. Ia lebih sering berada di vilanya di tengah-tengah perkebunannya di Bedoyo daripada di lojinya.

Tanpa diketahui alasannya, Smissaert sangat membenci Diponegoro. Ketiadaan pemimpin yang berwibawa di lingkungan keraton membuat para pejabat Belanda berbuat sesukanya terhadap pejabat Kesultanan. Mereka tidak lagi menghormati adat istiadat Jawa. Dalam rapat-rapat resmi yang diadakan pada hari Senin dan Rabu, residen selalu duduk di kursi (mahligai) yang disediakan untuk Sultan, yang oleh sementara bangsawan dinilai sebagai pencemaran atas kekuatan gaibnya.[80]

Tingkah laku pejabat Belanda yang dengan mudah masuk keraton dan mengadakan hubungan gelap dengan beberapa putri keraton membuat Diponegoro prihatin. Selain masalah moral, konflik pribadi antara Diponegoro dengan Smissaert semakin tajam, sesudah terjadi peristiwa saling mempermalukan di depan umum dalam suatu pesta di kediaman residen (Loji)[81]. Saat itu, Diponegoro terang-terangan menentang Smissaert.

Pada suatu hari Smissaert dan Danurejo memerintahkan memasang *anjir* (pancang) sebagai tanda akan dibuatnya jalan baru, yang sengaja melintasi tanah milik Diponegoro di Tegalrejo. Diponegoro memerintahkan anak buahnya untuk mencabuti pancang-pancang tersebut. Dalam memoarnya Diponegoro menulis:

> *"sesudah solat asar saya keluar rumah melihat ada gerombolan orang. Saya bertanya kepada seorang pembantu saya Ki Soban namanya. Soban apa yang terjadi kok banyak orang bergerombol? Orang dari luar Gusti utusan Patih akan membuat jalan. Saya panggil pembantu yang lain Mangunharjo. Apa yang terjadi Mangunharjo? Kenapa tidak memberi tahu saya? Cabut semua pancang itu!*[82]

Residen mendapat laporan bahwa pancang-pancang itu dicabut oleh pengikut Diponegoro. Danurejo memerintahkan untuk memasang kembali pancang-pancang dengan dikawal oleh pasukan Macanan, pasukan pengawal Kepatihan. Sebaliknya pengikut Diponegoro membalas mencabuti pancang-pancang yang baru ditanam. Oleh pengikut Diponegoro pancang-

---

[80] J. Hageman Jcz, *op. cit.*, 1856, hlm. 32, Peter Carey, *op. cit.*, 1986, hlm. 39

[81] J. Hageman Jcz, *op. cit.*, 1856, hlm. 32

[82] Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 189–192

pancang tersebut diganti dengan tombak-tombak mereka.[83] Insiden pancang ini merupakan konflik terbuka Smissaert-Danurejo dengan Diponegoro yang melibatkan kekuatan bersenjata. Berita insiden pancang ini tersebar luas di masyarakat. Para demang beserta anak buahnya dari pelbagai pelosok Kesultanan tanpa diundang berdatangan ke Tegalrejo bermaksud membela Pangerannya. Pada pertengahan bulan Juli 1825 telah berkumpul lebih kurang 1.500 orang. Di hadapan para sahabatnya, Kiai Taptoyani dan Kiai Nitiprojo, Diponegoro menyatakan tekadnya untuk mengusir Belanda dan orang Cina dengan perang sabil. Aktivitas pengikut Diponegoro telah meluas ke pelbagai tempat. Residen sendiri baru mengetahui setelah mendapat nota dari Residen Surakarta MacGillavrij, bahwa di Yogyakarta terdapat tanda-tanda akan terjadi kekacauan.[84]

Residen Smissaert menganggap berkumpulnya pengikut Diponegoro di Tegalrejo itu dapat diselesaikan dengan mudah. Pada tanggal 20 Juli 1825, residen membuat kekeliruan. Ia mengirim surat panggilan kepada Diponegoro yang disampaikan oleh dua orang pegawai rendahan. Diponegoro dipanggil ke Loji untuk mempertanggungjawabkan banyaknya orang yang bergerombol di Kedu dan pembelian padi secara besar-besaran. Residen menuduh Diponegoro sebagai penggeraknya dan harus bertanggung jawab. Diponegoro menolak panggilan dan tuduhan residen.[85] Panggilan kedua disampaikan lewat Pangeran Mangkubumi, salah seorang paman Diponegoro. Namun, Mangkubumi menyarankan agar Diponegoro tidak memenuhi panggilan karena ia mengenali tipu muslihat residen. Diponegoro pasti akan ditangkap karena di Loji telah dipersiapkan pasukan dari Paku Alam.[86] Panggilan kedua yang disampaikan Mangkubumi ditolak oleh Diponegoro. Residen marah besar dan merasa terhina. Pada tanggal 21 Juli 1825 residen memerintahkan satu detasemen pasukan yang dipimpin oleh Asisten Residen Chevallier menuju Tegalrejo.

Pasukan itu berkekuatan 50 orang yang terdiri atas pasukan infantri dan *hussar* yang diperkuat dengan dua pucuk meriam, dengan maksud menangkap Diponegoro. Dalam tempo yang singkat Tegalrejo dikepung dan dibakar, tetapi pengikut Diponegoro menyambutnya dengan perlawanan. Diponegoro yang telah mengetahui kedatangan pasukan tersebut mengundurkan diri ke suatu desa yang telah dipersiapkan sebagai

---

[83] Peter B.R.Carey, *Babad Diponegoro an Account of the Out-break of Java War (1825–1830)*, 1981, hlm. 18–36

[84] Nota MacGillavrij, Surakarta, 19 Juli 1825, P.J.F Louw, *De Java Oorlog van 1825–1830*, I, 1894, hlm. 252

[85] J. Hageman Jcz, *op. cit.*, 1856, hlm. 70–71

[86] Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 206

markas komando, yaitu desa Selarong. Pada hari itu perang telah disulut di Tegalrejo.

Desa Selarong adalah satu desa strategis yang berada di kaki bukit kapur yang berjarak lebih kurang sembilan kilometer dari Yogyakarta yang telah lama dan secara diam-diam dipersiapkan sebagai markas komando. Sungai Bedog, anak Sungai Progo, membelah desa menjadi Selarong Barat dan Selarong Timur yang sulit dijangkau oleh lawan. Pada tanggal 28 Juli 1825 bersama Diponegoro telah berkumpul beberapa orang bangsawan, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto, Suryodipuro, Blitar, Kiai Mojo, Pangeran Ronggo, Ngabehi Mangunharjo, dan Pangeran Surenglogo.[87] Yang pertama kali dilakukan Diponegoro adalah memerintahkan Joyomenggolo, Bahuyuda, dan Hanggowikromo, untuk memobilisasi orang desa di sekitar Selarong agar siap melakukan perang. Selanjutnya Diponegoro menyusun rencana strategis dan langkah-langkah taktis. Secara garis besar, Diponegoro berencana merebut dan menguasai seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta, mengusir orang-orang Belanda dan Cina. Untuk mencapai sasaran strateginya disusun langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, melakukan serangan terhadap *negara* (keraton), kemudian mengisolasi Yogyakarta untuk mencegah datangnya bantuan pasukan dari luar Yogyakarta.[88]

Kedua, mengirim surat lewat *caraka*, kepada para pemimpin pasukan di wilayah Kesultanan, yang berada di Kedu, Bagelen, Banyumas, Serang dan wilayah Monconegoro Timur (Magetan, Madiun, Rajegwesi, Kertosono, Berbek, Ngrowo) dan para demang yang berada di perbatasan wilayah Kesultanan dan Kesunanan. Surat itu berisi perintah untuk memerangi orang Eropa dan Cina.[89]

---

87 Berkumpulnya para bangsawan pengikut Diponegoro, diketahui dari kesaksian R.M. Suwongso, Kapten Kavaleri Legioen Mangkunegoro yang tertawan dalam pertempuran Randugunting/Kalasan pada 28 Juli 1825. Ia dihadapkan kepada Diponegoro, dibujuk untuk berpihak kepada Diponegoro, tetapi ia menolak. Kemudian ia dibebaskan tanpa syarat. P.J.F. Louw, *op. cit.*, I, hlm. 261–262; H.F. Auskes, *Het legioen van Mangkoe Nagoro*, 1935, hlm. 22

88 Ibu kota (negara) merupakan *centre of gravity* (*schwerpunk*) karena itu harus direbut dan diduduki lebih dahulu dalam rangka memenangkan perang

89 P.J.F. Louw, *op. cit.*, 1894, hlm. 207. Salah satu Surat Perintah Diponegoro dan Mangkubumi (tanpa tanggal ditemukan dalam Arsip Koleksi, H.M. de Kock Serie 14 Volgnr 17 tahun 1825) kepada Pangeran Ario Joyonegoro dan Tumenggung Joyo Moestopo di Tangoong (Tanggung) suatu kota kecil sebelah timur Brengkelan (Purworejo). Isi perintahnya, *pertama*, agar mereka menyusun barisan untuk melawan orang-orang Eropa dan Cina; *kedua*, jangan melakukan aniaya terhadap anak-anak; *ketiga*, semua laporan agar disampaikan ke Selarong. Surat itu dibawa oleh seorang caraka Ronggoprawiroseco

Ketiga, menyusun daftar bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan melindungi mereka yang membantu.

Keempat, membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta atas beberapa daerah perang (mandala) dan mengangkat para komandan daerah dan pasukan. Beberapa pembantu utama dilantik, antara lain sebagai berikut.

(1) Pangeran Suryologo, saudara Diponegoro.
(2) Tumenggung Mangkudirejo, diangkat sebagai Pangeran Mangkudiningrat.
(3) Pangeran Notoprojo.
(4) Tumenggung Mertoyudo, menjadi Pangeran Wiryonegoro.
(5) Demang Kertopengalasan, menjadi Tumenggung Wiryodirejo.

Para pemimpin mandala perang yang diangkat sebagai berikut.

(1) Bagelen, Pangeran Suryokusumo dan Tumenggung Reksoprojo.
(2) Lowano (Bagelen Timur), Pangeran Abu Bakar dan Muhammad.
(3) Ledok, Tumenggung Handangtoro.
(4) Gowong, Tumenggung Gajah Pernada.
(5) Langon, Pangeran Notoprojo.
(6) Kedu, Tumenggung Hadiwinoto, dan Tumenggung Martodipuro.
(7) Parakan, Tumenggung Sumodilogo.
(8) Yogyakarta Barat, Tumenggung Joyomustopo, Tumenggung Hadisuryo, dan Tumenggung Sumonegoro.
(9) Kedu, Kiai Muhammad Arfah, Mulyosentiko atau Tumenggung Seconegoro.
(10) Gamplong, Tumenggung Cokronegoro dan Tumenggung Sumodiwiryo.
(11) Yogyakarta Utara, Pangeran Surodilogo, dan Pangeran Sumodiwiryo.
(12) Sambiroto, Pangeran Mangkudiningrat, Pangeran Notoprojo, dan Tumenggung Ranupati.
(13) Yogyakarta Timur, Pangeran Suryonegoro, dan Suranegoro.
(14) Gunung Kidul, Pangeran Sudironegoro, Jonegoro, dan Sumodiningrat.
(15) Pajang, Warsokusumo, Mertoloyo, Wiryokusumo, dan Dipodirjo.
(16) Sokowati/Sragen, Tumenggung Kertodirjo, dan Mangunnegoro.[90]

[90] Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 228–229

Susunan kekuatan di setiap daerah militer adalah 1.000 orang prajurit, dan terbagi atas tujuh kelompok, masing-masing kelompok 150 orang (satu kompi) sebagian besar bersenjata api (*geweren*).

Dalam perkembangan kemudian, Diponegoro mengubah susunan daerah perang setelah memperbaiki struktur organisasi militernya dalam bentuk korps, yang meniru organisasi tentara kerajaan Turki Usmani pada abad ke-16–18. Pasukan elite kerajaan Turki Usmani terdiri atas tiga divisi, yaitu *Böluck*, *Cemaat*, dan *Segmen*. Pasukan infantrinya disebut *Bashiböloek*. Nama-nama Turki tersebut diadopsi oleh Diponegoro, dengan lafal Jawa. *Böluk*, menjadi *Bulkiyo*, *Bashiböloek* menjadi *Borjumuah*, *Turki* menjadi Turkiyo. Demikian pula pangkat komandan dan prajurit. Pangkat untuk pemimpin dan tertinggi adalah Alibasah. Hanya beberapa orang saja yang berpangkat Alibasah, antara lain Alibasah Sentot Prawirodirjo, Alibasah Kerto Pengalasan (Tumenggung Wiryodirejo), dan Alibasah Mohammad Ngusman. Kemudian pangkat *Basah*, antara lain Basah Gondokusumo, Basah Mertonegoro, dan Basah Ngabdul Latip. Selanjutnya pangkat *Dulah* atau *Agadulah* Reksosentono.[91] Dalam tentara Turki Usmani *Aga* sama dengan Panglima Divisi.[92] *Agadulah* dalam pasukan Diponegoro adalah komandan pasukan setingkat detasemen yang membawahi 400 orang prajurit. Pangkat perwira yang terendah *Seh* membawahi prajurit satu kompi. Masing-masing pembesar militer diangkat dengan surat keputusan resmi yang disebut *Piagem* dari Sultan Abdul Kamid Herucokro Kabirul Mu'minin Sayidin Panotogomo Khalifah Rasullullah Alaihi Wassalam. *Senopati ing Ngalogo Sabilullah*.[93] Namun, Diponegoro juga tidak membubarkan struktur organisasi militer Jawa, seperti pasukan-pasukan Harkio, Pinilih, Suropadah, Surogomo, Suratandang, Naseran, Sipuding, dan Yagir, dengan baju seragam yang berbeda.[94]

---

[91] *ARA*, Piagem Sultan Abdul Kamid Herucokro Kabirul Mukminin Sayidin Panotogomo Khalifah Rasulullah Alaihi Wassalam Senopati ing Ngalogo, Arsip Koleksi H.M. de Kock Serie 14 Volgnr 17 (1826), P.J.F. Louw, I, *op. cit.*, 1894, hlm. 207

[92] John R. Walsh, *Encyclopaedia Americana*, XV, 1975, hlm. 690

[93] Piagam pengangkatan yang ditemukan dalam Arsip Koleksi H.M. de Kock, tentang pengangkatan Akhmad Dalem Ripangi sebagai bupati Kuthagede dengan nama baru Tumenggung Reksosentono, dengan pangkat militer Angadaulah, *ARA*, Arsip Koleksi H.M. de Kock, serie 14 Volgnr 17/1826

[94] De Stuers menjelaskan pasukan Diponegoro ada 14 korps dengan seragam masing-masing, antara lain, *Pasukan Bukiyo, Borjomuah, Turkiyo,* ikat kepala putih dan jaket berwarna biru. *Pasukan Harkio*, ikat kepala hijau dan jaket berwarna biru. *Pasukan Pinilih*, ikat kepala hitam bergaris putih, jaket merah. *Pasukan Larban, Naseran*, tutup kepala hitam warna jaket bermacam-macam. *Pasukan Sipuding dan Yagir*, ikat kepala putih dan jaket berbagai warna. *Pasukan Surotandang dan Jayengan*, tutup kepala merah dan jaket putih. *Pasukan Suragama dan Wanangprang*, ikat kepala putih, jaket hitam, Steurs, F.V.A Ridder de, *Gedenschrift van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830*, 1847, hlm. 162

Tepat dua minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pada hari Senin tanggal 2 Agustus, pasukan Diponegoro melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta dengan kekuatan tiga *kolone* (6.000 orang), yang dibagi dalam tiga sektor. *Kolone pertama* dipimpin oleh Pangeran Abu Bakar, saudara Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III yang bergerak dari arah timur menyerbu Dalem Pakualaman, menghancurkan jembatan Kali Code, membakar perkampungan orang Cina dan Eropa, serta menghancurkan gerbang-gerbang pungutan. *Kolone kedua* dipimpin oleh Pangeran Adinegoro yang berhasil menguasai jalan penghubung Magelang–Yogyakarta–Surakarta. *Kolone ketiga* dipimpin oleh Pangeran Blitar yang bergerak dari arah selatan menguasai jalan raya Bantul dan berusaha merebut keraton. Rumah-rumah bangsawan yang dianggap lawan dirusak, dijarah, kemudian dibakar. Sepuluh orang bupati ditangkap, antara lain, Tumenggung Mertoloyo, Tumenggung Wiryokusumo, Tumenggung Notoyudo, Tumenggung Sumorejo, Tumenggung Danusumo, dan dua orang terluka, yaitu Tumenggung Sindunegoro dan Ronodiningrat. Yogyakarta sudah menjadi "hutan api" (*wana bongbongan*) siang dan malam.[95]

Peristiwa serangan pasukan Diponegoro mengejutkan tentara dan pemerintah Hindia Belanda. Para pembesar Kesultanan dan pemerintah Hindia Belanda panik luar biasa, mengungsi ke benteng Vredeburg. Garnisun Yogyakarta yang hanya berkekuatan 200 orang, tidak mungkin menghadapi pasukan Diponegoro yang jumlahnya jauh lebih besar.[96] Sultan Hamengkubuwono V juga diungsikan ke benteng Vredeburg dan dikawal secara ketat. Residen Smissaert melaporkan peristiwa ini kepada Jenderal de Kock dan meminta bantuan perkuatan pasukan. Sebagian pasukan Belanda yang mundur ke arah Surakarta dihadang di Prambanan. Legiun Mangkunegoro yang dipimpin oleh Kapten R.M. Suwongso dihancurkan di Randugunting (Kalasan). Komandan pasukan ditawan, kemudian dibawa menghadap Diponegoro di Selarong. Keraton dan sekitarnya berhasil dipertahankan oleh pasukan pengawal keraton yang dipimpin oleh Mayor Wironegoro. Yogyakarta kemudian diisolasi. Pasukan Diponegoro memblokade jalan masuk ke negara (kota) sehingga Yogyakarta praktis menjadi kota mati dan kekurangan pangan. Tawanan dan barang rampasan dibawa ke Selarong, dihadapkan ke *pramudeng prang* (pemimpin perang) Diponegoro, Yogyakarta diduduki selama tujuh hari. Serangan

---

[95] Diponegoro, *Babad I*, 1983, hlm. 230, P.J.F. Louw, *op. cit.*, Bijlage III, hlm. 598–601

[96] J. Hageman Jcz, *Geschiedenis van den Oorlog op Java 1825 tot 1830*, 1856 hlm. 77–78

terhadap Yogyakarta merupakan sukses awal dari *conspiracy of silence* Diponegoro yang dilakukan bertahun-tahun. Dalam waktu yang singkat seluruh wilayah Kesultanan bergolak.

Surat-surat Diponegoro yang dikirim kepada para tumenggung dan demang di daerah-daerah diterima pada waktu yang tepat dan mendapat sambutan dari mereka. Setelah serangan umum terhadap Yogyakarta, Pangeran Serang (menantu Pangeran Mangkudiningrat yang dibuang ke Ambon bersama Sultan Hamengkubuwono II) bersama Pangeran Notoprojo (Pangeran Papak) dan Bupati Gagatan yang termasuk wilayah Kesunanan Surakarta, mengikuti jejak Diponegoro, menyulut pemberontakan di Pantai Utara Jawa. Pasukan Pangeran Serang bergerak dari Serang menyerang Purwodadi. Dari Purwodadi bergerak menuju Demak, dan hampir semua jembatan penghubung dirusak. Ia dibantu oleh Raden Sukur, putra Bupati Semarang Surioadi Menggolo. Pada tanggal 11 September 1825, pasukan Pangeran Serang yang berkekuatan 8.000 melakukan konsolidasi di desa Praya, Demak.

Di wilayah Banyumas, pada tanggal 9 Agustus 1825, di Karang Kobar, Kalibeber, dan Batur sejumlah kantor pemerintah dibakar. Di desa Sembong (Weleri) pemberontakan dipimpin oleh Raden Ngabei Tersono membakar pos-pos di sepanjang jalan raya. Di Selomanik Gowong, Selomerto (Wonosobo) dan di Brengkelan (Purworejo), Lengis, Yana, dan Kadilangu terjadi pergolakan, rumah-rumah orang Cina dibakar.

Sementara itu, di Monconegoro Timur pecah pemberontakan yang dipimpin oleh Tumenggung Mangkunegoro dan Tumenggung Kartodirjo, Tumenggung Alap-alap.

Di Pisangan, pada tanggal 23 Juli 1825, Mulyosentiko dengan kekuatan 400–500 orang bersenjata api (senapan) berhasil menyergap bala bantuan pasukan Belanda yang bergerak ke Yogyakarta dari arah Magelang. Beberapa serdadu Belanda terbunuh dan merampas uang sejumlah F30.000, hasil rampasan dibawa ke Selarong. Di wilayah Kedu lainnya, terutama di distrik Probolinggo (sebelah Tenggara Magelang), telah berkumpul 55.000 orang secara sukarela. Kemudian massa menyerbu ke kota Magelang, yang hanya dijaga oleh 50 orang tentara. Sekretaris Residen, Bupati Danuningrat, panik luar biasa. Rumah-rumah para pejabat dibakar. Probolinggo rupanya telah dipersiapkan sebagai pangkalan perlawanan oleh pengikut Diponegoro. Di Menoreh, rumah-rumah pejabat Belanda menjadi sasaran perusakan dan pembakaran.

Bupati Wedana wilayah sebelah Barat Gunung Sumbing, Ronggo Surodilogo, setelah menerima surat dari Diponegoro dan Mangkubumi,

memerintahkan kepada semua *demang*, *penatus*, *peneket*, *panglawe*, dan seluruh masyarakat untuk berperang melawan kafir.[97]

Setelah keberhasilan pasukan Mulyosentiko, pada tanggal 31 Juli 1825 Diponegoro mengirim surat kepada masyarakat Kedu yang disampaikan seorang *caraka* bernama Kasan Besari, agar masyarakat Kedu siap berperang.

> *Kaloe Soeda ikoet goea poenja soerat oendang ini*
> *biar lakas sedia sendjata, biar reboet negerie dan*
> *bikin betoel agama Rasoel.............. kaloe ada njang*
> *brani trada maoe pertjaja boeninja goea poenja soerat*
> *misti goea pottong dia poenja leher.*[98]

Mengapa Diponegoro memberontak? Jawabannya termuat pada memoar Diponegoro dan pelbagai analisis para sejarawan, ada pula sumber pribumi yang menarik untuk dikemukakan. Dari Pangeran Mangku-diningrat saudara sepupu Diponegoro, komandan pasukan Diponegoro di Magelang memberikan pernyataan tertulis (*affidavit*) setelah ia menyerah kepada Jenderal de Kock pada tanggal 1 Desember 1826. Ia menjelaskan ada empat penyebab timbulnya pernyataan itu, yaitu *pertama*, Diponegoro sakit hati terhadap Residen Smissaert yang suka duduk di *dampar* (takhta) Sultan. *Kedua*, Diponegoro tidak suka terhadap cara mengembalikan uang sewa tanah di Bedoyo yang berstatus milik Raja. Karena para bangsawan tidak mampu membayar utang-utang pengembalian sewa tanah, oleh para penyewa dibebankan kepada Sultan (kerajaan). *Ketiga*, adanya pengusiran terhadap rakyat. Rakyat dipaksa pindah oleh para *planters* karena desanya termasuk tanah yang disewakan. *Keempat*, aktivitas para rentenir Cina yang memaksa petani menggadaikan sawahnya dan menentukan secara sepihak harga jual hasil panennya ditambah dengan bunganya secara paksa sehingga banyak orang kecil keluar dari desanya membantu Diponegoro.[99]

Dalam surat Pangeran Blitar (adik Sultan Sepuh) kepada Sultan Sepuh (Hamengkubuwono II) tanggal 10 Oktober 1826 dijelaskan sebab-sebab Diponegoro memberontak. *Pertama*, tingkah laku Patih Danurejo terhadap anak-anak dan keluarganya (Diponegoro). *Kedua*, Patih Danurejo telah berbuat melampaui kewenangannya yaitu mengubah susunan Kehakiman

---

[97] P.J.F. Louw, I, *op. cit.*, Bijlage LVIII, hlm. 525

[98] P.J.F. Louw, I, *op. cit.*, 1894, hlm. 269. Surat asli tidak ditemukan hanya terjemahannya dalam bahasa Melayu

[99] Affidavit ini dikutip oleh Vincent J.H. Houben, *Keraton and Kumpeni Surakarta Yogyakarta 1830–1870*, 1994, hlm. 14–15 dari *ARA*, Arsip Koleksi J.C. Baud, no. 305

Jawa. *Ketiga*, surat-menyurat dari Residen Smissaert tidak pernah menyebut gelar Pangeran hanya menulis Diponegoro saja. Penyebutan nama tersebut rupanya atas inisiatif penerjemah Dietre dengan persetujuan Patih Danurejo dan Kolonel Wironegoro. *Keempat*, sekitar penggantian Penghulu Rahmanuddin sebagai imam kerajaan dengan alasan sudah tua. Ratu Kencono (Janda Sultan IV, anak Danurejo IV) tidak mau mendengar nasihat Diponegoro dan menyerahkan semua permasalahan kepada Patih. Imam Besar hanya diangkat oleh Sultan sendiri, karena Sultan masih kecil tidak mungkin mengangkat seorang Imam Besar. Atas peristiwa ini Diponegoro merasa terhina. Selanjutnya residen merancang membuat jalan baru yang lebih luas yang melewati sawah Tegalrejo dan sepanjang sisi rumah Diponegoro tanpa pemberitahuan sebelumnya. Para pesuruh residen lalu mengukur tanah dan menanamkan pancang-pancang (*stokken*). Akan tetapi, pancang-pancang yang ditanam itu dicabut atas perintah Diponegoro, dan ditanam kembali sampai tiga kali dan yang keempat kalinya, Diponegoro memerintahkan mencabuti pancang-pancang itu dan menggantinya dengan tombak, diikuti oleh para demang dan rakyat untuk menjaganya.[100]

Keberhasilan Diponegoro mengobarkan pemberontakan dan perlawanan menunjukkan bahwa Diponegoro telah mempersiapkannya sejak lama. Kebijakan perpajakan, persewaan tanah, serta penggusuran rakyat dari desa-desa tempat tinggalnya oleh para penyewa tanah *apanage*, merupakan puncak kegelisahan masyarakat dan kebencian pribadi kepada para bangsawan pengelola pemerintahan setelah meninggalnya Sultan Hamengkubuwono IV. Rangkaian peristiwa dan cita-cita membangun balad (negara) Islam menjadi *causal factor* mengapa pemberontakan dengan cepat meluas dan sulit dipadamkan dengan kekuatan militer.

Laporan tentang peristiwa 21 Juli 1825 di Tegalrejo itu diterima oleh Komisaris Jenderal van der Capellen pada tanggal 24 Juli 1825. Ia sangat terkejut karena sebelumnya tidak pernah mendapat laporan dari residen tentang keadaan sebenarnya di Yogyakarta. Raad van Indie dipanggil bersidang dan memutuskan Letnan Gubernur Jenderal, Letnan Jenderal H.M. de Kock Panglima Tertinggi Tentara Hindia Timur, diangkat sebagai komisaris untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta dan diberi kekuasaan penuh menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menumpas pemberontakan.[101]

---

[100] *ARA*, Surat Rio Blitar kepada Sultan Sepuh, 10 Oktober 1826, Arsip Koleksi H.M. de Kock, Serie 14 Volgnr, 18, (1826)

[101] A.W.P. Weitzel, 1825, *op. cit.*, hlm. 7; P.J.F. Louw, I, 1894, *op. cit.*, hlm. 235

Jenderal de Kock yang tiba di Surakarta disambut dingin, baik oleh pejabat Belanda maupun Kesunanan. Ia bertemu dengan Sunan yang masih berusia 17 tahun, dan terkesan Sunan tidak peduli terhadap pemberontakan Diponegoro. Sikap Sunan yang acuh terhadap pemberontakan dan tidak berpihak kepada pemberontak melegakan de Kock. Ia sadar bahwa ia harus bekerja keras untuk mengatasi pelbagai kesulitan, kekuatan militer yang ada di Yogyakarta dan Surakarta hanya tiga resimen (resimen infantri, resimen hussar, dan resimen artileri) ditambah Legiun Mangkunegoro yang jumlah seluruhnya 1.800 orang. Sebagian dari mereka terkepung di Yogyakarta. Sementara itu, pemberontakan telah meluas di seluruh wilayah Kesultanan. Tidak ada peta yang lengkap. Hampir semua peta buruk dan cacat, sedangkan wilayah Kesultanan sebagian besar berbukit-bukit dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Sebagian besar pasukan tidak mengenal medan. Ia juga mendapat laporan bahwa karakter pemberontak adalah sangat pemberani dan fanatik, dan juga amat membenci orang Eropa dan Cina.

Kemudian de Kock menyusun rencana kampanye untuk merebut kembali Yogyakarta dan membebaskan wilayah milik pemerintah Hindia Belanda yang direbut pemberontak (Demak, Rembang, Jabarangkah, Karangkobar, Kedu, Bagelen dan wilayah milik kesultanan, Serang, Ngawi, dan Madiun), dengan cara sebagai berikut.

1. Memanggil pasukan-pasukan yang bertugas di luar Jawa (Sulawesi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, untuk segera berangkat ke Jawa dengan dan tempat pendaratannya telah ditetapkan.
2. Merekrut spion untuk memperoleh informasi tentang lawan.

Dasar rencana kampanye ini Jenderal de Kock ingin menggiring lawan ke *killing area*, medan antara Sungai Progo dan Bogowonto.[102]

Pada pertengahan bulan September 1825, pasukan yang bertugas di luar Jawa mendarat di kota-kota pelabuhan pantai utara Pulau Jawa sesuai dengan perintah operasi. Pasukan yang berasal dari Supa (Sulawesi Selatan) yang berkekuatan 561 orang di bawah Jenderal Mayor van Geen mendarat di Semarang. Kemudian ia diangkat sebagai panglima tentara di lapangan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi. Pasukan ini langsung diperintahkan bergerak ke pedalaman Keresidenan Semarang. Pasukan yang berasal dari Kalimantan Barat berkekuatan 211 orang di bawah Mayor Sollewijn pun mendarat di Demak. Pasukan yang berasal dari Kalimantan Selatan di bawah Kapten Roest mendarat di Rembang dan langsung

[102] de Stuers, 1847, *op. cit.*, hlm. 151

bergerak ke Madiun. Pasukan Kapten Michiels dari Sumatra Barat mendarat di Tegal dengan 510 prajurit diperintahkan untuk memperkuat pasukan Letnan Kolonel Cleerens. Di Bagelen kekuatan yang dikerahkan dari luar Jawa berjumlah 1.466 orang.[103]

Setelah seluruh pasukan berada di Pulau Jawa, Jenderal de Kock memerintahkan Komandan Garnisun Surakarta Letnan Kolonel Cochius bergerak ke Yogyakarta dengan kekuatan dua kompi infanteri *hulptroepen*, yaitu satu peleton *huzar* (infanteri berkuda) dan satu kompi *dragonder* (kavaleri ringan dan artileri). Dengan susah payah pasukan Cochius berhasil masuk Yogyakarta. Langkah selanjutnya de Kock merencanakan operasi militer besar-besaran merebut kembali Kota Yogyakarta dan dilanjutkan sampai ke Selarong, dengan kekuatan tiga kolone (7.500 orang), pada tanggal 22 September 1825 Jenderal de Kock tiba di Klaten. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1825, pasukannya bergerak menyerbu Yogyakarta. Pasukan Kolone I berhasil memukul mundur pasukan Diponegoro dan pada hari itu Yogyakarta direbut kembali. Sepuluh orang pangeran tertangkap dan ditawan.[104] Ia membuat pengumuman akan memberi pengampunan kepada mereka yang pernah memberontak. Kemudian ia menulis surat kepada Diponegoro dan Mangkubumi yang berada di Selarong. Surat itu berisi ajakan damai yang disampaikan lewat utusan yang bergelar pangeran, yaitu Pangeran Ronodiningrat. Utusan diterima oleh Pangeran Suryenglogo. Setelah surat itu dibicarakan dengan Mangkubumi dan Kiai Mojo, Diponegoro menolak. Surat balasan disusun oleh Pangeran Joyokusumo dan Pangeran Suryenglogo, tegasnya Diponegoro menolak diajak berdamai.[105]

Jenderal de Kock kemudian memerintahkan pasukan Kolone II menyerbu Selarong. Desa ini telah kosong. Pasukan Diponegoro berpencar ke pelbagai arah. Menurut memoarnya, Diponegoro yang dikawal oleh pasukan Bulkiyo dan Mandung bergerak ke arah barat menyeberangi Sungai Progo sampai di desa Jekso (Dekso). Desa ini terletak di dekat pertemuan Sungai Duwet dan Progo, yang rupanya telah dipersiapkan sebagai markas komando cadangan menggantikan Selarong. Dari desa ini Diponegoro mengendalikan jalannya peperangan.

Sebagian pasukannya ada yang melakukan konsolidasi di bekas Keraton Pleret yang dipimpin oleh Tumenggung Wirodirejo (Kerto Pengalasan) dengan mengerahkan pasukan dari wilayah Kulon Progo.[106]

---

[103] A.W.P. Weitzel, I, *op. cit.*, 1856, hlm. 365
[104] Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 231–232
[105] P.J.F. Louw, I, *op. cit.*, 1894, hlm. 197, De Stuers, *op. cit.*, 1847, hlm. 70–74
[106] Diponegoro, *Babad, I*, 1983, hlm. 293

Sejak kegagalannya menyerbu Selarong, Jenderal de Kock memerintahkan agar Diponegoro dan pasukannya terus dikejar. Informasi tentang keberadaan Diponegoro simpang siur. Pada bulan Oktober 1825, Mayor Sollewijn diperintahkan menyerbu Kutagede, gagal menemukan Diponegoro. Pada tanggal 24 Oktober de Kock mendapat informasi bahwa Diponegoro berada di tepi barat Sungai Bedog.

Operasi pengejaran terhadap Diponegoro langsung dipimpin de Kock. Dengan mengerahkan kekuatan tiga kolone (1.258 orang) dengan garis awal kota Bantul. Kolone pertama di bawah Mayor Sollewijn, kolone kedua dipimpin oleh Kapten van de Polder, dan kolone ketiga, yang berada di tengah, dipimpin oleh Jenderal de Kock sendiri. Kolone pertama yang bergerak ke desa Jeblok dihadang oleh pasukan Diponegoro sehingga terjadi pertempuran hebat, sedangkan kolone kedua dan ketiga bergerak ke Kasihan. Diponegoro yang mengonsentrasikan kekuatannya di desa ini, diserbu oleh pasukan lawan. Pertempuran seru pun terjadi. Pasukan Diponegoro bertempur dengan berani tanpa menghiraukan tembakan meriam. Di pihak Mandung jatuh korban 40 orang. Diponegoro berhasil meloloskan diri dari kepungan lawan bergerak ke Gegulu di tepi barat Sungai Progo. Dengan susah payah pasukan yang dipimpin Mayor Sollewijn berhasil sampai Gegulu, dan menemukan desa ini telah kosong dan dibakar. Sebaliknya, di desa Kaliwatang pasukan Sollewijn dihadang oleh pasukan Diponegoro. Dalam pertempuran di Kaliwatang jatuh korban 40 orang di pihak Diponegoro. Dalam operasi pengejaran ini Jenderal de Kock gagal menangkap Diponegoro[107], tetapi berhasil membersihkan pangkalan lawan di sekitar negara Yogyakarta.[108]

Operasi pengejaran diteruskan ke wilayah Yogyakarta Utara. Pimpinan operasi diserahkan kepada Jenderal Mayor van Geen karena de Kock dipanggil ke Batavia. Van Geen melakukan tindakan yang sama dengan de Kock. Operasi pengejaran dilanjutkan dengan mengerahkan tiga kolone, dan bergerak ke desa Ngrajeg dan Jumeneng. Operasi ini gagal menemukan Diponegoro yang dikawal oleh pasukan Mandung yang dipimpin oleh Tumenggung Mertoloyo.

Sementara itu, Kolonel Cochius memperoleh informasi pemusatan pasukan Diponegoro ada di Pleret bekas keraton Sultan Amangkurat I yang berkekuatan 800–1.000 orang dan dipimpin oleh Tumenggung Wirodirejo

---

[107] P.J.F. Louw, I, *op. cit.*, 1894, hlm. 445

[108] *ANRI,* Laporan Jenderal de Kock Kepada Komisaris Jenderal Du Bus pengganti van der Capellen, Arsip Djocja 8–11

(Kerto Pengalasan). Benteng bekas istana ini tingginya lebih dari 20 kaki dan tebal sehingga sangat baik untuk bertahan.

Setelah melakukan persiapan, pada tanggal 9 Juni 1826 Kolonel Cochius dengan kekuatan 7.342 orang menyerbu benteng Pleret dari empat penjuru. Setelah bertempur satu hari, yang banyak menelan korban dari kedua belah pihak, Kerto Pengalasan dapat meloloskan diri ke arah barat, menuju Jekso (Dekso). Operasi pengejaran diteruskan ke Jekso. Para spion dikerahkan mengamati desa ini.

> *Saya abdi dalem Ngabehi Pancayatna, saya diperintahkan untuk mengamati pesanggrahan Diponegoro di desa Jekso. Yang saya suruh Ki Sapengawat, yang berangkat pada hari Ahad tanggal 8 Ramadhan...........pesuruh saya berkunjung ke rumah Amat Rupangi saudara iparnya. Dalam pembicaraan dengan Amat Rupangi, menanyakan apa maksud Diponegoro. Bulan Puasa ini harus bersiaga. Jika ada lawan, jika kuat harus dihadapi, jika tidak diperintahkan lari. Selanjutnya pesuruh saya bertanya tentang Pesanggrahan Diponegoro.*
>
> *Jawabnya berada di depan Masjid. Yang menjadi Patihnya Diponegoro Raden Tumenggung Mertoloyo, berada di sebelah timur Pesanggrahan Diponegoro. Dan di mana tempat prajurit? Prajurit Nyutro berada di sebelah timur tempat tinggal Diponegoro, prajurit Mertoloyo berada di sebelah barat, prajurit Wirabraja di sebelah utara. Yang berada di sana hanya tiga orang, Raden Tumenggung Mantrijero, Kiai Modjo dan Kiai........(?). Kekuatan yang besar berada di desa Klaten ke selatan sampai Jekso dan yang sebelah selatan dari desa (?) sampai ke Jekso.*[109]

Di Jekso Diponegoro menerima pelbagai laporan mengenai jalannya peperangan. Operasi pengejaran ke Jekso dipimpin oleh Kolonel Cochius. Sebelum memasuki daerah lawan, pasukan Cochius dihadang oleh prajurit-prajurit Diponegoro. Pada tanggal 8 Juli 1826 di sekitar Jekso terjadi pertempuran yang menelan banyak korban. Akibat operasi pengejaran yang terus-menerus, Diponegoro bergerak ke arah utara, menuju lereng selatan Gunung Merapi. Sampai di Kejiwan, gerakan pasukannya ditahan oleh pasukan Sollewijn. Pada tanggal 9 Agustus 1826 terjadi pertempuran hebat. Pasukan Sollewijn mengalami kekalahan. Beberapa pucuk meriam, mortir, dan beberapa ekor kuda jatuh ke tangan pasukan Diponegoro. Mayor Sollewijn tertembak sebelah matanya.[110] Gerakan pasukan Diponegoro tidak

---

[109] *ARA*, Arsip Koleksi H.M. de Kock, Serie 14. Volgnr 17/1826, terjemahan dari bahasa Jawa

[110] A.W.P. Weitzel I, *op. cit.*, 1856, hlm. 360, P.J.F. Louw, II, *op. cit.*, hlm. 456

bisa ditahan. Pada tanggal 23 Agustus 1826, desa Gading diduduki oleh pasukan Diponegoro untuk memutuskan jalur komunikasi Surakarta–Klaten. Dengan kekuatan 10.000 prajurit, pada tanggal 28 Agustus 1826 Delanggu yang dipertahankan 500 orang jatuh ke tangan Diponegoro. Sejumlah kereta pengangkut uang dan logistik dirampas.[111]

Sementara itu, pasukan Diponegoro yang berasal dari Mataram *link-up* dengan pasukan prajurit Kiai Mojo dari Pajang, bergerak menuju Surakarta. Namun, gerakan pasukan ini berhasil ditahan di desa Gawok. Pasukan Diponegoro mengalami kekalahan, pada tanggal 26 Oktober 1926. Diponegoro terluka, tetapi berhasil meloloskan diri. Sejak kekalahannya di Gawok, ofensif Diponegoro terhenti, pasukannya mundur ke wilayah Pajang, dan tersebar di beberapa tempat, antara lain, Prambanan, Kalasan, Pulowatu, Jatinom, dan Delanggu.

Kegagalan menangkap Diponegoro dan menumpas pemberontakan dengan operasi-operasi militer yang dipimpin oleh Jenderal de Kock yang berlangsung lebih dari satu tahun mendapat kritik dari para residen. Mereka mengkritik cara-cara militer dalam melakukan operasi, seperti pembakaran desa, membunuh tawanan, berbuat tercela terhadap perempuan, serta penganiayaan anak-anak. Aksi-aksi militer yang demikian secara psikologis, politis, dan ekonomis amat merugikan. Hilangnya desa-desa dan penduduk yang berpindah tempat berakibat pada terhentinya perekonomian, pajak tidak dapat dipungut, dan secara psikologis menimbulkan antipati terhadap pemerintah dan militer sendiri.

Di pihak militer jumlah korban semakin meningkat dari hari ke hari. Pada tanggal 25 Maret 1826 Komisaris Kesultanan J.J. van Sevenhoven menulis surat rahasia kepada Komisaris Jenderal Du Bus, mengenai tiga masalah, terutama tentang situasi pemberontakan. Ia prihatin terhadap nasib para prajurit karena semakin berlarut-larutnya pemberontakan dan mengusulkan agar diadakan pembaruan ketatanegaraan Vorstenlanden sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri pemberontakan.

Pada tanggal 16 Mei 1826, Residen Surakarta MacGillavrij menulis nota yang keras kepada Jenderal de Kock. Ia berpendapat, pemberontakan pada hakikatnya adalah perpanjangan dan kesalahan pembagian kerajaan Mataram pada 1755. Pemberontakan akan terjadi terus-menerus sepanjang masih dilakukan pemisahan. Ia menyarankan penyatuan kembali dua kerajaan itu, dengan menghapuskan kerajaan Yogyakarta. Pada dasarnya MacGillavry tidak mempercayai raja-raja Jawa yang diberi kekuasaan

[111] A.W.P. Weitzel I, *ibid.*, 1852, hlm. 385, P.J.F. Louw, II, *Ibid.*, 1897, hlm. 472

memerintah. Sejak awal tidak ada kepastian hukum dan falsafah bahwa kerajaan Jawa telah takluk.[112]

Kesalahan para pendahulunya harus diperbaiki. Surat kedua residen tersebut didukung oleh Residen Japara dan Juana van Haak, demi kepentingan yang lebih besar.[113] Dari semua kritik tersebut yang menjadi permasalahan pokok adalah mendesak pemerintah untuk berani mengoreksi kebijakan masa lalu karena penumpasan pemberontakan yang telah berlangsung selama satu tahun belum membuahkan hasil.[114] Yang terpenting adalah kesultanan Yogyakarta harus dianeksasi langsung diperintah oleh gubernur jenderal, seperti yang dilakukan oleh Daendels terhadap Kesultanan Cirebon.

Pada bulan Mei 1826 itu juga Jenderal de Kock menjawab semua kritik para pejabat sipil. De Kock berpendapat, perlu dipertimbangkan hal-hal yang merugikan dan yang menguntungkan. Ia tidak setuju penghapusan Kesultanan Yogyakarta, karena para Pangeran tidak bersalah. Sangat tidak adil sekiranya dinasti Hamengkubuwono dihapuskan, yang berarti menambah musuh baru, para pangeran akan berontak.[115]

Untuk mengakhiri polemik mengenai nasib Kesultanan Yogyakarta, de Kock membentuk komisi yang menghadirkan kelompok pejabat yang menghendaki penghapusan Kesultanan dan kelompok yang mempertahankan keberadaan Kesultanan Yogyakarta. Kelompok pendukung unggul dalam pemungutan suara. Penghapusan Kesultanan merupakan ledakan yang mematikan. Sebagai jalan tengah, Jenderal de Kock mengusulkan agar Sultan Hamengkubuwono II (Sultan Sepuh) diangkat kembali, dan memberikan jaminan tidak akan mengancam status hukum Sultan Muda. Diangkatnya kembali Sultan Sepuh diharapkan dapat mengubah situasi karena Sultan Sepuh masih memiliki pengaruh terhadap putra dan cucu-cucunya. Komisaris Jenderal Du Bus setuju karena masalah biaya perang telah demikian meningkat.

Operasi-operasi militer yang dilakukan de Kock selama hampir dua tahun amat melelahkan belum membuah hasil yang diinginkan. Kekuatan

---

[112] *ANRI*, MacGillavrij, Nota Omtrent den Staat der Java Vorstenlanden thans bestaande onlusten en de middelen welke herstel en versterking der rust kunnen worden aangewend, Arsip Djocja 8–11

[113] Dukungan terhadap pendapat MacGillavrij, ditegaskan dalam suratnya kepada Letnan Gubernur Jenderal, 23 Juli 1826, ketika ia diminta tanggapan dan pendapat Nota MacGillavrij, *ARA*, Arsip Koleksi H.M. de Kock Serie 14 Volgnr 18 (1826)

[114] E.S. de Klerck, *De Java Oorlog van 1825-30*, IV, 1909, hlm. 564

[115] Surat balasan Letnan Gubernur Jenderal ditulis di Yogyakarta pada 20 Mei 1826, yang berjudul Aanmerkingen op de Nota van den Mac Gillavrij Resident te Soekarta, *ARA*, Arsip Koleksi H.M. de Kock Serie 14 Volgnr 18 (1826)

pemberontak lebih kurang setengah juta orang, tersebar di pelbagai tempat, tidak mungkin ditumpas hanya dengan kekuatan militer. Sampai bulan April 1827, 1.603 orang tentaranya tewas atau 27% dari total kekuatan 6.000 orang. Rekrutmen prajurit baru sulit dilakukan, ditambah dengan politik penghematan dari Komisaris Jenderal Du Bus. Akibatnya, kesejahteraan prajurit pun merosot.[116]

Faktor penyebab kegagalan operasi militer de Kock adalah sistem berperang orang Jawa sangat membingungkan. Karakter perlawanannya sulit diduga. Orang Jawa yang terkesan pemalas dan lamban, ternyata gerilyawan yang amat tangguh.[117] Mereka mampu mengoperasikan senjata-senjata rampasan dan mampu membuat mesiunya. Bahkan, bukan rahasia lagi mereka dapat membeli senjata-senjata baru.[118] Faktor lainnya adalah strategi militer Diponegoro yang mampu mengulur waktu untuk menguras tenaga dan kemampuan perang lawan. Lawan tidak pernah diberi kesempatan untuk istirahat sekalipun teknologi persenjataannya lebih unggul. Problem lain yang dihadapi de Kock adalah merajalelanya pemakaian opium di kalangan prajuritnya. Selain itu, istri-istri prajurit pribumi (*hulptroepen*) pun ikut menambah beban.

Kondisi yang dianggap sebagai faktor penghambat operasi militernya, disadari dan dikaji oleh de Kock beserta stafnya. Suatu strategi militer dan sistem perang baru merupakan *condition sine qua non* harus diciptakan. Berdasarkan panduan dan kajian stafnya, de Kock memperbaiki strategi mobilitas yang gagal dengan strategi baru, yaitu strategi Stelsel Benteng. Benteng berfungsi sebagai pangkalan pasukan dan dibangun sedekat mungkin dengan kedudukan lawan. Dengan operasi-operasi militer yang berpangkalan di benteng akan mendesak lawan ke *killing ground*. Beberapa larangan dikeluarkan, antara lain dilarang membakar desa, lumbung-lumbung pangan, rumah ibadah, menangkap ternak, dan hal-hal lain yang menimbulkan antipati masyarakat terhadap tentara Belanda. Untuk dapat melaksanakan strategi baru ini, secara efektif diperlukan reorganisasi dan rekonstruksi pasukan serta pembagian daerah operasi secara jelas. Kemudian de Kock membagi wilayah Kesultanan atas delapan daerah operasi militer yang masing-masing daerah operasi berkekuatan satu kolone mobil. Reorganisasi pasukan mobil dan pembangunan benteng-benteng merupakan pasangan dari pelaksanaan strategi Stelsel Benteng. Daerah

---

[116] Du Bus hanya menyetujui rekrutmen prajurit Bali Badung dengan harga SpM 15 setiap kepala, sekalipun kemauan perang prajurit Bali amat rendah. Sepuluh orang Bali sama dengan satu orang Bugis. P.J.F. Louw, I, *op. cit.*, 1897, hlm. 246

[117] A.W.P. Weitzel,II, *op. cit.*, 1855, hlm. 201

[118] De Stuers, 1848, *op. cit.*, hlm. 210

operasi militer kemudian disederhanakan menjadi Daerah Operasi Timur (Pajang dan Mataram) yang dipimpin oleh Kolonel Cochius dan Daerah Operasi Militer Barat (Bagelen, Ledok, dan Banyumas) dipimpin oleh Kolonel Cleerens.

Stelsel Benteng merupakan strategi dua kutub (*double pooled strategy*), yaitu gabungan unsur manuver (pasukan) yang dinamis dengan unsur perlindungan (benteng) yang statis.[119] Unsur manuver terdiri atas kolone-kolone mobil yaitu kesatuan tempur terpadu yang terdiri atas pasukan infanteri, pasukan berkuda (*ruiterij*), pasukan bertombak, pasukan artileri, dan pionir. Pasukan infanteri disusun dalam batalion campuran, yang terdiri atas pasukan (kompi) pribumi dan kompi Belanda. Pada setiap kolone diperbantukan satu kompi pionir, dinas kesehatan, dan beberapa petugas rohani Islam (*mohammedansche priester*) yang bertugas memimpin upacara keagamaan.[120] Logistik pasukan diangkut dengan kuda beban atau kuli.

Stelsel Benteng, sebagai sistem senjata fungsinya berkembang dari aspek militer ke beberapa aspek lain sebagai berikut.

1. Benteng berfungsi sebagai batas wilayah dalam daerah pertahanan (vak) untuk memutuskan komunikasi daerah-daerah yang dikuasai lawan, memperpendek jarak penyaluran logistik, evakuasi pasukan, tempat istirahat, atau rumah sakit.[121]
2. Benteng sebagai tempat aktivitas ekonomi, yaitu mengawasi persawahan, pasar-pasar, dan tempat penyetoran pajak.
3. Benteng sebagai tempat melakukan aktivitas politik, seperti perundingan, melakukan upaya membujuk pimpinan pemberontak atau kepala desa, dengan memberikan sejumlah hadiah berupa uang, opium, atau kain sarung.[122]

Stelsel Benteng sebagai sistem senjata diaplikasikan untuk sasaran politik, sosial, ekonomi, budaya, dan militer. Dari aspek taktis, Stelsel Benteng diaplikasikan dalam bentuk patroli-patroli taktis-ofensif secara teratur untuk memaksa lawan ke suatu daerah yang dikehendaki oleh strategi. Dari aspek strategi, Stelsel Benteng dengan operasi tempur, operasi teritorial, psikologi, dan budaya yang dilaksanakan oleh kolone-kolone, berhasil memisahkan musuh dengan rakyat, mencegah, dan membatasi ruang geraknya atau keleluasaan bergeraknya. Sejumlah benteng dibangun, yang menyebabkan

[119] Hans Delbück, *op. cit.*, 1985, hlm. 290
[120] A.W.P. Weitzel, II, *op. cit.*, hlm. 46
[121] J. Hageman Jcz, *op. cit.*, 1856, hlm. 234
[122] J. Hageman Jcz, *op. cit.*, 1856, hlm. 234

mobilitas lawan tinggi, konsentrasi kekuatan lawan terpecah belah, kelelahan perang, dan menurunnya semangat berperang sampai akhirnya mereka menyerah. Namun, dalam pelaksanaannya Jenderal de Kock harus membangun 258 benteng dengan pelbagai macam ukuran yang tersebar di seluruh medan (Pajang, Mataram, Kedu, Bagelen, Ledok, dan Monconegoro Timur) yang menelan biaya sangat besar dengan jangka waktu perang yang panjang.

Di samping keunggulannya, Stelsel Benteng ini bukan tanpa cacat dan tidak dapat dikritik. De Kock terperangkap oleh strategi Diponegoro karena kekeliruan menganalisis kondisi medan, cuaca, kemampuan berperang, dan kepemimpinan orang-orang Jawa. Diponegoro dan para pembantunya, Kiai Mojo, Alibasah Sentot Prawirodirjo, dan Pangeran Bei, ternyata pemimpin perang yang genius dan tangguh sehingga mengakibatkan perang berjalan lamban. Penentuan lokasi, penentuan medan kritis, untuk bangunan-bangunan benteng sering kali keliru. Karena tidak efektif, bangunan-bangunan tersebut terpaksa harus ditinggalkan sebelum digunakan. Demikian pula benteng-benteng yang dibangun dengan bahan-bahan seadanya, menjadi sasaran lawan untuk dibakar atau dihancurkan. Prasarana jalan dan transportasi logistik yang tidak memadai menjadi kelemahan dari stelsel ini.

Medan Mataram menjadi daerah pertempuran yang dahsyat pada 1828–1829. Setelah meninggalkan wilayah Pajang, Diponegoro mengonsentrasikan kekuatannya di wilayah Mataram terutama di daerah tepi barat Sungai Progo dan tepi timur Sungai Bogowonto, Pengunungan Trayumas, dan Pengunungan Kelir. Jenderal de Kock menilai bahwa daerah ini merupakan *killing area* bagi pasukan Diponegoro. Penilaian de Kock ternyata keliru. Daerah ini merupakan medan yang ideal untuk melakukan perlawanan. Daerah ini adalah daerah yang subur, berbukit-bukit terjal, dan berpenduduk padat dan menjadi sumber prajurit. Tanahnya yang subur dapat dijadikan sumber logistik dan masyarakat di wilayah ini hanya mengakui Sultan Ngabdulkamid Herucokro (Diponegoro) bukan orang lain. Kondisi alam dan masyarakat merupakan medan yang tepat untuk melakukan strategi atrisi. Pertempuran dahsyat dan mengerikan yang terjadi di daerah ini (deprivasi, destruksi, dan pembunuhan para tawanan) menjadi peristiwa sehari-hari karena tiap-tiap pihak yang berperang berusaha segera mengakhiri peperangan.

Strategi Diponegoro dengan perlawanan inkonvensional berhadapan dengan strategi de Kock yang dengan menggunakan benteng sebagai sistem senjata. Dalam pertempuran tersebut, de Kock berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Akibatnya, pasukan Diponegoro terkuras

energinya, posisinya terdesak, dan semangat berperangnya merosot terutama setelah Jenderal de Kock membangun 93 benteng di beberapa posisi strategis, pasukan Diponegoro pun dapat direbut oleh lawan.

Pada bulan September 1829, Diponegoro bersama Sentot melakukan konsolidasi dan konsentrasi pasukan di desa Siluk (Selo), di kaki Pegunungan Selarong. Desa Siluk kemudian diserbu oleh pasukan Cochius sehingga terjadi pertempuran yang menentukan (*decisive battle*). Dalam pertempuran ini, pasukan Diponegoro mengalami kekalahan, tetapi Diponegoro dan Sentot Prawirodirjo berhasil meloloskan diri. Akibat tekanan dan kejaran terus-menerus yang dilakukan oleh pasukan Jenderal de Kock, akhirnya Sentot menyerah pada bulan Oktober 1829. Diponegoro yang meloloskan diri ke arah barat melakukan konsolidasi di daerah Bagelen.

Di Bagelen, Ledok, dan Gowong pasukan Kolonel Cleerens melakukan operasi tempur, teritorial dan psikologi secara simultan. Wilayah Bagelen sejak 1828 secara penuh dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Masyarakat Bagelen, Ledok, dan Gowong hanya mengakui Diponegoro sebagai sultannya. Sejumlah benteng yang dibangun di tepi Sungai Bogowonto tidak berhasil mencegah infiltran pasukan Diponegoro dari daerah Mataram ke Bagelen. Namun, dengan operasi teritorial, yang intensif dari basis benteng-benteng, Kolonel Cleerens berhasil melunakkan "fanatisme" orang-orang Bagelen. Sejumlah 51 benteng di Bagelen, 20 benteng di Ledok, dan 7 benteng di Kedu, atau sejumlah 78 buah benteng dibangun di daerah operasi Kolonel Cleerens.

Pada akhir tahun 1829, Diponegoro beserta sisa pasukannya telah secara jelas diketahui posisinya, yang secara militer tidak ada artinya lagi, tinggal diserbu dan Diponegoro ditembak mati. Mengapa Jenderal de Kock tidak berbuat demikian? Ia sadar, tatkala ia mengumumkan akan memberikan hadiah kepada barang siapa yang dapat menangkap Diponegoro hidup atau mati akan mendapat hadiah uang sebesar Sp.M 20.000 tidak seorang Jawa pun yang menanggapi. Hal ini berarti pengaruh Diponegoro masih terlalu besar di kalangan masyarakat Jawa, sekalipun mereka berpihak kepada de Kock. Ia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyerbu dan mengejar (*vervolging*) atau melakukan tipu daya (*overriding*).

De Kock memilih pilihan kedua, yaitu memperdaya dan membujuk Diponegoro agar ia keluar dari "kantong pertahanannya" secara damai, kemudian menangkapnya. Ia ingin mengeksploitasi nilai-nilai budaya dan karakter kesatria bangsawan Jawa sebagai kelemahan. Nilai-nilai dan karakter kesatria tersebut ada pada pribadi Diponegoro. Nilai-nilai budaya kesatriaan, yang dianggap luhur, antara lain seorang kesatria *pantang ingkar*

terhadap janji. Dengan demikian, Diponegoro harus dibujuk sampai dia mengucapkan janjinya.

Pada tanggal 9 Februari 1830, Cleerens mengutus bekas orang kepercayaan Diponegoro, Penghulu Pake Ibrahim dan Kaji Badaruddin, menghubungi Diponegoro, dan menyampaikan pesan bahwa Kolonel Cleerens ingin bertemu untuk menyampaikan keinginan berdamai dari Jenderal de Kock. Tempat yang diinginkan di desa Remakawal, suatu desa di Kabupaten Rema Jatinegara milik Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro akhirnya setuju. Dalam pertemuan tersebut Diponegoro setuju berunding dengan Jenderal de Kock, yang akan diadakan di Magelang.

Pada tanggal 28 Maret 1830, pada pukul 10.00, Diponegoro meninggalkan penginapannya diikuti oleh dua orang putranya, menuju ke kediaman residen. Tata duduk di kediaman residen diatur secara protokoler (*sareng tata lenggah samya aneng panyeratanira*).[123] Yang berada di ruang tengah, yaitu Pangeran Diponegoro, Basah, Mertonegoro, Kaji Ngisa, Kaji Badaruddin, dan dua panakawan, Rata dan Bantengwareng, serta dua anak Diponegoro yang kecil. Hanya tiga orang yang duduk mendampingi Jenderal de Kock, yaitu Residen Valck, Mayor de Stuers (ajudan), dan Kapten Roeps (penerjemah, *tolk*). Basah Gondokusumo, Basah Suryowinoto, Basah Imam Musbah, dan beberapa adipati duduk di kursi di luar.[124] Tidak ada pembicaraan penting, tetapi pertemuan itu berlangsung lama. Tatkala pembicaraan berlangsung, Jenderal de Kock memerintahkan kepada Mayor Michiels untuk melucuti pengawal Diponegoro. Michiels pun menuju asrama pengawal Diponegoro. Sejumlah 1.400 orang dilucuti senjatanya, dilanjutkan ke pengawal yang berada di halaman depan keresidenan.[125] Jenderal de Kock kemudian melarang Diponegoro meninggalkan tempat.

Setelah Diponegoro sadar bahwa ia telah tertipu, ia menyatakan bahwa dialah yang bersalah dan bertanggung jawab atas pecahnya peperangan. Namun, Diponegoro menolak perintah untuk menyerah dan menyatakan lebih baik ia mati.[126] Ia menyampaikan pesan kepada Jenderal de Kock sekiranya ia dihukum mati, minta dikuburkan di Jimatan (Imogiri) agar berdampingan dengan istrinya.

Jenderal de Kock yang telah berpengalaman bergaul dengan para pemimpin dan bangsawan Jawa, mengenali karakter dan nilai-nilai yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianggap luhur oleh orang Jawa, yang juga

---

[123] E.S. de Klerck, V, 1908, hlm. 541–542, Diponegoro, *Babad*, II, 1983, hlm. 329

[124] Diponegoro, *Babad*, II, 1983, hlm. 427

[125] E.S. de Klerck V, 1908, hlm 591, Diponegoro, *Babad*, II, 1983, hlm. 427–428

[126] De Stuers, *op. cit.*, 1847, hlm. 234

dimiliki oleh Diponegoro, dieksploitasi sebagai kelemahannya, digunakan untuk memukul mereka kembali. Dengan pilihan yang kedua membuktikan Jenderal de Kock mampu mengalahkan orang Jawa dengan nilai budayanya sendiri, *menang tanpa ngasoraken*, artinya mencapai kemenangan tanpa merendahkan derajat orang yang dikalahkan.[127]

F. Bali

1. Pendahuluan

Sebagaimana disebutkan pada Bab I, di Bali terdapat sejumlah negara, yaitu Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Mengwi, dan Bangli. Negara-negara ini masing-masing mempunyai kekuasaan sendiri dan merupakan negara merdeka. Hubungan antara raja-raja di Bali dengan Belanda sebenarnya telah ada sejak abad ke-17. Akan tetapi, hubungan ini bukanlah hubungan politik. Hubungan antara raja-raja Bali pada tahun 1827 dan seterusnya sampai 1831 dengan pemerintah Hindia Belanda hanyalah dalam bidang sewa-menyewa orang untuk dijadikan bala tentara pemerintah Hindia Belanda. Hubungan politik antara raja-raja Bali dengan pemerintah Hindia Belanda baru terjadi pada tahun 1841 tatkala raja Karangasem meminta bantuan dari pemerintah Hindia Belanda guna memulihkan kekuasaannya di Lombok. Hal ini memberi kesempatan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengikat negara itu dengan suatu perjanjian yang akan membuka pintu untuk mengadakan hubungan politik dengan negara-negara di seluruh Bali. Pada tahun 1841 juga diadakan perjanjian dengan raja-raja Klungkung, Badung, dan Buleleng.

Jika dilihat isi perjanjian, tampak bahwa pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam perjanjian tersebut, antara lain, dinyatakan bahwa raja-raja Bali mengakui bahwa kerajaan-kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan negara Belanda; raja-raja Bali tidak akan menyerahkan kerajaannya kepada bangsa Eropa lainnya; raja memberi izin pengibaran bendera Belanda di daerahnya.

Suatu masalah yang menyulitkan hubungan antara Belanda dan kerajaan-kerajaan di Bali adalah berlakunya hukum *tawan karang*, yaitu hak dari Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hukum *tawan karang* ini telah menimpa kapal-kapal Belanda seperti yang dialami pada tahun 1841 di pantai wilayah Badung. Meskipun

[127] De Stuers, *op. cit.*, 1847, hlm. 235

dalam tahun 1843 raja-raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan *tawan karang*, ternyata mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1844 di Pantai Prancak dan Sangsit terjadi pula perampasan terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar. Percekcokan kemudian timbul antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan Belanda. Raja-raja Bali dituntut agar mau menghapuskan hak tersebut.

Dalam tahun 1845 Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum *tawan karang* yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, tuntutan Belanda agar Raja Buleleng melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat pada tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang dirampas dan menerima kekuasaan Hindia Belanda, telah menimbulkan kegelisahan pada diri raja. Patih Buleleng, Gusti Ktut Jelantik, dengan tegas mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin diterima. Gusti Jelantik yang terkenal sangat menentang Belanda mengetahui akibat yang akan terjadi dengan penolakan tuntutan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Ia menghimpun pasukan, menggiatkan latihan berperang, serta menambah perlengkapan dan persenjataan guna menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sikap menentang dari Buleleng mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 24 juni 1846 yang berakhir dalam waktu 3 × 24 jam.[128] Isi ultimatum tersebut, antara lain menyebutkan agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan Belanda, menghapuskan hak *tawan karang*, dan memberi perlindungan terhadap perdagangan Hindia Belanda. Batas waktu ultimatum sampai 27 Juni 1846 tidak dapat dipenuhi oleh raja Buleleng. Untuk memikirkan masalah itu, raja membutuhkan waktu 10 hari. Gusti Jelantik yang diutus oleh raja untuk merundingkan hal itu dengan Dewa Agung dari Klungkung, telah menyatakan pendiriannya untuk tetap menentang tuntutan Belanda tersebut. Selain Raja Buleleng, kerajaan Karangasem juga telah menyatakan sikap menentang pemerintah Hindia Belanda.

2. Jalannya Perang

Situasi di Bali menjadi tegang karena sikap kerajaan Buleleng dan Karangasem. Dalam keadaan demikian, Gusti Jelantik mempersiapkan prajurit kerajaan Buleleng dan memperkuat kubu-kubu pertahanan untuk

---

[128] A.W.P. Weitzel, *De Derde Militaire Expeditie naar het Eiland Bali in 1849*, 1859, hlm. 10, 76, 8–9

menjaga kemungkinan apabila sewaktu-waktu Belanda mengadakan penyerangan.

Sementara itu, pada tanggal 27 Juni 1846 telah tiba di Pantai Buleleng pasukan ekspedisi Belanda yang berkekuatan 1.700 orang pasukan darat, terdiri atas 400 orang serdadu Eropa, 700 orang serdadu pribumi, 100 orang serdadu Afrika, dan 500 orang pasukan bantuan dari Madura.[129] Di samping pasukan darat, juga diikutsertakan pasukan laut yang menggunakan kapal-kapal pengangkut sewaan. Setelah diketahui Raja Buleleng tidak memberikan jawaban atas ultimatum, pasukan Belanda mulai mengadakan pendaratan. Prajurit-prajurit Bali sementara itu telah bersiap-siap untuk menyambut serangan pasukan yang mendarat. Tembak-menembak mulai berlangsung. Tembakan-tembakan meriam dari kapal Belanda telah menyebabkan pasukan Bali mundur dari daerah pantai. Pertempuran meluas sampai di kampung-kampung dan sawah-sawah.

Pertahanan prajurit Bali yang berada di kampung-kampung dekat pantai satu demi satu akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Demikian pula benteng prajurit Bali di Buleleng setelah dipertahankan dengan gigih pada tanggal 28 Juni 1846 terpaksa ditinggalkan dan diduduki oleh pasukan Belanda. Dengan kekalahan prajurit Bali tersebut, terbuka kesempatan bagi pasukan Belanda untuk melanjutkan penyerangan terhadap Singaraja, ibu kota kerajaan Buleleng. Prajurit-prajurit Bali di Singaraja berusaha dengan keras untuk menghadapi serangan Belanda dan dengan gigih mencoba mempertahankan istana raja. Pertempuran di sekitar istana terjadi dengan sengitnya. Usaha pasukan Bali tidak berhasil karena kekuatan musuh terutama di bidang persenjataan jauh lebih baik. Istana raja akhirnya pada tanggal 29 Juni 1846 dapat diduduki oleh Belanda.[30]

Raja Buleleng dan Gusti Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur ke Jagaraga Jelantik dan berdamai dengan Belanda. Dalam perjanjian perdamaian yang diadakan, Belanda mengajukan syarat bahwa dalam waktu tiga bulan Raja Buleleng harus sudah menghapuskan benteng-bentengnya yang pernah dipakai untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, ia tidak diperbolehkan mendirikan benteng baru. Raja Buleleng diharuskan pula mengganti ¾ jumlah biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda. Di dalam perjanjian yang diadakan pada tanggal 9 Juli 1846 itu juga disebutkan[131] bahwa Belanda diperbolehkan

[129] A.W.P. Weitzel, *ibid.*, hlm. 12

[130] A.W.P. Weitzel, *ibid.*, hlm. 13

[131] A.A. Gde Agung, hlm. 255–261, *Bali pada Abad XIX*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1980

menempatkan serdadu-serdadu di Buleleng di dalam suatu benteng yang akan segera dibuatnya. Raja Karangasem mengikuti jejak kerajaan Buleleng dan mengadakan perdamaian dengan Belanda. Ia diharuskan membayar ¼ bagian dari biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda.

Meskipun telah diadakan perjanjian, tidak berarti kedua kerajaan tersebut sepenuhnya tunduk. Adanya perjanjian itu oleh raja-raja Bali ternyata hanya dipakai sebagai siasat untuk mengulur waktu guna memperkuat diri. Pembayaran pengganti biaya perang seperti yang termuat dalam perjanjian, tidak pernah dilaksanakan oleh raja-raja Bali tersebut. Waktu pasukan ekspedisi Belanda ditarik ke Jawa, persiapan militer kerajaan-kerajaan Bali makin digiatkan. Raja Klungkung yang sangat berpengaruh pada kerajaan-kerajaan lainnya, juga menunjukkan sikap menentang Belanda. Belanda sendiri pernah menuduh raja tersebut sebagai orang yang mempersulit usaha Belanda dan telah memberi perlindungan pada anggota pasukan Belanda yang melarikan diri.

Dari fakta-fakta tersebut terlihat jelas bahwa ketiga raja tersebut tetap menunjukkan sikap menentang terhadap Belanda. Penyerangan terhadap pasukan kecil Belanda yang ditinggalkan di Bali, dan perampasan senjata mereka, sering kali terjadi. Dalam hubungan ini Gusti Jelantik makin giat memperkuat pasukannya. Pertahanan di pantai Buleleng makin diperkukuh, sedangkan jalan yang menghubungkan pantai dengan ibu kota dijaga prajurit-prajurit Bali yang bermarkas di kubu-kubu pertahanan. Meskipun menurut Perjanjian 1846 ketiga kerajaan Bali tersebut harus mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Bali, kenyataannya menunjukkan bahwa raja-raja tersebut tetap merasa berdaulat. Hak *tawan karang* masih berlaku, dan dilaksanakan pada tahun 1847, kapal-kapal asing terdampar di pantai Kusumba di wilayah Klungkung. Kerajaan-kerajaan Bali lainnya, seperti Mengwi dan Badung pada waktu itu juga mempunyai sikap menentang Hindia Belanda.

Situasi di Bali ini menimbulkan kegelisahan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Raja-raja Buleleng, Karangasem, dan Klungkung menerima ultimatum dari pemerintah Hindia Belanda yang isinya agar raja-raja tersebut segera menyerahkan serdadu-serdadu Belanda dan tahanan yang melarikan diri; agar dalam waktu 14 hari telah mengirimkan utusan yang terdiri atas orang-orang terkemuka untuk meminta maaf. Di samping itu, Raja Buleleng dan Klungkung masih harus mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang terkena *tawan karang*. Dalam pada itu, Raja Buleleng dan Karangasem diharuskan segera membayar biaya perang seperti tercantum dalam perjanjian tahun 1846. Khusus pada Raja Buleleng, pemerintah Hindia Belanda masih menuntut penghapusan benteng-benteng

yang digunakan untuk melawan Belanda dalam perang sebelum dan sesudah tahun 1846 dan penyerahan Gusti Jelantik yang oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai otak perlawanan. Mendengar kata-kata komisaris Belanda yang diucapkan pada Raja Buleleng dalam suatu pertemuan bahwa Buleleng sebenarnya telah berada di bawah kekuasaan Gubernur Jendral, Gusti Jelantik mengatakan bahwa selama ia masih hidup hal ini tidak mungkin.[132]

Raja-raja Bali tidak memedulikan ultimatum tersebut, sebaliknya mereka makin giat memperkuat pasukannya. Pada tanggal 6 Juni 1848 di Sangsit mendarat sebagian pasukan Belanda. Keesokan hari dan lusanya tanggal 7 dan 8 Juni mendarat sebagian pasukan yang lain. Pendaratan yang belakangan mendapat perlawanan pasukan Bali yang mengadakan penjagaan di pantai. Pasukan Bali terdesak karena pasukan Belanda lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan pasukan yang dikirimkan tahun 1846. Timur Sangsit dan Bungkulan dapat diduduki Belanda. Selanjutnya Jagaraja, yang terletak di sebelah selatan Bungkulan dan merupakan benteng terkuat kerajaan Buleleng, menjadi sasaran serangan. Kecuali bangunan benteng yang kukuh, empat benteng berangkai di Jagaraja yang membentuk satu garis pertahanan itu terletak di daerah yang sulit dicapai oleh musuh.[133]

Di dalam pertempuran yang terjadi selama tiga jam di empat benteng Jagaraga tersebut, pasukan Bali telah dapat menewaskan lima opsir dan 74 serdadu Belanda. Di samping itu, 7 opsir dan 98 serdadu menderita luka-luka. Jenderal van der Wijck yang memimpin pasukan darat tidak berhasil mendesak pasukan Bali meninggalkan garis pertahanannya. Oleh karena itu, ia menarik mundur pasukannya, dan kembali ke pantai.

Dalam pertempuran dengan Belanda tersebut satu benteng prajurit Bali jatuh ke tangan Belanda, tetapi tidak besar pengaruhnya terhadap kekuatan pasukan Bali, karena pasukan Belanda yang menduduki benteng itu sangat lemah. Pasukan Bali yang ada di sekitarnya memblokade pasukan Belanda tersebut. Kesulitan pengangkutan alat-alat perang yang disebabkan menipisnya tenaga kasar dan kurangnya air tawar untuk minum, cukup mempersulit pasukan Belanda.

Untuk sementara waktu, medan pertempuran sepi. Pasukan Bali sebagian berada dalam kubunya masing-masing, sedangkan sebagian

---

[132] A.W.P. Weitzel, *ibid*., hlm. 19

[133] Kekuatan dari benteng Jagaraga membuktikan bahwa ekspedisi Belanda, terutama dalam tahun 1848 dan 1849, lebih banyak digunakan untuk merebut benteng tersebut. Periksa "De Expeditie naar Bali in 1868", *MT*, 1873, hlm. 125

mengadakan pengawasan pantai dan jalan-jalan yang akan dilalui oleh pasukan Belanda menuju Jagaraga. Sementara itu, pasukan Belanda di pantai dekat Sangsit, tidak bergerak sebelum menerima instruksi lebih lanjut dari atasannya di Batavia. Permintaan van der Wijck ke Batavia melalui surat agar diberikan tambahan tentara sebanyak dua batalion infantri dan 1.000 orang tenaga kasar tidak dipenuhi, berhubung di Jawa masih memerlukan cadangan tentara yang cukup kuat. Tidak dipenuhinya tambahan militer ini mengakibatkan ditariknya kembali pasukan Belanda ini ke Jawa pada tanggal 20 Juni 1848. Dapat ditambahkan di sini bahwa seluruh kekuatan Belanda yang dikirim ke Bali itu berjumlah 2.265 orang serdadu, yang terdiri atas 870 orang Eropa, 119 orang Afrika, dan 1.385 orang pribumi.[134]

Kegagalan ekspedisi militer Belanda ke Bali pada tahun 1848 menambah kepercayaan raja-raja Bali akan kekuatan mereka. Dalam hubungan ini pengaruh Gusti Jelantik sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan tersebut. Raja-raja Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Mengwi sepakat untuk bekerja sama dalam mengusir Belanda jika mereka kembali. Dalam pada itu, raja-raja Badung, Gianyar, Bangli, dan Tabanan belum terang-terangan menunjukkan sikap perlawanan, walaupun mereka sudah didekati Belanda. Sementara itu, persiapan-persiapan militer kerajaan-kerajaan Bali ditingkatkan. Benteng-benteng pertahanan baru, dibangun, seperti di Kusumba, Klungkung, dan Karangasem. Garis pertahanan di Singaraja diperkuat. Gusti Jelantik menyempurnakan benteng-benteng di Jagaraga serta menambah persenjataan. Dua puluh orang bekas serdadu Belanda yang masuk pasukan Bali diberi tugas mengurus dan memelihara senjata api, serta melatih prajurit Bali dalam menggunakan senjata api.

Kekhawatiran raja-raja Bali bahwa Belanda akan datang lagi di Bali, ternyata menjadi suatu kenyataan. Pada akhir bulan Maret dan awal bulan April 1849 pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor A.V. Michiels mendarat di Bali. Perlu dikemukakan di sini bahwa kekuatan militer Belanda pada pendaratan ini lebih besar jika dibandingkan dengan pendaratan-pendaratan sebelumnya. Pasukan terdiri atas pasukan darat dan laut. Pasukan darat terdiri atas pasukan infantri yang beranggotakan 4.177 orang, satu peleton kaveleri terdiri atas 25 orang, pasukan artileri dengan membawa 24 pucuk meriam, dan pasukan zeni beranggotakan 151 orang. Di samping itu, terdapat pasukan Dinas Kesehatan yang beranggotakan 122 orang, intendans sebanyak 9 orang; serta tenaga kasar pengangkut sebanyak 2.000 orang. Masih ada tenaga kasar cadangan sebanyak 1.000 orang. Jumlah seluruh kekuatan di darat adalah 273 opsir,

---

[134] A.W.P. Weitzel, *op.cit.*, hlm. 22

4.737 opsir rendah dan bawahan serta 2.000 orang tenaga kasar pengangkut. Di samping itu, terdapat Angkatan Laut yang terdiri atas 29 kapal perang berukuran besar dan kecil yang dilengkapi dengan 286 pucuk meriam. Masih terdapat juga 301 angkatan laut (marinir); 2.012 kelasi (matros) orang Eropa, dan 701 kelasi pribumi.[135]

Teknis pendaratan bergelombang, dan sasarannya adalah benteng Jagaraga. Pada tanggal 31 Maret 1849 sebagian pasukan Belanda berkekuatan 700 orang, terdiri atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut, mendarat di Pantai Buleleng. Dengan perlindungan tembakan-tembakan meriam dari kapal, pasukan bergerak menuju Singaraja. Pasukan-pasukan Bali tidak berhasil menghalang-halangi bergeraknya pasukan musuh itu. Kemudian pasukan Belanda yang lain menyusul mendarat mengikuti pasukan yang terdahulu.

Raja Buleleng mengirim utusan untuk menemui pasukan Belanda di Singaraja bahwa ia bersedia mengadakan perdamaian. Kemudian Raja Buleleng dan Karangasem juga mengirimkan utusan pada tanggal 2 April 1849 bahwa mereka ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi militer Belanda di Sangsit dan akan menyerahkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal. Karena utusan ini dicurigai oleh Belanda, pesan raja-raja tersebut tidak dapat disampaikan.

Pagi harinya, tanggal 3 April 1849, Raja Karangasem mengutus seorang bangsawan untuk memberitahukan pimpinan pasukan Belanda bahwa ia bersama Patih Buleleng, Gusti Jelantik, akan menemui Jenderal Michiels di Singaraja. Disampaikan juga permintaan izin agar kedua raja yang akan bertemu dengan Michiels diperbolehkan membawa pengikut sebanyak kira-kira 1.500 orang. Permintaan tersebut dikabulkan. Akan tetapi, karena jembatan di jalan yang menuju Singaraja rusak akibat banjir, membuat hari pertemuan tertunda sampai tanggal 7 April 1849.

Pada tanggal 7 April 1849 tengah hari, rombongan pasukan Karangasem dan Buleleng sebanyak 3.000 orang bersenjatakan tombak dan senapan tiba di sebuah kampung di Singaraja. Akan tetapi, Raja Karangasem dan Patih Buleleng baru tiba pada pukul tiga sore dengan, dikawal oleh prajurit-prajurit. Pengiring seluruhnya berjumlah kira-kira 10 sampai 12 ribu orang bersenjatakan tombak bertangkai merah sepanjang 12 sampai 14 kaki dan senapan kira-kira sebanyak 1.500 buah. Di antara senjata api itu ada yang merupakan hasil rampasan dari tentara Belanda. Di tengah-tengah barisan tampak panji-panji berwarna kuning dengan lukisan hitam.

Dalam pertemuan dengan Raja Karangasem dan Buleleng, Jenderal Michiels mengajukan pokok-pokok perjanjian yang antara lain menyebut

[135] A.W.P. Weitzel, *ibid.*, hlm 46–48

bahwa Raja Karangasem dan Buleleng harus mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda; mereka harus mengosongkan dan menyerahkan benteng Jagaraga kepada Belanda; benteng Jagaraga harus diruntuhkan dalam waktu singkat; menyerahkan serdadu-serdadu Belanda yang melarikan diri; menyerahkan senjata-senjata Belanda yang dirampas selama ekspedisi yang terdahulu; memenuhi bunyi kontrak yang sudah lalu dan mengirimkan utusan ke Jakarta untuk menyatakan menyerah. Raja Karangasem dan Gusti Jelantik menerima usul-usul tersebut dan atas permintaan wakil-wakil Bali, Jenderal Michiels menyetujui untuk mengadakan pertemuan dengan raja Buleleng di Sangsit. Di samping itu, Belanda menyetujui untuk memindahkan markasnya dari Singaraja ke Sangsit.

Pada tanggal 11 April 1849, pertemuan diadakan lagi di Sangsit. Raja Buleleng dan Karangasem didahului oleh patih mereka masing-masing dan dikawal oleh prajurit-prajurit Bali dalam jumlah besar dengan tombak terhunus. Dalam pertemuan itu pihak Belanda menuntut agar pada tanggal 15 April 1849 benteng Jagaraga sudah mulai diruntuhkan, dengan ancaman jika sampai tanggal tersebut tidak dilakukan, perjanjian perdamaian batal. Tampak bahwa kedua raja tersebut tidak mau tunduk pada tuntutan tersebut dan sebaliknya Belanda curiga bahwa kesanggupan raja-raja tersebut untuk berunding merupakan siasat mengulur waktu guna mempersiapkan diri.

Sampai tanggal 15 April 1849, raja-raja tidak juga mulai membongkar benteng sehingga suasana menjadi tegang dan pertempuran meletus lagi. Pasukan Belanda sebanyak 2.400 orang bersenjatakan senapan berbagai model, meriam, mortir, dan meriam kodok *(howitzer)* mulai bergerak menuju Jagaraga. Prajurit Bali yang mengadakan pertahanan di Jagaraga berjumlah sekitar 15.000 orang dan 2.000 di antaranya bersenjata pedang yang panjang.[136]

Prajurit-prajurit Bali melepaskan tembakan-tembakan dalam pertahanan mereka, dan dapat menahan serangan tentara Belanda yang datang dari berbagai arah. Serdadu Belanda kepayahan, di samping sulitnya mencapai benteng juga karena mereka kekurangan air minum. Pasukan Belanda ditarik mundur. Dalam pertempuran ini tentara Bali dapat menewaskan opsir Belanda, 17 opsir rendah dan serdadu; sedangkan yang mengalami luka-luka sebanyak 8 opsir dan 89 opsir rendah dan serdadu.

Keesokan harinya, tanggal 16 April 1849 benteng Jagaraga diserang Belanda secara mendadak. Pasukan Belanda ini didatangkan dari Sangsit

[136] A.W.P. Weitzel, *ibid.,* hlm. 49

dengan melalui jalan yang sangat sulit karena melewati lereng bukit, jurang, dan sungai. Prajurit-prajurit Bali terkejut. Dalam pertempuran yang sengit pasukan Bali tidak dapat menghalau pasukan musuh bahkan mereka terdesak dan terpaksa meninggalkan benteng-bentengnya pada hari itu juga. Benteng-benteng tersebut jatuh ke tangan musuh. Dalam pertempuran ini di pihak Bali banyak jatuh korban, terutama prajurit-prajurit Gusti Jelantik di Benteng ke-3 yang dikatakan hampir punah. Di pihak Belanda, jatuh korban 33 orang tewas dan 148 luka-luka. Sisa pasukan Raja Buleleng banyak yang melarikan diri ke Karangasem, sedangkan Raja Buleleng dan Gusti Jelantik menyingkir ke daerah batas kerajaan Buleleng dengan Karangasem. Dengan menyingkirnya raja Buleleng, kepala-kepala daerah bawahan terpaksa menyerah kepada Belanda, seperti Gusti Nyoman Lebak. Kepala daerah Sangsit yang menyerah pada tanggal 18 April 1849, kemudian disusul oleh para *pembekel* di daerah tersebut pada tanggal 20 April 1849.

3. Akhir Perang

Jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda membawa pengaruh pada negara-negara lain. Beberapa kerajaan menjadi bersikap lunak dan bersedia berdamai dengan Belanda, tetapi di samping itu ada juga negara yang tetap menunjukkan sikap menentang, seperti Karangasem dan Klungkung, yang siap menghadapi Belanda dengan 15 sampai 16 ribu prajurit. Raja Badung dan Bangli memihak Belanda. Raja Badung bersedia membantu Belanda untuk menyerang Klungkung. Demikian juga Raja Bangli yang telah bertemu dengan Jenderal Michiels pada tanggal 16 April 1849 di Sangsit, menyanggupi akan menghalang-halangi Raja Karangasem dan Klungkung lari ke gunung. Raja Jemberana juga telah mengadakan persetujuan dengan Belanda.

Raja Karangasem bersama-sama Raja Buleleng dan Gusti Jelantik mengadakan persiapan-persiapan apabila sewaktu-waktu diserang pasukan Belanda. Sementara itu, pihak Belanda mengatur persiapannya guna menyerang Karangasem. Pada tanggal 9 Mei 1849 Jenderal Michiels dan pasukannya mendarat di teluk Labuhan Amuk, sebuah pantai di sebelah tenggara Karangasem yang berdekatan dengan batas kerajaan Klungkung. Pengambilan tempat tersebut sebagai tempat pendaratan menunjukkan bahwa kedua negara tersebut merupakan sasaran penyerangan Belanda. Di tempat lain, di dekat Tulakuta, di perbatasan Karangasem, mendarat juga 1.000 pasukan Gusti Nyoman Lebak dari Buleleng yang membantu Belanda. Pasukan siap untuk memukul pasukan Karangasem. Kemudian malam hari menjelang tanggal 20 Mei 1849 pasukan dari Raja Mataram,

Lombok, di bawah Gusti Gede Rai dan dua orang lainnya mendarat di Ujung, pantai sebelah selatan kota Karangasem. Raja Mataram yang bermusuhan dengan Raja Karangasem bersedia membantu Belanda asal diperbolehkan memiliki daerah Culik di Karangasem. Sementara itu, Patih Karangasem, Gusti Made Jungutan yang ternyata mempunyai hubungan gelap dengan Raja Mataram menggabungkan pasukannya dengan pasukan Lombok untuk membantu Belanda. Hal ini terjadi karena Gusti Made Jungutan dipandang dari silsilah nenek moyangnya merasa berhak berkuasa di Karangasem.

Setelah pasukan bantuan dari Lombok yang berjumlah 4.000 orang mendarat di Ujung pada malam hari menjelang tanggal 20 Mei 1849, pada hari berikutnya pasukan depan dengan bantuan pasukan Gde Made Jungutan mendahului menyerang pasukan Raja Karangasem. Karena sebagian rakyat di daerah-daerah dekat pantai banyak yang menyatakan menyerah kepada Belanda, pengikut Raja Karangasem yang terbatas jumlahnya kalah dan raja sendiri meninggal. Raja Buleleng dan Gusti Jelantik dapat meloloskan diri ke bukit. Dengan kekalahan ini, kerajaan Karangasem diduduki oleh Belanda.

Setelah Karangasem, Klungkung dijadikan sasaran penyerangan oleh Belanda. Dalam hubungan ini perlu disebut bahwa pasukan Bali di Kusumba yang terletak di pantai kerajaan Klungkung sudah bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Belanda. Kontak senjata pertama-tama terjadi di Sunda Lawas. Prajurit Bali berusaha mempertahankan kubu-kubu pertahanannya yang terletak di sepanjang garis pantai. Ternyata pasukan Belanda yang menyerang datang dari dua jurusan, yaitu dari belakang dan dari arah pantai, tidak dapat ditahankan oleh pasukan Bali. Prajurit Bali yang berjumlah antara 200 sampai 300 orang terpaksa menyingkir. Demikian pula pasukan Bali di Kusumba, setelah mengadakan perlawanan terpaksa tunduk pada Belanda.

Pada tanggal 10 Juni 1849 siang hari, wakil Belanda di Badung mengabarkan bahwa raja-raja Badung dan Tabanan sehari sebelumnya dengan membawa pasukan sebanyak 16.000 orang prajurit telah menyerang Klungkung. Dikatakan selanjutnya bahwa Dewa Agung Gede Putra telah menyerah kepada mereka. Bagi Belanda tindakan kedua raja tersebut telah menunjukkan sikap bersekutu dengan Belanda.

Pada tanggal 12 Juni 1849 orang-orang yang menjadi utusan masing-masing kerajaan untuk menemui Gubernur Jenderal di Jakarta sudah berkumpul di markas besar pasukan Belanda. Utusan-utusan yang mewakili negara Klungkung adalah Ida Nyoman Pedada dan Ida Wayan Bagus; dari negara Badung adalah I Made Rai, Ida Nyoman Mas, dan Pembekel Tuban;

dari negara Tabanan adalah Made Yaksa; sedangkan dari negara Gianyar adalah Nyoman Rai dan Gusti Putu Getasan. Dengan tunduknya negara-negara di Bali tersebut berarti perlawanan-perlawanan besar telah berakhir.

Dari seluruh uraian di atas tampak tragedi bahwa perlawanan-perlawanan gigih dari pemimpin Bali akhirnya dapat dipatahkan oleh kolonialisme Belanda dengan bantuan sesama pemimpin Bali sendiri.

G. Kalimantan Barat

1. Pendahuluan

Kerajaan Sintang mengenal kekuatan kolonial Belanda pada tahun 1822. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda di Pontianak, setelah mengambil alih kekuasaan atas Kalimantan Barat dari Inggris pada tahun 1819, mengirim sebuah ekspedisi ke kerajaan-kerajaan di sepanjang aliran Sungai Kapuas. Mereka hendak membuat atau memperbarui perjanjian dengan kerajaan-kerajaan itu. Saat itu Belanda belum memperlihatkan tanda-tanda hendak menguasai kawasan pedalaman Kapuas. Setahun berikutnya perjanjian antara Sintang dan Belanda dibuat, yang di masa berikutnya diperbarui beberapa kali. Pedalaman Kapuas dianggap tidak lebih sebagai pos pengamat terluar (*outpost*). Pada tahun 1825–1830 kolonialisme Belanda masih sibuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro yang menyita hampir seluruh perhatian sehingga wilayah pedalaman Kalimantan Barat menjadi terabaikan.

Perhatian Belanda timbul kembali pada tahun 1840-an ketika seorang James Brooke asal Inggris tiba di daerah Serawak, Kalimantan Utara. Kemudian Brooke menjadi raja di Serawak, yang dikenal sebagai *the White Rajah* (Raja Berkulit Putih). Ia gencar dalam menjalin hubungan dengan daerah sekitarnya, hingga ke pedalaman Kapuas. Kerajaan Sintang dapat dicapai dari Serawak melalui sungai Ketunggau yang bermuara hingga ke Kalimantan Utara. Kerajaan Sintang menyambut baik upaya Brooke untuk menjalin hubungan niaga. Perkembangan itu tidak lepas dari pengamatan pejabat kolonial Belanda di Pontianak. Khawatir bahwa Brooke akan memperluas pengaruh dan kekuasaannya di pedalaman Kalimantan Barat, Residen Belanda segera mengirim sejumlah pejabat ke daerah aliran Sungai Kapuas. Selain itu, pada tahun 1850 meletus pemberontakan buruh Cina dari kongsi Tay Kong di pertambangan emas daerah Sambas terhadap Belanda. Pemberontakan itu dapat dipadamkan, tetapi sejumlah pelakunya melarikan diri hingga ke pedalaman Kapuas. Berkenaan dengan peristiwa-

peristiwa tersebut, pada tahun 1855 sebuah rombongan Belanda tiba di kerajaan Sintang untuk mengukuhkan kembali kekuasaan kolonial Belanda.

Ketika itu kerajaan Sintang tengah menghadapi suksesi atau peralihan kekuasaan. Raja yang sedang berkuasa telah merasa tua dan hendak mewariskan takhtanya kepada putra mahkota kerajaan. Menurut adat istiadat kerajaan, pengangkatan itu harus melalui persetujuan dari para bangsawan dan pemuka kerajaan. Raja Sintang telah mengirim surat kepada sultan Pontianak sehubungan dengan pengunduran dirinya. Karena rombongan Belanda berada di Sintang, mereka juga dimintai pendapat dan diizinkan ikut serta dalam pertemuan kerajaan. Calon kuat lainnya adalah Pangeran Ratu, yang masih terhitung paman Raja Sintang dan sedang menjabat patih kerajaan. Ia juga yang menjadi wali kerajaan selama Panembahan Suryanegara masih belum dewasa karena masih kanak-kanak ketika naik takhta. Belanda mendesak bahwa Pangeran Adipati seyogianya berhak atas takhta. Campur tangan Belanda itu menimbulkan ketidak-senangan di kalangan sejumlah elite kerajaan. Hasil keputusan musyawarah itu adalah mengangkat sang putra mahkota menjadi raja dengan gelar Panembahan Kusumanegara. Setelah itu, Belanda memulai pertemuan untuk memperbarui perjanjian dengan kerajaan Sintang.

2. Jalannya Perang

Perjanjian tahun 1855 berisi ketentuan yang tidak adil. Perjanjian itu sangat menguntungkan pihak Belanda. Pihak kerajaan Sintang, terutama para bangsawan, berada di pihak yang sangat dirugikan. Setidaknya 4 butir isi perjanjian itu sangat berat sebelah. *Pertama*, sumber pendapatan ekonomi patih kerajaan, dan para bangsawan, yang berasal dari *kaula* dan *privilese* lainnya dihapus tanpa diberi kompensasi. Kawasan persungaian dibuka untuk lalu lintas setiap kapal tanpa dikenakan pungutan seperti sebelumnya, yang antara lain menjadi hak patih dan para bangsawan. Sementara sang raja memperoleh ganti rugi (*schadeloostelling*) dalam bentuk uang sebanyak f.2.400 (dua ribu empat ratus gulden) setahun. *Kedua*, kepemilikan cacah (lungguh) para pemuka kerajaan, terutama terhadap kelompok Dayak, harus diserahkan kepada pihak Belanda. Padahal cacah adalah sumber pungutan, tenaga kerja, dan prajurit untuk peperangan. Penghapusan ini tidak diikuti imbalan pengganti. *Ketiga*, pungutan dan penyerahan hasil pertambangan, yang umumnya dikelola oleh pekerja Cina, dihapuskan. Akhirnya, melengkapi pudarnya pamor kerajaan adalah pengambilalihan semua wewenang hukum kerajaan, yang dilaksanakan oleh para bangsawan tinggi, seraya menempatkan kerajaan Sintang di bawah kekuasaan Belanda,

dalam administrasi residensi Borneo (Kalimantan) Barat. Semua masalah peradilan diselesaikan dalam wewenang sebuah badan peradilan kolonial (*landraad*).

Para bangsawan kerajaan telah mengajukan keberatan dan tuntutan mereka terutama untuk memperoleh ganti rugi ekonomi atas semua hak-hak tradisional yang dihapuskan itu. Namun, pihak Belanda hanya mengumbar janji bahwa semua itu akan diatur kembali. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan yang mengarah kepada keresahan. Bersamaan dengan itu, perpecahan mulai terjadi di kalangan elite kerajaan. Para bangsawan yang dekat dengan sang panembahan menerima ketentuan itu, sedangkan sekelompok bangsawan lainnya menentang pengaturan itu. Di antara mereka yang tidak puas terdapat sejumlah bangsawan pemuka kerajaan berpengaruh, seperti Pangeran Ratu, sang patih kerajaan, Pangeran Kuning, Pangeran Anom, dan Pangeran Muda. Para bangsawan yang menolak selanjutnya mengadakan pertemuan di Naga Kayan, tempat persemayaman Pangeran Ratu, pada bulan Maret tahun 1856. Pengelompokan dan mobilisasi pengikut mulai berlangsung. Kelompok-kelompok bersenjata mulai muncul di sejumlah tempat yang menandakan keadaan yang makin genting. Bentrokan hanya tinggal menunggu waktu dan pemantiknya.

Suatu peristiwa yang memicu bentrokan berawal dari sebuah insiden yang terjadi di sebuah perkampungan di Sungai Ingar yang berada di bawah kekuasaan Pangeran Ratu dan didiami oleh Haji Muhamad Saleh, seorang keturunan Arab yang kelak ikut menjadi pemimpin pemberontakan. Seorang pedagang yang bernama Lias dikatakan mencoba menggoda salah seorang istri Haji Muhamad Saleh. Tindakan itu kemudian terbongkar sehingga menimbulkan kemarahan. Haji Muhamad Saleh bersama seorang putranya, Nibung, mengejar Lias dan setelah bertemu menembaknya. Namun, Lias dapat menyelamatkan diri ke Sintang. Dalam keadaan terluka ia melapor kepada Asisten Residen Sintang, von Gaffron. Tidak berapa lama, pejabat Belanda itu berangkat menuju kediaman Haji Muhamad Saleh bersama 9 bawahan yang dipimpin seorang kopral. Melihat kedatangan pejabat itu, Haji Muhamad Saleh dan pengikut-pengikutnya menghadang di depan permukiman mereka dengan bersenjata lengkap. Von Gaffron tidak menduga mendapat sambutan yang tidak bersahabat itu.

Ia pun segera waspada dan tidak bertindak gegabah mengingat kelompoknya kalah dalam jumlah dan kekuatan senjata. Ia tidak segera menyampaikan maksud kedatangan dan tuntutannya. Oleh karena itu, keadaan sempat menjadi tegang. Kemudian muncul seorang ipar Haji Muhamad Saleh yang dapat membangun komunikasi dengan pihak

Belanda, bernama Abu Bakar. Von Gaffron menyampaikan maksud kedatangannya, yakni hendak menangkap pelaku kejahatan sebagaimana pengaduan Lias. Namun, Abu Bakar tidak dapat mengabulkan permintaan itu. Dengan setengah diplomatis ia mengatakan bahwa apabila von Gaffron mau kembali ke Sintang, dalam tempo delapan hari ia menjanjikan akan membawa orang yang dimasudkan ke hadapannya. Ia juga mengatakan akan membicarakan masalah itu dengan Panembahan dan Pangeran Ratu. Mendengar pernyataan itu, von Gaffron bertolak kembali ke kediamannya.

Pada hari yang dijanjikan itu tidak seorang pun muncul menghadap von Gaffron. Tidak hanya itu saja, sebulan kemudian pada tanggal 5 Oktober 1856, Nibung bersama dengan belasan pengikut Melayu dan Dayak mendayung perahu menuju Sintang. Arah mereka adalah benteng pertahanan Belanda. Sasaran yang dituju adalah kediaman seorang perwira Belanda, Letnan Dua J.E. Sachse, di dekat benteng itu. Mereka dengan cepat menyerang dan melukai perwira itu yang sedang bersama dengan seorang pembantunya. Dalam keadaan luka parah, letnan itu berusaha meloloskan diri menuju benteng, sedangkan pembantunya tidak sempat menghindar sehingga dibunuh di tempat. Letnan Sachse sempat bertahan beberapa jam sebelum mengembuskan napas terakhir keesokan harinya.

Peristiwa itu segera menggemparkan kalangan benteng Belanda dan kerajaan Sintang. Von Gaffron segera memberi perintah agar Pangeran Ratu dan Pangeran Anom tidak meninggalkan kota Sintang. Kemudian mereka didesak untuk segera menyerahkan pelaku-pelaku peristiwa itu karena para pelakunya berasal dari wilayah kekuasaan mereka. Memang, saat itu Haji Muhamad Saleh dilaporkan berada di kediaman Ade Muhamad, salah seorang putra Pangeran Ratu untuk mencari perlindungan.

Di kalangan kerajaan, Panembahan Kusumanegara tidak dapat mengendalikan keadaan yang mulai panik. Ia menghadapi dilema di antara pertentangan kerabat-kerabatnya dan pihak kolonial. Ia mengalami beban moral ketika menghadapi para bangsawan yang masih terhitung pamannya, seperti Pangeran Laksamana dari Sepauk dan Pangeran Muda dari Ketunggau. Perasaan yang lebih kurang serupa ketika ia berhadapan dengan Pangeran Kuning, Pangeran Anom, dan Pangeran Ratu yang masih terhitung angkatan kakeknya. Apalagi, ayahandanya yang mantan panembahan tidak mampu menolong banyak. Menghadapi keadaan yang sulit itu, ia mengambil keputusan untuk menyingkir dari ibu kota kerajaan Sintang.

Keberadaan Pangeran Ratu di ibu kota kerajaan sebenarnya bertalian dengan ketidakpuasannya atas penghapusan sumber ekonominya melalui Perjanjian Tahun 1855. Ia masih menuntut agar ketentuan itu diatur

kembali. Pejabat Residen Borneo Barat hendak berkunjung ke Sintang untuk membicarakan keinginan itu. Namun, peristiwa berdarah itu telanjur terjadi sehingga ketika Letnan Kolonel W.E. Kroesen, pejabat residen tiba ia telah meninggalkan ibu kota kerajaan kembali ke kediamannya. Seraya itu pula ia mengajukan pengunduran diri sebagai patih kerajaan. Setibanya di tempat kediamannya, ia menemukan keadaan yang telah siap untuk melakukan pertempuran. Pangeran Prabu, salah seorang kerabatnya yang menjabat patih di kerajaan Silat secara tidak langsung ikut mendorong keadaan siap siaga itu. Pangeran Muda sedang mempersiapkan pengikutnya di Sungai Ketunggau, Seberuang, Kayan, Melawi Hilir, dan Blitang.

Kemudian atas perintah ayahnya, ia berangkat ke Serawak bersama Pangeran Paduka dari Sanggou untuk meminta bantuan Raja James Brooke. Akan tetapi, permintaan itu tidak dikabulkan. James Brooke justru memberikan anjuran agar niat melawan Belanda itu diurungkan. Brooke mengggunting di dalam lipatan ketika secara rahasia membocorkan pertemuan itu kepada pihak Belanda melalui sepucuk surat. Walau upaya mencari bantuan itu tidak berhasil, semangat perlawanan Pangeran Muda dan lainnya tidaklah surut. Pecahnya bentrokan tinggal menghitung waktu.

Pada tanggal 12 November 1856 sekitar pukul 4 pagi aliran Sungai Kapuas telah ramai dengan dayungan perahu. Suatu peristiwa yang tidak biasa saat hening menjelang fajar itu. Sepasukan Melayu dan Dayak sekitar 2.500 orang di bawah pimpinan Pangeran Muda bergerak menuju benteng Belanda di Sintang. Kekuatan benteng itu sekitar 146 serdadu, dan dipersenjatai dengan tiga mortir. Di pelabuhan Sintang sebuah kapal penjelajah bersenjata meriam berlabuh. Walau tampak tidak berlangsung kesibukan yang luar biasa di dalam benteng, mereka telah bersiaga menyambut serangan yang diperkirakan akan datang.

Sepasukan penyerbu mengalami kesulitan untuk mendekati benteng karena halangan semak belukar yang rapat. Serbuan mereka disambut dengan tembakan kanon dari kapal yang berlabuh itu. Pertahanan benteng yang langsung dipimpin oleh von Gaffron tidak berhasil ditembus. Hujan tembakan itu memaksa pihak penyerbu untuk bergerak mundur. Keadaan yang tidak jauh berbeda ditemui oleh pasukan yang menyerbu dari arah Sungai Melawi dipimpin oleh Haji Muhamad Saleh. Tembakan kanon dan senapan diikuti oleh lemparan granat menyambut kedatangan mereka. Selain itu, pasukan Belanda telah membangun parit pertahanan untuk menahan serbuan itu. Namun, serbuan tetap berlangsung. Pekik sorak mengiringi serangan yang dilakukan berkali-kali untuk menuju jantung pertahanan benteng itu. Tidak kurang dari dua jam upaya penyerbuan itu

dilancarkan, tetapi tetap tidak berhasil. Ketika pasukan penyerbu menyadari bahwa upaya mereka tidak mencapai hasil, gerak mundur diambil. Mereka menyingkir ke dalam hutan dan sebagian lainnya kembali menaiki perahu mereka menjauhi medan pertempuran. Pihak Belanda tidak melakukan pengejaran. Keesokan harinya bantuan dari Pontianak tiba dengan membawa serdadu bantuan, yang langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel W.E. Kroesen.

Keadaan segera dipulihkan. Para penduduk yang menyingkir pada saat bentrokan terjadi mulai berangsur-angsur kembali ke permukiman mereka. Jaminan keamanan yang diberikan oleh pejabat Belanda membuat mereka merasa tidak khawatir untuk kembali. Setelah keadaan mulai pulih kembali, Kroesen menggalang kekuatan untuk menghadapi para pemberontak. Dari keterangan beberapa penduduk, ia mengetahui bahwa pertahanan pihak perlawanan berada di Sungai Menyumbung. Kroesen segera mempersiapkan pengejaran dengan mengirim sepasukan besenjata bersama kapal perang "Celebes". Kapal perang itu memiliki dua meriam yang salah satunya berkaliber berat. Pasukan pengejaran terdiri atas detasemen Angkatan Laut di bawah komando Letnan Dua Baron van Heeckeren van Walien dan detasemen infanteri Angkatan Darat di bawah komando Pembantu Letnan Satu J.V. Kriesfield.

Pertahanan perlawanan itu adalah tempat permukiman Pangeran Kuning. Mereka tidak menduga pasukan musuh akan tiba secepat itu sehingga tidak ada persiapan yang sempat dilakukan. Oleh karena itu, ketika kapal perang itu mulai menembakkan meriamnya, mereka tidak dapat bertahan dan kemudian bercerai-berai untuk menyelamatkan diri menuju hutan. Benteng pertahanan para pemberontak jatuh ke tangan pihak kolonial yang segera meratakannya dengan tanah. Mereka meninggalkan sejumlah korban dan persenjataan perang tradisional. Namun, Pangeran Kuning, salah seorang pemimpin perlawanan, tidak dapat ditangkap karena telah meloloskan diri meninggalkan tempat itu.

Dengan kemenangan itu, kubu pusat perlawanan lainnya menjadi sasaran berikutnya. Penyerangan dilakukan dengan taktik militer yang sama. Hujaman meriam mendahului serangan untuk melindungi pendaratan dua detasemen Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang masing-masing dipimpin oleh Letnan Dua Laut Steffens dan Letnan Dua H.W.C.A. Thieme. Kembali bentrokan tidak seimbang terjadi antara peralatan senjata modern melawan senjata tradisional. Kediaman Pangeran Muda yang diserang itu juga dibumihanguskan sehingga rata dengan tanah. Setelah itu, pasukan kolonial kembali ke Sintang.

Sesampai di ibu kota kerajaan, pemulihan roda pemerintahan dilakukan. Bangunan yang rusak diperbaiki seperti sediakala. Kroesen tidak segera berlayar ke Pontianak. Namun, ia melakukan serangkaian pelayaran dan kunjungan ke sejumlah kerajaan untuk mengetahui perkembangan keadaan dan keberpihakan mereka. Pada umumnya kerajaan yang dikunjungi tidak menunjukkan sikap yang mendukung pemberontakan itu. Malahan di Selimbau, kerajaan seteru bebuyutan kerajaan Sintang, menyatakan kesiapan mereka untuk ikut serta dalam pasukan kolonial. Setelah itu, ia kembali ke Pontianak dan meninggalkan puluhan serdadu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selama beberapa waktu keadaan di wilayah kerajaan Sintang tenang meskipun jalur pelayaran dan perdagangan belum pulih sepenuhnya. Pengikut Pangeran Muda masih menguasai jalur pelayaran menuju dan keluar pelabuhan Sintang. Mereka memungut pajak dari perahu dan pedagang yang melintas. Para pedagang beras ditekan agar tidak memasok bahan pangan itu ke Sintang. Keresahan juga melanda para pekerja tambang Cina. Sementara itu, para pemimpin perlawanan yang berhasil meloloskan diri dari penyerbuan Belanda bergabung di permukiman Pangeran Ratu.

Keresahan dan gangguan jalur pelayaran itu sampai di hadapan Kroesen. Namun, untuk sementara ia tidak berbuat apa-apa. Meskipun sebenarnya rencana pengejaran selanjutnya telah dicanangkan, ia menghadapi kendala karena belum tibanya pengganti kapal perang "Borneo". Kapal itu sedang menjalani perbaikan dan penyesuaian untuk pelayaran sungai. Untuk operasi lanjutan, Kroesen memerlukan kapal perang yang lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Namun, kondisi pelayaran sungai memerlukan persyaratan tertentu untuk jenis kapal perang yang dibutuhkannya. Pada tanggal 20 Desember 1856 kapal perang yang diinginkan itu pun tiba. Kapal "Admiraal van Kinsbergen" berlayar menyusuri sungai menuju perairan Sintang. Di sepanjang pelayaran itu Kroesen banyak menerima keluhan tentang keadaan yang tidak aman untuk perahu dan pedagang. Keterangan ini dikumpulkan Kroesen beserta keadaan tentang para pemberontak untuk rencana selanjutnya. Kedatangan kapal perang itu di Sintang disambut oleh von Gaffron. Ia juga telah mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk melakukan pengejaran terhadap para pemberontak. Ia memperoleh keterangan bahwa telah terjadi silang pendapat di antara pemimpin pemberontakan. Pangeran Ratu menganjurkan untuk menyerahkan diri, sementara Pangeran Muda bersikeras hendak melanjutkan serangan terhadap Belanda. Namun, niat itu terhalang oleh kesehatannya yang memburuk membuatnya jatuh sakit. Selanjutnya Kroesen mempersiapkan serangan untuk melumpuhkan perlawanan.

Ia mengirim satu pasukan pendahulu (pengintai) ke Sungai Bangkirei untuk melakukan pemeriksaan dan mempelajari keadaan sambil menunggu kedatangan pasukan induk. Mereka dibekali persediaan makanan dan persenjataan yang cukup untuk beberapa hari. Pasukan itu berhasil mengumpulkan keterangan tentang para pemberontak. Pangeran Anom dan Pangeran Kuning berada di Lenkajau, sedangkan Pangeran Muda segera akan meninggalkan kediaman Pangeran Ratu di Melawi. Saat pasukan utama tiba, persiapan penyerbuan segera dilakukan. Menyambut serangan musuh, Pangeran Ratu mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kubu pertahanan dipindahkan letaknya lebih ke pedalaman. Kediaman yang ada dikosongkan dan hanya dijaga oleh beberapa orang pembantu. Pangeran Ratu dan pengikutnya menyingkir ke benteng di pedalaman. Ketika pasukan Belanda tiba di sasaran mereka hanya menemui perkampungan yang lengang tanpa penghuni. Namun, pasukan Belanda tidak gegabah untuk langsung bergerak ke benteng yang terletak di dalam hutan itu. Kroesen mengirim salah seorang penjaga itu sebagai utusan kepada Pangeran Ratu dengan pesan agar segera datang menemuinya. Ia mengajaknya untuk membuka perundingan, walau nanti terbukti bahwa pertemuan itu tidak lebih merupakan sebuah perangkap.

Tidak beberapa lama, Pangeran Ratu mengirimkan jawabannya yang pada intinya ia bersedia menemui pejabat Belanda itu. Namun, cukup lama Kroesen harus menunggu kedatangan pemimpin pemberontakan itu. Sempat perintah untuk masuk menyerbu ke pertahanan perlawanan akan diserukan, tetapi tidak lama kemudian sosok yang ditunggu pun muncul beserta rombongannya lengkap dengan pengawal bersenjata senapan berpeluru. Ia tidak langsung bertemu dengan pejabat kolonial itu karena disuruh menunggu dan dilarang meninggalkan tempat. Kroesen memerintahkannya untuk menunjukkan lokasi penyimpanan senjata. Namun, dengan suatu siasat, Pangeran Ratu menyuruh putranya Ade Muhamad untuk menyerahkan tuntutan Belanda itu. Sebagaimana yang direncanakan, utusan itu tidak kembali lagi.

Ketika bertemu dengan Kroesen, Pangeran Ratu menolak keras ketika dituduh berkomplot melawan kekuasaan kolonial. Ia menegaskan bahwa ia telah meletakkan jabatan dan menjauhkan diri dari urusan pengaturan kerajaan. Sebenarnya, Pangeran Ratu hendak menyelamatkan keluarganya agar tidak menjadi korban sasaran serangan dan hukuman. Tentu saja pembelaan itu tidak mendapat tanggapan dari Kroesen. Pangeran Ratu kemudian ditangkap dan dibawa ke Sintang untuk diadili. Peradilan kolonial menyatakan dia bersalah dan sebagai hukuman ia dan keluarganya dibuang

ke Pulau Jawa. Mereka tidak pernah kembali ke tanah kelahiran mereka. Kabar penangkapan Pangeran Ratu itu sampai ke pertahanan perlawanan di Lenkajau. Segera persiapan untuk menghadapi penyerangan musuh dilakukan. Lokasi pertahanan dipindah ke tempat yang lebih sulit dijangkau. Mereka menyadari bahwa persenjataan musuh sangat sulit untuk dihadapi. Namun, mereka pantang menyerah. Apa yang mereka duga ternyata benar. Kroesen langsung bergerak menuju Lenkajau dengan kekuatan penuh. Pasukan penyerbu dipimpin oleh Letnan Dua Laut de Stuers dan Letnan Dua Infanteri Thieme. Pertahanan pemberontakan tidak lama bertahan menghadapi penyerbuan itu. Serangan gencar pasukan kolonial tidak dapat mereka bendung. Untuk kesekian kalinya mereka harus merelakan pertahanan mereka jatuh ke tangan musuh. Mereka menyingkir ke arah hutan rimba untuk menyelamatkan diri. Kedua pangeran pemimpin perlawanan juga dapat meloloskan diri. Pangeran Anom mengundurkan diri ke pedalaman Melawi. Setelah meluluhlantakkan pertahanan lawan, pasukan Belanda kembali ke Sintang.

Daerah pedalaman Melawi yang dipilih oleh para pemimpin perlawanan memiliki ciri geografis dan topografis yang sulit untuk dicapai. Ketinggian air sungai di dekatnya sedemikian dangkal sehingga tidak memungkinkan kapal perang untuk mendekat. Pihak kolonial juga menyadari hal itu sehingga mereka menunggu angkutan kapal yang sesuai untuk melakukan pengejaran. Oleh karena itu, selama beberapa waktu pihak pemberontak dapat menarik napas lega dan memiliki waktu untuk menata kembali kehidupan mereka. Namun, bentrokan berikutnya tinggal menunggu waktu. Von Gaffron, tanpa menunggu kedatangan Kroesen, segera bersiap untuk melakukan penyerangan. Benteng pertahanan Pangeran Muda di salah satu anak Sungai Melawi digempur. Pada mulanya mereka tidak menghadapi perlawanan ketika mendekati benteng itu. Keadaan sunyi senyap tanpa memperlihatkan gerakan yang mencurigakan. Akan tetapi, pada saat pasukan itu berada di suatu ceruk sungai, hujan tembakan dari arah hutan mencecar mereka. Sebagian pembantu pasukan sempat ketakutan hingga berlarian menyelamatkan diri kembali mengayuh perahu ke arah sungai asal kedatangan mereka. Namun, mereka kehilangan keseimbangan hingga terbalik. Pihak Belanda membalas dengan tembakan mortir, tetapi jarak tembak sangat dekat sehingga tembakan itu tidak berarti karena tidak mengenai sasaran. Akhirnya, pasukan Belanda harus mundur dan berlayar ke Sungai Pinoh. Di sana mereka menghitung kerugian yang diderita dan menyusun kekuatan kembali seraya menanti kedatangan kapal perang "Onrust".

Setelah kapal "Onrust" tiba, serangan dilanjutkan lagi dengan taktik yang sama dengan sebelumnya. Dentuman meriam menghujani pertahanan musuh melindungi pendaratan pasukan penyerbu yang dipimpin oleh Letnan Satu Laut A.A.A. Gaymans. Dari arah yang berbeda penghadangan dilakukan oleh Letnan Dua F.A. Schiebelhout beserta pasukannya. Pertahanan pemberontak tidak dapat bertahan dari tembakan meriam kapal perang dan gerak tempur mereka juga terhalang oleh serbuan dan penghadangan musuh. Hampir-hampir mereka tidak memiliki celah untuk meloloskan diri. Dengan susah payah sebagian pasukan perlawanan dapat menembus kepungan dan hujanan amunisi menuju hutan rimba yang lebat. Namun, para pemimpin perlawanan tetap tidak menyerah. Satu per satu di antara mereka menutup mata karena sakit atau usia tua. Pada tahun 1857, Pangeran Kuning berpulang dan dimakamkan di Sedayu atau Sedaga. Serbuan Belanda itu berhasil mendesak gerak pasukan perlawanan menjauh dari ibu kota kerajaan ke daerah pedalaman. Keadaan ini mendukung upaya Panembahan Sintang untuk memulihkan kembali kekuasaannya. Para bangsawan, terutama yang masih berkerabat dengan para pemimpin perlawanan diambil sumpah kesetiaan mereka, termasuk putra-putra Pangeran Ratu, yakni Ade Mohamad dan Raden Pati. Namun, tampak tanda-tanda, walau sulit untuk dibuktikan bahwa sejumlah bangsawan yang bersimpati dengan pemberontakan secara diam-diam memberi bantuan kepada mereka. Bahkan, sejumlah bangsawan masih tetap bergabung dengan pihak perlawanan.

Pusat perlawanan berada di Sedayu, yakni di Sungai Kayan yang merupakan hutan pepohonan yang lebat. Namun, sebuah serangan pasukan Belanda menghancurkan pertahanan itu walau melalui perlawanan yang sengit dari pihak pemberontak. Kembali, pasukan Belanda tidak berhasil menangkap pemimpin pemberontakan. Awalnya mereka kehilangan arah menuju posisi benteng itu berada. Lalu pada serangan pertama pihak perlawanan berhasil memukul mundur pasukan penyerbu. Setelah kontak senjata yang seru, benteng Kuala Ingar tidak dapat bertahan dari gempuran sehingga segera ditinggalkan yang selanjutnya dimusnahkan oleh pasukan musuh. Para pemberontak membangun tempat pertahanan baru yang terletak lebih jauh ke pedalaman dan sulit dijangkau.

3. Akhir Perang

Setelah serangan terhadap pertahanan perlawanan di Kuala Ingar, keadaan kembali tenang. Pihak Belanda tidak melanjutkan pengejaran mereka, sementara pihak lawan tidak membalas serangan itu. Namun, pemimpin perlawanan, Pangeran Anom yang telah berusia lanjut tetap

melakukan konsolidasi kekuatan. Ia memperluas dukungan perlawanan dari permukiman-permukiman di tepian Sungai Kayan dan Kapuas. Ia menerima banyak simpati dan dukungan dari mereka. Perkembangan ini membuat Belanda agak khawatir bahwa perlawanan akan timbul dan menjadi lebih hebat. Belanda mulai memberikan tanggapan.

Pertama, keadaan darurat diberlakukan di Sintang. Pada mulanya pemberlakuan itu membuat keadaan lebih tenang, tetapi kemudian menjadi tegang. Keadaan darurat ternyata memengaruhi lalu lintas perdagangan yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Menyikapi kemunduran itu, pihak kolonial Belanda mengambil sejumlah kebijakan. Selain memperkeras sikap terhadap para bangsawan yang dicurigai berkesetiaan ganda, Belanda mencoba membuka jalur perundingan. Sebelumnya, kontak pembicaraan telah terjadi ketika Pangeran Muda dan Pangeran Anom menyampaikan ke pihak Belanda bahwa para bangsawan dan pejabat kerajaan kerabat mereka yang tidak terlibat dengan gerakan mereka jangan dilibatkan. Karena tampak tanda-tanda sikap keras Belanda itu sering kali menyeret mereka yang justru tidak tersangkut paut dengan perlawanan. Namun, mereka tetap terkena getahnya. Juga kedua pemimpin pemberontakan itu menekankan kepada anak cucu mereka dapat memperoleh pengampunan dari pemerintah kolonial. Walau di balik permohonan itu tidak ada janji bahwa mereka akan menghentikan perlawanan.

Residen Borneo Barat, Kroesen, memberikan tanggapan dengan memberi ultimatum bahwa apabila dalam batas waktu selama tiga bulan perlawanan tidak diakhiri, mereka akan menempuh tindakan lebih keras. Ancaman itu menyatakan bahwa para pembangkang akan ditumpas habis tanpa diberi ampunan. Pasukan Belanda akan melakukan serangan kembali. Sehubungan dengan itu, perintah telah diturunkan kepada pejabat Asisten Residen Sintang yang baru, C. Kater. Pejabat itu agak lunak sikapnya. Berbeda dengan atasannya, ia mencoba membangun jalinan pembicaraan dengan para pemberontak. Upaya ini membuahkan hasil karena segera mendapatkan sambutan dari kubu perlawanan. Tempat pembicaraan disepakati akan dilakukan di Sintang.

Delegasi perlawanan tiba dengan pimpinan Ade Unut, putra Pangeran Muda dan cucu Pangeran Anom. Di pihak kolonial langsung di bawah pimpinan Kater. Perundingan itu berjalan dengan penuh kecurigaan karena pengalaman tertangkapnya Pangeran Ratu masih membekas dalam ingatan mereka. Namun, Ade Unut tidak terlibat dalam serangan ke benteng Belanda di Sintang tanggal 12 November 1856. Ia hadir mewakili pihak perlawanan yang dapat diterima oleh pihak kolonial. Pertemuan itu dihadiri oleh

sejumlah bangsawan dan pejabat kerajaan Sintang. Sementara itu, di pelabuhan Sintang bersandar sebuah kapal perang Belanda.

Pada awal pembicaraan, pihak tuan rumah, Asisten Residen Sintang mempersilakan Ade Unut untuk membacakan surat dari Pangeran Anom yang menugaskannya untuk hadir dalam perundingan itu. Ade Unut menegaskan bahwa apa yang diputuskan dalam pertemuan itu akan diikuti oleh Pangeran Anom. Beberapa kesepakatan awal yang menyangkut kebebasan berbicara dan keamanan peserta pertemuan dibahas sebelum masuk ke persoalan utama. Masalah ini penting mengingat rasa curiga terhadap perilaku Belanda masih sangat kuat. Pihak kerajaan Sintang meminta jaminan kolonial Belanda atas keselamatan wakil pihak perlawanan itu. Kater memberikan kata-kata jaminannya. Kemudian Kater membuka perbincangan dengan membahas surat permohonan ampunan yang pernah diajukan oleh Pangeran Muda dan Pangeran Anom pada bulan November 1859. Sebenarnya surat itu merupakan jawaban atas tawaran pihak kolonial kepada pemimpin perlawanan agar menghentikan gerakan mereka. Selanjutnya, Kater mengajukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum permintaan itu dapat ia kabulkan. Persyaratan itu antara lain bahwa Pangeran Anom harus meletakkan kedudukan dan hak-hak politiknya serta akan menjauh dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Lebih jauh lagi ia harus mencopot gelar-gelar ningratnya. Pihak perlawanan harus pindah dan bermukim di sekitar Sintang agar mudah diawasi oleh pemerintah kolonial.

Ade Unut hanya mengajukan keberatan terhadap tuntutan yang kedua oleh karena ia harus membicarakannya dengan Pangeran Anom dan terutama dengan ibundanya. Ada kemungkinan bahwa ibundanya tidak ingin pindah dari kediamannya karena ia ingin tetap dekat dengan makam suaminya, Pangeran Muda. Namun, ada usulan yang didukung oleh Panembahan Sintang bahwa sebaiknya makam itu ikut pindah juga. Gagasan ini sempat menimbulkan silang pendapat di kalangan hadirin. Penolakan pemindahan timbul berdasarkan alasan bahwa makam itu terletak di permukiman Dayak sehingga lebih terjaga dan sebaiknya tidak diganggu. Kemudian perbincangan masuk ke persoalan lainnya.

Setelah pertemuan selesai, Kater menawarkan kepada Ade Unut untuk menemaninya berangkat ke Pontianak. Namun, Ade Unut menolaknya karena sulit untuk percaya bahwa ajakan itu tidak mempunyai maksud apa-apa. Kecurigaan itu terbukti, tidak beberapa setelah itu, semua keluarga para pemberontak ditangkap oleh pasukan kolonial. Tidak ada perlawanan berarti yang dilancarkan dalam penangkapan itu. Namun, Pangeran Anom

tidak berada di antara mereka yang tertawan. Ia telah menutup mata karena sakit sebelum penangkapan itu berlangsung.

Dengan peristiwa itu, berakhirlah perlawanan para bangsawan Sintang terhadap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari pihak kolonialisme Belanda. Perlawanan yang berlangsung sekitar 52 bulan itu dikenal dalam sebutan setempat sebagai *Perang Tebidah*. Meskipun dapat dipadamkan, para pemimpin perlawanan, kecuali Pangeran Ratu yang menyerah, tidak dapat ditawan atau dibunuh. Salah seorang pemimpin perlawanan, Haji Mohamad Saleh dan putranya Nibung, berhasil menghindar dari penangkapan dan melanjutkan perlawanan. Ia bergabung dengan perlawanan Pangeran Mas Natawijaya dari Perang Banjar di Kalimantan Selatan, yang menyingkir ke wilayah Melawi, pada tahun 1864. Ade Unut memperoleh rehabilitasi dari pemerintah kolonial dan memperoleh gelar Panembahan Jayakusuma. Ia menutup mata pada tahun 1881.

H. Kalimantan Selatan

1. Pendahuluan

Perlawanan yang terjadi di Kalimantan Selatan, di wilayah kerajaan Banjar berlangsung hampir setengah abad lamanya. Jika dilihat coraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek (1859–1863),[137] dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya (1863–1905).

Perlawanan ini meletus pada tahun 1859 karena rakyat dan beberapa bangsawan di Banjar merasa tidak senang dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah. Kalau ditinjau lebih jauh, di kalangan rakyat sudah lama terpendam rasa tidak senang karena persoalan pajak dan kerja wajib yang memberatkan. Pajak yang semakin berat ini berhubungan dengan semakin kecilnya daerah kekuasaan kesultanan.

Penyempitan daerah Banjar, dari waktu ke waktu berdasarkan perjanjian dengan Belanda, berpangkal pada adanya hasil tertentu di daerah kesultanan yang dapat diperdagangkan. Hasil tersebut adalah lada,

[137] Orang Belanda menganggap bahwa perang itu hanya berlangsung antara tahun 1859–1863 (W.A. van Rees, *De Banjartnasinsche Krijg van 1859–1863*, I, Arnhem, D.A. Theime, 1865). Akan tetapi, Soeri Soeroto dalam tulisannya yang berjudul "Beratib Beameaal, suatu Pergerakan Keagamaan di Dalam Perang Banjar", *Bulletin Yaperna*, No. 11, Th. III, 1976, berpendapat bahwa perang itu terus berlangsung sampai tahun 1905, yaitu setelah perlawanan dari rakyat Banjar sama sekali terpatahkan

rotan, damar, emas, dan intan. Hasil-hasil ini yang mengundang orang asing (Belanda dan Inggris) datang ke tempat ini.

Guna mendapatkan hasil-hasil Banjar, pada awal abad ke-17 datang pedagang Belanda yang dengan susah payah mendapatkan izin untuk berdagang di sana. Akan tetapi, kemudian mereka diusir, karena ternyata merugikan pedagang dari Banjar sendiri. Setelah kepergian pedagang Belanda, datang pula pedagang asing lain, yaitu Inggris. Bangsa ini pun akhirnya bernasib serupa dengan pedagang Belanda, yaitu mereka diusir dari wilayah negara Banjar karena ternyata juga merugikan pedagang pribumi (penduduk asli).

Orang-orang asing dengan mudah dapat diusir dan dikalahkan oleh rakyat atau penguasa Banjar karena dalam taraf ini kedudukan mereka belum kuat. Orang asing di sana belum merupakan suatu kekuatan yang berarti, suatu kekuatan yang dapat mengguncangkan kewibaan dan ketenteraman di wilayah Banjar.

Setelah pedagang Inggris meninggalkan Banjar pada dasawarsa ketiga abad ke-18, Banjar didatangi lagi pedagang Belanda. Sultan Tahlilillah dapat didekati oleh Belanda. Pada tahun 1734 diadakan suatu perjanjian di mana pedagang-pedagang Belanda diberikan fasilitas perdagangan.

Pada masa awal, hidup matinya Belanda sangat bergantung pada sikap dan tindakan Sultan. Setelah setengah abad Belanda melakukan perdagangan di sana, muncul kesempatan untuk berkembang, yaitu adanya pertentangan di kalangan para bangsawan mengenai kedudukan Sultan, yaitu antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir.[138] Untuk dapat mempertahankan kedudukannya, Pangeran Nata meminta bantuan kepada Belanda.

Kesempatan baik ini tidak disia-siakan Belanda. Dengan bantuan Belanda, akhirnya Pangeran Amir dapat ditangkap, kemudian dibuang ke Ceylon. Akan tetapi, Pangeran Nata, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian baru yang diadakan tanggal 13 Agustus 1787, harus menyerahkan sebagian wilayah kesultanan kepada Belanda, seperti daerah-daerah Tanah Bumbu, Pegatan, Kutai, Bulongan, dan Kotawaringin.

---

[138] Pangeran Nata adalah paman ipar Pangeran Amir yang tetap menjadi Sultan setelah kakak Pangeran Amir yaitu Pangeran Abdullah, terbunuh atas perintah Pangeran Nata. Semula Pangeran Nata menjadi wali dari Pangeran Abdullah karena Pangeran Abdullah masih kecil. Pangeran Nata bergelar Sultan Tamjidillah III dan oleh rakyat diberi gelar Panembahan Ratu. Pangeran Amir merasa lebih berhak atas takhta itu dan mengadakan penyerangan terhadap Pangeran Nata

Sementara wilayah negara lainnya tetap dikuasai Sultan, tetapi sebagai pinjaman.[139]

Pada masa 1811–1816 daerah-daerah Belanda di Kesultanan Banjarmasin ini dikuasai oleh Inggris. Setelah Inggris meninggalkan Banjarmasin tahun 1816, Sultan Sulaiman yang memerintah tahun 1808–1825 mengadakan perjanjian baru dengan Belanda pada tanggal 1 Januari 1817, yang isinya menyebutkan penyerahan daerah-daerah kesultanan kepada Belanda. Daerah-daerah itu adalah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kotawaringin, Lawai, Jelai, Pegatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, dan Berau.[140]

Selain pertentangan antarbangsawan di pusat pemerintahan, kericuhan yang terjadi di daerah-daerah juga dijadikan alasan oleh Belanda untuk mengadakan intervensi. Seperti kericuhan yang terjadi di Marabahan dan Tanah Dusun pada tahun 1825 yang sedikit mengkhawatirkan Belanda. Untuk mengatasi kesulitan, diadakan perjanjian tambahan baru dengan Sultan dan daerah tersebut kemudian menjadi milik Belanda.

Perjanjian yang dilakukan antara Sultan Adam Alwasikh Billah (memerintah tahun 1825–1857) dengan Belanda pada tanggal 4 Mei 1826 memberi kesempatan kepada Belanda untuk memperoleh daerah yang lebih luas lagi. Seluruh daerah kesultanan, kecuali daerah Hulu Sungai, Martapura, dan kota Banjarmasin, masuk dalam kekuasaan Belanda. Selain itu, dalam perjanjian tersebut disebutkan adanya pemberian kekuasaan kepada Belanda untuk menentukan personalia dalam pengangkatan pejabat kesultanan.

Guna menguatkan kedudukannya di Banjarmasin agar tidak terdesak oleh Inggris, Belanda mengangkat seorang gubernur. Pada tahun 1845 Gubernur Weddik mengadakan perjanjian dengan Sultan untuk memperbarui Perjanjian Tahun 1826. Dalam perjanjian ini ditetapkan batas-batas kesultanan yang baru dan Belanda juga mendapat izin untuk mengerjakan tambang batu arang di distrik Riam.

Sebagaimana telah disinggung di awal, penyempitan daerah kesultanan mempunyai pengaruh terhadap keadaan sosial-ekonomi penguasa, baik penguasa di tingkat tinggi maupun rendah. Hal ini disebabkan pendapatan para penguasa ini adalah dari hasil penarikan pajak dan kerja wajib di wilayahnya. Sejak sekitar tahun 1824 sudah disinyalir bahwa kehidupan para penguasa terasa lebih berat dan sukar. Tambahan

---

[139] Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Kalimantan*, Djakarta, hlm. 336

[140] Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *ibid.*, hlm. 367

pula, adanya kontak dengan unsur-unsur kebudayaan Barat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan mereka. Untuk mengatasi kesulitan ini jalan yang ditempuh oleh penguasa ialah dengan menaikkan pajak.

Perlu dikemukakan bahwa seperti halnya di dalam masyarakat tradisional umumnya, masyarakat Banjar dapat terbagi dua kelas. Sebagian terbesar adalah golongan bawah, yang diperintah; sedangkan sebagian lainnya yang hanya sedikit adalah golongan atas, yaitu golongan yang memerintah. Di puncak struktur sosial ini terdapat kelas yang memerintah secara turun-temurun, terdiri atas Sultan dan sanak keluarganya. Di bawahnya adalah golongan agama, kemudian pejabat-pejabat birokrasi.

Golongan rakyat biasa, sebagian besar terdiri atas orang-orang yang produktif, yaitu suatu golongan yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti hasil-hasil makanan ikan, dan kerajinan tangan. Golongan di atasnya, sebagaimana telah disinggung di atas, hidupnya terutama dari penarikan dari berbagai macam pajak yang dipungut dari rakyat. Pajak-pajak itu umumnya dipungut langsung oleh petugas-petugas pajak dengan perantaraan dan bantuan kepala desa masing-masing. Dengan persetujuan kepala desa, petugas pajak dapat menentukan kebijakan sendiri, baik mengenai jumlah maupun cara penarikannya. Mereka berkeliling dengan pengawalan yang kuat. Selama dalam tugas mereka menjadi tanggungan penuh desa yang didatangi dan tidak akan pergi sebelum pajak yang dipungutnya terbayar. Daerah yang kaya dikenakan pajak kepala yang tinggi.

Selain pajak, rakyat juga dikenakan kerja wajib untuk kepentingan golongan yang berkuasa. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau persoalan pajak atau kerja wajib menjadi pangkal timbulnya kegelisahan sosial.

Di lain pihak, campur tangan Belanda dalam urusan intern Kesultanan, yaitu dalam pengangkatan penjabat-penjabat penting termasuk jabatan Sultan, membuat kegelisahan sosial ini semakin besar. Dalam hal ini bukan saja rakyat yang merasa tidak senang, melainkan juga beberapa orang dari kalangan penguasa dari yang tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi yaitu Sultan.

Rasa tidak senang dengan campur tangan Belanda dalam urusan intern dimulai tahun 1851, yaitu ketika Mangkubumi meninggal dunia. Timbul perbedaan pendapat mengenai penggantinya. Sultan Adam menginginkan Prabu Anom (putranya yang ke-4) sebagai pengganti, sedangkan Belanda tidak menyetujui dan kemudian yang diangkat Pangeran Tamjidillah (putra dari kakak Prabu Anom, yaitu Raja Muda Abdurrakhman dengan Nyai

Aminah). Tidak setujunya Sultan Adam terhadap pengangkatan Pangeran Tamjidillah selain Pangeran Tamjidillah dan bukan keturunan perempuan bangsawan, yaitu Nyai Aminah, juga karena ia menghina agama Islam.

Lepas dari masalah perbedaan pendapat di atas, timbul masalah baru yaitu dengan meninggalnya Sultan Muda Abdurrakhman pada tahun 1852.[141] Sultan Adam menghendaki pengangkatan Pangeran Hidayat[142] sebagai Sultan Muda. Pengangkatan ini didasarkan atas perjanjian antara Sultan Adam dengan Pangeran Abdurrakhman ketika dilangsungkan perkawinannya dengan Ratu Siti (ibu Pangeran Hidayat). Kemudian yang dicalonkan oleh Sultan Adam untuk menduduki Mangkubumi adalah Prabu Anom.

Keinginan Sultan Adam tidak disetujui oleh Belanda. Belanda menilai bahwa Pangeran Hidayat tidak cakap, tidak pernah bergaul dengan Belanda, dan tidak pernah menolong Belanda dalam perdagangan. Belanda memaksa Sultan Adam agar mencabut usulnya, yaitu mencalonkan Pangeran Hidayat sebagai Sultan Muda, dan agar menggantinya dengan Pangeran Tamjidillah. Demikian juga agar usul Sultan Adam mengangkat Prabu Anom sebagai Mangkubumi, dicabut.

Dalam bulan Mei 1853 Sultan Adam mengirimkan utusan ke Batavia (Jakarta) untuk meminta agar Pangeran Tamjidillah, yang sudah diangkat sebagai mangkubumi dipecat dan Pangeran Hidayat diangkat sebagai Raja Muda dan Prabu Anom sebagai mangkubumi. Usaha ini akhirnya tidak dikabulkan oleh Belanda. Guna mencapai cita-citanya, Sultan Adam menempuh jalan lain. Ia mengusulkan kepada Belanda agar Prabu Anom diangkat menjadi Raja Muda. Usul ini pun ditolak. Karena penolakan itu, pada tahun 1855 secara diam-diam ia melantik Prabu Anom sebagai Raja Muda (Putra Mahkota). Dalam tahun itu juga Sultan Adam membuat surat wasiat, yang boleh dibuka setelah ia meninggal. Surat wasiat itu menetapkan Pangeran Hidayat sebagai penggantinya jika ia meninggal. Anaknya sendiri, yaitu Prabu Anom, dan cucunya, Pangeran Tamjidillah, akan diancam hukuman mati jika menghalang-halangi maksudnya. Sehubungan dengan pengangkatan Prabu Anom dan pembuatan surat wasiat, Sultan Adam memecat Pangeran Tamjidillah sebagai mangkubumi.

---

[141] Sultan Muda Abdurakhman adalah anak Sultan Adam. Menurut dugaan, meninggalnya Sultan Muda Abdurrakhman adalah atas perbuatan Prabu Anom (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Kalimantan*, hlm. 369)

[142] Pangeran Hidayat adalah putra Sultan Muda Abdurrakhman dari istrinya yang bernama Ratu Siti (turunan raja). Ratu Siti adalah anak saudara Sultan Adam

Akan tetapi, pada bulan Mei 1856 datang surat yang menyatakan Pangeran Tamjidillah diangkat Belanda sebagai Raja Muda dan pemerintah Belanda memaksa Sultan Adam agar mengakui pengangkatan tersebut dan selanjutnya akan diangkat mangkubumi yang baru oleh Belanda. Sementara itu, Prabu Anom dilarang meninggalkan Banjarmasin dan gerak-geriknya diawasi.

Pada bulan Mei 1856 Sultan Adam juga mengajukan usul agar Pangeran Hidayat diangkat menjadi mangkubumi seperti kemauan Belanda. Usulnya diterima, dan pada bulan Agustus 1856 Pangeran Hidayat dilantik. Pengajuan Pangeran Hidayat sebagai mangkubumi adalah siasat Sultan Adam guna mendinginkan hati rakyat yang menilai bahwa Prabu Anom dijadikan tawanan.

Sesudah pelantikan Pangeran Hidayat sebagai mangkubumi, tanggal 1 November 1857 Sultan Adam meninggal dunia. Dua hari kemudian, Pangeran Tamjidillah dilantik menjadi Sultan.

Pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan menimbulkan kekecewaan di kalangan bangsawan dan rakyat. Kekecewaan itu karena Pangeran Tamjidillah adalah anak Sultan Muda (Pangeran Abdurrakhman) dengan Nyai Aminah (keturunan Cina). Ia amat dibenci, baik oleh golongan keraton maupun rakyat. Kebiasaan mabuk menyebabkan ia dimusuhi oleh golongan agama. Sementara Pangeran Hidayat adalah seorang yang sebenarnya berhak atas takhta, karena sebelum ia lahir telah ditetapkan oleh Sultan Sulaiman dan Sultan Adam untuk naik takhta sesuai dengan perjanjian antara Sultan berdua dengan Mangkubumi Nata ayah Ratu Siti sebelum ibu Pangeran Hidayat kawin dengan Sultan Muda. Menurut tradisi, hanya sultan yang ibunya seorang keturunan yang boleh menaiki takhta. Selain itu, Pangeran Hidayat mempunyai sifat yang baik, yaitu rendah hati, dan ramah tamah sehingga disenangi rakyat. Terakhir, adanya surat wasiat dari Sultan Adam yang menyatakan bahwa Pangeran Hidayatlah yang akan menggantikannya.

Kekecewaan di kalangan rakyat di Batang Balangan memperoleh saluran setelah Penghulu Abdulgani dengan terang-terangan mengecam pengangkatan Pangeran Tamjidillah. Suatu pengangkatan seseorang yang tidak berhak menjadi raja dipandang dari adat sebagai tanda kemerosotan kerajaan. Mereka lebih menaruh simpati kepada Pangeran Hidayat. Sebaliknya, Belanda memandang pengangkatan Pangeran Tamjidillah lebih menguntungkan.

Kedudukan Pangeran Hidayat sejak diangkat menjadi mangkubumi pada tahun 1856, menjadi sulit. Sewaktu Pangeran Tamjidillah menggantikan Sultan Adam menjadi Sultan pada tahun 1857, Pangeran

Hidayat merasa tersisihkan. Pendiriannya yang selalu bertentangan dengan Pangeran Tamjidillah juga menyulitkan kedudukannya sebagai mangkubumi. Pangeran Prabu Anom yang waktu itu dicurigai oleh Belanda dapat ditangkap Belanda dengan menggunakan pengaruh Pangeran Hidayat sebagai mangkubumi. Namun, pembuangan Prabu Anom ke Jawa menimbulkan kekecewaan pada diri Pangeran Hidayat karena menurut residen Belanda bahwa Pangeran Prabu Anom hanya akan ditahan di Banjarmasin.

Kericuhan ini dijadikan Belanda untuk mencampuri urusan dalam kerajaan Banjarmasin. Kolonel Andresen, utusan pemerintah Belanda di Batavia (Jakarta) datang di Banjarmasin untuk menyelidiki dari dekat sebab-sebab kericuhan. Andresen kemudian berkesimpulan bahwa Pangeran Tamjidillah yang tidak disenangi oleh rakyat adalah sumber kericuhan itu. Sultan Tamjidillah kemudian diturunkan dari takhta dan kekuasaan kerajaan Banjarmasin diambil alih oleh Belanda. Penentangan rakyat terhadap Sultan Tamjidillah kemudian beralih kepada pemerintah Belanda. Dalam situasi demikian, Pangeran Hidayat akhirnya condong kepada rakyat.

2. Jalannya Perang

Perlawanan rakyat terhadap Belanda berkobar di daerah-daerah di bawah pimpinan Pangeran Antasari yang berhasil menghimpun pasukan sebanyak 3.000 orang dan menyerbu pos-pos Belanda. Pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan Antasari pada tanggal 28 April 1859. Di samping itu, kawan-kawan seperjuangan Pangeran Antasari juga telah mengadakan penyerangan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang dijumpai. Pada saat Pangeran Antasari mengepung benteng Belanda di Pengaron, Kiai Demang Leman dengan pasukannya telah bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda di Pengaron. Bersama-sama dengan Haji Nasrun pada tanggal 30 Juni 1859, Kiai Demang Leman menyerbu pos Belanda yang berada di istana Martapura. Dalam bulan Agustus 1859 bersama Haji Buyasin dan Kiai Langlang, Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio.

Pada tanggal 27 September 1859 pertempuran terjadi juga di benteng Gunung Lawak yang dipertahankan oleh Kiai Demang Leman dan kawan-kawan. Dalam pertempuran ini kekuatan pasukan Demang Leman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan musuh sehingga ia terpaksa mengundurkan diri. Karena rakyat berkali-kali melakukan penyerangan gerilya, Belanda setelah beberapa waktu lamanya menduduki benteng

tersebut, kemudian merusak dan meninggalkannya. Sewaktu meninggalkan benteng, pasukan Belanda mendapat serangan dari pasukan Kiai Demang Leman yang masih aktif melakukan perang gerilya di daerah sekitarnya.

Sementara itu, Tumenggung Surapati menyanggupi permintaan Belanda untuk membantu menangkap Pangeran Antasari. Setelah mengadakan perundingan di atas kapal *Onrust* pada bulan Desember 1859, Tumenggung Surapati dengan anak buahnya berbalik menyerang tentara Belanda yang berada di atas kapal tersebut, kemudian merebut senjata mereka dan menenggelamkannya. Benteng pertahanan Tumenggung Surapati di Lambang mendapat serangan dari Belanda dalam bulan Februari 1860. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda menyebabkan Tumenggung Surapati meninggalkan benteng tersebut.

Tumenggung Jalil yang mengadakan perlawanan di daerah Amuntai dan Negara mendapat serangan dari pasukan Belanda dengan bantuan Adipati Danureja, yang sejak semula setia kepada Belanda. Atas jasanya turut mengalahkan Tumenggung Jalil, Danureja dijadikan Kepala Daerah Benua Lima. Tampaklah bahwa dalam perang ini Belanda menggunakan pejabat kerajaan yang memihak kepadanya untuk menindas perlawanan.

Sebagaimana telah disinggung di muka, Pangeran Hidayat condong kepada rakyat. Karena sikap ini, ia kemudian diturunkan dari kedudukannya sebagai mangkubumi oleh Belanda. Desakan Belanda melalui suratnya tertanggal 7 Maret 1860 yang berisi permintaan supaya ia menyerah dalam waktu 12 hari, mendapat jawaban tegas dari Pangeran Hidayat bahwa ia tidak akan menyerah. Dengan demikian, ia dianggap benar-benar memberontak terhadap Belanda.

Kekosongan jabatan sultan dan mangkubumi dalam kerajaan Banjarmasin, mengakibatkan kerajaan dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Wilayahnya dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Karena tindakan pemerintah Hindia Belanda itu, di samping perlawanan-perlawanan yang sedang berlangsung, di daerah-daerah timbul perlawanan-perlawanan baru, seperti di daerah Hulu Sungai, Tanah Laut, Barito, dan Kapuas Kahayan. Tempat-tempat seperti Tembarang, Muning, Amawang, Gadung, dan Barabai dijadikan pusat-pusat perlawanan untuk daerah Hulu Sungai, sedangkan di daerah Tanah Laut pusat perlawanan terdapat, antara lain di Riam Kiwa, Riam Kanan, dan Tabattio.

Dengan meluasnya perlawanan rakyat ini pemerintah Hindia Belanda di Banjar menghadapi kesulitan. Perluasan pengaruh perlawanan di kalangan rakyat dibatasi. Kepala-kepala daerah dan para ulama diberi peringatan agar mereka menunjukkan sikap setia kepada pemerintah

Belanda dan agar mereka mengecam kaum pejuang. Peringatan tersebut dikemukakan dengan disertai ancaman yang berat bagi yang tidak mengindahkannya.

Kepala-kepala daerah dan para ulama menjadi cemas karena adanya pengumuman tersebut. Namun, kebanyakan di antara mereka tidak mengindahkan ancaman tersebut. Mereka melarikan diri dan bergabung dengan para pejuang. Sementara itu, Pangeran Hidayat melakukan perlawanan dari daerah satu ke daerah lainnya bersama orang-orang yang setia kepadanya. Pada tanggal 16 Juni 1860 Pangeran Hidayat bertempur selama satu minggu di Ambawang, kemudian terpaksa mundur karena persenjataan Belanda ternyata lebih kuat. Pasukan Hidayat akhirnya sampai di Wang Bangkal. Tidak lama di sini pasukan Hidayat diserang pasukan Belanda pada tanggal 2 Juli 1860. Pasukan Belanda yang datang ke Wang Bangkal ini berasal dari posnya di Martapura. Dalam pertempuran ini pun pasukan Pangeran Hidayat terdesak dan terpaksa mundur lagi. Selama dalam pengunduran ini, pasukannya selalu mengadakan gangguan-gangguan terhadap pasukan Belanda berupa penyergapan secara gerilya. Mereka bertahan di tempat itu dan baru pada tanggal 10 Juli 1860 pasukan Pangeran Hidayat pindah ke tempat lain setelah mendapat pukulan berat dari pasukan Belanda.

Sementara di daerah lain, pasukan Pangeran Antasari masih tetap melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda. Pada permulaan bulan Agustus 1860 pasukan Antasari berada di Ringkau Katan, dan pada tanggal 9 Agustus terjadi kontak senjata dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda berkekuatan 225 orang tentara bersenjatakan senapan berbayonet, dan diperkuat oleh 125 orang hukuman yang dipersenjatai, serta 10 orang penembak meriam. Dalam pertempuran itu pasukan Antasari dapat membunuh dan melukai beberapa orang tentara Belanda, dan kemudian Pangeran Antasari bersama pasukannya mengundurkan diri dari Ringkau Katan. Kekalahan Antasari ini terutama karena datangnya bala bantuan Belanda yang bergerak dari Amuntai melalui Awang menuju Ringkau Katan. Di Tameang Layang kemudian didirikan pos penjagaan Belanda yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merembesnya kembali pasukan Antasari ke Ringkau Katan.

Gerakan cepat pasukan Pangeran Hidayat dari satu daerah ke daerah lain cukup menyulitkan Belanda. Pasukan Hidayat yang berada di Gunung Mandela dapat diketahui. Belanda mendatangkan pasukan sebanyak 140 orang dari pantai Ambawang bersenjatakan senapan berbayonet. Akan tetapi, pasukan Belanda yang bermaksud menangkap Pangeran Hidayat tidak menjumpainya, karena pasukan Hidayat sudah meninggalkan

Gunung Mandela menuju Haroman. Pasukan Hidayat dikejar oleh dua kelompok pasukan lain pada tanggal 20 Juli. Akan tetapi, pasukan Hidayat tidak juga dijumpainya. Kecepatan gerak pasukan Hidayat membuat Belanda kesal. Pangeran Hidayat diancam akan tetap dianggap sebagai pemberontak dan akan ditindas jika tidak mau menyerah secepatnya.

Menyerahnya Kiai Demang Leman atas kemauannya sendiri kepada Belanda pada tanggal 2 Oktober 1861 sedikit banyak memperlemah semangat para pejuang. Namun, penangkapan Pangeran Hidayat, yang kemudian diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Februari 1862, menimbulkan kekesalan pada diri Kiai Demang Leman. Tuntutan untuk pembatalan pengasingan ke Jawa oleh Kiai Demang Leman dan rakyat, tidak mendapat perhatian dari pihak Belanda. Kiai Demang Leman kesal dan melarikan diri dari lingkungan Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan lagi.

Sementara itu, Pangeran Antasari makin giat melakukan perlawanan, lebih-lebih setelah mendengar kabar tentang pengasingan Pangeran Hidayat, saudara sepupunya, ke Jawa. Kemahirannya dalam bertempur cukup memberi kepercayaan kepada para pengikut atas kepemimpinannya, misalnya ketika ia mempertahankan benteng Tundakan pada tanggal 24 September 1861 bersama-sama kawan-kawan seperjuangannya, yaitu Pangeran Miradipa dan Tumenggung Mancanegara. Demikian pula waktu ia bersama-sama Gusti Umar dan Tumenggung Surapati bertempur mempertahankan benteng di Gunung Tongka pada tanggal 8 November 1861. Karena kepercayaan ini, pada tanggal 14 Maret 1862 rakyat mengangkat Antasari sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sudah barang tentu gelar tersebut sangat besar pengaruhnya bagi kepemimpinan Pangeran Antasari. Ia masih terus memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai akhir hayatnya pada tanggal 11 Oktober 1862 di Hulu Teweh, tempat pertahanannya yang cukup kuat.

Setelah Pangeran Antasari meninggal, perlawanan rakyat masih terus berlangsung dipimpin oleh teman-teman seperjuangan dan putra-putra Pangeran Antasari. Kiai Demang Leman terus mengadakan perlawanan secara gerilya di sekitar Martapura. Aminullah memusatkan operasinya di perbatasan Pasir, sedangkan Pangeran Prabu Anom bergerilya di daerah Amandit. Demikian pula sekitar Khayahan Atas tetap tidak aman bagi Belanda karena gangguan para gerilyawan.

Belanda menyadari bahwa kekuatan perlawanan rakyat terletak pada para pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karena itu, para pemimpin itu selalu dicari untuk ditangkap ataupun dibunuh. Hal ini dapat dilihat, misalnya, usaha untuk menangkap Kiai Demang Leman. Atas bantuan

kepala pelarian orang-orang Jawa, Kiai Demang Leman dan kawan-kawannya seperjuangan seperti Tumenggung Aria Pati, dapat ditemui Pangeran Syarif Hamid yang dijadikan alat oleh Belanda. Pangeran Syarif Hamid melakukan pekerjaan ini karena Belanda menjanjikan akan mengangkat dirinya sebagai raja di Batu jika ia dapat menangkap Kiai Demang Leman. Kiai Demang Leman akhirnya dapat ditangkap dan pada Februari 1864 dibawa ke Martapura untuk menjalani hukuman gantung. Dengan tertangkap dan meninggalnya Kiai Demang Leman, pihak pejuang kehilangan seorang pemimpin yang berani.

3. Akhir Perang

Putra-putra Pangeran Antasari, antara lain Pangeran Muhammad Seman (Gusti Matseman) tetap melanjutkan perjuangan ayahnya. Demikian pula beberapa pejuang lain tetap melanjutkan perlawanan. Haji Buyasin yang banyak berjasa dalam kerja sama dengan Pangeran Antasari dan Kiai Demang Leman akhirnya mengalami nasib yang malang juga. Pada tanggal 26 Januari 1866, ketika berusaha menyelamatkan diri dari Tanah Laut ke Tanah Dusun, ia ditembak oleh Pembakal Buang yang menjadi alat pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai penerus perlawanan dapat disebutkan, antara lain Gusti Matsaid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, dan Penghulu Rasyid. Mereka mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di perbatasan antara Amuntai, Kulua, dan Rantau. Meskipun perlawanan rakyat yang timbul di berbagai daerah itu tidak sekuat perlawanan-perlawanan pada masa Pangeran Antasari, perlawanan mereka cukup menghambat kemajuan Belanda dalam memperluas wilayahnya. Pemerintah Hindia Belanda mengira bahwa dengan menyerahnya putra-putra Pangeran Antasari daerah Dusun Atas dapat ditenangkan. Akan tetapi, kenyataannya daerah sekitar Dusun Atas tetap melakukan perlawanan.

Pada tanggal 25 September 1864 Tumenggung Surapati beserta pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh dua orang penjaga benteng. Karena kejadian ini, pada bulan Maret 1865 di Muara Teweh didirikan pertahanan yang berkekuatan 4 orang opsir, 75 serdadu yang dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 mortir. Tumenggung Surapati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh itu pada akhir tahun 1865, tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, usahanya tidak berhasil. Ia kemudian bergerak bersama pasukannya menuju Sungai Kawatan. Pada tanggal 1 November 1865 satu pasukan Belanda

bergerak sampai di Kuala Baru untuk memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan. Sementara itu, pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendekati Kawatan.

Pasukan Surapati yang berada di benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut. Dalam pertempuran yang terjadi pasukan Surapati menderita kekalahan sehingga mengundurkan diri.

Dalam membicarakan perlawanan di daerah lain perlu disebut tokoh Demang Wangkang yang juga berpengaruh. Di Marabahan ia sepakat dengan Tumenggung Surapati untuk menyerang ibu kota Banjarmasin. Pada tanggal 25 November 1870 ia bersama pengikutnya sebanyak 500 orang meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Pertempuran terjadi di dalam kota, tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, Demang Wangkang menarik kembali pasukannya ke luar kota.

Demang Wangkang dan anak buahnya tidak kembali ke tempat pertahanan semula di Marabahan, tetapi ke Sungai Durrakhman. Tidak berapa lama di situ, pada akhir Desember 1870 datang pasukan Belanda yang kuat, terdiri atas 150 orang serdadu dan 8 orang opsir. Pasukan Belanda ini sudah mendapat tambahan pasukan bantuan yang didatangkan dari Surabaya dan pasukan orang Dayak di bawah pimpinan Suto Ono. Sebelum tiba di Durrakhman, pasukan Belanda ini telah datang ke tempat pertahanan Demang Wangkang semula yaitu di Marabahan, tetapi ternyata kosong. Benteng Demang Wangkang di Durrakhman didekati pasukan pemerintah Hindia Belanda. Terjadilah pertempuran, dan dalam pertempuran ini Demang Wangkang menemui ajalnya.

Gusti Matseman pada bagian akhir bulan Agustus 1883 beroperasi di daerah Dusun Hulu. Ia dengan pasukannya kemudian bergerak ke Telok Mayang dan berkali-kali mengadakan serangan terhadap pos Belanda di Muara Teweh. Sementara itu, Pangeran Perbatasari, menantu Gusti Matseman, mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Pahu, daerah Kutai. Kekalahan yang dideritanya menyebabkan ia tertangkap pada tahun 1885. Demikian pula perlawanan Tumenggung Gamar di Lok Tunggul tidak berhasil sehingga ia dengan pasukannya terpaksa mengundurkan diri ke Tanah Bumbu. Di tempat ini pertempuran terjadi lagi.

Tumenggung Gamar gugur dalam salah satu pertempuran tahun 1886. Gusti Matseman masih terus mengadakan perlawanan di daerah Kahayan Hulu.

Gusti Matseman berusaha untuk mendirikan benteng di daerah hilir Sungai Teweh. Usaha ini membuat Belanda kemudian memperkuat posnya

di Kahayan dengan menambah pasukan baru, dan mendirikan lagi pos darurat di Tuyun. Dalam bulan September 1886, pasukan Gusti Matseman berusaha memutuskan hubungan antara kedua pos Belanda tersebut. Sementara itu, benteng pejuang di Teweh makin diperkuat dengan datangnya pasukan bantuan dan bahan makanan yang diangkut melalui hutan. Namun, di lain pihak pos Matseman ini terancam bahaya. Di sebelah utara dan selatan benteng muncul kubu-kubu baru Belanda yang berusaha menghalang-halangi masuknya bahan makanan ke dalam benteng. Keadaan di sekitar benteng Matseman makin kritis. Pada suatu ketika benteng diserang pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu pasukan Gusti Matseman terdesak sehingga terpaksa meloloskan diri dan benteng jatuh ke tangan Belanda yang kemudian dibakar. Gusti Matseman masih terus melakukan perlawanan walaupun teman-teman seperjuangannya, yaitu Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrakhman menyerah pada pemerintah Hindia Belanda. Perlawanannya baru berhenti setelah ia gugur pada tahun 1905.

Dari seluruh uraian tersebut tampak jelas bahwa perlawanan yang terjadi di daerah Banjarmasin berlangsung cukup lama. Dengan menyerahnya ataupun meninggalnya pemimpin-pemimpin mereka, perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda lumpuh dan akhirnya padam sama sekali.

I. Aceh

1. Pendahuluan

Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia dalam abad ke-19, perlawanan di Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meskipun kekuatan kerajaan Aceh dalam abad ke-19 ini sudah sangat berkurang dibandingkan dengan kekuasaannya di abad ke-17, rasa harga diri sebagai kerajaan merdeka masih tetap kuat. Pada awal abad ke-19 ini yang menjadi sultan adalah Ala'uddin Muhammad Daud Syah (1823–1838), yang berusaha meningkatkan kewibaan dan kekuasaan pemerintah pusat. Pada waktu itu, tanggal 17 Maret 1824, sebuah persetujuan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya ditandatangani. Isinya antara lain disebutkan bahwa setelah memperoleh kembali jajahan yang selama perang direbut oleh Inggris, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Aceh tetap merdeka

dan bebas menjalankan politik kerajaannya. Tampaknya jaminan untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh hanyalah bersifat politik.

Dengan dikuasainya daerah Sibolga dan pedalaman Tapanuli dan Tanah Batak pada tahun 1830-an oleh orang Belanda, kedudukan Aceh mulai terancam sebab lawan berada tepat di seberang garis perbatasan. Pemerintah Hindia Belanda mulai melancarkan usahanya mengancam daerah Aceh yang jauh dari pusat. Keadaan memang membahayakan Aceh sebab uleebalang di luar wilayah Aceh Besar mempunyai kemerdekaan yang sangat besar, lebih-lebih karena pemerintah pusat tidak kuat. Daerah Singkil, Barus dan Trumon di barat, dan daerah Serdang dan Asahan di sebelah timur, mulai dipengaruhi Belanda.[143] Karena Inggris tidak memberikan reaksinya, orang Belanda nenjadi lebih berani. Pada tanggal 1 Februari 1858 Sultan Siak diikat dengan sebuah perjanjian oleh pemerintah Hindia Belanda yang isinya antara lain menyatakan bahwa Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatra Timur. Hal ini juga berarti bahwa kerajaan-kerajaan lain yang berada di bawah pengaruh Siak, seperti Deli, Asahan, Kampar, dan Inderagiri dengan sendirinya juga menjadi daerah takluk Hindia Belanda. Padahal wilayah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk daerah takluk atau daerah lindungan Aceh.[144]

Menjelang pecahnya perang melawan Belanda, wilayah kerajaan Aceh terdiri atas:

1. Aceh Besar, yang terletak di daerah sepanjang Sungai Aceh dan terbagi atas tiga wilayah yang disebut *sagi*. Setiap *sagi* dinamakan menurut jumlah mukim bagiannya. Mukim-mukim itu adalah mukim 12, 25, dan 26, dan bagian-bagian yang terletak di selatan mukim 25, yakni Lho'Nga, Leupueng, dan Lhong;
2. negeri, kerajaan kecil, dan federasi taklukan Aceh yang terletak di luar daerah Aceh Besar, yakni di pantai barat, utara, dan timur dari ujung utara Pulau Sumatra;
3. daerah-daerah pedalaman Gayo dan Alas.

Daerah-daerah yang langsung diperintah oleh Sultan adalah kawasan dalam (keraton), Pekan Aceh, Kampung Merduati, Kampung Jawa, Kampung Pande, dan Kampung Kedah. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Sultan Alaiddin Mahmud Syah, yang berkuasa tahun 1870–

---

[143] A. Reid, *The Contest for North Sumatra Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898*, Kuala Lumpur, hlm. 21–35

[144] Tentang Perjanjian Siak dan hubungannya dengan politik ekspansi Hindia Belanda di Sumatra dapat dilihat dalam A. Reid, *ibid.*, hlm. 25–35

1874 dibantu oleh 4 *Menteri Hari-hari*, yaitu T. Kali Malikul Adil, T. Nek Raja Muda Setia, T. Nanta Setia, dan Panglima Masjid Raya. Selain itu, Sultan dibantu pula oleh seorang syahbandar yang bernama Panglima Tibang Muhamad. Menjelang perang dengan Belanda, kerajaan Aceh tidak mempunyai pemerintahan pusat yang kuat. Kekuasaannya berpencar-pencar sebanyak negeri-negeri, atau *nanggroe*, wilayahnya. Perang *pageue* sering terjadi yang memperebutkan wilayah sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik kerajaan. Pada saat ini, Sultan harus menyelesaikan masalah antarnegeri itu. Ketidakharmonisan hubungan antar-uleebalang merupakan pencerminan lemahnya kewibawaan Sultan.[145]

Sudah tentu keadaan yang demikian ini tidak dapat diterima oleh Aceh yang sadar akan bahaya yang sedang mengancam. Sultan Aceh mulai waspada dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat ketika pada tahun 1871 Belanda dan Inggris mencapai persetujuan dan menandatangani suatu perjanjian yang disebut *Traktat Sumatra*. Menurut perjanjian ini orang Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan kekuasaannya di seluruh Sumatra, termasuk ke Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya. Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong bagi Hindia Belanda untuk menguasai Aceh adalah kenyataan semakin pentingnya posisi Aceh karena dibukanya Terusan Suez tahun 1869. Lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut.

Untuk menghadapi segala kemungkinan itu, Aceh mulai berusaha memperkuat diri dan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencari bantuan. Pada bulan Januari 1873, Sultan Aceh mengirimkan seorang utusan, Habib Abdurrachman, ke Turki untuk meminta bantuan apabila Belanda berusaha menaklukkan Aceh dengan kekerasan. Kemudian sebuah utusan yang dipimpin oleh Teuku Panglima Muhammad Tibang dikirim kepada residen Hindia Belanda di Riau untuk menyampaikan pesan Sultan bahwa maksud orang Belanda untuk mengirimkan utusan menghadap Sultan Aceh agar ditangguhkan sampai Sultan mengadakan hubungan dengan Turki. Perutusan Aceh ini dalam perjalanan pulang diantar oleh kapal perang Hindia Belanda "Murnix" dan singgah di Singapura. Kesempatan ini digunakan oleh utusan-utusan Aceh untuk menemui konsul Italia dan konsul Amerika Serikat di situ.[146]

---

[145] Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah Perang Aceh 1873–1912*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 39, 42, 43

[146] Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo, ed., *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Jakarta, hlm. 240

Melalui konsulnya di Singapura, pemerintah Hindia Belanda mengetahui bahwa konsul-konsul Amerika Serikat dan Italia bersedia membantu Aceh. Hal ini sudah tentu sangat mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing dalam soal Aceh. Tambahan lagi timbul desas-desus bahwa bantuan militer Amerika Serikat pada Aceh akan datang pada permulaan bulan Maret 1873.[147] Akibatnya, Menteri Jajahan di negeri Belanda pada tanggal 18 Februari 1873 memerintahkan kepada Gubernur Jenderal London di Batavia (Jakarta) agar mengirimkan kapal dengan pasukan yang kuat ke Aceh. Setelah diadakan perundingan diputuskan bahwa Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh, F.N. Nieuwenhuysen, akan berangkat ke Aceh dengan membawa dua buah kapal perang lengkap dengan pasukannya. Ia berangkat pada tanggal 7 Maret dengan kapal perang Citadel van Antwerpen dan kapal Siak. Dari Pulau Pinang, ia mendapat bantuan tambahan dua kapal lagi, yaitu Murnix dan Corhorn. Tepat pada tanggal 22 Maret 1873 penduduk Aceh yang berdiam di tepi Pantai Bandar Aceh melihat empat buah kapal Belanda membuang sauh. Tidak lama kemudian datang juru bahaya Belanda yang bernama Said Tahir menghadap Sultan Muhammad Daud Syah untuk menyampaikan surat Komisaris F.N. Nieuewenhuysen. Isi surat itu sangat mengejutkan sebab Sultan Aceh diminta untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas negaranya. Sultan sudah tentu tidak mau menerima isi surat tersebut dan memberi jawaban yang tidak langsung. Surat kedua dari Nieuewenhuysen juga mendapat perlawanan yang serupa, demikian juga dengan surat-surat yang lainnya. Akhirnya pada tanggal 26 Maret 1873 datang permakluman perang dari pihak Belanda, dan suatu perjuangan rakyat yang cinta kemerdekaan untuk mempertahankan tanah airnya pun dimulai.

2. Jalannya Perang

Sejak beberapa tahun sebelumnya, Sultan dan para pembantu memang sudah menaruh kecurigaan terhadap niat buruk pemerintah Hindia Belanda. Persiapan untuk mempertahankan negara mulai dilakukan. Selain mencari bala bantuan dari luar negeri (telah dibicarakan di atas) pertahanan pun semakin diperkuat. Sepanjang Pantai Aceh Besar dibangun *kuta*, yaitu semacam benteng untuk memperkuat pertahanan wilayah. Demikian juga dengan tempat-tempat yang penting di ibu kota, seperti istana Sultan, *gunongan*, dan Masjid Raya Baiturrachman juga diperkuat. Menurut

---

[147] A. Reid., *op. cit.*, hlm. 93–94

laporan Said Tahir (Sidi Tahil) dan Teuku Meuraksa, yaitu seorang uleebalang yang memihak Belanda, sekitar 3.000 laskar pejuang Aceh yang bersiaga di sepanjang pantai dan 4.000 orang lainnya mempertahankan istana.[148] Walaupun kesultanan Aceh tidak sekuat seperti abad-abad sebelumnya, persenjataan yang dikumpulkan cukup besar. Antara bulan Agustus 1872 sampai Maret 1873 Aceh berhasil memasukkan kira-kira 5.000 peti mesiu dan 1.394 peti senapan (sekitar 5.000) pucuk dari Penang.[149]

Senapan-senapan dan mesiu yang dimasukkan ke Aceh dari bandar Penang di semenanjung itu adalah hasil usaha yang giat pemimpin Aceh yang berada di luar negeri. Mereka memahami dan menyadari adanya bahaya yang mengancam negerinya. Di antaranya adalah Teuku Paya dari Lam Bada (sagi XXVI Mukim), Teuku Ibrahim kemenakan Teuku Pakeh Dalam dari Pidie, dan Nyak Abbas kemenakan Teuku Paya. Ketiga orang ini bersama lima orang lainnya yang besar perhatiannya pada perjuangan Aceh pada bulan September 1873 bersepakat membentuk sebuah dewan untuk meningkatkan bantuan pada Aceh. Dewan ini diketuai oleh Teuku Ibrahim. Selain Teuku Paya dan Nyak Abbas, anggota-anggota yang lain ialah Nyak Abu dan Panglima Perang Haji Yusuf, Gullahmeidin dan Umar (orang India Islam yang berasal dari Penang), dan Shaikh Kassim, orang Arab yang juga lahir di Penang.[150]

Walaupun sudah mendapat laporan tentang persiapan kekuatan pertahanan Aceh, Belanda rupanya menganggap bahwa Aceh dengan mudah akan dapat dikalahkan. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Walaupun tampaknya pemerintah pusat kesultanan Aceh lemah dan perekonomiannya merosot, semangat juang rakyat Aceh yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, pada agama, dan pada kemerdekaannya, telah menyeret orang Belanda ke dalam peperangan yang hebat dan lama.

Pada tanggal 5 April 1873 tampaklah suatu kesatuan penyerbu Belanda yang cukup kuat dan lengkap. Jumlahnya lebih dari tiga ribu orang yang didaratkan dari kapal perangnya. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler seorang panglima pasukan yang tangguh. Ketika melihat pendaratan pasukan penyerbu itu, segera para pejuang Aceh mempersiapkan diri dan menyambut serbuan Belanda itu dengan tembakan-tembakan yang hebat. Pertempuran dahsyat segera meletus antara pasukan penyerbu dengan laskar pejuang Aceh di pantai sebelah barat daya kota

---

[148] *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 111–112

[149] Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 241

[150] Peran dan usaha Dewan Delapan ini telah dibicarakan oleh A. Reid., *op. cit.*, hlm. 129–133

Pantai Cermin. Tanpa diduga kapal-kapal perang Belanda menembaki pertahanan Aceh dengan meriamnya sehingga para pejuang Aceh terpaksa mengundurkan diri dan meninggalkan *kuta* (benteng pertahanan) yang terletak di pantai itu yang segera jatuh ke tangan pasukan Belanda.

Pasukan Aceh menambah kekuatan untuk mempertahankan Masjid Raya Baiturrachman karena diduga Belanda akan menggerakkan pasukannya untuk menyerangnya. Mula-mula datang kira-kira satu peleton serdadu Belanda mencoba mendekati masjid tersebut. Dengan tiba-tiba pasukan Aceh yang kira-kira berjumlah 40 orang, yang memang sudah berjaga-jaga di belakang tembok dan bersenjata kelewang, menyerang kesatuan Belanda itu sehingga penyerbu terpaksa mundur kembali. Pertahanan pejuang Aceh di Masjid Raya ini memang cukup kuat. Setelah dipukul mundur, Belanda menyerang lagi dengan pasukan yang lebih besar. Agaknya Belanda mengerahkan induk pasukannya. Dengan serentak Masjid Raya diserbu dan dikepung. Namun, tentara Aceh yang mempertahankan masjid tersebut tidak tinggal diam dan mengadakan perlawanan dengan gigih. Terjadilah perkelahian satu lawan satu, dan dalam keadaan seperti itu meriam atau senapan tidak berguna. Karena kuatnya pertahanan laskar Aceh ini, serbuan serdadu Belanda menemui kegagalan.

Tidak lama kemudian, tampaklah api berkobar di atas masjid yang terbuat dari ijuk itu. Dinding-dinding masjid yang terbuat dari kayu mulai terbakar. Rupanya Jenderal Kohler memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan peluru api ke arah masjid yang megah itu. Laskar Aceh tidak kuasa menghalangi kobaran api yang mulai membakar masjid; mereka terpaksa meninggalkannya dan mengundurkan diri. Masjid berhasil diduduki Belanda pada tanggal 14 April 1873. Ketika Jenderal Kohler sedang berjalan untuk memeriksa masjid yang direbutnya itu, dengan tidak terduga datang tembakan dari seorang prajurit Aceh, dan menewaskan panglima perang Belanda itu.

Dengan jatuhnya Masjid Raya, kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmud Syah. Di samping itu, pasukan Aceh yang lain telah disiapkan untuk menyerbu pasukan-pasukan Belanda. Kekuatan pasukan pejuang Aceh semakin lama semakin besar sebab ketika terdengar berita tentang serangan Belanda, orang-orang Aceh yang selama ini sudah bersikap anti-Belanda segera bangkit semangatnya. Mereka, antara lain Panglima Polem Cut Banta, Panglima Sagi I Mukim, Teuku Imam Luengbata, dan Imam dari Mukim Igbata yang berada di luar ketiga sagi. Keduanya segera menyiapkan pasukan masing-masing lengkap dengan persenjataan dan perlengkapannya.

Masjid Raya akhirnya menjadi pusat pertahanan serdadu Belanda, dan pada tanggal 16 April 1873 tampak pasukan Belanda meninggalkan tahanannya untuk menyerbu istana Sultan. Pertempuran sengit sampai terjadi karena laskar Aceh dengan mati-matian berusaha mempertahankan istana. Kekuatan Aceh begitu besar sehingga Belanda tidak mampu menembusnya dan terpaksa mundur kembali ke Masjid Raya. Dalam pertempuran di sekitar istana ini sembilan orang perwira dan 116 serdadu Belanda tewas. Pasukan Aceh yang lain juga berhasil memukul mundur Belanda sehingga kembali ke pantai. Usaha Belanda untuk mematahkan perlawanan rakyat Aceh ternyata tidak berhasil. Atas persetujuan pemerintahnya di Batavia, pasukan Belanda meninggalkan pantai Aceh pada tanggal 29 April 1873.[151] Serbuan Belanda yang pertama menemui kegagalan.

Walaupun sudah mendapat kemenangan, laskar Aceh tidak mengurangi kewaspadaannya. Pertahanan dan persiapan semakin ditingkatkan karena besar kemungkinan Belanda akan kembali menyerbu. Dugaan ini benar karena agaknya Belanda bermaksud untuk menebus kekalahannya. Selama serbuan kedua belum tiba, kapal-kapal perang Belanda terus-menerus mengadakan blokade untuk mencegah masuknya perbekalan dan bala bantuan untuk Aceh. Karena ketatnya blokade ini, para pedagang di Penang terutama Inggris mengadakan protes sehingga pemerintah Hindia Belanda melalui konsulnya di Penang dan Singapura terpaksa mengeluarkan izin dagang khusus bagi para pedagang dari Semenanjung Melayu. Walaupun ada larangan keras untuk memasukkan peralatan perang ke Aceh, nyatanya pelanggaran sering terjadi sehingga sebenarnya blokade Belanda tidak berhasil dengan baik.[152]

Menjelang akhir tahun 1873, tepatnya tanggal 9 Desember, kembali tampak pendaratan pasukan Belanda di pantai Aceh. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada serbuan pada bulan April yang lalu dan diperkirakan berjumlah 2.000 orang. Pemimpinnya kali ini adalah pensiunan jenderal yang pernah menjadi Panglima Perang Hindia Belanda, yaitu Letnan Jenderal J. van Swieten. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa memanggil jenderal yang sudah tidak aktif ini karena disadari betapa berat tugas yang harus dilakukan dalam menghadapi perjuangan laskar Aceh. Terbukti dalam penyerbuan yang pertama kali telah menewaskan Jenderal Kohler. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan rakyat Aceh cukup hebat. Tugas pokok yang dibebankan kepada van Swieten adalah untuk menyerang dan

[151] Menurut catatan para pejuang Aceh yang gugur diperkirakan ada 900 orang. Lihat A. Reid, *ibid.*, hlm. 296

[152] A. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 241–242

merebut istana, dan kepadanya juga diberikan wewenang untuk mengadakan perjanjian dengan Sultan. Selain menjadi panglima ia juga diangkat sebagai komisaris pemerintah Hindia Belanda.

Ketika melihat pendaratan serdadu Belanda yang besar jumlahnya di Kuala Lue dekat Gigieng, Aceh Besar, para pejuang Aceh sudah menduga bahwa tujuan mereka adalah untuk menyerbu dan merebut istana. Di Gigieng laskar Aceh segera menyambut kedatangan pasukan Belanda itu dengan tembakan-tembakan senapan dan pertempuran sengit segera berkobar. Namun, karena kapal-kapal perang Belanda itu juga turut memuntahkan peluru meriamnya, terpaksa pasukan pejuang Aceh mengundurkan diri karena tidak mungkin menghadapi tembakan-tembakan meriam itu. Pertahanan istana segera diperkuat karena tempat ini menjadi tujuan serbuan Belanda. Rupanya Belanda percaya bahwa bilamana istana dapat dikuasai, pastilah pihak Aceh akan menyerah. Padahal kenyataan membuktikan bahwa hal yang sebaliknya; jatuhnya istana ke tangan Belanda mendorong laskar Aceh untuk berjuang lebih hebat.

Bala bantuan bagi laskar Aceh mengalir dari berbagai pihak untuk memperkuat pasukan pertahanan istana. Uleebalang Pidie mengirimkan bala bantuan yang berkekuatan kira-kira 1.500 orang, sedang dari Mukim XXII di Aceh Besar datang bantuan sebesar 500 orang dan Teuku Cik Peusangan dari Aceh Utara mengirimkan 1.000 orang ke Kuala Cangkul (Cengkoy). Dari fakta-fakta ini jelaslah bahwa kesediaan para uleebalang dan rakyat Aceh untuk membantu Sultan dalam melawan penyerbu Belanda besar sekali. Golongan-golongan yang ada dalam masyarakat pun bersatu padu.

Selain di sekitar istana, pertempuran sengit terjadi jika di daerah Masjid Raya, yang sudah diduduki kembali oleh pasukan Aceh sejak April 1873. Dengan gigih dan hebat laskar Aceh mempertahankan kedudukannya untuk menghindarkan kemungkinan didudukinya lagi Masjid Raya seperti pada penyerbuan yang pertama. Panglima Polem dengan pasukannya yang bertahan di Peukam Aceh menyerang pasukan Belanda yang mencoba mendekati masjid. Tembakan-tembakan gencar terdengar silih berganti dari kedua belah pihak. Bala bantuan pihak Belanda juga terus datang dan akhirnya Masjid Raya terpaksa ditinggalkan oleh laskar Aceh karena tekanan serbuan musuh semakin besar. Setelah menduduki Masjid Raya kembali, Belanda tampaknya mulai memusatkan kekuatannya untuk menyerbu istana.

Pasukan Aceh yang mengetahui maksud Belanda ini berusaha menghalang-halangi gerakan musuh itu, tetapi tidak berhasil. Istana dikepung dan pertempuran hebat pun berkobar. Setelah lebih dari dua minggu berhasil bertahan, laskar Aceh terdesak, dan pada tanggal 24 Januari 1874 istana Sultan pun jatuh ke tangan serdadu Belanda. Untungnya Sultan beserta keluarga dan beberapa orang pengikutnya sudah lebih dahulu menyingkir ke *Leunbata* pada tanggal 15 Januari 1873 sehingga usaha van Swieten untuk menangkap Sultan menemui kegagalan. Di tempat yang baru ini Sultan mendirikan markas pertahanannya. Bersama Panglima Polem dan para panglima yang lain, Sultan bertekad untuk meneruskan perjuangan dan melawan musuh sampai terusir dari bumi Aceh. Namun, nasib buruk tidak dapat dihindari. Sultan diserang wabah kolera dan meninggal pada tanggal 28 Januari 1874.

Setelah Sultan mangkat, beberapa panglima sagi, yaitu Panglima Polem dari Sagi XXII Mukim, Cut Banta dari Sagi XXV, dan Cut Lamreureng dari Sagi XXVI Mukim, bersepakat memilih putra Sultan yang bernama Muhammad Daud Syah sebagai gantinya. Karena Sultan baru ini masih kecil, kira-kira berusia 6 tahun, ia akan dibantu oleh sebuah Dewan Mangkubumi yang diketuai oleh Tuanku Hasyim. Pusat kesultanan ditetapkan di Indrapuri, yaitu sebuah tempat di sebelah selatan ibu kota lama yang sudah diduduki Belanda.

Orang Belanda mengira bahwa dengan didudukinya istana Sultan berarti mereka telah menguasai negara Aceh. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Januari 1874 van Swieten memproklamasikan bahwa Belanda telah menaklukkan kerajaan Aceh dan dinyatakan bahwa wilayah Aceh Besar menjadi milik pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini orang Belanda telah salah menduga. Walaupun wilayah Aceh Besar sudah dinyatakan sebagai daerah kekuasaannya, istana Sultan diduduki dan diproklamasikan bahwa kerajaan Aceh sudah ditaklukkan, tetapi dalam kenyataannya rakyat Aceh masih merasa bebas merdeka dan Sultan masih berdaulat. Bahkan semangat perlawanan rakyat semakin meningkat dan terus berlangsung di luar ibu kota dan daerah-daerah dengan cara bergerilya. Rakyat di bawah pimpinan para uleebalang, para ulama, dan para kepala adat terus menyusun kekuatan dan meningkatkan perlawanan.

Walaupun demikian, ada juga orang-orang Aceh yang memihak Belanda dan tidak turut berjuang. Salah satu contoh ialah penduduk daerah Meuraksa yang terletak di pantai yang kurang menunjukkan sikap perlawanan, bahkan kepala daerah itu, Teuku Ne'Neurak, cenderung untuk berdamai dengan Belanda. Sikap yang demikian ini mungkin disebabkan oleh kesulitan dan penderitaan yang dihadapi penduduk Meuraksa sebagai

akibat blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal Belanda. Sikap pro-Belanda dari penduduk Meuraksa ini sudah tentu telah menimbulkan kekesalan di kalangan pejuang-pejuang Aceh yang lain sehingga daerah ini sering juga diserang.

Semangat perlawanan pejuang-pejuang Aceh sangat menyulitkan pihak Belanda. Apa yang telah dikuasai Belanda sebenarnya tidak lebih hanya istana Sultan yang lama dan daerah-daerah yang diduduki oleh serdadunya. Daerah-daerah di luarnya masih tetap dikuasai oleh pihak Aceh yang terus berusaha mempertahankan negerinya. Orang Belanda mulai mengubah taktiknya. Jenderal Pel yang menggantikan van Swieten pada bulan April 1874 mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meuraksa sebanyak 38 buah dengan kekuatan pasukan kira-kira 2.750 orang yang berfungsi sebagai garis pembendung (*afsluitings linie*). Pihak pejuang Aceh pun tidak mau kalah dan *kuta-kuta* terus diperkuat.

Pada waktu itu jumlah uleebalang yang mengadakan perjanjian perdamaian dengan Belanda dan mengakui kekuasaan Belanda semakin banyak, baik di Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur, maupun di beberapa tempat lainnya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya terbukti bahwa mereka tidak tunduk sepenuhnya kepada Belanda dan ini juga kemudian disadari oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa tidaklah mudah menundukkan Aceh seperti yang diperkirakan. Pada umumnya faktor yang mendasari beberapa uleebalang itu, untuk menyatakan berdamai dengan orang Belanda, adalah faktor ekonomi. Mereka berusaha agar Belanda menghentikan blokadenya sehingga perniagaan dapat berjalan lagi. Keadaan ini juga dimanfaatkan untuk menyelundupkan perbekalan perang terutama senjata dan amunisi dari luar.

Selain itu, ada sebab lain yang memungkinkan Belanda memperluas kekuasannya, yaitu kelemahan yang ada di pihak Aceh sendiri. Sering kali terjadi pertentangan atau bentrokan bersenjata antara para pejuang Aceh yang menentang Belanda melawan mereka yang bersekutu dengan Belanda. Misalnya, yang terjadi antara negeri Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok di satu pihak dan Keureutu yang memihak Belanda di lain pihak. Belanda membantu sekutunya dengan mengerahkan pasukannya untuk menduduki Blang Ni, kota bandar yang penting bagi Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok. Rakyat Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok berusaha menahan pasukan Belanda itu. Namun, menemui kegagalan dan Blang Ni terpaksa ditinggalkan. Setelah berhasil menduduki Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok, Belanda mendirikan benteng di tempat tersebut.

Walaupun demikian, rakyat Simpang Ulin dan Tanjung Seumantok terus melawan tanpa patah semangat dengan jalan gerilya.

Sementara itu, para pejuang Aceh masih terus mengadakan penyerangan terhadap kedudukan pasukan-pasukan Belanda yang tersebar di pelbagai tempat. Penyerangan ini umumnya dilakukan dengan taktik gerilya karena walaupun persenjataan bagi Aceh dapat terus diselundupkan dari luar, jumlahnya tidak memadai jika dibandingkan dengan persenjataan Belanda. Beruntunglah para pejuang Aceh ini karena mereka lebih mengenal medan pertempuran daripada musuh yang hanya mampu bertahan di benteng-benteng yang dibangunnya. Lebih-lebih karena rakyat pada umumnya membantu para pejuang Aceh itu. Semangat perang menghancurkan *kapke ulanda* (Belanda kafir) telah menjiwai segenap rakyat Aceh yang kuat keyakinan agama Islamnya itu. Daerah-daerah yang sering mendapat serangan laskar Aceh, antara lain adalah Luengbata, Ketapang Dua, Bukit Sibin, Kuala Gigieng, Tibang, dan di Tunga. Para pejuang Aceh mendapat kemenangan gemilang karena berhasil menewaskan Jenderal Pel.

Penyerangan pasukan pejuang Aceh semakin meningkat dengan datangnya kembali Habib Abdurrachman dari Turki pada tahun 1877.[153] Dia berhasil mengadakan perundingan dengan Teungku Cik Di Tiro dan Imam Leungkata di Pidie guna membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan strategis perang. Penyerangan Habib Abdurrachman terutama bertujuan mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda yang merupakan garis pembendung (*afsluiting linie*) yang melingkar antara Krueng Raba, Lambaroh, Uleekarang, dan Klieng. Para pejuang Aceh juga berusaha menghambat kemajuan dan membatasi ruang gerak pasukan Belanda dengan jalan mencegat konvoi pasukan Belanda, membakar gudang senjata di Pendeti, serta perusakan jembatan seperti yang menghubungkan Pekan Krueng Cut dan Silang.

Medan pertempuran yang dihadapi Belanda semakin meluas sehingga semakin sulit untuk membagi kekuatan pasukannya ke tempat-tempat yang memerlukan. Teungku Cik Di Tiro menyerang kubu Belanda di Gigieng dan Raja Samalanga, sedangkan Teuku Ci'Bugis memimpin perlawanan di medan pertempuran di wilayah Aceh Besar. Pada tanggal 8 Agustus

[153] Habib Abdurrachman az Zakir (1832–1896) lahir di Hdramaut dan belajar tentang pengetahuan Islam di Mesir dan Kalikut (India). Semasa muda ia berkelana di Timur Tengah dan India, juga di Eropa dan mengunjungi Italia, Prancis, dan Jerman. Setelah bekerja pada Maharaja Johor, ia datang di Aceh dan mengabdi pada Sultan Aceh. Dalam perang melawan Belanda Habib Abdurrachman memegang peran yang tidak kecil, misalnya menjadi utusan Sultan untuk mencari bantuan dan dukungan dari Turki, A. Reid, *Contest for North Sumatra. Aceh, the Nederlands, and Britain*, 1858–1898, hlm. 81 dan hlm. 128–129

1877, satu pasukan Belanda yang besar jumlahnya menyerang Samalanga. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel van den Heijden. Selain serangan dari darat juga datang serbuan dari arah laut di mana pasukan Belanda yang diangkut oleh kira-kira 11 buah kapal perang dan 6 buah kapal sewaan mendarat di Pengilit Baroh. Sementara itu, pada malam hari secara mendadak para gerilyawan Aceh yang memang sudah mempersiapkan diri di Pengilit Tunong menyerang kedudukan Belanda di Pengilit Baroh itu. Serangan mendadak ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan serdadu Belanda dan pertempuran sengit tidak terelakkan. Karena taktik yang tepat itu pejuang Aceh berhasil menewaskan beberapa perwira dan sejumlah serdadu Belanda yang luka-luka berat dan ringan pun tidak terhitung jumlahnya. Di pihak Aceh pun telah jatuh banyak korban walaupun jumlahnya yang tepat sukar diketahui.

Memasuki tahun 1878 kegiatan laskar Aceh lebih luas lagi. Pertempuran terjadi antara pasukan Habib Abdurrachman dengan pasukan Belanda di Blang Ue, Peukan Badak, dan Bukit Sirun. Selanjutnya meletus pertempuran di Lembah Beradin, Manta Candu, dan Gle Taron. Perlawanan Habib Abdurrachman cukup menyulitkan Belanda, tetapi van der Hiejden juga berhasil menguasai daerah-daerah pertempuran dan menduduki markas besar pasukan Habib Abdurrachman, seperti Seunaloh, Ansen Batee, Aneu' Galong, dan Montasik. Pada tanggal 13 Oktober 1878 Habib Abbdurrachman menyerah kepada Belanda. Hal ini sedikit banyak memengaruhi kekuatan Aceh. Sukar untuk dicari faktor yang menyebabkan pemimpin pasukan Aceh yang berani ini mau berdamai dengan Belanda. Mungkin karena kekalahannya dalam pertempuran di Longi dan karena jatuhnya pusat pertahanannya di Montasik.

Berita lain yang memengaruhi laskar Aceh adalah menyerahnya Teuku Muda Baid, kepala Mukim VIII Baid. Oleh Belanda dia kemudian diberi tugas memadamkan perlawanan rakyatnya yang masih terus berkobar di Baid. Setelah menyaksikan sendiri betapa semangat rakyat tetap tinggi walaupun pemimpinnya telah menyerah, Teuku Muda Baid berbalik memihak lagi pada rakyatnya dan meningkatkan perlawanan terhadap Belanda. Namun, dalam suatu pertempuran ia tertangkap dan karena Belanda khawatir bila lepas akan menyukarkan pihaknya lagi, Teuku Muda Baid pun diasingkan ke Banda.

Sementara itu, Teungku Cik Di Tiro masih tetap melakukan perlawanan. Daerah pertahanannya tersebar di wilayah Pidie, dan Belanda tidak pernah merasa aman karena laskar Aceh berkali-kali menyerangnya, antara lain benteng Sigli yang diserang pada bulan April dan Mei 1878. Walaupun blokade ekonomi Belanda terhadap bandar Pidie diperketat,

pengaruhnya terhadap semangat juang laskar Aceh tidak besar. Adanya blokade Belanda ini menyebabkan beras, barang-barang keperluan hidup lain, serta senjata menjadi lebih sulit masuknya. Akan tetapi, melalui segala macam cara para pejuang Aceh berusaha menembus blokade Belanda. Karena pengangkutan perbekalan dari alat-alat perang dari Pidie ke Aceh Besar melalui jalan pantai terhalang, para pejuang Aceh terpaksa mengangkutnya melalui jalan gunung yang lebih sukar. Namun, berkat bantuan rakyat kesukaran itu dapat diatasi.

Di Aceh Barat perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Teuku Umar. Ia mula-mula hanya bertahan di kampung halamannya sendiri (Darat), akan tetapi kemudian meluas ke Meulaboh. Ia dibantu oleh istrinya yang bernama Cut Nya' Din yang juga aktif dalam medan pertempuran. Perlawanan Teuku Umar ini banyak menimbulkan kesukaran di pihak Belanda. Oleh karena itu, Belanda berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkannya. Pada bulan Februari 1878 Darat mendapat serbuan yang hebat dari pasukan Belanda yang dibantu oleh tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapalnya. Pertempuran di pantai segera berkobar. Teuku Umar dan Cut Nya' Din beserta pasukannya berusaha mempertahankan diri dengan gigih, tetapi karena tekanan pasukan Belanda semakin hebat, Darat terpaksa ditinggalkan. Teuku Umar beserta pasukannya kemudian bergerak ke Aceh Besar untuk melancarkan serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda dan memaksa Belanda meninggalkan beberapa posnya itu, misalnya pos Belanda yang ada di Krueng.

Memasuki tahun 1880 situasi di Aceh tetap buruk bagi Belanda. Perlawanan rakyat Aceh tetap berkobar. Rakyat bahu-membahu dan bekerja sama dengan kaum bangsawan dan kaum ulama mempertahankan tanah airnya. Jika pada umumnya kaum bangsawan seperti para uleebalang langsung memimpin perjuangan di medan pertempuran, peran kaum ulama terutama adalah membangkitkan semangat rakyat dengan terus-menerus mengkhotbahkan kisah-kisah peperangan seperti *Hikayat Perang Gompeuni*, dan *Syair Perang Atjeh*.[154]

Semangat jihad melawan Belanda semakin berkobar sebab pada setiap kesempatan karya sastra yang rupanya sengaja diciptakan untuk menumbuhkan semangat berjuang selalu dibacakan oleh para alim ulama ataupun cerdik pandai yang mampu membacanya.

Taktik gerilya juga benar-benar menguntungkan Aceh. Jika Belanda mengadakan tekanan yang kuat di satu tempat, para pejuang Aceh akan

---

[154] A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 249, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 133–134

menghilang dari daerah itu dan muncul di tempat lain untuk menyerang kedudukan Belanda. Demikian juga dengan taktik sebagian besar pada uleebalang; bila tekanan Belanda terlalu hebat mereka menyatakan tunduk pada Belanda, tetapi secara diam-diam sering masih terus memberikan bantuannya kepada para pejuang. Lebih-lebih daerah-daerah di pantai walaupun blokade Belanda semakin ketat, penyelundupan senjata dan perbekalan jalan terus.

Pemerintah Hindia Belanda memahami kesulitan yang dihadapinya sebab fakta-fakta dengan jelas menunjukkan hal tersebut. Sampai awal tahun 1880 biaya yang dikeluarkan sudah mencapai 115 juta gulden dan sampai akhir 1884 mencapai 150 juta gulden.[155] Berbagai cara dipikirkan agar masalah Aceh ini dapat cepat diselesaikan. Karena pejuang-pejuang Aceh masih selalu berhasil memasukkan perbekalannya melalui pantai utara, pada bulan Agustus 1881 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menjalankan blokade yang ketat. Tindakan yang diambil, antara lain sebagai berikut.

1. Seluruh pantai Utara Aceh dari Ulee Lhene sampai ujung Diemant tertutup baik untuk ekspor impor maupun untuk penangkapan ikan.
2. Pelabuhan yang terbuka, tetapi dengan pengawasan ketat ialah Ulee Lheue, Sigli, Samalanga, dan Lho' Seumawe.
3. Armada Belanda diperkuat dengan dua buah kapal lagi.[156]

Bagi pihak Aceh, blokade Belanda ini tidak terlalu mengkhawatirkan sebab seperti telah diuraikan sebelumnya penyelundupan perbekalan perang masih dijalankan. Apalagi mengenai persenjataan berbagai cara dijalankan untuk mendapatkannya. Dalam medan pertempuran, pejuang Aceh selalu berusaha merebut wilayahnya dari tangan musuh yang dapat dikalahkan dan kalau ada kesempatan mencurinya. Selain itu, sudah sejak lama pejuang Aceh mampu membuat senapan-senapan dan amunisi sendiri, dan setelah tahun 1880-an pembuatan persenjataan itu semakin ditingkatkan.[157]

Walaupun sudah 10 tahun Belanda berperang di Aceh, kekuasaannya ternyata masih lemah sekali. Pada bulan November 1883, sebuah kapal Inggris Nisero terdampar di Pantai Teumon, Aceh Barat. Raj Teumon dan Teuku Imam Muda, menawan anak buah kapal itu dan menyita muatannya. Belanda menuntut agar awak kapal dibebaskan, tetapi Raja Teumon menolak kalau tidak diberi uang tebusan yang tinggi. Pihak Inggris juga

---

[155] *Ibid.*, hlm. 249; *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 119; A. Reid, *op. cit.*, hlm. 296

[156] A. Sartono kartodirdjo. *op.cit.*, hlm. 249–250

[157] A. Reid, *op. cit.*, hlm. 192

berusaha membebaskan warganya yang ditawan itu. Namun, hal ini juga menemui kegagalan karena Raja Teumon tetap pada tuntutannya. Akhirnya persoalan itu dapat diselesaikan setelah tuntutan Raja Teumon dipenuhi yaitu uang tebusan 100.000 dolar dan pembukaan kembali pelabuhan Teumon. Dalam peristiwa ini Teuku Umar mendapat keuntungan. Ia berhasil merebut senjata pasukan Belanda yang ditewaskan dalam perahu yang akan membawanya ke Teumon ketika ia dimintai bantuan untuk membebaskan anak buah kapal Nisero tersebut.

Pada tahun 1884 Sultan Muhammad Daud Syah pun beranjak dewasa. Dengan dukungan Mangkubumi Tuanku Hasyim dan para ulama seperti Teungku Cik Di Tiro, dia mulai memimpin kesultanan Aceh yang sekarang berpusat di Keumala. Ia berseru agar perlawanan diteruskan dan untuk membiayai perlawanan ini pengumpulan harta benda digiatkan. Memang, terasa oleh Belanda bahwa serangan-serangan pejuang Aceh terus meningkat. Lebih-lebih karena Belanda melakukan taktik baru, yaitu memusatkan perhatiannya pada daerah-daerah yang telah dikuasainya, ialah Kutaraja dan sekitarnya yang dinamakan Stelsel Konsentrasi. Bentuk perlawanan baru ini berupa pengawasan wilayah seluas 50 km^2 sekitar Ulee Lheue dan Kotaraja dengan jalan membangun 16 pos penjagaan. Tiap-tiap pos itu dikelilingi oleh suatu daratan luas yang kosong tanpa pohon maupun rumah sejauh 1 km dan pos-pos itu dihubungkan dengan jaringan telepon dengan Kotaraja. Selain itu, Belanda makin sadar bahwa untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat yang tersebar di pelbagai daerah akan lebih menyulitkannya dan akan lebih banyak memakan biaya, maka kegiatan terhadap wilayah di luar Aceh Besar sedapat mungkin dibatasi. Dengan cara ini Belanda dapat melaksanakan penghematan.

Namun, perlawanan di luar Aceh Besar tetap berkobar. Di daerah XXVI Mukim Teuku Asan bersama dengan para pejuang yang lain seperti Nya' Bintang dan Teuku Usen mengadakan serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Mereka juga menghadang serta menyerang pasukan patroli yang mengawasi jalan-jalan penghubung antara pos-pos itu. Di Aceh Timur perlawanan rakyat dipimpin oleh Nya' Makam. Daerah perlawanannya meliputi wilayah Langkat dan Tamiang. Semua perlawanan itu telah menyulitkan pemerintah Hindia Belanda. Tambahan lagi pada tanggal 14 Juni 1886 Teuku Umar telah menyerang dan menyita kapal Hok Canton yang berlabuh di Pantai Rigaih. Nakhoda kapal tersebut seorang Denmark yang bernama Hansen, dicurigai akan menangkapnya untuk selanjutnya menyerahkan kepada Belanda dengan upah sebesar 25.000 dolar. Memang, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan pengumuman bahwa barang siapa yang dapat menangkap Teuku Umar

akan diberi hadiah besar. Dalam pertempuran yang terjadi Nakhoda Hansen tewas dan seluruh awak kapal ditawan oleh Teuku Umar. Pasukan yang dikirim Belanda untuk membebaskan tawanan itu menemui kegagalan. Akhirnya terpaksalah pemerintah Hindia Belanda menebus awak kapal itu dari Teuku Umar sebesar 25.000 dolar.

Gambaran pertempuran yang besar di pelbagai daerah bahwa perlawanan rakyat Aceh cukup sulit untuk ditundukkan oleh Belanda dalam waktu yang singkat. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa penaklukan Aceh dengan kekuatan senjata saja tidak akan berhasil. Belanda menggiatkan usahanya untuk memikat pemimpin-pemimpin pejuang Aceh. Teuku Umar pada tahun 1884 menyerah kepada Belanda, tetapi karena kecewa atas perlakuan Belanda pada dirinya, ia kemudian melakukan perlawanan kembali. Belanda berusaha pula untuk mendekati Teungku Cik Di Tiro, Panglima Polem, dan tokoh lainnya. Namun, sikap keras agama tidak dapat dilunakkan oleh Belanda.

Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan dengan mencari rahasia kekuatan Aceh terutama yang menyangkut kehidupan sosial-budayanya. Dr. Snouck Hurgronje yang paham tentang agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh yang naik haji di Mekah, oleh pemerintah Hindia Belanda dipandang sebagai orang yang tepat untuk diberi tugas memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Belanda dalam penaklukan Aceh.

Meskipun pada awalnya kedatangan Snouck Hurgronje untuk menjalankan tugas di Aceh mendapat rintangan dari gubernurnya, akhirnya dengan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia ia dapat masuk Aceh. Dengan nama samaran Abdul Gafur ia bertempat tinggal di tengah-tengah rakyat di Peukan Aceh. Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje, terutama berdasarkan keterangan-keterangan dari surat Teungku Cik Di Tiro yang pernah ia terima, dapat diketahui keadaan yang sebenarnya. Meskipun telah menundukkan Sultan tidak berarti bahwa kepala-kepala daerah dengan sendirinya akan tunduk. Dijelaskan pula bahwa pengaruh ulama-ulama pada rakyat sangat kuat. Oleh karena itu, akan sulit untuk menundukkan perlawanan rakyat Aceh yang kuat keyakinan agamanya itu.

Dari tulisan Snouck Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda juga mendapat petunjuk, bahwa satu-satunya jalan yang baik untuk ditempuh dan akan membawa hasil adalah dengan jalan memecah belah kekuatan yang ada dalam masyarakat Aceh. Kaum ulama yang memimpin perlawanan harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Di samping itu, Belanda akan membuka kesempatan bagi bangsawan Aceh dan anak-

anaknya untuk masuk dalam korps pamong praja dalam pemerintah kolonial. Golongan terakhir ini oleh Belanda diharapkan akan terikat pada Belanda dan menjadi terpisah dari golongan ulama. Sementara itu, perlawanan rakyat Aceh di daerah-daerah terus berlangsung. Teungku Cik Di Tiro Muhammad Saman telah meninggal pada permulaan tahun 1891 dan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Teuku Ma' Amin Di Tiro. Suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya adalah apa yang dilakukan oleh Teuku Umar dalam bulan Agustus 1893. Pada waktu itu, ia telah mengajukan pernyataan tunduk kepada Belanda. Dengan menyatakan sumpah setia di hadapan gubernur yang merangkap sebagai Panglima Belanda di Aceh, Teuku Umar diterima masuk dalam dinas militer Belanda. Gelar "Teuku Johan Pahlawan" diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Teuku Umar. Ia diizinkan membentuk sebuah legiun yang berkekuatan 250 orang dan diberi tugas mengamankan daerah Aceh Besar dan sekitarnya dari gangguan pejuang-pejuang Aceh.

Selama bekerja sama dengan Teuku Umar, Belanda memang banyak mendapat keuntungan. Banyak pos pertahanan para pejuang Aceh dapat direbut oleh Belanda, baik pos-pos yang termasuk dalam Sagi XXV Mukim, Sagi XXVI Mukim, maupun beberapa pos yang berada di Sagi XXII Mukim. Meskipun demikian, kecurigaan tetap ada di kalangan pembesar-pembesar pemerintah Hindia Belanda terhadap Teuku Umar. Di lain pihak, di kalangan para pejuang Aceh terdapat tanda tanya mengenai sikap Teuku Umar tersebut. Cut Nya' Din, istrinya yang pada waktu mengadakan perlawanan selalu mendampingi suaminya, mulai khawatir dan menganjurkan suaminya agar segera mengubah sikap dan mengadakan perlawanan lagi terhadap Belanda. Dalam pada itu Teuku Umar tidak sedikit mendapat tekanan-tekanan perasaan selama bekerja sama dengan Belanda. Sikap curiga dan hinaan dari sementara pembesar Belanda terhadap dirinya maupun keluarganya menyebabkan Teuku Umar pada tanggal 30 Maret 1896 terang-terangan menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ia menemui lagi teman-teman seperjuangan, seperti Panglima Polem, ulama-ulama di Tiro, dan uleebalang yang juga telah menghentikan kerja sama dengan Belanda, seperti Teuku Usen, Teuku Mahmud, dan Teuku Cut Muhammad.

Menjelang akhir abad ke-19 perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak surut walaupun sudah berjalan sekitar 20 tahun meskipun tidak sedikit korban yang gugur dan kerugian harta benda juga tidak ternilai. Demikian juga di pihak musuh, jumlah korban yang jatuh mencapai ribuan. Padahal musuh mengira bahwa dalam waktu singkat negara Aceh yang strategis letaknya itu, yang pada abad ke-19 kelihatan merosot kekuasaannya akan

dapat dikuasai dalam waktu singkat. Karena dengan segala taktik dan strategi militer pemerintah Hindia Belanda menemui kegagalan, nasihat seorang ahli ilmu sosial terpaksa dituruti.

3. Akhir Perang

Sejak bulan Mei 1898 Kolonel J.B van Heutz menjadi Gubernur Sipil dan Militer Aceh menggantikan van Vliet. Rencana pertamanya adalah menyerang Pidie sebab ternyata para pemimpin perjuangan Aceh, seperti Sultan, Teuku Umar, dan Panglima Polem, berada di wilayah tersebut.

Pasukan Panglima Polem dan Teuku Umar sering mengadakan penyerangan terhadap pos-pos militer Belanda dan pasukan-pasukan patrolinya. Selain itu, mereka juga mengadakan serangan ke sasaran-sasaran yang ada di Aceh Besar sehingga tidak sedikit kerugian yang diterima musuh. Agaknya musuh mulai menjalankan taktik baru dan tekanan-tekanannya terasa makin kuat. Lebih-lebih karena sekarang ternyata tidak hanya pasukan Belanda saja yang menyerang, tetapi juga dikerahkan pasukan orang Indonesia yang dipimpin oleh opsir-opsir Belanda yang pandai berbahasa Aceh. Pasukan ini direbut Korps *Marechausse*. Karena desakan serbuan musuh yang tidak dapat ditahan, terpaksalah beberapa uleebalang menyerah, sedang Teuku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polem ke Aceh Timur.

Seperti biasanya pejuang Aceh tidak menjadi gentar dan meneruskan gerakan gerilyanya. Tanah Gayo serta Alas dipakai sebagai basis karena mempunyai tempat-tempat perlindungan yang baik. Setelah tiba di wilayah Aceh Barat, Teuku Umar mengonsolidasikan diri dan mempersiapkan suatu penyerangan besar-besaran ke Meulaboh. Rupanya musuh dapat mencium rencana tersebut. Pada tanggal 11 Februari 1899, Belanda menyerang markas pertahanan Teuku Umar dan gugurlah pemimpin Aceh yang sejak lama dikejar-kejar Belanda itu. Istri Teuku Umar, Cut Nya' Din tertangkap dan pada tahun 1906 dibuang ke Jawa Barat. Pasukan musuh juga mendesak kedudukan pejuang Aceh di pantai utara dan timur. Teuku Tapa dari Gayo terus melakukan perang gerilya dengan menyerang pos-pos militer Belanda dan menguasai daerah-daerah yang sering dilalui pasukan musuh. Oleh karena itu, beberapa pertempuran terjadi, seperti di Idi Cut, Teupin Btee, dan Seuneboh.

Sementara itu, Panglima Polem dan Sultan masih tetap mengadakan perlawanan dengan cara berpindah-pindah tempat untuk menghindari nasib buruk seperti yang dialami oleh Teuku Umar. Memang van Heutz sedang berusaha untuk menangkap kedua pemimpin perjuangan tersebut.

Gambar 5.6 Teuku Umar (duduk no. 3 dari kiri) beserta pengikut-pengikutnya pada waktu ia menjalankan siasat bekerja sama dengan Belanda. Oleh pemerintah Belanda, ia digeri gelar **Teuku Johan Pahlawan** dan diangkat sebagai **Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda** di Aceh.
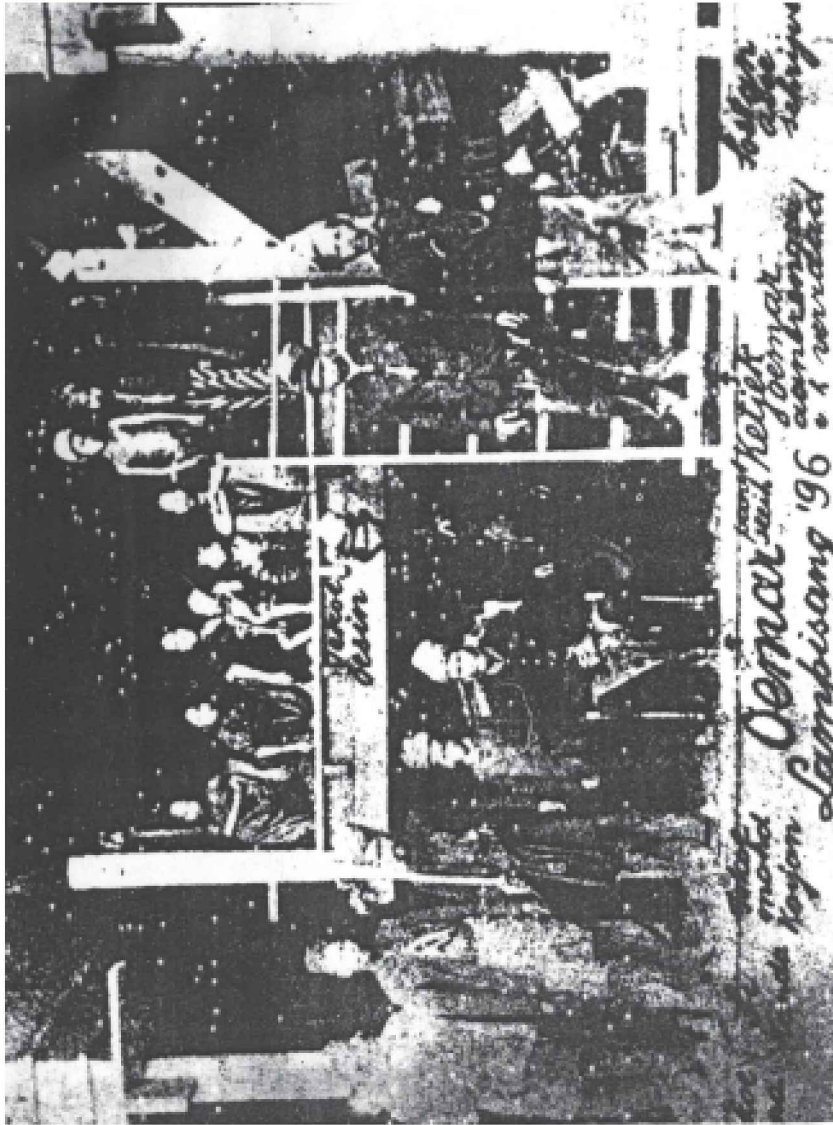
Gambar 5.7 Teuku Umar Johan Pahlawan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda di Aceh bersama-sama keluarga serta para pengikut di rumahnya di Lam Pisang dalam tahun 1896. Gambar ini dibuat hanya beberapa hari sebelum ia melaksanakan siasatnya meninggalkan pihak Belanda dan bergabung kembali dengan pihak pejuang Aceh dengan membawa persenjataan yang cukup besar jumlahnya.
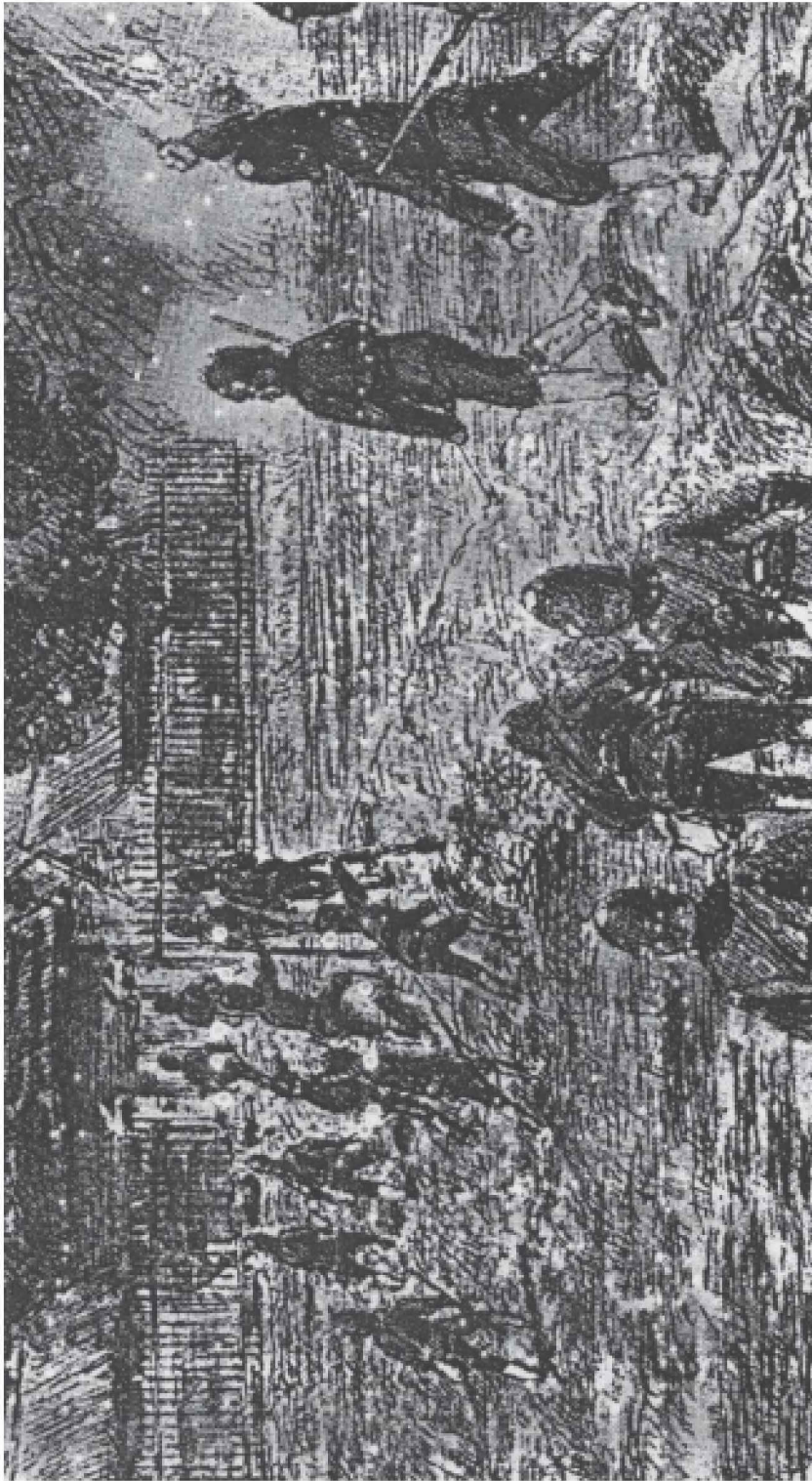
Gambar 5.8 Pada tanggal 30 Maret 1896 Teuku Umar bergabung kembali dengan pejuang-pejuang Aceh. Dengan berangnya, pasukan Belanda memusnahkan kampung Teuku Umar habis-habisan dan membumihanguskan rumahnya di Lam Pisang. Teuku Umar berhasil menyingkir.

Gambar 5.9 Seorang Panglima Aceh dari Jeuram, Aceh Barat

Gambar 5.10 Panglima-panglima Teuku Umar dari Seunagan, Aceh Barat. Sebelah kiri: Pang Yatim; sebelah kanan: Keuchi' Abaih

Ketika mereka sedang berada di Kutasawang, sejumlah pasukan musuh datang menyerang sehingga pertempuran pun meletus di tempat lain seperti Peusangan, Geudong, dan Keureutue karena pasukan Belanda berusaha menguasai daerah-daerah tersebut.

Sultan dan Panglima Polem kemudian memindahkan pusat pertahanannya di Batee Ilie. Rupanya pusat kedudukan pejuang Aceh ini dapat diketahui oleh musuh sebab pada awal Februari 1901 datang serangan dari pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal van Heutz sendiri. Karena besarnya jumlah pasukan musuh, Sultan dan pasukannya terdesak dan terpaksa meninggalkan benteng pertahanannya setelah bertempur mati-matian selama tiga hari tiga malam. Sultan dan Panglima Polem dengan sisa-sisa pasukannya terpaksa menyingkir.

Suatu peristiwa yang tidak terduga telah terjadi. Istri Sultan Pocut Murong tertangkap oleh musuh. Tambahan lagi tekanan-tekanan pihak Belanda terasa semakin berat. Akhirnya, Sultan Alaudin Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah pada Belanda dan upacara pemakamannya diadakan pada tanggal 20 Januari 1903.

Nasib buruk yang menimpa Sultan Aceh pun dialami oleh Panglima Polem. Istri, ibu, serta anak-anaknya berhasil ditangkap oleh Belanda. Di samping itu, serangan pasukan Belanda juga datang terus-menerus. Karena keadaan sudah mendesak, Panglima Polem dengan sisa pasukannya yang berjumlah 150 orang terpaksa menyerah kepada Belanda pada tanggal 6 September 1903. Dengan kejadian ini, perlawanan rakyat Aceh menjadi semakin lemah dan membuka jalan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah kesultanan Aceh. Hal ini tidaklah berarti bahwa perjuangan rakyat menentang kekuasaan Belanda telah lenyap sama sekali. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam abad ke-20 perlawanan-perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda masih sering terjadi.

J. Sumatra Utara

1. Pendahuluan

Perang di tanah Batak berlangsung kurang lebih 29 tahun, dimulai dari tahun 1878 sampai dengan tahun 1907. Peperangan ini disebut juga Perang Batak atau Perang Si Singamangaraja, bawah pimpinan Si Singamangaraja XII, yaitu "raja" terakhir dari tanah Batak, putra dari Si Singamangaraja XI. Perlawanan ditujukan untuk menentang kekuasaan

pemerintah Hindia Belanda yang akan menguasai daerah Batak pada abad ke-19.

Tanah Batak yang langsung dipimpin oleh Si Singamangaraja I ini berpusat di daerah Toba dan sekitarnya, yang sampai dengan pertengahan abad ke-19 dikenal sebagai daerah yang masih bebas dari kekuasaan Belanda. Suku bangsa terdiri atas beberapa suku, yaitu Batak Toba, Mandailing/Angkola, yang pada umumnya mendiami daerah Tapanuli; Batak Karo, Batak Simalungun mendiami daerah Kabupaten Simalungun, dan yang terakhir Batak Pakpak/Dairi mendiami Kabupaten Dairi.[158]

Struktur masyarakat di sini didasarkan pada bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung atau *huta* yang di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan agama, berdiri sendiri-sendiri. Tiap kesatuan *huta* didiami oleh satu ikatan kekerabatan yang disebut *marga*. Yang memerintah dalam satu *huta* disebut *Raja Huta*, yaitu pendiri kampung atau turunannya. Selain itu, terdapat pula *horja*, yang merupakan gabungan dari beberapa *huta*. Kepala *horja* dipilih oleh *Raja Doli*. Di atas *horja*, terdapat *bius*, yaitu gabungan dari beberapa *horja*.[159] Dari beberapa *bius* terbentuklah kesatuan wilayah yang lebih luas lagi, yaitu kesatuan negeri yang dipimpin oleh Si Singamangaraja. Walaupun demikian, Si Singamangaraja tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Pemerintah di tiap *bius* tetap berada di tangan *Raja Bius* sendiri. Di tiap *bius* Si Singamangaraja menempatkan wakilnya yaitu *Raja Naopat* yang terdiri atas empat orang dan langsung dipilih oleh Si Singamangaraja dari marga-marga tertentu. Pada kenyataannya Raja Naopat tidak mempunyai fungsi dalam pemerintahan secara langsung, tetapi hanya mengawasi pelaksanaan adat dan hukum yang berlaku, melaporkan segala keadaan masyarakat pada Si Singamangaraja, kemudian mempersiapkan peralatan apabila Si Singamangaraja akan mengadakan kunjungan dan menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat.[160]

Di samping itu, masyarakat Batak memandang Si Singamangaraja tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai seorang "raja" yang bersifat "Ilahi", yang memiliki kekuatan karismatik yang dapat memberikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini sesuai dengan kata-kata simbolis yang tertulis pada sebuah meterai (cap) peninggalan Si Singamangaraja XII yang antara lain berbunyi "Aku, pembahu keselamatan; Si Singamangaraja XII yang

---

[158] E.K. Siahaan dkk., Laporan Survei: Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara, Departemen P dan K, 1976, hlm. 1

[159] *Ibid.*, hlm. 112

[160] O.L. Napitupulu, *Perang Batak: Perang Sisingamangaradja,* Djakarta, Jajasan Pahlawan Nasional Sisingamangaradja,1972, hlm. 113–114

bertempat tinggal di Bakkara".[161] Dengan adanya kepercayaan akan kepemimpinannya yang demikian itu, masyarakat Batak yang terdiri atas beberapa marga dapat disatukan dalam satu ikatan negeri.

Pada masa kepemimpinan Si Singamangaraja XI, struktur kehidupan masyarakat Batak tidak mengalami perubahan penting. Segala pertentangan dan ketegangan dalam lingkungan warga masyarakat Batak dapat diatasi dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya tetap terjamin. Sebagai masyarakat yang masih hidup dalam alam tradisional, kehendak untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang berlaku pada lingkungan hidupnya besar sekali, sebaliknya kecenderungan untuk menolak pengaruh dari luar yang akan menganggu tradisi itu besar pula. Keadaan ini tidak dapat dipertahanan karena pemerintah kolonial Belanda selalu berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Pada abad ke-17 VOC memang telah melakukan kegiatannya di pantai barat Sumatra, tetapi masih terbatas pada hubungan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan tertentu saja, seperti Padang, Barus, dan Sibolga. Hubungan dengan daerah-daerah pedalaman boleh dikatakan tidak ada. Kemudian sejak puluhan kedua awal abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda berkali-kali mengirimkan ekspedisi militernya ke berbagai daerah di Sumatra untuk melakukan penaklukan dan pendudukan, serta pembentukan pemerintahan pamong praja di sana. Sekitar tahun 1819 sampai dengan tahun 1870, daerah Padang (Sumatra Barat), Bengkulu, sebagian daerah Lampung, Palembang, Jambi, Rokan, Siak, dan Deli, satu per satu diduduki setelah bertempur dengan rakyat setempat. Perang Padri (1821–1837) banyak memengaruhi daerah-daerah yang diduduki masyarakat Batak di sebelah utara daerah Minangkabau. Beberapa daerah turut terlibat dalam pertempuran-pertempuran itu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan pertempuran ini, yang menggores hati masyarakat Batak adalah peristiwa terbunuhnya Tuan na Balon (Si Singamangaraja), yaitu ayah dari Si Singamangaraja XI. Hal ini menjadi peringatan bagi rakyat Batak untuk berhati-hati terhadap masuknya penjajah Belanda ke daerahnya. Setelah Perang Padri berakhir, pasukan Belanda bergerak menduduki daerah-daerah di sebelah utara Sumatra Barat, seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli, dan sekitarnya. Terjadilah pendudukan demi pendudukan disusul dengan pembentukan daerah-daerah keresidenan dan penempatan seorang kontroler di tiap keresidenan sebagai wakil penguasa pemerintah setempat.

---

[161] A. Sartono Kartodirdjo (Editor), *Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme, Pusat* Sejarah ABRI, 1973, hlm. 270, dan seterusnya

Dalam pembentukan keresidenan Tapanuli, daerah Batak yang ada di sebelah utara tempat itu dimasukkan ke dalam wilayahnya, sekalipun belum dikuasainya. Demikian pula daerah Silindung yang terletak di sebelah utara Sipirok dianggap telah menjadi wilayahnya karena pada tahun 1840 ada beberapa kepala *huta* dari daerah ini yang telah berjanji tunduk kepada Belanda walaupun daerahnya belum dijadikan daerah pamong praja pemerintah kolonial. Setelah daerah Tapanuli dan Sipirok dikuasai Belanda, terbukalah jalan menuju daerah Silindung dan Toba sehingga kedaulatan tanah Batak mulai terancam.

Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1840 mengirimkan F. Junghun, dan pada tahun 1843 von Kessel, untuk menyelidiki keadaan daerah pedalaman Batak. Hasil-hasil penyelidikannya ternyata mendorong usaha untuk penyebaran agama Kristen selanjutnya. Islamisasi yang telah terjadi tidak dapat meluas sampai ke daerah pedalaman sekalipun daerah Batak diapit oleh dua daerah Islam yang kuat, yaitu Aceh dan Minangkabau. Hal ini dikarenakan masyarakat Batak sebagian besar masih menganut kepercayaan tradisional. Hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah Aceh dan Minangkabaulah islamisasi dapat berhasil dengan baik. Oleh sebab itu, daerah Batak dianggap sebagai tempat yang baik untuk penyebaran agama Kristen, di samping sebagai daerah yang harus ditundukkan Belanda. Dengan demikian, terjalinlan kerja sama yang erat antara kedua usaha ini.

Untuk kepentingan penyebaran agama Kristen, Dr. N. van der Tuuk dikirim ke daerah Batak. Pada tahun 1849 ia mulai bertugas di Barus. Dari sini ia berusaha menyusup ke daerah Toba. Kedatangannya disambut oleh masyarakat Toba dengan kebencian sehingga ia hampir terbunuh oleh rakyat Batak. Dengan menipu sebagai keluarga Si Singamangaraja X yang tewas dalam Perang Padri, yang diperkuat oleh Raja Lumbung, seorang kepala salah satu *huta*, ia dapat membebaskan diri dari usaha pembunuhan tersebut, bahkan pada tahun 1853 berhasil diterima oleh Si Singamangaraja XI di Bakkara. Sejak tahun 1860, misi Kristen mulai banyak memasuki daerah Silindung dan Toba; pos-pos zending juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintah Belanda mengerahkan ekspedisi-ekspedisi militernya ke daerah Barus dan Singkel untuk kemudian memasuki daerah pedalaman dan daerah Aceh.

Dalam keadaan demikian, Si Singamangaraja XI meninggal dunia dan diganti oleh salah seorang putranya Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, dengan gelar Si Singamangaraja XII. Si Singamangaraja XII menganggap bahwa perluasan agama Kristen akan membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan kedudukannya. Dengan banyaknya rakyat yang menganut

agama baru ini, dikhawatirkan hubungan tradisionalnya dengan pemimpin negeri akan terputus dan ini berarti akan merobohkan struktur tradisional dan kesatuan negeri yang telah lama ada. Secara ekonomis dan politis hubungan antara daerah-daerah dengan pusat akan runtuh. Oleh karena itu, sekitar tahun 1877 ia mengadakan kampanye keliling daerah untuk mengajak rakyat bersama-sama mengusir zending-zending Kristen dan mencegah kegiatan mereka. Akibatnya, terjadilah penyerangan terhadap pos-pos zending, perusakan-perusakan ataupun pembakaran-pembakaran rumah di beberapa tempat. Sementara itu, terdengar desas-desus bahwa Si Singamangaraja XII dengan bantuan pejuang-pejuang Aceh rencanakan penyeranganan ke zending di Silindung, dan telah mempersenjatai rakyatnya dengan 50 pucuk senjata. Hal ini akhirnya terdengar oleh garnisun militer Belanda di Sibolga sehingga pada tanggal 8 Januari 1878 tentara di pos Sibolga diperintahkan memasuki daerah Silindung dan mengadakan persiapan untuk menghadapi Si Singamangaraja XII serta melindungi penduduk yang beragama Kristen. Masuknya pasukan militer Belanda ke Silindung segera dijawab Si Singamangaraja XII dengan pernyataan perang. Pada tahun itu juga meletuslah pertempuran di daerah Silindung.

2. Jalannya Perang

Untuk memperkuat pasukan Belanda di Silindung, pada bulan Februari 1878 pasukan Belanda diberangkatkan lagi dari Sibolga ke pedalaman Silindung, di bawah pimpinan Kapten Scheltens. Pasukan bantuan ini terdiri atas dua orang opsir, 25 orang prajurit Eropa, dan 35 orang prajurit pribumi, satu mortir dengan perlengkapannya, petugas-petugas kesehatan, dan 150 orang kuli sebagai pengangkut perbekalan. Setelah melalui medan yang cukup sulit, pada tanggal 6 Februari 1878 mereka sampai di pos zending yang pertama, di Pea Raja. Kepala-kepala kampung setempat segera dikumpulkan dan bergerak menuju Sipoholon dengan tujuan menduduki Bahal Batu.

Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Benteng alam terletak di Dataran Tinggi Toba dan Silindung, yang terdiri atas pegunungan baik yang berhutan lebat maupun yang gundul, serta banyak mempunyai jurang-jurang yang curam dan terjal, padang-padang ilalang, tanah-tanah becek, dan sungai-sungai yang deras dan dalam. Benteng yang mereka buat sendiri berupa perbentengan kampung. Tiap kelompok kampung berbentuk empat persegi dikelilingi oleh pagar tembok

yang terbuat dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi diberi selokan yang dalam. Pintu masuk hanya beberapa buah dengan ukuran yang sempit, dan dapat dibuka serta ditutup dengan alat pengangkat. Rumah-rumah penduduk berbentuk rumah panggung dan berada di bagian dalam tembok itu, sedangkan sawah ladang berada di bagian luar tembok.

Pada waktu itu Bahal Batu telah mempunyai sistem perbentengan buatan sendiri. Ketika Si Singamangaraja XII mendengar berita bahwa pasukan Belanda telah sampai di Bahal Batu, ia segera ke Balige untuk mengumpulkan rakyat dan menyusun kekuatan menghadapi musuh. Kira-kira bersama 700 orang pasukannya Si Singamangaraja XII segera menyerang kubu-kubu pertahanan musuh. Pihak Belanda segera membalas serangan ini, dan meletuslah pertempuran sengit di Bahal Batu pada bulan Februari 1878. Persenjataan yang kurang seimbang antara pihak Si Singamangaraja XII dengan pihak Belanda menyebabkan keadaan pasukan Si Singamangaraja XII kurang menguntungkan. Sebagian besar pasukan Si Singamangaraja XII hanya menggunakan tombak, sedangkan pihak lawan mempergunakan persenjataan yang lengkap. Si Singamangaraja XII segera menarik mundur pasukannya untuk sementara.

Pada tanggal 7 Maret 1878 pihak Belanda mendapat bantuan lagi sebanyak dua kelompok pasukan di bawah pimpinan umum Letnan Kolonel F.L. Engel. Pasukan ini disertai juga oleh Residen Sibolga dan Pendeta Nommensen. Pertempuran terus merambat ke daerah sekitar Bahal Batu. Dalam suatu pertempuran di Butar, seorang pejuang Batak berhasil menembak jatuh seorang serdadu Belanda hingga tewas seketika. Belanda kemudian mengadakan pembalasan dengan membakar kampung-kampung yang berada di sekitarnya. Tembok setinggi 9 sampai 10 m yang mengelilingi kampung Butar menimbulkan kesulitan bagi pasukan Belanda untuk masuk. Pintu gapuranya juga tidak terbuka oleh lontaran granat. Akhirnya dengan mempergunakan balok besar, pintu gapura berhasil didobrak dan pasukan Belanda terus menerobos memasuki bagian dalam benteng. Benteng ternyata telah kosong, hanya tinggal beberapa mayat rakyat Batak yang gugur serta sejumlah ternak. Ternak ini segera dirampas dan kepala kampung Butar dijadikan tawanan.

Kampung Lobu Siregar dan Upu di Srabar menjadi kancah pertempuran pula pada bulan Maret itu. Kampung Upu di Srabar dibatasi dengan jurang pemisah yang dalam, lebih kurang 300 kaki dan pada bagian luarnya ditanami dengan ranjau yang terdiri atas bilah-bilah bambu sepanjang 10–16 cm dengan ujung runcing. Pihak Belanda pun mempergunakan tangga-tangga penyerang untuk memasuki tembok

benteng yang dibangun cukup tinggi, sekitar 6 sampai 9 m. Pertempuran yang terjadi di sini tidak berlangsung lama. Setelah terjadi tembak-menembak beberapa saat, diselengi dengan tembakan mortir, kampung ini berhasil diduduki. Pejuang-pejuang Batak dengan cepat menarik diri ke daerah lainnya. Kemudian pihak musuh membakar kampung-kampung ini dan kepala-kepala kampungnya dipaksa untuk menyerah.

Selanjutnya pasukan Belanda kembali ke Sibolga dengan meninggalkan satu detasemen militernya di Sipoholon dan sebagian lagi di Bahal Batu. Sementara itu, Si Singamangaraja XII mempersiapkan pasukannya untuk menyerang pihak Belanda kembali. Pada saat yang sama pasukan Belanda diperintahkan menaklukkan seluruh Toba dan menangkap semua kepala kampung yang masih membangkang. Ketika pihak Belanda sedang menunggu pembayaran denda sejumlah 3.000 gulden dari kepala kampung yang telah ditundukkan, pasukan Si Singamangaraja XII mencoba menyerang pos pertahanan Belanda di Bahal Batu kembali. Akan tetapi, Belanda berhasil mendahuluinya dengan tembakan-tembakan salvonya sehingga Si Singamangaraja XII akhirnya mengurungkan niatnya, pasukan ditarik kembali dan pertempuran tidak jadi berkobar.

Sekarang perhatian Belanda ditujukan pada Bakkara atau Lumbung Raja, yaitu tempat tinggal Si Singamangaraja. Bakkara terletak di sebuah lembah dekat Danau Toba dengan ketinggian 400 m dari permukaan laut, dipagari oleh gunung-gunung yang terjal dan gundul. Benteng pertahanan yang dibuat di sini merangkum tujuh buah kampung dengan pagar tembok setinggi 6 m. Pertempuran mulai berkobar ketika pihak Belanda meledakkan mortir ke dalam benteng Bakkara dari sebuah bukit yang terletak di dekatnya. Pejuang-pejuang Batak yang berada di sawah-sawah di luar tembok benteng segera menghadang masuknya pasukan musuh. Pertempuran segera meletus. Tembakan-tembakan dari pejuang-pejuang Batak kemudian dibalas dengan lemparan-lemparan granat oleh musuh. Jumlah pasukan Belanda yang memang lebih banyak mulai berhasil mendesak pasukan Si Singamangaraja XII. Bakkara segera terkepung, Letnan Ketchner mendesak dari bagian selatan, sedang Scheltens mencoba mendesak dari bagian timur, dan van den Bergh bergerak ke bagian barat benteng. Akan tetapi, tembok dari benteng Bakkara terlalu tinggi untuk dinaiki. Pasukan di bawah pimpinan Letnan B.T.C.F. Schmidt dan Letnan Roest van Limburg mencoba memasuki benteng dari sisi barat laut, tetapi segera dihalau oleh pejuang-pejuang Batak. Mereka yang memanjat tembok segera dilempari batu. Ternyata arus pasukan Belanda mengalir terus sehingga pengepungan secara ketat lebih mudah dilakukan, sementara itu simpang siur tembakan-tembakan terdengar semakin gencar. Akhirnya benteng pertahanan Bakkara

jatuh. Sebagaimana juga di kampung-kampung lainnya yang telah ditundukkan, semua orang yang tersisa di dalam benteng menjadi tawanan, ternak maupun padi dirampas, kepala-kapala kampung ditangkap, dan kampung-kampungnya segera dibakar. Kepala-kepala kampung ini baru akan dilepaskan dengan syarat harus berjanji untuk setia kepada pemerintah Belanda.

Si Singamangaraja XII bersama pasukannya menyingkir dari Bakkara menuju ke Paranginan untuk mempersiapkan penduduk di bagian selatan Danau Toba. Benteng-benteng pertahanan segera dibuat di Meat, Balige, Tambunan, dan Lagu Boti, yaitu tempat penasihat Si Singamangaraja XII, Raja Deang. Pada bulan Mei musuh mengejar ke Paranginan, kemudian bergerak ke Gurgur dengan maksud menyerang Balige dan Raja Deang. Di sepanjang kampung-kampung yang dilewati, kepala-kepala kampung dipaksa menyerah dan berjanji untuk setia kepada pemerintah Belanda. Sesampainya di dekat Meat, pejuang-pejuang Batak menghujani tembakan-tembakan pada mereka dari bukit-bukit setinggi 1.000 sampai 1.400 m sehingga pasukan musuh di bawah pimpinan Wellemse menghindarkan diri ke jurang-jurang yang terjal dan tidak sempat membalas serangan. Akan tetapi, bantuan kepada pasukan musuh segera datang dan mulailah pejuang-pejuang Batak menarik diri dari kancah pertempuran.

Pasukan Si Singamangaraja XII menyingkir ke Lintung ni Huta, tetapi musuh senantiasa mengejarnya. Dalam pertempuran yang timbul, pasukan Si Singamangaraja XII mundur ke daerah Tambunan, Lagu Boti, dan Balige. Balige dan Tambunan berturut-turut berhasil dikuasai oleh musuh. Demikian pula Onang Geang-Geang, Pakik Sabungan, dan Pintu Besi segera jatuh. Kampung-kampung yang terletak di antara daerah Silindung dan Danau Toba telah dikuasai Belanda. Walaupun demikian Si Singamangaraja XII terus-menerus menyusun barisannya kembali sama-sama pejuang-pejuang Batak lainnya untuk menyerang kubu-kubu pertahanan musuh kembali. Kancah pertempuran bergeser ke daerah di sepanjang Danau Toba. Perjalanan keliling sampai dilakukan oleh Si Singamangaraja XII untuk membakar semangat rakyat menentang penjajah. Pada tahun 1883 pasukan Si Singamangaraja XII sampai di Uluan bertepatan dengan tindakan Belanda menempatkan seorang kontrolir di Balige, termasuk juga untuk daerah Uluan dan Lagu Boti. Tindakan Belanda ditentang oleh penduduk setempat dengan mengadakan pengacauan-pengacauan dan huru-hara. Kontrolir yang baru diangkat kemudian meminta bantuan militer kepada atasannya untuk mengamankan daerah ini. Pada tanggal 31 Mei 1883 bantuan militer di bawah pimpinan Kapten H. Droeze, yang terdiri atas 150 orang dari kompi I dan II Batalion 17 Infanteri ditambah dengan lebih

kurang 12 orang pasukan mortir dan dua mortirnya, tujuh orang dari urusan kesehatan, dan 350 orang untuk mengangkut perbekalan ke medan pertempuran. Pasukan sampai di Sibolga pada tanggal 3 Juli 1883, dan pada tanggal 4 Juli mereka menuju Sipoholon. Esoknya mereka bergerak ke hutan Pagaranpisang. Namun, hutan ini ternyata telah kosong ditinggalkan oleh penduduknya. Kapten Genet menerima instruksi agar pasukan yang baru itu tidak bergerak ke luar batas daerah gubernemen.

Sementara itu, Si Singamangaraja XII kembali ke Babana dan merencanakan gerakan baru di Uluan (terletak di sebelah utara Sungai Pasir di daerah Babana). Daerah ini terdiri atas 600 huta dengan penduduk 40.000 jiwa. Huta-huta ini sangat berdekatan letaknya dan dipagari oleh sawah-sawah yang masing-masing dihubungkan dengan jalan-jalan. Penduduk di sini telah dapat membuat obat bedil atau bubuk mesiu dan peluru sendiri.

Pada tanggal 18 Juli 1883, pasukan Belanda bergerak dari Balige ke Lagu Boti di bawah pimpinan Kapten Genet. Berarti kekuatan pasukan Belanda di Balige berkurang. Keadaan ini memberi kesempatan kepada Si Singamangaraja XII untuk segera menyerang Balige. Balige ditembaki oleh lebih kurang 8 sampai 9 orang pejuang-pejuang Batak, demikian pula gedung-gedung pertemuan dan penjara di Silindung menjadi sasaran pembakaran. Gudang-gudang kopi dibakar pada tanggal 23 Juli 1883. Pihak Belanda segera menuntut balas. Kampung Lagu Boti dan Uluan kemudian diultimatum untuk segera menyerahkan orang-orang yang dianggap menjadi pembunuh-pembunuh Belanda. Jika tidak dilaksanakan mereka harus membayar denda. Apabila denda tidak segera dipenuhi juga, mereka akan dihancurkan. Uluan pun mendapat ultimatum yang serupa dan kesempatan untuk memenuhi ultimatum ini hanya diberikan beberapa hari. Penduduk Lagu Boti ternyata tidak mau menyerah dan tunduk kepada ultimatum ini, bahkan memperkuat pertahanan kampungnya dengan memasang ranjau-ranjau. Sampai dengan akhir masa ultimatum itu, penduduk di sini tidak juga memberikan jawaban yang pasti, Belanda memutuskan untuk mengadakan serangan umum pada tanggal 29 Juli 1883.

Sesuai dengan keputusan yang telah diambil, Belanda melancarkan serangan umum yang dimulai pukul 4.00 pagi. Pasukan Belanda bergerak ke huta Pananggara dengan kekuatan 145 orang pasukan dan 6 orang opsir. Pada pukul 05.00, mereka sampai ke tempat yang dituju dan segera menyerang. Pejuang-pejuang Batak mengadakan perlawanan sengit, tetapi tetap tidak berhasil menahan serangan yang bertubi-tubi dari pihak lawan. Huta Dalah akhirnya jatuh dan kepala kampungnya tewas dalam pertempuran ini. Demikian pula huta Anggaris dapat direbut tanpa

perlawanan yang berarti. Di huta Saon Angin, pejuang-pejuang Batak cukup merepotkan pasukan Belanda. Mereka berhasil menewaskan dan melukai beberapa pasukan Belanda. Huta ini diperkuat dengan pagar berduri, sedang di bagian luarnya terdapat tanah lapang yang penuh dengan ranjau-ranjau. Pasukan Belanda berusaha merebut huta ini dari bukit sebelah selatan, tetapi gagal karena terhalang oleh huta-huta Anggaris dan Rangga Bosi. Oleh karena itu, huta Rangga Bosi harus dijatuhkan terlebih dahulu. Rangga Bosi digempur dengan lemparan-lemparan granat dan tembakan-tembakan mortir. Sementara itu, bagian selatan huta Saon Angin menjadi sasaran granat pula. Di pihak lain, pejuang-pejuang Batak datang mengalir dari arah Juara dan Sigumpar untuk menghantam pasukan Belanda yang sedang mengepung huta Saon Angin tersebut. Sebagian dari pejuang-pejuang Batak bertempur dengan mengendarai kuda. Sementara itu, pihak Belanda terus melakukan serangan secara bertubi-tubi sehingga pasukan Si Singamangaraja XII terpaksa menyingkir ke bagian utara dengan mendapat perlindungan bambu-bambu berduri. Di bagian selatan, pasukan yang dipimpin oleh Kapten H. Droeze menyerang dengan gencar. Dari sini mereka terus menghantam sisa-sisa pertahanan yang ada di sebelah utara dengan menaiki atap-atap rumah sehingga kedudukan pasukan Si Singamangaraja XII dapat terlihat dengan mudah. Pertahanan Si Singamangaraja XII akhirnya terpecah, dan terpaksa mengundurkan diri. Pada pukul 12.00 siang huta Saon Angin jatuh ke tangan Belanda.

Bersamaan dengan meletusnya pertempuran di huta Saon Angin, dari Umpu Tinggi pejuang-pejuang Batak lainnya mencoba menyerang pasukan Belanda di Semenangking, tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Spandaw. Pasukan Si Singamangaraja XII terus didesak ke pegunungan barat laut huta Timbang. Pada saat itu bagian barat huta Timbang telah diduduki oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Reijer. Pasukan di bawah pimpinan Reijer dan Letnan Schafer bersama-sama membuka serangan lagi dan meletuslah pertempuran. Pejuang-pejuang Batak tidak tinggal diam. Mereka segera menghantam pasukan Belanda dari arah Handang dan bukit yang terletak di sebelah selatannya, tetapi pasukan Spandaw ternyata telah siap di sebelah barat huta Timbang. Timbang akhirnya tidak dapat dipertahankan oleh Si Singamangaraja XII, huta pertama dari Umpu Tinggi jatuh. Pejuang-pejuang Batak kemudian mengundurkan diri.

Perhatian Belanda sekarang diarahkan pada huta-huta yang lain, tetapi penyerangan batal dilakukan pada waktu itu karena hujan turun dengan lebatnya. Sementara itu, pejuang-pejuang Batak yang lain masih terus berusaha menyerang musuh dari arah huta Handang dan bagian utara

huta Tinggi, tetapi tidak berhasil. Kemudian Belanda mengarahkan serangannya ke huta Tinggi yang kedua.

Pasukan Schafer dan Spandaw ditugaskan untuk menyerang dari arah selatan dan timur. Ranjau-ranjau dan lubang-lubang perangkap cukup menghambat gerak maju pasukan Belanda. Namun, hambatan-hambatan ini dapat diatasi oleh Belanda. Dalam pertempuran-pertempuran yang timbul, pejuang-pejuang Batak tetap berusaha mempertahankan diri. Ketika musuh berhasil mendobrak pagar benteng, pasukan Si Singamangaraja XII terpukul mundur. Pertempuran di huta-huta yang lain juga berhasil mendesak mundur pasukan Si Singamangaraja XII. Pada pukul 16.00 pejuang-pejuang Batak terlihat mengibarkan bendera putih sebagai tanda untuk mengajak damai sehingga pasukan Belanda ditarik kembali dari Semenangking. Pada tanggal 30 Juli 1883 diadakanlah pertemuan antara kedua belah pihak untuk membicarakan soal denda. Pihak Belanda menuntut denda dua kali lipat dari denda yang pernah dituntut pada waktu yang lalu. Namun, denda ini tidak dapat segera dipenuhi. Pihak Belanda pada waktu itu mengalami kesulitan uang sehingga ditentukan bahwa denda dapat dibayarkan dalam bentuk kerbau atau barang-barang emas. Pengumpulan barang-barang ini pun memerlukan waktu sehingga penyerangan ditunda. Dalam pertempuran yang terjadi, huta ini akhirnya dapat diduduki Belanda.

Dalam pertempuran bulan Juli tersebut, pejuang-pejuang Batak berhasil menewaskan lima orang musuh di Si Gumpar. Namun, kampung Si Gumpar merasa khawatir akan pembalasan pihak Belanda sehingga kepala kampungnya segera menyerahkan diri, membayar denda, dan kemudian mengakui kedaulatan Belanda dengan mengangkat sumpah.

Batas terakhir untuk membayar denda adalah tanggal 1 Agustus. Huta Datu Hari tetap bersikeras tidak mau memenuhi tuntutan Belanda sehingga serangan Belanda diarahkan pada huta Datu Hari. Pada waktu itu huta Datu Hari masih dipertahankan oleh 16 orang pejuang Batak yang bersenjatakan senapan, sedang kepala hutanya telah melarikan diri terlebih dahulu. Benteng pertahanan Datu Hari terdiri atas dua lapis dinding, tiga buah parit selebar kira-kira 2 m dan penuh air bercampur lumpur. Huta ini terletak di tengah-tengah persawahan. Pintu gerbangnya ada di bagian barat, sedang di atas parit yang terluas terdapat jembatan yang dapat diangkat pada malam hari. Di samping itu, terdapat pula ranjau-ranjau, tetapi tidak disertai oleh lubang-lubang perangkap. Pada tanggal 2 Agustus 1883, pasukan Belanda bergerak dari Semenangking menuju Datu Hari. Dari arah tenggara dan timur, Datu Hari diserang dengan gencar. Penduduk

dalam huta terdesak mundur, sementara itu pasukan Belanda memerlukan waktu lagi untuk melewati medan yang sulit sehingga setelah mereka sampai di dalam benteng, ternyata huta tersebut telah kosong, dan Datu Hari dengan mudah diduduki oleh Belanda.

Dengan demikian, seluruh daerah Lagu Boti telah dikuasai Belanda. Akan tetapi, di daerah-daerah yang pernah mendapat serangan, seperti Naga Seribu, Muara Bakkara, Tangga Batu, dan Paranginan, masih tetap memihak kepada Si Singamangaraja XII sehingga pasukan Belanda senantiasa harus siap sewaktu-waktu menghadapi perlawanan dari pejuang-pejuang Batak.

Di daerah-daerah lain pasukan Belanda terus mengadakan serangan. Tangga Batu diduduki pada tanggal 7 Agustus 1883, dan Paranginan tanggal 9 Agustus 1883. Kepala-kepala kampungnya juga dikenakan denda. Bakkara ternyata menolak untuk membayar denda sehingga 6 buah huta dalam lingkungan Bakkara dibakar. Penduduk setempat kemudian dipaksa membayar kerugian dengan menyerahkan barang-barang emas. Dari Bakkara, pasukan Belanda menuju Lintong ni Huta, kemudian ke Tangga Batu melalui Paranginan. Dari Paranginan kemudian menuju ke Lagu Boti. Dalam perjalanan ini, pasukan Belanda mendapat serangan dari rakyat Semenangking. Pada tanggal 25 Agustus 1883 pejuang-pejuang Batak mengadakan penembakan-penembakan lagi pada malam hari dan mengirimkan pernyataan perang terhadap pihak Belanda di Semenangking.

Selanjutnya, Si Torang mulai terancam. Pada tanggal 27 Agustus 1883 pasukan Belanda bergerak menuju Pintu Batu, tetapi di sebuah padang ilalang mereka diserang oleh 80 orang pejuang-pejuang Batak dari Si Torang. Dengan susah payah pasukan Belanda akhirnya dapat meneruskan perjalanannya. Akan tetapi di Silaen, penduduk setempat menyerang mereka dari celah-celah bukit. Serangan ini berhasil dipatahkan dengan tembakan-tembakan artileri dan senapan secara gencar serta penghancuran dengan mitraliur dari infanteri. Huta Boksa dapat diduduki dan selanjutnya pasukan Belanda menyerbu Perabu Angin. Dalam usaha menjatuhkan Si Torang, pihak Belanda menggunakan taktik penghancuran-penghancuran dengan mematahkan kekuatan-kekuatan pertahanan pejuang-pejuang Batak di dalam benteng pertahanan. Mereka mengadakan loncatan penyerangan. Taktik ini mereka jalankan karena pengalaman mereka yang sukar dalam menjatuhkan benteng Saon Angin, di mana pejuang-pejuang Batak sulit diserang dalam posisi di belakang tembok benteng. Perabu Angin dengan mudah dapat diduduki, demikian pula Si Jarot, pusat dari kampung Si Torang. Patigi dan Si Ria-Ria diduduki Belanda pada tanggal 1 September 1883. Sesudah itu pasukan Belanda kembali ke pos pertahanan Lagu Boti,

sedangkan Si Singamangaraja XII mengadakan perlawanan di daerah lain lagi. Dari tahun ke tahun pasukan Si Singamangaraja XII terus berjuang melawan penjajah. Mereka sering menimbulkan huru-hara di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1887 timbul perlawanan dari Kota Tua dengan bantuan pejuang-pejuang Aceh yang datang dari daerah bebas di Trumon. Perlawanan ini dapat dipatahkan oleh pasukan Belanda di bawah Kapten J.A. Visser.

Pada tahun itu juga terjadi penyerbuan di bawah pimpinan Sarbut. Pos-pos zending menjadi sasaran pembakaran. Karena peristiwa ini Lobu Si Reger dapat diduduki.

Di pihak lain, pasukan Belanda terus membabi buta dengan membakar kampung-kampung yang menolak untuk membayar denda. Sejumlah 50 buah huta, masing-masing terdiri atas tiga sampai empat rumah dibakar habis pada masa itu.

Selain harus menumpas perlawanan rakyat Batak, pemerintah Hindia Belanda juga harus menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Pada waktu itu pertempuran yang terjadi di Aceh sangat hebat sehingga pemerintah Hindia Belanda mengalihkan perhatiannya dahulu pada perlawanan yang timbul di Aceh. Untuk sementara kegiatannya dalam menumpas pasukan Si Singamangaraja XII dikurangi dan diusahakan agar pemerintah pamong praja mengurangi sebanyak mungkin campur tangannya pada perlawanan rakyat Batak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan daerah-daerah dilakukan dengan hati-hati dan diperlukan penyelidikan yang saksama.

Sementara itu, Si Singamangaraja XII tetap bergerak terus untuk menyusun kekuatannya. Pada tahun 1889 ia aktif di daerah-daerah bagian tenggara dan barat Danau Toba serta Pulau Samosir. Pada bulan Mei 1889 Si Singamangaraja XII bersama kira-kira 90 orang pejuang Batak siap di huta Paong untuk melawan ekspedisi Belanda di situ. Ekspedisi ini terdiri atas 70 orang di bawah pimpinan Letnan Pitlo. Pada awal bulan Juli 1889 pertempuran mulai meletus. Pasukan Si Singamangaraja XII terdesak dari Lobu Tala ke pegunungan. Akan tetapi, pada tanggal 8 Agustus 1889, kembali pasukan Si Singamangaraja XII mengadakan serangan balasan dan berhasil menewaskan seorang pasukan Belanda serta mengusir mereka dari situ.

Untuk mengadakan serangan balasan kembali terhadap Si Singamangaraja XII, pasukan Belanda didatangkan dari Padang. Pada tanggal 23 Agustus 1889 mereka telah siap di Lintung ni Huta. Sementara itu, Butar berhasil diduduki oleh pasukan Belanda yang dikirim dari

Tarutung. Kemudian mereka bergerak melalui Lobu Tala ke Dolok Sanggul. Kepala-kepala kampung di sini dipaksa membayar denda, kecuali kampung Sait na Huta. Pasukan Belanda terus bergerak ke Aik ni Uli sambil membakar beberapa kampung yang dilewatinya sehingga perlawanan selalu timbul dari pejuang-pejuang Batak setempat.

Huta Paong diduduki pada tanggal 4 September 1889. Di pihak lain, pejuang-pejuang Batak mundur ke Pasingguran. Akan tetapi, pasukan terus mengejar dari pegunungan, sampai ke huta Julu. Julu segera dibakar dan kepala-kepala kampungnya dipaksa menyerah. Dalam penyerangan ini sebagian pasukan Belanda diungsikan ke Tarutung karena sakit, sedang sebagian lagi terus bergerak ke daerah sekitar Danau Toba. Ketika mereka sedang berada di Tamba, pejuang-pejuang Batak menembakinya. Kemudian ketika mereka sedang mendekati sebuah terowongan, kembali para pejuang Batak menyerangnya sehingga pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Tembakan-tembakan artileri dan infanteri Belanda dibalas oleh pasukan Si Singamangaraja XII dengan menjatuhkan batu-batu di sepanjang jurang yang curam itu sambil mengundurkan diri. Akan tetapi, pihak Belanda terus melakukan penembakan ke arah daerah Pintu Batu di seberang Danau Toba. Akibatnya, Si Singamangaraja XII bersama pasukannya terpaksa menyingkir ke Harion, sedangkan musuh bergerak melalui Si Holang menuju Kecamatan Lintong. Di Bakkara mereka berhenti untuk mengadakan perkemahan, dan esok harinya berangkat lagi menyerang Lintung. Setelah menghadapi perlawanan yang sengit dari pejuang-pejuang Batak, Lintung berhasil diduduki Belanda dan pada tanggal 18 September 1889 kampung itu dibakar.

Sementara itu, masyarakat semenanjung Samosir[162] masih menolak untuk tunduk dan membayar denda. Seperti juga di daerah-daerah lainnya, di sini pun kemudian terjadi pertempuran. Samosir akhirnya berhasil diduduki Belanda.

Dengan meluasnya daerah yang jatuh ke tangan Belanda, daerah gerak Si Singamangaraja semakin kecil dan pengikut-pengikutnya semakin berkurang. Akibatnya, pasukannya bertahan di sebelah barat daerah Danau Toba, yaitu daerah Pakpak, Dairi.

---

[162] Pada waktu itu Pulau Samosir masih merupakan semenanjung dan baru pada tahun 1906 tanah genting sepanjang 200 m di dekat Pusuk Bukit digali dan dijadikan terusan

3. Akhir Perang

Sampai dengan akhir abad ke-19 Si Singamangaraja XII, masih giat melakukan perlawanan-perlawanan. Sementara itu, hubungan dengan pejuang-pejuang Aceh tetap berlangsung. Akan tetapi, sesudah tahun-tahun 1900, kekuatan Si Singamangaraja XII bertambah surut sehingga perlawanan-perlawanan yang dilakukannya tidak lagi bersifat menyerang lawan sebanyak mungkin, tetapi lebih bersifat mempertahankan diri dari serangan lawan. Sekalipun demikian, penduduk daerah Pak-Pak dan Dairi tetap setiap padanya.

Pada pihak lain, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu sedang mengadakan operasi terakhir untuk membasmi kantong-kantong perlawanan yang masih ada di Sumatra, terutama di daerah Aceh dan Batak. Operasi ini dipimpin oleh Overste van Daalen, bergerak dari Aceh Utara melalui daerah Gayo Alas terus menembus ke daerah Batak, terutama ke tempat pertahanan Si Singamangaraja XII sehingga dikenal dengan *Gayo-Alas en Bataktochten*. Operasi dilakukan dengan mengadakan pengepungan-pengepungan dan membakar kampung-kampung yang masih membangkang di sepanjang daerah yang dilaluinya. Pertempuran-pertempuran yang berkobar menjadi lebih hebat dan lebih kejam lagi jika dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Operasi pasukan Belanda akhirnya sampai di daerah Pak-Pak dan Dairi, di mana Si Singamangaraja XII bersama pasukannya bertahan. Pejuang-pejuang Batak semakin terdesak dan hubungan dengan daerah-daerah Aceh terputus. Si Singamangaraja XII terkepung rapat-rapat di daerah segitiga antara Barus-Sidikalang, dan Singkel (perbatasan Aceh). Akan tetapi, ia senantiasa berpindah-pindah tempat.

Baru pada tahun 1907 pengepungan terhadap Si Singamangaraja XII dilakukan secara intensif. Tugas ini dilakukan oleh Kapten Hans Christoffel.

Operasi militer yang berlangsung selama April–Mei tahun 1907 yang dipimpin oleh Kapten Christoffel disertai taktik tawaran berdamai kepada Si Singamangaraja yang melibatkan beberapa tokoh, seperti raja Pertahan Batu dari Mara, Ompu ni Onggung, dan menantu Si Singamangaraja. Kedua tokoh tersebut bersama dengan Ypes berusaha melakukan pendekatan terhadap Si Singamangaraja. Mereka membuka hubungan dengan Ompu Babiat, seorang kepercayaan dan penasihat pemimpin perlawanan itu. Dua kali Ompu Babiat bertemu dengan Si Singamaraja untuk membicarakan maksud pihak Belanda. Kemudian Si Singamangaraja menyetujui usulan itu yang akan dibicarakan dalam suatu pertemuan. Namun, ia memberikan syarat bahwa pertemuan itu harus dihadiri oleh Residen Aceh dan Residen

Tapanuli. Selain itu, semua gerakan militer Belanda harus dihentikan. Gagasan hendak mengadakan perundingan itu tidak pernah terwujud karena pasukan Ypes sempat terlihat dan menimbulkan kecurigaan pihak pemberontak.[163]

Pada tanggal 12 Mei 1907, pasukan Hans Christoffel dengan bersenjatakan karaben dan klewang bergerak menuju Sukananing untuk mencari jejak Si Singamangaraja XII. Di dekat Sungai Pencineron, mereka melihat tiga orang pengikut Si Singamangaraja XII sedang mencari perbekalan makanan. Mereka kemudian dikejar, tetapi Si Singamangaraja XII bersama pasukannya dengan cepat meninggalkan daerah tersebut. Tidak lama kemudian, Boru Sagala, istri Si Singamangaraja XII, dengan dua orang anaknya serta beberapa pembantunya, tertangkap. Mereka dijadikan tawanan perang dan barang-barang perhiasannya seharga f2.000 dirampas. Esok harinya, Boru Situmorang, ibu kandung Si Singamangaraja XII, tertangkap pula di daerah itu dan kemudian dijadikan tawanan.

Sementara itu, pasukan Belanda terus bergerak ke daerah Lae Cinendung, tetapi belum berhasil juga menemukan jejak Si Singamangaraja XII. Pada tanggal 28 Mei, komandan Brigade Wenzel mendapat petunjuk dari tiga orang penduduk bahwa Si Singamangaraja XII berada di dekat jalan yang menuju Barus. Wenzel menggerakkan pasukannya untuk mengejar Si Singamangaraja XII, antara lain ke huta Lae Sanggar dan huta Pinang, tetapi tidak berhasil sehingga pasukannya kembali ke arah Sukananing.

Pada tanggal 4 Juni 1907 pasukan Belanda tiba di Panguhon, setelah melewati kampung-kampung Penegen dan Bululage. Kemudian terdengar berita bahwa Si Singamangaraja XII berada di sekitar daerah ini. Pertama-tama pasukan Belanda menggrebeg huta Anggoris yang tidak jauh letaknya dari Panguhon. Ternyata Si Singamangaraja XII telah meninggalkan tempat tersebut sebelum pasukan Belanda datang. Si Singamangaraja XII menyingkir ke daerah Alahan, sementara itu musuh terus mengejarnya melalui kampung-kampung Batu Simbolon, Bongkaras, dan Komi. Banyak penduduk setempat yang ditahan karena dicurigai berhubungan dengan Si Singamangaraja XII. Pada tanggal 16 Juni 1907, pengejaran dilakukan terus melalui Lae Kundur dan Huta Galung. Sesampainya pasukan Belanda di Alahan, kembali Si Singamangaraja XII berhasil meninggalkan tempat tersebut dengan cepat. Esoknya beberapa kampung terus dikepung dan dimasuki, tetapi sampai dengan pukul 12.00, mereka belum juga berhasil.

---

[163] Sitor Situmorang, *Toba Na Sae Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII–XX*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2004, hlm. 233–34

Gambar 5.11 Foto keluarga Si Singamangaraja yang tertawan

Dalam perjalanan yang terakhir ini Si Singamangaraja XII hanya didampingi oleh beberapa rencong. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, pukul 14.00, pasukan Hans Christoffel yang terdiri atas orang-orang Ambon, Halmahera, dan orang Belanda berhasil menemukan Si Singamangaraja XII di dekat Aik Sibulbulon, daerah Dairi. Dalam keadaan yang sangat lemah ini, Si Singamangaraja XII bersama putra-putranya dan pengikutnya tetap mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa ini Si Singamangaraja XII tertembak oleh pasukan Belanda yang mengepungnya dan gugur pada waktu itu. Demikian pula anak perempuannya, Lopian, dan dua orang putranya, Sutan Nagari dan Patuan Anggi gugur pula.[164] Putra-putrinya yang lain, istri dan ibunya tetap menjadi tawanan Belanda. Di antara putra-putranya, Sabidan, Pakilim, dan Buntai, dibuang ke luar daerah Batak, sedang Barita dan Pangarandang tinggal di Pea Raja dalam asuhan pendeta Henoch.[165] Semua harta pusaka Si Singamangaraja dirampas oleh Belanda.

Dengan gugurnya Si Singamangaraja XII, seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda. Sejak itu, rodi, penarikan pajak yang berat, serta berbagai peraturan pemerintahan kolonial yang merugikan rakyat masuk ke daerah ini. Struktur kehidupan tradisional dari masyarakat Batak pun menjadi berubah.

K. Nusa Tenggara Barat

1. Pendahuluan

Pada akhir abad ke-19 kedaulatan politik kerajaan Mataram yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir. Kedaulatan itu runtuh akibat ekspansi kolonial Hindia Belanda melalui sebuah perang. Ketika ekspedisi militer Hindia Belanda tiba di Lombok, kerajaan Mataram sedang menghadapi gejolak politik internal. Keguncangan itu berawal dari sebuah pemberontakan masyarakat desa terhadap kerajaan Mataram. Pemberontakan itu kemudian berkembang menjadi sebuah perang kolonial ketika pemerintah Hindia Belanda mencampuri masalah politik itu dengan berpihak pada perlawanan. Desa-desa yang melancarkan perlawanan itu dipelopori oleh desa Praya. Latar belakang pemberontakan desa Praya berkaitan dengan rasa tidak puas terhadap pola kebijakan politik yang diterapkan oleh raja Mataram, yakni Anak Agung Made Karangasem. Hal

[164] Adnicl Lumbantobing, *Si Singamangaraja I–XII*

[165] A. Sartono Kartodirdjo (Editor), *op. cit.*, hlm. 298

itu tampak pada esensi yang terkandung dalam tuntutan para kepala desa Sasak yang diprakarsai oleh desa Praya untuk meminta otonomi seluas-luasnya, penghapusan pajak tanah, dan penghapusan kerja wajib.

Desa Praya secara geografis terletak paling dekat dengan wilayah kekuasaan kerajaan Mataram dinasti Karangasem di Lombok Barat. Daerah Praya adalah daerah otonom dalam cakupan kekuasaan kerajaan Mataram. Keberhasilan raja Karangasem Bali menguasai Pulau Lombok tidak lepas dari bantuan desa Praya yang ketika itu berada di bawah pimpinan Banjar Getas. Dalam *Babad Lombok* kedatangan dinasti kerajaan Karangasem Bali ke Pulau Lombok berdasarkan permintaan dari Banjar Getas yang bertujuan mengalahkan rajanya, Datu Selaparang yang menurutnya telah berbuat serong dengan istrinya. Selanjutnya, raja Karangasem mengalahkan Datu Bayan dan Datu Pejanggi. Oleh karena itu, daerah-daerah yang ditaklukkan itu seperti Pejanggi, Langko, dan Parwa harus menyerahkan upeti dalam bentuk mata uang, yakni upeti picis. Sementara Bayan dan Sokang memberikan upeti kapas. Desa Praya dan Batukliang yang membantu penaklukan itu dibebaskan dari upeti. Akan tetapi, mereka harus ikut berperang apabila diminta oleh kerajaan. Kewajiban itu dikenal dengan sebutan "apati getih", yang artinya menumpahkan darah.

Kebijakan bebas upeti itu berubah pada masa Ratu Agung Agung Gde Ngurah Karangasem. Penguasa ini mengangkat putra mahkotanya Ratu Agung Ktut Karangasem sebagai wakilnya dan putranya yang lahir dari seorang selir, Anak Agung Made Karangasem sebagai pendampingnya. Pengangkatan pendamping raja menimbulkan gejolak karena masyarakat Sasak di Praya memandangnya tidak sah. Tanggapan dari sang pendamping itu justru mengusulkan kepada raja agar mengenakan pajak kepada desa Praya. Tindakan itu menimbulkan keresahan di desa itu. Pada tanggal 22 Juni 1891 Raja Mataram Lombok mengeluarkan perintah untuk mengerahkan penduduk desa Praya berangkat berperang membantu kerajaan Karangasem di Bali yang sedang berseteru dengan kerajaan Klungkung, juga di Bali. Selain memenuhi tuntutan "apati getih", berupa kerja wajib dan ikut berperang, penduduk Sasak juga harus menyediakan kebutuhan pangan untuk mereka yang berangkat. Kewajiban itu menambah beban kehidupan mereka.

Ketersingkiran dari kedudukan sosial dan politik bagi para elite desa Praya mewarnai latar belakang perlawanan. Para elite lokal hanya diberi jabatan paling tinggi sebagai kepala desa, yang tugasnya tidak lebih sebagai alat memungut pajak dan mengawasi ketertiban masyarakat di bawah pimpinannya. Di samping itu, sejumlah peristiwa pemecatan ikut menandai kemerosotan politik itu. Raja Mataram memecat tokoh masyarakat Sasak,
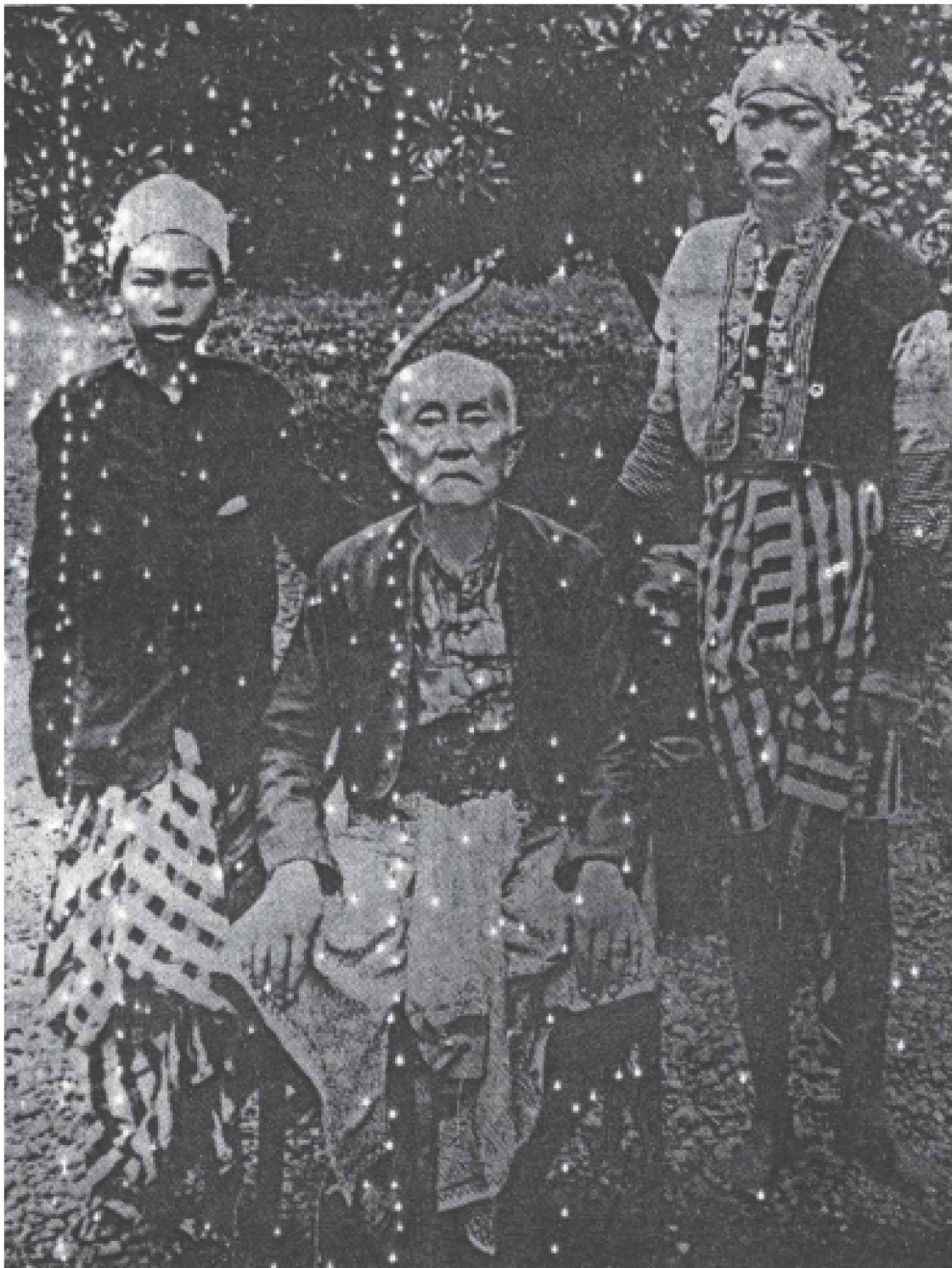
Gambar 5.12 Raja Selaparang Ratu Agung Agung Gde Ngurah Karangasem dengan beberapa keluarganya pada tempat pengasingannya di Batavia (Jakarta) tahun 1894–1896 (Sumber: *KITLV, Leiden*)
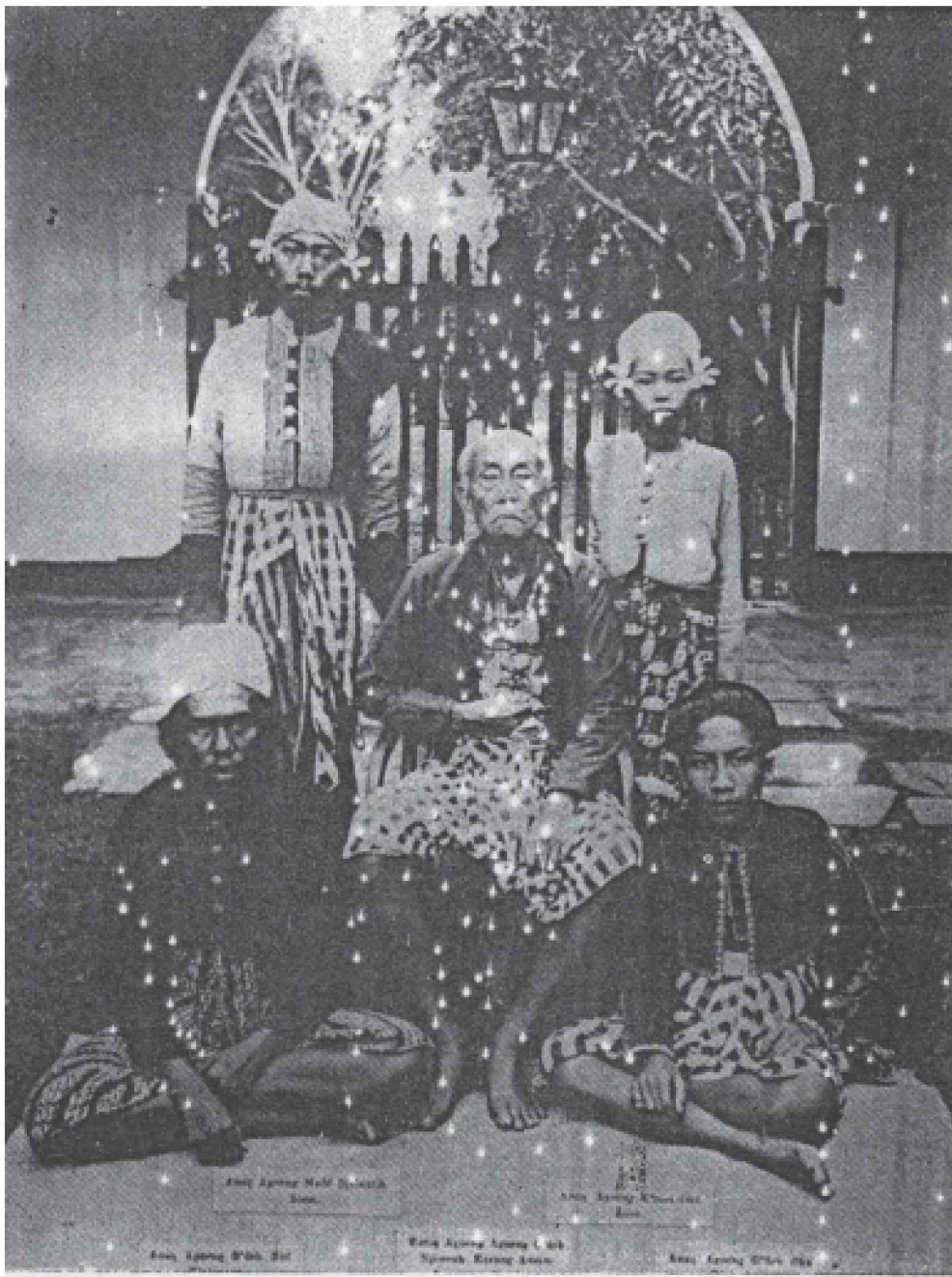
Gambar 5.13 Raja Selaparang Agung Agung Gde Ngurah Karangasem dengan keluarga dan pengirimnya di dalam pengasingan di Batavia (Jakarta) 1894–1896
(Sumber: *KITLV*, Leiden)
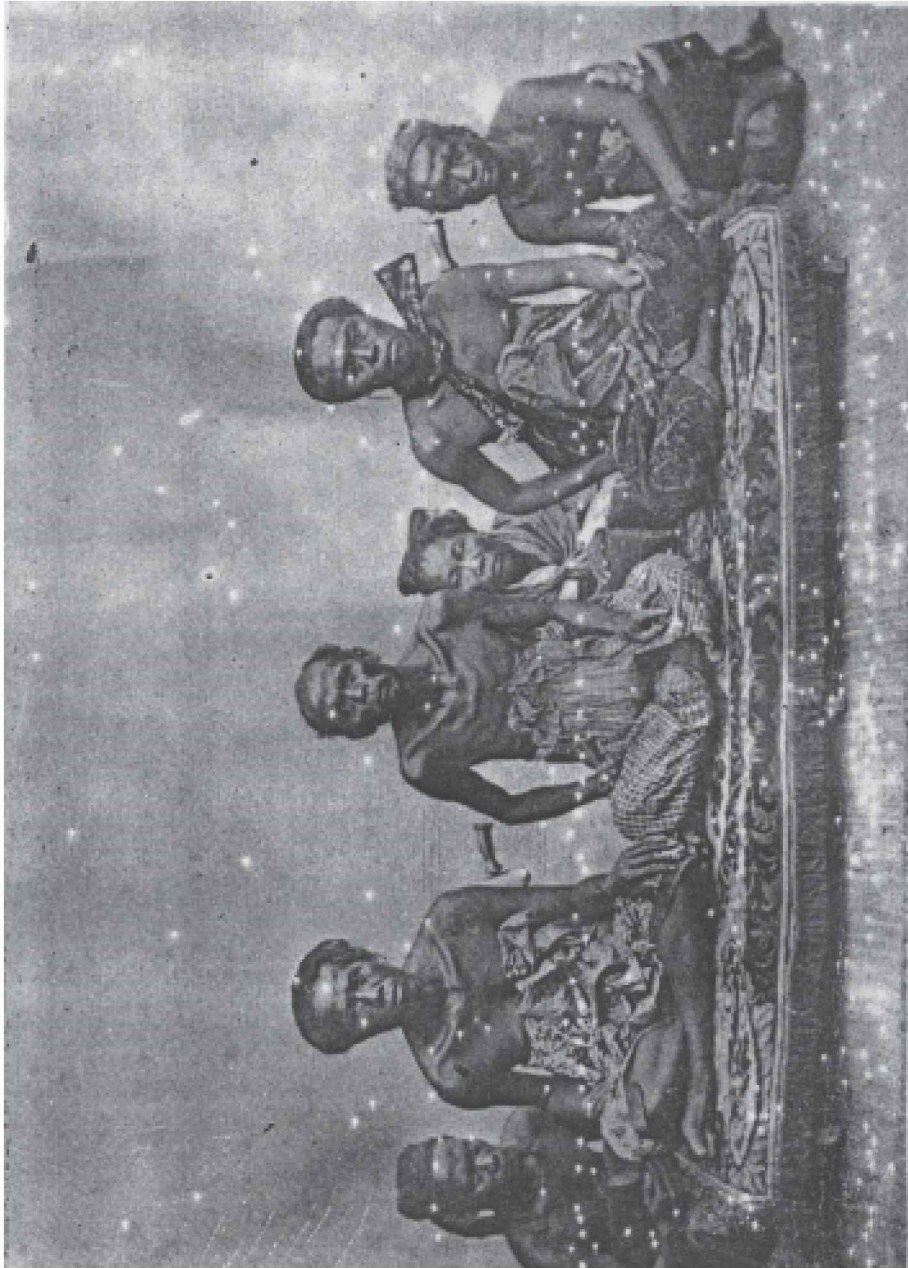
Gambar 5.14 Perutusan Raja Selaparang menghadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) pada tanggal 22 Mei 1894 (Sumber: *KITLV*, Leiden)

Gambar 5.15 Anak Agung Ketut Karangasem juga disebut Gusti Ngurah Ketut Karangasem, putra mahkota Selaparang Gugur di dalam pertempuran di Cakranegara melawan pasukan Belanda di dalam tahun 1894 selama berkobarnya perang Lombok (Sumber: *KITLV*, Leiden)

seperti Jro Mami Mustiaji dari desa Kopang, Raden Ratmawa dari desa Rarang, Mami Bangkol dari desa Praya, Raden Wiraanon dari desa Pringgabaya, Mami Mursari dari desa Sukra, Raden Malaya dari desa Masbagik, dan Jro Ginawang dari desa Batukliang. Tindakan kerajaan lainnya yang dipandang tidak adil dan sewenang-wenang adalah perampasan atas hewan peliharaan dan tanah. Selain itu, anak lelaki dan perempuan mereka sering dijadikan budak.

Pada awal Agustus 1891 Raja Mataram memerintahkan penduduk desa Praya untuk mengirimkan bantuan pasukan untuk kedua kalinya ke Bali. Akan tetapi, perintah itu tidak ditaati. Oleh karena itu, raja segera mengirim pasukan ke desa itu untuk menangkap dan mengasingkan pemimpin desa itu yang dianggap bertanggung jawab atas pembangkangan itu. Tokoh itu adalah Guru Bangkol dan Haji Ali. Penangkapan itu menimbulkan kehebohan dan keguncangan di kalangan masyarakat desa yang mulai dilanda kepanikan. Keguncangan itu juga menular pada kalangan elite Sasak lainnya. Kemudian sekelompok pemuka masyarakat desa Praya yang dipimpin oleh Mami atau Guru Bangkol, salah seorang guru tarekat Nakshabandiyah menyerukan panggilan kepada masyakarat desa Praya untuk bangkit dan melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan itu. Seruan itu, juga memperoleh tanggapan dari desa-desa lainnya, seperti Kopang, Rarang, Pringgabaya, Sakra, Masbagik, dan Batukliang.

Latar belakang pemberontakan juga berkaitan dengan perubahan kepemilikan tanah dan masalah ekonomi lainnya. Penguasa kerajaan Mataram mempersempit kesempatan kepemilikan orang Sasak, termasuk di Praya, atas tanah, yang mana tidak seperti masa sebelumnya. Raja Mataram menyatakan diri sebagai pemegang kuasa dan hak atas tanah di seluruh Lombok tanpa ada pengecualian. Hak itu dinyatakan sebagai sita komunal. Masalah ekonomi lainnya dapat ditelusuri dari sumber penghasilan raja Mataram, yang antara lain sebagai berikut.

1. *Perdagangan*, yang diawasi langsung oleh raja yang membangun dua pelabuhan, yaitu Ampenan di bagian barat dan Labuhan Haji di sebelah timur. Setiap pedagang, terutama Cina dan Arab, mendapat izin untuk menetap dan berdagang di kedua pelabuhan itu, memperoleh hak monopoli dagang atas komoditas tertentu. Hak itu memberikan mereka untuk memungut bea impor dan ekspor. Sebagai imbalannya, mereka harus membayar upeti kepada raja sekitar 50.650 *rijkdaalders* setiap tahun. Kewajiban itu juga berlaku untuk masyarakat Sasak.

2. *Pajak tanah*. Lahan garapan di Lombok pada akhir abad ke-19 terdiri atas sawah irigasi seluas 25.920 hektare, sawah tadah hujan seluas 46.080 hektare dan tanah tegalan seluas 24.480 hektare. Pajak yang dikenakan terhadap sawah irigasi dalam bentuk padi dan untuk sawah tadah hujan berupa *kepeng*.
3. *Kerja wajib*. Pekerja wajib atau disebut "pengayah", harus mengerjakan dan memelihara saluran irigasi, jalan, dan bangunan untuk kerajaan. Pembangunan sejumlah tempat rekreasi milik kerajaan yang dibangun antara tahun 1850 hingga 1890 di Narmada, Longsar, Gunung Sari, Bogowati, dan Suranadi melibatkan sebagian besar pekerja wajib. Kewajiban itu tidak jarang menyulitkan petani desa untuk menggarap lahan pertaniannya yang merupakan gantungan nafkah mereka sehari-hari. Tidak mengherankan jika tuntutan waktu kerja wajib yang begitu menyita waktu mereka menyebabkan lahan pertanian mereka mengalami gagal panen.

Semua perubahan dan perkembangan itu menjalin menjadi satu berupa kewajiban dan pemotongan hak untuk masyarakat Sasak. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan itu menjadi latar belakang penyebab perlawanan masyarakat Sasak yang dipelopori oleh desa Praya. Perlawanan itu dikenal sebagai Pemberontakan Praya.

2. Jalannya Perang

Pada awal April tahun 1891 permintaan kedua berupa bantuan prajurit oleh Raja Mataram ditolak oleh masyarakat desa Praya. Tidak hanya itu, dua tokoh desa itu, yaitu Guru Bangkol dan Mami Sapian, menyerukan mereka untuk melawan. Pada tanggal 7 Agustus ratusan penduduk Sasak desa Praya menyerang dan membakar rumah-rumah milik penguasa Bali di Lombok. Kerajaan Lombok banyak menempatkan pejabat Bali dalam struktur pemerintahan. Pada tanggal 8 Agustus Ratu Agung memerintahkan putranya Anak Agung Made Karangasem untuk segera memadamkan pemberontakan itu. Ia mengerahkan sekitar 3.000 pasukan dari Lombok Barat ke desa Praya. Raja juga menyerukan kepada pejabat-pejabat Bali di Lombok Timur untuk mengerahkan pekerja wajib untuk membantu. Sekitar 6.000 prajurit bergerak dari Sasak Timur, dan bergabung dengan pasukan kerajaan. Pada tanggal 11 Agustus desa Praya dikepung oleh pasukan Anak Agung Made Karangasem. Para pemberontak menyambut serangan itu dengan gagah berani. Mereka mengerahkan kekuatan pasukan yang besar pula mengimbangi kekuatan para penyerbu. Selama beberapa waktu, desa Praya bertahan dari serangan-serangan pasukan kerajaan. Pada tanggal
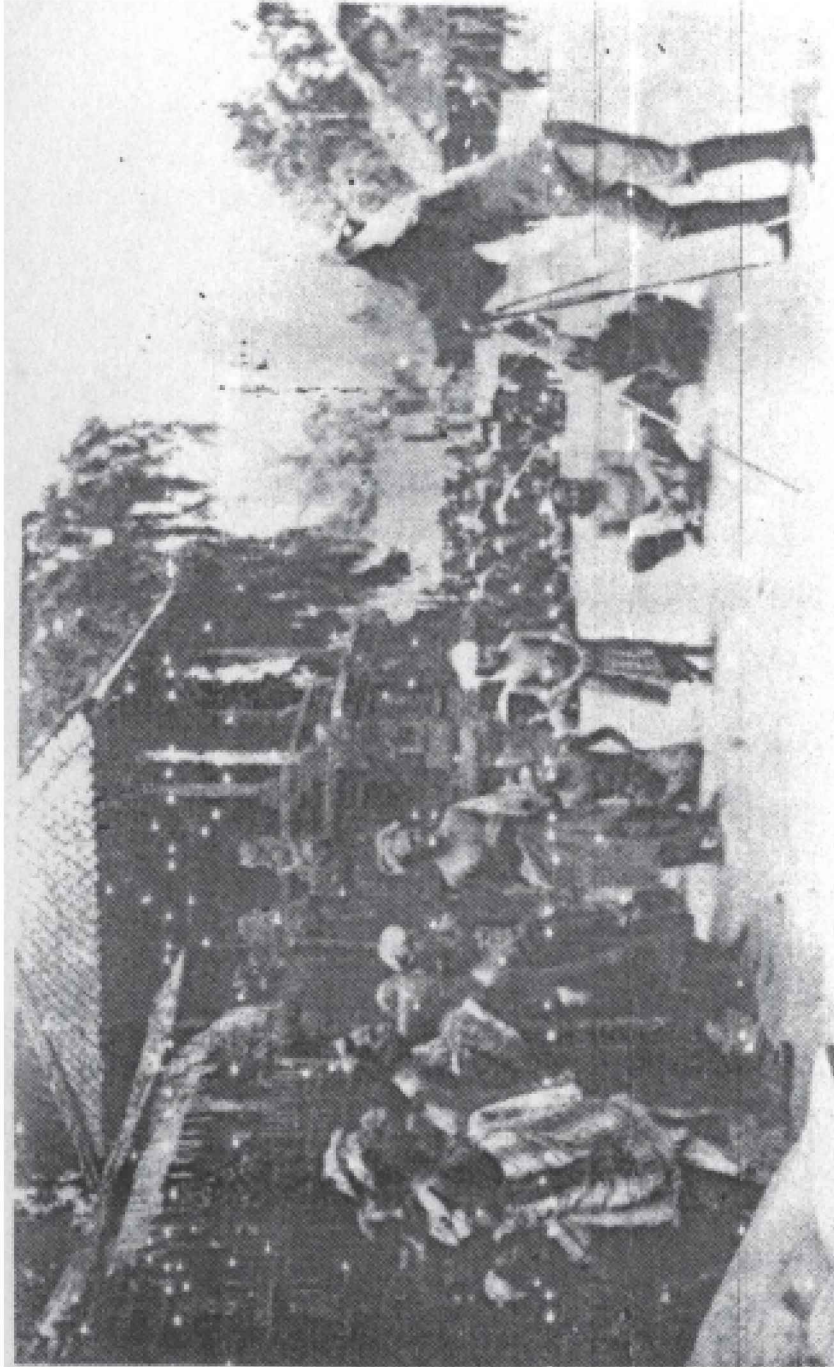
Gambar 5.16 Punggawa Ubud Cokorde Gde Sukawati bersama putra mahkota Kerajaan Gianyar Anak Agung Ngurah Agung di muka halaman barat Puri Agung Gianyar (1906).
(Sumber: Jhr. Dr. H.M. van Weede, *Indische Reisgherinneeringen*, H.D. Tjeeenk Willink & Zoon, Haarlem 1908)

25 Agustus kekuatan pasukan penyerbu bertambah dengan kedatangan Anak Agung Ktut Karangasem yang membantu dengan membawa sekitar 300 prajurit. Namun, serangan itu tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Sebagian besar pekerja wajib yang dikerahkan untuk ikut dalam serangan itu tidak bertarung sepenuh hati karena di dalam sanubari mereka ada solidaritas sesama orang Sasak. Malahan cakupan perlawanan kian meluas hingga desa Sakra, Batukliang, Sopang, dan Lombok Timur.

Raja Mataram memperoleh bantuan dari Raja Karangasem Bali, yakni Anak Agung Gde Jelantik, yang mengirim 4.000 pasukan pembantu. Selain itu, pihak kerajaan memblokade impor dan ekspor beras dalam upaya melemahkan kekuatan para pemberontak. Tidak hanya itu, pasukan kerajaan membangun tiga garis pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan balasan. Benteng didirikan di sepanjang Sungai Babak di Tanahbea, Narmadi, dan Kediri. Pertahanan kemudian dibangun di Cakranegara, Mataram, Linsar, dan Gunungsari beserta jalan-jalan masuknya. Pertahanan ketiga berada di sekitar kota Mataram dan Cakranegara. Kedua tempat itu dilindungi oleh dua lapis dinding bambu dan semak-semak berduri beserta meriam-meriam. Pada tanggal 29 Agustus 1891, Raja Mataram mencoba untuk melunakkan semangat perlawanan dengan membuka dialog. Ia bersama putra mahkota ikut dalam pasukan yang berada di desa Praya. Namun, keadaan yang ia saksikan tidak memungkinkan lagi menempuh jalan damai. Desa Praya tetap menolak untuk melakukan pembicaraan. Kemudian raja menempuh cara dengan melakukan pendekatan tidak langsung, melalui seorang penghulu agama bernama Haji Mohamad Ali. Ia juga seorang guru agama Guru Bangkol, sang pemimpin perlawanan, dari tarekat Nakhsabandiyah. Tampaklah bahwa Haji Mohamad Ali berada dalam posisi yang sulit. Ia diminta sebagai perantara untuk mengundang pemimpin perlawanan desa Praya itu untuk datang ke istana dan berbicara dengan raja. Ia tidak melaksanakan kehendak raja sehingga ia dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan, tetapi ia berhasil meloloskan diri dan bergabung dengan pihak perlawanan. Malahan, kubu perlawanan menjadi semakin kuat dengan bergabungnya sang tokoh karismatis itu. Dengan seruan perang jihadnya, banyak masyarakat Sasak, terutama dari desa Sakra bergabung dengan gerakan perlawanan itu.[166]

Pada tanggal 25 September 1891, para pemberontak dari wilayah Rarang, Masbagik, dan Pringgabaya menyerang pertahanan Mataram di Tanahbesa. Akan tetapi, gerak mereka terhenti, tidak dapat melintasi Sungai

---

[166] I Gde Parimartha, *Perang Praya: Faktor Pendorong dan Campur Tangan Kolonial Belanda di Lombok (1891–1894)*, Djambatan, 8, no. 3, 1990, hlm. 132

Babak yang menjadi garis pertahanan pertama kerajaan. Lalu pada tanggal 27 September 1891 pasukan pemberontak, yang berintikan desa Kopang dan Batukliang, menyerang pertahanan selanjutnya di Narmada. Namun, serangan itu tidak berhasil. Serangan berikutnya adalah dari pasukan Sakra dan Jroaru menyerang Kediri. Hasilnya tidak berbeda dengan serangan sebelumnya. Setelah itu, pasukan pihak pemberontakan mulai mengalami kemunduran. Kerugian yang diderita pada serangan-serangan yang gagal itu mulai memengaruhi kekuatan mereka. Banyak prajurit yang tewas dan luka-luka. Dalam keadaan itu, Raden Anak Agung Gde Ngurah Karangasem mulai membalas balik menyerang pertahanan pemberontak di sekitar Praya. Pada tanggal 5 Oktober 1891 pasukan Mataram menyeberangi Sungai Babak dengan kekuatan ribuan prajurit. Desa Pakukeling diratakan dengan tanah dan berlanjut ke desa Praya. Setibanya di Praya, mereka kembali memperoleh perlawanan yang sengit sehingga menyulitkan mereka. Semangat perlawanan pihak pemberontak dikobarkan oleh Guru Bangkol dan Mami Sapian dengan seruan keagamaan. Menyaksikan kekuatan pemberontak yang masih tangguh, pihak kerajaan mencari cara untuk melemahkan kekuatan mereka. Pada tanggal 29 Oktober 1891 sasaran serangan dialihkan ke daerah-daerah yang ikut membantu pemberontakan seperti Batuju. Walau akhirnya desa itu dapat ditundukkan, pasukan kerajaan kehilangan 40 prajurit, sedangkan di pihak perlawanan 200 orang tewas. Pada tanggal 9 Desember 1891 desa Sukarasa diserbu oleh 300 orang pasukan Bali. Desa itu juga jatuh ke tangan kerajaan. Kemudian kerajaan berhasil menaklukkan desa Muju pada 7 Januari 1892 dan 130 orang pemberontak tewas dalam bentrokan itu.

Berikutnya, peperangan sempat terhenti karena musim penghujan tiba. Curah hujan menyebabkan jalan-jalan yang ada tidak dapat dilalui. Namun, konsolidasi tetap dilakukan oleh kedua belah pihak. Raja Mataram menempatkan sejumlah pasukannya di desa-desa yang telah dikuasai untuk menjaga situasi. Bantuan pasukan juga ditambah. Sementara di pihak perlawanan selain memperbaiki keadaan desa yang sebagian porak-poranda akibat pertempuran sebelumnya, mereka menghimpun kekuatan dan merencanakan untuk merebut kembali daerah-daerah yang telah lepas ke pihak kerajaan. Tidak lama setelah itu pertempuran berlanjut kembali. Pada tanggal 30 Januari 1892, pemberontak dari Praya dan Sakra menyerang desa Karang, tetapi dapat dipukul mundur. Lalu pada tanggal 6 Februari pasukan pemberontak dari Kopang, Batukliang, dan Karang berusaha merebut Batujai. Akan tetapi, upaya itu tidak berhasil. Musuh terlampau tangguh untuk ditundukkan. Apalagi pada tanggal 9 Februari 1892 bala bantuan kerajaan dari Lombok Barat datang sehingga para pemberontak harus menarik diri.

Setelah itu, ketegangan dan bentrokan mulai mengendur sesaat. Setelah beberapa kali serangan tidak membuahkan hasil, pihak pemberontak lebih memilih untuk bertahan daripada terus menyerang. Selama 6 bulan hanya terjadi bentrokan-bentrokan kecil. Ketika itu pihak kerajaan berusaha menempuh cara diplomasi untuk berdamai. Raja mengirim surat kepada pemimpin pemberontak, Guru Bangkol, untuk menghentikan perlawanan. Surat itu disertai sejumlah uang 1.000 *rijkdaalders* sebagai hadiah yang diambil oleh Guru Bangkol. Akan tetapi, maksud surat itu tidak ditanggapi. Perlakuan itu merupakan tanda untuk kerajaan bahwa upaya perdamaian telah buntu. Pada bulan Agustus 1892 Mataram menyerang pertahanan Praya di Narmada dan Tanahbea. Serangan ini berhasil merebut desa itu dan terus mendesak pihak pemberontak hingga membuka jalan masuk ke jantung pertahanan mereka di Lombok Timur. Akibatnya, para pemberontak di wilayah itu menyingkir ke desa Praya dan Masbagik. Selanjutnya pada bulan September 1892 pasukan kerajaan merebut dan membakar desa Batukliang, Kopang, dan Karang sehingga mengurangi daerah kekuasaan pihak perlawanan. Pusat pemberontakan masih bergiat di desa-desa Praya, Sakra, Masbagik, Pringgabaya, dan Jroaru. Melihat kejatuhan beberapa desa itu sempat timbul kepanikan di pihak pemberontak. Banyak dari mereka yang mengungsi ke Pulau Sumbawa.

Ketegangan kembali mereda selama sekitar 8 bulan, sampai bulan Juni 1893. Tidak ada bentrokan yang berarti terjadi selain penyergapan terhadap pengiriman bahan makanan dan peralatan dari pihak kerajaan Mataram. Upaya perdamaian masih tetap diupayakan, tetapi hasilnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Pihak pemberontak bergeming menolak tawaran itu. Pada tanggal 2 Juni 1893 kekuatan kerajaan bergerak dari Kutaraja menuju desa Masbagik. Wilayah itu dipandang penting di antara daerah-daerah yang telah dikuasai. Dalam perhitungan mereka apabila daerah itu dapat direbut gerak maju penguasaan akan lebih mudah. Daerah itu juga merupakan jalur komunikasi antara Pringgabaya dengan Praya, dan Sakra dengan Jroaru sehingga harus dipotong. Dalam serangan itu pasukan Mataram berhasil menghancurkan daerah pedalaman. Desa Masbagik digempur habis-habisan hingga akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 9 Juni 1893.

Di tengah-tengah kemajuan dalam memadamkan pemberontakan itu, pihak kerajaan mendapat kesulitan lain. Dalam upaya menggalang kekuatan untuk menghadapi perlawanan itu, kerajaan menambah beban dan pungutan kepada daerah kekuasaannya di sebelah barat pulau. Masyarakat di wilayah itu merasa beban berat yang dipikul kian sehingga timbul ketidakpuasan yang berujung pada perlawanan. Pelopornya adalah

desa Sekarbela. Namun, gerakan perlawanan itu dapat segara diatasi oleh kerajaan. Dalam perkembangan selanjutnya, sampai bulan Juni 1894, kira-kira setahun lamanya, tidak ada pertempuran hebat yang terjadi. Hal ini dapat dimengerti karena orang Sasak mulai kekurangan daya untuk melancarkan serangan ke pertahanan kerajaan. Sementara pihak kerajaan juga tidak melakukan kegiatan ofensif dan lebih banyak menahan diri karena masih dibayangi oleh perlawanan desa Sekarbela. Setidaknya keadaan harus diseimbangkan agar peristiwa itu tidak berulang atau menjalar ke desa lain.

Setelah selama tiga tahun bergejolak, keadaan di wilayah Lombok Tengah, mulai dari Sungai Babak di bagian barat hingga ke timur di desa Masbagik, dan dari Kutaraja bagian utara sampai ke desa Mujur bagian selatan telah hancur lebur akibat serangan pasukan kerajaan. Penduduk wilayah ini yang berjumlah lebih kurang 100.000 orang telah melarikan diri ke daerah Praya, Sakra, dan Pringgabaya. Produksi makanan di daerah Lombok Timur yang tidak luput dari kehancuran tidak cukup untuk menyediakan bahan makanan bagi penduduk setempat maupun bagi para pengungsi. Akibatnya, terjadi kekurangan makanan yang mengganggu kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari. Keadaan ini dapat diketahui berdasarkan berita dari seorang mata-mata Bugis yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda pada bulan Februari. Ia menyatakan bahwa di banyak tempat di Lombok Timur timbul kekurangan makanan. Beras, jagung, dan bahan makanan lainnya menjadi langka bahkan akibatnya sebagian besar penduduk harus menyantap batang pohon pisang. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk itu diperkirakan apabila berlarut-larut, dalam jangka panjang, dapat memperlemah pasukan Sasak. Jelaslah dampak bentrokan itu terhadap masyarakatnya. Pertarungan itu tidak melahirkan pemenang atau kalah selain menelan jumlah korban yang cukup besar di tiap-tiap pihak. Namun, keadaan segera berubah ketika kekuatan kolonial Belanda campur tangan dalam pergolakan itu yang dilandasi kepentingan tertentu.

Hubungan kerajaan Mataram dan kolonialisme Belanda diatur melalui suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat pada bulan Juli 1843. Dalam perjanjian itu diatur bahwa kerajaan Mataram mengakui kekuasaan Belanda, tetapi tetap menjalankan kekuasaan politik internalnya. Dalam perkembangannya, kerajaan Mataram tidak mengindahkan kekuasaan Belanda. Mataram memperluas kekuasaannya hingga ke kerajaan Karangasem di Bali. Perkembangan itu menimbulkan kecurigaan Belanda bahwa Mataram hendak menguasai Bali. Tindakan itu dipandang sebagai suatu persaingan. Apalagi sikap kerajaan Mataram tidak mengindahkan

kekuasaan Belanda, seperti tidak lagi mengibarkan bendera Belanda, tetapi memakai benderanya sendiri. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk suatu keresidenan Bali dan Lombok yang berpusat di Buleleng, Bali. Sebelumnya wilayah itu merupakan bagian dari Residensi Banyuwangi.

Tidak mengherankan, perkembangan politik Mataram tidak lepas dari pengamatan Belanda. Kekuasaan Mataram dan Pulau Lombok telah lama menjadi incaran Belanda. Potensi dan perkembangan ekonominya merupakan alasan utama Belanda untuk menguasai kerajaan itu. Kesempatan itu kemudian datang ketika kerajaan Mataram sedang menghadapi perlawanan daerahnya yang dipimpin oleh desa Praya. Perkembangan gejolak politik itu diamati Belanda melalui keterangan yang disampaikan oleh Said Abdullah, seorang pedagang besar di Lombok. Ia memberi keterangan kepada Belanda karena kepentingan dagang, simpati kepada kelompok Sasak, dan ketidaksenangannya terhadap kerajaan.

Ketika perlawanan Sasak semakin meluas kesempatan untuk campur tangan terbuka lebar. Selain itu, pihak Belanda juga tidak menginginkan apabila kerajaan Mataram dikuasai oleh seorang penguasa beragama Islam. Pengalaman ekspansi di Aceh dan sejumlah pemberontakan lainnya yang dilatarbelakangi semangat Islam menjadi pertimbangan Belanda dalam menangani masalah Lombok. Apalagi sudah sejak tahun 1891 sejumlah pemuka masyarakat Sasak melayangkan surat permohonan bantuan untuk menghadapi masalah mereka dengan kerajaan Mataram. Pada saat itu Residen Bali dan Lombok, Dannenbargh berkunjung ke Lombok Timur dan bertemu dengan pemuka masyarakat Sasak. Pada kesempatan itu tujuh pemuka masyarakat Sasak menyampaikan surat memohon bantuan untuk menghadapi perlakuan dan kebijakan kerajaan Mataram terhadap mereka, kepada sang residen. Namun, mereka tidak memperoleh jawaban langsung. Pada tahun berikutnya di bulan Oktober dan November, sejumlah pemuka Sasak mengirim permintaan senada kepada residen itu. Gagasan ikut campur dalam masalah Lombok tampak pada penguatan usulan residen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Ia menyatakan bahwa apabila pasukan Belanda ikut memadamkan perlawanan itu, kerajaan Mataram akan mengakui kekuasaan kolonial. Raja Mataram dapat didesak untuk menambah butir perjanjian yang ada agar memberi keleluasaan kepada Belanda untuk menempatkan wakilnya di wilayah kerajaan itu. Namun, Gubernur Jenderal tidak segera melaksanakan usulan itu walau pokok pentingnya mendapat persetujuannya.

Pada tahun 1892, armada Belanda memblokade perairan Lombok untuk mengawasi dan mencegah pemasokan persenjataan untuk kerajaan.

Hasilnya adalah insiden di pelabuhan Ampenan dan penyergapan terhadap sejumlah kapal milik kerajaan yang dibeli di Singapura. Pada awal Mei 1892 terjadi insiden di pelabuhan Ampenan karena kapal api "Sri Mataram" yang membawa 600 prajurit dari Karangasem Bali ditahan oleh kapal perang kolonial "Jawa". Alasannya adalah prajurit dari Bali itu tidak diizinkan datang ke Pulau Lombok. Atas penahanan itu Raja Mataram memrotes residen Bali dan Lombok di Singaraja dengan menyatakan bahwa orang-orang dari Karangasem Bali dapat pergi ke Lombok demikian pula sebaliknya orang-orang dari Lombok dapat ke Karangasem. Lalu lintas kunjungan itu sudah berlangsung sejak dahulu. Adapun pelarangan itu tidak termaktub dalam kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda. Raja Mataram juga memrotes penahanan kapal api "Sri Cakra" pada bulan Juni 1892 yang sedang membawa prajurit bantuan dari Karangasem. Kedua kapal itu adalah milik kerajaan Mataram yang dibeli di Singapura melalui pedagang perantara Arab. Bantuan prajurit kerajaan memang diberikan oleh Karangasem Bali kepada kerajaan Mataram terutama dalam upaya menumpas pemberontakan Praya. Laskar bantuan itu langsung dipimpin oleh I Gusti Gde Jelantik yang adalah penguasa kerajaan Karangasem Bali ketika itu. Sebenarnya berdasarkan perjanjian tahun 1843, kerajaan Mataram dapat meminta bantuan Belanda. Akan tetapi, Raja Mataram menyadari akibat-akibat yang akan timbul jika melakukan perbuatan itu. Selanjutnya, sebagai balasan, kerajaan Mataram melarang kaulanya untuk memasok kebutuhan dan perlengkapan untuk kapal perang Belanda yang merapat di pelabuhan Ampenan.[167] Tindakan itu menambah ketidak-senangan Belanda terhadap Mataram.

Selanjutnya, pada bulan Juli 1893 pihak kolonial Belanda mendesak kerajaan Mataram untuk mematuhi ketentuan yang mereka berlakukan itu. Namun, campur tangan itu ditolak. Belanda tidak dapat menerima sikap itu yang dipandang sebagai sebuah arogansi politik. Di balik penolakan itu terbersit dugaan bahwa sebenarnya kerajaan Mataram tidak lagi mengakui kekuasaan Belanda. Puncaknya adalah surat ultimatum Gubernur Jenderal van der Wijck kepada kerajaan Mataram tertanggal 27 Mei 1894 yang berisikan beberapa tuntutan keras. Surat itu diserahkan oleh residen Bali dan Lombok kepada Raja Mataram. Tuntutan itu adalah sebagai berikut.

1. Pernyataan tuntutan secara jujur atas sikap yang tidak patut dan secara berulang kali dilakukan kepada gubernur jenderal dan petugas-petugasnya.

[167] I Gde Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815–1915*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2002, hlm. 344

2. Jaminan yang resmi bahwa pemerintah raja-raja mulai saat itu akan mematuhi segala perintah gubernur jenderal.
3. Penyerahan segera Anak Agung Made Karangasem agar segera dapat diasingkan ke pulau lainnya sebab segala kerusuhan adalah akibat perbuatannya.
4. Menerima segala usaha residen untuk mengakhiri keadaan yang kacau dan berjanji akan tunduk pada peraturan yang ditetapkan.[168]

Batas waktu yang diberikan adalah tanggal 11 Juni 1894. Raja Mataram tidak dapat segera membalas tuntutan itu, apalagi menyangkut pengakuan kekuasaan Belanda di Lombok dan menyerahkan putranya untuk diadili. Sementara raja sedang mempertimbangkannya, residen yang membawa surat itu hanya memberi waktu selama tiga hari untuk berpikir. Permintaan penundaan tidak digubris oleh Dannenbargh, hingga waktu yang diberikan pun telah habis. Raja Mataram tidak dapat memberikan jawabannya segera, yang diartikan oleh pihak kolonial Belanda sebagai pembangkangan. Sementara tuntutan itu belum dijawab semuanya, tersebar kabar burung di kalangan keluarga raja dan masyarakat Bali bahwa Anak Agung Made Karangasem berbuat serong dengan kemenakannya yang bernama Anak Agung Ayu Made Rai. Menurut adat Bali perbuatan tidak senonoh itu disebut *gamya-gamana* atau *incest*, sedangkan pelakunya harus dihukum mati dan mayatnya dilempar ke laut. Ada kemungkinan bahwa kemudian Anak Agung Made Karangasem bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu.

Ketika saat batas waktu tiba dan tidak ada tanggapan yang diberikan, sebuah ekspedisi militer bertolak menuju Ampenan. Ekspedisi yang berkekuatan ratusan perwira, ribuan prajurit, dan personal lainnya berangkat dengan 3 buah kapal perang, yaitu "Prins Hendrik", "Koningin Emma", "Tromp", dan dua kapal lainya "Borneo" dan "Sumatra".[169] Pasukan itu dipimpin oleh Mayor Jenderal J.A. Vetter, sebagai panglima, dan Mayor Jenderal P.P.H. van Ham, selaku wakil panglima. Pada tanggal 5 Juli 1894 ekspedisi itu sampai tujuan. Segera pesan dikirim kepada pihak kerajaan, melalui residen, agar memenuhi tuntutan itu. Tidak lama kemudian, utusan kerajaan datang ke kapal yang menyampaikan permintaan agar batas waktu menjawab ditunda mengingat waktu hanya

---

[168] A van der Kraan, *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment 1870–1940*, Kuala Lumpur/Hong Kong, Heinemann Educational Books, Ltd, 1980, hlm. 48

[169] Lalu Wacana dkk., *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Barat*, Jakarta, Proyek IDSN Ditjarahnitra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/84, hlm. 24

24 jam tidaklah cukup untuk mengambil keputusan. Raja hendak bertemu dan berbicara dengan residen, tetapi ditolak karena Belanda hanya ingin mendengar jawabannya segera. Pihak kerajaan Mataram masih berusaha menempuh jalan perundingan, termasuk ketika pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan. Utusan kerajaan menyampaikan pesan bahwa pendaratan itu telah menyebabkan kepanikan masyarakat dan meminta agar pasukan itu kembali ke kapal mereka. Pihak Belanda yang memang bertujuan hendak menyerang, tidak menanggapi kehendak itu. Juga usulan berunding tidak diladeni.

Sebelum bergerak masuk ke kerajaan Mataram, panglima pasukan Belanda mempelajari keadaan terlebih dahulu. Ia mengirim pasukan di bawah komando Letnan Kolonel Bijlevelt pada tanggal 8 Juli 1894 mendekati pertahanan kerajaan. Pasukan itu bertemu dengan I Gusti Gde Jelantik di Sekarbela yang memimpin 1.200 prajuritnya. Pasukan Bali itu datang untuk membantu Mataram memadamkan pemberontakan Praya. Di antara keduanya berlangsung pembicaraan yang mengarah kepada kesediaan raja Karangasem Bali itu menjadi perantara antara Belanda dan Mataram. Menyaksikan kekuatan pasukan Bali yang cukup besar itu, Bijlevelt menempuh cara taktis. Melalui perantaraan itu, kesediaan Raja Mataram dapat diperoleh. Namun, ia tidak dapat memenuhi permintaan untuk menyerahkan putranya karena Anak Agung Made Karangasem telah tewas sehubungan dengan kasus perzinahan yang melanggar adat istiadat itu. Namun, pihak Belanda tidak serta merta percaya atas keterangan itu. Kontrolir Liefrinck dan dua punggawa asal Buleleng dikirim ke dalam istana untuk membuktikan kematian tersebut. Sementara pasukan Belanda tetap bergerak menuju istana. Mereka membangun tenda peristirahatan di sekitar puri Mataram dan Cakranegara. Pasukan Sasak diharapkan meletakkan senjata mereka dan menghentikan perlawanan. Pihak Belanda mengambil peran sebagai penengah dalam bentrokan itu. Perundingan dengan raja Mataram mengenai penyelesaian pemberontakan Praya dilakukan. Hasil perundingan itu tercapai pada tanggal 9 Agustus 1894, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Rakyat Sasak diperbolehkan membentuk pemerintahan sendiri dan bersama dengan kerajaan Mataram berada di bawah kekuasaan Belanda.
b. Kewajiban raja Mataram membayar kerugian perang sebesar satu juta gulden yang harus diselesaikan sebelum ekspedisi Belanda meninggalkan Lombok.
c. Raja wajib menyerahkan upeti sebesar f250.000 kepada pemerintah Hindia Belanda.

Tentu saja penyelesaian seperti itu merugikan kerajaan Mataram. Tampak jelas niat Belanda yang hendak menguasai Pulau Lombok. Walau di atas kertas hasil perundingan itu tidak menemui penolakan, tetapi di bawah permukaan arus rasa ketidakpuasan mulai muncul. Pihak kerajaan Mataram sangat menyadari akibat-akibat yang timbul setelah perundingan itu. Ketegangan mulai melanda pihak kerajaan Mataram dalam menanggapi campur tangan Belanda yang dinilai telah melampaui batas. Ketegangan itu tidak berlangsung lama oleh karena beberapa saat kemudian adu senjata segera meletus.

Bersamaan dengan pembicaraan itu, pasukan kerajaan sudah siap berjaga-jaga di sekitar tempat di mana tentara Belanda mendirikan tenda hunian di Mataram dan Cakranegara. Pada malam hari tanggal 25 Agustus 1894, terjadi penyerangan terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda yang ada di Cakranegara dan Mataram oleh pasukan Mataram. Segera perang di antara kedua pasukan meledak. Pasukan Mataram yang dibantu pasukan Bali berhasil memukul mundur tentara Belanda di kedua tempat itu yang kekuatannya lebih kecil. Sebagian tentara Belanda disebar ke sejumlah tempat di Lombok Timur dan Lombok Barat. Dalam peristiwa itu sekitar 30 tentara Belanda meregang nyawa dan ratusan lainnya terluka. Malahan wakil panglima pasukan Belanda Mayor Jenderal van Ham tewas. Akibatnya, tentara Belanda makin menggencarkan serangan-serangan terhadap Cakranegara dan Mataram. Pertempuran lainnya terjadi seperti di Wanasara, Banjar Mantri, Banjar Pande, dan Karang Jesi yang menelan banyak korban di kedua belah pihak. Pasukan Mataram menyergap pasukan Belanda di bawah komando Letnan Kolonel L. van Pabst di Purwa Kerta. Mereka mengepung pasukan lawan dan menembaki mereka yang berada dalam keadaan tidak berdaya menjadi sasaran empuk. Sementara pasukan Mataram menembak dari atas pohon dan celah-celah tembok tempat tentara Belanda melintas. Tidak kurang tiga perwira Belanda tewas dan sejumlah lainnya menderita luka. Bahkan, ada perwira yang dinyatakan hilang dalam kontak senjata itu. Pasukan Mataram berhasil menawan tentara Belanda yang menghentikan perlawanan mereka. Tidak beberapa lama tawanan itu dibebaskan oleh kerajaan Mataram.

Kerugian yang diderita itu, terutama kematian Mayor Jenderal van Ham, menyadarkan pihak Belanda betapa mereka meremehkan kemampuan dan peralatan tempur pasukan lawan. Mereka mengira bahwa lawan yang dihadapi tidak lebih pasukan yang bersenjatakan tombak, parang, atau senjata tradisonal lainnya. Dalam kenyataannya, pasukan Mataram juga memiliki senapan dan persenjataan modern lainnya. Selain itu, mereka berharap pihak pemberontak Sasak akan membantu

menghadapi pasukan kerajaan yang menjadi musuh bersama. Pasukan perlawanan Sasak tidak membantu mereka. Ketika mengevaluasi peristiwa baku tembak itu, komandan pasukan Belanda tidak dapat memastikan apa dan siapa pemicunya. Karena kekuatannya sudah tidak memadai untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Mataram, Vetter mengirim permintaan bantuan kepada gubernur jenderal. Sementara menanti bantuan itu, pasukan Belanda tetap menyerang pertahanan dan permukiman kerajaan melalui tembakan meriam. Hujanan gempuran meriam dari arah pantai menghantam beberapa tempat di wilayah kerajaan Mataram.

Pada tanggal 3 September 1894 bantuan yang ditunggu tiba. Jenderal Sagov dan Kolonel J.J.K. de Moulin memimpin bala tentara bantuan itu. Kekuatan ekspedisi kedua itu melebihi yang pertama. Sebelum melakukan penyerangan, pasukan Belanda mencoba mendekati pemuka masyarakat Sasak untuk membantu mereka. Seruan itu tidak memperoleh tanggapan luas di kalangan masyarakat Sasak. Hanya sejumlah desa memenuhi seruan itu, tetapi tidak sepenuh hati walau mereka diberi senjata. Guru Bangkol yang memimpin perlawanan terhadap kerajaan Mataram tidak bersedia membantu Belanda. Pendekatan juga dilakukan melalui pasukan bantuan yang berasal dari Madura. Karena solidaritas berdasarkan latar belakang agama yang sama, pasukan Sasak itu bersedia bertempur di pihak Belanda. Pada tanggal 6 September 1894 batalion di bawah komando Kolonel Swart mulai melancarkan operasi militernya menyerang pertahanan kerajaan Mataram.

Dalam temu senjata itu kekuatan kerajaan Mataram mulai melemah karena belum pulih sepenuhnya dari pertempuran yang berkepanjangan dengan perlawanan Sasak, dari desa Praya dan lainnya. Pasukan Bali di bawah pimpinan I Gusti Gde Jelantik juga telah meninggalkan Pulau Lombok. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik itu yang tentu tidak menguntungkannya menghadapi militer Belanda. Walau begitu pasukan Mataram tidak mundur selangkah pun. Namun, gerak pasukan Swart di Arong-arong tidak dapat ditahan lebih lama. Apalagi mereka dihujani tembakan gencar oleh meriam-meriam Belanda. Satu per satu daerah kerajaan Mataram jatuh ke tangan pasukan Belanda yang meninggalkan korban tidak sedikit. Pertahanan di sekitar puri Mataram dan Cakranegara berhasil ditembus oleh pasukan penyerang. Puri Mataram jatuh ke tangan Belanda pada serbuan tanggal 29 September 1894. Putra mahkota kerajaan Anak Agung Ketut Karangasem tewas dalam upaya mempertahankan kerajaan dari serbuan itu. Dengan jatuhnya pertahanan dan puri kerajaan itu, jalan masuk menuju puri Cakranegara semakin terbuka. Pada tanggal 18 Oktober 1894 puri itu mulai menjadi sasaran penyerangan tentara Belanda.

3. Akhir Perang

Tidak kurang dari enam batalion pasukan, enam divisi pendaratan, detasemen kavaleri, dan artileri beserta perlengkapan senjata berat dipersiapkan untuk menyerbu pertahanan terakhir kerajaan itu. Pasukan Belanda dibagi ke dalam empat bagian, yang masing-masing dipimpin oleh Mayor Jenderal Sagov, Kolonel Swart, Letnan Kolonel Scener, dan Mayor Willems. Dengan taktik itu, sasaran penyerbuan diserang dari sejumlah arah yang sulit untuk lawan meloloskan diri. Komando pasukan Belanda merancang serbuan itu sebaik mungkin mengingat kekalahan yang mereka derita pada peristiwa tanggal 25 Agustus 1894. Setelah persiapan yang dilakukan itu dirasakan cukup, perintah menyerang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1894. Sejak pagi bentrokan bersenjata berlangsung dengan seru. Pasukan Mataram melakukan perlawanan hebat bertahan hingga sore hari. Pasukan Mataram berhasil memukul mundur pasukan Belanda walau puri Cakranegara dihujani tembakan meriam dan mortir. Pada keesokan harinya serbuan diulang kembali. Serangan lebih digencarkan sehingga pasukan Mataram yang kebanyakan menyandang senjata tradisional tidak dapat menahan serbuan itu lebih lama. Puri Cakranegara kemudian diduduki tentara Belanda. Keluarga kerajaan pun menyingkir ke Saksari. Namun, pasukan Belanda tetap mengejar mereka. Pada tanggal 20 November 1894 Saksari dikepung dan raja beserta beberapa anggota keluarganya menyerah kepada pasukan Belanda. Namun keluarga kerajaan lainnya tetap melakukan perlawanan, malahan surat dari Raja Anak Agung Gde Ngurah untuk menyerah atas tekanan Vetter tidak diindahkan. Perlawanan terus berlangsung.

Puncak pertempuran berlangsung pada tanggal 22 November 1894 di desa Saksari. Semua pengikut setia Raja Mataram melakukan *puputan*, yaitu bertempur melawan musuh sampai mati, termasuk keluarga Anak Agung Ketut Karangasem bersama tujuh putrinya. Perlawanan lainnya dari sejumlah bangsawan dapat ditundukkan hingga seluruh perlawanan pun berakhir. Pada tanggal 26 November, Raja Anak Agung Gde Ngurah Karangasem beserta sejumlah kecil pengikutnya ditangkap dan dibawa ke kapal "Prins Hendrik" untuk bertolak ke tempat pengasingannya di Batavia. Ia meninggal di tempat pengasingannya pada tahun 1896. Puputan Saksari dan pengasingan raja Mataram menandai akhir kekuasaan kerajaan Mataram Lombok.

Peristiwa puputan Saksari kemudian diabadikan oleh seorang pujangga Jerman dari akhir abad ke-19, yang bernama Theodor Fontane

(1819–1898) dalam sebuah balada. Syair itu berbahasa Jerman, *Die Balinesenfrauen auf Lombok*, yang terjemahannya berbunyi:[170]

Perempuan-perempuan Bali di Pulau Lombok

Terlalu!
Di Lombok penduduk ngamuk
Di Pulau Lombok orang Bali
Berontak terhadap si Meneer

Dan meneer-meneer dicekam murka dan cemas:
"Matikan api itu, cepat dan jangan ragu!"
Sembarang orang, yang beringas, yang bejat.
Jadi sewaan para Meneer-serdadu
Orang sembarang, berbedil Mauser,
Diperintah bikin tobat orang Bali.
Maju tiada rencana, tiada guna;
Serangannya juga simpang siur;
Bedil-bedil bagus kerjanya
Semua pemberontak tersungkur bersimbah darah

Yang lelaki. Tapi serdadu-serdadu tertegun
Memandang masih enam puluh perempuan anggun,
Semua siap tempur dan bertahan
Berkepung di naungan candi Budha
Berpakaian terindah, berhiaskan emas,
Mendekap anak bungsu di dada,
Mereka semua berdiri tegap,
Mengawasi musuh, mencekam keris.

Peluru-peluru menerpa atap dan tangga-
"Apa gunanya menunggu, takut dan tak berdaya?"
Maka pintu diseruak dan berhamburlah ke lembah,
Anak dijunjung tinggi, keris terhunus tinggi
(Permata membersit di hulu)

---

[170] Terjemahan Dra. Elizabeth Korah-Go, dalam www.geocities.com/tersaji/fontane.html.200719

Begitulah mereka menyerbu barisan musuh,
Separuh gugur, separuh terkapar luka,
Namun semua bertekad mati kini di saat sama,
Yang terakhir bangga kemrasuk mati,
Menghujam keris di dada sendiri.

Sementara si Meneer di ruang kantornya,
Berdalih kristiani memperabad budaya

Bab VI
Perkembangan Ekonomi

A. Sistem Sewa Tanah

1. Pendahuluan

Tidak lama setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels dari Indonesia, Jawa diduduki oleh Inggris dalam tahun 1811. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung selama lima tahun, yaitu antara tahun 1811 dan 1816. Akan tetapi, selama waktu itu telah diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat memengaruhi sifat dan arah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris.

Asas-asas pemerintah sementara Inggris itu ditentukan oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakikatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda (VOC) dalam rangka kerja sama dengan raja-raja dan para bupati. Secara konkret Raffles ingin menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani. Kepada para petani ini Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha.

Jelas kiranya bahwa Raffles dalam hal ini telah dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Prancis dengan semboyannya mengenai "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" bagi setiap warga, walaupun ia tentu menyadari pula dalam konstelasi masyarakat kolonial yang ada di Jawa, tidak dapat sepenuhnya mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam hal ini, pandangan Raffles dalam banyak hal sama dengan pandangan seorang pejabat Belanda dari akhir zaman VOC, yaitu Dirk van Hogendorp. Tokoh tersebut telah menarik kesimpulan dari pengamatannya di Indonesia bahwa sistem feodal yang terdapat di Indonesia pada waktu itu dan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh VOC mematikan segala daya usaha rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar kekuasaan, khususnya hak kuasa tanah para bupati atas rakyat, dibatasi. Seperti diketahui, untuk

mencapai tujuannya dalam memperoleh hasil-hasil bumi Indonesia, Kompeni telah mempergunakan raja-raja dan para bupati sebagai alat dalam kebijakan dagangnya. Sebagai pengganti sistem paksa yang berlaku hingga waktu itu, van Hogendorp menganjurkan agar para petani diberi kebebasan penuh dalam menentukan tanaman-tanaman apa yang hendak ditanam mereka maupun dalam menentukan bagaimana hasil panen mereka hendak dipergunakan. Di bawah sistem VOC kebebasan ini tidak ada.

Raffles sendiri menentang sistem VOC karena keyakinan-keyakinan politiknya, yang sekarang dapat disebut liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem ekploitasi seperti yang telah dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Apa yang dikehendakinya sebagai pengganti sistem Kompeni adalah suatu sistem pertanian yang atas kehendak sendiri menanam tanaman dagangan (*cash crops*) yang dapat diekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah kolonial hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasar yang diperlukan guna merangsang para petani untuk menanam tanam-tanaman ekspor yang paling menguntungkan.

Dalam usahanya untuk menegakkan suatu kebijakan kolonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada tiga asas. *Pertama*, segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apa pun juga. *Kedua*, peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai pengantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri-negeri Barat. Secara konkret hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala-kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. *Ketiga*, berdasarkan anggapan bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (*tenant*) tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah (*land-rent*) atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya yang dijadikan dasar kebijakan ekonomi pemerintah Inggris di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintah Belanda sampai tahun 1830.

Sistem sewa tanah yang kemudian dikenal dengan nama *landelijk stelsel* bukan saja diharapkan dapat memberikan kebebasan dan kepastian hukum kepada para petani dan merangsang juga arus pendapatan negara yang mantap.

Pelaksanaan sistem sewa tanah mengandung konsekuensi-konsekuensi yang jauh sekali atas hubungan antara pemerintah kolonial di satu pihak dan rakyat Indonesia dengan penguasa-penguasanya di lain pihak. Perubahan yang dipertimbangkan itu malahan dapat dikatakan revolusioner karena mengandung perubahan asasi, yaitu dihilangkannya unsur paksaan atas rakyat dan digantikan dengan suatu sistem di mana hubungan ekonomi antara pemerintah di satu pihak dan rakyat di lain pihak didasarkan atas kontrak yang diadakan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Jadi, perubahan ini pada dasarnya bukan merupakan perubahan ekonomi semata-mata, melainkan lebih penting lagi, yaitu merupakan suatu perubahan sosial-budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat yang tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dengan demikian, dasar kehidupan masyarakat Jawa yang tradisional hendak digantikan dengan dasar kehidupan masyarakat seperti yang dikenal di negara-negara Barat. Demikian pula ekonomi masyarakat Jawa yang tradisional dan feodal itu hendak digantikan dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang bebas.

2. Pelaksanaan

Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh Pulau Jawa. Di daerah sekitar Jakarta, yang pada waktu itu disebut Batavia, maupun di daerah Priangan, sistem sewa tanah tidak diadakan karena di wilayah sekitar Jakarta, umumnya tanah-tanah dimiliki oleh swasta dengan status tanah partikelir, sedangkan di wilayah Priangan, pemerintah kolonial berkeberatan menghapus sistem tanah paksa kopi (*preanger stelsel*) yang memberikan keuntungan besar. Jelas kiranya bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Oleh karena itu, daerah Priangan tidak pernah mengenal suatu fase menengah yang agak bebas di antara dua masa yang dicirikan oleh unsur paksaan dalam kehidupan ekonomi, seperti telah dikenal oleh daerah-daerah lain di Jawa, melainkan terus-menerus hanya mengenal sistem tradisional dan feodal sampai pada tahun 1870.

Mengingat Raffles hanya berkuasa untuk waktu yang singkat di Jawa, yaitu lima tahun, dan mengingat terbatasnya pegawai-pegawai yang cakap serta dana yang terbatas pula, tidak mengherankan Raffles pada akhirnya tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah itu. Meskipun demikian, gagasan-gagasannya mengenai kebijakan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang bertalian dengan sewa tanah, sangat memengaruhi pandangan pejabat-pejabat pemerintah Belanda

yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas Pulau Jawa dari pemerintah Inggris.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan van der Capellen (1816–1819), kemudian di bawah Gubernur Jenderal van der Capellen (1819–1826), dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826–1830). Sistem sewa tanah dihapuskan dengan kedatangan seorang gubernur jenderal yang baru, van den Bosch, dalam tahun 1830, yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien daripada di bawah VOC. Masalah itu baru dibahas pada bagian berikutnya.

Pelaksanaan sistem sewa tanah mengandung tiga aspek, yaitu penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar modern (baca: Barat), pelaksaan pemungutan sistem sewa, dan penanaman tanaman dagangan untuk diekspor.

Mengenai aspek yang pertama, yang dimaksud Raffles dengan pemerintahan yang modern, adalah penggantian pemerintahan-pemerintahan tidak langsung yang dahulu diselenggarakan melalui raja-raja dan kepala-kepala tradisional dengan suatu pemerintahan yang langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala-kepala tradisional sangat dikurangi dan sumber-sumber penghasilan mereka yang tradisional dihilangkan. Fungsi-fungsi tradisional yang mereka tunaikan pada waktu itu, sekarang dilakukan oleh pegawai-pegawai Eropa, yang jumlahnya bertambah banyak. Oleh Raffles diadakan fungsi asisten residen, yang bertugas mendampingi dan mengawasi para bupati, dan "pengawas penghasilan yang diperoleh dari tanah" (*opzieners der landelijke inkomsten*), yang kemudian disebut pengawas pamong praja (*controleur van het Binnenlands Bestuur*).

Dengan bertambahnya pengaruh pejabat-pejabat bangsa Eropa, pengaruh para bupati pribumi makin berkurang. Malahan di antara pejabat-pejabat Eropa timbul pikiran menghilangkan sama sekali jabatan bupati. Tidak mengherankan jika perkembangan ini sangat menggelisahkan para bupati, yang sebelum Raffles mempunyai kekuasaan dan gengsi sosial yang amat besar.

Pada waktu van der Capellen menerima jabatan sebagai gubernur jenderal dalam pemerintahan Belanda yang telah dipulihkan, pengaruh bupati sudah sangat berkurang dibandingkan dengan zaman VOC. Namun, van der Capellen menyadari bahwa mereka mempunyai pengaruh tradisional

yang besar atas rakyat dan ia menyadari pula bahwa pejabat-pejabat Eropa tidak pernah dapat menggantikan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat Jawa. Oleh karena itu, ia menempuh kebijakan yang menghormati kedudukan sosial para bupati dan berusaha pula menggunakan pengaruh dan kekuasan mereka untuk tujuan-tujuan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, tidak dapat dihindarkan bahwa secara lambat laun kekuasaan efektif telah bergeser dari para bupati pejabat-pejabat Eropa.

Hal ini jelas kelihatan dalam hubungan kekuasaan para bupati atas tanah. Bukan saja atas tanah yang mereka peroleh, melainkan menurut kebiasaan adat mereka dan juga pekerjaan rodi dari penduduk yang tinggal di atas tanah. Di bawah Raffles, kebiasaan ini dihapus dan para bupati kemudian diberi gaji dalam bentuk uang untuk jasa-jasa mereka pada pemerintah kolonial. Dengan putusnya hubungan antara bupati dan tanah, lenyap pula kewajiban rakyat untuk melakukan penyerahan wajib pekerjaan rodi untuk para bupati.

Dalam menilai keberhasilan perubahan yang dilakukan dalam kedudukan para bupati, dapat dikatakan bahwa secara marginal memang terjadi pembatasan dalam kekuasaan para bupati. Hal ini misalnya jelas dari beberapa pengaduan yang telah dilakukan oleh rakyat terhadap kepala-kepala mereka jika mereka mengalami apa yang mereka rasakan sebagai tindakan sewenang-wenang. Akan tetapi, pada umumnya kebiasaan-kebiasaan yang tradisional maupun penghormatan yang tradisional dari rakyat terhadap kepala-kepala mereka tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan keputusan-keputusan orang-orang asing, meskipun orang-orang yang terakhir ini mempunyai kekuasan politik yang efektif. Hal ini misalnya terlihat dalam kewajiban rakyat untuk melakukan pekerjaan paksa atau rodi untuk kepala-kepala mereka. Meskipun pemerintah kolonial secara resmi telah menghapus kebiasaan ini, kebiasaan ini tetap diteruskan.

Selanjutnya adalah mengenai aspek kedua, yaitu pelaksanaan pemungutan sewa tanah. Selama zaman VOC, "pajak" berupa beras yang harus dibayar oleh rakyat Jawa kepada VOC ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Dalam mengatur pungutan wajib ini para kepala desa oleh VOC diberikan kebebasan penuh untuk menetapkan jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh tiap-tiap petani. Sudah barang tentu kebiasaan ini mengakibatkan tindakan-tindakan sewenang-wenang yang sering merugikan rakyat. Sebagai seorang liberal, Raffles menentang kebiasaan ini. Berdasarkan keyakinannya bahwa penduduk Jawa harus dapat menikmati kepastian hukum, ia mempertimbangkan penetapan pajak secara perseorangan. Peraturan mengenai penetapan pajak tanah yang harus dibayar

oleh perseorangan dan bukan lagi oleh desa sebagai keseluruhan dikeluarkan pada tahun 1814. Daerah pertama yang terkena peraturan ini adalah Banten.

Tidak lama kemudian, pelaksanaan pemungutan pajak secara perseorangan mengalami banyak kesulitan. Salah satu faktor yang penting dalam hal ini adalah tidak tersedianya bahan-bahan keterangan yang baik dan dapat dipercayai untuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh tiap-tiap orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa penetapan pajak tidak dilakukan dengan tepat sehingga sering memperberat beban pajak untuk rakyat, bukan memperingan seperti dimaksudkan Raffles.

Kesulitan-kesulitan ini mengakibatkan dalam tahun 1816, sewaktu kekuasaan atas Pulau Jawa telah dikembalikan kepada Belanda, para komisaris jenderal menghapus penetapan pajak secara perseorangan dan kembali lagi ke penetapan pajak secara kolektif untuk tiap-tiap desa sebagai keseluruhan. Sudah barang tentu dengan penggunaan prosedur pemungutan pajak cara ini, penetapan pajak secara sewenang-wenang muncul kembali, walaupun tidak sehebat ekses-ekses yang terjadi selama zaman VOC.

Aspek ketiga sistem tanah adalah promosi penanaman tanaman-tanaman perdagangan untuk ekspor. Sampai seberapa jauh pelaksanaan sistem sewa tanah berhasil memajukan penanaman tanaman-tanaman dagangan untuk ekspor ke luar negeri? Pengalaman menunjukkan bahwa pada umumnya eksperimen ini telah mengalami kegagalan. Penanaman kopi misalnya, yang pada awal abad ke-19 merupakan tanaman perdagangan terpenting di Jawa, di bawah sistem sewa tanah mengalami kemunduran yang berarti. Perkembangan yang sama juga terlihat pada tanaman dagang lainnya, seperti gula dan lain-lain. Salah satu sebab kegagalan ini adalah kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasar bebas sehingga sering penjualan ini diserahkan kepada kepala-kepala desa mereka. Hal ini mengakibatkan kepala-kepala desa sering menipu petani itu sendiri atau si pembeli sehingga akhirnya pemerintah kolonial terpaksa campur tangan lagi dengan mengadakan lagi penanaman paksa bagi tanaman-tanaman perdagangan.

3. Penilaian

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku, baik selama pemerintah sementara Inggris di bawah Raffles maupun selama pemerintah Belanda di bawah para komisaris jenderal dan Gubernur Jenderal van der Capellen, menunjukkan bahwa usaha untuk

mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil. Mau tidak mau struktur feodal yang berlaku di masyarakat tradisional Jawa, khususnya gengsi sosial yang dimiliki para bupati dan kepala-kepala desa, perlu dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial jika mereka mau mencapai tujuan mereka untuk mendorong penduduk menanam tanaman perdagangan yang diinginkan. Oleh karena itu, gambaran yang diperoleh mengenai pelaksaan sistem tanah ini tidak merata (*uneven*). Kadang-kadang di beberapa tempat memang terdapat penanaman secara bebas, tetapi sering penanaman bebas ini formalitas belaka.

Sistem sewa tanah memang mengakibatkan lebih meresapnya pengaruh politik maupun pengaruh sosial sampai batas tertentu ke dalam masyarakat Jawa, terutama karena usaha mengesampingkan para bupati untuk langsung berhubungan dengan para petani. Namun, kita melihat bahwa hal ini tidak sepenuhnya berhasil dan bahwa dalam berbagai hal ikatan-ikatan tradisional masih perlu dimanfaatkan. Walaupun para bupati dapat dikesampingkan, hal yang sama tidak dapat dilakukan pada kepala-kepala desa yang perannya sangat dibutuhkan untuk pemungutan pajak tanah. Oleh karena itu, usaha sistem sewa tanah untuk mengadakan hubungan langsung dengan para produsen tanaman dagangan itu sendiri tidak berhasil.

Ditinjau dari tujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di Jawa dan merangsang produksi tanaman dagangan, sistem sewa tanah dapat dikatakan telah menemui kegagalan. Usaha-usaha untuk menghapus struktur masyarakat yang tradisional (feodal) dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada penduduk pun tidak berhasil.

Dalam menyelidiki sebab-sebab kegagalan ini, kita perlu mengamati lebih jauh pertimbangan-pertimbangan atau motif-motif Raffles dalam memperkenalkan sistem sewa tanah di Jawa. Dalam halaman sebelumnya sudah disinggung bahwa dalam menggariskan kebijakan, Raffles sangat dipengaruhi oleh asas-asas kolonial Inggris yang telah ditempuh di India. Kesalahan-kesalahan Raffles adalah bahwa ia mungkin telah melebih-lebihkan persamaan-persamaan yang menurutnya terdapat antara India dan Jawa, sedangkan sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan yang besar dalam susunan masyarakat maupun dalam tingkat perkembangan ekonomi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi India adalah lebih tinggi daripada di Jawa. India misalnya, sudah mengenal ekonomi uang (*money economy*) sejak abad ke-16. Demikian pula antara berbagai daerah di India terdapat lalu lintas perdagangan yang ramai, yang menunjukkan bahwa desa-desa di India bukan merupakan desa-desa yang hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Bahkan India juga mengenal perdagangan ekspor yang cukup ramai.

Dibanding dengan India, gambaran ekonomi Jawa pada awal abad ke-19 masih menunjukkan gambaran ekonomi yang menyeluruh. Bahkan sebaliknya hanya berdasarkan yang terlihat, yaitu desa-desa yang pada umumnya hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri tanpa banyak mengadakan perdagangan apalagi perdagangan ekspor.

Selain kopi, yang diperoleh dari penanaman paksa, Jawa pada awal abad ke-19 hanya mengekspor beras dalam jumlah yang terbatas dan beberapa barang lainnya yang tidak begitu berarti, yang pada umumnya diekspor ke kepulauan Maluku.

Uraian di atas telah memperlihatkan mengapa kebijakan Raffles, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda sampai tahun 1830, mengalami kegagalan. Berlainan dengan rakyat India, penduduk di Jawa tidak dapat menghasilkan tanaman-tanaman untuk diekspor atas usaha dan praktik mereka sendiri. Jika mereka tidak mendapat perintah dari atasan mereka, mereka tidak akan menanam tanaman dagangan yang menguntungkan sekalipun, tetapi hanya tanaman makanan. Hal ini sesuai dengan sifat ekonomi desa di Jawa yang bersifat memenuhi kebutuhan sendiri (*self sufficient*).

B. Sistem Tanam Paksa

1. Pendahuluan

Dalam bagian pertama kita telah melihat bahwa sistem pajak tanah, yang telah diintroduksi oleh Raffles dan kemudian diteruskan oleh para Komisaris Jenderal van der Capellen dan Du Bus de Gisignies, telah mengalami kegagalan, antara lain dalam merangsang para petani untuk meningkatkan produksi tanaman-tanaman perdagangan untuk ekspor.

Dalam tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Johannes van den Bosch, yang diserahi tugas utama meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Dalam membebankan van den Bosch dengan tugas yang tidak mudah ini, pemerintah Hindia Belanda terutama terdorong oleh keadaan parah keuangan negeri Belanda. Hal ini disebabkan *budget* pemerintah Belanda dibebani utang-utang yang besar. Oleh karena masalah yang berat ini tidak dapat ditanggulangi oleh Belanda sendiri, pemikiran timbul untuk mencari pemecahan-pemecahannya di koloni-koloninya di Asia, yaitu di Indonesia. Hasil pertimbangan-pertimbangan ini menjadi gagasan Sistem Tanam Paksa yang diintroduksi oleh van den Bosch sendiri.

Pada dasarnya, Sistem Tanam Paksa yang pada zaman Belanda terkenal dengan nama *Cultuurstelsel*, berarti pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktikkan oleh VOC dahulu. Raffles telah mencoba mendorong para petani di Jawa untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor mereka dengan jalan membebaskan mereka dari penyerahan-penyerahan wajib dan dengan memberikan mereka perangsang-perangsang positif, yaitu setelah mereka melunasi kewajiban pembayaran sewa tanah (*land rent*) sehingga mereka dapat memperoleh hasil bersih dari penjualan hasil-hasil pertanian mereka sendiri. Kegagalan sistem pajak tanah meyakinkan van den Bosch bahwa pemulihan sistem penyerahan wajib dilakukan untuk memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapat diekspor ke luar negeri. Selain itu, pengalaman selama sistem pajak tanah berlaku telah memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak dapat menciptakan hubungan langsung dengan para petani yang secara efektif dapat menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki tanpa mengadakan hubungan lebih dahulu dengan para bupati dan kepala-kepala desa. Artinya, ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang berlaku di daerah perdesaan masih perlu dimanfaatkan jika hasil-hasil yang diharapkan ingin diperoleh.

Sistem tanam paksa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman-tanaman dagangan untuk diekspor ke pasar dunia. Walaupun antara sistem eksploitasi VOC dan sistem tanam paksa terdapat persamaan, khususnya dalam hal penyerahan wajib, pengaruh sistem tanam paksa atas kehidupan desa di Jawa jauh lebih mengguncangkan daripada pengaruh VOC selama kurang lebih dua abad.

Ciri utama sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka. Van den Bosch mengharapkan agar dengan pungutan-pungutan pajak dalam natura ini tanaman dagangan dapat dikirimkan ke negeri Belanda untuk dijual di sana kepada pembeli-pembeli dari Amerika dan seluruh Eropa dengan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda.

Selama sistem pajak tanah masih berlaku antara tahun 1810 dan 1830, penanaman dan penyerahan wajib telah dihapus kecuali untuk daerah Parahyangan dan Jawa Barat. Di daerah ini rakyat Parahyangan diwajibkan menanam kopi, khususnya di daerah-daerah pegunungan yang masih kosong. Pajak yang wajib mereka bayar kepada pemerintah kolonial adalah dalam bentuk kopi yang mereka hasilkan, sedangkan segala macam bentuk pajak lainnya dibebaskan, kecuali yang harus mereka bayarkan secara

tradisional kepada para bupati. Dalam Sistem Tanam Paksa, asas yang diterapkan di daerah Parahyangan ini direncanakan untuk diterapkan di seluruh Pulau Jawa. Sistem penanaman paksa ini diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman dagangan di seluruh Pulau Jawa sampai tingkat yang dicapai di daerah Parahyangan, yaitu yang rata-rata dapat menghasilkan f5 satu rumah tangga.[1]

Dalam salah satu prasaran yang telah ditulis van den Bosch sebelum ia dikirim ke Indonesia, terdapat suatu perkiraan bahwa produksi tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak lebih kurang f15 sampai f20 juta setiap tahun, jika sistem tanam paksa yang dipraktikkan di Parahyangan juga diintroduksi di daerah-daerah lainnya. Van den Bosch yakin bahwa paksaan-paksaan seperti yang dijalankan oleh VOC adalah cara terbaik untuk memperoleh tanaman dagangan untuk pasar Eropa karena ia menyangsikan bahwa perkebunan-perkebunan Eropa yang mempekerjakan tenaga-tenaga kerja yang bebas dapat bersaing dengan perkebunan-perkebunan di Pulau Jawa. Di pihak lain, van den Bosch berkeyakinan bahwa penghapusan sistem pajak tanah dan penggantian sistem ini, dengan penyerahan wajib, juga akan menguntungkan para petani, karena dalam keyakinannya pajak tanah yang perlu dibayar oleh para petani sering mencapai sepertiga sampai separuh dari nilai hasil pertaniannya. Jika kewajiban pembayaran pajak tanah ini diganti dengan kewajiban untuk menyediakan sebagian dari waktu kerjanya untuk menanam tanaman dagangan, misalnya 66 hari dalam setahun, kewajiban ini akan lebih ringan daripada kewajiban membayar pajak tanah.

2. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa yang tertera dalam *Stadsblad* (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22 beberapa tahun setelah tanam paksa mulai dijalankan di Pulau Jawa, berbunyi sebagai berikut.[2]

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa.

---

[1] J.S.Furnivall, *Netherlands India*, Cambridge University Press, 1961, Bab 5, "The Culture System; 1830–1850", hlm. 115

[2] Suatu pembahasan yang lengkap mengenai ketentuan-ketentuan pokok dari Sistem Tanam Paksa dan penerapannya dalam praktik dapat dibaca dalam buku: G. Gonggrijp, *Schets ener economische geschiedenis van Naderlands Indie*, cetakan ketiga, Haarlem, 1949, Bab 4, hlm. 107–125

2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Di atas kertas, ketentuan-ketentuan di atas memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat, walaupun orang pada prinsipnya dapat mengajukan keberatan-keberatan mengenai unsur paksaan yang terdapat dalam Sistem Tanam Paksa itu. Dalam praktik ternyata pelaksanaan Sistem Tanam Paksa sering kali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok sehingga rakyat banyak dirugikan, kecuali mungkin ketentuan-ketentuan nomor 4 dan nomor 7 tersebut di atas.

Menurut ketentuan dalam Lembaran Negara tahun 1834 Nomor 22, setiap persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur ketakutan. Akan tetapi, dalam kenyataan ternyata seluruh pelaksanaan Sistem Tanam Paksa didasarkan atas unsur paksaan. Jelaslah kiranya bahwa dalam hal ini pemerintah kolonial menggunakan, atau lebih tepat menyalahgunakan kekuasaan tradisional dari para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar mereka menyerahkan sebagian tanah mereka untuk tujuan Sistem Tanam Paksa.

Salah satu akibat penting dari Sistem Tanam Paksa adalah meluasnya bentuk milik tanah bersama (milik komunal). Hal ini terjadi karena para pegawai pemerintah kolonial cenderung untuk memperlakukan desa

dengan semua tenaga kerja yang tersedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa sebagai satu keseluruhan untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam menetapkan tugas penanaman-penanaman paksa yang dibebankan pada tiap desa. Jika para pegawai pemerintahan kolonial misalnya harus mengadakan persetujuan-persetujuan yang terpisah dengan tiap-tiap petani yang memiliki tanah misalnya, mereka memperoleh seperlima dari tiap-tiap bidang tanah mereka. Hal ini sangat mempersulit pekerjaan mereka. Jauh lebih mudah untuk menetapkan target yang harus dicapai oleh tiap-tiap desa sebagai satu keseluruhan.

Dibanding dengan penyerahan wajib (*contingengenteringen*) yang dipaksakan VOC kepada penduduk, maka Sistem Tanam Paksa menaruh beban yang lebih berat di atas pundak rakyat. Jika selama zaman VOC pelaksanaan penyerahan wajib diserahkan kepada para kepala rakyat sendiri, selama Sistem Tanam Paksa para pegawai Eropa dari pemerintahan kolonial langsung melaksanakan dan mengawasi penanaman paksa tersebut. Hal ini sering berarti peningkatan "efisiensi" dari Sistem Tanam Paksa, dalam arti kata bahwa hasil produksi tanaman dagangan dapat ditingkatkan berkat pengawasan dan campur tangan langsung dari pegawai Belanda tersebut. Di lain pihak, peningkatan "efisiensi" ini tentu berarti penambahan bahan yang harus dipikul rakyat.

Untuk menjamin bahwa para pegawai Belanda maupun para bupati dan kepala desa menunaikan "tugas" dengan baik, pemerintah kolonial memberikan perangsang finansial kepada mereka dengan nama *cultuurprocenten*, selain pendapatan biasa mereka. *Cultuurprocenten* ini merupakan persentase tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanaman-tanaman ekspor tersebut yang diserahkan kepada pegawai Belanda dan para bupati dan kepala-kepala desa jika mereka berhasil dalam mencapai atau melampaui target produksi yang dibebankan kepada tiap-tiap desa. Cara-cara ini tentu saja banyak menimbulkan penyelewengan yang sangat menekan dan merugikan rakyat, karena pegawai-pegawai Belanda, para bupati, dan kepala-kepala desa mempunyai *vested interest* dalam usaha meningkatkan produksi tanaman-tanaman perdagangan untuk ekspor.

Penanaman paksa yang hanya dapat dijalankan dengan unsur kekerasan ditinjau dari segi ekonomis tidak efisien karena banyak pemborosan terjadi dalam penggunaan tenaga kerja untuk penanaman paksa. Hal ini dapat dimengerti karena pemerintah kolonial dengan mudahnya dapat mengerahkan tenaga-tenaga kerja yang diperlukan dengan cara komando lewat para kepala rakyat. Andaikata pemerintah kolonial hanya dapat memperoleh tenaga kerja yang diperlukan dengan cara "membeli" jasa-

jasa mereka di pasar tenaga kerja yang bebas, artinya jika mereka harus membayar upah untuk jasa-jasa tenaga kerja yang dipekerjakan, sudah barang tentu pemborosan tersebut di atas sedapat mungkin dihindarkan karena merugikan pemerintah sendiri. Selain itu, menurut ketentuan resmi mengenai Sistem Tanam Paksa hanya boleh meliputi seperlima dari tanah-tanah milik penduduk desa. Dalam praktik ternyata bahwa angka ini sering dilampaui sehingga sering mencapai separuh atau lebih dari tanah-tanah milik rakyat. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat, dan bukan itu saja, juga membahayakan kehidupan mereka. Jika penduduk desa dikerahkan untuk menanam tanaman untuk ekspor, mereka tentu saja tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengerjakan tanah yang disediakan untuk penanaman bahan makanan.

Angka-angka di atas kelihatan tinggi. Namun, untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam mengenai Sistem Tanam Paksa, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya Sistem Tanam Paksa bukan merupakan sistem dalam arti yang lazim, melainkan terdiri atas berbagai peraturan lokal (*lokal arrangements*) yang diadakan oleh pegawai-pegawai pemerintah kolonial untuk mengusahakan produksi tanaman dagangan.[3] Peraturan-peraturan ini berbeda dari tempat ke tempat, atau dari desa ke desa.

Waktu van den Bosch kembali ke negeri Belanda untuk menerima jabatan Menteri Kolonial, ia memang berusaha untuk tetap memusatkan kekuasaan eksekutif mengenai penanaman paksa dalam tangannya sendiri, akan tetapi usahanya ini tidak berhasil. Apa yang kemudian terjadi adalah suatu perkembangan di mana para pegawai setempat dari pemerintah kolonial memperoleh makin banyak kekuasaan untuk mengatur sebangsa Sistem Tanam Paksa di desa-desa di bawah wewenang mereka. Keadaan ini mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pegawai-pegawai setempat, yang dengan bantuan kepala-kepala rakyat berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan hasil produksi tanaman dagangan untuk kepentingan mereka sendiri.

Kita telah melihat di atas bahwa para pegawai Belanda dan para kepala rakyat memperoleh persentase dari hasil penjualan tanaman dagangan (*cultuurprocenten*) sehingga makin tinggi ekspor tanaman dagangan yang diwajibkan itu makin tinggi jumlah pendapatan yang mereka peroleh dari *cultuurprocenten*. Dalam keadaan demikian, penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan semula makin terjadi, dan pekerjaan yang dibebankan kepada rakyat makin banyak. Walaupun

---

[3] Robert van Niel, "Measurement of Change under the Cultivation System in Java, 1837–1851", *Indonesia*, 1972, No. 14 (Oktober), Cornell Modern Indonesia Project, hlm. 91

van den Bosch selama masa jabatannya sebagai gubernur jenderal telah mendirikan Kantor Urusan Tanaman Dagangan untuk mengawasi dan mengatur produksi tanaman dagangan serta melindungi rakyat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pegawai Belanda dan para kepala mereka sendiri, dalam praktik ternyata bahwa kantor ini makin tidak dihiraukan oleh yang belakang ini. Tanpa perlindungan efektif dari pihak pemerintah kolonial maupun dari para kepala mereka sendiri, rakyat di Jawa makin ditentukan untuk bekerja bagi kepentingan-kepentingan pribadi dari para pegawai pamong praja dan para kepala mereka.

Dalam pada itu, perlu diperhatikan juga walaupun di desa-desa yang termasuk dalam tanam paksa, tanah-tanah pertanian yang harus disediakan untuk tanaman dagangan sering melebihi seperlima dari seluruh tanah pertanian desa. Namun, jika diambil secara keseluruhan, seluruh jumlah tanah yang disediakan untuk penanaman paksa di Jawa hanya merupakan bagian yang relatif dari seluruh tanah pertanian di Jawa. Misalnya, dalam tahun 1845 penanaman paksa dijalankan di tanah-tanah yang hanya meliputi 86.000 atau seperdelapan belas dari seluruh tanah pertanian yang terdapat di Jawa pada waktu itu.[4]

Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh van Niel menunjukkan bahwa selama Sistem Tanam Paksa berlaku, tanah-tanah yang dikenakan Sistem Tanam Paksa rata-rata meliput hanya 5 persen dari seluruh tanah pertanian di Jawa.[5] Angka ini tidak jauh dari taksiran Gonggrijp. Malahan van Niel berpendapat bahwa 5% ini merupakan taksiran yang terlampau tinggi. Di lain pihak persentase keluarga-keluarga petani yang terlibat dalam Sistem Tanam Paksa tinggi sekali. Selama Sistem Tanam Paksa berlaku, persentase keluarga-keluarga petani yang terlibat dalam Sistem Tanam Paksa mencapai jumlah yang melebihi 70% dari seluruh jumlah keluarga-keluarga petani di Jawa.[6] Angka-angka di atas ini memberi kesan bahwa banyak tenaga kerja dikerahkan untuk penanaman paksa di bidang-bidang tanah yang relatif terbatas.

Misalnya, ketentuan untuk melakukan pekerjaan tanam paksa yang seharusnya tidak boleh melebihi pekerjaan penanaman padi dalam banyak hal tidak ditaati. Para petani biasanya dipaksa untuk bekerja jauh lebih lama untuk penanaman paksa daripada untuk tanaman bahan makanan mereka sendiri. Tekanan atas rakyat memang berbeda dari tempat ke tempat dan dari tanaman ke tanaman lain. Namun, pada umumnya rakyat memang dipaksa untuk bekerja jauh lebih lama untuk penanaman paksa daripada

---

4 G. Gonggrijp, *op. cit.*, hlm. 111

5 Robert van Niel, *op. cit.*, hlm. 98

6 *Ibid.*, hlm. 98

untuk nafkah mereka sendiri. Upah yang mereka terima untuk penanaman paksa sangat rendah pula.

Tekanan yang paling berat untuk rakyat terdapat di daerah-daerah tanaman indigo, terutama di daerah Parahyangan. Misalnya, setelah indigo diperkenalkan di sana, orang laki-laki dari beberapa desa di distrik Simpur dipaksakan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan indigo selama waktu 7 bulan terus-menerus, jauh dari tempat kediaman mereka. Jika akhirnya mereka kembali ke kampung halaman, mereka mendapati sawah-sawah mereka tidak terurus sama sekali. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena tenaga-tenaga di perkebunan indigo dilarang keras untuk meninggalkan pekerjaan mereka.

Selanjutnya adalah mengenai pembebasan pajak tanah. Menurut ketentuan resmi, tanah yang disediakan untuk tanaman paksa dibebaskan dari pajak tanah. Dalam praktik ternyata bahwa pelaksanaan penanaman paksa tidak begitu banyak menyimpang dari ketentuan semula, berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang disebut lebih dahulu. Meskipun demikian, petani-petani harus menanggung dua macam beban, yaitu pekerjaan paksa untuk menanam tanaman-tanaman ekspor dan pembayaran pajak tanah. Malahan, penerimaan pemerintah kolonial yang diperoleh dari pajak tanah terus meningkat, seperti dari angka-angka berikut.

Penerimaan dari Pajak Tanah[7]

Tahun	Penerimaan
1829	f3.305.698
1835	f7.679.359
1840	f9.364.907

Angka-angka di atas menimbulkan dugaan bahwa dalam praktik bukan orang-orang yang melakukan tanam paksa yang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah, melainkan tanah yang disediakan untuk penanaman paksa.

Hal ini memang sesuai dengan ketentuan semula. Akan tetapi, hal ini juga berarti bahwa jumlah rakyat yang besar yang terlibat dalam Sistem Tanam Paksa masih tetap diharuskan untuk membayar pajak tanah. Ketika telah melihat di atas bahwa tanah-tanah yang disediakan untuk tanam paksa relatif kecil sekali dibanding dengan seluruh tanah pertanian di Jawa. Di lain pihak, jumlah orang yang terlibat dalam Sistem Tanam Paksa jauh lebih

[7] Diambil dari G. Gonggrijp, *op. cit.*, hlm. 114

tinggi. Hal ini sangat mungkin merupakan sebab dari kenaikan tetap dari penerimaan pajak tanah selama sistem tanam paksa berlaku.

Ketentuan lain Sistem Tanam Paksa menentukan bahwa selisih positif antara nilai yang ditaksir dari tanaman dagangan yang dihasilkan dari penanaman paksa dan jumlah pajak tanah yang harus dibayar oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Ketentuan ini kedengarannya bagus, tetapi dalam kenyataan rakyat sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari ketentuan ini. Kelemahan ketentuan ini terletak dalam perumusan kata-kata "nilai yang ditaksir" dari tanaman dagangan. Dalam praktik, hal ini berarti bahwa taksiran mengenai nilai tanaman dagangan yang dihasilkan oleh rakyat di bawah paksaan dilakukan oleh pegawai-pegawai pemerintah kolonial sendiri. Sudah barang tentu taksiran ini tidak sesuai dengan nilai tukar yang dapat diperoleh di pasar bebas, malah jauh di bawah nilai tukar ini. Dengan demikian, rakyat tidak memperoleh keuntungan apa pun dari ketentuan yang kelihatan bagus di atas kertas. Seperti juga halnya dengan ketentuan-ketentuan lain, peraturan yang mengatakan bahwa kerugian-kerugian yang diderita akibat kegagalan panen akan ditanggung pemerintah ternyata tidak pernah ditepati, artinya segala kerugian yang diderita akibat kegagalan panen dibebankan kepada rakyat. Di samping segala pekerjaan yang harus dilakukan rakyat untuk penanaman paksa, mereka juga masih harus melakukan segala macam pekerjaan rodi baik untuk pemerintah kolonial maupun untuk kepala-kepala mereka sendiri. Kebiasaan pekerjaaan rodi ini memang sudah berasal dari zaman sebelum Sistem Tanam Paksa, tetapi ditambah dengan pekerjaan yang wajib dilakukan untuk penanaman paksa sehingga beban yang diletakkan di atas pundak rakyat menjadi makin berat.

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi luas tanah, tanah yang disediakan untuk penanaman paksa diambil sebagai persentase dari seluruh luas tanah pertanian di Jawa tidak begitu besar. Dalam tahun 1833, luas seluruh tanah pertanian rakyat berjumlah lebih kurang 964.000 bahu. Dari 964.000 bahu ini kira-kira 56.000 bahu digunakan untuk penanaman wajib, sedangkan dalam tahun 1861. Jadi, sewaktu penanaman paksa sudah mulai ditinggalkan, angka ini berjumlah kira-kira 53.000 bahu.[8] Dalam tahun 1833 hanya satu seperdelapan dari seluruh tanah pertanian di Jawa diperuntukkan penanaman wajib, sedangkan dalam tahun 1861 persentase ini lebih kecil lagi.

---

[8] D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi-Sosiologis Indonesia* (terjemahan Prof. Prajudi Atmosudirdjo), Jakarta, 1957, hlm. 2007

Pembagian luas tanah untuk penanaman paksa menurut jenis tanaman dalam tahun 1883[9] adalah sebagai berikut.

Jenis Tanaman	Luas Tanah (dalam bahu)
Gula	32,722
Nila (Indigo)	22,141
Teh	324
Tembakau	86
Kayu Manis	30
Kapas	5

Di samping tanaman yang disebut di atas, masih terdapat juga beberapa tanaman lain yang artinya lebih kecil lagi daripada kapas. Angka-angka di atas jelas memperlihatkan bahwa kedua tanaman ekspor yang terpenting adalah gula dan nila (indigo). Akan tetapi, perlu diperlihatkan di sini bahwa angka-angka di atas sama sekali tidak menyinggung arti dari penanaman kopi yang merupakan tanaman ekspor terpenting selama abad kesembilan belas. Jika kopi diperhitungkan juga, gambaran mengenai penamanan paksa menjadi berlainan sekali. Namun, ada beberapa sebab mengapa kopi mengambil tempat tersendiri sebagai tanaman ekspor yang terpenting dari Pulau Jawa.

Di daerah-daerah penanaman gula di Jawa, luas tanah sawah seluruhnya berjumlah sekitar 483.000 bahu, di mana kurang lebih 40.500 bahu dipergunakan untuk penanaman gula. Jadi, tanah sawah yang disediakan untuk penanaman gula dalam tahun 1833 hanya merupakan 1/12 dari seluruh tanah rakyat di daerah-daerah gula di Jawa.

Tanaman dagangan terpenting yang ditanam selama Sistem Tanam Paksa berlaku adalah kopi, tebu (gula), dan nila (indigo). Pentingnya ketiga tanaman ini tidak hanya dari luas tanah yang disediakan untuk ketiga tanaman ini, tetapi juga dari jumlah orang yang terlibat dalam penanamannya. Misalnya, dalam tahun 1858 tidak kurang dari 450.000 orang terlibat dalam penanaman kopi, dan kurang lebih 300.000 orang dalam penanaman tebu, dan kira-kira 110.000 orang dalam penanaman nila.

Dalam pada itu, terdapat suatu perbedaan dalam dampak (*impact*) dari penanaman kopi di satu pihak dan penanaman gula dan nila di lain pihak. Jika kopi ditanam di tanah-tanah yang belum digarap oleh rakyat untuk

---

[9] *Ibid.*, hlm. 207

pertanian, tebu dan nila ditanam di tanah-tanah pertanian rakyat. Dengan demikian, secara relatif tanaman kopi membawa pengaruh yang begitu mendalam atas kehidupan masyarakat petani dibanding dengan penanaman tebu dan nila.

3. Pengaruh Sistem Tanam Paksa

Dalam menganalisis dampak penanaman tanaman dagangan secara paksa, Geertz mengadakan perbedaan antara tanaman musiman dan tanaman tahunan.[10] Tanaman musiman, seperti gula, nila, dan tembakau, dapat ditanam di tanah-tanah sawah berseling (rotasi) dengan padi dalam jangka waktu satu tahun. Tanaman musiman yang memerlukan waktu bertumbuh kurang dari satu tahun. Tanaman tahunan meliputi tanam-tanaman seperti lada, kopi, teh, dan karet. Berbeda dengan tanaman musiman, tanaman tahunan tidak dapat bertumbuh berseling waktu padi.

Karena ciri-ciri pertumbuhan yang berbeda, dampak tanaman musiman atas masyarakat sekelilingnya berbeda dengan dampak tanaman tahunan. Dalam hal tanaman musiman, sistem yang mengusahakan tanaman-tanaman ini mengembangkan suatu hubungan dengan masyarakat petani sekelilingnya yang oleh Greertz disebut hubungan timbal balik (*mutualistic relationship*). Di lain pihak, ciri-ciri pertumbuhan tanaman tahunan yang khas tidak mengizinkan perkembangan ke arah hubungan timbal balik, tetapi justru menghendaki suatu hubungan terpisah atau terlepas (*insular relationship*) dari sistem penanaman padi di sawah-sawah. Tanaman-tanaman tahunan di daerah-daerah yang masih kosong dan yang tidak ditanam di daerah-daerah yang merupakan pertanian rakyat, seperti kopi, teh, dan lainnya di daerah-daerah pegunungan atau daerah kehutanan yang belum digarap sering menjadi semacam *enclave* dalam sistem pertanian Indonesia pada umumnya.

Di atas telah kita lihat bahwa kedua tanaman dagangan utama selama Sistem Tanaman Paksa adalah kopi dan gula; yaitu, jika dilihat dari luas tanah yang diperlukan untuk penanaman kedua tanaman ini, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, laba yang diperoleh dari penjualan kedua tanaman ini di pasaran ekspor, dan dampak atas masyarakat petani di Pulau Jawa. Karena gula merupakan tanaman musiman dan kopi merupakan tanaman tahunan, kedua tanaman ini merupakan contoh yang baik untuk meneliti seberapa jauh terdapat perbedaan antara dampak tanaman musiman dan sistem tanaman tahunan atas masyarakat petani.

---

[10] Clifford Geertz, *Agricultural Involution*, University of California Press, 1963, hlm. 54

Seperti juga halnya dengan padi, gula memerlukan tanah yang diirigasi. Dengan demikian, dapat dimengerti jika kemudian tanah sawah diharuskan dipergunakan untuk penanaman tebu. Para pemilik sawah diharuskan menyerahkan sebagian dari sawah-sawahnya untuk penanaman tebu menurut suatu skema rotasi tertentu dengan penanaman padi. Untuk tiap desa ditentukan bagian dari luas tanah yang harus diserahkan untuk penanaman tebu. Selain itu, penduduk desa juga diharuskan melakukan pekerjaan wajib, seperti menanam, memotong, mengangkut tebu ke pabrik-pabrik gula, dan bekerja di pabrik-pabrik gula itu sendiri.

Pekerjaan-pekerjaan wajib ini merupakan beban berat bagi penduduk desa. Kadang-kadang seluruh penduduk desa dikerahkan bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan pejabat-pejabat dan kepala-kepala sendiri. Hal yang terakhir ini terutama dilakukan dalam bentuk pekerjaan rodi, baik untuk pemerintah kolonial maupun untuk kepala-kepala melakukan pekerjaan wajib, seperti menanam, memotong, mengangkut tebu ke pabrik-pabrik gula, dan bekerja di pabrik-pabrik itu sendiri.

Menurut Gonggrijp, selama 20 tahun pertama Sistem Tanam Paksa, yaitu antara tahun 1830 dan 1850 dan sewaktu beban penanaman paksa justru paling berat menekan pundak rakyat, pekerjaan rodi untuk pemerintah kolonial dan para kepala rakyat malah bertambah lagi.[11] Pekerjaan rodi untuk pemerintahan kolonial pada umumnya meliputi pembangunan dan pemeliharaan umum, seperti jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, terusan-terusan, dan waduk-waduk. Selain itu, rakyat juga dikerahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah dan pesanggrahan-pesanggrahan untuk pegawai-pegawai kolonial dan untuk pekerja-pekerja, seperti mengangkut surat-surat dan barang-barang; menjaga gudang-gudang pemerintah kolonial, dan lain-lain. Dengan demikian, rakyat dikerahkan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan untuk kepentingan pemerintah kolonial maupun kepentingan pribadi pegawai-pegawai Eropa dan kepala-kepala rakyat itu sendiri. Yang paling menekan rakyat adalah pekerjaan rodi membangun dan memelihara benteng-benteng untuk tentara kolonial. Untuk pekerjaan ini, penduduk dari tempat-tempat yang jauh dikerahkan. Karena pekerjaan rodi itu sangat berat dan perawatan kesehatan pekerja-pekerja ini sangat kurang, tidak mengherankan bila ribuan penduduk meninggal karena penyakit, kekurangan makan, dan lain-lain. Karena begitu banyak orang meninggal selama melakukan pekerjaan di benteng-benteng ini, akhirnya praktik pekerjaan rodi di benteng-benteng ini dihentikan oleh pemerintah kolonial.

[11] G. Gronggrijp, *op. cit.*, hlm. 121

Perkembangan yang tampak dalam masa ini adalah kenaikan produksi hasil-hasil tanaman perdagangan yang pesat yang diakibatkan oleh penanaman paksa sejak tahun 1830, antara lain nyata dari angka-angka ekspor hasil-hasil pertanian. Misalnya, selama tahun 1830 sewaktu penanaman paksa baru dimulai ekspor kopi berjumlah 288 ribu pikul, ekspor gula berjumlah 108 ribu pikul, dan ekspor nila berjumlah 42 ribu pound dalam tahun 1831.[12]

Sepuluh tahun kemudian, yaitu dalam tahun 1840, ekspor kopi dari Jawa sudah meningkat sampai 132 ribu pikul dan ekspor gula telah meningkat sampai 1.032 ribu pikul, sedang ekspor nila telah meningkat dengan lebih pesat lagi, yaitu 2.123 ribu pon.

Kenaikan dalam volume ekspor ketiga tanaman perdagangan yang terpenting selama Sistem Tanam Paksa berlangsung dibarengi dengan kenaikan nilai ekspor ketiga barang dagangan ini. Jika dalam tahun 1830 ekspor kopi dari Jawa berjumlah f4.577.000, dalam tahun 1840 nilai ini sudah mencapai jumlah f37.368.000, ekspor gula dalam tahun 1830 berjumlah 1.558.000, dalam tahun 1840 berjumlah f13.782.000, dan dalam tahun 1830 telah meningkat sampai f6.371.000.[13]

Selain ketiga tanaman utama ini, pemerintah kolonial mengadakan pula penanaman paksa tembakau dan teh, tetapi tidak begitu berhasil dibanding dengan keberhasilan yang dicapai penanaman kopi, gula, dan nila. Meskipun demikian, kenaikan ekspor teh dan tembakau dari Jawa cukup mengesankan jika kita perhitungkan pula ekspor teh dan tembakau hasil pertanian rakyat, artinya yang tidak diusahakan dalam rangka Sistem Tanam Paksa. Misalnya, ekspor tembakau dalam tahun 1830 berjumlah f180.000, tetapi dalam tahun 1840 telah meningkat menjadi f1,2 juta dan dalam tahun 1845 mencapai jumlah f2,3 juta. Demikian pula produksi teh meningkat secara mantap sehingga mencapai volume 1,95 juta pon dalam tahun 1861.

Ekspor hasil tanaman dagangan yang disebut di atas mengalami kemunduran setelah tahun 1840, tetapi setelah tahun 1850 ekspor tanaman-tanaman ini meningkat lagi secara mantap sebagai akibat kenaikan produksi pertanian pada umumnya. Bukan produksi tanaman dagangan saja yang meningkat dengan pesat, produksi padi juga demikian. Hal ini bahkan terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur di mana penanaman padi dan gula dilakukan silih berganti di atas tanah yang sama. Perbaikan irigasi tidak saja menguntungkan produksi gula tetapi juga padi. Namun, gambaran

---

[12] Furnivall, *op. cit.*, hlm. 129

[13] Furnivall, *ibid.*, hlm. 129

mengenai peningkatan produksi padi tersebut tidak berlaku secara umum, hanya untuk beberapa daerah seperti di Jawa Timur. Pada umumnya keadaan yang sebaliknyalah yang dijumpai, yaitu di mana para pegawai pemerintah kolonial hanya mementingkan penanaman tanaman dagangan yang laku di pasaran dunia, sedangkan penanaman padi diabaikan. Karena selama 10 tahun pertama dari Sistem Tanam Paksa perkembangan produksi dan ekspor tanaman dagangan berjalan dengan baik, orang pada mulanya tidak begitu memerhatikan bahwa perkembangan ini juga mengandung kelemahan-kelemahan yang serius, seperti beban pekerjaan yang berat yang diletakkan di atas pundak rakyat, penanaman-penanaman di atas yang kurang cocok, dan sebagainya.

Bahkan, keadaan ekonomi tidak begitu baik seperti disangka orang, mula-mula terlihat di daerah Cirebon dalam tahun 1843 sewaktu pemerintah kolonial berusaha pula untuk mengekspor beras yang dihasilkan para petani. Suatu perusahaan yang ditunjuk pemerintah kolonial ditugaskan untuk memungut pajak dari para petani yang harus dibayar dalam bentuk beras. Karena penanaman padi di daerah Cirebon memang relatif sedikit dibanding dengan penanaman tanaman dagangan, seperti kopi, nila, dan teh, pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras merupakan beban yang sangat memberatkan penduduk daerah Cirebon. Keadaan menjadi parah sekali sewaktu dalam tahun 1843 panen padi di beberapa daerah pantai utara Jawa gagal. Kegagalan panen ini dan beban pajak beras yang sangat berat mengakibatkan bahaya kelaparan di daerah Cirebon sehingga ribuan keluarga terpaksa mengungsi dari daerah tersebut. Banyak orang yang fisiknya terlalu lemah untuk mengungsi, mati di pinggir jalan.

Tragedi yang serupa terjadi pula pada tahun 1848 di Demak sebagai akibat kegagalan panen dan dalam tahun-tahun 1849 dan 1850 di daerah Grobogan. Pengaruh yang dahsyat dari kegagalan panen dan wabah kelaparan jelas tampak dari jumlah penduduk daerah-daerah tersebut yang telah berkurang dengan pesat sebagai akibat pengungsian dan kematian sebagian besar dari penduduk tersebut. Jumlah penduduk Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 sampai 120.000, sedangkan jumlah penduduk Grobogan turun dengan lebih banyak lagi, yaitu dari 89.500 sampai 9.000.[14] Di daerah-daerah lain di Jawa Tengah jumlah penduduk banyak berkurang pula karena mati kelaparan dan wabah penyakit.

Kejadian-kejadian di atas merupakan titik balik dalam sejarah Sistem Tanam Paksa. Jelaslah kiranya bahwa batas-batas kemampuan Sistem Tanam Paksa untuk mengeksploitasi para petani Jawa telah tercapai sekitar

---

[14] G. Gonpgrijp, *op. cit.*, hlm. 128

tahun 1840. Antara tahun 1845 dan tahun 1851 di bawah Gubernur Jenderal Rochussen, penanaman nila maupun penanaman-penanaman paksa lainnya mulai dikurangi sehingga beban-beban berat yang diletakkan di atas pundak rakyat agak diringankan.

Sebagai suatu mekanisme untuk mengeksploitasi penduduk di Jawa demi kemakmuran negeri Belanda, Sistem Tanam Paksa memperlihatkan keunggulannya selama jangka waktu 1830 dan 1840. Namun, kejadian-kejadian setelah tahun 1840 jelas memperlihatkan bahwa rakyat di Jawa tidak dapat diperas terus-menerus tanpa akibat-akibat fatal bagi kesejahteraan rakyat. Menurut penilaian Furnivall, Sistem Tanam Paksa setelah tahun 1840 sebenarnya sudah menjadi usang karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi tahun 1840.[15]

Sementara itu, umumnya rakyat Belanda tidak tahu-menahu mengenai kemelaratan dan penderitaan yang dipikul rakyat Jawa yang diakibatkan oleh Sistem Tanam Paksa, yang justru telah berhasil menaikkan kemakmuran rakyat Belanda. Mengingat bahwa jaringan pengangkutan dan komunikasi di Jawa pada waktu itu jauh dari memadai dibandingkan dengan waktu sekarang, kekurangan pengetahuan pada pihak rakyat Belanda mengenai sosial-ekonomi penduduk di kolonial-kolonial mereka yang lain, tidaklah begitu mengherankan. Lagi pula pada waktu itu media massa seperti surat kabar juga belum begitu berkembang.

Keadaan ini mulai berubah setelah tahun 1850, sewaktu rakyat Belanda lambat laun memperoleh berita-berita mengenai keadaan sebenarnya yang terdapat di Pulau Jawa di bawah Sistem Tanam Paksa, khususnya berita-berita tentang tindakan-tindakan sewenang-wenang dari pegawai-pegawai pemerintah kolonial dan beban-beban berat yang harus dipikul oleh penduduk. Berita-berita mengenai malapetaka seperti yang terjadi di Cirebon, Demak, dan Grobogan juga lambat laun mengalir ke negeri Belanda dan mulai mengguncangkan hati nurani rakyat Belanda.

Antara tahun-tahun 1850 dan 1860 perdebatan mengenai kegunaan Sistem Tanam Paksa menjadi hangat di negeri Belanda. Keraguan mengenai sistem ini timbul selain oleh rangkaian malapetaka-malapetaka seperti yang telah terjadi di Jawa Tengah, dan pula stagnasi dalam produksi pertanian yang merupakan pertanda yang jelas bahwa batas-batas kemampuan Sistem Tanam Paksa untuk memperoleh hasil produksi pertanian yang lebih bayak dari rakyat telah tercapai. Selain itu, perkembangan-perkembangan sosial ekonomi dan politik di negeri Belanda sendiri menimbulkan keraguan pada

[15] Furnival, *op. cit.*, hlm. 145

rakyat Belanda tentang faedah-faedahnya untuk meneruskan Sistem Tanam Paksa. Perkembangan ini erat berkaitan dengan timbulnya aliran liberal setelah pertengahan abad ke-19 yang mulai menjalar ke seluruh Eropa Barat termasuk Belanda. Pada pokoknya paham liberal menghendaki agar segala kegiatan ekonomi diserahkan kepada usaha swasta tanpa campur tangan pemerintah. Menurut paham ini sebaiknya pemerintah menjauhkan diri dari peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan sebaiknya hanya menbatasi diri pada pemeliharaan ketertiban umum dan penciptaan sarana-sarana hukum dan administratif yang memungkinkan usaha swasta untuk mengembangkan diri dengan baik.

Sudah barang tentu para penganut paham liberal tidak dapat menyetujui Sistem Tanam Paksa sebagai suatu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Usaha swasta di negeri Belanda, yang merupakan pendukung utama dari paham liberalisme, setelah tahun 1850 makin berkembang di negeri Belanda sendiri dan siap sedia untuk mengembangkan sayapnya ke koloni-koloni Belanda, khususnya Indonesia. Sambil menunjuk kepada keuntungan-keuntungan yang makin merosot dari Sistem Tanam Paksa, usaha swasta Belanda dan pendukung-pendukung politiknya mengemukakan bahwa sebaiknya Indonesia dibuka saja untuk swasta yang pasti lebih mampu untuk mengembangkan ekonomi Indonesia.

Pada hakikatnya, apa yang dikehendaki golongan yang menjadi semakin kuat ini adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari eksploitasi sumber-sumber kekayaan Indonesia yang sebegitu jauh hanya jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Sementara itu, usaha swasta Belanda tidak saja menginginkan laba yang hingga kini diperoleh pemerintah Belanda, tetapi mereka yakin pula bahwa berkat keunggulan efisiensi, mereka dapat memperbesar laba yang bakal diperoleh dari eksploitasi sumber-sumber kekayaan Indonesia.

Dalam pada itu, tokoh Belanda yang menentang ekses-ekses Sistem Tanam Paksa dan menganjurkan pembukaan Indonesia untuk usaha swasta, seperti Baron van Hoevell dan Vitalis, berkeyakinan bahwa perkembangan usaha Belanda akan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Di samping itu, dalam tahun 1860 oposisi di negeri Belanda terhadap Sistem Tanam Paksa mendapat angin karena dua penerbitan yang secara jelas mengungkapkan penderitaan penduduk di Jawa yang disebabkan oleh penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan di bawah Sistem Tanam Paksa. Kedua tulisan tersebut adalah *Max Havelaar*, yang ditulis oleh seorang bekas pegawai pemerintah kolonial yang bernama Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli, sedangkan lainnya adalah sebuah pamflet yang berjudul *Suiker Contracten* (Kontrak-kontrak

Gula) yang ditulis oleh seorang pemilik perkebunan besar yang bernama Fransen van der Putte.[16]

Kedua tulisan di atas merupakan senjata ampuh yang digunakan secara efektif oleh pengikut aliran liberal yang semakin kuat di negeri Belanda di bawah topeng rasa humanisme dan perhatian yang mendalam terhadap nasib bangsa Indonesia, aliran liberal semakin mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk membuka Indonesia bagi modal swasta Belanda. Setelah perjuangan yang cukup lama, akhirnya dalam tahun 1872 aliran liberal telah mencapai kemenangan politik yang menentukan di negeri Belanda.

Dalam pada itu, di Jawa, penanaman paksa untuk berbagai tanaman dagangan setelah tahun 1860 lambat laun mulai dihapuskan. Penanaman paksa untuk lada dihapuskan tahun 1860 dan penanaman paksa untuk teh dan nila dihapuskan dalam tahun 1865. Seperti telah dikemukakan di atas, penghapusan penanaman-penanaman paksa ini akhirnya memang tidak terelakkan karena setelah tahun 1840 terbukti tidak begitu menguntungkan. Selain itu, gerakan liberalisme di negeri Belanda yang makin kuat juga memegang peran pokok dalam usaha penghapusan Sistem Tanam Paksa sekitar tahun 1870. Namun, untuk beberapa tanaman dagangan khususnya kopi, penanaman paksa masih tetap diperhatikan sampai akhir abad ke-19, bahkan di beberapa daerah sampai awal abad ke-20. Misalnya, penanaman kopi secara paksa di daerah Parahyangan yang sebenarnya telah berlangsung sejak zaman VOC baru dihapuskan secara resmi dalam tahun 1917. Menjelang tahun 1920, sisa-sisa penanaman paksa lainnya sama sekali terhapus dari bumi Indonesia.

4. Penilaian

Ciri pokok Sistem Tanam Paksa adalah pemungutan pajak dari rakyat Indonesia dalam bentuk hasil-hasil pertanian rakyat. Dalam pada itu, pos terpenting dalam anggaran belanja pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah pos penutup, yaitu pos yang menutupi jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran pemerintah kolonial. Jika sebelum tahun 1830, yaitu tahun dimulainya Sistem Tanam Paksa, pemerintah kolonial terus-menerus mengalami defisit, terhitung mulai dari tahun 1831 defisit anggaran pemerintah mengalami surplus sebagai akibat berhasilnya Sistem Tanam Paksa untuk memperoleh penerimaan pemerintah yang melebihi pengeluaran pemerintah kolonial. Pos penutupan yang positif ini dijadikan patokan dan tujuan bagi keberhasilan Sistem Tanam Paksa sebagai suatu

[16] *Ibid.*, hlm. 161

pengaturan kehidupan ekonomi di Hindia Belanda yang diselenggarakan untuk menunjang dan meningkatkan tingkat kemakmuran negeri Belanda. Pos atau saldo positif (*batig slot)* Belanda di Hindia Belanda ini, khususnya kebijakan pemerintah kolonial selama Sistem Tanam Paksa berlangsung antara tahun 1830 dan 1870.

Bahwa Sistem Tanam Paksa pada umumnya amat berhasil dalam memperoleh *batig slot* (saldo untung) yang besar terbukti dari angka-angka berikut. Misalnya, antara tahun-tahun 1832 dan 1867 saldo untung ini mencapai jumlah total f967 juta, dan untuk 10 tahun berikutnya, artinya antara tahun-tahun 1877, mencapai jumlah total f287 juta. Dengan demikian, jumlah total *batig slot* yang diperoleh negeri Belanda dari Sistem Tanam Paksa selama kurang lebih empat dasawarsa mencapai angka f784 juta, suatu angka yang tinggi sekali untuk masa itu.[17]

Walaupun kebanyakan tanaman paksa sebenarnya sudah dihapuskan pada tahun 1867, sisa-sisa penanaman paksa yang masih berlaku untuk beberapa tanaman perdagangan seperti kopi di beberapa daerah, antara lain Parahyangan, menyebabkan selama masa 10 tahun setelah tahun 1867 pemerintah kolonial masih memperoleh saldo untung yang begitu tinggi.

Saldo untung yang begitu tinggi bukan saja disebabkan oleh jumlah penerimaan yang tinggi yang diperoleh pemerintah kolonial, melainkan juga oleh usaha pemerintah kolonial untuk berhemat dalam mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan anggaran belanjanya. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengerahkan rakyat untuk membangun prasarana seperti pembangunan jalan-jalan raya dan jembatan-jembatan. Organisasi pekerjaan rodi ini merupakan sebab mengapa misalnya dalam anggaran belanja pemerintah kolonial untuk masa itu tidak terdapat pos pengeluaran untuk pembangunan prasarana.

Pos pengeluaran terbesar dalam anggaran belanja pemerintah kolonial malahan adalah pos perdagangan dan penanaman. Hal ini berarti bahwa pemerintah kolonial mengadakan pengeluaran yang langsung berfaedah untuk dirinya sendiri, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan penanaman paksa tanaman-tanaman dagangan. Jika semula saldo untung yang besar disebabkan baik oleh jumlah penerimaan yang tinggi yang diperoleh pemerintah kolonial dari Sistem Tanam Paksa maupun oleh jumlah pengeluaran pemerintah yang rendah, dalam tahun-tahun terakhir Sistem Tanam Paksa saldo untung masih dapat dipertahankan karena pengeluaran-pengeluaran dapat ditekan sampai tingkat serendah-rendahnya, sedangkan

---

[17] Burger, *op. cit.*, hlm. 229

penerimaan pemerintah kolonial yang terutama diperoleh dari Sistem Tanam Paksa mengalami kenaikan tinggi.

Saldo untung ini baru mulai turun dalam tahun 1867 sewaktu parlemen Belanda menghendaki pemerintah kolonial mengadakan pengeluaran yang lebih besar untuk pembangunan prasarana di Hindia Belanda. Setelah tahun 1870, yaitu setelah Sistem Tanam Paksa berakhir, saldo untung mulai lenyap sebagai akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah kolonial berkenaan dengan perang yang dilakukan di Aceh.

Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan suatu sistem eksploitasi yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh VOC sebelumnya. Dalam sistem eksploitasi ini, baik VOC maupun pemerintah kolonial, memanfaatkan ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang terdapat di Jawa antara rakyat dan penguasa-penguasanya untuk kepentingan sendiri. Seperti telah diterangkan dalam bab pertama, eksperimen dengan penanaman bebas oleh para petani yang dilakukan di bawah Sistem Pajak Tanah mengalami kegagalan sehingga dalam tahun 1830 pemerintah kolonial merasa terpaksa kembali lagi pada sistem eksploitasi yang pernah dipraktikkan oleh VOC. Meskipun demikian, antara sistem-sistem eksploitasi dari Sistem Tanam Paksa dan VOC terdapat juga beberapa perbedaan. Misalnya, dalam melaksanakan sistem eksploitasinya VOC berhubungan dengan raja-raja dan bupati-bupati, sedangkan dalam Sistem Tanam Paksa pemerintah kolonial terutama berhubungan dengan kepala-kepala desa untuk melakukan penanaman paksa oleh penduduk. Dengan demikian, pengaruh pemerintah kolonial atas kehidupan sehari-hari dari penduduk Jawa jauh lebih mendalam daripada selama zaman VOC.[18]

Karena pengaruh yang mendalam ini, Sistem Tanam Paksa menimbulkan berbagai perubahan dalam perikehidupan masyarakat Jawa dengan beberapa akibat yang tidak diinginkan, khususnya disintegrasi struktur sosial masyarakat Jawa. Disintegrasi ini terutama disebabkan oleh makin meresapnya ekonomi dan lalu lintas uang yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat Jawa. Perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang ini terutama disebabkan oleh meluasnya pekerjaan upah dan penyewaan tanah para petani kepada pengusaha-pengusaha Belanda yang dibayar dalam bentuk uang.

Selama tahun-tahun pertama, Sistem Tanam Paksa membuktikan diri sebagai suatu sistem eksploitasi yang efisien yang berhasil meningkatkan penerimaan pemerintah kolonial dan melalui *batig slot* dalam anggarannya berhasil menutupi defisit yang diderita pemerintah Belanda dan juga

---

[18] *Ibid.*, hlm. 229–230

meningkatkan tingkat kemakmuran bangsa Belanda. Di lain pihak, Sistem Tanam Paksa pada umumnya tidak menguntungkan rakyat Indonesia, malah sebaliknya sering menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang besar.

Kemajuan-kemajuan tertentu yang terlibat selama Sistem Tanam Paksa berlangsung, misalnya perluasan jaringan jalan raya yang sebetulnya tidak disebabkan oleh keinginan pemerintah kolonial untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, tetapi kepentingan pemerintah kolonial itu sendiri. Dalam tahun-tahun terakhir makin jelas bahwa Sistem Tanam Paksa sebagai suatu sistem eksploitasi kolonial tidak begitu efisien. Oleh sebab itu, dan juga oleh adanya keinginan pihak swasta Belanda untuk memegang peran utama dalam eksploitasi sumber-sumber alam Hindia Belanda, akhirnya sekitar tahun 1870 Sistem Tanam Paksa dihentikan. Dengan demikian, terbukalah peluang bagi modal swasta Belanda untuk memasuki Hindia Belanda.

C. Sistem Liberal

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi kolonial antara tahun-tahun 1870 dan 1900 pada umumnya disebut sistem liberalisme. Maksudnya, bahwa pada masa itu untuk pertama kali dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun daerah-daerah di luar Jawa. Selama masa ini pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Agraria (*Agrarissche Wet*) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak undang-undang ini melindungi hak milik petani-petani Indonesia atas tanah mereka. Di lain pihak, UU Agraria membuka peluang bagi orang asing, orang-orang bukan pribumi Indonesia, untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.

Zaman liberal menyaksikan penetrasi ekonomi uang yang lebih mendalam lagi ke dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Hal ini terutama disebabkan oleh penyewaan tanah penduduk oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar tersebut. Tanah yang disewakan tidak saja terbatas pada tanah-tanah kosong, tetapi meliputi juga areal persawahan. Seperti telah diterangkan dalam bagian terdahulu, tebu gula ditanam silih musim. Hal

ini juga disebabkan oleh kesempatan yang diberikan kepada para petani di Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar sebagai buruh harian atau buruh musiman.

Meluasnya pengaruh ekonomi Barat dalam masyarakat Indonesia selama zaman liberal tidak saja terbatas pada penanaman tanaman-tanaman perdagangan di perkebunan-perkebunan besar, tetapi juga meliputi impor barang-barang jadi yang dihasilkan oleh industri-industri yang sedang berkembang di negeri Belanda. Impor barang-barang jadi, yang untuk sebagian besar terdiri atas barang-barang konsumsi ringan, mempunyai akibat yang buruk bagi usaha-usaha kerajinan rakyat Indonesia, karena pada umumnya hasil-hasil produksi mereka, baik dalam harga maupun mutu tidak dapat bersaing dengan barang jadi hasil industri-industri Barat itu. Misalnya, impor barang-barang tekstil dari Twente di negeri Belanda mengakibatkan matinya usaha-usaha penenunan dari penduduk di Pulau Jawa.[19]

Akibat perkembangan yang menyedihkan ini, penduduk Pulau Jawa makin didorong ke dalam ekonomi uang, karena hilangnya mata pencaharian yang tradisional memaksa mencari pekerjaan-pekerjaan di perkebunan-perkebunan besar yang dimiliki oleh Belanda dan lain-lain orang Eropa. Namun, pada umumnya respons penduduk di Jawa terhadap meluasnya ekonomi uang adalah pasif; artinya, sebagian besar mereka tetap bergantung dari mata pencaharian di bidang pertanian, dan menjadi buruh pertanian hanya untuk melengkapi pendapatan yang diperolehnya dari hasil-hasil pertanian jika pendapatan ini tidak mencukupi.[20] Jika para petani ini terpaksa mencari pekerjaan di perkebunan besar untuk melengkapi pendapatan, mereka senantiasa berusaha untuk meninggalkan pekerjaan tambahan itu jika tidak dirasakan perlu lagi.

Perluasan produksi tanaman dagangan untuk ekspor dari perkebunan-perkebunan swasta tersebut serta impor barang-barang konsumsi ringan dari negara-negara industri Barat yang meningkat, mengakibatkan perdagangan internasional makin ramai antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Perkembangan perdagangan internasional juga mendorong perkembangan perdagangan di daerah pedalaman Pulau Jawa. Perdagangan perantara itu pada umumnya terdiri atas dua fungsi, yaitu perdagangan distribusi dan perdagangan koleksi. Perdagangan distribusi terutama menyebarkan barang-barang konsumsi yang diimpor dari luar negeri di antara penduduk di daerah perdesaan, sedangkan perdagangan

[19] W.F. Wertheim, *Indonesia Society in Transition*, *The Hague*, 1956, hlm. 93

[20] *Ibid.*, hlm. 94

koleksi terutama mengumpulkan hasil-hasil tanaman-tanaman dagangan dari petani dan meneruskannya kepada para pedagang besar.

Kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru terbuka itu pada umumnya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang termasuk golongan Timur Asing, khususnya orang-orang Cina. Seperti telah dikatakan oleh Wertheim, sebagai orang-orang yang berasal dari negara lain atau keturunan orang pendatang, golongan ini tidak terlalu terikat pada tradisi-tradisi dan norma-norma agraris yang masih dianut oleh penduduk di Jawa sehingga mereka berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk memenuhi fungsi perdagangan antara. Seperti telah dikemukakan di atas, para petani di Jawa juga mulai mencari pekerjaan di luar bidang pertanian, tetapi hal ini hanya mereka lakukan jika diperlukan, misalnya untuk membayar pajak tanah atau untuk membeli barang-barang konsumsi impor. Akan tetapi, pada umumnya sikap para petani tersebut terhadap meluasnya ekonomi uang adalah pasif; artinya, mereka tidak secara aktif memanfaatkan kesempatan-ekonomi yang baru untuk kepentingan material mereka sendiri dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Akan tetapi, mereka hanya menyesuaikan diri secara pasif dengan keadaan yang baru dan berusaha untuk memperoleh sekadar tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang minimal.

Salah satu akibat lain yang penting dari penetrasi Barat yang makin mendalam di Jawa adalah pertumbuhan penduduk yang makin pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini disebabkan menurunnya angka kematian, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Faktor-faktor yang turut mengakibatkan menurunnya angka kematian adalah tindakan-tindakan dalam bidang kesehatan rakyat yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti vaksinasi terhadap penyakit menular, perbaikan dalam sistem distribusi makanan kepada rakyat, antara lain melalui perbaikan jaringan jalan raya. Pertumbuhan penduduk di Jawa jelas kelihatan dari angka-angka yang berikut:[21]

1781	2,029,915	(taksiran Radermacher)
1795	3,500,000	(taksiran Nederburg)
1815	4,499,250	(penghitungan pertama)
1846	9,542,045	(perkiraan Bleeker)
1880	19,794,505	(perhitungan administratif)
1905	30,360,667	(sensus penduduk)

[21] David Joel Steinberg, *et al.*, *In Search of Southeast Asia; A Modern History*, Oxford University Press, 1971, hlm. 211

2. Asas-Asas Liberalisme

Sama halnya dengan negara-negara lain, di negeri Belanda para pengikut aliran liberal berpendapat bahwa negara (baca: pemerintah) sepatutnya tidak ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi, tetapi membiarkannya kepada kekuatan-kekuatan pasar. Mengikuti Adam Smith, para pengikut aliran liberal berpendapat bahwa satu-satunya tugas negara adalah memelihara ketertiban umum menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Agar hal ini dapat diwujudkan, para pengikut aliran liberal menghendaki agar segala rintangan yang sebelumnya telah dibuat oleh negara dihapuskan. Rintangan-rintangan ini menghambat kelancaran kehidupan ekonomi dan oleh karena itu perlu disingkirkan.

Ketika orang liberal mencapai kemenangan politik di negeri Belanda (setelah tahun 1850), mereka mencoba menerapkan asas-asas liberalisme di koloni-koloni Belanda, khususnya di Indonesia, sedikitnya di wilayah-wilayah yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Mereka berpendapat ekonomi Hindia Belanda akan berkembang dengan sendirinya jika diberi peluang sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan pasar untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dalam praktik hal ini berarti kebebasan berusaha, yang dalam konteks Hindia Belanda khususnya berarti kebebasan sepenuhnya bagi usaha dan modal swasta Belanda untuk mengembangkan sayapnya di Hindia Belanda dalam berbagai usaha kegiatan ekonomi.

Usaha kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan yang paling pesat selama zaman liberalisme di Hindia Belanda adalah industri-industri ekspor, yang terdiri atas perkebunan-perkebunan besar dan tambang-tambang. Industri-industri ekspor merupakan motor penggerak utama bagi kehidupan ekonomi liberal di Hindia Belanda sangat memengaruhi pola perkembangan sektor-sektor lainnya. Perkembangan pesat industri-industri ekspor dicetuskan oleh permintaan yang meningkat di pasaran dunia akan hasil-hasil perkembangan dari Hindia Belanda, seperti gula, kopi, dan tembakau. Perkembangan makin pesat lagi dengan munculnya kapal-kapal uap yang sangat menurunkan biaya pengangkutan antara daerah-daerah produksi dan pasaran dunia.[22] Selain itu, pembukaan Terusan Suez tahun 1869 amat mempersingkat jarak antara negara-negara penghasil bahan mentah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan negara-negara konsumen di Eropa, suatu hal yang menurunkan biaya pengangkutan.

---

[22] Daved Joel Steinberg, *op. cit.*, hlm. 211

Para pengikut liberalisme di negeri Belanda mengecam peran negara (baca: pemerintah Hindia Belanda) selama zaman Sistem "perusahaan" yang perlu menghasilkan laba. Perbedaan mereka dengan orang-orang seperti van den Bosch dan pendukung Sistem Tanam Paksa lainnya terletak pada gambaran mereka mengenai koloni mereka. Jika van den Bosch memandang Hindia Belanda sebagai suatu *perusahaan negara*, kaum liberal menganggap koloni mereka sebagai suatu perusahaan swasta.[23] Akan tetapi, kedua-duanya menghendaki agar perusahaan itu menghasilkan laba atau saldo surplus (*batig slot*) yang dapat ditransfer ke negeri Belanda.

Walaupun demikian, di antara orang-orang liberal sendiri ada perbedaan pendapat mengenai adanya saldo surplus yang besar itu. Misalnya, para pengusaha Belanda yang tinggal di Indonesia menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda melaksanakan pelbagai pekerjaan umum yang dapat menunjang perkembangan industri ekspor mereka, seperti jalan-jalan raya, fasilitas-fasilitas irigasi, dan jembatan-jembatan. Selain itu, mereka juga menginginkan sekolah-sekolah bagi anak-anak mereka, seperti penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan bagi keluarga maupun buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan mereka. Sudah barang tentu pembangunan prasarana ini memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dapat dimengerti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang meningkat akan sangat mengurangi jumlah saldo surplus yang harus ditransfer ke negeri Belanda. Dapat dimengerti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang meningkat akan sangat mengurangi jumlah saldo surplus yang harus ditransfer ke negeri Belanda. Perlu dikemukakan di sini bahwa pembangunan sarana oleh negara tidak berlawanan dengan asas-asas liberalisme yang memang membenarkan pembangunan prasarana yang dapat memperlancar kegiatan-kegiatan ekonomi swasta.

Orang-orang liberal berkeyakinan bahwa ekonomi yang pesat yang dicetuskan oleh kegiatan usaha swasta akan membawa kesejahteraan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia tanpa tindakan khusus dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Dengan lain perkataan, mereka berkeyakinan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat hubungan yang langsung. Pihak kaum liberal memperingatkan bahwa campur tangan pihak pemerintah dalam kehidupan ekonomi dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang justru akan

---

[23] J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press, 1967, hlm. 174–175

mempunyai efek yang buruk atas kesejahteraan rakyat.[24] Satu-satunya tindakan yang diperlukan adalah memberikan perlindungan dasar kepada orang-orang Indonesia agar kedudukan lemah mereka tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan-kepentingan mereka. Perlindungan dasar ini adalah UU Agraria dari tahun 1870 yang menegaskan hak milik dari penduduk pribumi atas tanahnya dan melarang perpindahan hak milik ini kepada orang-orang bukan Indonesia. Jika pengusaha-pengusaha Barat memerlukan tanah, misalnya untuk membuka perkebunan besar, mereka paling banyak hanya dapat menyewa tanah penduduk.

Pemerintah Hindia Belanda diwajibkan untuk menjaga agar tanah pertanian rakyat yang diperlukan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman mereka sendiri tidak disewakan kepada pengusaha-pengusaha Barat. Di samping UU Agraria, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perburuhan-perburuhan yang menegaskan kondisi-kondisi pekerjaan yang layak bagi orang-orang Indonesia, misalnya mengenai tingkat upah minimal yang harus dibayar kepada buruh-buruh Indonesia. Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam kenyataan peraturan-peraturan dan perundangan-perundangan mengenai perburuhan, terutama yang menyangkut keadaan pekerjaan yang layak, sering tidak dilaksanakan sehingga sangat merugikan kaum buruh Indonesia.

Walaupun zaman liberalisme di Hindia Belanda diawali dengan harapan-harapan besar mengenai keunggulan sistem liberal dalam meningkatkan perkembangan ekonomi koloni sehingga menguntungkan kesejahteraan rakyat Belanda maupun rakyat Indonesia, pada akhir ke-19 sudah nyata bahwa rakyat Indonesia tidak mengalami tingkat kemakmuran yang lebih baik daripada di masa yang lampau. Meskipun produksi untuk ekspor meningkat dengan pesat antara tahun-tahun 1970 dan 1900, pada akhir abad ke-19 ada pertanda jelas bahwa orang-orang Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, telah mengalami kemerosotan di tingkat hidup mereka, sehingga menimbulkan kritik-kritik yang tajam di negeri Belanda sendiri yang agak mirip dengan kritik setengah abad sebelumnya yang dilontarkan terhadap Sistem Tanam Paksa. Di bawah ini akan dibentangkan sistem ini di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatra Timur.

3. Jawa Tengah dan Jawa Timur

Harapan kaum liberal adalah pembebasan kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintahan serta penghapusan segala unsur

[24] J.D. Legge, *Indonesia*, Prentice-Hall, hlm. 64

paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Harapan ini tercapai, khususnya dalam hal perkembangan industri-industri ekspor yang berjalan dengan pesat sekali. Di bawah UU Agraria tahun 1870, para pengusaha Belanda lainnya dapat menyewa tanah dari penduduk Jawa atau dari pemerintah Hindia Belanda untuk perkebunan-perkebunan besar. Yang mengalami perkembangan pesat adalah gula, yang termasuk barang dagangan ekspor yang penting dari Hindia Belanda pada waktu itu. Dengan tersedianya modal swasta dalam jumlah yang besar, perkebunan-perkebunan gula dan perkebunan-perkebunan lainnya dapat mengimpor mesin dan perlengkapan lainnya, hal yang telah meningkatkan produktivitas perkebunan-perkebunan ini. Misalnya, dalam hal perkebunan-perkebunan gula perluasan dan kemajuan-kemajuan teknis yang diintroduksi dalam industri ini mengakibatkan kenaikan produksi yang pesat, seperti ternyata dari angka-angka yang berikut. Dalam tahun 1870 luas tanah di Pulau Jawa yang ditanami gula berjumlah 54.176 bahu, sedangkan dalam tahun 1900 jumlah itu meningkat sampai 128.301 bahu. Di lain pihak, produksi gula meningkat lebih pesat lagi, yaitu dari 2.440.000 pikul dalam tahun 1870 hingga 12.050.544 pikul dalam tahun 1900.[25] Demikian pula perkebunan-perkebunan teh mengalami perkembangan yang pesat, terutama setelah perkebunan-perkebunan mulai ditanam dengan teh Assam.Tanaman ekspor lain yang mengalami kenaikan pesat dalam produksi adalah tembakau. Jauh sebelumnya, tembakau telah ditanam di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Selama zaman liberalisme, pengusaha-pengusaha Belanda mendirikan pula perkebunan-perkebunan tembakau di sekitar Besuki di Jawa Timur yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat. Perkebunan-perkebunan di Besuki itu bekerja sama erat dengan penduduk sekitar yang juga menanam tembakau yang kemudian disortir dan diolah selanjutnya di perkebunan-perkebunan besar. Di samping itu, modal dan usaha Belanda mendirikan perkebunan-perkebunan tembakau yang besar di sekitar Deli di Sumatra Timur.

Tanaman-tanaman dagang lainnya yang dihasilkan perkebunan-perkebunan besar yang telah mengalami perkembangan pesat selama masa ini adalah kopi dan kina. Selama masa ini Indonesia malah menjadi negara penghasil kina yang paling terkemuka di dunia karena hampir 90% kina yang digunakan di dunia pada waktu itu berasal dari perkebunan-perkebunan kina di Jawa.[26] Di lain pihak, kopi tidak mengalami perkembangan begitu pesat seperti selama Sistem Tanam Paksa masih berlaku.

---

[25] G. Gonggrijp, *op. cit.*, hlm. 149

[26] *Ibid.*, hlm. 150

Perkebunan-perkebunan gula, teh, tembakau, dan tanaman-tanaman dagang lainnya mengalami perkembangan yang paling pesat antara tahun 1870 dan 1885. Selama masa itu para pengusaha perkebunan-perkebunan memperoleh keuntungan yang besar sekali dari penjualan-penjualan tanaman-tanaman ini di pasaran dunia. Untuk sebagian besar perkembangan itu disebabkan oleh pembukaan Terusan Suez dalam tahun 1869 yang sangat mengurangi jarak antara negara penghasil tanaman-tanaman dagang ini dan pasaran-pasaran dunia yang terpenting di Eropa Barat.

Setelah tahun 1885 perkembangan dagang mulai berjalan agak seret karena jatuhnya harga-harga kopi dan gula di pasaran dunia. Dalam tahun 1891 harga tembakau di pasar dunia juga jatuh dengan pesat sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Jatuhnya harga gula di pasar dunia terutama disebabkan oleh penanaman gula *beet sugar* yang mulai ditanam di berbagai negara Eropa selama masa ini sehingga negara-negara ini tidak memerlukan lagi gula dari Indonesia.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi berbagai perkebunan-perkebunan besar sebagai akibat krisis di pasar dunia juga mempunyai implikasi-implikasi atas pembiayaan usaha-usaha kegiatan ini. Pada umumnya kegiatan-kegiatan perkebunan besar ini dibiayai oleh apa yang dinamai bank-bank perkebunan (*cultuurbanken*) yang merupakan lembaga-lembaga keuangan yang bergerak secara otonom. Sebelum krisis terjadi sekitar tahun 1885, kegiatan perkebunan-perkebunan besar ini penuh dengan risiko. Para pengusaha perkebunan-perkebunan besar ini tidak berusaha mengurangi risiko mereka dengan cara membentuk perseroan-perseroan terbatas, tetapi menjalankan perkebunan-perkebunan ini atas usaha sendiri. Jika mereka memerlukan tambahan pembiayaan, hal ini mudah diperoleh dari bank-bank perkebunan yang disebut di atas. Akan tetapi, bank-bank ini sering bersedia meminjamkan kredit kepada perkebunan-perkebunan ini tanpa jaminan-jaminan yang kuat.

Krisis yang melanda perkebunan-perkebunan besar Indonesia sebagai akibat turunnya harga-harga berbagai tanaman perdagangan di pasar dunia juga memukul berbagai bank-bank perkebunan yang telah meminjamkan uang kepada perkebunan-perkebunan ini. Krisis sekitar tahun 1885 mengakibatkan suatu reorganisasi yang penting dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda pada waktu itu. Disadari bahwa perkebunan-perkebunan besar tidak dapat dijalankan lagi sebagai usaha dan milik perseorangan, tetapi perlu direorganisasi sebagai perseroan-perseroan terbatas. Perkebunan-perkebunan ini selanjutnya tidak dipimpin langsung oleh

pemiliknya, tetapi oleh seorang manajer, artinya pegawai yang digaji langsung bertanggung jawab kepada direksi perkebunan-perkebunan tersebut yang biasanya dipilih dan diangkat oleh pemegang saham. Di lain pihak, bank-bank perkebunan tetap melanjutkan usaha pemberian kredit kepada perkebunan-perkebunan besar. Akan tetapi, setelah krisis tahun 1885, mereka juga mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan-perkebunan besar.[27] Hal ini dirasakan perlu agar tidak salah urus, ketiadaan efisiensi dalam operasi perkebunan-perkebunan besar dapat dihindarkan di kemudian hari. Di lain pihak, bank-bank perkebunan sendiri tidak berdiri otonom lagi, tetapi menjadi bagian dari bank-bank yang berkedudukan di negeri Belanda.

Perkembangan-perkembangan baru yang terjadi pada akhir abad ke-19 itu menandakan suatu tahap baru dalam sejarah ekonomi Hindia Belanda di mana asas-asas liberal murni yang menjunjung tinggi usaha swasta dan persaingan bebas lambat laun mulai ditinggalkan dan mulai diganti dengan suatu tata susunan ekonomi yang lebih bersifat *terpimpin*. Artinya, kehidupan ekonomi Hindia Belanda, khususnya di Jawa, mulai dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan industrial dan finansial di negeri Belanda sendiri dan tidak lagi diserahkan kepada pemimpin-pemimpin perkebunan-perkebunan besar yang berkedudukan di Jawa. Dengan demikian, ekonomi Hindia Belanda makin dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kapital-finansial di negeri Belanda, sedangkan para pionir yang telah merintis pembukaan Hindia Belanda bagi usaha-usaha dan modal swasta lebih kurang dua dasawarsa sebelumnya mulai dicaplok oleh kepentingan-kepentingan kapitalis besar di negeri Belanda. Sebagai pengganti pengusaha-pengusaha perseorangan ini, sejak tahun 1885 mulai bermunculan perusahaan-perusahaan raksasa yang berbentuk perseroan-perseroan terbatas yang sering pula saling berkaitan.[28]

Markas besar perusahaan-perusahaan raksasa ini berkedudukan di negeri Belanda, tetapi juga kadang-kadang juga di negara-negara Eropa lainnya. Dengan demikian, ekonomi Hindia Belanda tidak saja bersifat individualis, tetapi juga bersifat kapitalis. Menjelang akhir abad ke-19, proses perombakan-perombakan ekonomi Hindia Belanda di suatu sistem merkantilisme negara ke sistem merkantilisme perusahaan besar dapat dikatakan telah selesai.[29]

Jika perkebunan-perkebunan di Jawa berkembang dengan pesat di alam liberal dengan sangat menguntungkan pihak swasta Belanda maupun

---

27 J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 196–199

28 Clifford Geertz, *Agricultural Involution*, University of California Press, 1963, hlm. 84–85

29 *Ibid.*, hlm. 85

pemerintah kolonial, di lain pihak tingkat kesejahteraan penduduk Jawa makin mundur. Pada akhir masa liberal menjadi semakin jelas bahwa ramalan dan harapan penganut-penganut liberal mengenai kemakmuran yang lebih tinggi bagi penduduk Nusantara yang akan dibawa ekonomi liberal tidak terwujud. Penelitian Widjojo Nitisastro mengenai pertumbuhan penduduk di Indonesia memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Jawa setelah tahun 1880 menurun dibanding dengan masa sebelumnya.[30] Akan tetapi, angka yang tersedia mengenai produksi bahan makanan memperlihatkan bahwa kenaikan produksi ini malah lebih rendah lagi daripada kenaikan jumlah penduduk. Di lain pihak, perkembangan pesat perkebunan-perkebunan besar Barat menjamin peningkatan secara bertahap produksi tanaman-tanaman ekspor.

Pertumbuhan penduduk Pulau Jawa, yang berjalan lebih pesat daripada pertumbuhan produksi bahan makanan, khususnya beras, bermakna bahwa konsumsi bahan makanan per kepala selama zaman liberalisme memperlihatkan *trend* yang menurun, khususnya setelah tahun 1880. Di samping itu, krisis yang telah dialami perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885 juga membawa pengaruh buruk bagi penduduk Jawa karena penyempitan operasi perkebunan-perkebunan ini berarti penyempitan penghasilan bagi penduduk Jawa, yaitu berupa upah bagi pekerjaan baik di perkebunan-perkebunan maupun yang berupa sawah tanah. Jika penduduk Jawa secara rata-rata memperoleh pembayaran untuk sewa tanah sebanyak f42,48 untuk satu bahu selama Sistem Tanam Paksa, pada tahun 1900 angka ini telah menurun sampai f25 untuk satu bahu.[31]

Demikian pula upah telah menurun dengan pesat setelah tahun 1885, setelah terbukti pula dari hasil suatu penyelidikan yang dilakukan *Mindere Welvaarts Commisie* (Panitia Kemerosotan Kemakmuran), suatu panitia resmi yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial untuk menyelidiki keadaan kesejahteraan penduduk Jawa.

Selain pendapatan yang berkurang dari pekerjaan di perkebunan-perkebunan besar dan penyewaan tanah pada perkebunan-perkebunan ini, penduduk mengalami penciutan dalam penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tradisional, seperti kerajinan tangan, sebagai akibat impor barang-barang dari luar negeri yang lebih unggul daripada hasil-hasil tangan. Selain itu, pembangunan jalan-jalan kereta api di Pulau Jawa juga mengakibatkan penciutan dalam penghasilan yang diperoleh penduduk Jawa dari pengangkutan barang-barang dengan gerobak. Kemiskinan yang

---

30 Widjojo Nitisastro, *Population Trends in Indonesia*, Cornell University Press, 1970, hlm. 53

31 Furnivall, *op. cit.*, hlm. 214

diderita penduduk Jawa sebagian besar disebabkan oleh pengangguran dan kekurangan kerja alternatif.

Kemakmuran yang menurun dari penduduk Jawa, antara lain terbukti dari angka-angka impor barang-barang konsumsi seperti tekstil, yang telah berkurang pada akhir abad ke-19 dibanding dengan tahun-tahun berikutnya. Demikian pula impor bahan makanan, terutama beras, telah banyak berkurang dibanding dengan pertengahan abad ke-19. Hal ini jelas dari angka-angka berikut. Dalam tahun 1875 impor bahan tekstil (kapas) dan beras berjumlah f59,9 juta, tetapi dalam tahun 1900 impor kedua barang ini hanya berjumlah f53 juta walaupun penduduk Nusantara telah meningkat lebih kurang 10 juta selama seperempat abad ini. Di lain pihak, impor barang-barang bagi penduduk Eropa selama masa yang sama telah meningkat dari f5,9 juta sampai f26,7 juta.[32]

Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh *Mindere Welvaarts Commisie* pada awal abad ke-20, pendapatan rata-rata dari suatu rumah di Jawa kira-kira hanya berjumlah f80 untuk satu tahun. Dari jumlah ini lebih kurang f16 harus dibayar kepada pemerintah sebagai pajak.

Kemerosotan kemakmuran penduduk Jawa disebabkan berbagai faktor. *Faktor pertama*, kita melihat bahwa jumlah penduduk Jawa meningkat dengan pesat dalam abad ke-19. Pertumbuhan yang pesat ini mengakibatkan perbandingan antarjumlah penduduk (faktor produksi tanah) dengan luas tanah yang terbatas. Di lain pihak, tidak lagi seimbang, sehingga sebagai akibat "hukum pertambahan hasil yang makin berkurang" (*law of deminishing returns*), kenaikan produksi pertanian berkurang. Perkembangan produksi pertanian yang tidak menguntungkan ini juga tidak dapat diubah dengan penggunaan peralatan pertanian yang lebih efisien berhubung para petani rata-rata sangat kekurangan modal sebagai akibat kemiskinan mereka. *Faktor kedua*, dengan adanya sistem kerja rodi yang sering harus dilakukan untuk pejabat-pejabat pemerintah kolonial maupun untuk para kepala mereka sendiri, para petani tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja keras karena mereka mengetahui bahwa hasil pekerjaan keras mereka akhirnya tidak dapat mereka nikmati sendiri, tetapi akan diambil oleh pemerintah kolonial atau penguasa mereka sendiri.

Faktor ketiga adalah politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Pulau Jawa. Seperti telah dikemukakan oleh Gonggrijp selama abad ke-19, Jawa harus menanggung *burden of empire*, artinya Jawa harus menanggung beban finansial untuk daerah-daerah lain di Nusantara yang dikuasai Belanda.[33]

---

[32] *Ibid.*, hlm. 215–216

[33] G. Gonggrijp, *op. cit.*, hlm. 156

Selama abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menganut politik tidak campur tangan (*onthoudings politiek*) terhadap daerah-daerah di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaannya. Akibat politik ini, beban finansial untuk memerintah daerah-daerah ini, walaupun secara tidak langsung, terpaksa ditanggung oleh Jawa, dan itu berarti penduduk Jawalah yang harus menanggung segala beban untuk mengatur dan memerintah daerah-daerah koloni di luar Jawa. Dengan demikian, dana-dana yang tersedia dari penghasilan ekspor tanaman-tanaman Jawa tidak dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kesejahteraan penduduk Jawa sendiri, akan tetapi untuk membiayai pemerintah daerah-daerah koloni di luar Jawa. Di samping itu, pada hakikatnya penduduk Jawa juga membiayai segala perang kolonial yang dilakukan oleh penduduk Hindia Belanda untuk menguasai daerah-daerah lainnya di kepulauan Indonesia yang belum dikuasai Belanda, khususnya Aceh. Perang kolonial terhadap Aceh memakan biaya yang berjumlah jutaan gulden yang untuk sebagian terbesar ditanggung oleh penduduk Jawa. Dapat dibayangkan bagaimana efeknya terhadap kesejahteraan rakyat di Jawa andaikata jumlah dana yang besar ini dipergunakan pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Jawa dan bukan untuk tujuan-tujuan destruktif, seperti perang kolonial.

Faktor keempat, yang dapat menerangkan mundurnya kemakmuran penduduk Jawa pada akhir abad ke-19 adalah sistem perpajakan yang sangat *regresif*, artinya sangat memberatkan golongan yang berpendapatan rendah, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang pribumi. Akan tetapi, di lain pihak sangat meringankan golongan yang berpendapatan tinggi, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang Eropa. Perusahaan-perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan besar di Jawa, tidak membayar banyak pajak meskipun mereka memperoleh laba yang tinggi dari penjualan tanaman dagang Indonesia di pasar dunia. Demikian pula pegawai-pegawai pemerintah kolonial tidak atau hanya sedikit membayar pajak pendapatan. Satu-satunya golongan yang diwajibkan membayar pajak langsung kepada pemerintah kolonial adalah para petani yang merupakan golongan terbesar. Dengan demikian, bukan pemerintah kolonial yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan rakyat, melainkan justru sebaliknya rakyat dipaksa untuk membantu pemerintah kolonial dalam menjalankan politik kolonialisasinya di Indonesia. Seperti telah dikemukakan di atas, penghapusan tanam paksa di Indonesia sekitar tahun 1870 tidak berarti penghapusan kebijakan saldo untung (*batig slot*) dari pemerintah Hindia Belanda. Artinya, surplus anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jawa, tetapi seperti sedia kala

ditransfer ke negeri Belanda. Misalnya, antara tahun 1867 dan 1877 pemerintah Hindia Belanda telah mentransfer tidak kurang dari f151 juta ke negeri Belanda, suatu jumlah yang sangat tinggi pada waktu itu.[34] Dana-dana pemerintah kolonial yang dapat digunakan untuk membangun prasarana-prasarana, seperti waduk-waduk untuk irigasi, terbatas sekali karena dana-dana yang tersedia dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain, seperti pembiayaan perang Aceh, sedangkan surplus penerimaan atas pengeluaran pemerintah kolonial ditransfer ke luar negeri.

Faktor kelima, yang menyebabkan berkurangnya kemakmuran penduduk Jawa adalah krisis yang telah disinggung di atas, yaitu melanda perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885. Seperti telah dikemukakan di atas, kejadian ini mendorong perkebunan-perkebunan besar di Jawa untuk mengadakan penghematan-penghematan drastis berupa penekanan upah dan sewa tanah sampai tingkat yang serendah mungkin. Hal ini mudah dilaksanakan karena golongan yang terkena tindakan-tindakan penghematan ini, yaitu penduduk Jawa, secara ekonomi dan politik tidak berada dalam kedudukan yang baik untuk mempertahankan hak-hak mereka. Paling banyak mereka hanya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sangat merugikan itu.

4. Pembangunan Prasarana

Selama zaman liberal pemerintah Hindia Belanda membangun banyak prasarana untuk menunjang produksi tanaman dagangan ekspor. Salah satu prasarana yang terpenting dalam hal ini adalah waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi untuk peningkatan produktivitas. Sebelum krisis tahun 1885, pemerintah Hindia Belanda relatif tidak mengeluarkan banyak uang untuk pembangunan prasarana karena tidak mengurangi saldo surplus *(batig slot)* yang dapat ditransfer ke negeri Belanda. Akan tetapi, setelah krisis, menjadi jelas sekali bahwa pemerintah kolonial perlu bertindak lebih giat untuk membantu perkebunan-perkebunan besar yang terkena krisis ini. Salah satu tindakan penting dalam hal ini adalah pembangunan sarana-sarana irigasi di Pulau Jawa yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum. Walaupun sarana irigasi ini terutama dibangun untuk kepentingan perkebunan-perkebunan besar, penduduk Jawa turut pula menarik manfaat dari pembangunan sarana-sarana irigasi ini, khususnya di daerah-daerah perkebunan gula yang menyewa tanah dari para petani atas dasar rotasi.

Selain pembangunan sarana-sarana irigasi, selama masa ini pemerintah kolonial juga giat membangun jalan-jalan raya, jaringan dengan kereta api,

---

[34] *Ibid.*

dan jembatan-jembatan. Pembangunan pekerjaan umum ini untuk sebagian besar dilaksanakan dengan mewajibkan penduduk setempat melakukan pekerjaan rodi. Jadi, walaupun selama masa liberal pembangunan sarana-sarana irigasi dan sarana-sarana pengangkutan memang berjalan dengan pesat, di lain pihak beban pekerjaan rodi yang harus dilakukan oleh penduduk Jawa sangat berat, malahan lebih berat lagi jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Di lain pihak, pembangunan prasarana-prasarana selama zaman liberal juga dilakukan atas skala yang jauh lebih besar daripada masa Sistem Tanam Paksa, terutama sarana-sarana irigasi. Setelah tahun 1885, Departemen Pekerjaan Umum pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu bagian khusus yang dinamakan 'Brigade Irigasi' yang merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sarana-sarana irigasi dalam skala besar di Pulau Jawa. Di samping pembangunan sarana-sarana irigasi baru, 'Brigade Irigasi' juga ditugaskan untuk memperbaiki sarana-sarana irigasi yang sudah tua.[35]

Jalan-jalan kereta api pertama dibangun antara Semarang dan daerah kesultan (*Vorstenlanden*) serta antara Batavia dan Bogor. Pembangunan kedua jalan kereta api yang pertama ini diselesaikan dalam tahun 1873 dan terutama dimaksudkan untuk membuka daerah-daerah Jawa dan menghubungi daerah perkebunan besar yang kebanyakan terletak di daerah pedalaman dengan kota-kota pelabuhan yang terdekat, yaitu Batavia di Jawa Barat dan Semarang di Jawa Tengah. Demikian pula pada tahun 1873 pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalan kereta api antara Surabaya dan kota Malang, yang merupakan pusat penting dari perkebunan-perkebunan besar di daerah Jawa Timur. Jelaslah kiranya bahwa pembangunan jaringan jalan-jalan kereta api di Pulau Jawa terutama terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi: khususnya kepentingan-kepentingan perkebunan-perkebunan besar. Perkembangan jaringan kereta api ini berjalan dengan pesat sekali, seperti terlihat dari angka-angka berikut. Kedua jalan kereta api yang pertama dibuka dalam tahun 1873 seluruhnya hanya meliputi jarak lebih kurang 250 km, tetapi pada akhir zaman liberal seluruh jaringan jalan kereta api, banyak yang dibangun oleh pemerintah kolonial maupun oleh pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan Eropa, telah meliputi jarak lebih kurang 3.000 km.[36]

Sementara jaringan kereta api sedang dibangun di Jawa, pemerintah kolonial juga sibuk membangun jaringan jalan kereta api di beberapa daerah di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaannya atau yang ingin

[35] *Ibid.*, hlm. 159

[36] J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 329

dikuasainya, seperti di Aceh dan di Sumatra Barat. Pembangunan jaringan jalan kereta api ini tidak saja didorong oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan-pertimbangan politik dan militer, khususnya dalam hal Aceh yang secepat mungkin ingin ditaklukkannya. Pembangunan jalan kereta api di Sumatra Barat lebih bersifat ekonomi karena di sana jalan kereta api dibangun untuk menghubungi kota Padang dengan tambang-tambang batu bara di Ombilin. Di daerah perkebunan-perkebunan besar di Sumatra Timur yang telah dibuka sejak tahun 1863, Maskapai Tembakau Deli (*Deli Tabak Maatschappij)* yang mengusahakan perkebunan-perkebunan tembakau di daerah tersebut juga mengambil prakarsa untuk membangun jalan kereta api pada tahun 1883. Dengan demikian, pada akhir zaman liberal di beberapa daerah Pulau Sumatra telah dibangun jaringan jalan kereta api yang seluruhnya meliputi jarak lebih kurang 400 km.[37] Pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini cukup mengesankan walaupun masih jauh terbelakang dibanding dengan pembangunan jalan kereta api di Jawa. Di pulau-pulau lain tidak dilakukan pembangunan jalan kereta api.

Perdagangan ekspor Hindia Belanda yang makin meningkat mendorong pengangkutan laut, dan dengan demikian meningkatkan pula kebutuhan akan suatu armada dagang yang dengan cepat dapat mengangkut barang-barang ekspor Nusantara ke pasar dunia maupun yang dapat mengurus lalu lintas barang yang semakin meningkat antara berbagai daerah di Indonesia. Sungguhpun demikian, pihak Belanda lambat sekali membangun armada dagang yang dapat memelihara perhubungan laut di perairan Indonesia dan lebih suka menggantungkan diri pada kapal-kapal Inggris. Baru dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah perusahaan yang mengurus perhubungan laut antardaerah di Indonesia, yaitu *Koningklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), yang kemudian memperoleh monopoli untuk pengangkutan laut di Indonesia.[38]

Pengangkutan laut yang makin meningkat menimbulkan pula kebutuhan akan pelabuhan-pelabuhan laut yang modern dan efisien. Dalam tahun 1872 pemerintah Hindia Belanda mulai membangun suatu pelabuhan laut yang baru di Tanjung Priok yang baru selesai dalam tahun 1893. Demikian pula di tempat-tempat lain dibangun pelabuhan-pelabuhan baru, seperti Belawan di Sumatra Timur, *Emmhaven* (Teluk Bayur) di Padang, Sumatra Barat, dan Cilacap di Pantai Selatan, Jawa Tengah.

---

37 *Ibid.*, hlm. 329

38 G.E. Allen & A.G. Donnothorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya*, George Allen & Unwin, 1957, hlm. 26

Selain pembangunan sarana fisik, selama masa liberal pemerintah Hindia Belanda juga lebih giat mengusahakan pembangunan sosial khususnya lembaga-lembaga pendidikan bagi penduduk Indonesia. Sebelum zaman liberal, pemerintah Hindia Belanda secara terbatas telah membuka beberapa sekolah bagi anak-anak bupati dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Di samping usaha pemerintah kolonial, misionaris-misionaris Kristen-Protestan dan Roma Katolik dari negeri Belanda telah membuka sekolah-sekolah bagi penduduk Indonesia, tetapi hanya di daerah-daerah di mana sebagian penduduk tidak menganut agama Islam, seperti daerah kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah kolonial tidak mengizinkan misi-misi Protestan dan Katolik membuka sekolah-sekolah bagi penduduk Nusantara di daerah-daerah beragama Islam karena takut menimbulkan kesulitan dan pertentangan agama.

Baru selama zaman liberal sistem pendidikan bagi penduduk Indonesia mengalami perkembangan yang lebih pesat, suatu hal yang memang mencerminkan sikap kaum liberal mengenai pentingnya penyebaran pendidikan bagi kalangan luas di masyarakat. Dengan dibukanya jembatan-jembatan yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintah kolonial bagi orang-orang Indonesia pribumi maupun orang-orang Indo-Eropa, kebutuhan akan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat memberi latihan-latihan dan pendidikan seperlunya bagi calon-calon pegawai pemerintah, terus meningkat. Salah satu perkembangan penting yang mencerminkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah kolonial terhadap pendidikan bagi golongan pribumi adalah pengangkutan seorang Inspektur Pendidikan Pribumi, yang kemudian diikuti oleh pendirian suatu Departemen Pendidikan Agama dan Industri dalam tahun 1867.[39]

Penggabungan bidang-bidang pendidikan dan industri juga mencerminkan keyakinan pemerintah Hindia Belanda tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pada mulanya sekolah-sekolah dibuka untuk putra-putra para bupati dan pembesar Indonesia lainnya, tetapi secara lambat laun pendidikan juga meluas pada anak-anak yang bukan berasal dari kalangan ningrat dan pembesar-pembesar Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia antara lain ternyata dari angka-angka jumlah sekolah di Indonesia dalam tahun 1882 yang khusus diperuntukkan murid-murid Indonesia yaitu lebih kurang 300 di Jawa dan lebih kurang 400 di daerah-daerah luar Jawa. Jumlah murid yang menghadiri sekolah-sekolah ini lebih kurang 40.000 orang.[40]

[39] J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. 118–119

[40] *Ibid.*, hlm. 220

Meskipun secara sepintas angka ini kelihatan tinggi dibanding dengan jumlah penduduk Nusantara yang menjelang akhir zaman liberal berjumlah lebih kurang 30 juta, angka di atas tidak mengesankan. Selain beberapa ribu orang yang dapat membaca dan menulis, mayoritas dari rakyat buta huruf. Jumlah murid-murid yang diperkenankan memasuki sekolah-sekolah Belanda yang sebenarnya hanya terbuka untuk murid-murid Eropa, lebih kecil lagi, yaitu hanya 2.000 orang pada tahun 1900. Dengan demikian, orang-orang pribumi yang sanggup membaca dan berbicara bahasa Belanda terbatas sekali. Setelah tamat sekolah-sekolah Eropa ini, mereka pun paling-paling dapat mengharapkan kedudukan yang relatif rendah dalam hierarki pemerintah Belanda.

5. Sumatra Timur

Selama dasawarsa-dasawarsa pertama dari abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda pada umumnya tidak melibatkan diri dengan daerah-daerah di luar Jawa, kecuali beberapa daerah yang memang lebih dahulu jatuh di bawah kekuasaan Belanda, seperti kepulauan Maluku, daerah kecil sekitar Makassar, daerah sekitar Banjarmasin, Bengkulu, yang telah diserahkan oleh Inggris kepada Belanda dalam tahun 1824 dalam rangka perjanjian London, dan Sumatra Barat di mana perlawanan terhadap agresi Belanda dapat dipatahkan oleh Belanda dalam tahun 1837. Salah satu faktor penting yang dapat menerangkan keengganan pemerintah Hindia Belanda untuk melibatkan diri terlalu banyak dengan daerah-derah luar Jawa adalah pengalamannya yang buruk selama perjuangan Diponegoro (1825–1830) yang mengajar mereka agar tidak mencoba-coba mengubah tata susunan masyarakat pribumi. Selain pertimbangan ini, Belanda memang tidak begitu berminat untuk mengadakan ekspansi teritorial ke daerah-daerah luar Jawa karena ingin memusatkan segala perhatiannya ke Jawa yang sejak tahun 1830 telah menjelma sebagai suatu daerah koloni yang menghasilkan banyak keuntungan bagi Belanda. Keterlibatan dengan daerah-daerah luar Jawa hanya terjadi secara insidentil, misalnya, jika diadakan ekspedisi militer terhadap beberapa daerah untuk menumpas perampokan di laut.

Keterlibatan Belanda yang lebih intensif dalam urusan-urusan daerah luar Jawa baru terjadi setelah mereka menyadari bahwa suatu politik yang hanya mengutamakan kedaulatan nominal Belanda atas daerah-daerah luar Jawa akhirnya dapat mengancam kedudukan dan hegemoni Belanda di kepulauan Nusantara. Kejadian yang mencetuskan kekhawatiran Belanda adalah kegiatan "Raja Brooke", seorang petualang Inggris di Serawak, mengangkat dirinya menjadi raja di Serawak.

Akan tetapi, faktor terpenting yang akhirnya mendorong Belanda untuk melepaskan "politik tidak campur tangan" dalam urusan-urusan daerah luar Jawa dan mulai mengadakan ekspansi teritorial ke daerah-daerah ini adalah penemuan bahan-bahan mineral yang berharga di daerah-daerah ini, seperti timah di daerah pulau Bangka, Belitung, dan Singkep, batu bara di daerah Ombilin, Sumatra Barat, emas di Kalimantan Barat, dan batu bara di Kalimantan Tenggara.[41] Bahan-bahan mineral ini menjadi penting dalam abad ke-19 bertalian dengan proses industrialisasi yang sedang berjalan di negara-negara Eropa Barat, termasuk negeri Belanda, dan penggunaan bahan-bahan mineral ini sebagai bahan baku bagi produksi berbagai barang jadi.

Kegiatan-kegiatan militer Belanda yang terpenting di daerah-daerah luar Jawa adalah usaha penaklukan Kesultanan Aceh yang dimulai dalam tahun 1873. Selain pertimbangan-pertimbangan politik dan militer, menaklukkan Aceh juga terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi, khususnya pengamanan kepentingan pengusaha-pengusaha yang telah membuka perkebunan-perkebunan tembakau yang besar di daerah Deli, Sumatra Timur, sejak tahun 1863. Sebagai contoh ekspansi ke luar Jawa di sini akan diuraikan kasus Sumatra Timur.

Pada pertengahan abad ke-19 yang kemudian menjadi tersohor sebagai daerah "Pantai Timur Sumatra" masih merupakan suatu daerah terpencil dan terbelakang yang tidak dikenal sama sekali. Tidak mengherankan bahwa pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menduga bahwa daerah ini dalam waktu kurang dari setengah abad akan mengalami perkembangan yang demikian sehingga orang sering menyebut daerah ini sebagai "Amerikanya Hindia" (*Indie Amerika*).[42]

Permulaan perkembangan ekonomi uang terjadi sewaktu Jacob Nienhuis, seorang pengusaha perkebunan Belanda, mengunjungi pantai timur Sumatra Utara untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penanaman tembakau di daerah ini. Perusahaan yang mempekerjakan Nienhuis mendengar dari Abdullah seorang Arab yang bekerja pada Sultan Deli, bahwa mutu tembakau yang ditanam oleh penduduk setempat sangat tinggi. Dalam kunjungan yang pertama ke Sumatra Timur, Nienhuis melihat bahwa Abdullah tidak memperbesar-besarkan mutu tembakau tersebut, artinya ia telah yakin bahwa tembakau yang ditanam oleh penduduk Deli

---

41 W.F. Wertheim, *op. cit.*, hlm. 63

42 Uraian selanjutnya mengenai perkembangan Sumatra Timur ini didasarkan atas tesis Thee Kian Wee, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra*, 1863–1942, Jakarta, 1977

memang sangat tinggi. Meskipun demikian, Nienhuis juga cepat menyadari bahwa jumlah tembakau yang ditanam penduduk setempat terlampau kecil untuk perdagangan tembakau yang menguntungkan. Oleh sebab itu, Nienhuis berusaha untuk menanam sendiri tembakau setelah memperoleh suatu konsesi tanah suci dari Sultan Deli.

Kesulitan pertama yang dihadapi Nienhuis dalam menanam tembakau adalah masalah tenaga kerja. Berbeda dengan keadaan di Jawa, perkebunan-perkebunan besar dapat dengan mudah menarik penduduk setempat untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan tersebut. Nienhuis mengalami banyak kesulitan dalam menarik tenaga kerja yang bersedia bekerja di perkebunan-perkebunannya. Oleh sebab itu, Nienhuis terpaksa pergi ke Penang untuk memperkerjakan orang-orang Cina. Kunjungan ini berhasil sehingga pada tahun 1865 Nienhuis memperoleh hasil panen sebanyak 189 bal daun tembakau yang dapat dijual dengan mudah di negeri Belanda dengan harga yang tinggi.

Keberhasilan Nienhuis dalam menanam tembakau di Deli atas dasar komersial dengan cepat menarik perhatian kalangan-kalangan pengusaha besar di negeri Belanda sehingga mereka mulai merencanakan untuk menanam modal mereka dalam perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Badan Usaha Dagang Belanda (*Nederlandsche Handels Maatschappij* atau NHM) yang didirikan oleh Raja Willem I menaruh perhatian besar pada usaha Nienhuis, dan dalam tahun 1869 perusahaan ini menanam modalnya dalam suatu perusahaan baru yang diberi nama Badan Usaha Deli (*Deli Maatschappij*) yang dikepalai oleh Nienhuis sendiri. Perusahaan-perusahaan lain kemudian juga menyusul karena tertarik pada harga tinggi yang dapat diperoleh tembakau Deli di pasar dunia. Karena tanah di daerah Sumatra Timur dapat diperoleh dengan mudah dari para sultan daerah tersebut atas dasar konsesi, harga yang tinggi yang dapat diperoleh tembakau Deli di pasar dunia dapat menjamin keuntungan yang besar bagi perusahaan-perusahaan yang menanam modal mereka dalam perkebunan-perkebunan tembakau ini. Sultan-sultan Melayu di daerah Sumatra Timur dengan mudah dapat menyediakan tanah atas dasar konsesi kepada perkebunan-perkebunan besar karena daerah Sumatra Timur adalah suatu daerah yang untuk sebagian besar terdiri atas hutan lebat yang hanya didiami oleh sedikit orang. Tidak mengherankan bahwa dengan demikian para sultan bersedia memberikan konsesi-konsesi tanah dengan pembayaran suatu jumlah tertentu sebagai imbalan dari perkebunan-perkebunan besar.

Penanaman tembakau yang menguntungkan sekali serta tersedianya tanah yang murah berhasil menarik banyak modal sehingga Sumatra Timur mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dan mungkin unik dalam

sejarah kolonial mana pun juga. Lebih kurang 25 tahun, setelah Nienhuis untuk pertama kali membuka perkebunan tembakau di Deli, topografi Sumatra Timur berubah sama sekali dari keadaan semula dan menjelma menjadi suatu daerah perkebunan besar yang menyusur pantai Sumatra Timur sepanjang 200 km.[43]

Pengalaman yang diperoleh perkebunan-perkebunan tembakau itu menunjukkan bahwa mutu tinggi dari tembakau Deli yang tersohor di pasar dunia memerlukan kondisi tanah yang baik yang hanya dapat dipertahankan jika tanah yang ditanami itu hanya dipakai selama 1 tahun dalam suatu siklus penanaman tembakau dari 8 tahun atau kadang-kadang lebih lama lagi jika keadaan tanah tidak begitu baik.[44]

Dengan demikian, perkebunan-perkebunan tembakau, seperti juga halnya dengan para petani setempat, melaksanakan pertanian ladang (*Shifting Cultivation*), di mana perusahaan tembakau tiap tahun berpindah ke suatu bidang tanah yang baru untuk menanam tanaman tembakau yang baru. Hal ini berarti bahwa perkebunan-perkebunan tembakau juga memerlukan luas tanah paling sedikit 8 kali lebih luas daripada bidang tanah yang ditanam dalam suatu tahun tertentu.[45] Dengan demikian, penanaman tembakau merupakan suatu sistem pertanian yang sangat ekstensif yang hanya dapat dilakukan di suatu daerah yang relatif kosong dengan jumlah penduduk yang kecil seperti halnya di Sumatra Timur pada abad ke-19.

Sistem pertanian tembakau yang sangat ekstensif itu menyebabkan tanah di Sumatra Timur yang cocok untuk penanaman tembakau lambat laun menjadi langka sehingga prospektor-prospektor tanah mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan penanaman tembakau di daerah-daerah di luar Deli, Serdang, dan Langkat yang merupakan daerah inti perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatra Timur. Di samping daerah-daerah sebelah selatan dan utara daerah pantai Sumatra Utara, para prospektor tanah juga menjajaki kemungkinan penanaman tembakau di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, bahkan di Sabah. Akan tetapi, keadaan tanah daerah-daerah ini tidak begitu cocok untuk penanaman tembakau Deli dengan sifatnya yang khas itu, dan bahwa hanya daerah pantai timur Sumatra, khususnya Deli, memiliki tanah yang paling cocok untuk tembakau Deli.[46]

---

43 R. van De Waal, "Richtlijnen voor een Ontwikkelingsplan voor de Oostkust van Sumatra", disertasi pada Sekolah Tinggi Pertanian, Wageningen, 1959, hlm. 3

44 Allen & Dornithorne, *op. cit.*, hlm. 97–98

45 Karl Pelzer, "The Agrarian Conflict of East Sumatra", Pacific Affairs, Juni 1957, hlm. 155

46 W.H.M. Schedee, *Geshiedenis van Sumatra's Oostkust*, vol. II, Amsterdam, Ostkust van Sumatra Instituut, 1918, hlm. 182

Perkembangan di daerah Deli, Langkat, dan Serdang akhirnya mengalami kemunduran-kemunduran juga. Pada akhir dasawarsa delapan puluhan mulai tampak tanda-tanda adanya kelebihan produksi, terlebih-lebih pada tahun 1891 sewaktu panen tembakau ternyata berjumlah 50.000 bal atau lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Akibat kelebihan produksi ini terjadi suatu krisis yang mengakibatkan bahwa harga di pasar dunia jatuh lebih dari 50% di bawah tingkat harga tahun sebelumnya.

Beberapa faktor dapat menerangkan krisis ini. *Pertama*, pasar dunia mengalami kelebihan penawaran tembakau, terutama karena kenaikan produksi tembakau Deli. *Kedua*, UU Tarif Bea Masuk Mc. Kinley (tarif bea masuk atas impor tembakau ke Amerika Serikat) sangat dinaikkan sehingga pada tahun 1891 pembelian tembakau oleh Amerika tidak terjadi. Dengan adanya persediaan tembakau di satu pihak dan pengurangan pembelian tembakau di lain pihak tidak mengherankan jika krisis tembakau dapat terjadi.

Salah satu akibat adanya krisis tahun 1891 adalah ditutupnya berbagai perkebunan tembakau. Antara tahun-tahun 1890 dan 1894 tidak kurang dari 25 perusahaan tembakau yang memiliki banyak perkebunan dibubarkan. Hal ini meningkat dalam tahun 1891 dengan jumlah 236.323 bal jatuh sampai tingkat produksi 144.689 bal dalam tahun 1892.[47]

Krisis tahun 1891 menandakan berakhirnya tahap pertama dari sejarah ekonomi pantai timur Sumatra, suatu tahap yang ditandai oleh pertumbuhan pesat dari produksi tembakau, demikian tumbuhan yang abnormal, setelah krisis, suatu tahap baru dimulai yang dapat digambarkan sebagai tahap konsolidasi. Para spekulan yang banyak bergiat dalam perusahaan-perusahaan tembakau selama tahap pertama meninggalkan Sumatra Timur dan perkebunan-perkebunan tembakau yang tetap bertambah hanya dipimpin oleh pengusaha-pengusaha yang benar-benar berkepentingan dalam investasi yang sehat dalam perkebunan-perkebunan tembakau. Pengusaha-pengusaha ini kemudian giat berusaha untuk mengadakan rasionalisasi dalam penanaman tembakau, antara lain dengan perbaikan metode-metode produksi dan dengan mengadakan penelitian-penelitian ilmiah yang ditunjukkan untuk memperbaiki mutu tembakau Deli yang memang sudah tersohor mutunya. Penelitian yang diadakan untuk lebih memperbaiki mutu tembakau Deli dilakukan oleh lembaga penelitian Deli (*Deli Proef Station*) yang didirikan oleh perhimpunan pengusaha-pengusaha perkebunan Deli (*Deli Planter's Vereniging*), yaitu perhimpunan para pengusaha perkebunan tembakau di Sumatra Timur. Krisis tahun 1891

[47] W. Westerman, *De Tabakscultuur op Sumatra's Oostkust*, Amsterdam: J.M. de Bussy, 1904, hlm. 4

juga menyadarkan para pengusaha perkebunan tembakau bahwa tembakau Deli hanya dapat ditanam di beberapa daerah saja di Sumatra Timur khususnya Deli, Langkat, dan Serdang, yang memiliki kombinasi iklim dan tanah yang khas yang tidak terdapat di tempat-tempat lain di Sumatra Timur. Peran tembakau Deli di tempat lain memperlihatkan merosotnya mutu tembakau Deli sehingga tidak memiliki lagi sifat-sifat yang unggul yang tersohor di seluruh dunia. Salah satu akibat penting krisis tahun 1891 adalah dikuranginya luas tanah yang ditanami tembakau. Sementara itu, akibat krisis tembakau tahun 1891 adalah peningkatan usaha penanaman tanaman-tanaman perdagangan baru yang mempunyai prospek ekspor yang baik di pasaran dunia. Krisis tahun 1891 memperlihatkan bahaya ekonomi yang hanya bergantung pada satu tanaman (*monoculture economy*). Mula-mula diadakan usaha-usaha untuk menanam kopi di daerah Serdang, tetapi saingan dari Brasil mengakibatkan penanaman kopi itu tidak begitu menguntungkan sehingga setelah beberapa tahun dihentikan sama sekali.

Penanaman kopi juga tidak kelihatan menarik karena justru pada waktu itu pengusaha-pengusaha perkebunan besar sedang memulai menanam karet jenis *Hevea Brasiliensis* di perkebunan-perkebunan mereka yang ternyata mempunyai prospek yang baik sekali. Penanaman karet ternyata menguntungkan sekali sehingga banyak perkebunan kopi kemudian dijadikan perkebunan karet. Daerah yang kemudian menjelma sebagai pusat penanaman karet adalah daerah Serdang, seperti juga Deli merupakan pusat penanaman tembakau, sehingga karet menjadi motor penggerak ekonomi daerah Sumatra Timur. Seperti juga halnya tembakau, Deli juga pernah menjadi motor penggerak daerah ini beberapa dasawarsa yang lalu.

Suatu pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi Sumatra Timur tidak lengkap tanpa pembahasan masalah tenaga kerja yang dihadapi perkebunan-perkebunan besar di Sumatra Timur mulai sejak daerah ini dibuka untuk modal dan usaha berat. Seperti telah disinggung di atas, Nienhuis mengalami betapa sukarnya memperoleh tenaga kerja bagi perkebunan tembakau yang baru dibukanya karena penduduk setempat pada umumnya tidak bersedia bekerja pada perkebunan-perkebunannya. Ditinjau dari segi ekonomi, keengganan penduduk setempat untuk bekerja sebagai buruh perkebunan dapat dimengerti karena dengan jumlah penduduk yang kecil dan tersedianya tanah yang luas tidak terdapat perangsang ekonomi yang besar bagi mereka untuk menambah nafkahnya dengan bekerja pada perkebunan-perkebunan besar sebagai buruh tetap. Hal ini jelas berbeda sekali dengan keadaan di Jawa di mana adanya tekanan penduduk Jawa untuk mencari tambahan nafkah dengan bekerja pada perkebunan-perkebunan besar.

Kekurangan tenaga kerja yang mula-mula dialami oleh Nienhuis dan para pengusaha perkebunan lainnya yang kemudian menyusulnya, mendorong para pengusaha ini untuk menarik tenaga kerja dari daerah-daerah lain. Pada tahun-tahun pertama pengusaha-pengusaha perkebunan Deli berhasil menarik tenaga kerja Cina yang diambil dari Penang dan Singapura melalui perantara-perantara (broker) Cina. Usaha untuk mempekerjakan buruh-buruh Cina ini sangat berhasil sehingga dalam tahun 1871, yaitu hanya 8 tahun setelah daerah Sumatra Timur dibuka untuk investasi modal Barat, perkebunan-perkebunan tembakau di Deli sudah mempekerjakan kurang lebih 3.000 buruh Cina.

Dalam pada itu usaha pengerahan tenaga kerja dengan sistem perantara ternyata mempunyai kelemahan dan kekurangan, karena menimbulkan penyelewengan pada pihak perantara yang sering menculik atau membujuk calon buruh dengan janji yang muluk-muluk untuk pergi ke Sumatra Timur tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya di sana. Di samping itu, pengerahan tenaga kerja melalui perantara juga mahal sekali, karena perantara-perantara ini menuntut uang komisi yang tinggi sekali untuk jasa mereka.

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan ini para pengusaha perkebunan di Sumatra Timur mengambil keputusan untuk mencari sendiri pekerja-pekerja di negeri Cina. Seperti telah dikemukakan di atas pada tahun 1879 para pengusaha perkebunan tembakau di Sumatra Timur telah bergabung dalam perhimpunan pengusaha-pengusaha perkebunan Deli (*Deli Planters Vereneging* atau DPV) dengan tujuan agar perhimpunan ini dapat menggarap berbagai masalah yang dihadapi pengusaha-pengusaha perkebunan ini, antara lain mengenai kerja. Untuk ini, dalam tahun 1888 DPV mendirikan suatu biro imigrasi (*Immigratie Bureau*) untuk mengurus secara langsung seleksi calon pekerja negeri Cina dan pula pengangkutan pekerja-pekerja yang diseleksi itu dari negeri Cina ke Sumatra Timur. Di samping itu, biro imigrasi mengurus alokasi (pembagian) pekerja-pekerja yang baru tiba itu di antara berbagai perkebunan, dan pula memberikan pertolongan dalam transfer simpanan dari pekerja-pekerja ini keluarga mereka di negeri Cina. Transfer simpanan ini sangat dianjurkan oleh biro imigrasi karena merupakan faktor insentif yang kuat bagi pekerja-pekerja ini untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan di Sumatra Timur.

Sebagai hasil pekerjaan Biro Imigrasi ini pekerja-pekerja yang direkrut di negeri Cina bertambah dengan pesat, seperti terlihat dari angka-angka yang berikut. Misalnya, dalam tahun 1888, 1.152 pekerja didatangkan dari negeri Cina, tetapi setahun kemudian angka ini sudah meningkat hampir

lima kali lipat sampai 5.167, untuk seterusnya meningkat lagi sampai 6,666 dalam tahun 1890.[48]

Dalam tahun-tahun berikutnya ribuan pekerja menyusul dari negeri Cina, sedangkan dari pekerja-pekerja yang telah menyelesaikan masa kerjanya hanya sebagian kecil saja pulang kembali ke tanah air mereka. Bagian terbesar dari pekerja-pekerja yang telah menghabisi masa kerja kemudian memperpanjang kontrak kerja mereka atau memutuskan untuk terus menetap di Sumatra Timur.

Tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan Sumatra Timur didatangkan dari negeri Cina di bawah sistem kontrak. *Hla Myint* mendefinisikan sistem kerja kontrak sebagai berikut: "... suatu sistem di mana pihak majikan membayar biaya pengangkutan pekerja-pekerja dari tempat asal mereka ke tempat pekerjaan, sedangkan para pekerja mengikat diri bekerja untuk masa beberapa tahun dengan upah tertentu."[49]

Mengingat kesulitan besar dan biaya tinggi yang perlu dibayar oleh perkebunan-perkebunan Sumatra Timur untuk mendatangkan pekerja-pekerja ke Sumatra Timur, tampaknya memang cukup beralasan jika perkebunan mengharuskan calon-calon pekerja mendatangi kontrak kerja dahulu yang dapat memberikan jaminan bahwa para pekerja akan tetap bekerja di sana sedikitnya untuk suatu masa tertentu. Perlu diingat bahwa penjualan budak-budak di muka umum telah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1854, sedangkan dalam tahun 1860 telah dikeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sama sekali sistem perbudakan di Hindia Belanda.[50]

Tidak mengherankan bila dalam keadaan demikian sistem kerja kontrak kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan Sumatra Timur untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerjaan-pekerjaan sedikitnya untuk beberapa tahun. Di lain pihak, para pekerja tentu saja berhak atas perlindungan yang memadai karena mereka pergi ke suatu tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Mereka berhak atas keadaan kerja dan keadaan hidup yang layak dan berhak atas jaminan bahwa mereka tidak akan dikeluarkan begitu saja dari pekerjaan sehingga telantar begitu saja di hutan rimba Sumatra Timur.[51]

---

[48] J.M. Bool, *De Chinese Immigratie naar Deli*, 1903, hlm. 76–77

[49] Hla Myint, *The Economies of the Developing Countries*, New York, hlm. 62–63

[50] Virginia Thompson, *Labor Problems in Southeast Asia*, New Haven: Yale University Press, 1947, hlm. 151

[51] Cecil Rothe, *Arbeid in de Landbouw: De Landbouw in de Indische Archipel*, vol. 1, Den Haag, hlm. 318

Dalam tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatra Timur yang disebut *koeli ordonnantie*. *Koeli ordonnantie* ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatra Timur, kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menuntut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan. Untuk memberi kekuatan pada peraturan-peraturan dalam *Koeli Ordonnantie*, dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian, ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan.

Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja kemudian terkenal sebagai *poenalie sanctie*. *Poenalie sanctie* membuat ketentuan bahwa pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sumatra Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa ke perkebunan dengan kekerasan jika mengadakan perlawanan. Hukuman lain dapat berupa kerja paksa pada pekerja-pekerja umum tanpa pembayaran atau perpanjangan masa kerja yang melebihi ketentuan-ketentuan kontrak kerja.[52]

Koeli Ordonannantie, yang pertama kemudian diikuti oleh *ordonantie-ordonantie* dari tahun 1884 dan 1893 yang memberi jaminan hak pengawasan hukum pada para majikan atas kuli-kuli kontrak mereka. Selain *poenale sanctie*, pengusaha-pengusaha perkebunan mempunyai cara lain untuk menahan pekerjaan-pekerjaan mereka. Salah satu cara adalah memberi kesempatan judi bagi para pekerja pada hari pembayaran gaji. Cara ini ternyata berhasil sekali karena pekerja-pekerja sering terjerat utang yang begitu besar jika kalah judi sehingga menandatangani kontrak kerja baru dengan majikan-majikan mereka untuk memperpanjang masa kerja.[53]

Menjelang akhir abad ke-19, di negeri Belanda mulai timbul kontroversi yang hangat mengenai *poenalie sanctie*. Perdebatan ini berlangsung lama

---

52 *Ibid*., hlm. 318–320

53 W.F. Wertheim, *op. cit*., hlm. 245

sekali dan baru mulai mereda selama dasawarsa tiga puluhan sehingga *poenalie sanctie* akhirnya dihapuskan sama sekali. Hal ini menyebabkan timbulnya kontroversi mengenai *poenalie sanctie* adalah penerbitan suatu pamflet yang berjudul *De Millioenen van Deli* (Jutaan dari Deli) yang dikarang oleh J. Van den Brand, seorang pengacara Belanda. Dalam tulisannya itu ia mengungkapkan kepada rakyat Belanda keadaan kerja yang buruk sekali di Sumatra Timur, yang disamakan dengan keadaan yang tidak banyak berbeda dengan perbudakan. Van den Brand mengutip banyak contoh yang konkret mengenai perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap pekerja-pekerja mereka di perkebunan. Pamflet van den Brand menimbulkan kemarahan yang besar di kalangan masyarakat Belanda sehingga pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengadakan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan lingkungan kerja pekerja-pekerja perkebunan di Sumatra Timur. Walaupun lambat, dalam abad ke-20 perlakuan terhadap pekerja-pekerja perkebunan mengalami perbaikan berkat usaha ini.

Bab VII
Gerakan Sosial

Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, di Indonesia terus-menerus timbul perlawanan, kerusuhan, kegaduhan, brandalan, dan sebagainya, yang semuanya itu cukup mengguncangkan masyarakat dan pemerintah waktu itu. Peristiwa-peristiwa itu terutama banyak terjadi di daerah perdesaan. Boleh dikatakan hampir tiap tahun di salah satu daerah terjadi pergolakan dan kerusuhan, yang sering diwujudkan sebagai tindakan-tindakan yang bersifat agresif dan radikal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pergolakan sosial menjadi endemis sifatnya. Gerakan itu ternyata merupakan kekuatan sosial yang besar di daerah perdesaan. Timbulnya pergolakan itu dapat dianggap sebagai suatu ledakan daripada ketegangan-ketegangan, permusuhan, atau pertentangan yang terdapat di dalam masyarakat perdesaan. Sikap rakyat dalam mengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang sangat radikal karena digerakkan oleh harapan-harapan yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran mesianistis atau milenaristis dan juga dengan pandangan eskatologi yang bersifat revolusioner. Sebagai aktivitas kolektif, gerakan sosial yang didukung oleh rakyat petani bertujuan hendak mewujudkan ataupun sebaliknya menolak suatu perubahan susunan masyarakat. Dalam usaha untuk melaksanakan tujuannya itu, sering kali ditempuh jalan radikal atau revolusioner.

Tidak dapat disangkal bahwa dominasi Barat beserta perubahan-perubahan sosial yang mengikutinya telah menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan rakyat untuk cenderung melakukan pergolakan sosial. Dominasi ekonomi, politik, dan kultural yang terjadi pada masa kolonial telah mengakibatkan timbulnya disorganisasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya. Dengan dimasukkannya sistem ekonomi uang, beban rakyat menjadi bertambah berat. Sistem ekonomi uang ini telah memungkinkan pelaksanaan sistem perpajakan, peningkatan perdagangan hasil bumi, timbulnya buruh upahan, masalah kepemilikan, dan penggarapan tanah. Dengan adanya subordinasi ekonomi itu, pengerahan tenaga dan kondisi kerja menjadi tergantung pada pihak penguasa kolonial. Selain itu, dengan adanya perkembangan perdagangan dan industri pertanian timbul deferensiasi struktural di dalam masyarakat Indonesia sehingga timbul pula peran-peran tradisional. Dalam bidang politik timbul banyak penetrasi sistem administrasi yang bersifat legal

rasional yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Sementara itu, lembaga-lembaga politik tradisional semakin terdesak. Demikian pula penguasa-penguasa tradisional merosot kedudukannya menjadi alat birokratis yang sepenuhnya ditempatkan di bawah pengawasan kekuasaan kolonial, yaitu sebagai akibat timbulnya proses birokratisasi menurut nilai dan ukuran Barat. Timbulnya ide baru mengenai kehidupan sosial membuat bangunan tradisional tersebut semakin diperlemah. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, golongan-golongan sosial ditempatkan di luar kerangka sosial dan merongrong kekuatan norma-norma tradisional sebagai pedoman hidup. Dalam situasi yang demikian itu timbul kecenderungan masyarakat untuk mencari pegangan-pegangan lama, antara lain dengan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional.

Dalam menghadapi pengaruh penetrasi budaya Barat yang memiliki kekuatan desintegratif, masyarakat Indonesia mempunyai cara-cara untuk membuat reaksi sendiri. Karena di dalam sistem kolonial tidak terdapat lembaga-lembaga untuk menyalurkan perasaan tidak puas atau kekuatan oposisional, jalan yang akan ditempuh adalah dengan mengadakan gerakan sosial sebagai protes sosial. Dalam perwujudannya, gerakan protes sosial itu sering kali diperkuat oleh perasaan keagamaan dan menjadi gerakan sosial politik. Kekuatan-kekuatan yang timbul dari kepercayaan agama yang berakar dalam tradisi rakyat untuk melawan ekspansi kolonial adalah sangat membahayakan. Dalam situasi yang demikian itu timbul harapan akan kedatangan seorang mesias atau ratu adil yang diharapkan dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Konsepsi kehadiran ratu adil itu antara lain berisi harapan akan kembalinya susunan masyarakat lama atau datangnya zaman keemasan, yang biasanya hal itu membuat gerakan protes menjadi sangat radikal serta revolusioner sifatnya. Dengan demikian, protes sosial yang mengambil jalan kekerasan yaitu dengan melancarkan pemberontakan secara aktif dapat dibenarkan oleh tradisi mesianistis.

Gerakan-gerakan rakyat itu umumnya dianggap sebagai gerakan yang bersifat arkais karena organisasinya, programnya, serta strategi dan taktiknya masih terlalu sederhana apabila dibandingkan dengan gerakan sosial modern seperti yang dilancarkan oleh komunisme dan fasisme. Oleh sebab itu, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukannya mudah sekali ditindas oleh kekuatan militer kolonial. Pada umumnya gerakan-gerakan semacam itu sangat pendek umurnya atau abortif, dan merupakan pergolakan lokal atau regional yang tidak ada koordinasi satu sama lain. Dalam peristilahan kolonial, peristiwa-peristiwa munculnya aksi gerakan sosial itu sering digolongkan dengan sebutan-sebutan sebagai "gangguan ketenteraman", "huru-hara", "kerusuhan", atau "gerakan rohani".

Pergolakan-pergolakan itu tidak semuanya termasuk kategori dari peristiwa perang-perang besar, seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, maupun Perang Aceh. Selain sifatnya yang tradisional arkais, gerakan sosial juga memiliki orientasi tujuan yang masih kabur, pengikut atau pelaku-pelakunya tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang tata masyarakat dan tata pemerintahan yang akan direalisasikan andaikata perjuangan itu dapat mencapai kemenangan. Sifat yang tradisional arkais juga tercermin, antara lain bahwa gerakan tersebut sering kali tidak dapat dipisahkan dari segi-segi religio magis. Dalam lingkungan sosio kultural pada masa itu, loyalitas dan sentimen pokok tidak ada kecuali sentimen keagamaan sehingga agitasi-agitasi atau reaksi yang dilancarkan terhadap tantangan Barat pada hakikatnya adalah bersifat keagamaan.

Dapat ditunjukkan bahwa selama periode abad ke-19 dan ke-20 hampir setiap daerah mengenal masa-masa pergolakan yang tercermin dalam bentuk gerakan-gerakan sosial dengan segala perkembangannya. Secara luas gerakan-gerakan itu pada hakikatnya dapat digolongan menjadi empat golongan, sesuai dengan landasan-landasan pokok yang mendorong timbulnya gerakan tersebut. *Pertama*, adalah jenis gerakan melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Dalam hal ini ideologi yang pokok yang mendorong timbulnya gerakan ini adalah adanya rasa dendam terhadap kondisi sosial ekonomi yang kurang memberi tempat yang bebas bagi kehidupan para pendukungnya. Golongan *kedua*, adalah jenis gerakan ratu adil, yaitu suatu gerakan yang bersifat mesianistis yang memuat harapan akan kedatangan ratu adil, atau imam mahdi sebagai juru selamat rakyat. Golongan *ketiga*, adalah gerakan Samin. Golongan *keempat*, yang terakhir, adalah jenis gerakan-gerakan sekte keagamaan, yang memuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya. Sebagai bukti yang nyata dari gerakan ini sejak tahun 1860 terdapat pertumbuhan pesat dari tarekat-tarekat, seperti tarekat Kadiriyah terutama di Banten, tarekat Nasibandiyah di Priangan Barat, dan tarekat Satariyah di Banyumas.[1]

Uraian beserta contoh-contoh yang memuat fakta-fakta detail mengenai gerakan sosial berikut ini akan dapat memberikan gambaran tentang ciri-ciri penting dari gerakan sosial tersebut dan juga tentang pola-pola kepemimpinan ideologi serta bentuk-bentuk organisasinya.

---

[1] Aliran Kadiriyah memasuki masyarakat Islam Banten sebelum abad XIX, sedangkan aliran Satariyah sejak abad XVII menyebar di kalangan masyarakat Aceh, lalu ke Jawa Barat dan akhirnya berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888, Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia.* Terjemahan oleh Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hlm. 212

A. Gerakan Melawan Pemerasan

1. Pendahuluan

Agitasi kaum petani yang timbul di tanah partikelir (*particuliere landerijen*) sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan suatu gejala historis dari masyarakat petani pribumi. Pada umumnya hampir semua perlawanan atau kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir merupakan akibat dari adanya tuntutan pajak dan kerja rodi (*herendiensten*) yang tidak adil terhadap kaum petani di daerah itu. Oleh karena itu, kerusuhan-kerusuhan di tanah partikelir sering disebut sebagai kerusuhan *cuke*, sesuai dengan salah satu nama jenis pungutan pajak yang paling membebani petani-petani di daerah itu. Kerusuhan *cuke* pada hakikatnya tidak mempunyai ciri-ciri umum sebagai gerakan sosial. Meskipun isu-isu tentang adanya kebangkitan agama atau fanatisme Islam sering kali disertakan dalam laporan-laporan tuan tanah atau pemerintah, bukti yang menunjukkan intensitas fanatisme itu tidak banyak kelihatan. Menurut Sartono Kartodirdjo, pergolakan di tanah partikelir berbeda dengan gerakan sosial lainnya. Pergolakan di tanah partikelir itu lebih terarah secara khusus pada suatu rasa dendam tertentu. Selain itu, gerakan tersebut mempunyai sifat *magico religious* seperti yang tercermin dalam tujuannya yang bersifat milenaristis atau mesianistis. Oleh karena adanya harapan yang milenaristis itu, kerusuhan-kerusuhan di tanah partikelir dapat dianggap sebagai contoh pergolakan yang dijiwai oleh semangat keagamaan. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu kadang-kadang tidak hanya bersifat sporadis, tetapi tidak jarang juga muncul sebagai perlawanan yang teratur.[2] Untuk dapat memahami sebab-sebab timbulnya kerusuhan-kerusuhan di tanah partikelir, perlu kiranya lebih dahulu diutarakan sedikit tentang terjadinya tanah partikelir dan keadaan di dalamnya.

Tanah-tanah partikelir (*particuliere landerijen*) adalah tanah milik swasta yang muncul akibat praktik-praktik penjualan oleh Kompeni (VOC 1602–1799). Kebijakan seperti itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) dan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811–1816) yang berlanjut sampai sekitar tahun 1820-an. Dalam prosesnya, penjualan tanah partikelir berbeda dengan penjualan tanah biasa seperti yang dikenal pada masa kini. Pada penjualan itu yang diserahkan bukan hanya sebidang tanah dengan berbagai jenis tanaman di atasnya, melainkan penyerahan suatu wilayah berikut

---

[2] Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Kuala Lumpur, 1978, hlm. 21–26

dengan penduduk yang hidup di atasnya. Kepemilikannya pun bersifat mutlak dalam jangka waktu yang dapat dikatakan relatif tanpa batas. Selain itu, para pemiliknya yang lazim disebut "tuan tanah" (*landheer*) memperoleh hak-hak istimewa, yang tiada lain adalah hak-hak yang biasanya dipegang oleh pemerintah, seperti hak fiskal dan keamanan (kepolisian setempat). Mereka berhak menuntut sebagian hasil produksi tanah garapan para petani dan berhak pula menuntut penyerahan tenaga kerja bagi keperluan pribadinya, seperti memetik buah, menggarap dan memelihara tanaman, atau mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya.[3]

Tanah partikelir timbul sebagai akibat adanya praktik-praktik penjualan tanah yang dilakukan oleh Belanda semenjak permulaan zaman VOC sampai perempat pertama abad ke-19. Tanah-tanah semacam itu terdapat di sekitar Batavia, Bogor, Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Alasan penyerahan tanah-tanah itu cukup bervariasi. VOC misalnya, pada awalnya menyerahkan tanah dengan status tanah partikelir dilandasi kepentingan politis. VOC banyak menghadiahkan tanah-tanah itu kepada orang-orang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas keamanan dan ketenteraman di sekitar Batavia, termasuk beberapa mantan pegawai atau perwira VOC; dan dalam jumlah kecil juga dihadiahkan kepada beberapa kepala penduduk pribumi, yaitu untuk mencari dukungan dari pihak-pihak atau tokoh-tokoh tertentu. Sementara itu, tanah di sekitar Bogor menjadi milik pribadi para gubernur jenderal secara berturut-turut. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels dan Raffles, banyak tanah dijual dengan status tanah partikelir karena pemerintahan waktu itu memerlukan banyak dana untuk reorganisasi dan rasionalisasi pemerintahan Hindia, yang justru dalam keadaan bangkrut.

Dengan adanya hak-hak istimewa itu tuan tanah melakukan eksploitasi tanah miliknya semaksimal mungkin. Bahkan tidak jarang pihak tuan tanah melakukan berbagai kecurangan dengan cara memanipulasi reglemen dan kontrak-kontrak kerja yang ada. Pada masa Daendels dan Raffles telah diadakan perbaikan, yaitu dengan adanya larangan kepada tuan rumah untuk menerima sepersepuluh dari hasil tanah atau memungut penyerahan tenaga kerja yang berat. Namun, karena kontrol pemerintah pada umumnya sangat lemah, pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan tuan tanah tetap terjadi. Akibatnya, pada tahun 1816 di beberapa tanah partikelir, seperti di sekitar Batavia dan Cirebon, muncul perlawanan dari

[3] Mengenai hak-hak serta kewajiban pemilik tanah partikelir dapat dilihat dalam reglemen-reglemen yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda, misalnya yang paling terkenal ialah Reglemen Tahun 1836 No. 19. (Lihat *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1836 No. 19)

para petani. Peristiwa itu telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru yang dinilai dapat melindungi para petani. Beberapa kali reglemen baru diterbitkan. Akhirnya, pada 28 Februari 1836 pemerintah menerbitkan Peraturan (Reglemen) No. 19, khusus bagi tanah-tanah partikelir yang berada di sebelah barat sungai Cimanuk.[4] Di dalam reglemen itu secara tegas disebutkan bahwa pemerintah tetap mempunyai hak yang tidak dapat diganggu gugat dengan penyerahan tanah-tanah itu, khususnya dalam masalah perlindungan terhadap kesejahteraan penduduk dan masalah tata tenteram. Akan tetapi sekali lagi, tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan kontrolnya terhadap tanah partikelir, membuat tindakan tuan tanah yang sewenang-wenang tetap berjalan sehingga menimbulkan kegelisahan dan frustrasi di kalangan para petani. Perlawanan pun kembali terjadi berulang kali. Secara berturut-turut, pada tahun 1845, 1886, dan 1892 terjadilah kerusuhan yang sengit di Candi Udik, Ciomas, dan Campea. Dari tahun 1913 pergolakan-pergolakan semakin terjadi lebih umum dan mendalam.

Pada tahun 1915 di Jawa terdapat 582 tanah partikelir, yang meliputi luas tanah sekitar 1,3 juta *bau* (1 bau = 0,8 hektare) dan dengan penduduk sebanyak lebih kurang 1,8 jiwa. Beberapa di antaranya ada yang merupakan daerah yang luas dengan penduduk 75.000 jiwa (bahkan ada yang meliputi 175.000 jiwa). Sebagian besar tanah itu dimiliki oleh persekutuan usaha bersama, oleh tuan-tuan tanah bangsa Eropa yang tinggal di luar Indonesia dan oleh orang-orang Cina. Tanah partikelir di timur sungai Cimanuk yang tidak begitu luas dikuasai oleh orang-orang Cina dan orang-orang asing non-Eropa. Sejak semula yang menjadi tujuan pokok tuan tanah adalah memperoleh penghasilan dari tanah yang dikuasainya. Cara mengusaha-kannya antara lain dengan jalan menarik hasil secara langsung, mengumpulkan uang sewa, dan bagian panen, dan ada pula yang memungut pajak beserta tenaga kerja dari petani-petani yang menanami tanah tersebut. Untuk menyelenggarakan eksploitasi kekayaannya itu, para tuan tanah mengangkat pegawai administrasi, pengawas, dan pemungut pajak. Selain padi, para tuan tanah juga mengusahakan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, seperti kopi, teh, dan cokelat.

Sebagian besar hak milik para penanam adalah tidak tetap. Mereka sesungguhnya telah kehilangan otonomi dalam kehidupan ekonominya

---

[4] Reglemen No. 19 Tahun 1836 hanya berlaku bagi tanah partikelir yang berada di sebelah barat sungai Cimanuk, Cirebon. Adapun bagi tanah-tanah partikelir yang berada di sebelah timur sungai Cimanuk masih menggunakan reglemen lama dan baru tahun 1880 terbit reglemen tersendiri bagi tanah partikelir yang berada di sebelah timur sungai Cimanuk

sekalipun menurut hukum mereka masih tetap orang bebas. Sedikit banyak mereka itu merupakan buruh sewaan yang hidupnya bergantung pada tuan-tuan tanah. Sebaliknya, sebagai orang yang berkuasa, para tuan tanah dapat bertindak sewenang-wenang, seperti (a) dapat memaksakan segala macam kehendaknya, (b) menuntut penyerahan tenaga kerja, dan (c) mengusir para petani apabila mereka tidak dapat membayar utangnya atau memenuhi pekerjaan yang diminta, dan membayar pajak sebagaimana mestinya.

Pada pokoknya para petani bertanggung jawab dalam urusan pembayaran *cuke*, *pajeg*, atau kontingensi (*contingent*). *Cuke* dan *pajeg* adalah pajak yang dikenakan pada tanaman padi dan kacang. Jumlah *cuke* yang dibayarkan adalah seperlima dari hasil panen. *Pajeg* pada dasarnya sama dengan *cuke*, yaitu seperlima, tetapi berbeda dalam hal penetapannya, yaitu dihitung untuk satu periode tertentu yang dapat diperpanjang pada periode berikutnya sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, penarikan *pajeg* tidak lagi memerhatikan realitas hasil panen yang terjadi pada saat ditariknya *pajeg* tersebut. Sementara kontingensi adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanaman selain padi dan kacang. Cara menariknya juga tidak berdasarkan hasil panen, tetapi berdasarkan periode tertentu yang disepakati sebelumnya.[5] Selain itu, para petani masih dibebani berbagai macam tugas pekerjaan. Mereka yang mengolah tanah berkewajiban untuk melakukan kerja *kompenian* (kerja rodi) selama lima hari setiap bulannya. Para tuan tanah menuntut pekerjaan itu kepada para petani sebagai gantinya untuk pemerintah. Pelayanan kerja lainnya yang harus diserahkan antara lain yaitu, seperti kerja *garol* (kerja rodi yang dilakukan pada hari-hari tertentu dan untuk tujuan tertentu pula), *kroyo* (kerja bantu yang diambil alih dari adat kebiasaan penduduk setempat), dan tugas *kemit* (perondaan keamanan desa, yang dalam praktiknya adalah untuk menjaga gudang-gudang atau pabrik-pabrik milik tuan tanah).[6] Meskipun ada kontrak kerja yang telah disepakati antara pihak tuan tanah dan para petani, seperti telah disinggung di atas, para petani tidak mendapat jaminan perlindungan pada masa-masa terjadinya bencana alam, kegagalan panen, sakit, dan halangan lainnya. Justru sebaliknya, para tuan tanah cenderung menggunakan kondisi semacam itu untuk meningkatkan 'penghasilannya' dengan cara sewenang-wenang, seperti orang yang tidak

---

[5] Mohammad Iskandar, "Aksi Kolektif Petani Ciomas tahun 1886: Dampak Politis bagi Pemerintah Hindia Belanda" (Disertasi tidak diterbitkan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007), hlm. 49

[6] Iskandar, *ibid.*, hlm. 52–53; Lihat juga *Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1836*, No. 19

masuk kerja karena sakit, langsung dianggap berutang yang dapat dibayar dengan kerja rodi atau uang. Para petani umumnya tidak berdaya terhadap kesewenang-wenangan itu karena kepala penduduk pribumi yang menjadi pemimpinnya, atau atau pegawai-pegawai lokal dan lembaga pengadilan yang seharusnya tempat mencari keadilan, telah dikuasai oleh tuan tanah.[7]

Salah satu ciri yang terpenting dalam bangunan masyarakat di tanah partikelir adalah hilangnya persekutuan hidup di dalam desa. Di Jawa Tengah, persekutuan hidup di desa kecil diikat bersama oleh ikatan-ikatan tradisional yang memberikan rasa aman dan tenteram. Di tanah partikelir, meskipun ikatan-ikatan semacam itu relatif masih ada, umumnya telah dikuasai atau paling tidak dipengaruhi oleh tuan tanah. Bahkan ada pula upaya dari pihak tuan tanah yang menjadikan kontrak-kontraknya semacam adat istiadat penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, terciptalah bentuk kehidupan organisasi desa yang meletakkan para tuan tanah menjadi lebih kuat tidak ubahnya seperti seorang raja.

Tuan tanah mempunyai koordinasi cukup tinggi dalam mengatur para aparaturnya dalam upaya mencapai semua tujuan-tujuannya. Selain itu, para tuan tanah umumnya juga melakukan koordinasi dan hubungan yang baik dengan para pejabat Eropa maupun pribumi, yang seharusnya menjadi pengontrol atas semua tindakan para tuan tanah yang dinilai berlebihan atau melenceng dari ketentuan tanah partikelir. Dengan demikian, pengaduan-pengaduan para petani atau penduduk setempat, dapat mereka redam sebelum sampai mencuat keluar wilayah tanah partikelir. Faktor-faktor semacam inilah yang membuat gerakan-gerakan petani di tanah partikelir, umumnya merupakan perlawanan yang dilandasi rasa benci terhadap pungutan cukai dan tuntutan kerja rodi yang berlebihan dan tidak berkeadilan. Peristiwa Ciomas dalam hubungan ini dapat menjadi suatu contoh tentang berkumpulnya berbagai sebab menjadi satu dalam menimbulkan ledakan pergolakan.

2. Gerakan di Jawa

Tanah partikelir Ciomas terletak di bagian utara lereng Gunung Salak, yang dijual oleh Gubernur Jenderal Daendels pada pihak swasta, luasnya sekitar 9.000 bau atau sekitar 7.220 ha (dengan perhitungan 1 bau = 0,8 ha),[8] dan berpenduduk lebih kurang 15.000 jiwa (berdasarkan catatan tahun 1885).[9] Daerah ini, seperti halnya tanah-tanah partikelir lainnya, memiliki

[7] Iskandar, *ibid.*, hlm. 87–97 dan 109–112

[8] *Regeeringsalamak voor Nederlandsche-Indië*, 1885, No. 42, hlm. 206

[9] *Ibid.*

sejarah pergolakan yang berulang kali dalam menentang tuan rumah. Meskipun demikian, perlawanan yang terjadi tahun 1886-lah yang mengangkat daerah ini menjadi pembicaraan nasional, termasuk di Parlemen Belanda hampir selama tiga tahun. Peristiwa itu patut disebut sebagai suatu 'masalah', karena demikian rumitnya, yaitu masalah perlawanan petaninya sendiri dan masalah pertentangan antara tuan tanah melawan pemerintah Hindia Belanda sebagai dampak politisnya.[10] Patut dicatat bahwa luas dan tingkat eksploitasi di tanah partikelir Ciomas sangat meningkat setelah para tuan tanah berusaha mengintensifkan produksinya untuk kepentingan pasar di luar desa, terutama sejak awal tahun 1880-an, setelah terjadinya kekeringan yang berkepanjangan serta mewabahnya penyakit hewan serta krisis pertanian.

Beberapa hal yang menggambarkan keadaan politik dan ekonomi tanah partikelir Ciomas sebelum meletus kerusuhan-kerusuhan adalah sebagai berikut: (1) Para petani di daerah itu sangat benci terhadap pungutan cukai. Praktik umum yang terjadi adalah bahwa untuk menuai panen para petani harus menunggu waktu yang ditentukan oleh tuan tanah. Untuk mengawasi panen itu tuan tanah menunjuk petugas pengawas dan penjaga yang ditempatkan di sawah-sawah; dan karena petugas-petugas itu tidak diawasi langsung oleh tuan tanah, mereka cenderung menyalahgunakan kedudukannya. (2) Ketidakadilan terjadi berulang kali yang berhubungan dengan salah satu praktik perbudakan, misalnya, mewajibkan petani untuk mengangkut hasil panen milik tuan tanah dari sawah-sawah ke lumbung-lumbung yang jaraknya 10 sampai 12 paal (15 sampai 18 km). (3) Perbudakan yang lebih berat adalah kerja rodi yang banyak dipraktikkan di kebun-kebun kopi atau di pabrik-pabrik kopi. Peraturan-peraturan yang keras diterapkan terhadap mereka yang tidak hadir atau yang datang terlambat dan sering juga terjadi bahwa pengiriman orang lain sebagai wakil ditolak. (4) Kewajiban sejenis yang melampaui batas, antara lain penyerahan dua butir kelapa untuk setiap pohon, sebatang bambu untuk setiap petak sawah, seluruh hasil pohon enau atau kopi yang diwajibkan untuk ditanam di kebun petani sampai mencapai jumlah 250 batang. (5) Ekspor padi, kerbau, dan hasil-hasil bumi lainnya dilarang. (6) Jika petani tidak dapat membayar utangnya, tanah, rumah, dan kerbaunya disita. (7) Perluasan kekuasaan tanah sampai juga pada pengawasan penjualan ternak, rumput, kayu, dan penebangan pohon-pohon. (8) Perempuan dan anak-anak diwajibkan pula untuk bekerja selama sembilan

[10] C.H.F. Reisz, *De Tweede Kamer en De Tjimas-Verbanning*, Batavia, H.M. Van Dorp & Co, 1887

hari setiap bulannya. Jadi, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan kondisi dan situasi seperti itu, telah menimbulkan situasi yang buruk pada kehidupan para petani, yang akhirnya mendorong para petani untuk melakukan perlawanan dalam bentuk aksi kolektif dengan kekerasan menentang pihak tuan tanah.

Menjelang pecah perlawanan, banyak orang yang meninggalkan tanah partikelir Ciomas untuk menghindarkan beban pajak dan rodi yang berat dan tidak adil, yang tidak dapat pikul lagi. "Pelarian" dari tanah partikelir itu sampai mencapai jumlah 2.000 orang, termasuk di antaranya para *bujang* yang *nota bene* merupakan buruh harian pada gudang-gudang dan perkebunan kopi milik tuan tanah.

Menurut pihak tuan tanah Ciomas, perlawanan para petani terjadi bukan karena masalah pajak dan rodi, melainkan karena adanya hasutan yang didalangi mantan Asisten Residen Bogor dan Hoofd penghulu Bogor, yang memanfaatkan meningkatnya "fanatisme agama Islam" di sekitar Priangan Barat, khususnya daerah Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Afdeling Bogor. Pendapat tuan tanah itu sempat pula menjadi pendapat Asisten Residen Batavia yang ikut menangani masalah Ciomas pasca terjadinya perlawanan tahun 1886.[11] Namun, pandangannya itu mengabaikan kenyataan adanya pergolakan petani yang terjadi hampir di seluruh tanah partikelir yang disebabkan oleh kericuhan *cuke*.

Perlawanan petani Ciomas dalam bentuk aksi kolektif dengan kekerasan yang cukup berarti terjadi dua kali pada tahun 1886. Perlawanan pertama terjadi pada bulan Februari 1886 di bawah pimpinan Apan Ba Sa'amah, yang diawali dengan pembunuhan terhadap Camat Ciomas bernama Haji Abdurrakhim, yang datang ke Apan untuk menangkap dirinya di kampung Pasir Angsana, Ciomas. Setelah berhasil membunuh Camat Ciomas, Apan mundur ke kampung Petir, Ciomas, yang berada dekat dengan perbatasan tanah partikelir Ciampea. Di kampung itulah ia bertahan bersama para pengikutnya, sampai akhirnya tewas ditembak serdadu yang datang mengepung rumahnya di bawah pimpinan Asisten Residen Bogor.

Perlawanan petani yang kedua terjadi sekitar tiga bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei di bawah pimpinan Mohammad Idris. Seperti halnya Apan, pada awalnya Idris merupakan petani biasa yang terikat kontrak kerja dengan tuan tanah Ciomas. Sejak akhir tahun 1885, Idris sudah merasa kecewa kepada pihak tuan tanah, terutama setelah tanahnya disita oleh

[11] Iskandar, *op. cit.*, hlm. 127–128 dan 185

tuan tanah untuk melunasi utang-utangnya. Sebagai balasannya ia tidak mau memenuhi kewajiban kerja rodi (*kompenian*) di kebun kopi milik tuan tanah, sebaliknya ia pergi berdagang ke pasar Bogor. Setelah itu, ia pun pindah dari kampungnya, Parakan, ke kampung Pepojok, Ciampea, yang tidak jauh dari bukit Pasir Gaok, Ciampea. Di tempat inilah Idris banyak menerima kunjungan dari petani-petani Ciomas lainnya yang merasa senasib dengan Idris. Makin lama orang-orang yang datang kepadanya semakin banyak, termasuk para *bujang* yang melarikan diri dari perkebunan tuan tanah. Salah satu di antaranya adalah Djeding Ba Sa'iran yang sebelumnya merupakan mandor bujang yang mendapat kepercayaan berkali-kali untuk menyelenggarakan pesta *sedekahan bumi*.[12] Menurut laporan, sekitar 2.000 orang ikut bergabung dengan Idris untuk melakukan perlawanan terhadap tuan tanah Ciomas.

Selasa malam, 18 Mei 1886, Idris memutuskan untuk menyerang pesta *sedekahan bumi* yang akan diselenggarakan di Kampung Taman yang letaknya tidak jauh dari perkebunan kopi Gadok, Ciomas. Pesta itu pada dasarnya merupakan pesta tahunan menyambut selesainya panen padi. Menurut kebiasaan, tuan tanah dan keluarganya selalu menghadiri pesta tersebut. Oleh karena itu, Idris memutuskan untuk menyerang pesta tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 09.00, Idris bersama sekitar 40 orang pengikutnya, beberapa di antaranya adalah perempuan, datang menyerang pesta tersebut. Namun, keluarga tuan tanah yang menjadi target penyerangan itu tidak hadir dalam pesta itu. Hanya beberapa orang *pancalang* dan polisi desa kepercayaan tuan tanah yang hadir di pesta itu, selebihnya adalah penduduk biasa. Setelah tahu bahwa sasaran utama tidak ada, Idris menyuruh para pengikutnya untuk kembali ke Pasir Gaok. Beberapa pengikutnya tidak langsung pulang ke Pasir Gaok, tetapi masuk dan menguasai perkebunan kopi Gadok sampai setengah hari. Setelah itu, mereka pun kembali ke Pasir Gaok.

Peristiwa penyerangan itu dengan cepat dilaporkan oleh tuan tanah kepada Asisten Residen Bogor. Keesokan harinya, Kamis, 20 Mei 1886, pasukan militer di bawah pimpinan langsung Residen Batavia, datang mengepung Pasir Gaok, Ciampea. Ikut serta dalam rombongan itu Asisten Residen Batavia dan Bogor, polisi desa setempat, dan administratur tanah partikelir Ciomas. Sebelumnya Idris telah menginstruksikan kepada para pengikutnya bahwa jika yang datang mengepung adalah tentara atau militer, mereka tidak usah melawan, lebih baik menghindar saja. Akan tetapi,

---

[12] *Ibid.*, hlm. 165

jika yang datang adalah orang-orang tuan tanah, atau tentara yang di dalamnya ada orang-orang tuan tanah, mereka harus melawan.

Sesuai dengan instruksi Idris, para petani tidak mau mendengar perintah menyerah dari Asisten Residen Bogor. Sebaliknya, mereka menyoraki dan mengejeknya. Akhirnya, Asisten Residen memerintahkan untuk menembaki para pengikut Idris. Setelah para pengikut Idris cerai-berai, pasukan pengepung pun naik ke atas bukit. Di sana mereka menemukan 36 mayat dan 19 orang yang terluka parah kena tembakan. Kemudian Residen memerintahkan untuk segera membawa kesembilan belas orang terluka itu ke rumah sakit kota Bogor. Setelah itu, ia memerintahkan melakukan penyisiran untuk menangkap para pengikut Idris. Dari sekian banyak orang yang menyerah atau tertangkap, di antaranya adalah Mohammad Idris dan Djeding Ba Sa'iran.

Suatu ciri penting pemberontakan Ciomas adalah adanya spontanitas waktu timbul dan selama perkembangannya. Memang benar sebelum pecah perlawanan pada bulan Mei 1886, telah terjadi beberapa bentuk perlawanan, baik dalam bentuk aksi perseorangan, maupun aksi kolektif seperti yang dilakukan Apan Ba Sa'amah dan kawan-kawannya. Sekalipun demikian, perlawanan pada bulan Mei 1886 terjadi di luar dugaan tuan tanah dan pemerintah. Dengan kata lain, peristiwa itu dinilai terjadi secara tiba-tiba.

Dalam peristiwa Ciomas itu masalahnya cukup jelas. Petani merasakan tekanan dari pungutan pajak dan beban kerja yang berat serta berbagai tindakan yang tidak adil lainnya. Pengalaman atau rasa senasib itulah yang menjadi faktor utama terbentuknya indentitas yang sama yang menjadi modal utama dalam melakukan aksi kolektif melawan pihak tuan tanah. Pihak tuan tanah maupun pemerintah setempat mengidentifikasi adanya fanatisme keagamaan dalam dalam aksi kolektif itu, teutama perang jihad. Meskipun betul peserta aksi kolektif itu adalah orang-orang yang beragama Islam dan perasaan satu agama ikut menjadi pendorong spirit di kalangan mereka, bukti-bukti faktual yang ada tidak cukup kuat untuk mengategorikan perlawanan petani Ciomas sebagai perang suci dalam arti perang *jihad fisabillah*. Sebutan *Imam Mahdi* dan *Ama* (dalam arti *Panembahan*), *Tuan Allah*, lebih banyak diutarakan oleh keluarga tuan tanah dan para pendukungnya; sementara dari proses verbal, tidak ada satu pun pelaku yang mengaku dirinya sebagai *Panembahan* atau *Imam Mahdi*. Para pelaku atau saksi, umumnya mengaku ikut terlibat dalam perlawanan itu karena merasa senasib dizalimi oleh pihak tuan tanah. Adanya isu-isu bangkitnya fanatisme agama Islam pada umumnya lebih banyak disebabkan oleh sikap *Islam-fobi* yang hidup di kalangan pengusaha maupun penguasa kolonial,

sehingga sedikit saja aktivitas umat Islam yang meningkat, seperti meningkatnya jumlah orang yang datang ke masjid atau pengajian sudah diterjemahkan sebagai adanya gerakan fanatisme keagamaan yang ingin mengobarkan perang suci. Sebagai contoh, pada tahun 1885 di wilayah Sukabumi dilaporkan telah terjadi pertemuan para kiai dan ulama yang dicurigai sebagai upaya para tokoh Islam untuk mengobarkan perang agama.[13]

Kepemimpinan perlawanan di tanah partikelir Ciomas tidak datang dari luar golongan petani, tetapi dari dalam golongan sosial itu sendiri. Apan Ba Sa'amah yang disebut oleh pihak tuan tanah sebagai *Imam Mahdi* dan Mohammad Idris yang disebut oleh Sartono Kartodirdjo sebagai *Panembahan,* adalah petani-petani biasa seperti petani yang lainnya. Kelebihannya mereka mempunyai semacam karisma dan kemauan yang melebihi yang lainnya, seperti umumnya para agen perubahan. Oleh karena itulah, sejak ia menyingkir ke desa Pepojok yang kemudian pindah ke Pasir Gaok, banyak petani yang datang untuk bergabung dengannya, serta menganggap dirinya sebagai sebagai seorang raja.

Untuk memahami gerakan petani di tanah partikelir di Jawa Barat, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, yaitu mengenai jenis lingkungan budaya tempat ideologi gerakan itu berakar. Tradisi mesianistis yang khas mengenai kedatangan *Ratu Adil*, yang mengambil tempat yang luas di sebagian besar gerakan-gerakan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak dijumpai di sini. Jelaslah bahwa tanah partikelir dalam hal ini terletak di luar daerah lingkungan Tradisi Besar Jawa tempat berakarnya kepercayaan *Ratu Adil*.

Hal yang *kedua*, bahwa dengan jelas kepemimpinan terletak di tangan orang "awam", yaitu bukan pemimpin agama seperti para haji dan kiai. Hal ini dapat diartikan bahwa sifat budaya dari tanah partikelir tidak terletak di pusat daerah Islam di Jawa. Mungkin karena itulah "organisasi" gerakan tampak lemah. Kerusuhan-kerusuhan di tanah partikelir merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat yang terpencar.

Ketiga, sangat menarik perhatian peran yang dimainkan oleh pelaku-pelaku *magico religous* (dukun) dalam perkembangan perlawanan. Kepada merekalah orang-orang yang hendak mencari keselamatan dan keten-

---

[13] X, *"Koning" Otto: Een Banierdrager.* s-Gravenhage: M. Van Der Beek, 1888; lihat juga E. de Waal, *Onze Indische Financien, Niuewe reeks aanteekeingen,* Vol. I, 's-Gravenhage, 1876, hlm. 245 dan *Java Bode*, 4 dan 7 September 1885

teraman datang. Selain melakukan kekuatan-kekuatan yang dapat menyembuhkan orang sakit dan kekuatan-kekuatan gaib, orang-orang itu bahkan tidak hanya memberikan jimat-jimat dan mantra-mantra, tetapi juga menghidupkan kembali legenda-legenda kuno.

Perlawanan petani Ciomas tahun 1886 relatif kecil jika dibandingkan dengan "pemberontakan" petani Banten yang terjadi dua tahun kemudian. Akan tetapi, dampaknya dapat dikatakan jauh lebih besar daripada pemberontakan petani Banten, terutama dampak politisnya. Setelah peristiwa itu, terjadi polemik yang berkepanjangan baik di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda, terutama di Parlemen Belanda (*Staten Generaal – Tweede Kamer*); yang berakhir dengan turunnya Gubernur Jenderal Otto van Rees dari jabatannya, yang terjadi beberapa bulan sebelum pecahnya pemberontakan petani Banten.

Masalah Ciomas akhirnya ditutup begitu saja setelah Otto van Rees berhenti dari jabatannya. Namun, peristiwa itu sendiri menjadi alasan bagi para penentang lembaga tanah partikelir untuk mendesak pemerintah Hindia Belanda pada khususnya untuk secepatnya membeli kembali semua tanah-tanah partikelir yang ada di Hindia Belanda.[14] Selain meningkatnya desakan itu, pemerintah berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada reglemen-reglemen tanah partikelir yang ada. Untuk itu, pemerintah telah membentuk satu komisi yang bertugas mengkaji dan membuat reglemen baru yang dapat menangkal kesewenang-wenangan tuan tanah. Salah satu hasil komisi itu antara lain terbitnya Reglemen No. 422 Tahun 1912, yang dimulai sejak 1 Maret 1913. Dalam tahun 1912 pula Menteri Jajahan menyetujui permintaan pemerintah Hindia Belanda untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir, yang selanjutnya diatur oleh keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tahun 1912, yang tercantum dalam *Staatsblad* tahun 1912 no. 480 dan 481. Dalam kurun waktu 1913–1920 lebih dari separuh jumlah tanah partikelir yang ada berhasil dibeli kembali oleh pemerintah Hindia Belanda dengan harga f90.000.000,- (sembilan puluh juta gulden). Pembelian tanah-tanah itu terpaksa dihentikan sewaktu terjadi depresi ekonomi dunia. Tanah-tanah partikelir yang masih tersisa, secara umum akhirnya lenyap setelah terjadinya perubahan sosial-politik yang terjadi sejak Perang Pasifik melanda wilayah Hindia Belanda, yang disusul dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

---

[14] *Indische Gids,* 1887 II, hlm. 1761–1763; lihat juga E. van Delden, *Particuliere Landerijen op Java,* Leiden: S.C. van Doesburgh, 1911, hlm. 88

Hampir bersamaan dengan mulai dibelinya kembali tanah-tanah partikelir oleh pemerintah, gelombang kerusuhan-kerusuhan di tanah partikelir masih tetap bermunculan. Di Campea misalnya, pada awal tahun 1913 terjadi perlawanan petani yang disebut oleh penguasa setempat sebagai huru-hara.[15] Suatu pergantian pemilik diikuti dengan pengangkatan pegawai yang baru. Pemilik yang baru itu tanpa pengetahuan yang cukup tentang keadaan setempat mencoba untuk membuat peraturan-peraturan baru guna menjamin hak tuan tanah. Para petani menginginkan peraturan-peraturan lama dipertahankan. Mereka juga melancarkan ancaman terhadap seorang pengawas baru yang bernama Sastrakusuma, yang telah menuduh mandor bekerja sama dengan rakyat. Pada malam hari tanggal 14 Januari sebuah mobil dihancurkan dan beberapa ekor kuda dilukai. Pada hari berikutnya berkumpullah kira-kira dua ratus orang yang datang dari lima desa untuk melakukan protes terhadap peraturan-peraturan baru di muka rumah wedana. Disebutkan bahwa pertemuan-pertemuan rahasia telah diadakan di Ciomas. Untuk menghindari pertumpahan darah, pemerintah mengadakan pengamanan secara militer untuk mengendalikan aksi para petani itu.

Beberapa bulan kemudian, gerakan itu merembes ke tanah partikelir di Pemanukan dan Ciasem, di mana agitasi rakyat menentang pemungutan *cuke* yang meningkat tinggi mendapat tempat yang lebih luas lagi. Tambahan lagi dengan diadakannya pengukuran kembali sawah-sawah, kebencian terhadap pungutan cukai bertambah besar.

Pada bulan Mei 1913 kurang lebih 400 orang petani beramai-ramai datang ke tempat Bupati Purwakarta untuk mengajukan permintaan keringanan dari beban pungutan *cuke* yang berat.[16] Mereka segera bubar setelah Bupati menjanjikan akan memerhatikan tuntutan-tuntutan mereka. Namun, gerakan itu tidak berhenti, malahan meluas selama bulan-bulan berikutnya ke desa-desa di tanah partikelir. Sebagai contoh pada tanggal 7 Juni, 350 orang dari enam desa mengajukan tuntutan tentang pemecahan masalah yang mendesak. Pada tanggal 23 Agustus segerombolan orang dari Babakansawah dan sekitarnya di bawah pimpinan Bapa Eming berkumpul untuk mengajukan protes terhadap pengukuran kembali sawah. Hari berikutnya Bapa Eming bersama dengan 230 orang menghadap Kontrolir untuk meminta pertanggungjawaban atas perilakunya yang

---

[15] Surat dari Residen Bogor kepada Gubernur Jenderal, tanggal 16 Februari 1919 No. 2105/4, dalam *Mailrapporten* No. 511.13, *Algemeene Rijksarchief* (*ARA*), Den Haag

[16] Surat Residen Karawang kepada Residen Batavia, tanggal 13 Juni 1913 No. 5410/4 dalam *Mailrapporten* No. 1897/13, *ARA*

keliru. Sehari kemudian polisi menangkap Bapa Eming di rumahnya, dan ketika rumahnya digeledah ternyata ditemukan beberapa senjata dan jimat-jimat.

Kerusuhan-kerusuhan itu semacam juga terjadi di tanah partikelir Slipi (Tanah Abang) pada tanggal 22 Juli 1913. Dalam penyelidikan tentang masalah ini ternyata *cuke* memang telah dinaikkan sampai 200% dan sebenarnya tuan tanah telah melanggar haknya, yaitu seperlima dari hasil panen. Kenaikan yang mendadak itu karena faktor-faktor sebagai berikut:

a. hasil panennya lebih baik dari tahun 1912;
b. perbaikan sistem irigasi secara umum telah menaikkan produksi;
c. kenaikan areal tanah yang tidak wajar sebagai hasil pengukuran kembali;
d. pengawasan ketat selama panen mencegah praktik-praktik yang buruk.

Faktor-faktor tersebut sebenarnya telah cukup jelas untuk menerangkan tentang kenaikan itu, tetapi kenyataannya petani-petani tetap tidak menyukai dan menolaknya. Apa yang mereka inginkan adalah penggantian *cuke* dengan pajak tanah seperti yang dipraktikkan di daerah yang ada di bawah administrasi pemerintah. Ketidakpuasan lain yang erat hubungannya dengan hal ini adalah manipulasi yang sering dilakukan pihak tuan tanah dalam menentukan *cuke* yang kadang kala secara sepihak diganti dengan sistem *pajeg*, atau sebaliknya bergantung mana yang menguntungkan bagi pihak tuan tanah. Ketidakpuasan para petani atau penduduk setempat terjadi setelah mengetahui bahwa penimbangan padi dilakukan oleh pihak tuan tanah dilakukan dengan tidak jujur.

Secara umum kondisi seperti itu tidak hanya akan mendorong rakyat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengguncangkan, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan aksi kolektif, baik aksi tanpa kekerasan seperti protes secara damai atau sekadar melakukan sabotase; maupun dengan disertai tindakan kekerasan yang disebut oleh pihak penguasa sebagai kerusuhan atau pemberontakan. Dalam aksi yang disebutkan terakhir rasa kebencian terhadap tuan tanah sering kali diungkapkan dalam bentuk teriakan-teriakan yang berbentuk ancaman seperti: "Patahkan lehernya tuan tanah satu!"[17]

Selain masalah *cuke* yang menjadi penyebab kemarahan umum, masih banyak lagi masalah yang dapat mengakibatkan bergeraknya penduduk setempat untuk melakukan aksi kolektif, misalnya masalah tentang kerja paksa dan penafsiran pajak kepala. Sebagai contoh masalah yang terakhir

---

[17] Surat Residen Batavia kepada Gubernur Jenderal, tanggal 10 September 1913 No. 367, dalam *Mailrraporten* 1913/13, *ARA*

ini adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir Slipi dan Cakung.

Berbeda dengan peristiwa pergolakan-pergolakan di daerah tersebut di atas, peristiwa pergolakan di tanah partikelir di Surabaya pada tahun 1916 mempunyai sifat yang khas, yaitu radikal atau malahan revolusioner. Pergolakan ini bertujuan untuk menghancurkan institusi tanah partikelir, termasuk berbagai macam kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada penduduknya. Agitasi-agitasi yang terdahulu tidak menyangkut pernyataan-pertanyaan pokok yang membahayakan. Di dalam peristiwa Surabaya tampaknya rakyat telah diindoktrinasi dengan ide yang menyatakan bahwa tanah adalah milik petani dan karenanya mereka tidak perlu membayar uang sewa untuk tanah yang mereka tanami atau diami, dan juga tidak perlu melakukan pelayanan kerja. Orang yang menghasut para petani untuk melakukan pemberontakan adalah Sadikin. Ia menganjurkan agar rakyat menolak untuk melakukan kerja *kompenian*, membayar sewa tanah atau *cuke*. Untuk memperkuat tuntutan mereka, para petani melakukan ancaman, intimidasi, dan rintangan-rintangan. Dengan kata lain, mereka menolak semua tuntutan tuan tanah dan mengabaikan semua hak-hak istimewa tuan tanah. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi minta izin kepada tuan tanah sewaktu hendak menuai padinya, untuk menebang pohon, mendirikan rumah, atau untuk mendiami dan menguasai tanahnya. Secara keseluruhan latar belakang dari agitasi petani dalam hal ini sangat penting karena menunjukkan ciri-ciri telah dipengaruhi oleh radikalisme dari pergerakan nasional modern, terutama Sarekat Islam. Apa yang dapat diketahui adalah adanya suatu perembesan kerusuhan-kerusuhan ke sejumlah besar tanah partikelir, seperti di Kaputran Kidul, Kaputran Lor, Sawahan, Bagong, Kedonganyar, Kembang Kuning, dan Grudo, yang dalam beberapa hal berbeda dengan apa yang terjadi di tanah partikelir Jawa Barat. Di sini rakyat berhadapan dengan masalah penguasaan tanah, dan menjawabnya dengan menggabungkan diri dalam gerakan serta merebut tanah dari tuan-tuan tanah mereka.

Ciri khas lain gerakan ini adalah bersifat sekuler dalam pengertian bahwa tidak adanya tanda-tanda ide agama atau upacara-upacara keagamaan. Padahal, jarang dapat ditemukan gerakan yang betul-betul sekuler di dalam sejarah pergolakan sosial tradisional Jawa. Mayoritas gerakan-gerakan itu bersifat keagamaan. Agitasi petani di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem adalah lebih bersifat sekuler daripada bersifat keagamaan, meskipun demikian di situ ada bukti digunakannya jimat dan pusaka.

Lebih sensasional dari pemberontakan di Surabaya adalah pemberontakan di Condet, sebuah desa tanah partikelir Tanjung Oost yang termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jawa Barat. Pemberontakan itu tidak berlangsung lama dan mengikuti pola sebagian besar dari protes tradisional. Akan tetapi, dalam pusat keruwetan kejadian-kejadian masih jelas tampak adanya perjuangan antara petani kecil melawan tuan tanah. Kaum petani telah menderita dan memeras keringat untuk kepentingan tuan tanah. Oleh karena itu, pemberontakan mencerminkan adanya kesulitan dan ketegangan di tanah partikelir.

Dengan berlakunya peraturan baru tentang tanah partikelir tahun 1912, para tuan tanah melakukan pengadilan terhadap petani-petani yang tidak dapat membayar pajak. Pada tahun 1913 telah dilakukan pengadilan pula 2.000 perkara mengenai kegagalan dalam pembayaran sewa atau pajak pekarangan ataupun penebusan pekerjaan kompenian. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 1914 terhadap 500 perkara dan 300 perkara pada tahun 1915. Akibatnya, banyak kaum petani yang mengalami kebangkrutan karena harta milik mereka terpaksa disita dan dijual atau dibakar. Sudah barang tentu hal ini menimbulkan rasa dendam dan kebencian yang mendalam. Rasa dendam itu menjadi semakin membara karena tuan tanah selain melakukan peradilan tersebut juga menaikkan pungutan pajak.

Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 14 Mei 1916 yaitu dengan diadilinya seorang bernama Taba dari desa Batu Ampar di tanah partikelir Tanjung Oost. Pengadilan dilakukan di *Landraad* (pengadilan distrik) Meester Cornelis (Jatinegara) yang memutuskan bahwa Taba harus membayar f7,20 dan ongkos perkaranya. Pada tanggal 15 Maret 1916, ia diperingatkan bahwa apabila ia tidak dapat membayar, pihak yang berwajib akan menjual barang-barangnya yang disita. Akibat tindakan itu, rakyat menuduh para kepala setempat mengabdi kepada kepentingan orang Kristen, oleh karena itu harus dibunuh. Ketika petugas datang ke tempat Taba untuk melaksanakan keputusan hukumannya, yaitu pada tanggal 7 Maret 1916, banyak orang-orang berkumpul di rumah Jaimin, yang terletak di sebelah utara rumah Taba. Maksud mereka akan mencegah para Entong Gendut ada di antara gerombolan orang-orang itu. Suara penghinaan dan doa-doa terdengar, tetapi tidak sampai terjadi kerusuhan lebih lanjut. Rumah Taba dijual seharga f4,50 dan dibeli Mandor Pirun pada tanggal 15 Maret 1916.

Di Batu Ampar penduduk memasuki perkumpulan bela diri yang bermaksud untuk dipergunakan dalam melakukan pencegahan terhadap pegawai-pegawai pemerintah yang akan melaksanakan keputusan-

keputusan pengadilan distrik. Menurut laporan, pemimpin-pemimpinnya adalah Entong Gendut, Maliki, dan Modin, ketiganya berasal dari Batu Ampar. Delapan orang *wazir* dan dua orang prajurit diangkat. Dalam perkumpulan itu telah terdaftar lebih kurang 400 anggota, di antaranya Haji Amat Awab, Said Keramat, dan Dullah. Tampak juga beberapa orang Arab mempunyai hubungan rahasia dengan perkumpulan itu, yaitu Said Taba bin Akhmad Al Hadat dan Said Muksin bin Akhmad Alatas dari Cawang, dan Said Umar bin Alaydrus dari Cililitan.[18]

Peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 5 April 1916, yaitu ketika Entong Gendut memimpin segerombolan orang-orang berkerumun di depan Villa Nova, rumah Lady Rollinson, pemilik tanah partikelir Cililitan Besar. Pada waktu itu di sana ada pertunjukan tarian topeng. Pada sore harinya tuan tanah Tanjung Oost, Ament, dilempari dengan batu ketika ia sedang naik mobil melalui barat daya sebuah jembatan. Sementara itu, pertunjukan topeng terus berlangsung tanpa ada gangguan sampai kira-kira pukul 11 yaitu ketika terdengar perintah-perintah untuk menghentikan pertunjukan. Entong Gendutlah yang menyuruh orang-orang supaya bubar dan pulang ke rumah. Gerombolan itu bubar tanpa menimbulkan kerusuhan.

Wedana segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Entong Gendut menghadapnya di Meester Cornelis. Ketika Asisten Wedana Pasar Rebo dan mantri polisi datang ke Batu Ampar untuk melaksanakan panggilan itu, mereka menemukan Entong Gendut di rumahnya sedang berkumpul dengan sekelompok anggota-anggota perkumpulannya, di antaranya Haji Amat dan Maliki. Ketika ditanya alasannya menghentikan pertunjukan topeng, Haji Amat Awab menjawab bahwa hal itu dilakukan demi kepentingan agama. Entong Gendut menambahkan bahwa hal itu juga dimaksudkan untuk mencegah perjudian. Selanjutnya ia menyatakan mengapa rakyat menentang polisi karena menurut dia polisi membantu kepentingan orang Kristen, yaitu dengan menjual rumah rakyat dan kadang-kadang membakarnya. Entong Gendut juga mengutuk orang-orang kampung yang telah minum *aer srani* (air Kristen). Perdebatan antara Asisten Wedana dan Entong Gendut terus berlangsung. Sambil berdebat, Entong Gendut memegang keris di tangannya dan menghentak-hentakkan kakinya. Ia menyatakan juga bahwa kedua orang itu, Asisten Wedana dan mantri polisi, adalah pengikutnya dan ia akan membantu mereka. Serentak ia mengucapkan, "Saya jejak bumi dan bumi menjadi laut," maka berdatanganlah orang banyak dari semak-semak, semuanya siap dengan

[18] Laporan Asisten Wedana Pasar Rebo, tanggal 10 April 1916 dalam *Mailrapporten* 118/16, *ARA*

senjatanya dan siap mengikuti Entong Gendut, yang memproklamasikan diri sebagai Raja Muda. Karena keadaan yang demikian itu, usaha petugas untuk menangkap Entong Gendut gagal.

Pada tanggal 9 dan 10 April 1916 rumah Entong Endut digerebek lagi oleh sepasukan petugas pemerintah di bawah pimpinan Wedana untuk menangkapnya. Setelah diminta agar diizinkan keluar dari dalam rumah, Entong Gendut segera menampakkan diri sambil membawa benda panjang yang dibungkus dengan kain putih–mungkin tombak–, keris dan bendera merah dengan gambar bintang sabit berwarna putih. Kemudian dengan suara lantang ia mengatakan bahwa ia adalah raja dan tidak perlu tunduk pada siapa pun, baik kepada hukum atau kepada Belanda. Setelah memberi aba-aba panggilan kepada anak buahnya, keluarlah beberapa orang-orang dari semak-semak dan terus-menerus menyerbu para petugas pemerintah yang mengepung mereka. Dalam kerusuhan itu, Wedana ditangkap dan ditawan.

Tidak lama kemudian, pasukan bantuan di bawah pimpinan Asisten Residen datang menyelamatkan Wedana dan menyerbu tempat para pengikut Entong Gendut. Kedatangan pasukan ini disambut oleh para pengikut Entong Gendut dengan teriakan-teriakan, "Sabilillah tidak takut!" Mereka datang secara bergelombang dengan membawa bendera merah sambil memainkan gerakan-gerakan ilmu silat. Karena kaum para pengikut Entong tidak mengindahkan peringatan dari pasukan pemerintah, akhirnya pasukan pemerintah menembakinya. Kerusuhan berakhir setelah para pengikut Entong Gendut cerai-berai dan lari menyelamatkan diri. Entong Gendut sendiri jatuh tertembak dan akhirnya meninggal karena lukanya cukup parah.

Seperti di daerah tanah partikelir lainnya, ketidakadilan, kemiskinan, dan kemelaratanlah yang menyebabkan petani-petani di Condet, Tanjung Oost, melakukan perlawanan. Tindakan tuan tanah telah membuat beratus-ratus petani kehilangan tanah, rumah, bahkan juga kebebasan. Sistem pemilikan tanah partikelir dalam masyarakat modern, dengan meluasnya sistem ekonomi uang, telah melumpuhkan kehidupan petani. Oleh karenanya, dengan adanya kemelaratan, kejahatan meningkat. Meningkatnya perampokan, misalnya, dapat dihubungkan dengan meningkatnya protes sosial yang tidak terorganisasi.

Dalam kerusuhan di Tanjung Oost itu masih ada selubung rahasia mengenai ada tidaknya sifat politik dari kerusuhan tersebut. Keterangan-keterangan dalam sumber tidak menyebutkan tentang adanya hubungan

antara bendera merah dan bintang sabit putih dengan suatu aliran politik, misalnya Sarekat Islam.

Sifat keagamaan gerakan ini tampak dari adanya proklamasi Entong Gendut sebagai *Imam Mahdi*, semboyan-semboyan "Sabilillah", upacara membawa bendera, ucapan mantra-mantra magis, penggunaan jimat-jimat, dan sebagainya. Sulitlah kiranya untuk menyebutkan apakah peristiwa itu benar-benar suatu gerakan agama, atau suatu peristiwa yang berdasarkan pada konflik ekonomi, yang di dalamnya terdapat perjuangan kelas yang berselimut agama. Namun, yang jelas bahwa di dalam masyarakat tradidional Jawa, hampir semua gerakan mempunyai warna keagamaan. Di dalam gerakan Entong Gendut, motif-motif ekonomi berjalan dengan motif-motif agama dan kedua segi tersebut saling memperkuat. Demikian pula sukar untuk menggungkapkan sebab-sebab ekonomi dalam peristiwa yang lain, seperti yang terjadi di Tangerang tahun 1924.

Secara luas peristiwa kerusuhan di Tangerang yang meletus pada tahun 1924 tidaklah disebabkan oleh tekanan ekonomi. Keadaan petani di tanah partikelir Tangerang tidak menimbulkan dasar-dasar ketidakpuasan. Namun, hidupnya kembali pergolakan di Tangerang yang mengambil bentuk dramatis telah cukup mengguncangkan pemerintah dan khalayak ramai.

Tangerang merupakan dataran yang penuh dengan sawah-sawah di mana kehidupan ekonomi penduduknya berbasis pada pertanian. Mata pencarian tambahan adalah dari perdagangan kecil dan penjualan tenaga. Hampir seluruh daerah itu terdiri atas tanah-tanah partikelir yang dimiliki oleh orang-orang Cina. Jumlah orang Cina cukup besar dan mereka hidup tersebar di antara penduduk pribumi. Di tempat pusat terjadinya kerusuhan, yaitu di Pangkalan, di mana 30% tanahnya menjadi milik kongsi, 40% milik penduduk pribumi, dan 30% milik perseorangan orang-orang Cina. Di tanah partikelir ini juga berlaku pemungutan *cuke*, sewa tanah dan pekarangan, serta pengerahan tenaga kerja terutama ialah kompenian yang dapat dibeli. Kompenian rakyat Tangerang ini digunakan di perusahaan pembuatan genting. Dalam penggarapan tanah, petani juga harus menyerahkan seperlima dari hasil panen kepada tuan tanah. Sepanjang tahun petani bergantung pada tuan tanah. Disebutkan bahwa beberapa perubahan telah terjadi di antara tuan tanah Cina sejak munculnya Sarekat Islam pada tahun 1913. Mereka tampak tidak berlebih-lebihan dalam penarikan *cuke*, sewa tanah dan pekarangan, serta kompenian. Dibandingkan dengan tanah partikelir di Meester Cornelis dan daerah Bogor, tekanan dirasakan lebih lemah. Selama periode 1921–1923 tidak ada

dalam pengajuan mengenai kegagalan pembayaran bebas kerja kompenian ke pengadilan. Bahkan, pemimpin perlawanan sendiri, Kaiin, dalam tahun-tahun 1922 dan 1923 masih mempunyai utang kepada tuan tanah Pangkalan, tetapi tidak ada tuntutan. Tuntutan terhadap kegagalan pembayaran kompenian tampaknya hanya dalam jumlah kecil.

Dengan demikian, situasi ekonomi di Tangerang umumnya tidak begitu jelek. Harga beras tidak begitu mahal. Demikian juga harga-harga bahan makanan lainnya rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keluhan umum yang terjadi pada waktu itu mengenai sukarnya mencari uang terasa jarang. Sebuah laporan dari pemerintah menganggap peristiwa kerusuhan di Tangerang sebagai gerakan Ratu Adil, tetapi anehnya di dalam ideologi gerakan itu tidak tampak adanya konsep Ratu Adil. Yang ada adalah semacam paham nativisme, yaitu kerinduan terhadap kembali kerajaan lama. Sudah barang tentu dalam sifat mesianistis ataupun nativistis unsur-unsur agama tradisional tentu ada di dalamnya. Memang dapat dikatakan bahwa peristiwa Tangerang merupakan fenomena ekonomi dan agama. Gerakan protes golongan petani di situ terhadap tuan tanah pemerintah dapat dilihat dari latar belakangnya mengenai adanya pertentangan golongan. Beberapa gambaran tentang suasana lingkungan tersebut dapat dilihat dalam kepercayaan-kepercayaan agamanya, sistem dan praktik-praktik yang mencerminkan ideologi gerakan dan sebagainya.

Pertama, beberapa pemimpin gerakan disatukan oleh suatu pemujaan terhadap orang keramat di kuburan Manggadua di Batavia, yaitu makam Pangeran Blongsong dan Ibu Mas Kuning. Menurut mimpi yang diterima oleh Kaiin bahwa orang yang dimakamkan itu adalah orang tuanya sendiri yang sesungguhnya menjadi pemilik tanah-tanah partikelir di Tangerang. Menurut mimpinya itu tanah tersebut dahulu hanya disewakan dan sejak periode penyewaan habis, tuan-tuan tanah itu harus diusir. Kemudian Kaiin memproklamasikan diri sebagai raja di tanah itu dengan gelar "Pangeran Arjuna".

Kedua, Kaiin berguru pada Sairin, alias Bapak Cungok dari Cawang, mengenai *ilmu kawedukan* dan *ilmu keslametan*. Sairin inilah yang dianggap sebagai dalang dari seluruh gerakan itu. Ia terkenal sebagai seorang dukun dan memiliki sifat khas dari *Abang Betawi*. Ia pernah juga terkenal sebagai pokrol bambu dan pernah ikut serta dalam kerusuhan di Tanjung Oost tahun 1916 sebagai pemberi *jimat* kepada pengikut-pengikut Entong Gendut. Selain itu, ia juga dikenal sebagai guru ilmu-ilmu tersebut, termasuk soal-soal kegaiban, seperti memanggil mendung dan banjir, dan juga banjir darah, di samping dapat menghilang dan berganti rupa.

Ketiga, adanya harapan terhadap restorasi dari kesultanan Banten. Menurut *uga* (tradisi) setempat, salah seorang keturunan Maulana Hasanuddin pada suatu ketika akan menjadi raja Banten. Sesudah proklamasinya sebagai raja, rakyat akan berkumpul di Banten untuk mendirikan kembali masjid besar, istana, dan saluran-saluran air. Hanya mereka yang dapat menunjukkan "kartu" silsilah dan cap "Haji Kamul" akan dibebaskan dari kewajiban kerja paksa. Ide yang nativistis ini disebarkan oleh Ibu Melati, seorang dukun yang terkenal, yang di samping membagi-bagi "kartu" silsilah juga menjual *jimat* dalam bentuk "kitab suci" yang memuat sejarah keramat Banten. Ibu Melati terkenal karena ilmunya seperti *ilmu kawedukan* dan *ilmu keteguhan*.

Keempat, adanya ideologi milenaristis dan eskatologis yang didukung oleh pengikut-pengikut Kaiin. Ilmu yang diajarkan oleh seorang guru bernama Raden Mangunsaria, mengajarkan tentang kedatangan seorang wali yang akan mengajarkan suatu ilmu yang "tinggi". Diramalkan juga akan adanya banjir besar yang akan menghancurkan umat manusia kecuali mereka yang telah mengikuti ajaran baru itu. Mereka yang selamat akan diberi sawah dan rumah gedung, sedangkan yang tidak percaya akan mati seperti kerbau.

Kelima, berhubungan dengan ideologi milenarisme dan ekstakologi ini terdapat pula harapan mesianistis tentang kedatangan *Imam Mahdi*, yaitu tokoh juru selamat dalam tradisi Islam Syiah. Tanda-tanda kedatangan *Imam Mahdi* itu digambarkan dengan turunnya Nabi Isa di gunung Serandil, seorang anak membawa bendera akan dikenal sebagai *Imam Mahdi*. Orang besar akan kehilangan kekuasaannya, rakyat akan mengambil alih pemerintahan, dan orang-orang Islam akan menggantikan orang-orang Belanda.

Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa upacara-upacara ritual yang dilakukan oleh pemberontak mirip dengan ritus inisiasi dari perkumpulan-perkumpulan mistik, seperti mandi dengan air suci untuk membersihkan diri setelah beberapa hari berpuasa dan berdoa atau bersemedi. Di sini terdapat juga kepercayaan tentang penjelmaan kembali tokoh-tokoh mistis, seperti Prabu Siliwangi, raja Mesir, Banten, Surakarta, dan Cirebon. Jimat dan benda-benda keramat memainkan peran penting di dalam kehidupan pengikut-pengikut gerakan itu.

Dalam peristiwa Tangerang, tampak adanya proses transformasi, di mana protes ekonomi dirumuskan dalam batasan-batasan keagamaan. Berhubungan dengan itu, dapat ditunjukkan pula tentang golongan-golongan sosial yang ada di dalam gerakan itu. Menurut penyelidikan,

berdasarkan kedudukan sosialnya, dari 24 orang yang ditawan, 4 orang di antaranya adalah orang miskin, sedangkan sisanya termasuk orang kaya, yaitu orang yang memiliki rumah, tanah, ternak, dan sumber-sumber kehidupan atau pendapatan lainnya. Orang-orang itu juga selalu membayar pajaknya secara teratur. Mereka itu berasal dari distrik-distrik di sekitar Kebayoran, lebih kurang 20 paal dari Pangkalan yang jaraknya lebih kurang 30 km, yaitu pusat pemberontakan. Tokoh-tokoh gerakan itu cukup bervariasi latar belakangnya. *Tokoh pertama*, Kaiin, yang menjadi pemimpin selama perlawanan berlangsung dikenal sebagai dalang. Sebelumnya ia adalah seorang kuli *nyawah* (buruh mengolah sawah) yang rumahnya berdiri di atas pekarangan saudara perempuannya. Setelah itu, secara berturut-turut ia menjadi mandor, pembantu polisi, dan pembantu. Pada saat perlawanan terjadi, ia dipandang sebagai dalang yang baik. Setelah kawin dengan Tan Tseng Nio ia menjadi lebih makmur.

Tokoh kedua, adalah Haji Riun dari Kalideres, yang memiliki rumah yang baik, dikenal sebagai guru mengaji Alquran dan *syeh,* yang berprofesi sebagai pedagang hasil bumi. *Tokoh ketiga*, adalah Merin dari Parungkured. Oleh Kaiin ia ditunjuk sebagai pahlawan (panglima). Ia juga termasuk orang berada. *Tokoh keempat*, adalah Aneong dari Karang Tengah, seorang petani dan juga seorang dukun, diangkat sebagai patih. *Tokoh kelima*, adalah Sirah Bapa Sambut, juga seorang petani yang makmur; dan yang *terakhir* adalah Marin dari Kampung Melayu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemimpinnya terdiri atas petani-petani yang berada. Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, tampak lebih jelas awal mula terjadinya peristiwa pemberontakan itu sendiri.

Kaiin Bapak Kaiah alias Bapa Dalang, sejak tahun 1922 sering kali mengunjungi makam keramat di Manggadua dengan ditemani Haji Riun dan Sairin. Ia juga sering kali berziarah ke Ujung Keramat di rumah Ibu Edja dan ia berkenalan dengan Merin, Raden Mangunsaria, dan Abdul Murod dari Gang Betet di Batavia (Jakarta) Lama. Tanda-tanda penting sebelum terjadinya perlawanan tampak sewaktu Bapak Dalang mengunjungi Kyai Mohammad Santri dari Girijaya di lereng Gunung Salak. Orang mengganggap kiai itu sebagai seorang pendeta keramat yang dapat memberi rahmat.

Pertemuan pengikut-pengikut penting gerakan itu terjadi pada bulan Oktober di rumah Merin, ketika sedang dilangsungkan upacara pesta perkawinan. Pada saat itulah terjadi perubahan pada Kaiin. Pesta perkawinan itu diramaikan dengan pertunjukan wayang yang menyajikan cerita *Penggiring Sari* dan Soklawijaya, keduanya keturunan Prabu

Siliwangi, yaitu cerita legendaris tentang raja dari kerajaan Sunda. Pada suatu ketika Kaiin sekonyong-konyong jatuh tidak sadar dan berkata kepada para pengunjung bahwa "carita Soklawijaya" sebenarnya sejarah hidupnya sendiri. Ia juga menerangkan bahwa ia adalah keturunan raja dan akan dinobatkan sebagai raja dengan gelar Ratu Rabulalamin atau Sang Hyang Tunggal. Lagi pula ia mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tapanya selama 17 tahun dan waktunya telah tiba untuk mendirikan kerajaannya. Ia mengajak para hadirin untuk turut serta bergerak ke arah Gunung Salak.

Beberapa kali setelah meletusnya perlawanan, Kaiin dan para pengikutnya mengadakan pertemuan-pertemuan dan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat keramat di Manggadua dan Parungkured Rahmat, dan orang-orang keramat itu diharapkan untuk menjamin berhasilnya usaha dalam merebut kembali *Negeri Pulo Jawa*. Pengikut-pengikut Kaiin melihat ke depan dengan harapan untuk memiliki tanah cukup luas yang direbut dari tuan-tuan tanah Cina sesuai dengan ilham yang diterimanya bahwa tanah-tanah di Tangerang sebenarnya milik nenek moyangnya.

Sesuai dengan anjuran Sairin, serangan harus dimulai pada tanggal 10 Februari 1924, atau tanggal 4 bulan Rajab dalam penggalan Jawa. Beberapa minggu sebelum melancarkan serangan, merupakan saat yang menggentarkan, di mana banyak dilakukan ziarah-ziarah dan pembagian jimat-jimat. Puncak acara persiapan terakhir adalah upacara pembersihan diri yang dilakukan di rumah Sairin untuk memperoleh kekebalan bagi para pendukung gerakan itu. Pada waktu yang telah ditentukan mereka diharuskan memakai celana putih dan topi bambu buatan Tangerang.

Setelah dekat harinya, para pengikut Kaiin dikumpulkan di rumah Kaiin. Pada kesempatan itu Kaiin memproklamasikan dirinya sebagai orang keramat yang terakhir dan meramalkan bahwa pada hari serangannya, dunia akan diliputi oleh kegelapan. Oleh karenanya, rakyat dianjurkan agar tinggal di rumah. Mungkin akan terjadi perang kecil atau perang besar.

Pada tanggal 19 Februari 1924, Kaiin memimpin pengikut-pengikutnya menuju ke tempat tuan tanah di Pangkalan dan menyerang penghuninya serta harta miliknya. Kantor tuan tanah di Kampung Melayu dirampok dan buku-buku dibakar. Kemudian mereka menuju ke rumah asisten wedana Teluknaga untuk memberitahukan bahwa mereka akan ke Jakarta untuk menghacurkannya. Asisten wedana itu menasihati agar tidak melanjutkan maksudnya. Ia cukup berhasil menenangkan mereka dengan mengajak minum teh. Sementara mereka minum teh, ia mengirimkan kurir kepada kontrolir Tangerang untuk memberitahukan tentang adanya aksi

Kaiin dan para pengikutnya itu. Setelah menerima berita itu, kontrolir Tangerang mengirimkan sepasukan polisi ke Teluknaga.

Pada siang harinya Kaiin dan para pengikutnya bergerak kembali ke arah Jakarta, tanpa menyadari bahwa mereka telah dibayangi oleh pasukan polisi. Ketika sampai di Tanah Tinggi, mereka disergap dan dihujani tembakan oleh polisi sehingga 19 orang terbunuh dan 20 orang lainnya tertangkap. Setelah bentrokan berdarah itu terjadi, gerakan itu lenyap dan kemudian tidak ada beritanya lagi.[19]

Meskipun tidak cukup bukti yang dapat mengungkapkan adanya hubungan gerakan Kaiin ini dengan pertumbuhan nasionalisme modern atau Sarekat Islam, dari ide-ide yang dilontarkan para pemimpinnya, terlihat adanya kesadaran politik di kalangan mereka. Hal ini antara lain tercermin dari tujuannya untuk mengembalikan tanah dari orang-orang asing yang dinilainya tidak mempunyai hak menguasai tanah itu kepada rakyat atau penduduk pribumi, seperti tercermin dalam ungkapan mereka, "dari asal pulang ke asal". Satu ciri penting dari gerakan di Tangerang ini adalah tuntutan penghapusan tanah partikelir dan pengusiran terhadap orang-orang asing. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan ekonomi yang khusus dengan disertai tuntutan politik yang luas.

Tentu saja lahirnya nasionalisme dapat diharapkan pengaruhnya dalam gerakan-gerakan protes daerah agraris. Hal ini tampak semenjak tahun 1913 banyak kegiatan yang bersifat kolektif terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya sistem tolong-menolong dalam kematian, pembicaraan tentang masalah sehari-hari dalam perkumpulan-perkumpulan, beberapa bentuk organisasi perkumpulan seperti yang tercermin dalam perkumpulan rodat yang meningkatkan rasa tolong-menolong dan sebagainya. Perlawanan di Tangerang memang tidak mempunyai afiliasi yang bersifat nasional dan diorganisasi melalui garis kekerabatan serta pengelompokan dalam upacara.

Namun, dalam gerakan yang terjadi di Demak pada tahun 1918 dan 1935 tampak adanya tingkatan modernitas yang lebih luas, baik dalam kepemimpinan maupun organisasinya. Peristiwa Bulusan yang terjadi tahun 1918 misalnya, diorganisasi oleh ketua Sarekat Islam dari Demak dan Semarang yang bernama Suharja dan Semaun. Gerakan pemberontakan dimulai dengan diadakannya serentetan rapat-rapat di cabang-cabang Sarekat Islam yang merumuskan tuntutannya sebagai berikut:

[19] Laporan Asisten Residen Mr. Cornelis, tanggal 10 Maret 1924

(1) penghapusan pajak kepala (sebagai ganti kerja paksa); (2) penghapusan lumbung desa dan pembagian padi kepada orang kecil; (3) pengembalian tanah sawah komunal kepada orang kecil; (4) pembelian tanah partikelir oleh pemerintah secepat mungkin. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, rakyat akan berontak.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa desa-desa siap untuk menjadi arena propaganda protes dengan tujuan yang bersifat nasional dan sekuler. Banyak orang desa menjadi radikal dan siap untuk melakukan kegiatan politik, seperti yang terjadi di empat desa wilayah Kecamatan Wasalam. Mereka menolak untuk menyekolahkan anak-anak mereka dengan alasan pengetahuan yang diterima tidak bernilai. Rakyat di Karangrawa dan Klitik Hilir menolak untuk menghadap asisten wedana dan melakukan kerja paksa. Di mana-mana rakyat lebih kuat kesetiaannya kepada pemimpin Sarekat Islam daripada kepada para pegawai pemerintah.

Kerusuhan-kerusuhan lain adalah peristiwa Genuk pada tahun 1935 di daerah Demak.[20] Perlawanan ini terjadi di lingkungan para kusir gerobak, yang menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah kotapraja Semarang. Mereka sebenarnya menolak untuk membayar dua kali, yaitu ke Kabupaten Demak dan Semarang. Pada tanggal 4 Febuari 1935 perlawanan meletus ketika kusir-kusir gerobak mengadakan perlawanan terhadap polisi di Kaligawe yang sedang memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk ke kota. Dalam pergumulan yang singkat tiga orang terbunuh dan lainnya banyak yang luka-luka. Peristiwa ini mengakibatkan memuncaknya ketegangan-ketegangan yang lebih sengit di berbagai tempat dalam menolak pungutan pajak yang berat.

Kerusuhan di Genuk ini menurut laporan diorganisasi oleh Sukaemi dan Raden Ahmad yang menjadi anggota cabang Sarekat Kusir Indonesia. Gerakan protes di Genuk ini juga berisi unsur-unsur agama seperti yang tampak dengan adanya proklamasi Sukaemi sebagai Sunan Kali Jaga, yaitu sebagai suatu keinginan agar diakui sebagai pemimpin yang keramat. Selain itu, ia juga membagi-bagikan karcis seharga lima sen sebagai tanda bebas masuk kota, karena ia mengganggap dirinya memiliki kekuasaan dalam mengawasi pemasukan itu.

Dari kerusuhan-kerusuhan tersebut di atas, jelaslah bahwa rakyat masuk dalam arus aksi kolektif karena mereka menginginkan berakhirnya

---

[20] Surat resmi Residen Semarang pada tanggal 14 Februari 1935 No. 187/27, dalam *Mairraport* 195/351, *ARA*

kebobrokan ekonomi mereka. Tuntutan-tuntutan ekonomi jelas menonjol hampir di segala pemberontakan di tanah partikelir seperti Cikandi Udik, 1845; Pondok Gedeh, 1864; Bekasi, 1869; Cibarusa, 1870; Ciampea, 1892; Tanjong Oost, 1916; Bululusan, 1918. Faktor ekonomi yang mereka jadikan alasan yang menonjol adalah masalah pungutan cukai.

Ide-ide agama, terutama sekali ide perang jihad, penting sekali dalam memberikan dukungannya terhadap gerakan-gerakan petani, sehingga merupakan pembantu dalam perlawanan petani. Gerakan semacam itu dapat ditemukan misalnya di dalam: Peristiwa Cilegon, 1888; Peristiwa Gedangan, 1904; Peristiwa Dermadjaja, 1907; dan Peristiwa Garut, 1919. Lahirnya Sarekat Islam juga telah banyak memberikan pengaruh dalam gerakan protes seperti yang terjadi di Lasem dan Tuban, 1913; Rembang, 1916; Surabaya, Cirebon, 1918; Kudus, 1918; dan Garut, 1919. Pada tahun-tahun itu terjadilah mobilisasi massa petani secara cepat dan luar biasa. Gerakan-gerakan protes selanjutnya tercermin dalam gerakan lain yang lebih merupakan gerakan mesianistis, gerakan "sektarianistis" dalam gerakan agama, dan juga dalam gerakan yang termasuk dalam nasionalisme modern.

B. Gerakan Ratu Adil

1. Pendahuluan

Seperti gerakan sosial tradisional lainnya, kerusuhan-kerusuhan mesianistis di Jawa merupakan peristiwa pergolakan yang pendek umurnya dan terbatas tempatnya, misalnya pada sebuah desa atau suatu persekutuan hidup. Gerakan itu umumnya berasal dari seseorang yang menerima peran sebagai pemimpin agama, nabi atau jurus selamat, dan yang diikuti oleh segolongan orang-orang yang percaya kepadanya. Gerakan ini selalu bersandar pada segi-segi gaib dan umumnya menjelma dalam segi-segi eskatologis dan milenaristis. Memang gerakan itu haruslah dipandang sebagai gerakan yang bersifat revolusioner dalam pengertian bahwa gerakan itu menghendaki suatu perubahan multak. Secara singkat gerakan itu menghendaki munculnya satu milenium, yaitu harapan terhadap datangnya zaman keemasan yang tidak mengenal penderitaan rakyat dan semua ketegangan serta ketidakadilan telah lenyap.

Mesianisme yang timbul di Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung untuk menyatakan dirinya dalam gerakan Ratu Adil, yang dalam beberapa hal jenis gerakan semacam ini masih dapat dijumpai di daerah tersebut

pada masa sekarang.[21] Di Jawa Barat di daerah Sunda, gerakan semacam itu juga muncul dengan nama gerakan Ratu Sunda.[22] Namun, di Jawa Tengahlah gerakan Ratu Adil muncul di masa yang terpanjang. Gerakan mesianistis yang tertua, terkenal dengan apa yang disebut Pemberontakan Diponegoro (yang lebih dahulu) pada akhir tahun 1720.[23] Selama abad ke-19 gerakan semacam itu tersebar luas ke seluruh daerah Jawa di mana gerakan itu muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam pertengahan pertama dari abad itu secara berturutan gerakan itu muncul secara lokal, dan tercantum dalam laporan tertulis sehingga jelas menunjukkan bahwa harapan-harapan mesianistis di kalangan rakyat merupakan faktor yang penting dalam pandangan mata pemerintah.[24] Sifat nativistis dari gerakan itu tercermin dalam harapan-harapan akan kembalinya kerajaan pribumi. Selama pertengahan kedua abad ke-19 ide mesianistis semakin lebih tampak.

Kehidupan kembali harapan-harapan yang mesianistis sering kali diikuti oleh munculnya kembali kehidupan keagamaan, nativisme, atau milenarianisme. Sudah barang tentu di samping menunjukkan ciri-ciri khas tertentu, gerakan ini juga memiliki bentuk yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Pada sekitar tahun 1910-an gerakan mesianistis menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Tidak mengherankan bahwa pergolakan tradisional yang mengguncangkan itu meluas di Jawa berdampingan dengan gerakan nasionalisme modern. Hal ini sejalan dengan belum meratanya pengaruh dari westernisasi. Sebagian masyarakat Jawa masih mempertahankan tradisi, seperti dalam pemujaan nenek moyang, orang-orang keramat, dan kekuatan-kekuatan magis, sedangkan sebagian masyarakat lain–yaitu sebagian besar masyarakat kota–sedikit banyak telah mengalami suatu tingkatan modernisasi.

Sifat agama dari gerakan-gerakan protes tradisional umumnya dihasilkan oleh kenyataan bahwa masyarakat tradisional umumnya bereaksi terhadap perubahan sosial dengan jalan keagamaan, semata-mata

---

21 Pada bulan April 1967 muncul berita tentang gerakan yang menamakan diri Herucakra. Gerakan tersebut berpusat pada seorang penebus atau tokoh Ratu Adil yang mengambil nama Herucakra

22 Tentang contoh-contoh dari gerakan Ratu Sunda, misalnya pada tahun 1832, 1839, 1841, 1853; lihat Surat resmi Residen Priangan, tanggal 20 Desember 1871, La A. Rahasiah, contoh lain lihat pula "Ratu Sunda" dalam *Weekblad van Indië, II* (1905–1906), hlm. 22

23 Periksa J. Brandes, "Iets over ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorspelling van Jayabaya", *TBG,* Jilid XXXXXII (1889), hlm. 268–430

24 Daftar kerusuhan-kerusuhan selama periode ini dapat dilihat dalam E. De Wall, *Onze Indische Financien,* Jilid I (1876), hlm. 219–222, beberapa di antaranya dapat disebut di sini antara lain: gerakan yang dipimpin oleh Bagus Djedik alias Pandita Penembahan Syeh

karena perubahan itu tidak membawa diferensiasi di antara berbagai segi kehidupan. Akibatnya, gerakan-gerakan agama cenderung untuk menjadi revolusioner sifatnya, bertujuan untuk mengadakan perubahan secara mutlak dan radikal. Gerakan mesianistis selalu menunjukkan penolakan secara mutlak terhadap tata masyarakat yang ada, terutama sekali menolak secara mutlak adanya orang-orang Eropa. Sementara gerakan ini muncul dengan sifat keagamaannya, gerakan-gerakan mesianistis menunjukkan segi politik. Peristiwa Gedangan di Jawa Timur pada tahun 1904 dan peristiwa Dermadjaja pada tahun 1907 menggambarkan secara jelas hubungan antara gerakan mesianisme dengan penolakan pemerintahan asing.

Dalam segi-segi keagamaan gerakan ini selalu menyertakan unsur-unsur nativitis, yaitu kehidupan kembali mitos-mitos lama atau suatu kerinduan terhadap kembalinya zaman keemasan pada masa lampau. Kerinduan rakyat untuk menemukan kembali zaman keemasan yang mitis itu, ditunjukkan dalam ramalan-ramalan mesianistis, dan rakyat melahirkan rasa dendamnya terhadap pemerintah asing, serta keinginan mereka untuk mengusirnya tergambar dalam penghidupan kembali harapan-harapan mereka akan kedatangan Ratu Adil. Namun, harapan itu selalu mengandung diagnosis terhadap keburukan kehidupan sosial dan ekonomi yang telah mencekik penduduk perdesaan.

Tujuan pokok gerakan ini adalah mengubah kehidupan profan dari masyarakat secara mutlak dan radikal, tanpa mengarahkan ke tujuan-tujuan dunia belaka. Karena sifat tujuannya yang profan dan praktis, gerakan ini tidak mempersoalkan masalah kehidupan di akhirat. Akan tetapi, yang dipersoalkan ialah masalah sekarang sehingga tidak membuat perkiraan tentang nasib akhir dari manusia. Oleh karena itu, dapat dibedakan dari gerakan-gerakan keagamaan yang murni. Namun, sebagian besar gerakan mesianistis di Jawa bersifat sinkretis, sehingga sukarlah untuk membedakan antara gerakan yang bersifat profan dan gerakan agama. Banyak gerakan-gerakan ini bersandar pada perkumpulan-perkumpulan sufi sehingga tujuan akhirat kadang-kadang ikut juga menjadi suatu unsur. Ide perang jihad juga membawa serta janji-janji tentang kehidupan yang bahagia di alam baka nanti. Mesianisme menjadi tekanannya pada sifat keduniawiannya dengan milenarianisme dan sifat spritual dengan

atau Tekowari di Surakarta pada tahun 1839; pada tahun 1840 kerusuhan di Yogyakarta digerakkan oleh Sarip Prawiro Sentono dan juga adanya gerakan Baudjaja di Semarang; pada tahun 1842 gerakan Kyai Hasan Maulani; peristiwa Achmad Daris pada tahun 1843; peristiwa Singataruna pada tahun 1848; lihat pula selanjutnya Laporan Politik 1839–1848 dalam *Exhibitum*, 31 Januari 1851 No.27, *bis*

mendasarkan kepercayaan tentang penyelamatan dari kekuatan-kekuatan gaib. Untuk memahami sifat khas gerakan mesianistis di Jawa, perlulah kiranya diketahui lebih dahulu tentang latar belakang budaya tempat gerakan itu terbentuk.

Untuk mengetahui iklim budaya dan masyarakat perdesaan Jawa hendaklah diperhatikan kehidupan Islam dan terutama sekali tentang reaksi lingkungan kaum muslim terhadap pengaruh pemerintah Belanda. Pada dasarnya reaksi kaum muslim itu bersikap bermusuhan. Sikap melawan kaum muslim ini kadang-kadang dinyatakan dengan cara-cara kekerasan, yaitu dalam bentuk pemberontakan melawan yang berkuasa. Bersamaan dengan perluasan ekspansi dan pengaruh yang besar dari kekuasaan Barat selama perempatan akhir abad ke-19 dan bagian pertama dari abad ke-20, api semangat Islam juga menghebat. Dalam suasana kebangkitan kembali agama ini, Islam menjadi tempat pemersatu karena memiliki daya tarik yang luas bagi rakyat secara keseluruhan. Cap agama menjadi penting dalam perkembangan gerakan perlawanan terhadap Belanda. Kekuatan perlawanan yang terpadu di dalam lingkungan masyarakat Islam terpusat dalam lembaga-lembaga Islam seperti dalam pesantren dan tarekat, ide jihad atau perang sabil, dan dalam pemimpin-pemimin agama yang mencoba untuk mengasingkan dan mengebalkan diri terhadap kekuatan-kekuatan baru. Tempat mereka yang sstrategis itu menjadikan mereka pusat kekuatan pengerak dalam menggerakkan peralatan kelembagaan dalam melancarkan gerakan-gerakan perlawanan.

Praktik-praktik Islam yang umumnya di perdesaan Jawa selalu dipenuhi dengan unsur-unsur non-Islam seperti mistik, kekuatan-kekuatan magis, dan pola-pola adat kebiasaan lama yang diserap tetapi semua unsur-unsur ini memperlemah sifat keagamaannya. Sebagai suatu sistem, "agama rakyat Jawa" memiliki kekuatan yang lain daripada yang lain dalam meng-asimilasikan unsur-unsur asing yang memperkaya isi ideologinya dan memperkuat kekuatannya dalam menghidupkan massa. Mengenai hal ini dapat ditunjukkan, misalnya: pemujaan orang-orang keramat seperti yang tercermin dari banyaknya makam-makam keramat, dari para wali, punden, tempat-tempat berziarah, upacara selamatan atau sedekah, penggunaan kekuatan magis dalam pengobatan tradisional, penggunaan perhitungan dalam menentukan waktu yang baik untuk melakukan sesuatu yang penting dalam kehidupan, seperti perkawinan, perjalanan, ataupun usaha perdagangan.

Pesantren dan tarekat mempunyai peran penting dalam perkembangan gerakan mesianistis. Keduanya memberikan dasar organisasi yang kuat bagi pergerakan sosial dan memberikan kekuatan yang pokok dalam melakukan

tindakan-tindakan politik. Pesantren merupakan lembaga penting dalam pembentukan pola kehidupan sosial, budaya, dan agama bagi kaum muslim. Tarekat mempunyai peran yang kuat bagi gerakan keagamaan, dan banyak memberikan kekuatan dalam gerakan kebangkitan kembali agama dalam abad ke-19.[25] Ikatan perhubungan antara guru dan murid yang terbentuk dalam pesantren dan tarekat merupakan landasan pembentukan organisasi yang efektif dan menjadi inti bagi pembentukan solidaritas. Oleh karena adanya perhubungan itulah besar kemungkinannya dalam mengalihkan tarekat ke dalam sel-sel atau pusat kebangkitan kembali agama, dan juga mudah untuk melibatkannya dalam pemberontakan. Lebih-lebih adanya *bai'at* atau sumpah setia murid kepada guru merupakan landasan kuat bagi terwujudnya disiplin golongan. Lembaga keagamaan itulah yang menjadi saluran jaringan-jaringan perhubungan, perluasan ideologi, dan semangat agama. Karena adanya kenyataan itulah beberapa gerakan agama dapat meluas sampai jauh melampaui batas-batas lokalnya bahwa Belanda sangat mencurigai pesantren dan tarekat sebagai tempat pembentuk kesatuan yang meliputi seluruh bangsa, dan sebagai pusat sikap anti-Belanda, serta tempat persekongkolan para haji.

Pesantren bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai penanaman kader-kader pemimpin agama. Beberapa pesantren yang terkenal dari ujung ke ujung Pulau Jawa pada bagian kedua abad ke-19, antara lain pesantren Lengkong (Cirebon), Krapyak (Yogyakarta), Tegalsari (Ponorogo), dan Sidacerma (Surabaya). Sudah merupakan hal yang umum bagi para santri untuk belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya dalam mencari pengetahuan yang memadai.[26] Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kepemimpinan dari gerakan-gerakan agama banyak muncul dari lingkungan tarekat dan pesatren.

Banyak pemimpin agama yang merasa terpanggil untuk menyatakan diri sebagai pemimpin mesianistis sebagai akibat dari penetrasi Barat yang semakin mendalam. Dengan melalui perluasan penempatan pegawai pamongpraja, pemerintah kolonial telah membuat jalan yang semakin lebar bagi penetrasinya ke daerah perdesaan, dan dengan demikian secara tidak

---

[25] Sebagai contoh adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888; lihat Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its conditions, course, and sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, The Hague, 1966, terutama bab V dan VI

[26] Mengenai pesantren-pesantren yang terkenal, lihat J.F.G. Brumun, *Het Volks onderwijs onder de Javanen*, (1847); juga L.W.C. Berg dalam, "Het Mohammedaansche godsdients-onderwijs of Java en Madoera, en de daarbij gebruikte Arabische boeken, *TBG*, Jilid XXXI (1886), hlm. 518–555

langsung mengancam kedudukan elite agama yang ada di daerah tersebut. Akibatnya, dengan sifat bermusuhan, pemimpin agama mulai menggerakkan pesantren dan tarekat dalam gerakan perlawanan terhadap Belanda. Mereka mengutuk pemerintahan Belanda atas dasar landasan politik dan agama. *Pertama*, dalam pandangan kepercayaan kaum muslimin pemerintahan kafir haruslah ditolak. *Kedua*, mereka takut kehilangan hak-hak istimewa, kedudukan dan pengaruh terhadap penduduk perdesaan. Dalam masa peralihan ini permusuhan dipertajam karena dalam kenyataan kaum elite agama dan pengikut-pengikutnya harus berhadapan dengan golongan elite lain, yaitu elite birokratis (priyayi), yang hidup berdamai dengan Belanda. Oleh karenanya pola umum dari gerakan agama menunjukkan bahwa elite birokratis telah menjadi sasaran bagi sikap bermusuhan rakyat, karena mereka dianggap bekerja sama dengan Belanda. Dengan demikian, muncullah "kelas" pemimpin agama yang berfungsi menjadi pemelihara ideologi tradisional, dan dapat dianggap sebagai endapan sosial yang membeku, selama kebangunan kembali agama dalam abad ke-19. Di bawah kepemimpinan dengan basis kelembagaan pesantren dan tarekat, kerangka ideologis Islam dapat menyatukan masyarakat muslim perdesaan dan mengadakan perlawanan terhadap penetrasi Barat yang modern.

Faktor penting yang berlaku umum di sebagian besar gerakan mesianistis ialah bahwa gerakan itu tersusun dari kelompok-kelompok keluarga. Pengumpulan pengikut dilakukan melalui garis kekerabatan, sekalipun pengikut dari luar ikatan itu juga terdapat. Perkawinan dalam hal ini merupakan cara mempertemukan berbagai macam keluarga dalam satu sistem persekutuan. Anggota-anggota gerakan agama juga mengembangkan solidaritas persaudaraan yang melampaui hubungan-hubungan kekerabatan. Ikatan sumpah setia menciptakan juga semacam semangat kekerabatan yang dapat mencakup orang-orang yang ada di luar jaringan ikatan antarkeluarga. Sering kali di situ terdapat semacam inti keluarga kiai yang menjadi tulang punggung ikatan kekerabatan tersebut yang dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya.

Ledakan-ledakan mesianisme telah menunjukkan bahwa di dalamnya termuat tuntutan mengenai penyelaman masyarakat, yang menjelma dalam ide kedatangan Ratu Adil dan Imam Mahdi. Di dalam mitos Ratu Adil yang di lingkungan masyarakat Jawa sering juga disebut *Erucakra*, terdapat harapan akan kedatangan seorang raja yang membawa pemerintahan yang penuh dengan keadilan. Rakyat akan dibebaskan dari kejahatan, permusuhan, kesakitan, dan kelaparan. Kebangkitan kembali raja Tanjung Putih terjadi pada tahun 1880 (Saka) sedangkan *Erucakra* disebutkan akan

memerintah di Ketangga pada tahun 1900 (Saka).[27] Mitos semacam ini memiliki variasi yang bermacam-macam sesuai dengan lingkungan setempat. Sebagai contoh dapat dilihat dalam ramalan Ahmad Ngisa, pemimpin gerakan mesianisme pada tahun 1871. Ia meramalkan kedatangan Pangeran Erucakra yang diikuti oleh pasukan militernya, yang terdiri atas hantu-hantu, setan-setan, dan binatang-binatang berbisa. Erucakra akan membawa pemerintah asing dan akan mengusir dari negerinya, mereka boleh kembali asalkan mereka mau masuk Islam dan kegiatannya dibatasi untuk berdagang saja. Setelah orang-orang asing diusir, tiga pengusaha akan muncul, pertama berasal dari Majapahit, kedua dari Pajajaran, dan ketiga berasal dari Kali Sasak (Pekalongan). Ibu kota Banyumas akan pindah ke Daing dan ibu kota Banjarnegara ke Batur. Namun, setiap orang akan tinggal di tempat kelahirannya masing-masing.

Tradisi mesianistis Islam masuk juga ke dalam mesianisme Jawa, dan mahdisme dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa aliran gerakan agama di Jawa. Mesianisme Islam yang masuk ke dalam mesianisme Jawa itu umumnya tercermin dalam bentuk eskatologinya.

Tradisi mahdisme menyebutkan akan terjadinya hari terakhir (hari kiamat) yang didahului dengan kehancuran alam semesta. Penderitaan dan penindasan akan diakhiri oleh kedatangan Imam Mahdi sebagai pembawa ketenteraman dan raja dari kerajaan yang terakhir. Kerajaan itu akan dihancurkan oleh *Dajal*, setan yang kemudian akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Dengan demikian, keadilan akan dibangun kembali. Kepercayaan mesianistis Islam ini bercampur dengan mesianistis Jawa, yang sebagian besar mengendap ramalan Jayabaya. Tradisi ini merupakan unsur penting dalam pembentukan alam pikiran rakyat di daerah perdesaan Jawa. Bilamana rakyat mengalami penindasan atau penderitaan yang berat, ide Ratu Adil cenderung akan muncul. Sudah barang tentu penindasan kolonial bukanlah satu-satunya sumber kelahiran gerakan mesianistis. Dalam sejarah Indonesia banyak terjadi pemberontakan rakyat yang diarahkan baik kepada penguasa pribumi maupun kepada kekuasaan asing. Mesianisme ini tampak dalam sejarah Indonesia terutama karena dicatat oleh para pegawai pemerintah pada waktu itu. Sementara unsur-unsur nativitis itu jelas menunjukkan rasa kebencian terhadap kekuasaan asing dan mencerminkan semacam perasaan proto-nasional.

Persamaan dan perbedaan mengenai gerakan mesianistis ini dapat diperjelas melalui beberapa contoh yang muncul di dalam lingkungan

---

[27] Lihat J.J. de Hollander, *Handleiding bij de beofening der Javaansche Taal-en Letterkunde,* Breda, 1848, hlm. 173–183

budaya Jawa. Perlu ditekankan bahwa skala gerakan itu mungkin mencakup lingkungan kecil, tetapi masalah yang dilahirkan cukup luas.

2. Gerakan di Jawa

Pada tahun 1903 seorang kiai dari desa Samentara di Kabupaten Sidoharjo, bernama Kasan Mukmin, mulai bertindak sebagai orang yang menerima wahyu dan mengaku sebagai penjelmaan Imam Mahdi yang akan mendirikan sebuah kerajaan baru di Jawa. Ia berkotbah bahwa perang jihad akan diumumkan untuk melawan pemerintah Belanda. Sebelum memproklamasikan diri sebagai juru selamat, Kasan Mukmin telah mengumumkan sekelompok pengikut di sekelilingnya. Ia membagi-bagikan jimat dan menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. Namun, pengetahuannya tentang ajaran Islam tampak kurang, sedangkan menurut seorang penasihat Belanda pengetahuan *ngelmu*-nya tentang masalah-masalah Islam sangat meragukan.[28]

Mengenai masa muda Kasan Mukmin kurang diketahui. Ia dilahirkan di sebuah desa Gatakpesantren, dekat Muntilan, kira-kira tahun 1854. Setelah perceraian orang tuanya ia dipungut oleh Kyai Muktaran. Karena berdagang permadani ia banyak melakukan perjalanan, dan sering kali mengunjungi Semarang dan Pekalongan. Pada waktu itu ia telah berhubungan dengan seorang guru tarekat yang terkenal, Kyai Ngabdulrasul, yang lebih dikenal sebagai Kyai Krapyak. Dalam perjalanan tahun-tahun berikutnya ia banyak mengunjungi pesatren-pesantren serta guru-guru yang terkenal, seperti Pesantren Plotengan (Mojokerto), Kyai Haji Idris, Pesantren di Tirem (Mojokerto), dan terakhir Pesantren Sidodermo (Surabaya). Perkawinannya dengan kemenakan Haji Mohammad Tahir membawanya ke dalam lingkungan pemimpin-pemimpin agama yang terkenal di daerah itu. Setelah perceraiannya ia mulai berpraktik di bidang pengobatan, membagi-bagikan jimat, dan memberikan isyarat bagi nelayan dan petani. Sampai meninggalnya, Kasan Mukmin tetap tinggal di Samentara. Ia pernah meninggalkan tempat itu hanya sewaktu ia mengunjungi Kyai Krapyak untuk memasuki Tarekat Naksabandiyah. Berbeda dengan kiai-kiai lainnya, Kasan Mukmin tidak mendirikan *langgar* sendiri, dan menolak publisitas mengenai praktiknya sebagai guru. Ia mengajarkan *ngelmu*-nya secara rahasia. Tidak semua orang diperbolehkan menyaksikannya. Pengikut-pengikutnya mengikuti ajaran guru dengan melalui *rapal-rapal* (semacam doa-doa) yang dihafal dan diulang-ulang.

---

[28] Catatan Snouck Hurgronje, appendix dari Laporan Residen Surabaya, tanggal 10 Juni 1904, No. 189/Geh

Setelah kunjungannya ke Kyai Krapyak, ia menjadi semakin berpengaruh. Selama pertemuan kedua pemimpin itu rupanya telah membahas ramalan Jayabaya, ramalan mengenai milenium di bawah pemerintahan Erucakra, dan mengenai harapan-harapan kaum muslimin tentang akan datangnyan Imam Mahdi. Hasil pertemuan ini meyakinkan Kasan Mukmin untuk mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Semula yang diberitahu adalah teman karibnya, kemudian secara diam-diam kepada orang lain, dan akhirnya dalam pertemuan-pertemuan dengan pengikut-pengikutnya. Beberapa minggu sebelum meletusnya pemberontakan, persekongkolan dibentuk dan rapat-rapat rahasia diadakan, antara lain di desa Damari, Kurek, Wagir, dan Keboanpasar. Keboanpasar kemudian dipilih sebagai pusat pertemuan dan gerakan karena mungkin iklimnya sangat sesuai untuk gerakan itu. Disebutkan bahwa desa tersebut adalah tempat orang-orang membuat onar dan kekacauan. Terdapat laporan dari pihak resmi bahwa sebelum terjadinya pemberontakan, Kasan Mukmin sering berhubungan dengan Wedana di Bulang, Raden Djajadiningrat.[29]

Hari-hari terakhir menjelang timbulnya pemberontakan ditandai oleh kegiatan-kegiatan besar. Orang banyak dikumpulkan dan mereka yang menolak untuk bergabung dengan gerakan mendapat ancaman. Kasan Mukmin mengatakan bahwa mereka pasti akan menang, dan senapan-senapan Belanda akan macet, sedangkan mereka akan menjadi kebal terhadap peluru. Diterangkan juga bahwa mereka yang mati dalam pertempuran nanti akan naik ke surga, karena itu tidak perlu khawatir meninggalkan anak-istrinya, mereka nanti akan terpelihara.

Menurut rencana semula, pemberontakan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 atau Ahad Legi, tanggal 14 Maulud, kemudian dimajukan pada hari Jumat tanggal 27 Mei berketepatan dengan Gerebeg Maulud, yaitu perayaan hari kelahiran Nabi. Di tengah-tengah sawah yang terletak di sebelah utara Keboanpasar dikibarkan sebuah panji yang terdiri atas tiga warna, yaitu putih, biru, dan putih, dan diikati pita dari daun pisang kering sebagai lambang kegersangan. Pada pagi hari Jumat tanggal 27 Mei diadakan upacara sembahyang Subuh, dengan disertai upacara mandi suci, yaitu air *zam-zam*, sedangkan pada malam sebelumnya telah diadakan upacara zikir semalam suntuk yang dipimpin oleh Haji Abdulgani. Sesudah itu, Kasan Mukmin dengan murid-muridnya pergi ke lapangan, di mana rombongan lain telah siap di bawah pimpinan Haji

[29] Surat resmi Residen Surabaya, tanggal 19 September 1904 No. 325; periksa juga tanggal 15 Oktober 1904 No. 365

Abdulgani, Kyai Wagir, dan Pak Rupiah, menantu Kyai Wagir. Rombongan itu berjumlah lebih kurang 100 orang. Dari tempat ini pemberontak bergerak ke Keboan pasar.

Setelah mendengar adanya kegiatan gerakan pemberontakan itu, Bupati Sidoharjo segera pergi ke Gedangan dengan dikawal sepasukan polisi bersenjata, untuk menunggu bantuan pasukan militer yang dikirim oleh Residen Surabaya. Di tempat itu telah terjadi keributan, dan diberitakan oleh seorang yang baru saja lolos dari tawanan pemberontak bahwa wedana dan lurah Gedangan telah ditawan pemberontak dan seorang anggota polisi terbunuh. Bupati dan pasukannya kemudian bergerak menuju ke arah tempat kaum pemberontak dan akhirnya bertemu di jembatan Keboanpasar. Kaum pemberontak tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari pasukan pemerintah dan terus melancarkan serangan terhadap mereka dengan senjata pedang, tombak, dan keris sehingga terjadi pertempuran sengit. Pertempuran berakhir dalam waktu singkat dan pemberontak dalam keadaan ketakutan melarikan diri untuk menghindari tembakan-tembakan dari pasukan pemerintah. Dalam pertempuran itu Residen menderita luka-luka dan meninggalkan korban sejumlah 40 orang mati dan 20 orang lainnya luka-luka. Sejumlah orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung pemberontakan atau dikenal sebagai pemberontak, ditangkap. Kasan Mukmin sendiri akhirnya terbunuh karena menolak untuk ditawan. Jumlah orang yang ditawan ada 83 orang.[30]

Sekalipun pemberontakan telah ditumpas dengan mudah, dalam beberapa waktu pegawai-pegawai pemerintah merasa tidak aman. Demikian pula masyarakat orang Eropa merasa tidak tenteram dan takut kalau-kalau persekongkolan para haji itu akan mengadakan pembunuhan besar-besaran terhadap orang Eropa seperti yang telah diramalkan sebelumnya.

Di dalam peristiwa Gedangan ini terdapat sumber-sumber yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa agitasi yang secara khusus berhubungan dengan rasa dendam dan ketidakpuasan rakyat. Menurut sumber itu penyerangan dilancarkan secara khusus untuk menggulingkan pemerintahan setempat. Alasan pokok dari tindakan mereka berhubungan dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Bukti-bukti juga menunjukkan bahwa pemberontakan itu dijiwai oleh keinginan untuk membalas dendam yang disebabkan adanya perselisihan antara petani dengan pengurus perkebunan tebu. Menurut fakta-fakta dari hasil pemeriksaan, pemberontakan itu timbul sebagai

[30] Laporan Residen Surabaya, tanggal 10 Juni 1904 No. 189, Geh

jawaban terhadap kondisi penyewaan tanah yang tidak wajar, pengerahan tenaga buruh, masalah yang berhubungan dengan sistem pengairan, dan pungutan pajak di daerah-daerah perdesaan. Rakyat dan juga pegawai-pegawai pemerintah tidak mampu atau enggan ikut memecahkan perselisihan soal tanah. Memang salah satu sebab penting dari ketidak-puasan rakyat yang terjadi pada awal abad ke-20 ialah adanya peraturan tahun 1899, yang mengatur masalah peminjaman tanah kepada perusahaan-perusahaan gula. Menurut peraturan itu pihak pabrik gula mengadakan perjanjian kolektif dengan setiap desa, di mana pihak pabrik gula harus membayar sejumlah sewa tanah yang menjadi utang desa kepada pemerintah, sebagai gantinya sepertiga dari tanah desa diserahkan kepada pihak pabrik gula untuk kepentingan penanaman tebu. Namun, di dalam praktiknya peraturan itu merupakan sumber-sumber kesulitan bagi orang-orang desa karena banyak hal tidak wajar dalam pelaksanaannya.

Selain rasa dendam yang dibangkitkan oleh masalah penggunaan tanah, masih terdapat rasa dendam lain yang tercermin dalam agitasi yang tajam, seperti, (1) pemerintahan kafir telah membawa penderitaan dan kesengsaraan rakyat; (2) air telah dikatakan menjadi kotor atau beracun karena kena air yang dipergunakan untuk memandikan orang-orang Kristen; (3) tanah dan buruh telah diperas untuk kepentingan perusahaan asing; (4) pegawai dikatakan telah melakukan pencemaran tempat-tempat suci dengan mengadakan pembongkaran makam-makam keramat; (5) pengotoran garam oleh benda-benda "tidak murni"; dan (6) tindakan sewenang-wenang dari pegawai lokal.

Gerakan mesianisme pada masa berikutnya muncul pada tahun 1907 di desa Bandungan wilayah Kabupaten Berbek, di keresidenan Kediri. Pemimpin dari gerakan ini bernama Dermodjojo, seorang petani kaya dari desa Bandungan yang berumur 60 tahun. Di samping memiliki sawah seluas 30 bahu, ladang 7 bahu, dan sejumlah ternak, ia juga memiliki dua perangkat gamelan, dua perangkat wayang, gerobak sapi, dan tempat pande besi. Nama aslinya adalah Bagus Tulban, lahir di sebuah desa dekat Kudus yaitu desa Gebog. Ia diasuh oleh ibu dan ayah tirinya Trunodiko. Semasa kanak-kanak banyak cerita-cerita yang ajaib mengenai dirinya. Dikatakan bahwa pada suatu malam seorang pekerja pabrik melihat sinar yang keluar dari tubuh anak itu. Ibunya juga heran karena bilik yang ditempati oleh bayi itu tidak ada lampu yang menyala dan ternyata sinar itu keluar dari jantung bayi itu. Setelah dewasa ia kemudian menjadi seorang santri yang berkeliling dari pesantren satu ke pesantren lain, untuk memperoleh bimbingan dari guru-guru agama yang terkenal di pusat-pusat pengajaran agama yang penting. Secara berturut-turut ia belajar pada Haji Tuan Sanap,

Haji Dulkamid, Kyai Bardogi, Haji Sajang, dan Haji Mohammad Umar, guru di pesantren terkenal Sidocermo di Surabaya. Ia juga pernah belajar di pesantren Mojokerto dan pernah pula berguru di pesantren Kyai Kasanbesari selama tiga tahun. Di dalam pesantren yang terakhir ini ia banyak mendapat pengaruh yang tidak sedikit dari Kyai Kasanbesari. Di samping mendapat pengetahuan mistik, ia juga memperoleh pengetahuan tentang ramalan Jayabaya, harapan tentang kedatangan Ratu Adil dan memperoleh pusaka yang bernama Rojomuko dari kiai tersebut. Setelah meninggalkan pesantren ia banyak pula berhubungan dengan orang-orang penting termasuk para bupati di Jawa Timur. Menurut berita ia telah lebih dari sepuluh kali berpindah tempat sebelum berdiam di Bendungan, di tempat ini ia membuka tanah persawahan dan menjadi kaya.

Dermodjojo sebagai seorang suami dari empat orang istri, dan ayah dari 19 orang anak, telah berhasil dalam hidupnya karena ia terkenal tidak hanya sebagai seorang dukun, tetapi juga juga sebagai "penasihat" pertanian (*guru tetanen*) dan guru *ngelmu* (mistik) sehingga ia disegani oleh orang-orang desa. Para priyayi juga banyak yang berhubungan dengan dia karena memiliki pengetahuan primbon dan pengetahuan *ngelmu*. Mengenai cita-cita politiknya terlihat dari kehendaknya untuk menjadi kepala desa pada tahun 1896, tetapi gagal dalam memperoleh jabatan itu. Ia pernah juga menyuap Wedana Warujayang agar mau mengulangi pemilihan lurah tersebut dan ia juga pernah terlibat dalam masalah penjualan kayu jati gelap.

Mengenai kapan gerakan itu dimulai tidak dapat diketahui, tetapi yang jelas setelah Dermodjojo memproklamasikan dirinya sebagai Ratu Adil. Ia bermimpi bahwa ia telah ditakdirkan untuk menjadi Ratu Adil dan hal ini diperkuat dengan cerita-cerita orang lain yang memimpikan dia akan menjadi tokoh tersebut. Isi dari ramalan mimpi itu pada umumnya berkisar pada soal-soal yang berhubungan dengan proklamasi kiai sebagai Ratu Adil, perjuangan melawan musuh-musuhnya, kedudukan dari pengikut-pengikut penting dan kemenangan terakhir yang baik. Proklamasi Dermodjojo sebagai Ratu Adil terjadi pada bulan Januari 1907, yaitu ketika diadakan perayaan untuk menyambut pengumumannya itu yang jatuh pada tanggal 23 bulan *Besar* (bulan Jawa). Sesudah itu ia banyak memberikan indoktrinasi kepada pengikut-pengikutnya tentang kepercayaan bahwa Togog dan Semar akan datang untuk membebaskan rakyat. Dua tokoh ini membawa air suci yang disebut "tirta wilayat" yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kepercayaan ini memperkuat keyakinan para pengikut Dermodjojo dalam melancarkan serangan terhadap musuhnya.

Setelah tersiar berita bahwa Dermodjojo sedang mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk merencanakan suatu pemberontakan, pada tanggal 29 Januari 1907 Bupati Nganjuk bersama-sama sepasukan polisi bergerak menuju desa Bendungan untuk kemudian mengepung rumah Dermodjojo. Dalam situasi tegang akhirnya terjadilah perkelahian antara kedua pihak yang mengakibatkan beberapa orang menderita luka-luka, termasuk asisten residen dan wedana Berbek. Bantuan militer dari pihak pemerintah segera didatangkan dari Surabaya, yang tiba di tempat kerusuhan tersebut pada sore harinya. Pertempuran yang kedua segera terjadi dalam waktu yang singkat karena polisi berhasil mengatasi para pemberontak, dan menawan 49 berhasil ditawan termasuk Dermodjojo sendiri, berikut 9 orang lainnya yang terluka. Pemberontakan pun berakhir hanya dalam tempo sehari.

Dilaporkan bahwa pemberontakan itu tidak dijiwai oleh perasaan tidak puas dari pihak rakyat perdesaan, tetapi merupakan hasil dari sifat ketaatan yang membabi buta dari pengikut-pengikut Dermodjojo yang dianggap sebagai Ratu Adil. Sebagaimana dengan gerakan-gerakan petani lainnya, gerakan ini juga merupakan kejadian lokal yang murni. Beberapa pegawai pemerintah Belanda mengganggap gerakan ini mempunyai komplotan luas dengan segolongan aristokrat. Dalam hubungan ini bekas wedana Kertosono dianggap sebagai dalang dari peristiwa di Bendungan itu. Sementara itu bupati Pasuruan dituduh mempunyai hubungan gelap dengan gerakan tersebut, malahan disebut pula bahwa terdapat suatu jaringan perkomplotan yang meliputi daerah Banyuwangi, Kediri bagian Selatan, dan Madiun, di mana beberapa anggota priyayi ikut terlibat di dalamnya. Sudah barang tentu gerakan ini mempunyai hubungan dengan pemimpin-pemimpin agama beserta lembaganya, seperti Kyai Mohammad Rawi dari Banyuwangi dan pesantren di Cepaka. Gerakan lain yang mirip dengan gerakan mesianis ini juga dapat dilihat dalam Peristiwa Dietz, yaitu suatu gerakan mesianistis yang dipimpin oleh orang yang bernama Dietrz yang pengaruhnya meliputi Jawa Tengah.

Gerakan ini timbul pada sekitar tahun 1918 dengan munculnya orang bernama Dietz, pemimpin gerakan tersebut. Ia mengaku sebagai satu-satunya putra Ratu Kedaton, permaisuri Sultan Yogyakarta yang telah wafat, Hamengkubowono V. Ia dibuang ke Manado bersama dengan ibunya, dan dia diangkat sebagai anak oleh pensiunan opsir kesehatan Mayor Dietz. Oleh karena itu, ia kemudian disebut dengan nama Dietz. Namanya sendiri adalah Gusti Muhammad. Ketika berusia 15 tahun ia memakai nama Pangeran Surjengalogo.[31] Latar belakang pendidikannya

[31] Lihat *Babad Suryengalangan* (MS Sana Budaya, Yogyakarta)

dan pengalamannya dimulai dari *Europeesche Lagere School*, diikuti dengan perjalanan ke berbagai negeri di Eropa. Agaknya calon raja ini ingin menuntut hak penggantian takhta Kraton Yogyakarta, dan memegang peran sebagai dukun dan guru *ngelmu* serta menyebut dirinya sebagai Gusti Mohammad Herucokro. Dengan gelarnya itu ia bertujuan menjadi juru selamat. Ia memperoleh pengikut dan pengaruh yang luas, rupanya karena memiliki kepandaian dalam masalah pengobatan dan ajaran mistiknya yang terkenal dengan *ilmu kamuksaan*. Karena gelar kebangsawanannya yang tinggi itu pula ia dapat menarik beberapa pengikut di lingkungan tertentu dari daerah Yogyakarta.

Disebutkan bahwa Dietz tinggal di desa Bergaskidulo, lebih kurang 30 km dari daerah Semarang.[32] Di situ ia hidup sebagai petani dengan memiliki sawah seluas 15 bahu. Selain itu, ia mendirikan rumah dengan model kraton Jawa yang khas di daerah kerajaan, seperti regol di sebelah utara dan sebuah paseban yang terletak di sebelah selatan. Tempat tinggal itu dinamakan Kraton Tuk Puger, yang didiaminya bersama delapan istrinya dan anak-anaknya. Tempat itu kemudian ditinggalkan sebagai monumen ketika ia pindah di kratonnya di Ambarukmo, Yogyakarta, yaitu setelah memproklamasikan dirinya sebagai Sultan.

Dalam gerakannya itu ia mengumpulkan pengikut-pengikutnya dengan mengumumkan dirinya sebagai Ratu Adil dan calon pemegang takhta di Yogyakarta. Meluasnya gerakan ini ke seluruh daerah Jawa Tengah selatan diikuti dengan meluasnya mitos tentang kepemimpinannya sebagai juru selamat, dengan segala ajaran dan petuahnya kepada rakyat. Di daerah Surakarta misalnya tersebar berita bahwa pewaris kesultanan yang sebenarnya adalah Pangeran Surjengalogo yang meninggal dalam beberapa tahun sebelumnya, tetapi ia telah menjelma kembali ke dalam diri Gusti Mohammad Herucokro yang akan menjadi Ratu Adil dan akan membawa penyelamatan umat. Kedatangannya itu akan didahului oleh suatu bencana, oleh karena itu dianjurkan agar orang-orang mau menjadi pengikut Gusti Muhammad agar dapat selamat. Selain itu, juga terdapat kepercayaan bahwa dengan memakai minyak campuran yang dibawa oleh tokoh Ratu Adil itu orang dapat menyelamatkan diri dari bencana. Bahkan tersebar pula kepercayaan bahwa Gusti Muhammad itu seorang pemimpin bala tentara siluman yang tidak kelihatan. Gerakannya itu berhasil memikat pengikut-pengikut dari daerah Semarang, Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Tidak terdapat catatan mengenain aktivitas dan tindakan-tidakan dari gerakan ini secara terperinci, hanya dapat disebutkan bahwa ketika ia

[32] Lihat laporan rahasia tentang gerakan Dietz di dalam *Verbaal*, tanggal 30 Desember 1921, hlm. 14

tiba di Surakarta disambut oleh 2.000 orang, dan ada pengerahan dari Yogyakarata sebanyak 200 orang, dan 250 orang lainnya dari tempat lain yang pernah dipekerjakan dalam pembangunan istananya. Selain itu, di Klaten terdapat pengikutnya sebanyak 300 orang, dan di daerah Wonogiri sebanyak 150 orang. Dengan demikian, karena adanya nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam gerakan ini, yaitu sebagai pewaris takhta di Yogyakarta, ditambah dengan ajaran mesianistis, kedudukan pemimpin gerakan tersebut sangat kuat.

Pengikut dari gerakan Ratu Adil ini pada dasarnya terdiri atas golongan anggota bangsawan rendah, dan sejumlah pengikut-pengikut yang berasal dari golongan masyarakat rendah atau orang kebanyakan. Dari gerakan yang tersebut terakhir ini tidak ada bukti-bukti tentang adanya hubungan antara kekesalan ekonomis dan gerakan Dietz. Sekalipun demikian hal ini tidak berarti bahwa di situ tidak terdapat faktor-faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakangi sekelompok golongan sosial yang menjadi bagian dalam suatu gerakan.

Gerakan-gerakan mesianistis lainnya dapat disebutkan misalnya, gerakan Nur Hakim dan Malangjuda yang terjadi berturut-turut pada tahun 1870–1871 dan 1885–1886. Hampir bersamaan dengan gerakan tersebut, terdapat pula gerakan Ratu Adil yang meletus di daerah lain yang terkenal dengan peristiwa Amat Ngisa. Di daerah Banyumas gerakan-gerakan semacam ini juga muncul pada sekitar tahun 1920, di antaranya timbulnya dua buah gerakan mesianistis yang dapat dikatakan menonjol pada waktu itu. Gerakan pertama terjadi pada tahun 1919, dengan munculnya seorang pemimpin agama dari Prembun yang bernama Amadkosdi, dengan mengambil gelar Ratu Gambiranom, dan mengajarkan serta menganjurkan perang melawan orang kafir. Gerakan itu dilakukan antara lain dengan mengadakan penyerangan terhadap orang-orang Cina di Sidorejo dengan pengikut 50 orang. Gerakan yang kedua dipimpin oleh Mohammad Sirad yang memproklamasikan diri sebagai Imam Mahdi.[33] Latar belakang gerakan ini rupanya lebih dititikberatkan pada dua hal. Pertama, penolakannya terhadap lumbung padi, dan kedua, penolakannya terhadap perkawinan menurut tata cara Islam yang resmi. Sifatnya yang demikian itu menggambarkan suatu kecenderungan yang kuat tentang rasa kebenciannya terhadap golongan atau suatu lembaga yang sangat kuat kedudukannya dalam masyarakat. Selain itu, juga mencerminkan agitasi

[33] Surat resmi Residen Banyumas, tanggal 28 Januari 1920, No.18, dalam *Mailrapport* No. 135/20, *ARA*

yang diarahkan untuk menentang pembagian kemakmuran yang tidak merata.

Gerakan mesianistis tidak hanya terdapat di daerah seperti tersebut di atas, tetapi juga di daerah Mojokerto. Pada tahun 1923 seorang bernama Bulkim memproklamasikan diri sebagai Ratu Adil dan mengambil gelar Suropati Ngalogo.[34] Pada tahun yang sama juga muncul seorang yang bernama Pak Djebrak yang mengaku sebagai keturunan Raja Darmawulan, dan menyebarkan ajaran-ajarannya dan mengaku memiliki senjata yang terkenal waktu itu yaitu pusaka wesi kuning (senjata keramat dari Menak Jinggo, yang berhasil direbut oleh Damarwulan dan dipergunakan untuk membunuhnya). Sebelum berkesempatan untuk merebut kekuasaan pemerintah di Mojokerto dari tangan Belanda, Pak Djebrak berhasil ditangkap dan ditawan, kemudian dikirim ke Lawang untuk diselidiki penyakitnya. Di daerah yang sama dan dalam tahun yang sama pula timbul gerakan yang dipimpin oleh Murakat yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Gerakan ini bersifat anti-Belanda dan menganjurkan orang agar tidak mengakui pemerintahan serta tidak tunduk kepada pegawai pemerintah. Sebelum tokoh ini dapat menggerakkan rakyat untuk melancarkan serangan-serangannya, ia dapat ditangkap dan ditawan.

Dari gambaran munculnya gerakan mesianistis tersebut dapat dikatakan bahwa dalam budaya Jawa, kepemimpinan di dalam gerakan mesianistis bersumber pada wahyu suci, *wisik*, atau *wangsit*, di mana semuanya itu dinyatakan sebagai kekuatan-kekuatan yang bersifat gaib, misalnya mempunyai kekuatan magis dan dapat menyembuhkan orang sakit. Selain itu, dapat ditunjukkan pula bahwa pemimpin mesianistis tersebut pada dasarnya memiliki pribadi yang dinamis, memiliki jaringan komunikasi luas yang dapat melewati batas-batas daerahnya. Namun, ide dan sikap sebenarnya bersifat tradisional.

C. Gerakan Samin

1. Pendahuluan

Di antara pergolakan sosial di perdesaan, gerakan Samin dapat dianggap sebagai gerakan sosial tradisional yang pasif.[35] Gerakan ini secara umum memiliki ciri-ciri gerakan perdesaan yang lain, seperti para pelakunya

---

[34] Laporan Asisten Residen Nganjuk, tanggal 31 Maret 1923 No. 103, dalam *Mailrapport* No. 360/23, *ARA*

[35] Sartono Kartodirdjo, "Gerakan Protes dan Ketidakpuasan dalam Masyarakat Tradisional", *Prisma*, 1, 1977, hlm. 44

adalah para petani dan daerah geraknya tidak luas, dalam arti hanya meliputi beberapa desa saja dan sering terpisah-pisah, artinya tidak ada dukungan atau konsolidasi di antara gerakan-gerakan itu. Namun, ada satu hal yang membedakannya dengan gerakan-gerakan petani lainnya, yaitu biasanya gerakan-gerakan sosial yang sejenis ini hanya berumur singkat, tidaklah demikian dengan gerakan Samin.[36] Gerakan ini dimulai pada akhir kira-kira abad ke-19 dan hingga masa akhir ini masih hidup.[37] Selain itu, walaupun gerakan ini pada waktu mencapai puncaknya berhasil menimbulkan kecemasan pada pemerintah Hindia Belanda, pengaruhnya terhadap tatanan masyarakat pada waktu itu ataupun pada susunan pemerintah kolonial tidaklah besar. Sungguhpun demikian, gerakan Samin ini yang dapat dikatakan unik. Ada beberapa aspek dari sikap orang Samin yang patut dicatat, yaitu tanpa kekerasan, rajin, jujur dan berhasil sebagai petani, serta menghargai sesamanya sederajat, termasuk kaum perempuan.

Banyak pendapat yang telah dikemukakan tentang gerakan ini. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu berpendapat bahwa Gerakan Samin adalah gerakan mesianistis. Pandangan pemerintah Hindia Belanda tampaknya sejalan dengan pandangan Snouk Hurgronje, penasihat pemerintah Urusan Bumiputra dan ahli Islam pada waktu itu, yang berpendapat bahwa gerakan Samin adalah gerakan mesianistis yang non-Islam. Gerakan semacam ini tidaklah berbahaya menurut pendapatnya karena dapat dengan cepat ditumpas dengan jalan membuang pemimpin atau penganjurnya. Itulah sebabnya Surontiko Samin, penganjur ajaran Saminisme, dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Sumatra walaupun tidak cukup bukti bahwa ia akan memberontak.

Para sarjana dan peneliti pada masa kini pun tertarik pada gejala masyarakat perdesaan pada akhir abad ke-19 ini. Dari hasil penelitian dan analisis mereka telah terbit banyak karya tulis yang dapat menjadi sumber keterangan. Pendapat dan kesimpulan akhir mereka pun berbeda-beda.

---

[36] Beberapa penulis telah membahas tentang gerakan Samin, antara lain: Harry J. Benda dan Lance Castle, "The Samin Movement", *BKI*, 125, 2, 1969; A. Pieter E. Korver, "The Samin Movement and Millenium", *BKI*, 132, 2 dan 3, 1976; Sartono Kartodirdjo, "Gerakan Protes dan Ketidakpuasan dalam Masyarakat Tradisional", *Prisma*, 1, VI, 1977; Emanuel Subangun, "Tidak ada Mesias dalam Pandangan Hidup Jawa", *Prisma*, 1, VI, 1977, dan Victor King, "Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java", Suggestions for the Theoritical Analisys of the Dynamic of Rural Unrest", *BKI*, 129, 4, 1973

[37] Korver mengemukakan bahwa sampai tahun 1973 di desa Kutuk, Kabupaten Kudus, masih ditemukan masyarakat Samin. Keterangan tentang kehidupan masyarakat ini di masa setelah kemerdekaan dapat diketemukan dalam Dep. Penerangan, RI, "Provinsi Jawa Tengah", hlm. 480–481 dan Dep. Penerangan RI, "Propinsi Jawa Timur", hlm. 871–872

Pada umumnya mereka berpendapat bahwa orang-orang Samin itu bergerak dan menentang pemerintah karena tekanan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan politik kolonialnya, karena mayoritas orang Samin adalah petani dan pada umumnya petani itu miskin hidupnya.[38] Kemudian terbukti bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor penyebab bergolaknya petani di sekitar hutan jati di Blora itu. Ternyata tidak semua petani miskin bergabung dengan Gerakan Samin, dan penganjur gerakan ini umumnya adalah petani pemilik tanah yang berkecukupan. Namun, karena mereka merasa tidak berdaya menghadapi kekuasaan kolonial dan timbul kecemasan akan hilangnya kedudukan atau statusnya, di sini faktor sosial pun memegang peran.[39] Tambahan lagi karena para penganjurnya adalah para petani yang sedikit berada di atas garis kemiskinan, mereka itu sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya sebagai akibat masuknya penetrasi kebudayaan Barat.[40]

Tentang sifat gerakan ini pun terdapat bermacam-macam pendapat. Ada yang menggolongkannya ke dalam gerakan milenarian karena para pengikutnya tetap mengharapkan datangnya masa aman dan tenteram.[41] Namun, sukar digolongkan ke dalam gerakan mesianistis karena Samin sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Ratu Adil. Dia percaya kepada kehidupan di dunia sekarang ini yang sederhana, dan bukan kehidupan yang ideal di masa depan.[42] Memang para pengikutnya yang kemudian menganggap Samin sebagai Penyelamat yang akan datang di hari kemudian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada mulanya gerakan Samin ini tidaklah bersifat mesianistis dan tidak menjalankan tindakan yang agresif terhadap pemerintah. Namun, memasuki abad ke-20 tindakannya cenderung meningkat dan bersifat mesianistis. Para penganjurnya terutama didominasi oleh unsur-unsur pemilik tanah yang kemudian berhasil menarik banyak pengikut dari kalangan petani yang relatif lebih miskin sejalan dengan meluasnya penerapan sistem perpajakan. Untuk memahami tumbuh dan berkembangnya gerakan Samin ini, akan dibahas secara singkat di bawah ini.

---

[38] Harry J. Benda dan L. Castle, *op. cit.*, hlm. 219–220

[39] Victor T. King, *op. cit.*, hlm. 470

[40] Onghokham, "Peranan Rakyat dalam Politik", *Prisma*, 8, VII, 1979, hlm. 40–43

2. Gerakan di Jawa

Pada bulan Januari tahun 1903 Residen Rembang melaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa di daerah Blora Selatan dan wilayah yang berdekatan dengan Bojonegoro terdapat lebih dari 700 orang Samin. Mereka mendiami daerah yang luas, meliputi kira-kira 34 buah desa.[43] Empat tahun kemudian jumlah mereka diperkirakan sudah mencapai 3.000 orang. Laporan Residen Rembang ini pada mulanya kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Baru pada tahun 1905 pemerintah menaruh perhatian pada orang-orang Samin itu. Salah satu sebabnya ialah sikap orang-orang Samin itu mulai menarik diri dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Misalnya mereka menolak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan padinya kepada pemerintah untuk tidak mengambil kayu di hutan-hutan yang dikuasai oleh pemerintah. Sejak itu, pemerintah mulai mencurigai orang-orang Samin ini walaupun belum tampak adanya gerakan-gerakan yang membahayakan.

Orang Samin adalah mereka yang mengganggap dirinya sebagai penganut ajaran Surontiko, seorang petani yang berasal dari Randublatung, sebuah desa di Blora Selatan. Ia dapat digolongkan sebagai petani yang berkecukupan, dalam arti relatif, karena dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Ia memiliki sawah seluas 3 bau (kira-kira 2 ha), tanah ladang kira-kira ¾ ha, dan beberapa ekor sapi.[44] Pada tahun 1890 Samin mulai menarik pengikut, yaitu para petani di desanya dan desa-desa di sekitarnya. Namun, rupanya gerak-geriknya belum menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda. Baru kemudian, seperti tersebut di atas, ketika jumlah pengikutnya semakin bertambah dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan pemerintah, maka Pemerintah mulai menaruh perhatian. Ajarannya kemudian juga meluas ke daerah Rembang, Blora Utara, dan bahkan sampai ke daerah Rembang, Blora Utara, dan sampai ke Ngawi di dekat Madiun.[45] Dalam usaha menyebarkan ajarannya ini, Samin mendapat bantuan sepenuhnya dari para menantunya, yaitu Surohidin dan Karsiyah.

Kemudian pada tahun 1907 timbul desas-desus bahwa orang-orang Samin akan memberontak terhadap pemerintah dan Surontiko Samin

[41] A. Pieter E. Korver, *op. cit.*, hlm. 250–255

[42] H.J. Benda dan L. Castle, *op. cit.*, hlm. 212

[43] *Ibid.*, hlm. 211

[44] Emanuel Subangun, *op.cit.*, hlm. 26

[45] Peta dalam H.J. Benda dan L. Castle, *op. cit.*, hlm. 216–217

dengan 8 orang pengikutnya ditangkap. Sumber-sumber resmi menuduh bahwa Samin dan para pengikutnya merencanakan akan menjatuhkan pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan membentuk pemerintahan baru sesuai dengan pergantian zaman. Suatu kebetulan bahwa tahun baru Jawa, yang diawali oleh bulan *Suro* jatuh pada tanggal 14 Februari 1907 dan orang Jawa percaya bahwa biasanya pada pergantian tahun atau zaman terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, pemerintah Hindia Belanda segera bertindak untuk mencegah semakin meluasnya gerakan mesianistis ini.[46]

Namun kenyataannya kecemasan pemerintah Hindia Belanda itu kurang beralasan. Ketika Samin ditanya oleh pemeriksanya apakah ia akan menjadi raja atau ratu seperti yang dikatakan oleh para pengikutnya, maka Samin menjawab: "Tidak." Juga ketika pemeriksanya menanyakan: "Apakah Samin tahu tentang akan datangnya Ratu Adil atau Herucakra?" Samin juga menjawab bahwa ia tidak tahu. Walaupun demikian, rupanya pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengambil risiko dan pada tahun 1907 itu Samin beserta dengan 8 orang pengikutnya dibuang ke Padang dan meninggal di sana pada tahun 1914. Pemerintah berpendapat bahwa akan sangat berbahaya bila Samin dikembalikan ke desanya. Oleh sebab itu, walaupun bukti-bukti tidak cukup untuk menuduhnya merencanakan pemberontakan, pembuangan terus dijalankan.

Dengan kepergian Surantiko, gerakan Samin mengalami pukulan dan agak terlambat perkembangannya. Akan tetapi, terus hidup dan berkembang walaupun dengan lambat. Pada tahun 1908, seorang yang bernama Wongsoredjo menyebarkan ajaran Samin di Jiwan dekat Madiun. Ia mengakui telah mengajak pengikutnya untuk tidak membayar pajak dan melakukan kerja rodi (*corvees*) dan juga dikatakan lebih lanjut bahwa mereka akan kebal. Pemerintah segera menangkap dan membuang Wongsoredjo dengan dua orang pengikutnya. Karena pengikutnya sedikit, gerakannya tidak lama kemudian lenyap.

Memasuki dekade kedua abad ke-20-an, Gerakan Samin semakin meningkat. Sifatnya pun berubah. Tanda-tanda bahwa mereka akan bertindak dengan kekerasan mulai tampak. Di Grobogan, orang Samin pimpinan Surohidin dan Pak Engkrak tidak mau menaati peratuan-pemerintah. Pak Karsiyah, salah satu menantu Samin, mengajak rakyat

[46] Harry J. Benda menduga gambaran yang dikemukakan oleh laporan itu merupakan gambaran yang tercipta dalam angan-angan para pejabat Belanda yang diwarnai dan dipengaruhi laporan para mata-mata bahwa gerakan mesianistis akan meletus. Benda menyangsikan bahwa orang-orang Samin mempunyai gagasan semacam itu

Kajen di Pati untuk menentang pemerintah dan menamakan dirinya Pangeran Sendang. Di desa Larangan orang-orang Samin menolak membayar pajak, menyerang kepala desa dan menantang pasukan polisi yang datang untuk menangkap orang-orang itu. Beberapa orang luka-luka dan para penyerang ditangkap dan dipenjarakan di Pati. Dalam bentrokan yang terjadi ini tidak ada seorang pun yang tewas. Walaupun gerakan Samin pada waktu itu tidak banyak terdengar aktivitasnya, berdasarkan laporan J.E. Jasper, Asisten Residen Tuban pada tahun 1917, terbukti bahwa daerah permukiman orang Samin semakin meluas, walaupun tampak jumlah pengikutnya menurun jumlahnya.[47]

Orang Samin ini menyebut dirinya sebagai pengikut agama Adam atau Ilmu Nabi Adam (*Elmoe Nabi Adam*).[48] Mereka tidak percaya kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa karena seperti dikatakan oleh Surontiko Samin ketika ia diinterogasi, ia tidak dapat melihatnya. Ia menambahkan bahwa ia juga tidak percaya surga dan neraka. Orang Samin mempunyai kepercayaan "Tuhan budaya itu ada dalam diri sendiri" dan penyelamat dari siksaan adalah diri sendiri juga. Keyakinan semacam ini sebenarnya adalah sama dengan ajaran *kejawen* atau kebatinan Jawa di mana yang menjadi cita ideal dalam pandangan hidup para penganutnya adalah pertemuan atau persatuan antara hamba dan Tuhannya (*Jumbuhing kawula-gusti*).[49]

Sebetulnya agama Adam ini pada dasarnya mengandung aspek-aspek tani Jawa yaitu pemujaan kepada Dewi Kesuburan atau Dewi Ibu. Diyakini bahwa kesatuan antara bumi dan langit menghasilkan kehidupan di dunia ini. Demikian juga halnya kesatuan yang serasi antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan akan menghasilkan kedamaian dan kesuburan. Oleh karena itu, orang Samin menghargai perkawinan dan mengganggap dirinya suci, dan kaum perempuan dijunjung tinggi. Tambahan lagi sebagai petani, mereka sangat menghargai tanahnya dan petani mendapat penghormatan yang tinggi. Itulah sebabnya mereka itu rajin mengolah tanahnya sehingga sawah mereka merupakan yang terbaik dibandingkan dengan sawah petani-petani bukan Samin.[50]

---

[47] H.J. Benda dan L. Castle, *op. cit.*, hlm. 214

[48] *Ibid.*, hlm. 226

[49] Emanuel Subangun, *op. cit.*, hlm. 27; Victor T. King juga mengakui bahwa Gerakan Samin memang dekat dengan keyakinan kejawen. Akan tetapi, keyakinan ini lebih merupakan alat pendorong atau pendukung solidaritas dan kekeluargaan bagi orang Samin untuk menghadapi tekanan-tekanan pihak penguasa. Lihat Victor T. King, *op. cit.*, hlm. 473

[50] A. Pieter E. Korver, *op. cit.*, hlm. 250; Victor King, *op. cit*, hlm. 459 dan 470

Lebih lanjut ajaran Samin ini juga diartikan sebagai *sami-sami* (sama-sama) yang bersumber pada dasar persamaan manusia. Mereka menganggap semuanya sebagai saudara (*sadulur*) dan harus saling menolong. Mereka juga berpendapat bahwa bumi milik bersama dan untuk dimanfaatkan bersama-sama demi kesejahteraan semuanya. Ada satu ungkapan orang Samin yang mencerminkan semangat "sama rata sama rasa" ini yaitu: *lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe*. Yang artinya "tanah, air, hutan milik semua orang".[51]

Sifat lain dari ajaran orang Samin adalah ajaran tentang etika yang dilaksanakan secara ketat sekali. Mereka cenderung menganut sifat *puritan* di mana pengikutnya dilarang keras mencuri, berbohong, dan berzinah. Sebaliknya mereka dianjurkan bekerja dengan rajin, sabar, jujur, dan murah hati. Mereka pun hidup rukun dan damai. Aturan-aturan moral yang mendasari kehidupan orang Samin juga merupakan suatu mekanisme dalam membina solidaritas kelompok. Oleh sebab itulah orang Samin berhasil mempertahankan diri sekian lamanya dalam kehidupan masyarakat yang penuh perubahan. Mereka juga menganut paham persamaan derajat dan mencintai sesamanya.[52]

Masalah tentang mengapa Gerakan Samin muncul dan berkembang merupakan persoalan yang harus dibahas tersendiri. Hal ini erat hubungannya dengan politik kolonial yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda dan lingkungan hidup orang Samin. Di sini faktor ekonomi memegang peran yang sangat penting walaupun bukan satu-satunya faktor penentu. Banyak faktor-faktor lain yang memainkan perannya.

Bila dilihat secara sepintas, tampaklah orang Samin menentang pemerintah Hindia Belanda karena mereka tidak puas terhadap tekanan-tekanan ekonomi akibat dijalankannya kebijakan baru oleh Pemerintah,[53] yaitu apa yang dinamakan Politik Etika. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan baru untuk melaksanakan politik tersebut. Namun, ternyata sering terjadi bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk menaikkan kesejahteraan hidup rakyat berakibat sebaliknya; beban rakyat menjadi lebih besar. Misalnya, ketika diperkenalkan banteng dari Bengal dengan maksud untuk meningkatkan peternakan rakyat para petani harus membayar harga yang sering merupakan beban yang berat. Belum lagi tambahan yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaannya. Juga usaha pemerintah untuk menanggulangi

---

51 Onghokham, "Peranan Rakyat dalam Politik", *Prisma*, 8, VIII, 1979, hlm. 43

52 *Ibid.*

53 H.J. Benda dan L. Castle, *op. cit.*, hlm. 219–222

penyakit pes, telah menambah beban rakyat. Penduduk dipaksa untuk memperbaiki rumahnya dan sering memerlukan biaya besar. Walaupun mereka dapat mendapat kredit dari pemerintah, sering terjadi bahwa para peminjam tidak mampu mengangsur utangnya itu. Demikian juga dengan diperkenalkannya sekolah-sekolah di mana orang tua murid harus menyediakan uang untuk membayar uang sekolah dan keperluan lain-lainnya. Pemeliharaan sekolah-sekolah itu merupakan tanggung jawab dari penduduk setempat berupa pajak yang harus dibayarnya. Demikian juga dengan biaya pemeliharaan jalan, jembatan, dan lain-lainnya yang merupakan kepentingan umum. Beban-beban ini menambah berat kehidupan rakyat yang juga masih harus menanggung beban-beban seperti kerja bakti, jaga malam, dan sebagainya.

Masalah lain yang juga membebani rakyat berhubungan dengan peraturan kehutanan. Gerakan Samin berkembang di daerah hutan jati, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur kecuali di daerah Madiun, mereka itu berdiam di daerah persawahan. Pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda semakin meningkatkan pengusaha dan pengolahan hutan jati. Daerah demi daerah diteliti, ditentukan batas-batasnya dan dibuat petanya. Sejak tahun 1897 pengawasan, pengaturan, dan konversi hutan (*Hout vesterijen*) semakin diintensifkan.

Rakyat dilarang memasuki hutan-hutan itu tanpa izin, lebih-lebih untuk memungut hasilnya. Sejalan dengan itu, pengawasan pun ditingkatkan dan tugas polisi hutan diintensifkan. Dasar pemikiran pemerintah adalah bahwa penguasaan hutan jati yang dilakukan oleh negara itu wajar sebab hutan-hutan itu semula adalah milik kerajaan Mataram. Akan tetapi, ada suatu hal yang tidak disadari yaitu bahwa di bawah kekuasaan yang terdahulu prinsip pemilikan itu sifatnya hanya teoritis, sedang penguasa sekarang (pemerintah Hindia Belanda) benar-benar menguasainya dan mengeksploitasinya secara efektif karena hutan jati itu merupakan salah satu sumber keuangan negara.

Kebijakan-kebijakan baru pemerintah ini sudah tentu tidak kecil pengaruhnya terhadap kehidupan penduduk di sekitar hutan jati. Penduduk yang semula bebas memanfaatkan dan mengambil hasil dari hutan itu, seperti untuk pertanian, pengembangan ternak, mengambil kayu bakar, dan sebagainya, menjadi terhambat. Lebih-lebih bagi para petani yang umumnya buta huruf, sangat sukar untuk memahami peraturan-peraturan pemerintah yang baru itu. Mereka selama ini merasa bahwa hutan adalah milik penguasa, tetapi terbuka untuk semuanya. Sekarang ini sumber pencaharian mereka tertutup. Para petani *blandong* (hutan) mencoba mengadukan nasib mereka kepada bupati dan beberapa bupati

pun meneruskan keluhan rakyatnya kepada raja. Namun, hasilnya tidak ada karena para raja sendiri pada waktu itu hidupnya bergantung pada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, bukan hanya ruang gerak dan sumber nafkah petani yang dipersempit, tenaga mereka juga diperlukan oleh Belanda. Sebelum ada mesin, tenaga manusia merupakan satu-satunya sumber tenaga. Oleh karena itu, pengerahan tenaga dengan alasan kerja bakti, yang sebenarnya adalah kerja rodi, dan merupakan salah satu penarikan pajak, dijalankan dengan ketat oleh pemerintah. Akibatnya, timbul rasa ketidakpuasan dan keresahan.[54]

Keresahan petani ini tidak akan berbahaya bagi pemerintah bila tidak ada faktor lain yang memengaruhinya. Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa hanya mereka yang memiliki ¼ bau ke atas yang dikenakan pajak.[55] Dari sumber-sumber yang telah dikemukakan di atas ternyata penggerak gerakan Samin adalah para pemilik tanah dan golongan petani yang berkecukupan (*tyang cekap*). Merekalah yang pertama-tama terkena oleh peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan politik etika. Akibatnya, ada yang berpendapat bahwa faktor ekonomi yang mendorong meletusnya gerakan Samin harus ditempatkan dalam konteks struktur sosial masyarakat Jawa, khususnya soal diferensiasi status dalam kehidupan masyarakat.[56]

Dalam kehidupan masyarakat perdesaan di Jawa yang agraris, kepemilikan tanah mempunyai kaitan yang erat dengan status seseorang. Stratifikasi sosial di kalangan petani didasarkan pada kepemilikan tanah.[57] Mereka yang menguasai ini harus menanggung segala biaya atas tanahnya, seperti pajak dan kerja rodi. Pada umumnya para pemilik tanah mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan para penggarap atau buruh tani. Akibatnya, orang desa memberikan penilaian yang sama tinggi terhadap harga tanah sebagai sumber kehidupan dan terhadap nilai status yang terkandung di dalamnya. Sehubungan dengan ini, bagi orang Samin hal-hal seperti pemilikan tanah, keberhasilan dalam pengolahan tanah, dan status yang dipunyainya yang berhubungan dengan kedua hal tersebut, merupakan dasar yang penting bagi penentuan kedudukan seseorang. Beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda telah mengganggu prinsip-

---

[54] *Ibid.*, hlm. 223; Onghokham, *op. cit*, hlm. 40; Victor T. King, *op. cit.*, hlm. 462

[55] H.J. Benda dan L. Castle, *ibid.*, hlm. 220

[56] Victor I. King, *op. cit.*, hlm. 463

[57] Mengenai status dan kepemilikan tanah ini bukan hanya terjadi di perdesaan Jawa, tetapi merupakan gejala umum di Asia Tenggara. Lihat David Joel Steinberg (ed.), *In Search of Southeast Asia: A Modern History*, University Hawaii Press, 1987, Bab 1

prinsip yang dianggapnya penting itu. Misalnya, pada mulanya para pemilik tanah itu mempunyai peran yang cukup penting dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa yang kedudukannya semacam *primus interpares* dan biasanya salah seorang pemilik tanah perlu berunding dengan para pemilik tanah lainnya sebelum melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, dengan keluarnya peraturan pemerintah pada tahun 1906 yang antara lain menentukan bahwa kepala desa adalah pejabat birokrasi yang mempunyai kekuasaan mengambil keputusan, pemilik tanah yang tidak menjadi kepala desa merosot pengaruh dan statusnya. Dengan demikian, para pejabat pemerintah mempunyai status yang lebih tinggi daripada mereka yang bukan pejabat. Terjadilah apa yang disebut "perongrongan status" dari warga desa pemilik tanah dan persaingan antara mereka dengan para pejabat Pemerintah. Hal ini merupakan faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan Samin. Selain itu, tindakan mereka yang mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat perdesaan dapat dianggap sebagai usaha mengembalikan status dirinya dalam lingkungan hidup mereka sendiri.[58]

Selain faktor-faktor yang telah dikemukan di atas, perlu juga diteliti faktor-faktor lain yang tidak kurang pentingnya. Di sini perlu diperhatikan soal disintegrasi sosial yang terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh ekonomi modern ke perdesaan. Seperti telah dibahas di muka, rakyat Indonesia pada umumnya dan orang Jawa pada khususnya mempunyai cara-cara sendiri dalam menghadapi penetrasi budaya Barat. Karena pada abad ke-19 ini rakyat sebagian besar tinggal di perdesaan dan hidup dalam lingkungan agraris yang tradisional, hal-hal yang merupakan rongrongan ekonomi seperti peraturan tanah dan perpajakan merupakan masalah yang peka. Terutama hal ini cepat dirasakan oleh anggota masyarakat desa yang berada di atas garis kemiskinan. Inilah yang menyebabkan mengapa pada umumnya kaum petani menengah sering melawan dan bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang datang. Dalam hal orang Samin besar kemungkinannya bahwa mereka itu menentang penguasa karena berkeinginan bahwa mereka itu menentang penguasa karena berkeinginan agar dibiarkan sendiri. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan di desa dirasakan sebagai suatu tekanan dalam penghidupan.[59]

Aspek lain dari rongrongan ekonomis adalah terjadinya proses kemiskinan di kalangan petani menengah yang sedikit berada di atas garis kemiskinan. Peraturan-peraturan pemerintah terutama pajak sangat

---

58 Emmanuel Subangun, *op. cit.*, hlm. 27; Victor I. King, *op. cit.*, hlm. 466–470

59 Korver, *op. cit.*, hlm. 260–263

dirasakan sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan.[60] Selain itu, proses pemiskinan juga terjadi dengan apa yang disebut *pancasan* (pengaruh milik). Bila negara memerlukan tenaga kerja baru untuk menjalankan pembangunan dan lain-lainnya, atau bila perlu diadakan jabatan-jabatan baru, diperlukan tanah *sekep* yang baru untuk menggajinya. Biasanya tanah-tanah *sekep* itu diambil dari tanah *sekep* yang lama.[61]

Dalam hubungan ini sesungguhnya kemiskinan sebagian besar penduduk bukanlah sumber keresahan. Akan tetapi, perasaan tertekan karena harus tunduk pada ketidakadilan yang sukar ditanggulanginya. Para petani ini merasa menderita karena mereka merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengelak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah. Mereka juga menjadi putus asa karena tidak memperbaiki keadaan.[62] Oleh karena itu, sulit diterima bahwa penderitaan hidup rakyat desa karena tidak boleh memungut hasil hutan dan terkena beban pajak yang berat merupakan penyebab munculnya gerakan Samin. Itulah sebabnya banyak juga petani miskin yang tidak bergabung dengan gerakan Samin.

Ada satu aspek lain dari gerakan Samin yang cukup penting untuk dikemukakan. Sesungguhnya gerakan ini tidak homogen. Setelah Surontiko Samin dibuang, para pemimpin lainnya yang meneruskan ajarannya mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Hal demikian memang dapat dipahami karena tidak ada doktrin tertulis yang ditinggalkan oleh Samin. Misalnya, orang Samin di Grobogan ada yang masih menganut agama Islam dan tidak membangkang pada pemerintah. Kemudian kelompok yang berdiam di Wonokerto menolak melakukan kerja rodi, tetapi masih bersedia membayar pajak, sedang para pengikut Surohidin di Kemantren masih mau berhubungan dengan pemerintah walaupun menolak membayar pajak dan melakukan kerja rodi. Hanya Pak Engkrak yang dapat dianggap paling keras sikapnya, karena dia dan pengikutnya sama sekali menolak hubungan dengan pemerintah dan tidak mau menuruti kewajiban-kewajiban pemerintah.[63]

---

[60] Onghokham, " Peranan Rakyat dalam Politik", *op. cit.*, hlm. 42

[61] Onghokham, "Penelitian Sumber-Sumber Gerakan Mesianis", *ibid.*, hlm. 15–18

[62] Benda dan Castle, *op. cit.*, hlm. 219

[63] *Ibid.*, hlm. 215

D. Gerakan Sekte Keagamaan

1. Pendahuluan

Di luar arus perkembangan mesianisme yang berlangsung selama abad ke-19 dan ke-20, terdapat pula pertumbuhan sekte-sekte keagamaan yang baru, yang memuat berbagai tingkatan kepercayaan dan pandangan, baik dari tingkat kepercayaan Islam yang ortodoks maupun tingkat ide-ide yang mencerminkan sikap yang bertentangan dengan Islam. Dalam pertumbuhannya, gerakan milenaristis sangat menarik bagi golongan petani pada khususnya dan lapisan bawah pada umumnya. Dalam beberapa hal munculnya gerakan ini merupakan suatu jawaban terhadap situasi sosial yang diciptakan oleh dominasi kolonial. Pada umumnya, gerakan-gerakan sekte sering kali menunjukkan corak umum dari gerakan pemberontakan lainnya, dan sering pula memuat unsur-unsur protes rakyat terhadap tekanan dari golongan yang berkuasa seperti gerakan-gerakan kerusuhan lainnya di perdesaan.

Lahirnya gerakan milenaristis ataupun gerakan sekte menampilkan pemimpin-pemimpin karismatis, seperti yang diduduki oleh para guru, haji, atau kiai, dan memberikan tempat bagi rakyat untuk bersatu dalam ikatan keagamaan. Anggota-anggota gerakan sekte merasakan dirinya tenggelam dalam situasi masyarakat yang tampak tengah mengalami demoralisasi. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menarik diri dari lingkungan tersebut. Gerakan sekte memberikan jalan pelariannya, yaitu melalui ajaran mistisisme yang penuh kerahasiaan. Dengan kata lain, gerakan-gerakan itu menampilkan suatu sistem kepercayaan yang bulat lengkap dengan kepemimpinannya bagi mereka yang pegangan kehidupan tradisionalnya sedang guncang.

Bila dibandingkan, antara gerakan mesianisme dan gerakan sekte tampak persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain ialah kedua tipe gerakan tersebut didukung oleh masyarakat lapisan bawah, kepemimpinannya terdiri atas golongan elite agama yang tidak termasuk dalam lingkungan birokrasi pemerintahan kolonial, penolakan terhadap tata kemasyarakatan yang berlaku, dan memiliki ideologi milenaristis yang lebih diarahkan kepada persoalan kehidupan masa sekarang daripada kehidupan di akhirat.

Perkembangan arus sekte di Jawa hanya harus dipahami di dalam kerangka perubahan-perubahan sosial serta kekacauan dan demoralisasi, yang muncul sebagai akibat dari westernisasi yang mendalam. Untuk memahami hal tersebut, perlu diutarakan suatu definisi gerakan sekte. *Sekte*

merupakan ekspresi keagamaan dari perasaan ketidakmampuan suatu masyarakat dan perasan-perasaan untuk memberontak, hasil perjuangan kelas, organisasi dari kelas bawah, dan peralatan dari sifat agresif mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami bila milenarisme dan gerakan sekte terutama mendapat tempat di kalangan masyarakat yang tertindas karena dianggap memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam situasi yang serba buruk, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik, gerakan sekte ataupun milenarisme muncul dengan ajakan untuk mengadakan penertiban dan penataan kembali agama, serta memberikan kepercayaan-kepercayaan yang dibutuhkan dalam usaha memperoleh penyelamatan.

Gerakan sekte mengandung unsur pertentangan yang bersifat ganda. Di satu pihak sekte-sekte bertentangan dengan golongan elite birokratis. Sekte-sekte cenderung untuk menyaingi elite agama dan penguasa sehingga dengan demikian menarik pendukung-pendukung yang kebanyakan terdiri atas kalangan orang-orang yang tertekan oleh golongan yang berkuasa.

Ciri-ciri umum yang berhubungan dengan gerakan sekte dan mesianisme terdapat dalam masalah peran pemimpin dan ajaran-ajarannya. Dari uraian terdahulu mungkin dapat timbul dugaan bahwa pemimpin agama adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap lahirnya gerakan-gerakan sekte yang benih-benihnya telah ada di dalam susunan sosial masyarakat Jawa. Penyelidikan mengenai berbagai gerakan sekte menunjukkan memang ada pemimpin-pemimpin yang melahirkan gerakan yang terorganisasi sebagai jawaban kolektif dari rakyat. Namun, dalam sejarah gerakan mesianistis peran pemimpin agama sebagai penggerak pertama tidak terlalu jelas. Gerakan sekte membuat perbedaan penting, antara pemimpin yang karismatis, dan amanat dan tugas yang bersifat mesianistis. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin sekte tidak menerima perannya sebagai juru selamat, lagi pula mereka tidak menyatakan akan datangnya tokoh-tokoh suci.

Dengan demikian, jelaslah bahwa di dalam kenyataannya lahirnya suatu gerakan sekte, kepemimpinan dalam gerakan itu merupakan hal yang vital, selain situasi lingkungan juga amat penting. Selain itu, masalah sebab-sebab ekonomi dan sosial dalam gerakan-gerakan sekte merupakan suatu persoalan yang penting pula. Sudah barang tentu dalam membicarakan gerakan sekte faktor-faktor agama, peran pemimpin agama dan ideologinya tidak dapat dipandang rendah. Beberapa contoh mengenai gerakan mesianistis menunjukkan bahwa sulit untuk menentukan faktor-faktor ekonomi sebagai faktor penyebab utama bagi kelahiran gerakan secara khusus, sehingga penjelasan yang berhubungan dengan sebab-sebab ekonomi akan menjadi kabur dan tidak memuaskan. Demikian pula halnya

dengan gerakan sektarianisme. Yang perlu ditekankan dalam hal ini ialah bahwa iklim budaya memberikan tempat yang baik bagi kelahiran seorang pemimpin agama, yang kemudian mampu mewujudkan gerakan keagamaan.

Dari segi ideologinya dapat diketahui ada persamaan antara gerakan mesianistis dan gerakan sekte. Gerakan keagamaan pada umumnya dan gerakan sekte khususnya merupakan gerakan protes yang menempatkan dirinya sebagai lawan masyarakat. Sikap kebencian dan permusuhannya tidak hanya ditujukan kepada penguasa kolonial, tetapi juga terhadap golongan priyayi dan pemimpin-pemimpin agama yang resmi. Kedudukan sebagai penguasa itulah yang menimbulkan perlawanan dari anggota-anggota sekte. Mereka mengutuk pranata sosial yang dihasilkan sistem pemerintah kolonial. Sikap semacam itu dalam beberapa hal diajarkan secara khusus oleh pemimpin-pemimpin keagamaan. Gerakan pemurnian misalnya, merupakan salah satu jawaban terhadap situasi yang penuh pertentangan itu. Secara jelas dapat terlihat dari sikap anti-asingnya.

Seperti halnya gerakan-gerakan mesianistis, tujuan gerakan sekte adalah menjawab persoalan kebendaan yang dihadapi anggota-anggotanya. Apa yang mereka cari sebenarnya adalah suatu kehidupan duniawi yang penuh kebahagiaan dan ketenteraman. Hal ini dapat terwujud dalam suatu kerajaan yang diperintah secara adil, damai, dan penuh kebahagiaan, ataupun dalam bentuk suatu masyarakat agama yang murni, yaitu yang tidak dikotori oleh orang kafir dan bebas dari kekuasaan golongan yang telah lama berkuasa. Arahnya lebih ditujukan untuk mengadakan perubahan atau pergantian dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, ideologi gerakan sekte dekat dengan ideologi mesianisme, yaitu berorientasi kepada kehidupan dunia sekarang. Perasaan kebencian ataupun dendam terhadap kekuasaan dan agama bangsa asing, dalam gerakan sekte merupakan bagian penting. Dalam penyelidikan gerakan-gerakan sekte di Jawa terdapat petunjuk bahwa gerakan yang tidak dilembagakan cenderung mencari tujuan yang bersifat kebendaan dan keduniawian. Sebaliknya, gerakan yang terlembagakan cenderung mengarahkan pandangan kepada kehidupan di akhirat.

Pada umumnya di dalam gerakan keagamaan selama periode abad ke-19 dan ke-20 terdapat petunjuk adanya suatu variasi yang luas dalam bentuk dan arah pertentangan dengan pranata-pranata yang telah lama berlaku. Karena di antara kelompok-kelompok sekte yang timbul tenggelam selama periode tersebut, hanya beberapa contoh saja yang perlu dipilih untuk dikemukakan. Sumber-sumber mengenai masalah ini kebanyakan terpencar-pencar dan tidak lengkap. Oleh karena itu, di sini tidak akan

diadakan suatu penggolongan yang tajam. Terbatasnya nilai penyajian data-data tentang latar belakang gerakan-gerakan yang bermacam-macam itu di dalam catatan-catatan resmi menimbulkan kesulitan dalam mempelajari sektarianisme di dalam masyarakat kolonial di Jawa. Tidak sedikit sekte yang dapat tetap hidup karena dilakukan secara rahasia atau dengan diam-diam sehingga tidak mengherankan bahwa gerakan semacam itu tidak terdapat di dalam dokumen pemerintah. Selain itu, ada juga gerakan sekte yang tetap terbuka dan hidup terus karena oleh pihak pemerintah kolonial dianggap tidak berbahaya, atau sangat menekankan segi-segi ritual saja. Sudah barang tentu hal ini menyangkut masalah tarekat yang dipandang kurang memiliki semangat pemberontakan agama.[64] Dapat dikatakan bahwa bilamana gerakan itu ada di bawah pengaruh pemimpin yang revolusioner, gerakan itu akan menjadi berbahaya bagi pemerintah karena memiliki landasan penting untuk melakukan pemberontakan. Namun, selama gerakan itu bersikap tenang dan damai, dari pihak pemerintah kolonial tidak ada perhatian yang penuh, dan akibatnya sedikitlah keterangan mengenai gerakan itu yang masuk dalam catatan pemerintah kolonial.

Untuk memahami sekte-sekte di Jawa pentinglah kiranya diketahui perbedaan antara gerakan-gerakan pemurnian Islam di satu pihak, dan gerakan-gerakan Islam sinkretistis atau gerakan yang bertentangan dengan Islam di lain pihak.

Sebagai ungkapan protes, gerakan sekte tidak hanya menyalurkan perasaan kebencian atau dendam yang disebabkan oleh kebobrokan, tetapi juga sanggup memberikan jalan bagi anggota-anggotanya untuk memperoleh identitasnya di dalam suasana perubahan sosial dan demoralisasi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran identitas golongan secara kuat ditentukan oleh pengaruh sosial kultural yang ada di tiap-tiap sekte. Oposisi mereka dalam beberapa hal ditujukan kepada agama yang resmi. Unsur-unsur ideologi yang mendukung semangat revitalisme kebanyakan berasal dari anasir-anasir budaya Jawa pra-Islam, yang dalam kehidupannya terletak di luar tradisi besar Islam. Unsur-unsur ideologi inilah yang sering disebut sebagai *ideologi abangan*.

Perbedaan sikap moral antara satu sekte dengan sekte lain memperjelas adanya bermacam-macam sektarianisme. Di satu pihak terdapat satu sekte yang secara keras melancarkan propaganda menentang kekenduran dalam

---

[64] Lihat catatan Snouck Hurgronje pada tanggal 7 Juni 1889, dalam E. Gobee dan C. Adriaanse (ed.), *Ambtelijke adviezen van Snouck Hurgronje, 1889–1936*, 's-Gravenhage, 1957–1965, 1980–1986, dan 1986–1999

menjalankan kehidupan beragama dan sekaligus menganjurkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Di lain pihak terdapat golongan sekte yang tampak memberikan kebebasan dan kelonggaran untuk tidak melakukan dasar-dasar ajaran agama secara ketat. Sebenarnya kedua sikap moral dari kedua golongan sekte ini menunjukkan adanya semangat pemberontak keagamaan, untuk menentang masyarakat yang ada. Golongan sekte yang pertama mencerminkan sikap perlawanannya terhadap situasi yang dipandang korup atau bobrok sehingga menganjurkan semangat pemurnian Islam. Golongan yang kedua muncul sebagai lawan dari agama yang telah lama diterima dan dianut umum dalam masyarakat. Dalam beberapa hal kedua sikap moral itu hidup berdampingan.

Percampuran unsur-unsur Islam dan anasir-anasir pra-Islam Jawa yang banyak terdapat di lingkungan penduduk perdesaan merupakan gerakan sekte pula. Sementara anggota sekte ada yang sangat tebal kesadaran budaya tradisionalnya sehingga lebih memperkuat warisan budaya Jawa Kuno mereka daripada budaya Islam. Mungkin hal ini merupakan salah satu segi dari reaksi mereka terhadap Islam sebagai agama yang resmi. Latar belakang keagamaan pra-Islam Jawa, antara lain berisi unsur-unsur animisme, upacara-upacara magis dan kekerabatan, yang biasa disebut "agama Jawa" atau *abangan*. Biasanya golongan yang melakukan protes ini dalam beberapa hal bertentangan dengan Islam sebagai agama resmi dan cenderung kepada *abangan*.

Salah satu ciri lain gerakan sekte ialah adanya pengawasan yang ketat terhadap anggota-anggotanya. Sebagai contoh nyata dapat dilihat di dalam tarekat. Sebagai syarat mutlak setiap calon anggota yang hendak masuk ke dalam tarekat harus mengucapkan sumpah setia terlebih dahulu secara khidmat. Melalui sumpah tersebut, sekte dapat mengawasi ketaatan anggota-anggotanya secara ketat. Hal ini berbeda sekali dengan gerakan mesianistis yang hanya mengundang hak dari pihak pimpinan untuk mengeluarkan anggotanya bila melakukan pengkhianatan. Sekalipun dalam hubungan sosial terhadap anggotanya untuk berhubungan dengan orang-orang yang bukan anggota sekte dan orang-orang "luar" lainnya, dalam sekte ada pembatasan-pembatasan yang mengarah kepada pemisahan golongan tersebut sebagai kelompok tersendiri. Sikap-sikap negatif mereka terhadap masyarakat, seperti keinginan untuk menghancurkan pranata-pranata yang telah ada dan membangun lembaga sektenya, memperkuat rasa pemisahan diri sebagai kelompok tersendiri.

Sifat kerahasiaan yang menyelubungi kehidupan sekte bukan hanya sebagai alat mempertahankan tali perhubungan ke dalam sekte tersebut, tetapi juga sebagai alat perlindungan terhadap hubungannya dengan dunia luar yang dianggapnya sebagai dunia yang "jahat" dan "bobrok". Dengan demikian, terdapat suatu pola pemeliharaan suatu solidaritas di dalam sekte sekalipun berbeda dengan yang berlaku di dalam pergerakan modern seperti yang terdapat di dalam Sarekat Islam. Akan tetapi, usaha untuk merahasiakan diri itu sebenarnya timbul karena adanya kecurigaan dari pihak yang berkuasa terhadap gerakan-gerakan rahasia dan berbagai persekongkolan atau perkumpulan penjahat. Memang organisasi sekte secara rahasia itu dalam beberapa hal mirip dengan organisasi dari kelompok masyarakat penjahat yang hidupnya bergantung pada kegiatan yang melawan tata masyarakat. Kecenderungan untuk melarikan diri ke dalam sifat yang serbarahasia itu dengan sendirinya merupakan jenis protes sosial pula.

Berbeda dengan gerakan-gerakan sekte, tarekat kebanyakan tidak perlu mengadakan kegiatan di bawah tanah secara rahasia karena mereka umumnya diizinkan oleh pemerintah. Hal ini tidak berarti bahwa tarekat tidak mungkin menjurus menjadi suatu gerakan yang membahayakan pemerintah karena peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di daerah Banten Utara pada sekitar pertengahan tahun 1880-an telah menunjukkan bahwa tarekat Naksabandiyah–Kadariah menjadi suatu alat penting bagi perluasan gerakan yang dipimpin oleh guru-guru tarekat. Malahan dalam beberapa puluh tahun berikutnya ada petunjuk bahwa gerakan semacam tarekat yang terdapat di daerah itu secara aktif berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke kejahatan.

2. Gerakan di Jawa

Mengenai gerakan sekte yang sampai sekarang masih dapat dikenal, antara lain ialah sekte Budiah yang didirikan oleh Haji Mohammad Rifangi dari Kalisalak pada pertengahan abad ke-19. Sekte Budiah merupakan jenis pemurnian Islam yang menurut pendiriannya diadakan untuk melawan kebobrokan agama yang dirasakan telah merayap ke dalam masyarakat Islam di Jawa pada abad ke-19. Tujuannya adalah untuk mengadakan pembaruan Islam dengan cara kembali kepada ajaran yang murni. Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Haji Rifangi diterima secara luas oleh penduduk perdesaan di daerah keresidenan Pekalongan dan Kedu. Satu hal yang menarik ialah sekte Budiah sampai sekarang masih mempunyai pengikut-pengikut di daerah Pekalongan, padahal dalam sejarah gerakan agama

jarang suatu gerakan sekte dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya bila senantiasa dikejar oleh pemerintah kolonial (terutama sekali pada awal kehidupannya). Melalui catatan-catatan pemerintah dapat diketahui peristiwa-peristiwa penting yang ada di sekitar kehidupan pendiri sekte Budiah sampai ditangkap dan dibuangnya tokoh tersebut oleh pemerintah kolonial.

Menurut catatan-catatan itu Haji Mohammad Rifangi adalah seorang putra penghulu, yang dilahirkan di Kendal (Semarang) pada tahun 1786. Ia pernah tinggal di Mekah selama 8 tahun dan kemudian berdiam di tempat kelahirannya. Setelah istrinya meninggal, ia kawin lagi dengan seorang janda mantan demang Kalisalak. Dikatakan pula bahwa pejabat-pejabat agama setempat yang menuduhnya melakukan kesalahan sehingga ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah menjalankan hukumannya, ia pindah ke Kalisalak dan mendirikan sebuah sekolah yang memberikan pelajaran membaca Alquran bagi anak-anak dan orang dewasa. Dalam ajarannya ia menyerukan kembali kepada keaslian dan kemurnian Alquran. Akhirnya, kegiatannya dicurigai oleh pemerintah dan pejabat-pejabat agama setempat karena tujuan dan motif gerakannya makin menunjukkan perlawanannya terhadap pemerintah kafir dan juga terhadap agama Islam yang resmi. Pejabat-pejabat agama resmi marah karena dituduh menambah-nambah dan memalsukan agama Islam.

Untuk memahami apa sebenarnya yang diajarkan oleh Haji Rifangi, perlu dipelajari karya-karyanya, antara lain *Ilmu Hukum Islam*, *Asas-Asas Kepercayaan*, dan *Mistisisme*, yang semuanya ditulis dalam bahasa Jawa dan dalam bentuk puisi. Kumpulan karyanya itu disebut *Kitab Tardjumah* yang pada dasarnya berisi terjemahan ke dalam bahasa Jawa dari apa yang terdapat di dalam Kitab Suci yang berbahasa Arab. Nama-nama atau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Arab dipertahankannya, seperti nama-nama, *Husunukmatalib*, *Asnal-makasid*, *Jam'ul-masa'il*, dan *Abjanulhawad'ij*.[65] *Kitab Tardjunah* diajarkan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan agama, dan karena Haji Rifangi telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa, ruang lingkup penjelasannya sangat luas.

Dalam karya lain, *Nalam Wikayah*, Haji Rifangi membahas masalah mencari tingkat kesempurnaan jiwa yang tertinggi. Menurutnya, hal ini dapat diperoleh dengan jalan melaksanakan perintah Tuhan, bekerja sama dengan sesama muslimin dalam mengamalkan kewajiban agama. Tekanan utama kitab itu adalah mengajar masyarakat dan perseorangan. Selain itu,

---

[65] Catatan Snouck Hurgronje kepada Residen Kedu, tanggal 29 Desember 1900, dalam Gobee dan Adraanse (1965), hlm. 1936

ia juga menyatakan bahwa orang saleh, taat beribadah, adil, dan bijaksana adalah mereka yang akan memperoleh kemenangan tertinggi.

Menurut Haji Rifangi, kehidupan agama dari rakyat dan pemimpin-pemimpin telah menyimpang dari petunjuk-petunjuk Tuhan. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa penguasa negara, bupati-bupati, kepala-kepala distrik, dan kepala-kepala desa semuanya berdosa. Demikian pula penghulu bodoh dan tidak mau belajar karena lebih suka melanggar kebenaran daripada menjalankan hukum dan amalan agama sesuai dengan hukum-hukum Ilahi. Sebagian besar guru agama mengabaikan tugasnya mengajar murid-muridnya, dan takluk terhadap adat-adat kebiasaan orang-orang kafir. Mereka dicap sebagai orang kafir dan munafik karena menerima pengetahuan secara turun-temurun saja. Oleh sebab itu, menurut Rifangi, mereka harus disadarkan bahwa praktik agama yang mereka jalankan tidak sah dan tidak benar. Demikian pula perkawinan mereka juga tidak berdasarkan hukum sehingga anak yang mereka lahirkan tidak sah pula. Rifangi juga menentang adat kebiasaan yang banyak dilakukan orang, misalnya dalam pertunjukan wayang dan gamelan laki-laki dan perempuan duduk bersama, perempuan yang bepergian tanpa memakai kerudung kepala, dan sebagainya.

Mendekati para pemimpin agama seperti ini dianggap oleh Rifangi tidak benar. Para guru agama dan haji yang dianggapnya setia kepada raja kafir dikutuknya pula. Rakyat hanya dibenarkan untuk setia kepada khalifah Nabi, yaitu suatu jabatan yang patut dihormati, bukan setia kepada priyayi. Dalam menanggapi mundurnya kepercayaan dan masyarakat kaum muslimin ia berulang kali menunjuk pada banyaknya praktik-praktik agama yang dijalankan secara pura-pura. Bagian tertentu dari tulisannya penuh dengan cacian dan makian terhadap penyelewengan dan ketakhyulan yang meresap ke dalam Islam. Ia mengatakan bahwa mereka yang tunduk kepada raja kafir dalam perkara agama tidak lebih baik daripada anjing-anjing atau babi.[66]

Perlu ditambahkan bahwa dalam salah satu kitabnya, Haji Rifangi juga membahas masalah Perang Sabil secara luas. Namun, anehnya ia tidak memperinci perjuangan melawan pemerintah kafir.

Selain konsepsi perjuangan melawan kejahatan, dalam kitab *Nalam Wikayah*, Rifangi juga memasukkan kepercayaan tentang akan datangnya suatu milenium. Dikatakan bahwa bila mereka yang bodoh mau mengikuti

---

[66] Surat resmi Residen Pekalongan tanggal 31 Juli 1924 No. 504/Geh, dalam *Mailrapport* 14/25, *ARA*

bimbingan mereka yang memiliki kebijakan dan berpengetahuan, Jawa akan menjadi makmur dan tidak akan ada pencuri, perampok, dan pemberontak.

Apa yang tersebut di atas merupakan sikap khas cerminan ideologi dari sekte pemurnian. Kemudian bagaimanakah gerakan itu mengambil bentuk pada tingkat-tingkat pertumbuhannya dan bagaimana pula perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan sejarahnya?

Salah satu hal yang menarik ialah bahwa Ahmad Rifangi mulai mengadakan gerakan pemurniannya setelah kembali dari Mekah. Ia merasa muak terhadap kehidupan orang Islam di Jawa yang dipandangnya sudah banyak menyeleweng dan tidak murni lagi sebagai akibat adanya percampuran antara Islam dan budaya Jawa pra-Islam, serta akibat perluasan pengaruh Barat. Kalisalak sebagai salah satu desa yang menjadi pusat gerakannya merupakan tempat di mana dia mendirikan sekolah agama, dan mengajarkan ajarannya, yang kemudian dikenal sebagai *ngelmu Kalisalak*. Pengikut-pengikutnya terutama sekali berasal dari lingkungan rakyat biasa khususnya kaum petani. Meskipun jumlah penganut yang benar-benar terpercaya tidak begitu besar, lingkungan pengikut cukup luas, bahkan simpatisan-simpatisannya tersebar luas meliputi sejumlah keresidenan di Jawa Tengah. Pengikut-pengikutnya yang dikenal sebagai santri Budiah dapat dikatakan membentuk persekutuan-persekutuan hidup kecil di dalam lingkungan masyarakat Islam yang lebih besar; anggota-anggotanya membedakan dirinya secara tajam dari orang-orang Islam pada umumnya. Dalam menjalankan ibadah sembahyang sehari-hari dan menjalankan ibadah puasa, pengikut-pengikut Budiah sangat keras dan teliti. Mereka dilarang mengunjungi pertunjukan-pertunjukan yang menyenangkan, seperti wayang dan gamelan, sebagai pertanda kecermatan dan kecerdasan dalam menjalankan cara hidup mereka. Mereka dilarang bergaul dengan orang-orang yang bukan pengikut sektenya. Kaum perempuannya dilarang muncul di tempat-tempat umum kecuali dalam keadaan memaksa dan mereka diharuskan memakai kerudung. Tidak mengherankan bila timbul suatu sikap yang meremehkan orang-orang yang bukan anggota sektenya, dan sikap memisahkan diri dari masyarakat umumnya. Sikapnya yang mengutuk adat kebiasaan masyarakat yang berasal dari budaya Jawa non-Islam dan semangat keagamaannya untuk membebaskan Islam dari keburukan-keburukan masyarakat Jawa mengakibatkan timbulnya fanatisme atau sikap yang tidak kenal kompromi.

Sikap gerakan sekte yang menarik diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya merupakan jawaban terhadap situasi yang tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam situasi yang demikian, ketegangan antara sekte dan masyarakat tidak dapat dipecahkan. Namun, sekte Budiah tidak pernah

menimbulkan pemberontakan, yaitu bahwa dengan adanya sikap menarik diri. Hal ini memang dapat dipahami mengingat masalah yang penting dari gerakan ini adalah usaha memurnikan individu dan masyarakat. Berbeda dengan gerakan mesianistis, gerakan sekte ini tidak memperlihatkan adanya kehendak untuk mengarahkan ke suatu milenium.

Jika diperhatikan, jelaslah bahwa dalam beberapa hal, gerakan keagamaan yang menolak lingkungan sosial yang berbeda dengan golongan politik yang memiliki perasaan yang sama terhadap masyarakat sekitarnya. Keduanya memang merupakan suatu ancaman bagi pranata-pranata yang berlaku, dan mungkin juga keduanya dapat menimbulkan pemberontakan. Karena kedua gerakan itu tidak dapat dibedakan secara jelas, timbullah kecenderungan untuk memberi cap terhadap gerakan sekte sebagai suatu kegiatan yang bersifat politik.

Selama tahun 1850-an, yaitu sewaktu Ahmad Rifangi tengah mencanangkan semangat reformasinya, pejabat-pejabat pemerintah membiarkannya. Namun, karena timbul ide-ide anti-pemerintah, Residen Pekalongan dan Bupati Batang sering mengusulkan agar Rifangi ditangkap dan dibuang. Pejabat-pejabat agama setempat pun sangat marah kepadanya. Meskipun demikian, pemerintah pusat tidak bertindak karena tidak adanya bukti-bukti yang cukup.

Sesungguhnya pertentangan-pertentangan yang terjadi antara sekte dengan kaum muslimin pada umumnya bukan menyangkut masalah perbedaan dalam kepercayaan agama, melainkan hanya menyangkut perbedaan-perbedaan kecil yaitu masalah kebijakan. Pertentangan antara kaum revitalis dan kaum tradisionalis pernah terjadi secara dramatis, yaitu sewaktu diadakannya perdebatan terbuka antara Ahmad Rifangi dan Haji Penang, penghulu Batang. Menurut berita dari seorang mantan bupati, dalam perdebatan itu, Haji Rifangi mengalami kekalahan sehingga gambaran umum terhadap dirinya menurun. Perdebatan ini mencerminkan suatu konfrontasi langsung antara dua benteng pertahanan, yaitu Haji Penang yang mewakili para penghulu dan pejabat-pejabat agama yang resmi, dengan sokongan pemerintah dan Ahmad Rifangi.

Pada akhirnya Haji Rifangi ditahan pada tahun 1859 dan kemudian dibuang ke Ambon. Sudah barang tentu hal ini merupakan pukulan berat bagi gerakannya. Setelah Haji Rifangi dibuang, tidak ada ancaman pemberontakan lagi atau tidak ada agitasi untuk melawan pemerintah dan para pengikutnya bersifat kurang fanatik apabila dibanding dengan sikap mereka pada waktu gerakan itu mencapai puncaknya. Penguasa kolonial sendiri pada akhir abad ke-19 tampak sudah kehilangan perhatiannya terhadap sekte ini.

Berbeda dengan gerakan sekte Budiah yang merupakan contoh dari suatu gerakan pemurnian Islam, ada pula gerakan yang bersifat seni atau bertentangan dengan Islam. Sebagai wakil gerakan yang tersebut terakhir ini ialah gerakan Igama Jawa-Pasundan. Berlainan dengan gerakan Budiah, gerakan Igama Jawa-Pasundan bermaksud memperbaiki keaslian dari tradisi Jawa. Gerakan ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap Islam ortodoks dan dianggap sebagai kepercayaan yang diimpor dari luar. Sejumlah pengikut dari sekte ini terdapat di Cirebon dan Priangan. Menurut satu laporan, pada tahun 1925 terjadilah suatu perselisihan antara anggota-anggota gerakan ini dengan kaum muslimin di Kuningan dan Tasikmalaya. Tersiarlah desas-desus yang menyatakan bahwa sekte tersebut telah terlibat dalam suatu peristiwa pelemparan bom ke dalam rumah kediaman asisten residen dan Bupati Bandung.[67]

Gerakan Igama Jawa-Pasundan didirikan oleh Sadewa, atau lebih terkenal dengan nama Madrais. Ia menuntut supaya diakui sebagai putra Pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Menurut silsilahnya ia adalah keturunan generasi ke-5 dari Sultan Cirebon Chaerudin. Ketika kebangsawanannya diakui oleh istana Cirebon, ia mengambil nama ayahnya kembali, yaitu Pangeran Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Kebangsawanannya itu membantu membentuk gerakannya selain pikiran yang tajam dan kepandaiannya dalam meyakinkan orang lain.

Dalam menyebarkan agamanya, Madrais mempergunakan badan yang bertugas mempropagandakan gerakannya dan menarik pengikut di antaranya orang-orang pegunungan. Ajarannya bertujuan menghidupkan kembali unsur-unsur budaya Jawa dan Sunda dan banyak menekankan kewajiban-kewajiban terhadap tanah airnya. Banyak upacara magis dan animistis dari penduduk zaman kuno diperkenalkan kembali dalam upacara keagamaannya. Gerakan ini menganjurkan kepada pengikutnya agar meninggalkan upacara dan hukum Islam, bahkan menyatakan bahwa Islam adalah agama orang Arab dan bukan dimaksudkan untuk orang Jawa. Oleh karena itu, pengikutnya menganggap dirinya bukan sebagai orang Islam. Sekte ini melarang pengikut-pengikutnya untuk mempergunakan pejabat-pejabat agama dalam upacara-upacara perkawinan dan penguburan mayat. Akibat sikap yang demikian itu, gerakan ini harus berkonfrontasi dengan para kiai dan pejabat desa, terutama di daerah Islam yang kuat seperti di Tasikmalaya dan Padalarang.

---

[67] Surat resmi Sekretaris Jenderal, tanggal 21 Oktober 1925 No. 05/5/7, dalam *Mailrapaport* 1091X/25, *ARA*

Gerakan Igama Jawa-Pasundan tidak mendapat tekanan dari pihak pemerintah karena gerakan itu tidak mengancam ketertiban umum. Lebih-lebih dalam salah satu ajarannya yang menyebutkan kesetiaan kepada Seri Maha Baginda Putri Ratu Goevernement Belenda (*sic*). Selain itu, ajarannya menyebutkan bahwa orang harus percaya kepada Tuhan dan patuh kepada hukum negara. Dengan demikian, ajarannya dapat dikatakan sebagai ajaran masyarakat damai, yang akhirnya ditujukan kepada soal penyucian dan penyempurnaan individu, dengan jalan melalui pengendalian semua perasaan, keinginan, kemauan, dan pikiran. Dengan kata lain, gerakan ini lebih berhubungan dengan masalah keselamatan individu daripada masalah pemberontakan secara kolektif.

Pada masa yang lalu selalu ada kemungkinan bahwa rasa ketidak-puasan rakyat dapat disalurkan secara terbuka melalui jalan perlawanan, tetapi dapat pula muncul dalam bentuk yang lain seperti perbanditan, atau tindakan-tindakan kelompok yang mendekati kriminalitas. Hal ini banyak terjadi terutama setelah tata tertib umum di bawah pemerintah kolonial semakin lama semakin efektif sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk melancarkan perlawanan secara terbuka sebagai pernyataan protes sosial semakin terbatas. Dalam suasana yang demikian itulah orang dapat tergoda untuk melakukan protesnya dalam bentuk suatu perbuatan kejahatan. Hal ini memberi petunjuk bahwa dalam hal berbagai kondisi atau situasi apa pun selalu ada kilasan protes sosial yang muncul, baik dalam kelompok besar maupun secara individual, bahkan ada pula yang muncul dalam bentuk suatu aksi kejahatan. Sehubungan dengan uraian tentang gerakan sekte, dapat ditunjukkan tipe terakhir dari gerakan tersebut yang dalam kegiatannya mirip dengan tindakan-tindakan kriminal. Dalam usahanya untuk mempertahankan anggota-anggotanya untuk melancarkan perlawanannya terhadap tata masyarakat yang berlaku, aksi sekte yang terakhir ini menggunakan cara-cara tertentu, yaitu menakut-nakuti lawannya atau mengadakan pemerasan-pemerasan. Aksi itu dapat dikatakan berbentuk antara suatu sekte mistik dan suatu gerombolan penjahat. Kelompok aksi tersebut memiliki upacara-upacara sendiri, organisasi dan sumpah-sumpah rahasia sendiri, dan pergaulannya juga terbatas pada kalangan anggotanya sendiri. Berbeda dengan gerakan sekte mistik, aksi ini tidak mempunyai tujuan untuk menganjurkan kesucian bagi perseorangan, lagi pula tidak mempunyai tujuan sosial yang khas. Kegiatannya berkisar dari melakukan perang dengan semboyan 'perang sabil' sampai ke berbagai macam perbuatan kriminal, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

Salah satu gerakan itu dapat ditunjukkan oleh adanya gerakan sekte *Oah* (jagoan atau jawara) yang muncul di Sukabumi dan Cianjur. Dalam suatu laporan disebut bahwa pada tahun 1921, sekte *Oah* memiliki 1.000 orang anggota yang tersebar ke berbagai desa. Kegiatan sekte ini antara lain melakukan teror di daerah itu sementara tiap anggotanya terlibat dalam peristiwa pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Orang-orang yang ada di luar sekte itu selalu diancam dan ditakut-takuti, sedangkan orang yang kaya diperas. Mereka memaksa para pedagang di pasar untuk memberikan uang, dan apabila tidak diberi, pada malam harinya anggota sekte itu akan datang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Gerakan sekte ini, antara lain dipimpin oleh Fadil, Bapa Adna, Kosi, Arkam, Pak Tasik, dan Ibrahim. Dalam kegiatannya, mereka dibantu oleh *badal-badal*, dan dalam organisasinya juga memiliki cabang-cabang yang masing-masing dipimpin oleh seorang "pahlawan bacok" (seorang jago berkelahi) dan memiliki perlengkapan senjata sendiri. Sudah menjadi kebiasaan sekte *Oah* untuk menyebarkan desas-desus tentang akan dilancarkannya suatu perang sabil. Kegiatan mereka baru berkurang setelah pemerintah melakukan tindakan pembersihan dengan kekerasan. Dalam suatu aksi pembersihan, Kasim dengan 32 orang anggotanya berhasil ditangkap. Ternyata mereka memiliki senjata, dan di antaranya ada yang dituliskan huruf-huruf Arab yang menurut kepercayaanya berkekuatan magis.

3. Gerakan di Tanah Batak

Meninggalnya Si Singa Mangaraja XII bukanlah pertanda berakhirnya perlawanan orang-orang Batak terhadap kolonialisme Belanda. Ini terbukti dengan adanya gerakan yang dikenal dengan nama *Parsihudamdam*. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan tentang *Parsihudamdam*, dirasa perlu untuk menyinggung secara singkat sebuah gerakan lain yang bernama *Parmalim*, karena antara gerakan ini dengan *Parsihudamdam* ternyata mempunyai kaitan erat.

Parmalim tampaknya tetap berusaha untuk mempertahankan kepercayaan asli. Kepercayaan asli Batak disebut *Sipelebegu.* Kepercayaan didasarkan pada keyakinan adanya roh nenek moyang. Akan tetapi, "sekte" keagamaan ini juga terpengaruh oleh ajaran dari pelbagai agama lainnya, misalnya Kristen dan Islam. Di samping itu, juga ada pengaruh dari agama Hindu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Batak walaupun sering dikatakan terisolasi, ternyata mempunyai hubungan dengan dunia luar. Pengaruh agama Islam terlihat dengan adanya larangan memakan daging babi terhadap pengikut-pengikut Parmalim; juga terlihat pada adanya

kalimat: *Bissmillahi rokhmanir rakhim* yang tentu saja diucapkan dalam dialek Batak. Agama Kristen Katolik juga berpengaruh pada pengikut Parmalim, karena antara Mogliani dengan pendiri gerakan ini, Guru Somalaing, telah terjalin hubungan yang erat. Guru Somalaing telah menyebarkan ajaran-ajaran kepercayaannya itu sejak tahun 1890.[68]

Jadi, kelihatan bahwa gerakan Parmalim sudah mulai berkembang sejak Si Singa Mangaraja XII masih hidup. Jika kita melihat latar belakang kegiatan Guru Somalaing, tampak bahwa ia pernah mempunyai kedudukan penting dalam perang Si Singa Mangaraja, yaitu bahwa ia salah seorang propagandis dari Si Singa Mangaraja di dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Bahkan telah disebut-sebut sebagai salah seorang penasihat terdekat dari Si Singa Mangaraja. Dalam perang Si Singa Mangaraja itu, bahkan Si Singa Mangaraja telah berkali-kali melakukan serangan terhadap pasukan-pasukan Belanda misalnya dalam penyerbuan ke Balige.

Setelah Si Singa Mangaraja XII meninggal, timbul sebuah pergerakan yang disebut *Parsihudamdam*. Oleh sementara pihak, gerakan Parsihudamdam diduga merupakan "kelanjutan" dari gerakan Parmalim. Dugaan ini didasari adanya pelbagai persamaan ciri kedua gerakan ini, antara lain keduanya mengharapkan kedatangan Si Singa Mangaraja untuk mendirikan kembali kerajaan Batak yang akan menciptakan ketenteraman hidup bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk mengusir *si bontar mata*, yaitu orang Belanda atau Eropa. Upacara-upacara keagamaannya juga hampir sama, yaitu dengan cara *berpangir* dan minum air jeruk yang telah diperas (*unte pangir*), yang dilanjutkan dengan doa bersama-sama.[69] Peserta anggota Parsihudamdam dipimpin oleh seorang yang dianggap telah mendapat petunjuk dari orang suci dan *Debata Mulajadi na Bolon*. Dalam doa yang dilakukannya, tampak pengaruh dari agama Islam, yaitu diserukannya berkali-kali *Laillah Illah*, sambil menggoyang-goyangkan badan dan kepala ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Gerakan-gerakan ini dimaksudkan untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan dan meminta kekuatan daripada-Nya.[70] Dalam keadaan yang demikian para pengikut Parsihudamdam itu meneriakkan ucapan-ucapan yang tidak jelas artinya, yaitu *preberebere* berulang-ulang dan kemudian

---

[68] Porma Tiurma L. Tobing, "Gerakan Parsihudamdam di Tanah Batak" (Skripsi Sarjana Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, tidak diterbitkan)

[69] *Ibid.*

[70] *Ibid.*

dilanjutkan dengan seruan *damdam* secara cepat. Mungkin karena ucapan itu tidak jelas, juga jika dilihat dalam pengertian bahasa Batak.[71]

Timbulnya gerakan Parsihudamdam mempunyai berbagai kaitan dengan terjadinya pelbagai perubahan ketika itu, yang telah melahirkan guncangan dalam kehidupan masyarakat Batak yang tadinya terisolasi. Tata susunan masyarakat Batak, baik yang menyangkut ekonomi maupun politik, sosial, dan budaya mengalami perubahan-perubahan tertentu dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat Batak pada waktu itu. Meninggalnya Si Singa Mangaraja lebih meningkatkan suasana ketidakpastian karena tidak adanya seorang pemimpin yang dianggap mampu untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor-faktor ini semua akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan yang bermusuhan terhadap Belanda.

Sistem pajak yang merupakan beban berat rakyat, pemungutan pajak yang dilakukan secara sewenang-wenang, dan kerja rodi, juga merupakan beban yang sangat dirasakan memberatkan rakyat pada waktu itu. Penarikan pajak yang sewenang-wenang ketika itu tidak jarang menjadi berita di dalam pelbagai tulisan di surat kabar, misalnya penarikan pajak yang lebih besar dari ketentuan yang ada di dalam peraturan yang ada.[72] Pelaksanaan kerja rodi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penggantian uang untuk kerja rodi yang terlalu besar jumlahnya sehingga tidak terjangkau oleh yang bersangkutan.[73] Pekerjaan rodi ditanggapi sebagai suatu bentuk kerja paksa yang bertentangan dengan kebiasaan mereka selama ini. Sebenarnya bentuk kerja sama telah dikenal oleh masyarakat Batak, tetapi bentuk kerja itu disertai paksaan.

Yang sangat "meresahkan" pula adalah pelaksanaan pelbagai peraturan, misalnya peraturan kerja rodi, telah diadakan diskriminasi di antara anggota masyarakat. Ketika itu orang-orang Batak melihat bahwa orang-orang Belanda atau Eropa dan Cina ternyata tidak dikenakan wajib kerja rodi sebagaimana yang dikenakan pada diri mereka.

Guncangan terjadi pula sebagai akibat dimasukkannya sistem pemerintahan baru di daerah mereka, yaitu dengan menggantikan jabatan-jabatan lama dengan sistem penggajian. Sistem ini telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat Batak. Mereka meragukan yang telah digaji oleh pemerintah Belanda karena dengan sendirinya pejabat yang

---

[71] *Ibid.*

[72] *Oetoesan Hindia*, Soerabaja, 10 Januari 1917

[73] *Sinar Soematra*, Padang, 24 Mei 1917

digaji oleh pemerintah akan lebih setia kepada yang menggaji dan mengangkat mereka daripada rakyat yang dipimpinnya.[74]

Dalam keadaan yang demikian, pada tahun 1915, mulai terdengar adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Parsihudamdam. Di daerah Barus, Suga-suga diadakan pertemuan-pertemuan yang disertai dengan upacara-upacara keagamaan. Di dalam pertemuan-pertemuan itu, secara tegas dikeluarkan ucapan-ucapan yang menentang dan mengusir orang-orang kulit putih. Selain itu, ada juga suara-suara yang menolak membayar pajak dan menentang untuk melaksanakan kerja rodi. Akan tetapi, tindakan-tindakan ini segera diketahui oleh penguasa dan tentara dikerahkan untuk menghentikannya. Beberapa orang pemimpin berhasil ditangkap. Untuk beberapa saat gerakannya dengan mengadakan rapat-rapat pada malam hari. Mereka mencari pengikut dengan berpidato propaganda di kedai-kedai tuak pada hari *onan* (pekan).[75] Sambil minum-minum, kisah tentang Si Singa Mangaraja dibentangkan. Keperkasaan Si Singa Mangaraja menjadi salah satu pengikat yang sama dari kelompok-kelompok Parsihudamdam. Ia dikatakan tidak mati dan masih hidup dan pernah berjumpa dengan orang-orang tertentu. Dikatakan bahwa pada suatu ketika bahwa Si Singa Mangaraja akan kembali untuk mengusir kekuasaan orang-orang Belanda.

Dengan perantaraan Raja Balige, pihak Belanda mulai melancarkan gerakan penumpasannya. Para pemimpin Parsihudamdam yang terdapat di Sigaol, Uluan, dan Dairi ditangkap dengan alasan melanggar wilayah kekuasaan Raja Balige. Sekita 50 orang dapat ditangkap.[76]

Penumpasan itu menyebabkan gerakan Parsihudamdam terdiam beberapa saat. Walaupun demikian, Parsihudamdam tetap melakukan gerakan-gerakan secara diam-diam. Mereka berusaha memengaruhi rakyat agar tidak membayar pajak dan tidak ikut jalur keluarga dijadikannya jalan untuk menyebarkan cita-cita. Mereka mengajak anggota keluarga mereka menjadi anggota Parsihudamdam, dan keluarga yang baru masuk ini pun berusaha untuk mengajak keluarga yang lain.[77]

Gerakan diam-diam itu akhirnya berkembang menjadi gerakan terbuka, sebagaimana yang terjadi di Rure Parira, yaitu tempat yang terletak antara Sitinjak Rambe dan Pulo Gobang. Asisten Demang dari Sitinjak gagal menghentikan gerakan itu, bahkan ia sendiri hampir terbunuh. Akhirnya

---

74 *Benih Merdeka*, Medan, 2 Oktober 1918

75 Porma Tiurma L. Tobing, *op. cit.*, hlm. 59

76 *Ibid.*, hlm. 60

77 *Ibid.*, hlm. 60–61

Gezaghebber WS.C.M. Muller diperintahkan untuk mengakhiri gerakan-gerakan Parsihudamdam itu. Ketika Muller tiba di tempat orang-orang Parsihudamdam berkumpul dan menjalankan upacara keagamaannya, tampaklah olehnya sekumpulan orang-orang Parsihudamdam sedang menjalankan sembahyang keagamaan. Ia segera memerintahkan untuk menghentikan upacara keagamaan itu. Namun, perintahnya tidak dihiraukan oleh pengikut Parsihudamdam. Perintahnya kembali diulangi, tetapi juga tidak dihiraukan. Ia lalu mengeluarkan ancaman, tetapi ancamannya mengkibatkan kemarahan orang-orang Parsihudamdam. Mereka menangkap Muller, dan secara beramai-ramai, badannya ditusuk-tusuk dengan senjata tajam sampai mati. Melihat peristiwa itu, para pegawai Muller segera melarikan diri untuk kemudian meminta bantuan dari patroli polisi. Kapten A. Meijres yang berkedudukan di Sibolga segera berangkat ke tempat kejadian ini setelah menerima laporan tentang kejadian itu. Ia mengambil mayat Muller yang tertinggal di Rure Parira, tetapi ketika tiba di tempat itu, rumah tempat sembahyang orang Parsihudamdam itu telah kosong.

Terbunuhnya Muller mempertebal keyakinan orang-orang Parsihudamdam bahwa saat kemenangan mereka akan segera tiba. Karena dengan membunuh Muller, mereka yakin bahwa mereka pun akan dapat membunuh orang-orang Belanda lainnya. Karena ternyata tindakan-tindakan mereka telah mendapat berkat dari dewa-dewa penolong mereka.[78]

Keberanian para pengikut Parsihudamdam itu juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan di antara mereka, yang mengatakan bahwa: seorang Parsihudamdam tidak akan mati kecuali jika mereka berbuat dosa, tetapi kemudian mereka akan bangkit kembali. Karena keyakinan mereka itu, menurut mereka, untuk melawan Belanda tidak perlu menggunakan senjata tajam, cukup hanya dengan sebatang alang-alang yang digunakan sebagai pengganti pedang yang akan sanggup membunuh musuh yang berada sejauh 3 paal. Senjata mereka akan diperoleh dari Si Singa Mangaraja dan pelor senapan cukup dari pasir.[79] Keberanian anggota-anggota Parsihudamdam bersumber juga pada keyakinan mereka untuk mengusir bangsa Belanda dari wilayah Tanah Batak.

Untuk menjalankan maksudnya itu, anggota-anggota Parsihudamdam selalu memerlukan kekuatan. Upacara-upacara keagamaan selalu

---

[78] *Ibid.*, hlm. 64

[79] *Ibid.*, hlm. 62

berhubungan dengan usaha memperoleh kekuatan semacam itu. Tentang upacara ini dapat diketahui sebagai berikut.

> "Mereka mulai dengan meminum air jeruk yang telah diperas airnya, lalu mereka berpangir juga dengan air jeruk dan menghirup asap wangi dari kemenyan, sambil berdoa yang dipimpin oleh seorang yang menjadi gurunya (imam), menurut contoh dari agama Islam. Bunyi doa antara lain: "kami minta tolong pada-Mu Tuhan", kemudian diteruskan dengan menyebut bermacam-macam nama seperti Allah, Nabi Muhammad, Si Singa Mangaraja, Simarimbulu bosi nama seorang tokoh dalam dongeng Batak, seorang yang seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu dari besi. Kemudian doa diteruskan dengan kata-kata, "Dari kamulah datangnya semua berkat kekuatan untuk melawan Raja Stambul, kami minta pertolongan-Mu."[80]

Doa di atas diucapkan berkali-kali sampai tidak sadarkan diri, dan pada saat itu mereka memukul-mukul badannya dengan tidak merasakan sakit. Tiga hari lamanya mereka dalam keadaan demikian, dan setelah itu mereka merasa kebal dan bertambah keberanian karena yakin bahwa mereka telah menerima kekuatan dari Tuhan dan dari orang-orang sakti yang diseru namanya dalam upacara keagamaan yang telah mereka lakukan itu.

Dalam diri gerakan Parsihudamdam telah ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan kita cukup sulit untuk menentukan jenis gerakannya. Gerakan ini jelas merupakan suatu sekte keagamaan. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa gejala ini pun merupakan suatu gerakan yang menentang pemerasan karena adanya sistem pajak dan sistem rodi. Demikian pula tidak akan salah jika kita menyebutnya sebagai suatu gerakan mesianisme, karena gerakan ini mengharapkan datangnya seorang raja, yaitu Si Singa Mangaraja, untuk pada saatnya datang memimpin orang Batak untuk menciptakan suatu kehidupan damai berdasarkan sistem kehidupan yang pernah dialami oleh masyarakat-masyarakat yang lampau.

---

[80] *Ibid.*, hlm. 55–56

Daftar Pustaka

Buku-Buku dan Majalah

Abdulrazak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa, Makasar, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara*, 1964.

_____, "Sedjarah Kerajaan Tanete" di dalam Bingkisan Jajasan Kebudajaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Oktober 1967.

Aceh, *Verzameling van Bulletins* 13 April 1873–27 Februari 1880, Batavia, Landscrukkerij', 1880.

Aceh–*onlusten* in 1896, anonim, 1897

"Aceh", *Beknopte Encycloppaedie van Nederlandsch Oost Indie*, Leiden, E.J. Brill, 1921.

Adatrechtbundels, 17, "Celebes", 's-Gravenhage, Martines Nijhoff, 1917.

Ahmad, Zakaria, *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Chun 1520–1675*, Medan, Monara,1972.

Alexander, "Korte levensschets van de Arabier Habib Abdoer'r Rahman Alzahir", *IG*, 2, II, 1880.

Algemeen Overzigt van de Staatkundige Gesteldheid van Nederlandsch Indie over 1852, (Arsip di Schaarsbergen, Nederland).

"Alg, Verslag van den Chef van den staf der expeditie voor Bali van 1906", (anonim), *Militaire Tijdschrift*, 27, lb: ekstra.

Algemeen Verslag der Asistent Residentie Sintang 1856, Arsip Borneo West, Arsip Nasional Republik Indonesia.

Allen, G.C. dan A.G. Dornithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya*, London, George Allen dan Unwin, 1957.

Altona, T., "Over den oorsprong der Kalang", *TBG*, 62, 1923.

Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Bandjarmasin, Fadjar, 1953.

Anderson, John, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*, London, 1826.

Anon (Anderson, John), An Exposition of the Politicak and Commercial relations of the Government of Prince of Wales Island with the states on the East Coast of Sumatra from Diamond Point to Siak, Penang, 1824.

_____, *Acheeh and Ports on the North and East Coasts of Sumatra*, London, 1840.

_____, *Acheen and the Port on the North and East Coast of Sumatra, Kualalumpur*, Oxford University Press, 1971.

Anson, A.E.H., *About Others and myself*, London, 1920.

Archer, Raymond Leroy, "Muhammadan Mysticism in Sumatra", *IMORAS* 15, 11, 1937.

Arnold, Thomas. W., *The Preaching off Islam*, London, 1935.

Arsip Nasional RI, *Surat-surat Perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggris dan Hindia Belanda* 1635–1860, Djakarta, 1965.

_____, *Laporan Politik Tahun 1837*, Djakarta, Penerbitan sumber-sumber sedjarah Arsip Nasional RI, 1971.

_____, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839–1848*, Jakarta, Penerbitan sumber-sumber sejarah no. 5, 1973.

van der Kraan, A., *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment 1870–1940* Kuala Lumpur/Hong Kong: Heinemann Educational Books, Ltd, 1980.

"Babad I Gusti Ngurah Pandji Sakti ring Buleleng", dalam H.J. de Graaf, *TBG*, 1949.

"Babad Lombok" (dikutip pada karangan H.J. de Graaf dalam *Djawa*, 21, 1941.

"Babad Mangwi" (terdjemahan dalam bahasa Indonesia (bahasa Malaju), *MS*, 1465, KintyaLiefrinck-van der Tuuk.

Balbian Verster, J.F. *Een Amsterdammer als pionier op Bali* (*Overdruk IXe Jaarboek van de Vereeniging Amstlelodanum*).

"De Bandjermasinsche opstand in het jaar 1859–1909", (anonim) De Banier, 1909. Bannink, J.C.A., "De verovering en Pacificatie van Aceh, vergeleken met de Geschiedenis van Britsch–Birma", *IG*, 35, I, 1913.

Bastian, A, *Bali and Lombok, Die Balier, Lose Blatter aus indien*, 1897.

Bastin, John, *The native Policies of Sir Stamford Raffles ini Java and Sumatra*, Oxford, 957.

_____, *Essays on Indonesiaan and Malayan History*, Singapore, 1965.

Bastin, John and R. Roolvink (eds), *Malayan and Indonesiaan Studies, esseays presented o Sir Richard Winstedt on his eighty-fifth birthday*, Oxford, 1964.

Beamer, Charles R, "The Acehnese- Dutch war and its Effect on the Acehnese people: their land, customs and institution", *Conference on Modern Indonesian History*, University of Wisconsin, 1975.

Beck, W.J., "Sisinga Maharadja", *TBG*, 53, 1917.

Beckman, Dan, *A voyage to and from the island of Borneo, in the east Indies*, London, 1718.

Benda, Harry J. dan Lance Castles, "The Samin Movement", *BKI*, 125, 1969.

Berg, C.C., *Babad Bla-Batuh, de geschiedenis van een tak der familie Jelantik*, 1932. Kemudian diterjemahkan oleh I Gusti Bagus Sugriwa, *Babad-Blabatuh*, Denpasar, Pustaka Balimas, 1960.

van den Berg, L.W.C., *Le Hadhrcmaut et les colonies Arabes dans L 'archipel indien*, Batavia, 1886.

_____, "Het Mohammedaansche godsdienst-onderwijs op Java en Madoera, en de daarbij gebruikte Arabische boeken", *TBG*, 31, 1886.

_____, "De Mohammedaansche vorsten in Nederlansch-Indie", *BKI*, 53, 1901.

Bert Supit, "Penyebab Pecahnya Perang Tondano", Makalah Seminar Perang Tondano, Yayasan Kebudayaan Minahasa, Jakarta: November 1986.

_____, *Minahasa dari Amanat Watu Pinawetengan hingga Gelora Minawanua*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1986.

_____, *Sejarah Perang Tondano (Perang Minahasa di Tondano)*, Jakarta, Lembaga Penelitian Sejarah dan Masyarakat, 1991.

Besluit 27 Juni 1857 no. 3. Arsip Koleksi Algemeene Secretarie, *ANRI*.

Bloemen Waanders, P.L. van, "Aanteekeningen omtrent de zeden en gebruiken der Balinezen, inzonderheid die van Boeleleng", *TBG*, 8, 1859.

_____, "Bijdragen tot de kennis van het eiland Bali", TNI, 3, II, 1868.

_____, "Dagverhaal eener reis ovre Bali in Juni en Juli 1856", *TNI*, 3, I & II, 1870.

Blok, E., "Syair Perang Aceh, haar een to Singapoera (?) gelithographeerden Maleischen tekst, in het Hollandsch vertaald", *TBG*, 30, 1885.

Blok, T.T., *History of the People at the Netherlands*, diterjemahkan oleh O.A. Biertadt, 5, London, 1912.

Blom, Govert, *Lotgevallen op mijne reis naar Java, het verongelukken van het fregatschip Overrysel, nabij het eiland Baly, en terugreis naar Nederland, met het fregatschip Johanna Catharina*, 1841.

Blumberger, Petrus J.Th., "Saminisme", *Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*, III.

Bogaars, George, "The effect of the opening of the Suez Canal on the trade and development of Singapore", *JMBRAS*, 28, I, 1955.

Bondan, A.H.K, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Bandjarmasin, 1953.

Bonga. S/G.E.N.L. van Zuylen, *Aceh-Album*, 's-Gravenhage, Firma W.J. van Hoogstraten, 1889.

Bool, J.M., *De Chinese Immigratie naar Deli*, 1903.

Boon, M., LW. *van Landsberge, en de Practijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 Juni 1855*, Utrecht, 1943.

Bowles, Thomas Gibson, "The Ashantee war un*necessary and unjust", Fraer's Magazine*, January 1874.

Brau de St-Pol. Lias, *Chez Les Atches*, Paris, 1884.

Braddel, Thomas, *Statistics of the British Possessions in the Straits Settlements*, Penang, 1861.

Brandhof. J.L.W. van den, "Klewang-aanvallen op Atjeh's westkust in 1902", *IG*, 2, 1939.

Brandes, J.L.A., "Iets over een ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorspeilingen van Jayabaya", *TBG*, 32, 1889.

_____, "De koperen platen van Sembiran (Boeleleng, Bali), oorkonden in het Oud-Javaansch en het Oud-Balineesch. Met proeven van het schrift van de platen van Sembiran", *TBG*, 33, 1890.

———, "Register op de pt 1za omzetting van de Babad Tanah Djawi (uitgave van 1794)", *VBG*, 51, 1900.

———, Beschrijving der Jav, Balineesche en Sasahsche handshriften, uit de nalatenschap van Dr. K.N. van der Tuuk, 1901.

Bratakesawa (ed)., *Jangka Ranggawarsita*, Yogyakarta, 1959.

Brooshooft, P., *Geschidenis van den Aceh-Oorlog 1873–1886*, Utreeht, F.B. van Ditmar, 1886.

Brown, C.G. (editor dan penerjemah), "The Malay Annals", *IMBRAS*, II, III, 1952.

Bruijn, W.K.H. Feuilleteau de, "Aanteekeningen over de Malijers en Dayak van Hoeloe Soenei", *KT*, 1933.

Brumund, J.F.G., *Het Volksonderswijs onder de Javanen*, Batavia, 1857.

Buckley, C.B., *An Anecdotal History of old Times in Singapore*, Kualalumpur, 1965.

Bureau voor de Bestuurszaken der Butengewesten. Mededeling van het. Buitenbezittingen, 2, II, 1916.

Burger, D.H., *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia*, Terjemahan Prof. Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta, 1957.

–––––, *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia*, Terjemahan Prof. Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta, 1957.

———, *De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer*, Wageningen, 1939.

———, "Structuur-veranderingen in de Javaansche samenleving", *Indonesie*, Jilid II (1948–1949) dan Jilid III (1949–1950).

Burkill, I.H., *A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula*, 2 volumes, London, 1935.

Cabaton, A., *Java, Sumatra, and the other Islands of the Dutch East Indies*, Diterjemahkan oleh Bernard Miall, London, 1911.

Cable, Boyd, *A Hundred year History of the P & 0*, London, 1937.

Calenbrander, H.T., *Koloniale Geschiedenis Nederlands Indie Sids 1816*, III, 's-Gravenhage, 1926.

Cameron, John, *Our Tropical Possessions in Malayan India*, Kuala Lumpur, 1965.

Cepellen, T. van, "Notice Historique du Royaume de Banjermassin (Borneo)", *Moniteur des Indes Orientales*, The Hague, I, 1846–1847.

Carey, P.B.R., *Pangeran Diponegoro and the making of the Java War*, (disertasi yang belum terbit).

Castles, Lance, *The Political Life of a Sumatran Residency*, Disertasi Yale University, 1972.

Cense, A.A., *De Kroniek van Bandjarmasin* (Santpoort 1928), sebuah disertasi Leiden.

Cense, A.A., dan Uhlenbeck, E.M., *Critical Survey of Studies on Borneo*, Bibliographical Series 2, The Hague, I, 22, 1958.

Chabot, H. Th., *Verwantschap, Stand En Sexe In Zuid Celebes*, Groningen, Bij J.B. Wolters' Uitgever Maatschappij N.V., 1950.

Clercq, F.S.A de, "De Vroegste Geschiedenis van Bandjarmasin", *TBG*, 24, 1877.

Colenbrander, H.T., *Koloniale Geschidenis*, 3, The Hague, 1926.

Coolhaas. W.P.H., "De Nisero-Kwestie, Professor Harting en Gladstone", *Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap*, Utrecht, 1964.

Covarrubias, M., *Island of Bali*, 1956.

Cowan, H.K.J, "Bijdrage tot de Kennis der geschiedenis van het rijk Samoedra-Pase", *TBG*, 78, 1938.

Croo. M.H. Du, *Marechaussee in Aceh Herinneringen en Ervaringen van den eersten Luitenant en Kapitein van her korps Marechaussee van Aceh en onderhoorgheden H.J. Schmidt, van 1902 tot 1918*, Maastricht, 1943.

Cusinieer, Jeanne., "La Guerre des Padri (1803–1838–1845)", *Archives de Sociologie des Religious*, 4, 1959.

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia van passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India, 31 jilid, Batavia-Den Haag, 1888–1931.

Damste, H.T., "Atjehsche Oorlogspapieren", *IG*, 1912.

_____, (ed)., "Hikayat Prang Sabi", *BKI*, 84, 1928.

———, "Drie Aceh-Mannen: Snouck Hurgronje-van Heutsz-van Daalen", *KT*, 25–27, 1936–1938.

Danvers, F.C., "The English Connection with Sumatra", *Asiatic Quarterly review I*, 1886.

Danlae, H. Parkas, *Sedikit tentang Marga Batak*, Djakarta, Bagian Penerangan LEKRA.

Davis, Vohn, *The voyages and works of John Davis the navigator* (ed. A.H. Markham), London, Hakluyt Society, 1880.

van Delden, *De Particuliere Landerijen op Java*, Leiden, 1911.

"De Zaak van Poeloeng", Anonim, *IG*, 8, I, 1886.

Dietz, D., "Krijgsverrichtingen in Toba, (Juli–September 1883)", *IMT*, 1–2, 1885.

Dt.R. Dihulu, *Riwayat dan Perdjuangan Imam Bondjol Pahlawan Islam*, Medan, Pustaka Indonesia.

Dijk, P.A.L.E., "De dood van Si Singamangaradja", *IG*, 62, 1940.

Djawatan Penerangan Kalimantan Timur, *Memperingati Pahlawan Antasari*, 1961.

Dobbin, Christine, "Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)", *Indonesia*, 13, 1972.

Dooren, J.B.J. van, *Thomas Matulesia, her hoofd der opstandelingen op het bestuur der Molukken in 1817, 1857.*

Doup, A.,*Korp Marechaussee Aceh*, Medan, N.V. *Deli Courant*, 1930.

———, *Gedenkboek van het Korps Marechaussee 1890–1840*, Koetaradja.

Drewes, G.W.J., *Drie Javaansche Goeroe's. Hun Leven, Onderricht en Messias Prediking*, Leiden, 1925.

Eck, R. van, "Schetsen van het eiland Bali", *TNI*, I, 1880, II, 1878, I, 1879.

———, "Nog eens: Een en ander over Bali", *IG*, I, 1882.

Eddy Mambu. "Pantang Menyerah: Kisah Perlawanan Orang-orang Minahasa terhadap Kekuasaan Penjajah di Permulaan Abad ke-19", Jakarta: Makalah Seminar Perang Tondano, Yayasan Kebudayaan Minahasa, November 1986.

"Een Belangstellende – T. Panglima Tibang", *IMT*, 11, 1892.

"Eenige reisen in de binnenlanden van Borneo, door eenen Ambtenaar van het Gouvernement, in het jaar 1824" (anonim), *TNI*, 2, 1838.

Eerde, J.C. van, "Hindoe–Javaansche en Balische eeredienst", *BKI*, 65, 1911.

Eisenberger, J., Kroneo, Bandjarmasin, drukk. Liem Hwat Sing, 1936.

Encyclopedisch Bureau, "Sumatra's Oostkust", Weltevreden, 1919.

"De Expeditie naar Bali in 1868" (anonim), *Militair Tijdschrift*, 1873.

Encyclopedie van Nederlandsch Indie (ENI), 1919.

Faes, T., *Geschiedenis van her particuliere landbezit op West Java, Batavia*, 1893.

Fokkens, Jr. "Vrije Dessa's op Java en Madoera", *TBG*, 31, 1886.

_____, "De Priesterschool te Tegalsari", *TBG*, 24, 1877.

Forrest, Thomas, *A Voyage from Calcutta to the Mergut Archipelago*, Kuala Lumpur, 1967.

Foster, William (ed). *The Voyage of Thomas Best to the East Indies 1612–14*, London, Hakluyt Society, 1934.

Friedich, R.H. Th. (ed.), "Usana Bali", *TNI*, 3, 1847.

"Voorloopig Verslag van her eiland Bali," *VBGKW*, 22, 1849 dan 23, 1850.

Fromberg, P.H., *Verspreide Geschriften*, Leiden, 1925.

Furnivall, J.S., *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press, 1967.

Gabriel, C., "Kriegzug der Bondjol unter Aufuhrung des Tuanku Rau in die Batak lander", diterjemahkan oleh Kenan Hutagalung dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Jerman, *TBG*, 61, 1922.

Geertz, Clifford, *Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia*, University of California Press, 1963.

C-IBB, H.A.R. (ed), *Whither Islam, A Survey of modern movements in the mostem world*, London, 1932.

Gobee, E, "Dari hal Parsihaldamdam", *KT*, VIII?, 1919.

———, E dan C. Asriaanse (eds), *Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889–1936*, 3 jilid, 's-Gravenhage, 1957–1965.

"De Goeroe Ilmoe Samin", anonim *IG*, 1, 1915.

Gould, James W. "Sumatra–America's Pepperpot 1784–1873" *Essex institute, Historical collections 92*, 1956.

Gonggrijp, G, *Schets Ener Econamische C-eshiedenis van Indonesie*, Haarlem, 1957.

Goris, R, "Overzicht over de belangrijkste litteratuur betreffende de cultuur van Bali over het tijdvak 1920–1935", *Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck-van der Tuuk*, 5, 1937.

———, "Pura Besakih", Kull Tadja Bali, nomor Bali dari madjalah Indonesia, hlm. 43–52 (terdjemahan dari karangan: "De poera Besakih, Bali's rijkstempel", *Djawa*, 17), 1937.

———, "Dinasti Warmadewa dan Dharmawangsa di Pulau Bali", *Bahasa dan Budaya*, 5, 1956–1957.

de Graaf, H.J., "De opkomst van Raden Troenodjojo", *Djawa*, 30, 1940.

———, Gusti Pandji Sakti, vorst van Buleleng, *TBG*, 83, 1949.

Grevelink, Bisschop, 'Indische Handelsproducten' *IG*, 2, II, 1880.

Greve, H "Eenige opmerkingen betreffende de laatste expeditie naar Bali", *IMT*, 1870.

Groneman, *J., De Garebeg's te Ngayogyokarto*, Den Haag, 1895.

de Haas, *Eenige omerhingen over her werk*: De Bandjarkrijg, Leiden, 1866.

Hageman, J, *Geschiedenis van den oorlog op Java van 1825 tot 1830, Batavia*, 1856.

———, "Bijdrage tot Geschiedenis van Borneo", *TBG*, 6, 1857.

———, "Geschiedenis Aanteekeningen omtrent Zuidelijk Borneo", *TNI*, 1, 1861.

Halewijn, E.A., "Geographische en Ethnographische gegevens bereffende het rijk van deli", *TBG*, 23, 1876.

———, M., "Borneo, Eenige Reisen in de Binnenlanden van dit Eiland, door eenen Ambtenaar van het Gouvernement, in het jaar 1824", *TNI*, I, 1838.

Hall, D.G.E., *A History of south–east Asia*, London, 1960.

Hamer, C., "De Sair Madi Kentjana" (with list of *63 Sjairs and 51 hikayat circulating in Bandjar at that time*), *TBG*, 33, 1890.

Hamerster, M., *Bijdrage tot de kennis van de Afdeeling Asahan, Ooskust van Sumatra-Instituut*, Amsterdam, 1926.

Hamka, "Diponegoro pahlawan Islam", *Hikmah*, 1952.

Hanna, W.A., "The Magical-Mystical Syndrome in the Indonesian Mentality, bagian III: The Rise and Fall of Mbah Suro", *American Universities Field Staff Reports Service, Southeast Asia Series*, 15, 7, 1967.

Hardinge, Arthur, *The life of Henry Howard Molyneux Herbert Fourth Earl of Larnarvon*, 1831–1890, 3 jilid, London, 1925.

Hasjmy, A., *Hikayat Prang Sabi menjiwai Prang Aceh lawan Belanda*, Banda Aceh, Firma Pustaka Farabx, 1971.

———, *Iskandar Muda Menkuta Alam*, Jakarta, Bintang, 1975.

Hay, John Dalrymple, *Ashanti and the Gold Coast*, London, 1874.

Hazil, *Teuku Umar dan Tjut Nya 'Din sepasang Pahlawan Perang Aceh*, Amsterdam, 1952.

Heijboer, Pierre, *Klewangs, Klamboes, Klapperbomen*, Uniboek, Bussum, 1977.

Helbig, K., "Der Singa Mangaradja and die sekte der Parmalim bei den Batak", *ZE*, 67, 1935.

Helius Sjamsudin, *Antasari*, Jakarta, Balai Pustaka, 1970.

Hendriks, A., "lets over de Wapenfabricatie op Borneo", *VBG*, 18, 1842.

Henny, C., "Stille Kracht", *IG*, 2, 1921.

Hervey, D.F.A., 'Achin Piracy' (ed. S.G.H. Leyh), *JMBRAS*, 5, II, 1927.

Heutz, J.B. Van, *De Onderwerping van Aceh*, 'S-gravenhage, De Gebroeders van cleef, 1893.

Hijmans van Anrooij, H.A., "Nota omtrent het rijk van siak", *TBG*, 30, 1885.

Hoesein Djajadiningrat, "Critische overzicht van de in de Maleische werken overvatte wens over de geschiede nis van het Soeltanaat van Atjeh", *BKI*, 65, 1911.

———, *Herinneringen van Pangeran Achmad Djajadiningrat*, Amsterdam dan Batavia, 1936.

Hovell, W.R. van, *Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847*, 1854.

Hoeven, A. Pruys van Der, *Een Woord over Sumatra*, Rotterdam, 1854.

———, *Mijne Ervaring van Aceh*, the Hague, 1886.

Haezoo, W., "Het Javaansch geschrift Achiring Djaman", *MNZG*, 27, 1883.

Hohendorff, John. Andr. Baron van, *Radicale berschrijving van Bandjarmassingh, zoo door den Heer Raad-Extraordinair is bijeengebragt, en overgegefen in Rade van Indien op den 9e Juny 1757*, 's-Gravenhage, 1862.

Hollander, J.J. de, *Handleiding bij de beoefening der Javaansche Taalen Letterkunde, Breda*, 1848.

———, *Handleiding bij de beoefening der Land en Volkenkunde*, I dan II, Breda, 1898.

Hoos, A.A., "Bali en Lombok", *Verslagen Alg. Vergadering Ind. Genootschap*, 1894.

Hooyer, G.B., "De Oorlog op)p Sumatra's Weskust", *De Krijggeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894*, Den Haag, De Gebr. van Cleef, 1895, Jilid I.

———, *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894*, 3 jilid, Batavia, 1896.

Hotz, G.D.E.J., *Beknopt Geschiedkundig Overzicht van den Atjeh-Oorlog*, Breda, 1924.

Hudson, Alfred B., "The Pladju Amat Ma'Anjan Dajak in Historical Perspective", *Indonesia*, No. 4, Modern Indonesia Project, Cornell University, 1967.

———, *The Barito Isolects of Borneo, a Classification Based on Comparative Recostruction and Lexicostatistics*, New York, I, 22, 1967.

Hulstijn, P. van, *Van Heutz en de Buitengewesten*, 's-Gravenhage, 1926.

Hyde, Francis E, *Blue Funnel: A History of Alfred Holt & Co. of liverpool from 1865 to 1914*, Liverpool, 1957.

Ibrahim, Alfian T., *Emas, kafir, dan maut, catatan singkat mengenai pengalaman dua orang Perancis di Aceh pada akhir abad ke XIX*, Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1976.

———, "Sejarah singkat Perang di Aceh", A. Sartono Kartodirdjo (ed.) *Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973.

______, *Mengenal Masyarakat Aceh yang Sedang Membangun*, (sebuah catatan) Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1976.

Ida Bagus Rama, *Perubahan Sosial di Lombok 1894–1942*, Yogyakarta, Tesis S2 Program Studi Sejarah Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1989

Idema, H.A., "De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817", *BKI*, 79, 1923.

I Gde Parimartha, "Perang Praya: Faktor Pendorong dan Campur Tangan Kolonial Belanda di Lombok (1891–1894)", Djambatan, 8, no. 3, 1990.

I Gde Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815–1915*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2002.

Iskandar, T. *Nuru d-din ar-Raniri Buczanu* Malaysia, Kualalumpur, 1966.

Jakub, Ismail, *Tengku Tjhik di Tiro Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1960.

I Wayan Tagel Eddy, "Bara Lombok di Seberang Bali: Sebuah Studi tentang Pemberontakan Praya 1891–1894", Yogyakarta: Tesis Magister S2 Program Studi Sejarah Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1992.

Jaarlijksch politiek verslag over de eilanden Balie en Lombok (tidak lengkap).

Jacobi, E.H., "Javaansche Titels", TNI, 4, 1846.

———, *Agrarian Unrest in Southeast Asia*, New York, 1949.

Jacobs, J., *Eenigen tijd onder de Baliers*, Batavia, 1883.

Jacub, Ismail, *Teungku Tjhik Di tiro* (*Muhammad Saman*): *Pahlawan besar dalam Perang Aceh* (*1881–1891*), Jakarta, Penerbit Bulan-Bintang, 1960.

James, K.A., "De geboorte van Si Singa Mangaradja", *TBG*, 65, 1902.

Jasper, J.E., *Verslag betreffende het Onderzoek inzake de Saminbeweging*, Batavia, Gouvernement Press, 1917.

J.J., "Twee brieven van Dipa Negara", *BKI*, 25, 1877.

Joekes, A.M., De Wet van Sultan Adam van Bandjarmasin van 1835, *IG*, 2, III, 1881.

Jonge, J.K.J. de, De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, 5 Den Haag, 1870.

Joustra, M., "De Singa-mangaradja-figuur", *GKITLV*, 1926.

J.U Lontaan, J.U., *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, 1975.

Kahin, G. Mc.T., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York, 1952.

Kat Angelino. A.D.A.D.E, *Colonial Policy* (diterjemahkan oleh G.J. Renier), 2 jilid, the Hague, 1931.

Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia*, *Propinsi Kalimantan*, 7.

Kementerian Penerangan RI, *Pahlawan Diponegoro*, Djakarta, 1955.

Kemp, P.H. van der, "Brieven van den G . G van der Cappellen over Dipanegara's opstand", *BKI*, 1896.

———, "Dipanegara, een geschiedkundig Hamlet type", *BKI* 46, 1896.

———, "Het verblijf van Commissaris Van den Broek op Bali van 18 December 1817 tot 24 Juni 1818", *BKI*, 50, 1899.

———, "Raffles Ache–overeenkomst van 1819" *BKI*, 51, 1900.

———, "De geschiedenis van het londonsche tractaat van 17 Maret 1824", *BKI*, 56, 1904.

———, "Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817", *BKI*, 66, 1912.

———, "Nadere Mededelingen over den Opstand van Saparoea 1817" *BKI*, 69, 1913.

———, *Nederlandsch-Indisch Bestuur in het midden van 1817*, 1915.

———, *Java's Landelijk Stelsel*. 's-Gravenhage, 1916.

———, "Over der opstand in de Molukken in 1817–1818 M", *BKI*, 74, 1918.

Kempees, J.c.J., *De tocht van den Overste van Daalen door de Gayo, Alas-en Bataklanden* (8 Februari–23 Juli 1904), Amsterdam, J.C. Dalmeijer.

Kennedy, J., *A History of Malaya*, London, 1962.

Kennedy Raymond, *Bibliography of Indonesian peoples and cultures Revised Edition*, New Haven, 1955.

Kern, W., *Commentaar op de Salasilah van Koetai*, The Hague, 1956.

Kesteren, C.E. van, "De nisero-quaestie en de Gouverneur-Generaal louaon", *IG*, 6, II, 1884.

Kielstra, E.B. "Bijdragen tot de Geschiedenis van Borneo's Westerafdeeling", *De Indische Gids*, 12, I, 1890.

Kidung Pamaneangah (C.C. Berg, *Kidung Pamancangah, de geschiedenis van het rijk Gelgel, critisch uitgeven, $% + % (Javaansch-Balische historische geschriften*, I); Gora-Sirikan *Kidung Pamancangah*, Denpasar, Pustaka Balimas, 1957.

Kielstra, E.B., *Beschrijving van den Aceh-Oorlog*, Jilid I, 's-Gravenhage, De Gebroeder van Cleef, 1883.

———, "De Toestand van het Indische leger", *De Gids*, 48, II, 1884.

———, *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog*, 3 Jilid, 's-Gravenhage, De Gebroeder van Cleef, 1885.

———, "Sumatra's Weskust van 1819–1825", *BKI*, 36, 1887.

———, De Atjeh Oorlog: *Kort Overzicht van Oorsprong Verloop en Gevolg*, 's-Gravenhage, Loman & Funke, 1896.

Kruisheer, A, *Aceh 1896*, 2 jilid, Weltevreden, 1913.

Kumar, Aun, "Dipanegara (1787–1855)", *Indonesia*, 14, 1972.

Lancaster, James, *The voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies 1591–1603*, (ed. William Foster) London, Hakluyt society 1944.

Langen, K.F.H. van, De "Nisero Kwestie", *IG*, 6, II, 1884.

———, "De inrichting van het Acehsche Staatsbestuur onder het sultanaat", *BKI*, 34, II, 1888.

Langhout, Joh., *Vijttig jaren Economische staatkunde in Aceh*, Den Haag, N.U. Boekhandel v/h W.P. van Stockum & zoon, 1923.

———, *The Economic conguest of Acheen by the Dutch, The Hague*, 1924.

Lamster, J.C., J.B. *van Heutsz als Gouverneur-Generaal 1904–1909*, Amsterdam, 1946.

Lasker, Bruno, *Human Bondage in Southeast Asia*, Chapel Hill, 1950.

Lauts, *Het eiland Bali en de Balineezen*. Amsterdam, 1848.

Lekkerker, C., *Land en yolk van Sumatra*, Leiden, 1916.

———, *Bali en Lombok, Overzicht der litteratuur omtrent deze eilanden tot einde 1919*, 1920.

Lennon, W. Caulfield, "Journal of an expeditin to the Molucca Islands under the Command of Admiral Rainier", *BKI*, 60, 1908.

Levy, V., "Le peuple Balinais", *Bull. Soc. Beige de Geogr*, 29, 1895.

Leupe, P.A., *Stukken betrekkelijk Borneo* (dari tahun 1635–1636–1855).

———, *Beschrijving van eenen togt naar de bovenlanden van Banjermassing enz.*, Utrecht, 1864.

Leur, J.C. van, *Indonesian trade and Society*, diterjemahkan oleh J.S. Holmes dan R. van Marie, Bandung, 1955.

Liefrinch, F.A., "De Residentie Bali en Lombok na het jaar 1894", Voordracht Ind. Gen., 9902.

———, *De landsverordeningen der Balische vorsten van Lombok,* 2 jilid, 1915.

———, *Landverordeningen van Inlandsche vorsten op Bali*, 1917.

———, *Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten*, 1918.

———, *Bali en Lombok Geschriften*, 1927.

Lindsay, W.S., *History of Merchant shipping and Ancient Commerce*, IV, London, 1876.

Lintgensz, Aernoudt, "Verhael van't gheene mij op't Eylandt van Baelle wedervaeren is", *BKI*, 5.

Loeb, Edwin M., *Sumatra-its History and People*, Vienna, 1935.

Luke, Harry, *The old Turkey and the new*, London, 1955.

Lovat, Alice, *The life of Sir Frederick Weld*, London, 1914.

Lumbantobing, Adniel, *Sedjarah Si Singamangaradja*, 1959.

Mackenzie, Compton, *Realms of silver, one hundred years of banking in the East*, London, 1954.

Madjolelo, Dawis Datuk & Ahmad Marzuki, *Tuanku Imam Bondjol*, Djakarta, Jambatan, 1951.

Mallinegrodt, J., "Een en Ander over Gebruiken aan het Kota Waringinsche Hof", *KT*, 1925.

van der Maaten, K., *Snuck Hurgronje en de Atjeh Oorlog*, 2 jilid, Leiden, 1948.

Maassen, C.C.J., dan A.P.G. Hens, *Agrarische Regelingen voor het gouvernementsgebeid van Java en Madoera*, 2 jilid, Batavia, 1934.

Mansveldt, W.M.F., *Geschiedenis van de Nederlandsche Handels-Maatschappij*, 2 jilid, Haarlem, 1924.

Mattulada, "*Latoa satu lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (A Descriptive Analysis of the Political Antropology of the Businese)*", Disertasi untuk Gelar Doktor Dalam Ilmu Antropologi, Jakarta, 1975.

Marks, H.J., The first contest for Singapore 1819–1824, *VKI*, 27, 1959.

Marrison, G.E., "The coming of Islam to the East Indies," *JMBRAS*, 24, I, 1951.

Marsdem, William, *History of Sumatra*, Kuala Lumpur, 1966.

Maurenbrecher, R., "Tjakraadiningrat Vorstenhuis van Madoera", *TBB*, 2, 1889.

McIntyre, W.D., "Disraeli's Election Blunder" dalam *Renaissance and Modern Studies* 5 (1961), PP, 70–105.

"Mededeelingen Betreffende Atjehsche onderhorigheden", *BKI*, 67, 1913.

Mees, C.R., *De Kroniek van Koetai, tekstuitgave met Toelichting, Zanpoort*, 1935.

Meijner, H.G.J.L., *Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van het Bandjarmasinsche Rijk 1863–1866*, Leiden, I.J. Brill, 1866.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., *Asian trade and European influence in the Indonesian Archipelago Betsween 1500 and About 1630*, The Hague, 1962.

Meinsma, J.J. (ed.), *Babad Tanah Djawi: Javaansche geshidenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaarteling*, 2, Den Haag, 1899–1903.

Meyer, D.H., "Over het bendewezen op Java", *Indonesia*, III, 1949–1950.

Meyer, J.J., "Bijdragen tot de Kennis der Geschiedenis van het Voormalig Bandjermasinsche Rijk, thans Residentie Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo", *IG*, 1, 1889.

———, "Veertig jaren to Bandjarmasin; Iets over Panembahan Muda, Sultan Kuning, Gusti Kasan, figuren uit de Bandjarmasinsche Opstand", *IG*, I, 1899.

Middel, R. Brons, *Hikayat Pangeran Diponegoro dan perang Djawa 1825–1830*, 1895.

Milburn, William, *Oriental Commerce*, 2 jilid, London, 1813.

Moreau, Henri, *Le Port de Sabang*, Paris, Librarie Maritime Internationale, 1926.

Moh. Said, *Tokoh Sisingamangaradja XII*, Medan, 1961.

———, *Aceh sepanjang Abad*, Medan, Penerbit Pengarang sendiri, 1961.

Muh. Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat* (*1803–1838*), Djakarta, P.N. Balai Pustaka, 1964.

Mulder, Niels, "Saminism and Buddhism: a note on a field visit to a Samin community", *Asia Quarterly*, 1974.

Mundisuro, S. *Protelan ringkasanipun Suraos Serat babad perang Diponegoro*, Djakarta, Lembaga Kebudayaan Indonesia, *MS*, 1958.

Myint, Hla, *The Economics of The Developing Countries*, New York.

Naarding, J.W., *Het conflict Snouck Hurgroje van Heutsz-van Daalen*, Utrecht, 1938.

Nanulaitta, I.O., *Kapitan Paltimura*, Jakarta, Departemen P dan K, 1979.

Napitupulu, O.L., *Perang Batak, Perang Sisingamangaradja*, Djakarta, Jajasan Pahlawan Nasional Sisingamangaradja, 1971.

Naskah Sintang, A II., Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Naskah Sintang, CS 84-2/37, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta

Netser, E., "Togtjes in het gebiet riouwen onderhoorigheden het landschap Deli", *TBG*, 14, 1864.

———, "De Nederlanders in Johor en -Siak, 1602 tot 1865", T.J., *Political and statistical accorent of the British settlements in the straits of Malacca*, 2 jilid, London, 1839.

Neytzel de Wilde, Z., "De rechtstoestand der opgezetenen van de particulaiere landerijen beoosten de Tjimanoek", *KS*, I, 1916–1917.

Niel, R. van, "Measurement of Change in Java 1837–1851", *Indonesia*, 14, 1972.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 Jilid, Leiden, 1911–1937.

Nieuwenhuis, C., *De expeditie naar Samalanga* (*Januari 1901*), *Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.*

van Nieuwenhuijze, C.A.O., *Samsu'l-din van Pasai*, Leiden, 1945.

Nijpels, G., *De Expeditien naar Bali in 1846*, *1848*, *1849*, en *1868*, Haarlem.

Noorlander, J.C., *Bandjarmasin en de Compagnie in de 2e helft van de 28e eeuw*, sebuah disertasi Leiden, 1935.

Nya' Amat, Teungku, *Hikayat Prang di Sigli*, Leiden, Universiteitsbibliotheek, or 8926, *Officieele Bescheiden betreffende het Ontstaan van den Oorlog tegen Atjeh in 1873*, Algemeene Landsdrukkerij, 1881.

"Ompu Nommensen: Doktor dan perintis djalan baru dari Batak", Anonim, *Minggu Pagi*, Jogjakarta, *Kedaulatan Rakyat*, 1950.

Ongkokham, "Saminisme: Tindjauan sosial ekonomi dan kebudayaan pada gerakan tani dari awal abad ke XX", Skripsi Sarjana Muda Fakultas Sastra UI, Djakarta, 1964.

———, *"The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century"*, Disertasi Yale University, 1975, tidak diterbitkan.

———, "Pulung Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik, Beberapa Aspek Politik Desa di Madiun pada abad ke-19", *MISI*, VII, 1, 1977.

———, "De ongeregeldheden op het particuliere land 'Tjampea' (Buitenzeorg) in Juni 1892", Anonim, *IG*, 2, 1892.

"Onlusten op het particuliere land Tjiomas (Buitenzorg) in 1886", Anonim, *IG*, 2, 1886.

Oorlog met Atjeh, Verslag van he Verhandelingen der Tweede kamer in comite-Generaal van 16, 17, 18 en 19 April 1874, Algemeene Landsdrukkerij, 1881.

"De Opstand en Moord van Tjikandie Oediek in 1845," Anonim, *TNI*, 1, 1859.

Osborn, Sherard, *My Journy in Malayan waters*, London, 1860.

Pangeran Dipanegara: Djago kebangsaan, Pemimpin rahajat, Goeloegoe perang Djawa taoen 1823–1830, Anonim, Tasikmalaja, Boekoe Pasoendan seri 3, 1933.

Panikkar, K.M., *Asia and western dominance*, London, 1953.

Parkinson, C.N., *Trade in the Eastern seas 1793–1815*, Cambridge, 1937.

———, *British Intervention in Malaya 1867–1877*, Singapore, 1960.

Parlindungan, Mangaradja Dunggang, *Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao*, Djakarta, Penerbit Tandjung Pengharapan, 1964.

———, "De Persihudamdam Beweging", *IG*, anonim, 1917.

Paulus, J., "Ryk van Bandjarmasin", *Encyclopedie van Nederlandsch – Indie*, I, 1917.

Pelzer, Karl, "The Agrarian Conflict of East Sumatra", *PA*, Juni, 1957.

———, "Western Impact on East Sumatra and north Tapanuli: The Roles of the Planter and the missionary", *ISEAH*, 2, II, 1961.

van Pernis, H.D., unpublished, "Badjarese Woordenlijst", appended to W. Kern's *Woordenlijst van het Bandjarees-Maleis*, Codes 8332, L.U.B.

Philips, C.H., *The East India company 1784–1834*, Manchester, 1940.

Piekaar, A.J., *Aceh en de Oorlog met Japan*, Bandung, W. van Hoeve, 1949.

Pigeaud, Th. G. Th., "Balineezen in de Javansche geschiedenis," *Mededeelingen Kirtya Liefrinck-van der Tuuk*, 1, 1929.

———, "Aantekeningen betrefende den Javaansche Oosthoek", *TBG*, 72, 1932.

Pijnappel, J., "Beschrijving van het Westelijke Gedeelte van de Zuid – en Oosterafdeeling van Borneo", *BKI*, 7, 1860.

Pires, Tome, *The Suma Orientalis of Tome Pires* (translated R. Cortesao), Hakluyt Society, London, 1944.

P.J Veth, "Borneo's Westerafdeeling Geograpisch, Statistisch, Historisch Voorafgegaan door Eene Algemeene Schets der Ganschen Eilands", II, 1856.

Pleyte, C.M., "Singa Mangaradja, de heilige koning der Bataks zijne afkomst en de open-baring der eerste wetten volgens een handscrift uit Bakkara, behoorende tot het legaat", *BKI*, 55, 1903.

Poeniko Serat Babad Tanah Djawi: *Wiwit saking Nabi Adam doemoegi ing Tahun 1647*, 's-Gravenhage, 1941.

Poensen, C., *Briever over den Islam uit de binnenlanden van Java*, Leiden, 1886.

———, "Amangkoe Boewana II (Sepuh), Ngajogyakarta's tweeae Soeltan", *BKI*, 58, 1905.

Politiek Verslag, 1861, Arsip Borneo West, *ANRI.*

Purcell, V.W.W.S, *The Chinese in South–East Asia*, London, 1965.

Puvanarajah T, and R Suntharalingam, "The Acheh treaty of 1819", *JSEAH*, 2, 1961.

Raet, J.A.M. Cats, Baron De, "Vergelijking van den vroegeren toestand van Deli, Serdang en Langkat met den tegenwoordigen", *TBG*, 23, 1876.

Ramelan, *Mbah Sur Nginggil* (*Kisah Hantjurnya Petualangan Dukun Klenik Mbah Suro*), Djakarta, Matoa, 1967.

Rappard, W.E., "De particuliere hoofden in de landerijen beoosten de Tjimanoek op Java", *IG*, 2, 1916.

Ras, J., *Hikajat Bandjar*, Leiden, 1968.

"Ratu Sunda", anonim, Wvl, 2, 1905–1906.

Rees, W.A. van, *De Bandjarmasinsche Krijg van 1859–1863*, 2 jilid, Arnhem, 1865.

———, *De Bandjarmasinsche Krijg nader toegelicht*, Arnhem, 1867.

———, *Vermeulen Krieger*; *Indische Typen en Krijgstafereelen*, Batavia, Kolff & Co, tidak bertahun.

Reid, Anthony, "A Russian in Kelantan?" *Peninjau Sejarah I*, 2, 1966.

———, "Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia", *JAS*, 26, 2, 1967.

———, *The contest for north Sumatra, Aceh the Nederlands and Britain 1858–1898*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.

-----, *Pre-Colonial State System in Southeast Asia*, Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic 6, 1975.

Rengers, W. J. van Welde, Baron, Schets eener parlementaire geschiedents van Nederland van 1849 tot 1891, 3 jilid, The Hague, 1905–7.

Robequain, Charles, *Malaya, Indonesia Borneo and the Philippines* (translated by E.D. Laborde), New Impression, London, 1959.

Rochemont, J.I. de ('Maurits'), *London en Atsjin*, Batavia, Ernst & Co.

——, *Wat hebben partijschappen van onzen Atsjin-Oorlog gemaakt? Een Yolks-Voorlezing*, Haarlem, 1876.

Roo de la Faille, P. de, Studie over Lomboksch adatrecht, *Adat Rechtbundels*, 5 Bali en Lombok.

Roorda, T., *Javaunsche Wetten*, Amsterdam, 1844.

——, "Verhaal van de oorsprong en het begin van de opstand van Dipa-Negara", *BKI*, 7, 1860.

Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", *Adatrechbundel*, 34.

Rouweroy van Nienwaal, M.Ch. van, "Het graf van Dipanegara to Makassar", *TN*, 1, 1928–1929.

Rutte, *Le Expeditie tegen de versterking van Pangeran Antasarie*, Leiden, 1863.

Sangti, *Batara, Sejarah Batak*, Balige, Karl Sianipar Company, 1977.

van den Berg van Saparoea, C.J.G.L., "De Tragedie op het eiland Saparoea in het jaar 1817", *BKI*, 104, 1948.

Sartono Kartodirdjo, *Tjajatan tentang segi-segi messianistis dalam sejarah Indonesia*, Jogjakarta, 1959.

——, *The Peasants Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course, and Sequel. A Case Study of Social Movements in Indonesia*, The Hague, 1966.

——, *Gerakan Sosial dalam Sedjarah Indonesia*, Jogjakarta, 1967

——, "Agrarian radicalism in Java: its setting and development", Claire Holt(ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, Cornell University Press, 1972.

——, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries*, Singapore, Oxford University Press, 1973.

——, "Sejarah Pedesaan dan Pertanian," *Prisma*, 7, V, 1976.

Schadee, W.H.M, *Geschiedenis van Sumatra's Ooskust*, II, Amsterdam, 1918.

Schmid. H.J. & M.H. du Croo, *Marechaussee in Atjeh*, Maastricht, Leiter Nijpels, 1943.

Scholtem, P., *Op Reis met de "Special Party"*, Leiden, 1971.

Schrieke, B.J.O. (ed.), *The Effect of Western influence on native civitisation in the Malay Archipelogo*, Batavia, 1929.

_____, *Indonesian Sociological Studies*: *Ruler and Realm in Early Java*, II, 's-Gravenhage, 1959.

Schwaner, C.K.L.M., *Borneo, Beschrijving van het stroomgebied van den Barito en reisen langs eenige vorname rivieren van het Z.O. gedeelte van eiland*, 2 jilid, Amsterdam, Uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor taal, land-en volkenkunde van Neerl. Indie, 1853–1854.

Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1977/1978.

Serat Babad Dipanegara, Surakarta, 1913.

Serat Wulang Reh, Jasan Dalem Sri Susuhunan Pakubuwana IV, Sala, 1963.

Sevenhoven, J.L. van, "De oorzaken van de oorlog op Java, van 1825 tot 1830," *TNI*, 2, 1838.

Sheikd Abbas IBN Muhammad (Teungku Kutakarang), *Tadzkirat, ar-Rakidin*, MS, Leiden, Universiteits-bibliotheek. cod. or. 8037 b.

Siahaan, E.K. Cs, *Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara*, Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatra-Utara 1975/1976, Departemen Pendidikan & Kebudayaan R.I.

Siahaan, P.A.N, *Sedjarah Kebudayaan Batak: Suatu Studi tentang suku Batak*, Medan, C.V. Napitupulu & Sons, 1964.

Siegel, James T., The Rope of God, Berkely; University of California Press, 1969.

"Sintangsche Troebelen", Naskah koleksi KITLV Leiden, H 356.

Snouck Hurgronje, C., "Nog lets Over de Salasila van Koetei", *BKI*, 1888.

———, C. *De Atjehers*, 2 Jilid, Batavia, 1893–4.

———, *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, Batavia, 1903.

———, "L'arabie et les Indes neerlandais," *Revue de L 'Histoire des Religions*, 57, 1908.

———, *The Achehnese*, (Diterjemahkan oleh A.W.S. O'Sullivan, Leiden, 1906.

———, *Verspreide Geschriften*, IV, I, Bonn dan Leipzig, 1924.

———, *Mekka in the latter part of the 19th century*, diterjemahkan oleh J.H. Manahan, Leiden/London, 1931.

Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755–1825* (*Perdjandjian Gianti Perang Diponegoro*), Djakarta-Amsterdam: Mahabarata, 1952.

Soemadirdjo, *Serat Asta Brata Winedar atau Serat Asta Lokapala*, Jogjakarta, 1838.

Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java*, New York Cornell: Cornell University, 1968.

Soeroto, Soeri, "The Beratib Beamal Movement in the Bandjar War", Paper yang diajukan pada International Conference IAHA bulan Agustus 1971 di Manila.

———, "Pergerakan Sosial dalam Perang Bandjar", Paper yang diajukan pada Seminar Sedjarah Nasional II, (26–29 Agustus 1970 di Jogjakarta), Jogjakarta, 1970. (Juga dimuat dalam Bulletin Yaperna, 5, Februari 1975)

———, "Berdirinya Kerajaan Banjar Suatu Tinjauan Sosiologis Kulturil", (Paper yang diajukan pada Seminar Staf Djurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM), Yogyakarta, 1972.

———, "Perang Banjar", dalam Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo, (ed.), *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan Keamanan, 1973.

———, "Beratib Beamaal, suatu pergerakan keagamaan di dalam perang Banjar", Bulleting Yaperna, 11, III, Februari 1976.

Somer., J.M., *De Korte Verklaring*, Berda, 1934.

Sorokin, P.A., "Social Stratification" di dalam Selo Soemardjan & Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.

Sosrowidjojo, *Raden Serat Perwotjarito Bali*, 1875.

Spuler, Bertold (ed.), *Wustenfeld-Mahler'sche Vergleichungtabellen*, Wiesbaden, 1961.

Stall. J., "De Misigit Raija in Aceh," *IG*, 1882.

Stein Callenfels, P.V. van, "De rechten der vorsten op Bali", *Indonesie*, I.

Steinberg, David Joel (*et. al*), *In Search of Southeast Asia*: *A Modern History*, Oxford University Press,1971.

Sturler, J.W.E. *de*, *De zaak Thomas door den landeigenaar tegelicht*, 2 jilid, 's-Gravenhage, 1886.

Sukanto, *Sentot Alibasah Abdulmustopo Prawirodirdjo Senapati Diponegoro*, Djakarta, N. V, Poesaka Asli.

———, *Sekitar Jogyakarta 1755–1825*, Djakarta, Mahabarata, 1952.

———, *Hubungan Diponegoro-Sentot*, Djakarta, PT Surungan, 1959.

S.U. Marunduh "Konflik Minahasa-Belanda 1807–1809", Yogyakarta, Tesis Magister S2 Program Pascasarjana Sejarah Universitas Gajah Mada, 1997.

Surjakusuma, K.R.A.P. (ed.), *Serat Tjabolek*, Semarang, 1885.

Swellengrebel, J.L. (editor), *Bali Studies in Life*, *Thought and Ritual*, 1960, memuat bibliografi pada halaman-halaman terakhir.

Swieten, J. van, *Krijgsverrigtingen tegen het Eiland Bali in 1848*, Den Haag, 1849.

——, *De waarheid over onze Vestiging in Aceh*, Zaltbommel, 1879.

Szekely-Lulofs, M.H., Tjoet Nja Din, *Riwayat hidup seorang Puteri Aceh*, Terjemahan Abdoel Moeis, Jakarta, 1954.

Tampoebolon, R.H.A., "Het sneuvelen van Si Singa Mangaradja", *TNAG*, 61, 1944.

Tandilintin, L.T., *Toraja dan Kebudayaannya*, Ujung Pandang, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi, 1974.

Tanojo, R., ed., *Djangka Djajabaja Weddha Wakja*, Surakarta, Tanpa angka tahun.

Tarling, Nicholas, "British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824–1871", *JMBRAS*, 30, III, 1957.

——, *Anglo-Dutch Rivalry in the Malay World 1780–1824*, Sydney, 1962.

——, *Piracy and Politics in the Malay World*, Singapore, 1963.

——, *Southeast Asia, Past and Present*, Melbourne, 1966.

Abdullah Taufik, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, II, October 1966. (Modern Inditesia Project, Cornell University).

Thamrin, M.Z., "Pengaruh Pendidikan Islam pada Rakyat Aceh dalam Menentang Penjajahan Belanda", Skripsi Sarjana Keguruan, Universitas Syah Kuala, 1975.

Thee Kian Wie, *Plantion Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra*. 1863–1942, Disertasi, University of Wisconsin, 1969.

Thevenot, M., *Relation de Divers Voyage Curieux*, II, Paris, 1664.

Thomson, Virginia, *Labor Problems in Southeast Asia*, New Haven, Yale University Press, 1947.

Thornton, A.P, *The imperial Idea and its Enemies*, London, 1959.

Thornton, R.H., *British Shipping*, Cambridge, 1959.

Thrupp, Sylvia L., ed., "Millenial Dreams in Action: Essays in Comparative Study," *CSSH*, Supplement II, The Hague, 1962.

Tichelman, G.L., "De Parhoedamdam Beweging", *MVGNI*, 45, 1937.

Tjantrik Mataram, *Peranan Ramalan Djojobojo dalam Revolusi Kita*, Bandung, tanpa angka tahun.

Tjipto Mangoenkoesoemo, *Het Saminisme*, Semarang, 1918.

Tobias, "Borneo," *De Nederlandsche Hermes, Tijdschrijft voor Koophandel, Zeevaart en Nijverheid*, 13, 1828.

Tobias, P.F. Laging, *Phrasen en Feiten*, Amsterdam, 1886.

———, "Het Herstel van het Sultanaat in Aceh", *IG*, 8, II, 1886.

———, "Onze tegenwoordige politiek in Aceh en hare Gevolgen", *De Gids*, 50, II, 1886.

Tobing, Porma Tiurma L., *Gerakan Parsihudamdam Di Tanah Batak*, Jakarta, Skripsi Sarjana Fakultas Sastra UI, 1974.

Tolson, G.P., "Aceh," *JMBRAS*, 5, 1880.

Tromp, S.W., "Uit de Salasila van Koetei", *BKI*, 37, 1888, pp. 1–108; IV 16.

Undang-undang Sultan Adam Bandjarmasin, Codex Or. 6664 (appended), L.U.B., Gloss.

"Undang-undang Sultan Adam", dikeluarkan tahun 1835, Adatrechtbundels, XIII: Borneo.

Vandenbosch, Amry, *The Dutch East Indies: its Government, Problems and Politics*, Los Angeles, 1944.

———, *Dutch Foreign Policy since 1815*, The Hague, 1959.

de Veer, W., *Particuliere Landerijen en de openbare veiligheid in de residentie Batavia*, Batavia, 1904.

Veer, Paul Vantt, *De Aceh-Oorlog*, Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspers, 1969.

van der Ven, A., "Aantekeningen omtrent het rijk Bandjarmasin", *TBG*, 9, 1860.

Veltman, T.J., "Nota over de Geschiedenis van het landschap Pidie", *TBG*, 58, 1919.

Verheull, Q.A.R., *Herrineringen van eene reis naar Oost-indien*, 1835.

Veth, J., "Het Beratib Beamal in Bandjarmasin", *TNI*, 2, 1869.

Vetch. R.H., *Life of Lieut–General the Hon. Sir Andrew Clarke*, London, 1905.

Veth, P.J. *Borneo's Wester Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, Voorafgegaan door eene Algemeene Schets des Gandschen Eilands*, 2 jilid, Zaltbommel; 1854–1856.

Vink. J.A., "Desertien van militairen der Nederlandsch Indiche Krijgsmacht naar de Acehers in de Laatste lo Jaren", *IMT*, 23, II, 1892.

Vlekke, B.H.M., *Evolution of the Duth Nation*, New York, 1945.

———, *Nusantara: A History of Indonesia*, Bandung, 1959.

van Vlijmen, B.R.F., *Bali in 1868. Een bladzijde der Indische krijgsgeschiedenis*, Amsterdam, 1875.

van Vollenhoven, C., *Het Adatrecht van Nederlandsch* – Indie, 3 jilid, Leiden, 1931.

Vredenbregt, Jacob, "The Haddj," *BKI*, 118, 1962.

———, "The Haddj: Some of its features and functions in Indonesia," *BKI*, 143, 1962.

de Vries, Gijsbert, *Pang Paneu de Toenonger*, W van Hoeve, Deventer.

de Waal, E., Onze Indische Financien, I, 's-Gravenhage, 1876.

van de Waal, R., *Richtlijnen voor een Ontwikkelingsplan voor de Oostkust van Sumatra*, Disertasi pada Sekolah Tinggi Pertanian, Wageningen, 1959.

Wacana, Lalu dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Proyek IDSN Ditjarahnitra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/84.

Weitzel, A.W.P., *De derde militaier expeditie naar het Eilend Balie in 1849*, Gorinchem, 1859.

Wekker (nama samaran), *Hoe Beschaafd Nederland in de Twintigste Eeuw Vrede en Orde Schept on Atjeh*, 's-Gravenhage, Avondpostdrukerij Rp907.

Wertheim, W.F., *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Bandung, 1959.

Wertheim. W.F., "De Geest van het Oostindesche Gouvernement, honderd Jaar Geleden," *BKI*, 117, 1961.

Westerman, W., *De Tabakscultuur op Sumatra's Oostkust*, Amsterdam, 1904.

Widjojo Nitisastro, *Population Trends in Indonesia*, Cornell University Press, 1970.

Winstedt, R.O., "The Advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago", *JSBRAS*, 77, 1917.

Wiselius, J.A.B., "Djaja Baja, zijn leven en profetieen", *BKI*, 19, 1872.

Witte. J.C., J.B., *Van Heuts, Leven en Legende*, Bussum, Fibula-van Dishoeck, 1976.

Worsley, P.J., *Babad Buleleng*, The Hague, 1972.

www.geocities.com/tersaji/fontane.htm?200719, "Theodor Fontane".

Tangkilisan Yuda Benharry. Pemberontakan Sintang 1856–1861. Depok: Makalah Seminar Penulisan Tesis Mahasiswa S-2 Program Studi Ilmu Sejarah eks Belanda 1990–1993 Program Studi Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 13 Febuari 1993.

-----, Pemberontakan Sintang 1856–1861. Depok: Tesis S-2 Magister Humaniora Program Studi Sejarah Program Pascasarjana Ilmu Pengetahuan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2001.

Zainuddin, H.M., *Tarich Aceh dab Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961.

———, *Srikandi Aceh*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1966.

Zentgraaff. H.C., Aceh, Batavia, Koninklijke Drukkerij de Unie, tanpa angka tahun.

———/W.A. van Goudoever, *Sumatraantjes*, De Java-Bode, "Zijn de Samin geraarlijk?", *Anonim*, *IG*, 2, 1916.

Zollonger, "Een uitstapje naar het eiland Bali", *TNI*, 7, 1845.

———, "Reis over de eilanden Bali en Lombok gedurende de maanden Mei tot September 1846", *VBGKW*, 22, 1849.

Sumber-Sumber Naskah dan Pemerintah

Abdulkarim, "Hikayat Prang Compeuni", Universiteitsbibliotheek Leiden, *MS*, cod. or. 8728 a

"Babad Pacina", MS Sanabudaya, No. A/2, 75a.

"Babad Pakepung", MS Sanabudaya, No. 127, 7a.

Exhibitum, 1850–1900: 1900–1941.

Gandaatmaja, "Babad Negara Patjitan". or 8991, MS Leiden

Geheim don Kabinet's Verbaal, 1850–1900.

"Hikayat Prang Geudong", *MS*, Universiteitsbibliotheek, Leiden, cod. or 8683b.

Xoloniaal Verslag, 1860–1900.

Mailreports, 1872–1900.

Oast-lndisch Besluit, 1850–1900; 1830–1900.

"Paniti Praja", MS Reksapustaka, No. 20.

Regeeringsalmanak voor Nederlandch-Indiie, 1840–1900.

Sraatsblad van Nederlandsch-Indie, 1850–1930.

"Tetedakan Pranatan Dalem tuwin Serat warni-warni tumrap Nagari Surakarta". MS Radyapustaka, No. 165.

Daftar Sumber

A. Arsip

1. Algemeene Rijksarchief (ARA)

Archief/Collectie H.M. de Kock.

Serie 14, Volgnr 2

Serie 14, Volgnr 3

Serie 14, Volgnr 4

Serie 14, Volgnr 5

Serie 14, Volgnr 6

Serie 14, Volgnr 8

Serie 14, Volgnr 9

Serie 14, Volgnr 10

Serie 14, Volgnr 11

Serie 14, Volgnr 12

Serie 14, Volgnr 13

Serie 14, Volgnr 15

Serie 14, Volgnr 16

Serie 14, Volgnr 17

Serie 14, Volgnr 18

Serie 14, Volgnr 19

2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Arsip-arsip Keresidenan

Extract uit het register der Resolutieen van Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië in rade 1816-1832 No. 102. 1822 – 1824.

103. 1824 – 1827

104. 1828 – 1829

105. 1830 – 1831

Surat keluar

No. 149. 1825–1826
150. 1827
151. 1828
152. 1829
153. 1829–1830

Arsip Bagelen

Inventaris Arsip Bagelen 1828-1894

Surat-menyurat

1.5. Surat-surat dari asisten Residen Bagelen 1830–1833

Pemerintah

5. Rapport van der Resident van Kadoe aan Heeren Kommissarisen ter Regeling van zaken in den Vorstenlanden dd 18e September 1830 houdende verslag van zijne verrigten in Begalen
6. Laporan dari Residen Kedu mengenai perbuatan/tindakan yang terjadi di Bagelen 1830
7. Peraturan mengenai pemerintahan di residensi Bagelen 1831
92. Organisasi daerah Ledok 1831
93. Berkas mengenai keamanan 1831-1832
94. Berkas mengenai pemberontakan di Bagelen oleh Pangeran Danuprodjo 1831
96. Berkas mengenai data-data kependudukan yang dibuat oleh Residen Banyumas dan Bagelen 1831
100. Berkas mengenai sejarah Karanganyar 1830-1891

Pelayaran

117. Berkas mengenai pelayaran di Serayu dan Bogowonto 1830

Arsip Kedu

11.1. Uitgaande stukken, 1827
11.2. Rapport van resident Valck, 1827
12. Uitgaande stukken 1828 (2 bader)
13. Fragment bundel brieven resident van Kadoe, Juli–Agustus 1830
16. Ingekomende stukken 1827
17. Ingekomende stukken 1828

18.a Inkommende en afgaarde brieven 1830-1831, (1-3)
21. Besluit Gouverneur Generaal 1821–1827
22.1. Resident van Kadoe 1815–1825 22.2. Lijst van Geborten
22.3. Lijst van Overlijden 1829
22.7. Bezoldiging inlandshe hoofden 1827
22.9. Verhaal eener beklimming van de berg Sumbing gelegen in de residentie Kadoe 1830
25. Resident van Kadoe 1830–1867
25.1. Brieven van de Resident van Ledok aan den heeren Commisarissen, 1830-1831
25.2. Geslachtlijst van onder collecteur, wedana en bupati residentie Kedoe
26. Inkommende brieven 1828

Arsip Tegal

21. Tahun 1826–1828
21.1. Concepten een de Gouverneur Generaal 1826 (Kruisprauwen, Financien, Militair, Detachement Djajengsecars enz.)

Arsip Surakarta 1646 – 1890

122.9. Surat MacGillavry kepada Secretaris van Staat Gouverneur Generaal mengenai keadaan di Solo dan Yogyakarta
125. Surat kepada Luitenant Gouverneur Generaal mengenai keadaan bangsawan Jawa, 21 Agustus 1826
127. Surat Minister Staats Kommisaris Generaal over NI kepada Luitenant Gouverneur Generaal, mengenai kelakuan kurang baik Susuhunan, 17 Maret 1829
129.19 Overeenst emend residen dengan penguasa pribumi
131.12 Surat Residen Surakarta MacGillavry kepada Kommisaris Generaal dan Gouverneur Generaal over Nederlandsch Indië, berisi nota mengenai keadaan bangsawan Jawa sehubungan dengan pemberontakan dan cara-cara menguasai kerusuhan yang dapat dilakukan 1824–1826

Rapport van den Resident van Kadoe 18 September 1830

Dagregister van den Resident van Kadoe belast met het civiel gezag in Bagelen en in aangrenzende landen, Kedoengkebo, Juni 1830

Extract een brief van de Majoor Michiels Kommandant in Banjoemas en in het Ledok, 6 Agustus 1830

Statistiek Beschrijving van Bagelen

Rapport over de militaire positie van de Provincie Bagellen, 26 Juli 1830

Inlandsche Hoofden in Oost Begaleen, mandelijk tractement 1828

5.1. Staat der en Oost Begallen dienstdoende Inlandsche Hoofden, Barisan met aanwijzing waar gestationeerd

Verklaring van den Javaan Doellah Djaijo Seeno inwoner desja Patoek district Wonoroto, Regentschap Bringkeelan, Residentie Bagellen

Onrust in Bagelen, aankommende brieven, Poerworedjo, 29 November 1831 Voornaamste land gebouwen in Residentie Bagelen

Arsip Yogyakarta

4.6. Verslag Sultan Djocja 1824

6.2. Diversen Zaken 1816 – 1830
- daftar nama pemberontak
- Surat melepaskan diri Pangeran Diponegoro
- Instructie untuk kepala desa

6.12. Javansche Wetten

6.4.1. Notulen Raad uitmakende het bestuur van Djocjakarta 1825–1826

6.4.2. Vergadering bij den Raad het bestuur Rijk Djocjakarta over gronden 1825–1826

6.5. Uitgaande brieven 1826

6.7.3. Lijst regenten, officieren van den Sultan 1825

7.1.-3. Brieven Djocja 1825–1826

7.4. Tractaat de Burgraaf Leonard Du Bus de Gisignies met Sultan Hamangkoeboeana II 1826

7.a. Brieven inventaris verslag Djocjakarta.

8.1. Landverhuur kultuur Djocjakarta 1826

8.2. Brieven over Pemberontakan Diponegoro, Laporan Resident Djocjakarta J.I.van Sevenhoven 1823–1826

8.9. Nota MacGillavry voor Resident Rembang over situatie te Djocjakarta 1826

8.10. Nota MacGillavry voor Gouverneur Generaal betreffende verdediging der Vorstenlanden, opgemaakt na den oorlog 1826

9.2. Brieven Pangeran Adipati Notoprodjo te Bangkalan aan Resident Djocjakarta 1827

9.3. Brieven Resident Surakarta, Kadu, Brebes Tegal aan Luitenant Gouverneur Generaal, over Java Oorlog 1826–1830

9.5. Inkommende brieven over Djocjakarta Rijk 1827

9.6. Djocjakarta 1816–1855

9.a.7. Oproep de Kock aan Diponegoro om den opstand te beeindigen 1826

9.a.8. Rapport van Lawijck van Pabst 1827

9.a.13. Missive van du Bus

9.a.14. Missive van du Bus 1828

9.a.15. Missive van du Bus 1828

9.a.17 Nieuwe verdeeling van het Mataram Rijk 1828

9.a.22. Overzicht geschiedenis Djocjakarta Rijk door Valck 1755–1830

9.24. Nota over de Java Oorlog 1903 door P.J.F. Louw

10.4. Verhaal Pangeran Diponegoro door Kolonel Nahuijs, 1827–1830

10.5. Verslag de Kock. Penangkapan Diponegoro di Magelang 1830

10.8. Korespondentie J. I. Van Sevenhoven met Nahuys 1830

11.1. Stukken speculatie van Luitenant Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, Van den Bosch met residenten van Vorstenlanden

11.3. Rapport Resident van Kadoe aan Kommisaris Regeling in Vorstenlanden, Verslag verigtingen Bagelen 1830

11.6. Stukken daargestelden grensscheiding tusschen de landen beide hoven van Soerakarta en Djocjakarta 1830

11.7. Grensregeling Soerakarta en Djocjakarta Rijk 1830

12.2. Aankomende brieven ter regeling der Vorstenlanden 1830–1831

12.3. Inkomende brieven met J.I. van Sevenhoven aan den regeling Nederlandsch Indië van Vorstenlanden 1830–1831

18.2. Geheim memorie over politiek Djocjakarta Rijk 1839

18.4. Korespondentie Kjai Modjo met Diponegoro

18.5. Memorie Valck over karakter van Pangeran Adipati Mangkoeboemi. Geheim copy, 1847

19a.2. Troon opvolging 1830

19a.5. Piagem Boek 1823

19b.1. Inleiding geschiedenis den Oorlog op Java 1825–1830
19b.2. Diversen Zaken 1816–1833
19b.3. Takken over de overkomst Sultan Sepoeh
19b.4. Rapport van Landverhuur 1825
22a. Stukken over den Pangeran Adipatie Mangkudiningrat, 1831
54. Minuut en afgaande stukken Djocjakarta 1825
55. Afgaande stukken in het Algemeen gelden en goederen 1826
57. Afgaande stukken Djocjakarta 1827–1830 No. 1–4
65.1. Ingekomende stukken van Gouvernement 1830
69. Inkommende stukken en aankommende stukken Djocjakarta 1826 No. 1–14
71. Inkommende stukken 1827–1825
72. Inkommende stukken Djocjakarta 1828
74. Aankommende stukken Djocjakarta 1829
81. Djocjakarta 1821-1830 No. 1–9. Korespondentie Secretaris Djocjakarta Rijk met Nederlandsch Indië Regering
81.3. Secreet uitgaande brieven Djocjakarta 1825

Militaria

48.56. 1581–1830
52. Departement van Oorlog Vijf jarige begrotingen uitgaven van 1826 tot en met 1830 (varia, 556)
77. Military departure. 1815-1816 (varia 43) (bhs Inggris)
89. 1780, 1784, 1785, 1790, 1826
93. Oorlog 1826
128. Begroting der benodigde fondsen tot bestrijding der uitgaven voor het militaire 1826
139. Memorie en vorstellen betrekkelijk de verdediging muitelingen Inlandsche vijand Vorstenlanden op Java 1825–1830
174.a. Generaal Rapport der Koloniale Marine 1826
174.b. Generaal Rapport der Koloniale Marine 1829
179. Register den aangekomen en versterken schepen sedert den 26 Juli tot Augusts 1828
561–602. Militairie gebouwen en water staat

571–572. Kedoe
574– Djokdjakarta
576–577. Madiun

B. Buku

Adas, Michael, 1988, *Ratu Adil-Tokoh Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, terjemahan Tohir Effendi (judul asli: *Prophets of Rebellion, Millenarian Protest Movement Against European Colonial Order*, 1993), Jakarta: CV Rajawali.

Aron, Raymond, 1959, *The Century of Total War*, Boston: The Beacon Press.

Asprey, Robert B, 1994, *War in The Shadows, the Guerrilla in History*. New York: William Morrow and Company.

Auskes, H.F., 1935, Luitenant Kolonel, *Het Legioen van Mangkoe Nagoro*, Bandoeng: Uitgevers A.C. Nix & Co.

Beaufre, André, 1965, General d'Armée, *An Introduction to Strategy*, New York: Frederick A. Praeger.

Bentley, Michael (ed), 1997, *Companion to Historiography*, London and New York: Routledge.

Berkhofer, Jr., 1969, Robert F.A., *Behavorial Approach to Historical Analysis*, Toronto Ontario: Collier MacMillan.

Bernard, H.M. Vlekke, 1959, *Nusantara, a History of Indonesia,* 's-Gravenhage, A. Manteau.

Booms, A.S.H., 1902, *Neerlands Krijgsroem in Insulinde*, jilid I, (1812–1874), 's Gravenhage, W.P. Van Stockum an Zoon.

Brakel, D., 1895, *De Oorlogs in Nederlandsch Indië*, Tanpa tempat terbit: Tanpa nama penerbit.

Burke, Peter, 1990, *The French Historical Revolution the Annales School*, London: Polity Press.

Callwell, C.E., 1906 (reprinted 1974), *Small Wars, their Principles and Practice*, third edition. London: General Staff-War Office.

Car, E.H., 1987, *What is History?*, London: Penguin Books (edisi kedua).

Cardinar Patrick, 1961, *The Nature of historical explanation*, Oxford: Oxford University Press.

Carey, P.B.R., (ed), 1981, *The Archive of Yogyakarta*, Vol. I, London: Oxford University Press.

Carey, Peter B.R., 1975, *Pangeran Dipanegara and the making Java War*, Oxford: University of Oxford.

Carey, Peter B.R., 1985, *Asal-usul Perang Jawa* (terjemahan tim penerjemah Pustaka Azet), judul asli, The Origin of the Java War (1825–1830), Jakarta: Pustaka Azet.

Carey, Peter B.R., 1981, *Babad Dipanegara : An account of the out break of the Java War (1825-1830): The Surakarta version of the Babad Dipanegara with translation into English and Indonesian Malay*, Kuala Lumpur: The Malaysian Branch of the Royal Asiatie Society.

Citrosusanto, 1985, *Serat Babadipun KGPAA Mangkunegoro II*, (alih huruf latin oleh M. Husodo dan Suroso), Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Perpustakaan Jawa Tengah.

Clausewitz, Carl von, 1950, *Principles of War*, Harrisburg Pennsylvaania: The Military Series Publishing Company.

Clausewitz, Karl von, 1954, *Tentang Perang*, (terjemahan Susatyo, Mayor Inf), Jakarta: Pembimbing.

Clive Day, 1909, *Nederlandsch beheer over Java gedurende drie Eeuwen*, (Nederlandsche bewerking door H.D.H. Bosboom; Gep. Luitenant Kolonel O.I. Leger),'s Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon.

Collins, John M., 1974, *Grand Strategy, Principles and Practices*, Annapolis Mary-land: Naval Institute Press.

Cowley, Robert, (ed), 1996, *Reader's Companion to Military History*, Boston: Houghton Mifflin Company.

Darsiti Soeratman, 1989, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830–1939*, Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa.

Dawson, William Harbutt, 1918, *After-War Problems*, London: George Allen and Unwin.

Delbrück, Hans, 1983, *History of the Art of War within the Framework of Political History, the Modern Era*, IV, London: Greenwood Press.

Deventer, J.S.Z., S van, 1866, *Bijdrage tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java*, jilid II, Zalt-Bommel: Joh. Nomal en Zoon.

Deventer, M.L. Van, 1891, *Het Nederlandsche Gezag Over Java Sedert 1811*, jilid I (1811–1820), 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Diponegoro, *Babad Dipanegara ing nagari Ngayogyakarta Adiningrat*, jilid I dan II (salin aksara Ny. Dra. Ambaristi dan Lasman Marduwiyota), Jakarta, 1983, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

Dufly, Christopher, 1987, *The Military Experience in the Age of Reason 1715–1789*, New York: Barnes and Noble Books.

Eco, Umberto, 1994, *The Limits of Interpretation*, Indianapolis: Indiana University Press.

Edward Mead Earle, (ed), 1940, *Makers of Modern Strategy*, Princeton: Princeton University Press.

Fieldhouse, D.K., 1965, *The Colonial Empires*, London: MacMillan & Education.

Fischer, David Hackett, 1970, *Historian's Fallacies, toward a Logic of Historical thought*, New York, San Francisco, London: Harpers Colophon Books.

Frederick, A. William, Soeri Soeroto, 1982, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

de Graaf, H.J., 1949, *Geschiedenis van Indonesië*, 's-Gravenhage-Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve.

de Graaf, H.J., 1987, *Runtuhnya Istana Mataram,* (terjemahan Pustaka Grafiti Pers-KITLV), Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Grivas, George, 1965, *General Grivas on Guerrilla Warfare*, (translated by A.A. Pallis), New York: Frederick A. Praeger Publisher.

Hageman Jcz, J., 1856, *Geschiedenis van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830*, Batavia: Lange & Co.

Hardjonagoro, K.R.T., *et al.*, 1990, *Sultan Abdul Kamit Herucakra Kalifah Rasulullah di Jawa 1987-1855*, Surakarta: Museum Radya Pustaka.

Hart, B.H.Liddel, 1929, *The Decisive Wars of History a Study in Strategy*, London: G. Bell & Sons Ltd.

Hooyer, G.B., 1895, *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch Indië van 1811 tot 1894*, jilid I, Den Haag-Batavia: De Gebr van Cleef, G. Kolff & Co.

Ibrahim Alfian, T., 1987, *Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873–1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ibrahim Alfian, T., (eds), 1987, *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartodirdjo Sartono, 1992, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900: dari Emporium sampai Emperium*, jilid I, Jakarta: Gramedia.

Kartodirdjo Sartono, 1984, *Ratu Adil*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Keegan, John, 1993, *A History of Warfare*, London: Pimlico.

Keegan, John, et. al., 1976, *Who's who in Military History from 1453 to the Present Day*, New York: William Monrow & Co Inc.

Keegan, John, 1996, *Refighting World War II*, New York: Vintage Books.

van der Kemp, P.H., 1896, *Brieven van den Gouverneur Generaal van der Capellen over Dipanegara's opstand, zoo mede eene wederlegging van den Minister Elout*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.

van der Kemp, P.H., 1896, *Dipanegara, eene geschiedkundige Hamlettype*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.

de Klerck, E.S., *De Java Oorlog van 1825-30*, Batavia, jilid IV (1905), jilid V (1908), jilid VI (1909), Landsdrukkerij.

Lannoy, L.D.C., 1899, *Cavalerie Tegen den Inlandsche Vijand*, Batavia: H.M. van Dorp & Co.

Levy, Yank, 1943, *Guerrilla Warfare*, New York-Washington: Penguin Books Inc.

Lindsay, Jennifer, *et. al.*, 1994, *Kraton Yogyakarta*, (judul asli A Preliminary Descriptive Catalogue of the Manuscripts of the Kraton Yogyakarta, diterjemahkan oleh R.M. Sutanto, T.E. Behrend), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lloyd, Christopher, 1986, *Explanation in History*, Oxford: Basil Blackwell Inc.

Lloyd, Christopher, 1993, *The Structures of History*, Oxford: Blackwell Publisher.

Louw, P.J.F., *De Java Oorlog van 1825–30*, jilid I, 1894, jilid II, 1897, jilid III, Batavia, 1904, Landsdrukkerij.

Louw, P.J.F., 1904, *Kaarten en Teekeningen behoorende bij de Java Oorlog van 1825-30*, Batavia: Landsdrukkerij.

Malcolm, Mayor General Sir. John, 1826, *The Political History of India from 1784 to 1823*, jilid I, 1825, jilid II, London, John Murray, Albemarle-Street.

Malik, Arjan Dass, 1925, *An Indian Guerilla War the Sikh Peoples War 1699–1768*, New Delhi: Wiley Eastern Limited.

Mill, James, E.S.Q., 1840, *The History of British India*, fourth edition, London: James Madden and Co.

Mirawati, Ina, 2000, *Akhir Perang Jawa 1825–1830, Kasus Pembuangan Kyai Maja*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Moertono, Soemarsaid, 1985, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, (terjemahan oleh Yayasan Obor Indonesia, judul asli, State and Statecraft in Old Java, a Study of the Later Mataram Period 16th to 19th Century, Cornell, 1981, Cornell Modern Indonesia Project), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Montgomery of Alamein, Field Marshal, Viscount, 1968, *A History of Warfare*, London: Collins.

Moor, J.A., de, 1983, *Indische Militair Tijdschrift (1870–1942), Selected and Annotated Bibliography*, Leiden: Centre for the History of European Expansion.

Mughni, Syafiq A., 1997, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Jakarta: Logos.

Nagtegaal, Luc., 1996, *Riding the Dutch Tiger, The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast Java 1680-1743,* Leiden: KITLV Press.

Nahuijs, 1835, *Verzameling van Officielle Rapporten Betreffende den Oorlog op Java in de jaren 1825-1830*, jilid I, Deventer, M. Ballot.

Osanka, Franklin Mark, (ed), *Modern Guerrilla Warfare Fighting Cammunist Guerrilla Movement 1941–1961*, New York, 1963 (third printing), Free Press of Glencoe.

Paret, Peter, 1992, *Understanding War, Essays on Clausewitz and the history of military power, Princeton*, New Jersey: Princeton University Press.

du Picq, Ardant, 1947, *Battle Studies,* (translated from Eight edition in the French by Colonel John N. Greely), Harrisburg: The Military Publishing Company.

Poerwokoesoemo, Soedarisman, 1985, *Kadipaten Pakualaman*, Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pringgodigdo, R.M., A.K., 1938, *Dhoemados saha ngrembakanipoen Pradja Mangkoe-negaran*, Surakarta: Radya Pustaka.

Raffles, Thomas Stamford, 1982, *The History of Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Ricklefs, M.C., 1990, *The Seen and Unseen Worlds in Java 1726–1749*, Honolulu: Allen and Unwin and University of Hawaii Press.

Ricklefs, M.C., 1993, *War Culture and Economy in Java 1677–1726*, Sydney: Allen & Unwin.

Rouffaer, G.P., 1931, *Vorstenlanden* (overdruk uit Adatrecht bundel XXXIV Serie D. No. 81), Batavia: tanpa nama penerbit.

Sagimun, M.D., 1965, *Pahlawan Diponegoro Berjuang*, Jakarta: Gunung Agung.

Seskoad, 1980, *Vademacum Pengetahuan Pertahanan Keamanan*, Bandung: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.

Soedjatmoko, (ed), 1990, *Historiografi Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, 1953, *Sekitar Jogjakarta 1755–1825, Perjanjian Gianti-Perang Dipanegara*, Jakarta, Amsterdam, Mahabarata.

Soekiman, Djoko, 2000, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Steenbrink, A. Karel, 1984, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang.

Stuers, F.V.A., 1830, *De drie Portretten van Diepo Negoro, Kjai Modjo en R Pacha Prawiro Dirdjo (Sentot)*, tanpa tempat terbit, tanpa nama penerbit.

Stuers, Jhr. F.V.A. Ridder de, 1847, *Gedenkschrift van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830*, (terjemahan dari bahasa Prancis oleh H.M. Lange, judul asli : Mèmoires sur la guerre de l'ile de Java de 1825 à 1830), Amsterdam: Johannes Müller.

Tarling, Nicolas (ed), 1994, *The Cambridge History of Southeast Asia, The nineteenth and twentieth Centuries*, jilid II, New York, Melbourne: Cambridge University Press.

Tilly, Charles, 1978, *From mobilization to Revolution*, Ontario-Sidney: Addison-Wesley Publishing Company.

Tjokorda Rai Sudharta, *et al.*, 1994, *Kalender 301 tahun (Tahun 1800 s.d. 2100)*, Jakarta: Balai Pustaka.

Toy, Sidney, 1955, *A History of Fortification, from 3000 B.C. to A.D. 1700*, London-Toronto: William Heinemann Ltd.

Utrecht, E., 1962, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Jakarta: Sumur Bandung.

Veer, Paul Van't, 1985, *Perang Aceh*, (terjemahan Grafiti Pers, judul asli De Atjeh Oorlog, 1879), Jakarta: PT Grafiti Pers.

Veth, P.J., 1907, *Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch*, jilid II-IV, Haarlem: De Erven F. Bohn.

Wallach, Jehuda, L., 1986, *The dogma of the battle of annihilation*, London: Greenwood Press.

Weitzel, A.W.P., 1855, *De Oorlog op Java van 1825 tot 1830*, jilid I (1852) jilid II (1853), Breda, Broese en Comp.

Wisseling, H.L., 1988, *Indie Verloren Rampspoed geboren en anders opstellen over de geschiedenis van Europese expansie*, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakken.

Yamin, Muhammad, 1998, *Sejarah Peperangan Dipanegara*, Jakarta: Balai Pustaka.

C. Artikel

Carey, Peter, "Waiting for the Just King: The Agrarian World of South Central Java from Giyanti (1755) to the Java War (1823–1830)", *Modern Asia Studies*, No. I, 1986, hlm. 59–137.

_______, "De Madoereesche Hulptroepen van Indische Leger", *Indische Gids*, Agustus, 1883.

Gijsberti-Hodenpijl, A.KA, "De Korpsen Barisan van Madoera", *IMT*, No. 35 (1904), hlm. 763–775.

_______, (n.n), "De expeditie naar Kertosono in 0ctober 1825", *IMT*, No. 22 (1891), hlm. 239–255.

Huntington, Samuel P., "Guerrilla Warfare in Theory and Policy" in Franklin Mark Osanka (ed), *Modern Guerrilla Warfare Movement*, 1961, hlm. XV–XXI.

J.P. Schoemaker, "De onderwerping en gevangenneming van Diponegoro hoofd der opstandelingen in den Java Oorlog 1825–1830", *IMT*, 1–6 (1893) hlm. 407–424, hlm. 424–491.

Somer, J.M., "Drie figuuren in den Java Oorlog", *IMT*, No. 69 (1938) I hlm. 254–267, hlm. 443–456, hlm. 564–569.

Leirissa, R.Z., *"Historiografi, Suatu Tinjauan Kritis"*, Pidato disampaikan pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Madya Tetap pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 6 Juli 1996.

SS, "Beschouwingen over een historische Javaansche strijdwijze de Soepit Oerang", *IMT* No. ( ), hlm. 304–325.

D. Manuskrip

Arif Iskandar, "Pembinaan Daya Mampu dalam Pagelaran Perang Diponegoro", Makalah pada Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 26–29 Agustus 1970.

Djoko Surjo, Kepemimpinan Pangeran Diponegoro dalam Perpektif Sejarah, Makalah Seminar Sejarah Perang Pangeran Diponegoro, Universitas Diponegoro Semarang, 20 Februari 1990.

Djoko Surjo, *et al*, Hari Lahir Purworejo, Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 1975.

Djuliati Suroyo, A.M., Pangeran dan Petani sebuah Aliansi Kraton – Desa dalam Perang Diponegoro, Makalah pada Seminar Sejarah Perang Diponegoro, Universitas Diponegoro Semarang 20 Februari 1990.

Groen, P.M.H., Buiten de Militaire Orde, pidato pengukuhan sebagai gurubesar sejarah militer pada Rijks Universiteit, Leiden, 30 Juni 1995.

Leirissa, R.Z., Metodologi Strukturis dalam Ilmu Sejarah (kumpulan karangan), Jakarta, 1999, Program Ilmu Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Sarwanta Wiryasaputra, Legiun Mangkunegara Solo, tth, Reksopustoko. Perpustakaan Istana Mangkunegaran Solo.

Tjokrokusumo, R. Sudiro, Sejarah Purworejo, Purworedjo, 1969, Yayasan Keluarga Singowidjajan.

E. Majalah dan Terbitan Resmi

Indisch Militair Tijdschrift, Batavia, 1893–1936, G. Kolff.

Recueil Militair, 's-Gravenhage, Amsterdam, 1826.

Staatsblad van Nederlandsch Indië 1825, 1826, 1827.

Daftar Singkatan

BKI : Bijdragen tot de Taal-, land-, en Volkenkunde, Den Haag
FEQ : Far Eastern Quaterly, Menasha
GKITLV : Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde. Den Haag 1929
IG : Indische Gids. Amsterdam
IMT : Indische Militaire Tijdschrift. Batavia. Ind. Gen. Indische Genootschap, Den Haag
JRAS : Journal of the Royal Asiatic Society. London
JSEAH : Journal of the Singapore Branch of the Royal Asiatic Society, Singapore
KT : Koloniaal Tijdschrift, Den Haag
KW : Koloniaal Weekblad
MISI : Majalah Ilmu Sastra Indonesia, Jakarta
MNZG : Mededelingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootschap
MT : Militaire Tijdschrift
MVGNI : Mededelingen der Vereeniging der Gezaghebbers in Nederlandsch Indie
TBG : Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, Batavia
TBB : Tijdschrift voor Binnelandsch Bestuur, Batavia
TNAG : Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijks kunding Genootschap, Amsterdam
TNI : Tijdeschrift voor Nederlandsch Indie
Nijmegen, Den Haag, Amsterdam
VBG : Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap vam Kunsyen en Wetenschappen, Batavia
VKI : Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Den Haag
WvI : Weekblad voor Indie
ZE : Zeitschrift fur Ethnologie, Berlin

Indeks

A

abangan 455, 456
alifuru 189, 190, 192, 193
apanage 113, 115, 119, 224
Arung Matoa 217
Arung Palaka 45, 46, 213, 214
Asta Brata 61

B

Babad Pacina 62
Bartolomeus Diaz 13
basa ampek balai 195
batig slot 382, 383
Benteng Gamalama 20, 31
brahmana 85
Bustanus Salatin 135

C

Cheng He 10, 13, 14, 25, 41
conspiracy of silence 228, 235
Cultuurstelsel 353

D

Daendels 57, 243, 245, 402, 406
De Kock 228, 238, 239, 242, 243, 244, 246, 247, 248
Dermodjojo 437, 438
Diponegoro 71, 199, 203, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249

E

Emporium 8, 14, 45
enclave 119, 144
Entong gendut 416, 417, 418, 419, 420
erucakra 431, 445

F

Faletehan 18
Fort Nassau 41
Fort Oranye 32, 33

G

Gerakan Samin 441, 442, 443, 445, 447
Guru madras 40

H

Hindia Belanda 58
hongi 179

I

imam Mahdi 419, 421, 431, 440

J

Jalur sutra 5
Jan Pieterszoon Coen 30, 42, 43

K

kasta 88
Kejawen 446
Kitab Adat Meukuta Alam 140
Koeli ordonnantie 395
Kolonial 399, 400
kompeni 163
ksatria 85, 87, 89

L

leverantie 158, 181
liberal 371, 374, 376

M

Mahardika 26
Majapahit 55
Mancanegara 56, 65, 71
Modern awal 3, 5, 6, 11, 12, 27
monopoli 15, 19, 31, 32, 36, 38

N

Nalam Wikayah 458, 459
Nation state 3
Nusantara 24, 26, 30, 51, 52, 387

O

Onrust 278
Ordo Dominikan 23

P

Padri 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209
Pamade 78
Pela gandong 41
Perdikan 68
perjanjian 1855 126
perjanjian Bongaya 101
Perjanjian Gianti 50, 65
poenalie sanctie 395
political entrepreneur 5, 13
Praya 329
preanger stelsel 347

R

raffles 199, 345, 346, 352, 402
Ratu Adil 411, 420, 426, 427, 428, 431, 437, 438, 440, 441, 443, 445
Rodi 405, 407
Rotterdam 215

S

Samudra Pasai 132
Si Singamangaraja 306, 307, 308, 312, 319, 320, 466
sistem Tanam Paksa 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 376, 380
soldadu 182
stelsel benteng 244, 246
Subak 79
Sultan Ageng Tirtayasa 46
Sultan Agung 47, 55, 56, 73, 74
Sultan Baabulah 20, 21, 32
Sultan Haji 46,47
Sultan Hasanuddin 45, 212, 213
Sultan Iskandar Muda 132, 134, 138, 147
Sultan Mandar Syah 33, 34, 36
Sunda Kalapa 15, 16, 18

T

Tawan karang 250, 252
Teuku Umar 299
Teungku Cik Di Tiro 294, 298, 299
Tirta wilayat 437

Tomé Pires 14, 15, 26
Traktat London 131,133
Traktat Sumatra 133, 285
Tuanku Imam Bonjol 206, 208, 209

U

Ukung 158, 159, 163, 164, 174

V

Van Den Bosch 206, 348, 353, 375
Van Der Capellen 224, 348, 350, 352
Vasco Da Gama 13
VOC 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 47, 48, 49, 52, 71, 158, 179, 180, 245, 349, 356, 368, 403

W

walak 156, 157, 158, 160, 164, 166, 172, 173, 174
Wedana 63, 64, 65, 66, 68

BHINNEKA TUNGGAL IKA
Pahlawan Nasional Indonesia
Abdoel Moeis (1883–1959)
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
K.H. Samanhoedi (1868–1956)
Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
dr. Soetomo (1888–1938)
K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
H. Agus Salim (1884–1954)
Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
Sukardjo Wirjopranoto (1903–1962)
Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)
K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
Tan Malaka (1884–1949)
Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (1911–1963)
Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
K.H. Fakhruddin (1890–1929)
K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
dr. Moewardi (1907–1948)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
Sri Susuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)
K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
RMT Ario Soerjo (1896–1948)
Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
Dr. Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)
Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
Soetan Sjahrir (1909–1966)
Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
Raden Dewi Sartika (1884–1947)
Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
Pangeran Antasari (1809–1862)
Sersan Usman alias Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
Kopral Harun alias Tohir bin Said (1947–1968)
Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
Arie Frederik Lasut (1918–1949)
Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
Maria Walanda Maramis (1872–1924)
Supeno (1916–1949)
Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)
Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlam (1872–1946)
K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
Sultan Hasanuddin (1631–1670)
Kapitan Pattimura (1783–1817)
Pangeran Diponegoro (1785–1855)
Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
Tengku Tjik di Tiro (1836–1891)
Teuku Oemar (1854–1899)
dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
Raden Oto Iskandar di Nata (1897–1945)
Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)
Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
Teuku Njak Arief (1899–1946)
Nji Ageng Serang (1752–1828)
Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
Soeprijadi (1923–1945)
Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
Untung Suropati (1660–1706)
Tengku Amir Hamzah (1911–1946)
Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)
Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
Radin Inten II (1834–1856)
KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
Frans Kaisiepo (1921–1979)
Silas Papare (1918–1978)
Marthen Indey (1912–1986)
Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
Tuanku Tambusai (1784–1882)
Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
H. Adam Malik (1917–1984)
Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
La Maddukelleng (1700–1765)
Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
Abdul Kadir (1771–1875)
Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
Andi Djemma (1901–1965)
Pong Tiku alias Ne' Baso (1846–1907)
Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
H. Nani Wartabone (1907–1986)
Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
Andi Mappanyukki (1885–1967)
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
Ismail Marzuki (1914–1958)
Kiras Bangun alias Garamata (1852–1942)
Bagindo Azizchan (1910–1947)
Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
K.H. Noer Ali (1914–1992)
H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
Opu Daeng Risadju (1880–1964)
Izaak Huru Doko (1913–1985)
Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
K.H. Abdul Halim (1887–1962)
Soetomo alias Bung Tomo (1920–1981)
Laksda Jahja Daniel Dharma alias John Lie (1911–1988)
Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)
K.H. Idham Chalid (1921–2010)
H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
H. R. Mohamad Mangoendiprodjo (1905–1988)
K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975, buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan dari SNI adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup.

Keunikan kedua dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat Indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku SNI sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku SNI telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku SNI, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku SNI. Kepada para penulis buku SNI, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, SNI Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga SNI Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Buku ini telah dinilai oleh Panitia Penialaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) dan dinyatakan layak sebagai buku nonteks pelajaran (buku pengayaan, buku referensi, dan/atau buku panduan pendidik) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor: 3610/A8/LL/2009, Tahun 2009, Tanggal 21 Desember, dengan kategori*

Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka
Jalan Bunga No. 8 – 8A Matraman
Jakarta 13140
Telepon : (+6221) 8583369
Faks : (+6221) 29622129
Http : //www.balaipustaka.co.id